



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



TAHUN 2025-2029



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Indonesia Republik Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12));
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan.
- (2) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

- (3) RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi serta memperhatikan:
- RPJPD;
 - RTRW; dan
 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB II SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebijakan perencanaan RPJMD;
 - pelaksanaan RPJMD; dan
 - hasil RPJMD.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara perubahan RPJMD.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

Hj. DILLAH HIKMAH SARI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

H. SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR: (.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 adalah untuk:

- a. Menetapkan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/kota;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- f. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR ...

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pijakan awal dalam menentukan arah pembangunan daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan.

Dengan mengusung visi "Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia", dokumen ini disusun melalui pendekatan teknokratik, politis, dan partisipatif. Penyusunan dilakukan dengan landasan data yang sah, analisis yang berbasis ilmiah, serta pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Dokumen perencanaan ini juga mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jambi, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat Tanjung Jabung Timur.

Kami menyadari bahwa terwujudnya dokumen ini tidak terlepas dari kerja sama dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan dokumen Rancangan Akhir RPJMD ini, baik dari unsur perangkat daerah, legislatif, akademisi, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda, maupun masyarakat umum.

Harapan kami, dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi panduan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, pembangunan yang merata dan inklusif, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkeadilan. Semoga dokumen ini terus disempurnakan melalui proses berikutnya dan menjadi semangat bersama dalam membangun daerah yang lebih sejahtera dan bahagia.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Hubungan antara Dokumen Rancangan Akhir RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	7
1.4 Maksud dan Tujuan	9
1.4.1 Maksud	9
1.4.2 Tujuan	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	12
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	13
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis	13
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	133
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	176
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	216
2.2 Gambaran Keuangan Daerah	327
2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024	329
2.2.2 Neraca Daerah Tahun 2020-2024	346
2.2.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030	353
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	360
2.3.1 Permasalahan	360
2.3.2 Isu Strategis	426

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS	454
3.1 Visi	454
3.2 Misi	456
3.3 Tujuan dan Sasaran	468
3.4 Strategi dan Arah Kebijakan	488
3.4.1 Strategi	488
3.4.2 Arah Kebijakan Pembangunan	530
3.5 Program Prioritas Daerah	559
 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	 589
4.1 Program Perangkat Daerah	589
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	655
4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran	655
4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	658
 BAB V PENUTUP	 679
 LAMPIRAN	 680

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024	15
Tabel 2.2	Klasifikasi Kemiringan Lahan dan Luasnya Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025	16
Tabel 2.3	Luas Wilayah Menurut Ketinggian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	17
Tabel 2.4	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	24
Tabel 2.5	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	26
Tabel 2.6	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Serat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	27
Tabel 2.7	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Energi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	29
Tabel 2.8	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	30
Tabel 2.9	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	32
Tabel 2.10	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	34
Tabel 2.11	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	35
Tabel 2.12	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Energi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	38
Tabel 2.13	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	40
Tabel 2.14	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Iklim di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	42

Tabel 2.15	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tata Kelola Air dan Banjir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	44
Tabel 2.16	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	46
Tabel 2.17	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pemurnian Air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	48
Tabel 2.18	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	50
Tabel 2.19	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Kualitas Udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	52
Tabel 2.20	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	54
Tabel 2.21	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Penyakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	56
Tabel 2.22	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	57
Tabel 2.23	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	60
Tabel 2.24	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	62
Tabel 2.25	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pemurnian Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	63
Tabel 2.26	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	65
Tabel 2.27	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Kualitas Udara Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	67
Tabel 2.28	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	69
Tabel 2.29	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	70

Tabel 2.30	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tempat Tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	73
Tabel 2.31	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Rekreasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	74
Tabel 2.32	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Estetika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	75
Tabel 2.33	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tempat Tinggal Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	77
Tabel 2.34	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Rekreasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	78
Tabel 2.35	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Estetika Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	80
Tabel 2.36	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	83
Tabel 2.37	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Siklus Hara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	84
Tabel 2.38	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Produksi Primer di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	86
Tabel 2.39	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Biodiversitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	87
Tabel 2.40	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	89
Tabel 2.41	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Siklus Hara Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	91
Tabel 2.42	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Produksi Primer Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	93
Tabel 2.43	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Biodiversitas Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	95
Tabel 2.44	Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024	97

Tabel 2.45	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024	100
Tabel 2.46	Indeks Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024	101
Tabel 2.47	Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Aman dan Layak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2024	106
Tabel 2.48	Data Timbulan Sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	108
Tabel 2.49	Penanganan Sampah Terlayani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	110
Tabel 2.50	Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2030	111
Tabel 2.51	Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	119
Tabel 2.52	Kepadatan Penduduk Dirinci per Kecamatan Tahun 2024	123
Tabel 2.53	Komposisi Jumlah Penganut Agama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024	124
Tabel 2.54	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	135
Tabel 2.55	PDRB Per Kapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	142
Tabel 2.56	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2020-2024	145
Tabel 2.57	Status Gizi Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	155
Tabel 2.58	Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Per Sektor Usaha Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024	168
Tabel 2.59	Data Distribusi Masyarakat Berdasarkan Agama di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2023	170
Tabel 2.60	Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	177
Tabel 2.61	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024	178

Tabel 2.62	Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	179
Tabel 2.63	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	180
Tabel 2.64	Rasio Industri Pengolahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024	182
Tabel 2.65	Rasio PDRB Makan dan Minum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024	183
Tabel 2.66	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi dan Kabupaten dalam Provinsi Jambi Tahun 2020-2024	186
Tabel 2.67	Indikator Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024	190
Tabel 2.68	Data Capaian Kinerja Telekomunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019-2024	192
Tabel 2.69	Indikator Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019-2023	193
Tabel 2.70	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	195
Tabel 2.71	Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024	198
Tabel 2.72	Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	200
Tabel 2.73	Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	202
Tabel 2.74	Jumlah Jembatan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	203
Tabel 2.75	Jaringan Irigasi Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2024	205
Tabel 2.76	Akses Air Minum Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024	207
Tabel 2.77	Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	208

Tabel 2.78	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	210
Tabel 2.79	Rasio Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024	213
Tabel 2.80	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	216
Tabel 2.81	Indeks Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	218
Tabel 2.82	Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022	221
Tabel 2.83	Angka Kriminalitas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	223
Tabel 2.84	Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	225
Tabel 2.85	Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	226
Tabel 2.86	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024	228
Tabel 2.87	Rasio Guru SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	240
Tabel 2.88	Rasio Guru SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	240
Tabel 2.89	Jumlah Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	246
Tabel 2.90	Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	251
Tabel 2.91	Realisasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	253
Tabel 2.92	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2024	255
Tabel 2.93	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	257
Tabel 2.94	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	260

Tabel 2.95	Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	264
Tabel 2.96	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta, DPR, dan Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	266
Tabel 2.97	Kebutuhan, Produksi dan Ketersediaan Pangan Per Kapita Per Tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	268
Tabel 2.98	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024	269
Tabel 2.99	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	270
Tabel 2.100	Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019-2023	272
Tabel 2.101	Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	276
Tabel 2.102	Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	278
Tabel 2.103	Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2024	280
Tabel 2.104	Persentase Aplikasi Informatika yang Dimanfaatkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	282
Tabel 2.105	Capaian Kinerja Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	284
Tabel 2.106	Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2023	286
Tabel 2.107	Nilai Investasi Berdasarkan Sektor Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2023 dalam Miliar Rupiah	287
Tabel 2.108	Nilai Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2023	288
Tabel 2.109	Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	289
Tabel 2.110	Data Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	291

Tabel 2.111	Kinerja Persandian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	292
Tabel 2.112	Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	293
Tabel 2.113	Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	295
Tabel 2.114	Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun 2020-2023	298
Tabel 2.115	Perkembangan Jumlah Olahan Hasil Perikanan, Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat dan Produksi Benih Ikan Tahun 2020-2024	299
Tabel 2.116	Kinerja Pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	300
Tabel 2.117	Kinerja Sektor Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	302
Tabel 2.118	Jumlah Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2023	303
Tabel 2.119	Luas Panen Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2023	304
Tabel 2.120	Luas Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	305
Tabel 2.121	Lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022	307
Tabel 2.122	Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	309
Tabel 2.123	Jumlah Pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024	310
Tabel 2.124	Kontribusi Sektor Industri Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	312
Tabel 2.125	Pertumbuhan Sektor Industri Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	313
Tabel 2.126	Nilai SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	317
Tabel 2.127	Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	318
Tabel 2.128	Kinerja Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	320
Tabel 2.129	Kinerja Keuangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	321

Tabel 2.130	Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	322
Tabel 2.131	Kinerja Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	324
Tabel 2.132	Kinerja Pengawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	326
Tabel 2.133	Realisasi APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	330
Tabel 2.134	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	335
Tabel 2.135	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	336
Tabel 2.136	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	339
Tabel 2.137	Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	341
Tabel 2.138	Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	344
Tabel 2.139	Neraca Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	352
Tabel 2.140	Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026 -2030	354
Tabel 2.141	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026-2030	359
Tabel 2.142	Analisis Permasalahan Inti Infrastruktur Kewilayahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	362
Tabel 2.143	Analisis Masalah Kualitas Aksesibilitas Konektivitas Antarwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	363
Tabel 2.144	Analisis Masalah Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	365
Tabel 2.145	Analisis Inti Masalah, Masalah dan Urusan yang Terlibat	370
Tabel 2.146	Analisis Masalah Ketergantungan Terhadap Sektor Pertambangan dan Galian Masih Tinggi (Sektor Perikanan dan Pertanian Rendah)	374
Tabel 2.147	Analisis Masalah Daya Saing Pasar Produk Unggulan Daerah Masih Rendah	377

Tabel 2.148	Analisis Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Perdagangan dan Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah	379
Tabel 2.149	Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	381
Tabel 2.150	Analisis Masalah Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	381
Tabel 2.151	Inti Masalah dan Masalah Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Timur	388
Tabel 2.152	Analisis Masalah Kualitas Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	389
Tabel 2.153	Analisis Masalah Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	393
Tabel 2.154	Analisis Masalah Kualitas Hidup Layak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	401
Tabel 2.155	Analisis Masalah Pembangunan Manusia Antargender di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	410
Tabel 2.156	Inti Masalah dan Masalah Aspek Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	413
Tabel 2.157	Analisis Permasalahan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur	414
Tabel 2.158	Analisis Permasalahan Tata Kelola Akuntabilitas Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	416
Tabel 2.159	Analisis Permasalahan Efektivitas Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	418
Tabel 2.160	Analisis Permasalahan Keamanan dan Ketertiban bagi Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	422
Tabel 2.161	Analisis Permasalahan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Tanjung Jabung Timur	424
Tabel 2.162	Isu Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur	427
Tabel 3.1	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMN 2025-2029 (Asta Cita)	459
Tabel 3.2	Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045	461

Tabel 3.3	Target sasaran Visi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Periode I RPJMD tahun 2025-2029	462
Tabel 3.4	Target Indikator Utama Pembangunan (IUP)RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Periode I RPJMD tahun 2025-2029	464
Tabel 3.5	Keterkaitan Kata Kunci dalam Visi dengan Sasaran Daerah RPJMD Kabupaten Tanjung Tabung Timur Tahun 2025-2029	483
Tabel 3.6	Tujuan dan Sasaran Daerah RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029	485
Tabel 3.7	Strategi Pembangunan Misi 1	489
Tabel 3.8	Strategi Pembangunan Misi 2	494
Tabel 3.9	Strategi Pembangunan Misi 3	505
Tabel 3.10	Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029	530
Tabel 3.11	Arah Kebijakan Pembangunan Misi 1	532
Tabel 3.12	Arah Kebijakan Pembangunan Misi 2 Tujuan 1	537
Tabel 3.13	Arah Kebijakan Pembangunan Misi 2 Tujuan 2	542
Tabel 3.14	Arah Kebijakan Pembangunan Misi 3 Tujuan 1	548
Tabel 3.15	Arah Kebijakan Pembangunan Misi 3 Tujuan 2	551
Tabel 3.16	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029	565
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah	590
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029	656
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2030	659

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan antara Dokumen Rancangan Akhir RPJMD dengan Dokumen Lainnya	9
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025	14
Gambar 2.2	Peta Ketinggian Kabupaten Tanjung Jabung Timur	18
Gambar 2.3	Peta Geologi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	23
Gambar 2.4	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	99
Gambar 2.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	103
Gambar 2.6	Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	104
Gambar 2.7	Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	104
Gambar 2.8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2023	105
Gambar 2.9	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun, 2020-2024	112
Gambar 2.10	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2024	114
Gambar 2.11	Jumlah Desa Tangguh Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2024	115
Gambar 2.12	Peta Rawan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025	117
Gambar 2.13	Sex Ratio Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	121
Gambar 2.14	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2024	122
Gambar 2.15	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045	126
Gambar 2.16	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045	127
Gambar 2.17	Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025	128
Gambar 2.18	Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Tanjung	

	Jabung Timur Tahun 2030	129
Gambar 2.19	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2045	130
Gambar 2.20	Angka Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2045	131
Gambar 2.21	Proyeksi Penduduk Usia Tua Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2045	132
Gambar 2.22	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024	134
Gambar 2.23	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	137
Gambar 2.24	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	138
Gambar 2.25	Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	139
Gambar 2.26	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	140
Gambar 2.27	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	141
Gambar 2.28	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	144
Gambar 2.29	Perkembangan Angka Rasio Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024	146
Gambar 2.30	Capaian Angka IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024	148
Gambar 2.31	Rasio Kesempatan Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	149
Gambar 2.32	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024	151
Gambar 2.33	Prevalensi Stunting Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	154
Gambar 2.34	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate</i> /ASFR 15-19 Tahun)	157
Gambar 2.35	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024	159

Gambar 2.36 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024	160
Gambar 2.37 Angka Literasi dan Numerasi SD/Sederajat dan SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	162
Gambar 2.38 Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	166
Gambar 2.39 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2023	172
Gambar 2.40 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	175
Gambar 2.41 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	185
Gambar 2.42 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2024	187
Gambar 2.43 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2024	192
Gambar 2.44 Capaian Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Timur	199
Gambar 2.45 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	212
Gambar 2.46 Perbandingan Inflasi Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024	215
Gambar 2.47 Tingkat Kelulusan SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	229
Gambar 2.48 Tingkat Kelulusan SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	230
Gambar 2.49 APK SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	231
Gambar 2.50 APK SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	232
Gambar 2.51 APM SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	233
Gambar 2.52 APM SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	233

Gambar 2.53	APS PAUD Usia 5-6 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	234
Gambar 2.54	APS SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	235
Gambar 2.55	APS Pendidikan Non-Formal Usia 7-18 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	236
Gambar 2.56	Persentase Rasio Ideal Rombel SD/Sederajat Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	237
Gambar 2.57	Persentase Rasio Ideal Rombel SMP/Sederajat Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	237
Gambar 2.58	Persentase Rasio Sekolah SD/Sederajat Terhadap Penduduk Berusia 7-12 Tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	238
Gambar 2.59	Persentase Rasio Sekolah SMP/Sederajat Terhadap Penduduk Berusia 13-15 Tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	239
Gambar 2.60	Angka Putus Sekolah SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	241
Gambar 2.61	Angka Putus Sekolah SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	241
Gambar 2.62	Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/Sederajat ke SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	243
Gambar 2.63	Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/Sederajat ke SMA/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	243
Gambar 2.64	Persentase Guru Memiliki Sertifikat Pendidik dan Kualifikasi Guru S1 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	244
Gambar 2.65	Perkembangan Jumlah Posyandu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	245
Gambar 2.66	Jumlah dan Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	247
Gambar 2.67	Jumlah dan Rasio Tenaga Kefarmasian Medis Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	248
Gambar 2.68	Jumlah dan Rasio Tenaga Keperawatan Medis Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung	

	Timur Tahun 2020-2024	249
Gambar 2.69	Jumlah dan Rasio Tenaga Bidan Medis Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	250
Gambar 2.70	Persentase Desa UCI Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	252
Gambar 2.71	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	262
Gambar 2.72	Besaran Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	262
Gambar 2.73	Besaran Kasus yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	263
Gambar 2.74	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2023	296
Gambar 2.75	Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024	301
Gambar 2.76	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020-2024	331
Gambar 2.77	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020-2024	332
Gambar 3.1	Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan Visi RPJMN 2025-2029	456
Gambar 3.2	Sinkronisasi Program Kerja Unggulan Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029	563

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Rancangan Akhir RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dokumen Rancangan Akhir RPJMD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top Down Planning*. Sebelum kepala daerah baru terpilih, pemerintah akan membuat dokumen Rancangan Akhir RPJMD dengan pendekatan teknokratis. Namun setelah terpilihnya kepala daerah yang baru, akan disusun dokumen Rancangan awal (ranwal) RPJMD yang disesuaikan antara dokumen teknokratik dan janji politik pemimpin baru. Setelah itu dokumen ranwal akan diulas kembali hingga menjadi rancangan akhir RPJMD. Hal ini juga yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, yang lahir dari pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung di tahun 1999. Pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan di wilayah pesisir timur Provinsi Jambi. Kabupaten dengan ibukota Muara Sabak ini dimekarkan dengan dasar Undang-undang RI Nomor 54 Tahun 1999 pada Tanggal 9 Oktober 1999. Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki luas sebesar 5.087,07 km², dipimpin oleh Harris Fadilah sebagai Bupati yang pertama menjabat. Pergantian kepala daerah pun terjadi setiap lima tahun sekali. Setiap kepemimpinan yang berganti, berperan penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah, membawa visi dan misi yang disesuaikan dengan tantangan serta potensi daerah pada masanya. Untuk itu, RPJMD disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap RPJPD, RPJMN, serta dokumen perencanaan Provinsi Jambi.

Di tahun 2025 perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung dilakukan bersama dengan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih, yaitu Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T., sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, dan Muslimin Tanja, S.Th.I., M.Si., sebagai Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur. Pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024-2029 lebih mengarah pada pembangunan merata, yang mana tertuang pada visi kepala daerah terpilih yaitu Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia. Sebelumnya terpilihnya kepala daerah yang baru, Bappeda telah menyusun dokumen teknokratik RPJMD yang dibuat berdasarkan data dan informasi kondisi daerah. Namun selanjutnya akan disusun Rancangan Akhir RPJMD yang diselaraskan dengan janji politik pemimpin daerah Tanjung Jabung Timur yang baru. Hal ini juga didasarkan pada Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045, penyusunan Rancangan Akhir mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045 yang mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Penyusunan dokumen Rancangan Akhir RPJMD mempertimbangkan kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai daerah pesisir yang strategis namun rentan, serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah mengidentifikasi kondisi daerah di tahun-tahun sebelumnya dan kebutuhan masyarakat untuk tahun 2025-2029 nantinya. Dengan adanya RPJMD ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Selain itu melalui penyusunan RPJMD ini, diharapkan tercipta arah pembangunan yang terpadu, konsisten, dan berkelanjutan, yang tidak hanya menjawab tantangan pembangunan saat ini, tetapi juga mempersiapkan pondasi bagi kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka panjang. Dengan semangat kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, RPJMD ini menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara merata dan berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2025-2029, menggunakan sejumlah peraturan sebagai rujukan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3); dan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

1.3 Hubungan antara Dokumen Rancangan Akhir RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

Hubungan antara dokumen Rancangan Akhir RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 mempedomani Rencana Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 terutama dalam Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dalam RPJPD. Dalam hal Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 belum ditetapkan dengan Perda, maka dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 dapat mengacu pada Rancangan Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045.

2. RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dokumen Rancangan Akhir RPJMD harus mempedomani dan mempertimbangkan arahan, pola, dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 dan sebagai rujukan dalam menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

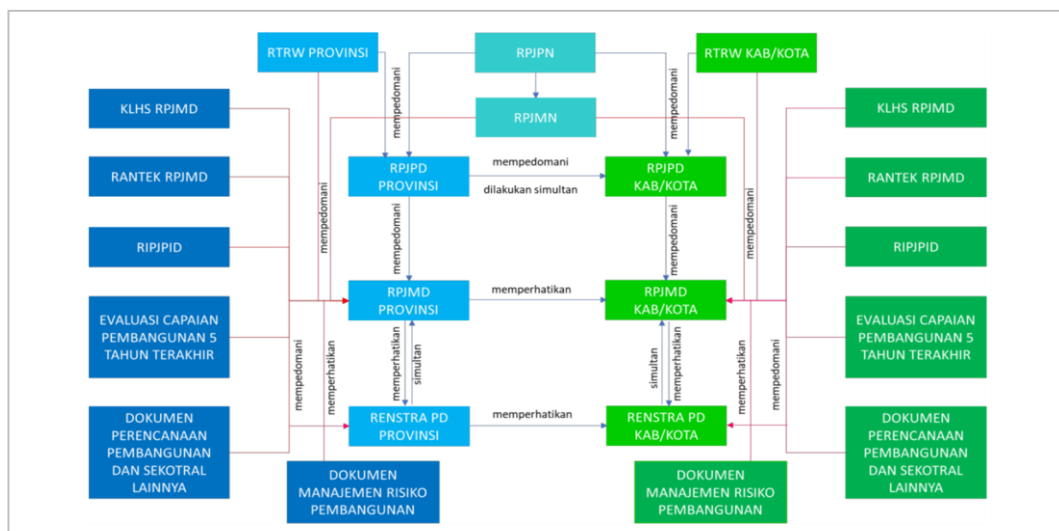
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. RPJMN 2025-2029 menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan. Rangkaian Kerja yang disusun untuk mewujudkan Rangkaian Kinerja dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045, memperhatikan Arah Kebijakan yang disusun dalam RPJMN Tahun 2025-2045.

4. Dokumen Perencanaan Sektor Lain

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain RAD *Sustainable Development Goals* (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

Gambar 1.1

Hubungan antara Dokumen Rancangan Akhir RPJMD dengan Dokumen Lainnya



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan metode dan pendekatan kerangka pikir secara ilmiah dan memadukannya dengan janji politik pimpinan daerah yang baru, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2025-2029 merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyusunan tahapan perencanaan selanjutnya serta menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan;
2. Mengintegrasikan janji politik atau program unggulan Kepala Daerah terpilih dengan berbasis data dan analisis;
3. Menciptakan integrasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; dan
4. Memastikan keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, maksud dan tujuan penyusunan dokumen ranwal RPJMD, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menguraikan tentang aspek geografi dan demografi,, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan

umum, dan gambaran keuangan daerah yang diidentifikasi dari kondisi daerah lima tahun sebelumnya. Selain itu pada bab ini menjelaskan isu strategis dan potensi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas

Bab ini menguraikan tentang gambaran Visi Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil daerah yang telah terpilih. Sementara itu, program prioritas merupakan wujud konkret dari misi daerah. Program-program ini dipilih berdasarkan urgensi, relevansi terhadap permasalahan utama daerah, serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program prioritas juga mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan, agar pembangunan tidak hanya berdampak jangka pendek tetapi juga membawa perubahan fundamental dalam struktur sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini menguraikan tentang rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja untuk Tahun 2025-2029 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program perangkat daerah disusun sebagai tindak lanjut dari visi, misi, dan program prioritas daerah, dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan masing-masing perangkat daerah. Program yang dirancang bertujuan untuk menjawab permasalahan utama daerah, mendorong pencapaian sasaran pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan dokumen dan menegaskan pentingnya penyusunan dokumen Rancangan Akhir RPJMD sebagai panduan strategis pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2025-2029

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Sejarah terbentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berawal dari adanya aspirasi Masyarakat Tanjung Jabung Timur yang dipandang perlu untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk menjamin perkembangan dan kemajuan Tanjung Jabung Timur di masa mendatang. Kondisi berkembangnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tanjung Jabung saat itu menjadi alasan dilakukannya pemekaran atas wilayah Tanjung Jabung menjadi Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung terdiri atas wilayah: a) Kecamatan Muaro Saba b) Kecamatan Dendang c) Kecamatan Mendahara d) Kecamatan Rantau Rasau e) Kecamatan Nipah Panjang dan f) Kecamatan Sadu. Melalui pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka Kabupaten Tanjung Jabung diubah namanya menjadi Tanjung Jabung Barat. Dengan adanya pemekaran ini maka luas wilayah Tanjung Jabung berkurang menjadi 5.009,82 km² sementara itu

luas Tanjung Jabung Timur sendiri sebesar 5.445 km² atau 10,2 persen dari luas wilayah provinsi Jambi.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Secara resmi ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkedudukan di Muaro Sabak. Wilayah ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah utara dan timur, sebelah Selatan dengan Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, dan sebelah barat dengan Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas wilayah 5.445,0 km².

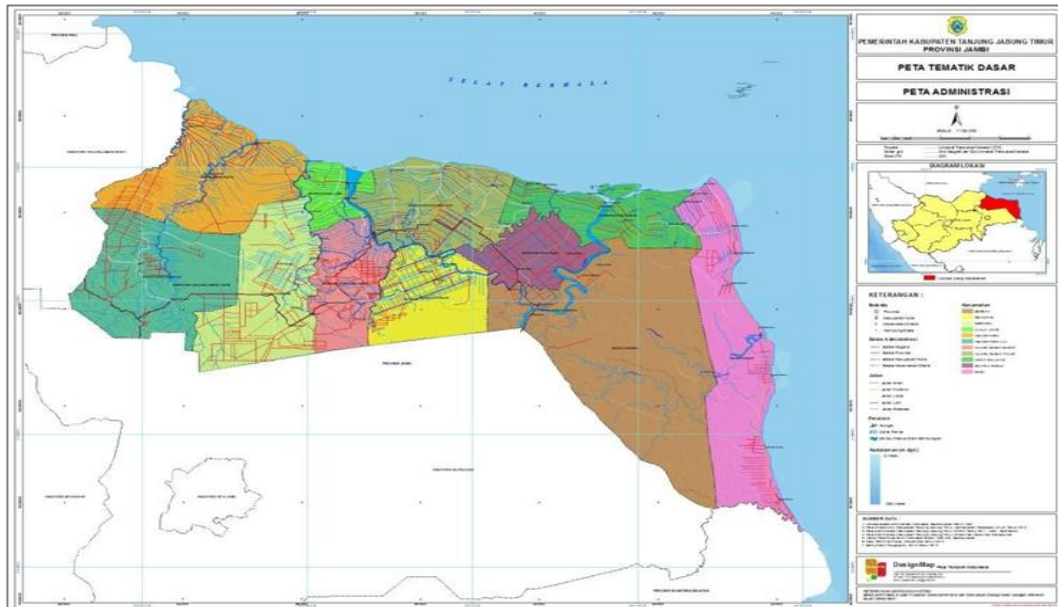
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

a. Karakteristik Geografis Wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia, yang terletak di bagian timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah menjadi kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (berdasarkan UU RI Nomor 54 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999).

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025



Sumber: RPJMD Teknokratik Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025-2029

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53' Lintang Selatan sampai 1°41' Lintang Utara atau antara 103°23'-104°31' Bujur Timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut China Selatan, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi. Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak di Pantai Timur Pulau Sumatera ini cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan daerah hinterland segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura-Batam-Johor (Sibajo). Wilayah perairan laut kabupaten merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga sangat potensial untuk berkembang.

Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 5.087,07 km² atau 10,14 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi. Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33 persen (225.047,6 ha) luas daratan kabupaten ini

merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non-Pertanian seluas 319.452,40 ha (58,67 persen). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 di antaranya belum bernama) menjadi 9.005 km² yang terdiri dari daratan seluas 508.707 ha dan lautan/perairan seluas 342.063 ha.

Awal terbentuknya wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 6 kecamatan dan 63 desa/kelurahan, namun sejak tahun 2006 dimekarkan menjadi 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa.

Tabel 2.1

Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas	
		Kelurahan	Desa	Km2/sq.km	%
1	Berbak	1	5	1.169,17	22,98
2	Dendang	1	6	381,52	7,50
3	Geragai	1	8	556,30	10,94
4	Kuala Jambi	2	4	114,95	2,26
5	Mendahara	1	8	538,79	10,59
6	Mendahara Ulu	1	6	554,23	10,89
7	Muara Sabak Barat	7	0	277,47	5,45
8	Muara Sabak Timur	2	10	387,94	7,63
9	Nipah Panjang	2	8	308,32	6,06
10	Rantau Rasau	1	10	177,52	3,49
11	Sadu	1	8	620,85	12,20
Jumlah		20	73	5.087,07	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1, struktur kewilayahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 terdiri dari 11 kecamatan dengan total 93 desa/kelurahan yang mencakup luas wilayah sebesar 5.087,07 km². Kecamatan Berbak menempati wilayah terluas dengan 1.169,17 km² atau sekitar 22,98

persen dari total luas kabupaten, sementara Kecamatan Kuala Jambi memiliki luas wilayah terkecil yaitu 114,95 km² atau 2,26 persen. Jumlah desa/kelurahan bervariasi, di mana Kecamatan Muara Sabak Barat memiliki 7 kelurahan tanpa desa, sedangkan Kecamatan Muara Sabak Timur memiliki jumlah desa terbanyak sebanyak 10 desa dan 2 kelurahan. Secara keseluruhan, distribusi desa dan kelurahan menunjukkan struktur pemerintahan tingkat lokal yang tersebar merata, meskipun terdapat ketimpangan dalam hal cakupan wilayah, yang menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan dan pelayanan publik yang adil dan efektif.

b. Topografi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian secara topografi, Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada umumnya datar dengan kemiringan antara 0-15 persen. Dengan luas terbesar dengan kemiringan lahan sekitar 0-8 persen sekitar 508.321,17 ha atau sekitar 99,95 persen dari luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan dengan kemiringan 8-15 persen sekitar 249,83 ha atau sekitar 0,05 persen berada di Kecamatan Sadu Ulu dan Kecamatan Muara Sabak Barat.

Tabel 2.2
Klasifikasi Kemiringan Lahan dan Luasnya Menurut Kecamatan di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025

Kecamatan	0 - 8 %	8 - 15 %	Jumlah
Mendahara	53.858,00	-	53.858,00
Mendahara Ulu	55.419,68	3,32	55.423,00
Geragai	55.630,00	-	55.630,00
Dendang	38.152,00	-	38.152,00
Muara Sabak Barat	27.500,49	246,51	27.747,00
Muara Sabak Timur	38.806,00	-	38.806,00
Kuala Jambi	11.395,00	-	11.395,00
Rantau Rasau	17.755,00	-	17.755,00
Berbak	116.917,00	-	116.917,00
Nipah Panjang	30.794,00	-	30.794,00
Sadu	62.457,00	-	62.457,00
Jumlah	508.321,17	249,83	508.571,00
Persentase	99,95	0,05	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun, 2011-2031

Ketinggian tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat bervariasi dari 0 hingga lebih 100 meter, Sebagian besar Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak pada ketinggian 10-20 mdpl sekitar 298.232,39 ha atau sekitar 58,64 persen dari luas wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan untuk luas terkecil berada di ketinggian >100 mdpl sekitar 10,69 ha berada di Kecamatan Sadu Ulu. Lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut.

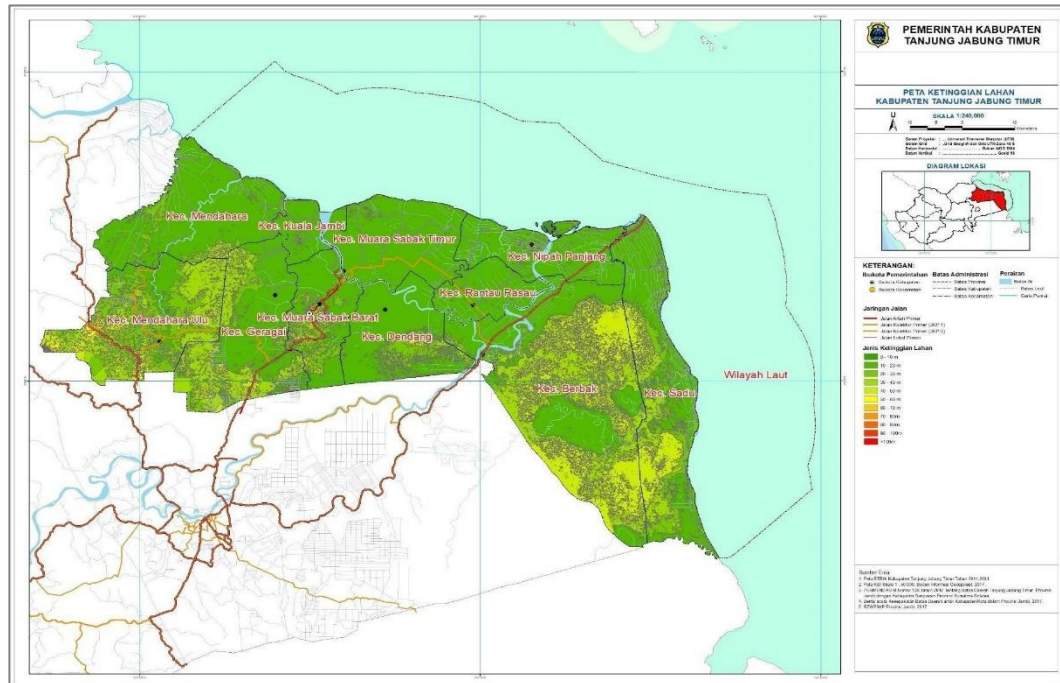
Tabel 2.3
Luas Wilayah Menurut Ketinggian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)											Jumlah
		0 - 10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100	≥ 100	
1	Mendahara	323,84	47.108,84	4.727,26	1.307,07	385,92	5,08	-	-	-	-	-	53.857,99
2	Mendahara Ulu	195,29	9.375,35	19.190,77	20.021,15	5.247,37	1.093,24	199,73	36,94	36,30	16,17	10,69	55.423,00
3	Gera-gai	21,33	27.794,11	8.640,59	16.675,60	2.498,37	-	-	-	-	-	-	55.630,00
4	Dendang	-	30.729,12	6.315,48	673,39	434,01	-	-	-	-	-	-	38.152,00
5	Muara Sabak Barat	96,17	18.099,57	6.330,77	2.874,64	287,27	49,52	9,06					27.747,00
6	Muara Sabak	241,81	38.058,25	505,94	-	-	-	-	-	-	-	-	38.806,00
7	Kuala Jambi	753,04	10.089,52	526,67	-	-	25,77	-	-	-	-	-	11.395,00
8	Rantau Rasau	-	17.618,95	136,05	-	-	-	-	-	-	-	-	17.755,00
9	Berbak	177,34	39.108,01	6.535,04	36.935,53	34.161,09	-	-	-	-	-	-	116.917,00
10	Nipah Panjang	299,51	28.953,82	1.532,35	8,33	-	-	-	-	-	-	-	30.794,01
11	Sadu	-	31.387,6	12.298,0	9.385,4	9.384,7	1,17	-	-	-	-	-	62.457,00
Jumlah		298.232,39	66.648,24	87.790,35	52.308,04	1.174,77	208,9	36,94	36,30	16,17	10,69	508.571,00	298.232,39
Persentase		0,41	58,64	13,11	17,26	10,29	0,23	0,04	0,01	0,01	0,00	0,00	100,00

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031 dan Interpretasi Digitasi Peta Tahun, 2025

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikelompokkan dalam beberapa satuan morfologi yaitu dataran rendah dan perbukitan yang bergelombang halus.

Gambar 2.2
Peta Ketinggian Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Tanjab Timur 2011-2031 dan Interpretasi Digitasi Peta, 2022

Dari bentuk morfologi dan penyebaran batuan, maka orientasi ke arah barat akan dijumpai morfologi yang lebih tinggi yaitu morfologi perbukitan gelombang halus, yang diikuti dengan variasi dan jenis batuan yang ada, sedangkan pada orientasi ke arah timur akan dijumpai morfologi dataran rendah dan batuan yang relatif sejenis. Kondisi topografi dan morfologi demikian, menyebabkan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi sumber daya yang besar dengan keindahan cagar alam dan pantainya.

2. Potensi Sumber Daya Alam

a. Geologi dan Jenis Tanah

Berdasarkan pada jenis batuan dan kesearangannya, maka akuifer di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu:

1) Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir

Sistem akuifer ini terdapat pada sedimen lepas, yaitu endapan aluvial dan rawa yang disusun oleh material lepas berukuran lempung sampai kerakal. Permeabilitas pada umumnya bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Material halus pada umumnya mempunyai kelulusan 10-5 s/d 10-2 m/h dan material kasar antara 10-1 s/d 10-2 m/h. Sebaran akuifer ini menempati daerah yang luas dengan ketebalan bervariasi mulai 5 s/d 40 m. Dari kondisi tersebut akuifer ini termasuk ke dalam akuifer produktif sedang.

2) Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antarbutir dan rekahan

Sistem akuifer ini terjadi dari berbagai jenis batuan yang bersifat padu dan kurang padu, menempati sebagian kecil daerah penyelidikan. Batuan yang termasuk dalam sistem akuifer ini dapat dikelompokkan menjadi dua akuifer sebagai berikut:

- Satuan batuan vulkanik muda, terdiri atas breksi gunung api, lava, dan tufa bersusun andesit- basalt. Satuan ini berbentuk morfologi perbukitan bergelombang lemah dengan penyebaran terbatas meliputi daerah Geragai dan sekitarnya.
- Formasi Muara Enim dan Formasi Air Benakat, terdiri atas batupasir, batulempung, serpih, batu lanau dan napal. Dijumpai setempat-setempat dengan luas singkapan relatif sempit. Secara garis besar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk dari formasi geologi endapan permukaan aluvium, batuan sedimen dengan berbagai formasi serta dari batuan metamorf dan batuan terobosan. Formasi geologi yang terbesar berada di jenis formasi geologi Aluvium dan Pantai sekitar 39,78 persen dan jenis formasi geologi Qa sekitar 32,35 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan jenis formasi geologi terkecil berada di Qv sekitar 0,01 persen hanya berada di Kecamatan Muara Sabak Barat.

Kondisi geologi lingkungan untuk setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dijelaskan berikut ini:

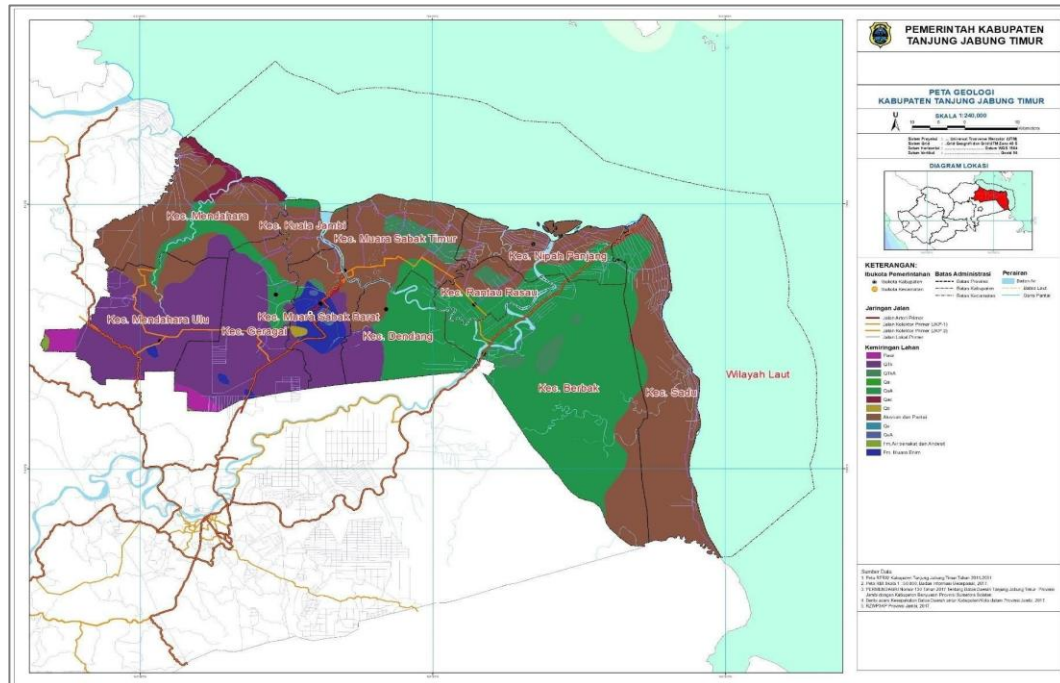
- Kecamatan Mendahara Kondisi geologi wilayah Kecamatan Mendahara pada umum memiliki daya dukung geologi sedang sampai rendah. Daya dukung rendah memiliki sebaran dominan/luas dan tersusun oleh endapan Rawa (Qs) terutama pada endapan lumpur dan tanah gambut. Sementara itu wilayah dengan daya dukung sedang berada di bagian tengah mengikuti alur sungai besar dan disusun oleh aluvium sungai (Qa) berupa endapan kerakal, kerikil dan pasir. Kondisi air tanah wilayah ini memiliki tingkat produktif sedang dengan keterdapatan akuifer melalui aliran antar butir.
- Kecamatan Mendahara Ulu Kondisi geologi wilayah Kecamatan Mendahara Ulu memiliki daya dukung sedang, karena disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan serta endapan aluvium sungai. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui celahan dan ruang antar butir.
- Kecamatan Geragai Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang sampai rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan, batu lempung tufaan dan endapan aluvium sungai, sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui celahan dan ruang antar butir.
- Kecamatan Kuala Jambi Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini pada umumnya memiliki daya dukung geologi rendah karena seluruh wilayah tersusun oleh endapan rawa (Qs) berupa endapan lumpur dan tanah gambut. Kondisi air tanah wilayah ini memiliki tingkat produktif sedang dengan keterdapatan akuifer melalui aliran antar butir.

- Kecamatan Muara Sabak Barat Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini memiliki daya dukung sedang sampai rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan Formasi Kasai. Perselingan batu pasir kuarsa dan batu lempung kuarsa, bersisipan batubara dan oksida besi dari Formasi Muara Enim. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui celahan dan ruang antar butir.
- Kecamatan Muara Sabak Timur Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan. Formasi Kasai yang tersebar di bagian tengah dan wilayah yang disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian selatan.
- Kecamatan Dendang Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian barat daya dan wilayah yang disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian timur. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa yang tersebar di bagian barat laut. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antar butir.
- Kecamatan Nipah Panjang Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian tenggara. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa yang tersebar di bagian utara. Potensi air

tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antar butir.

- Kecamatan Rantau Rasau Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian tengah dan wilayah yang disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian selatan Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa yang tersebar di bagian utara. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antar butir.
- Kecamatan Berbak Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian tengah setempat-setempat dan wilayah yang disusun oleh endapan aluvium yang tersebar luas hampir di seluruh bagian. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antar butir.
- Kecamatan Sadu Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh endapan aluvium yang tersebar setempat-setempat di bagian timur. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa tersebar sangat luas di bagian timur. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antarbutir.

Gambar 2.3
Peta Geologi Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber: Revisi RTRW 2011-2031 dan Interpretasi Digitasi Peta Tahun 2022

Secara garis besar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk dari formasi geologi endapan permukaan alluvium, batuan sediment dengan berbagai formasi serta dari batuan metamorf dan batuan terobosan. Formasi geologi yang terbesar berada di jenis formasi geologi alluvium dan pantai sekitar 39,78 persen dan jenis formasi geologi QaA sekitar 32,35 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tanjab Timur. Sedangkan jenis formasi geologi terkecil berada di Qv sekitar 0,01 persen hanya berada di Kecamatan Muara Sabak Barat.

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Jasa Layanan Ekosistem

Ekosistem adalah entitas yang kompleks yang terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang dan mikroorganisme yang dinamis serta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional (MA, 2005). Fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk

melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (De Groot, 1992).

Jasa ekosistem adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu (De Groot, 2002):

1) Jasa Penyediaan

a) Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

Daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercermin dalam kontribusi jasa ekosistem terhadap penyediaan pangan, sebagai bagian dari klasifikasi jasa penyediaan (*provisioning services*). Berdasarkan hasil analisis tahun 2024, distribusi luas dan peran ekosistem dalam penyediaan pangan tersebar secara bervariasi di lima tipe ekoregion utama, yaitu dataran aluvial, lembah antar perbukitan, dataran fluviomarin, lahan gambut, dan wilayah pesisir. Distribusi luas dan peran jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.153,146	0,227	8,826	0,002	22.527,886	4,434	26,424	0,005	7.619,459	1,500
Lembah Antar Perbukitan	-	-	-	-	58,040	0,011	-	-	-	-
Dataran Fluviomarin	-	-	-	-	18,613	0,004	9,110	0,002	-	-
Lahan Gambut (Peat Land)	6.851,882	1,349	66,262	0,013	418.224,276	82,315	10.238,385	2,015	24.315,221	4,786

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	-	-	9.709,989	1,911	6.663,699	1,312	329,271	0,065
Total	8.265,417	1,627	75,088	0,015	450.538,804	88,675	16.937,618	3,334	32.263,951	6,350

Sumber: Hasil Analisa 2024

Dari data diketahui bahwa kontribusi terbesar berasal dari kawasan lahan gambut, dengan luas mencapai 418.224,28 hektar atau sekitar 82,32 persen dalam kategori sedang, serta tambahan 24.315,22 hektar (4,79 persen) pada kategori sangat tinggi. Hal ini menegaskan bahwa lahan gambut memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan regional, meskipun secara ekologis juga tergolong rentan. Ekoregion dataran aluvial juga menunjukkan kontribusi signifikan, khususnya dalam kategori sedang dengan cakupan 22.527,89 hektar (4,43 persen). Sedangkan wilayah pesisir berkontribusi secara lebih terbatas namun tetap penting, dengan luasan 9.709,99 hektar (1,91 persen) pada kategori sedang dan 6.663,70 hektar (1,31 persen) dalam kategori tinggi. Adapun dataran fluviomarin dan lembah antar perbukitan memberikan peran relatif kecil dalam total distribusi, meskipun tetap tercatat dalam kategori sedang dan rendah.

Secara keseluruhan, dari total luasan yang dianalisis, sebesar 450.538,80 hektar (88,68 persen) masuk dalam kategori sedang, yang menunjukkan dominasi peran ekosistem dalam mendukung penyediaan pangan di kelas produktivitas menengah. Hal ini menggambarkan potensi besar jasa ekosistem di Tanjung Jabung Timur dalam penyediaan bahan makanan, namun juga menunjukkan perlunya pengelolaan yang bijak agar daya dukung tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

b) Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

Peran jasa ekosistem dalam mendukung penyediaan air bersih merupakan bagian integral dari daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil analisis tahun 2019 menunjukkan bahwa distribusi dan kontribusi ekosistem terhadap penyediaan air bersih tersebar

di lima ekoregion utama, dengan komposisi peran yang bervariasi berdasarkan kategori kapasitasnya, yakni dari sangat rendah hingga sangat tinggi.

Tabel 2.5
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	288,773	0,057	27.850,500	5,482	2.008,072	0,395	26,424	0,005
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluviomarin		-		-	18,613	0,004	6,600	0,001	2,510	0,000
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	6.747,617	1,328	401.421,075	79,007	37.954,999	7,470	6.654,191	1,310
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	76,455	0,015	9.884,807	1,946	4.385,215	0,863	2.356,482	0,464
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	439.233,035	86,449	44.354,886	8,730	9.039,607	1,779

Sumber: Hasil Analisa 2024

Pada Tabel 2.5 dapat dilihat bahwa kategori sedang mendominasi total distribusi dengan cakupan mencapai 439.233,04 hektar atau sekitar 86,45 persen dari total luas ekosistem yang dianalisis. Lahan gambut menjadi penyumbang terbesar dalam kategori ini, yaitu sebesar 401.421,08 hektar, menegaskan peran strategisnya sebagai wilayah penyimpan dan penyedia air tanah yang signifikan. Selain itu, wilayah dataran aluvial juga memberikan kontribusi penting dengan luasan 27.850,50 hektar (5,48 persen) dalam kategori yang sama.

Adapun kategori tinggi dan sangat tinggi secara kumulatif mencakup 53.394,49 hektar, yang tersebar terutama di lahan gambut (37.954,99 hektar dan 6.654,19 hektar), serta di wilayah pesisir (masing-masing 4.385,22 hektar dan 2.356,48 hektar). Ini menunjukkan bahwa wilayah pesisir, meskipun terbatas secara spasial, tetap memiliki fungsi penting dalam penyediaan air bersih, terutama bagi masyarakat pesisir dan kawasan perairan estuari.

Sebaliknya, wilayah dengan peran sangat rendah dan rendah memiliki luasan yang lebih terbatas, masing-masing sebesar 8.340,51 ha (1,64 persen)

dan 7.112,85 ha (1,40 persen). Kategori ini tersebar di seluruh ekoregion namun paling dominan ditemukan di lahan gambut dan dataran aluvial.

Variasi ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian fungsi ekosistem, khususnya di lahan gambut dan dataran aluvial, perlu menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan air bersih. Pemahaman terhadap karakteristik ekologis masing-masing ekoregion sangat penting untuk mendukung kebijakan perlindungan dan optimalisasi sumber daya air di masa mendatang.

c) Jasa Ekosistem Penyediaan Serat

Penyediaan serat merupakan salah satu bentuk jasa ekosistem yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung sektor ekonomi dan industri rumah tangga berbasis sumber daya alam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan hasil analisis tahun 2024, distribusi ekosistem yang menopang penyediaan serat tersebar di berbagai ekoregion dengan dominasi pada kategori tinggi dan sangat tinggi.

Tabel 2.6
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Serat di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.153,146	0,227	35,250	0,007	1.748,864	0,344	7.893,379	1,554	20.505,102	4,036
Lembah Antar Perbukitan		-		-		-		-	58,040	0,011
Dataran Fluviomarin		-	2,510	0,000	18,613	0,004		-	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	6.851,882	1,349	6.729,742	1,325	43.763,599	8,614	160.080,843	31,507	242.269,960	47,683
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	2.357,543	0,464	1.184,762	0,233	347,037	0,068	12.813,617	2,522
Total	8.265,417	1,627	9.125,045	1,796	46.715,838	9,195	168.321,259	33,129	275.653,319	54,254

Sumber: Hasil Analisa 2019

Tabel 2.6 memperlihatkan secara total lebih dari separuh wilayah yang dianalisis, yakni sebesar 275.653,32 hektar atau sekitar 54,25 persen, berada dalam kategori sangat tinggi. Kontribusi terbesar berasal dari kawasan lahan gambut yang menyumbang 242.269,96 hektar pada kategori ini, mengindikasikan peran penting gambut sebagai ekosistem penghasil serat yang dominan. Selanjutnya, kategori tinggi mencakup 168.321,26 hektar (33,13 persen), dengan kontribusi utama juga berasal dari lahan gambut (160.080,84 hektar), disusul dataran aluvial dan pesisir.

Kategori sedang hanya mencakup 46.715,84 hektar atau 9,20 persen, yang tersebar secara relatif merata antara lahan gambut, dataran aluvial, dan wilayah pesisir. Di sisi lain, kategori sangat rendah dan rendah memiliki porsi jauh lebih kecil, yakni masing-masing 8.265,42 hektar (1,63 persen) dan 9.125,05 hektar (1,80 persen).

Wilayah dataran aluvial menunjukkan pola distribusi yang seimbang di seluruh kategori, dengan peran signifikan pada kategori sangat tinggi (20.505,10 hektar atau 4,04 persen) dan tinggi (7.893,38 hektar). Sementara itu, meskipun kontribusi wilayah pesisir dalam kategori sedang dan tinggi tergolong kecil, perannya tetap relevan dengan cakupan 12.813,62 hektar (2,52 persen) di kategori sangat tinggi.

Temuan ini menunjukkan bahwa ekosistem lahan gambut merupakan penyumbang utama jasa penyediaan serat, yang mencerminkan potensi besar untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan yang hati-hati dan berbasis prinsip konservasi sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologis dan ekonomi dari jasa penyediaan serat di wilayah ini.

d) Jasa Ekosistem Penyediaan Energi

Jasa ekosistem dalam penyediaan energi menunjukkan kontribusi penting dari lanskap ekologis Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap sumber daya energi lokal, baik dalam bentuk biomassa, bahan bakar hayati,

maupun potensi energi alternatif lainnya. Berdasarkan hasil analisis tahun 2024 di dalam Tabel 2.7, sebaran jasa ekosistem penyediaan energi didominasi oleh ekoregion lahan gambut yang berkontribusi sangat besar dalam kategori sedang, yakni seluas 378.487,71 hektar atau setara dengan 74,49 persen dari total cakupan. Ini menandakan bahwa kawasan gambut tidak hanya penting dalam fungsi hidrologis, tetapi juga menjadi penyangga utama bagi pasokan energi berbasis sumber daya alam.

Kategori sedang secara keseluruhan mendominasi proporsi ekosistem dengan total luas mencapai 412.240,75 hektar (81,14 persen). Selain lahan gambut, dataran aluvial juga turut berkontribusi sebesar 20.779,02 hektar (4,09 persen), serta wilayah pesisir sebesar 12.909,38 hektar (2,54 persen). Komposisi ini menunjukkan bahwa distribusi penyediaan energi tidak hanya terpusat, tetapi tersebar di berbagai ekosistem yang memiliki karakteristik ekologis dan aksesibilitas yang beragam.

Tabel 2.7
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Energi di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.441,919	0,284	9.079,550	1,787	20.779,022	4,090	8,826	0,002	26,424	0,005
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluvio-marine		-	18,613	0,004	6,600	0,001		-	2,510	0,000
Lahan Gambut (Peat Land)	13.608,788	2,678	60.879,077	11,982	378.487,708	74,494	66,262	0,013	6.654,191	1,310
Pesisir (Coast)	337,905	0,067	1.359,580	0,268	12.909,381	2,541		-	2.356,482	0,464
Total	15.388,612	3,029	71.336,820	14,040	412.240,751	81,137	75,088	0,015	9.039,607	1,779

Sumber: Hasil Analisa 2024

Sementara itu, kategori rendah menyumbang luasan sebesar 71.336,82 hektar atau 14,04 persen, dengan kontribusi utama juga berasal dari lahan gambut (60.879,08 hektar). Adapun kategori sangat rendah dan sangat tinggi

memiliki porsi yang relatif kecil, masing-masing 15.388,61 hektar (3,03 persen) dan 9.039,61 hektar (1,78 persen).

Menariknya, kategori tinggi hanya mencakup 75,09 hektar atau 0,015 persen, yang menunjukkan bahwa intensitas penyediaan energi pada tingkat tertinggi belum berkembang optimal. Sebaliknya, sebagian besar ekosistem masih berada dalam kapasitas sedang dan rendah. Hal ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi peningkatan nilai guna jasa ekosistem energi secara terencana dan berkelanjutan, khususnya di kawasan dataran dan pesisir yang memiliki potensi biomassa dan energi alternatif lainnya. Dengan demikian, pendekatan kebijakan yang adaptif dan berbasis wilayah perlu dike depankan guna mengoptimalkan peran ekologis berbagai ekoregion dalam penyediaan energi, sembari menjaga integritas lingkungan dan keseimbangan daya dukungnya.

e) Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik

Sumber daya genetik merupakan aset ekologis yang bernilai strategis dalam mendukung ketahanan hayati, konservasi plasma nutfah, serta pengembangan sektor pertanian dan bioteknologi di masa depan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki keragaman ekosistem yang mendukung jasa penyediaan sumber daya genetik, sebagaimana tergambar dari analisis distribusi pada tahun 2024 (lihat Tabel 2.8).

Tabel 2.8
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	288,773	0,057	27.576,580	5,428	2.034,496	0,400	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluviomarin		-	2,510	0,000	18,613	0,004		-	6,600	0,001
Lahan Gambut	6.918,144	1,362	6.747,617	1,328	266.098,290	52,373	40.572,870	7,986	139.359,105	27,429

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
(Peat Land)										
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	76,455	0,015	9.943,978	1,957	2.356,482	0,464	4.326,044	0,851
Total	8.340,505	1,642	7.115,355	1,400	303.695,501	59,773	44.963,848	8,850	143.965,669	28,335

Sumber: Hasil Analisa 2024

Secara umum, kategori sedang mencakup area paling luas, yakni sebesar 303.695,50 hektar atau sekitar 59,77 persen dari total kawasan yang dianalisis. Kontribusi utama berasal dari kawasan lahan gambut, yang mendominasi dengan 266.098,29 hektar pada kategori ini. Hal ini menunjukkan bahwa lahan gambut bukan hanya penting secara hidrologis, tetapi juga menjadi cadangan genetik yang bernilai tinggi, baik untuk spesies endemik maupun potensi domestikasi.

Kategori sangat tinggi menyumbang sebesar 143.965,67 hektar (28,34 persen), yang sebagian besar juga bersumber dari lahan gambut (139.359,11 hektar). Sedangkan kategori tinggi mencapai 44.963,85 hektar (8,85 persen), dengan sebaran utama di lahan gambut dan wilayah pesisir. Pesisir berperan cukup signifikan dalam penyediaan sumber daya genetik, terutama pada kategori sangat tinggi sebesar 4.326,04 hektar (0,85 persen), yang mencerminkan potensi keragaman hayati laut dan kawasan estuari. Adapun kategori sangat rendah dan rendah memiliki kontribusi paling kecil, masing-masing 8.340,51 hektar (1,64 persen) dan 7.115,36 hektar (1,40 persen). Wilayah dataran aluvial menunjukkan keanekaragaman peran di berbagai kategori, terutama pada kategori sedang dengan 27.576,58 hektar (5,43 persen).

Data tersebut menegaskan bahwa pelestarian sumber daya genetik tidak hanya menjadi agenda konservasi, tetapi juga merupakan bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan. Keberadaan kawasan dengan nilai keanekaragaman genetik tinggi, terutama di lahan gambut dan pesisir, perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan tata ruang, perlindungan

kawasan lindung, dan pengembangan kebijakan konservasi berbasis ekosistem.

f) Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Menurut Kecamatan

Kapasitas jasa ekosistem dalam menyediakan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan distribusi yang tidak merata antar kecamatan, mencerminkan karakteristik biofisik dan pemanfaatan ruang yang beragam. Berdasarkan hasil analisa tahun 2024, penyediaan pangan sebagai bagian dari jasa penyediaan ekosistem tercatat tersebar di seluruh wilayah, dengan dominasi pada kategori sedang (lihat Tabel 2.9).

Secara total, kategori sedang mencapai luas 450.538,80 hektar atau sekitar 88,68 persen dari total distribusi. Kecamatan Berbak menjadi kontributor utama dengan luasan 108.169,55 hektar (21,29 persen), diikuti oleh Mendahara Ulu sebesar 58.750,91 hektar (11,56 persen), dan Sadu dengan 57.146,61 hektar (11,25 persen). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan bentang alam yang relatif datar dan subur memiliki potensi dominan dalam mendukung ketahanan pangan melalui fungsi ekologisnya.

Tabel 2.9

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	541,302	0,107		-	108.169,553	21,290	2.727,734	0,537	7.968,487	1,568
Dendang	714,752	0,141	66,262	0,013	24.635,377	4,849	551,585	0,109	8.324,483	1,638
Geragai	1.355,878	0,267		-	46.516,354	9,155	140,183	0,028	3.169,503	0,624
Kuala Jambi	315,597	0,062		-	9.572,382	1,884	1.729,830	0,340	337,483	0,066
Mendahara	474,745	0,093		-	48.309,722	9,508	3.670,477	0,722	77,604	0,015
Mendahara Ulu	369,552	0,073	8,826	0,002	58.750,907	11,563	201,779	0,040	13,907	0,003
Muara Sabak Barat	1.027,155	0,202		-	18.318,732	3,605	531,997	0,105	8.750,429	1,722
Muara Sabak Timur	953,897	0,188		-	37.002,623	7,283	1.855,683	0,365	688,522	0,136
Nipah Panjang	450,069	0,089		-	24.472,500	4,817	1.806,083	0,355	2.561,189	0,504
Rantau Rasau	1.659,766	0,327		-	17.644,046	3,473	713,622	0,140	328,980	0,065
Sadu	402,704	0,079		-	57.146,608	11,248	3.008,645	0,592	43,364	0,009
Total	8.340,505	1,627	75,088	0,015	450.538,804	88,675	16.937,618	3,334	32.263,951	6,350

Sumber: Hasil Analisa 2024

Pada kategori sangat tinggi, penyebaran relatif lebih terkonsentrasi di beberapa kecamatan dengan luasan terbesar tercatat di Muara Sabak Barat sebesar 8.750,43 hektar (1,72 persen), Dendang sebesar 8.324,48 hektar (1,64 persen), dan Berbak sebesar 7.968,49 hektar (1,57 persen). Meskipun secara persentase tidak sebesar kategori sedang, luasan ini tetap signifikan karena mencerminkan potensi produksi pangan intensif di wilayah tersebut.

Kategori tinggi tercatat seluas 16.937,62 hektar (3,33 persen), tersebar di hampir seluruh kecamatan, dengan sumbangan terbesar berasal dari Kecamatan Mendahara sebesar 3.670,48 hektar dan Sadu sebesar 3.008,65 hektar. Sebaliknya, kategori sangat rendah dan rendah secara agregat hanya mencakup kurang dari 2 persen dari total luasan, menunjukkan bahwa sebagian besar ekosistem di Tanjung Jabung Timur masih memiliki kapasitas sedang hingga tinggi dalam mendukung fungsi penyediaan pangan.

Distribusi spasial ini menjadi dasar penting dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan lanskap pertanian, khususnya untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan berbasis ekosistem. Optimalisasi potensi lokal melalui pendekatan kewilayahan yang adaptif dan berbasis data akan memperkuat daya dukung lingkungan hidup dalam agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan

g) Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Menurut Kecamatan

Kemampuan ekosistem dalam menyediakan air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan variasi spasial yang cukup signifikan antar kecamatan, mencerminkan perbedaan kondisi hidrologi, struktur lahan, serta intensitas pemanfaatan wilayah (lihat Tabel 2.10). Berdasarkan analisis tahun 2024, proporsi terbesar terdapat pada kategori sedang, yang mencapai luas 439.233,04 hektar atau sekitar 86,45% dari total yang diamati.

Kecamatan Berbak mencatatkan nilai tertinggi dalam kategori sedang, yaitu seluas 115.031,25 hektar (22,64 persen), disusul Mendahara Ulu (43.200,91 hektar atau 8,50 persen), dan Mendahara (40.806,42 hektar atau

8,03 persen). Hal ini mengindikasikan dominasi kawasan dataran rendah dan lahan gambut sebagai ekosistem penyimpan dan penyedia air tanah yang substansial.

Selain itu, kecamatan dengan luasan signifikan dalam kategori tinggi adalah Mendahara Ulu (13.005,40 hektar atau 2,56 persen) dan Geragai (14.483,96 hektar atau 2,85 persen). Meskipun proporsinya lebih kecil dari kategori sedang, nilai ini tetap menunjukkan potensi strategis dalam mendukung pasokan air bersih yang dapat dioptimalkan melalui pengelolaan berkelanjutan.

Tabel 2.10

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	541,302	0,107	668,935	0,132	115.031,254	22,640	464,792	0,091	2.700,793	0,532
Dendang	781,014	0,154	966,168	0,190	31.993,692	6,297	-	-	551,585	0,109
Geragai	1.355,878	0,267	344,317	0,068	34.857,585	6,861	14.483,955	2,851	140,183	0,028
Kuala Jambi	315,597	0,062	52,490	0,010	9.857,375	1,940	767,799	0,151	962,031	0,189
Mendahara	474,745	0,093	-	-	40.806,416	8,031	10.538,900	2,074	712,487	0,140
Mendahara Ulu	378,378	0,074	2.618,501	0,515	43.200,909	8,503	13.005,397	2,560	141,786	0,028
Muara Sabak Barat	1.027,155	0,202	310,433	0,061	25.760,323	5,070	998,405	0,197	531,997	0,105
Muara Sabak Timur	953,897	0,188	-	-	37.680,795	7,416	55,475	0,011	1.810,558	0,356
Nipah Panjang	450,069	0,089	179,876	0,035	26.853,813	5,285	1.202,695	0,237	603,388	0,119
Rantau Rasau	1.659,766	0,327	-	-	17.973,026	3,537	-	-	713,622	0,140
Sadu	402,704	0,079	1.972,125	0,388	55.217,847	10,868	2.837,468	0,558	171,177	0,034
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	439.233,035	86,449	44.354,886	8,730	9.039,607	1,779

Sumber: Hasil Analisa 2024

Kategori sangat tinggi mencakup 9.039,61 hektar (1,78 persen), dengan distribusi terbesar berada di Berbak (2.700,79 hektar), Muara Sabak Timur (1.810,56 hektar), dan Dendang (551,59 hektar). Kategori ini cenderung terkonsentrasi di kawasan pesisir dan estuari yang memiliki potensi air tanah dangkal maupun tangkapan air hujan. Sementara itu, kategori sangat rendah

dan rendah masih dijumpai pada sebagian besar kecamatan, meskipun luasannya relatif kecil masing-masing sebesar 8.340,51 hektar (1,64 persen) dan 7.112,85 hektar (1,40 persen). Keberadaan kategori ini penting untuk dipetakan sebagai wilayah yang memerlukan intervensi peningkatan daya dukung ekosistem terhadap ketersediaan air bersih.

Dari data ini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan air bersih sebagai bagian dari jasa ekosistem tidak hanya bergantung pada jumlah curah hujan atau sistem irigasi, tetapi juga ditentukan oleh fungsi alami ekosistem dalam menyimpan, menyaring, dan mendistribusikan air. Oleh karena itu, perlindungan ekosistem di wilayah dengan kategori sedang hingga sangat tinggi perlu menjadi prioritas dalam pengelolaan sumber daya air daerah secara terpadu.

h) Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Menurut Kecamatan

Jasa ekosistem dalam penyediaan serat memiliki kontribusi signifikan terhadap keberlangsungan sektor kehutanan rakyat, kerajinan berbahan alami, dan industri rumah tangga berbasis sumber daya alam lokal. Berdasarkan hasil analisa tahun 2024, distribusi ekosistem penyediaan serat menunjukkan dominasi yang kuat pada kategori sangat tinggi, yang secara total mencakup 275.653,32 hektar atau 54,25 persen dari total luas wilayah yang dianalisis (Tabel 2.11).

Tabel 2.11

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	541,302	0,107	2.700,793	0,532	6.481,527	1,276	105.334,888	20,732	4.348,566	0,856
Dendang	714,752	0,141	617,847	0,122	8.615,527	1,696	13.973,817	2,750	10.370,516	2,041
Geragai	1.355,878	0,267	140,183	0,028	1.653,744	0,325	4.536,333	0,893	43.495,780	8,561
Kuala Jambi	315,597	0,062	962,031	0,189	101,988	0,020	337,483	0,066	10.238,193	2,015
Mendahara	474,745	0,093	712,487	0,140	2.468,808	0,486	596,628	0,117	48.279,880	9,502
Mendahara Ulu	369,552	0,073	150,612	0,030	7.888,533	1,553	10.650,765	2,096	40.285,509	7,929
Muara Sabak Barat	1.027,155	0,202	531,997	0,105	923,081	0,182	11.342,523	2,232	14.803,557	2,914

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Muara Sabak Timur	953,897	0,188	1.820,908	0,358	872,426	0,172	678,183	0,133	36.175,311	7,120
Nipah Panjang	450,069	0,089	603,388	0,119	1.178,572	0,232	2.778,475	0,547	24.279,337	4,779
Rantau Rasau	1.659,766	0,327	713,622	0,140	151,788	0,030	336,800	0,066	17.484,438	3,441
Sadu	402,704	0,079	171,177	0,034	16.379,844	3,224	17.755,364	3,495	25.892,232	5,096
Total	8.265,417	1,627	9.125,045	1,796	46.715,838	9,195	168.321,259	33,129	275.653,319	54,254

Sumber: Hasil Analisa 2024

Kecamatan yang menjadi kontributor terbesar dalam kategori ini adalah Mendahara dengan luasan 48.279,88 hektar (9,50 persen), diikuti oleh Geragai (43.495,78 hektar atau 8,56 persen) dan Mendahara Ulu (40.285,51 hektar atau 7,93 persen). Selain itu, Sadu dan Muara Sabak Timur juga memberikan sumbangsih signifikan dengan luas masing-masing lebih dari 25.000 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan-kawasan tersebut memiliki ekosistem yang sangat produktif dalam menghasilkan komoditas serat alami seperti rotan, pandan, atau kulit kayu.

Kategori tinggi juga mencakup area yang luas, yaitu 168.321,26 hektar atau 33,13 persen. Kecamatan Berbak tampil mencolok dalam kategori ini dengan kontribusi sebesar 105.334,89 hektar (20,73 persen), disusul Muara Sabak Barat dan Sadu. Keberadaan kategori ini memperkuat argumen bahwa jasa penyediaan serat tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, tetapi menyebar secara luas di seluruh kecamatan dengan variasi intensitas.

Sementara itu, kategori sedang mencakup 46.715,84 hektar (9,20 persen) dan tersebar merata, meskipun kontribusinya relatif kecil jika dibandingkan dengan dua kategori di atas. Kecamatan seperti Dendang, Mendahara Ulu, dan Nipah Panjang mencatatkan luasan sedang yang cukup signifikan, memperlihatkan potensi sedang yang bisa ditingkatkan dengan pendekatan budidaya dan pengelolaan berkelanjutan. Kategori sangat rendah dan rendah, dengan akumulasi kurang dari 4 persen dari total luas wilayah, menunjukkan adanya beberapa kecamatan yang peran ekosistemnya dalam penyediaan serat masih rendah. Meskipun demikian, keberadaan kawasan ini

tetap penting untuk diperhatikan dalam konteks konservasi dan diversifikasi pemanfaatan jasa ekosistem di masa mendatang.

Secara umum, distribusi ini menegaskan bahwa ekosistem penyediaan serat menjadi komponen penting dari daya dukung lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi ini dapat dikembangkan menjadi basis ekonomi lokal yang berkelanjutan tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya.

i) Jasa Ekosistem Penyediaan Energi Menurut Kecamatan

Penyediaan energi berbasis ekosistem merupakan salah satu fungsi lingkungan yang berkontribusi penting terhadap kemandirian energi lokal dan kelestarian sumber daya hayati. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi ekosistem yang mendukung penyediaan energi, baik dari biomassa, bioenergi, maupun bahan bakar berbasis sumber daya alam terbarukan. Berdasarkan hasil analisis tahun 2024, potensi terbesar teridentifikasi dalam kategori sedang, dengan total luas mencapai 412.240,75 hektar atau sekitar 81,14% dari total wilayah yang dikaji (lihat Tabel 2.12).

Kontribusi tertinggi dalam kategori ini berasal dari Kecamatan Berbak dengan luasan 102.152,82 hektar (20,11 persen), disusul Mendahara Ulu sebesar 50.927,35 hektar (10,02 persen), dan Mendahara sebesar 48.875,84 hektar (9,62 persen). Kecamatan lain seperti Geragai dan Sadu juga mencatatkan luas signifikan, masing-masing di atas 40.000 hektar. Sebaran ini menunjukkan bahwa kapasitas ekosistem dalam menyediakan bahan bakar dan sumber energi alternatif cukup merata di berbagai wilayah, khususnya yang memiliki bentang alam rawa, gambut, dan kawasan budidaya hutan rakyat.

Kategori rendah menempati urutan kedua dengan luas mencapai 71.336,82 hektar (14,04 persen), di mana Kecamatan Dendang (15.973,84 hektar) dan Berbak (13.343,23 hektar) menjadi dua penyumbang utama. Meskipun masih tergolong moderat, luasan ini memperlihatkan adanya

potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui teknologi energi berbasis komunitas seperti biogas atau pengolahan limbah organik.

Tabel 2.12

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Energi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	1.210,237	0,238	13.343,228	2,626	102.152,818	20,106		-	2.700,793	0,532
Dendang	1.680,920	0,331	15.973,842	3,144	16.019,850	3,153	66,262	0,013	551,585	0,109
Geragai	1.700,195	0,335	4.478,930	0,882	44.862,610	8,830		-	140,183	0,028
Kuala Jambi	368,087	0,072	386,981	0,076	10.238,193	2,015		-	962,031	0,189
Mendahara	474,745	0,093	2.469,475	0,486	48.875,841	9,620		-	712,487	0,140
Mendahara Ulu	2.988,053	0,588	5.278,953	1,039	50.927,353	10,023	8,826	0,002	141,786	0,028
Muara Sabak Barat	1.337,588	0,263	9.363,077	1,843	17.395,651	3,424		-	531,997	0,105
Muara Sabak Timur	964,247	0,190	1.550,598	0,305	36.175,322	7,120		-	1.810,558	0,356
Nipah Panjang	629,945	0,124	3.559,885	0,701	24.496,623	4,821		-	603,388	0,119
Rantau Rasau	1.659,766	0,327	480,768	0,095	17.492,258	3,443		-	713,622	0,140
Sadu	2.374,829	0,467	14.451,083	2,844	43.604,232	8,582		-	171,177	0,034
Total	15.388,612	3,029	71.336,820	14,040	412.240,751	81,137	75,088	0,015	9.039,607	1,779

Sumber: Hasil Analisa 2024

Kategori sangat tinggi memiliki cakupan 9.039,61 hektar (1,78 persen), tersebar terutama di Berbak, Muara Sabak Timur, dan Mendahara. Luasan ini relatif kecil dibanding kategori sedang, namun menjadi indikasi wilayah dengan intensitas tinggi dalam penyediaan sumber energi alami. Sementara itu, kategori tinggi justru menunjukkan angka yang sangat rendah (75,09 hektar atau 0,015 persen), yang menandakan kemungkinan belum optimalnya pencatatan atau pemanfaatan di area dengan potensi teknis yang lebih tinggi. Pada sisi lain, kategori sangat rendah masih tercatat di beberapa kecamatan dengan total 15.388,61 hektar (3,03 persen), mencerminkan adanya tantangan ekologis, keterbatasan akses, atau tekanan konversi lahan yang menghambat fungsi ekosistem dalam penyediaan energi.

Dengan mempertimbangkan variasi ini, strategi pengelolaan energi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu memperhatikan basis spasial ekosistem. Wilayah dengan kategori sedang dan tinggi dapat diarahkan menjadi zona pengembangan energi berbasis masyarakat yang ramah lingkungan, sementara wilayah kategori rendah dan sangat rendah perlu mendapatkan dukungan konservasi dan pemulihan fungsi ekologis secara berkelanjutan.

j) Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik Menurut Kecamatan

Sumber daya genetik merupakan fondasi penting dalam menjaga keragaman hayati dan ketahanan ekologis suatu wilayah. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jasa ekosistem dalam penyediaan sumber daya genetik tersebar secara bervariasi di seluruh kecamatan, mencerminkan keragaman karakteristik lanskap dan fungsi ekologis masing-masing wilayah.

Kategori sedang mendominasi distribusi dengan cakupan luas sebesar 303.695,50 hektar atau sekitar 59,77 persen dari total. Kecamatan dengan kontribusi tertinggi dalam kategori ini adalah Mendahara (40.364,33 hektar), disusul oleh Muara Sabak Timur (37.691,13 hektar), Sadu (37.505,85 hektar), Geragai (33.490,76 hektar), dan Mendahara Ulu (32.569,04 hektar). Lima kecamatan ini secara kolektif menyumbang lebih dari separuh luas pada kategori sedang, menandakan tingginya nilai konservasi genetik di kawasan tersebut.

Pada kategori sangat tinggi, luasan total mencapai 143.965,67 hektar (28,34 persen). Kontributor terbesar dalam kategori ini adalah Kecamatan Berbak dengan luas 97.393,34 hektar (19,17 persen), menjadikannya wilayah paling menonjol dalam penyediaan sumber daya genetik tingkat tinggi. Disusul oleh Sadu (20.549,47 hektar), Mendahara Ulu (10.696,85 hektar), dan Dendang (5.649,33 hektar), sementara kecamatan seperti Rantau Rasau dan Muara Sabak Timur hanya menyumbang sebagian kecil dari total luas sangat tinggi.

Tabel 2.13
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik
Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	541,302	0,107	668,935	0,132	18.102,704	3,563	2.700,793	0,532	97.393,342	19,169
Dendang	781,014	0,154	966,168	0,190	26.344,358	5,185	551,585	0,109	5.649,334	1,112
Geragai	1.355,878	0,267	344,317	0,068	33.490,755	6,592	14.624,138	2,878	1.366,830	0,269
Kuala Jambi	315,597	0,062	52,490	0,010	9.857,375	1,940	962,031	0,189	767,799	0,151
Mendahara	474,745	0,093		-	40.364,329	7,944	8.216,460	1,617	3.477,014	0,684
Mendahara Ulu	378,378	0,074	2.618,501	0,515	32.569,037	6,410	13.082,204	2,575	10.696,851	2,105
Muara Sabak Barat	1.027,155	0,202	310,433	0,061	23.168,229	4,560	1.530,402	0,301	2.592,094	0,510
Muara Sabak Timur	953,897	0,188		-	37.691,134	7,418	1.810,558	0,356	45,136	0,009
Nipah Panjang	450,069	0,089	179,876	0,035	26.636,527	5,243	603,388	0,119	1.419,981	0,279
Rantau Rasau	1.659,766	0,327		-	17.965,206	3,536	713,622	0,140	7,820	0,002
Sadu	402,704	0,079	1.972,125	0,388	37.505,847	7,382	171,177	0,034	20.549,468	4,045
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	303.695,501	59,773	44.966,358	8,850	143.965,669	28,335

Sumber: Hasil Analisa 2024

Kategori tinggi mencakup 44.966,36 hektar (8,85 persen), dengan Geragai (14.624,14 hektar) dan Mendahara Ulu (13.082,20 hektar) sebagai penyumbang utama. Kecamatan lainnya seperti Mendahara dan Muara Sabak Timur juga tercatat cukup signifikan dalam mendukung fungsi ekosistem ini, meskipun tidak sebesar dua kecamatan tersebut. Sementara itu, kategori rendah dan sangat rendah menempati proporsi yang lebih kecil, yakni masing-masing 7.112,85 hektar (1,40 persen) dan 8.340,51 hektar (1,64 persen). Meski luasnya terbatas, keberadaan kategori ini menunjukkan adanya wilayah dengan tekanan atau degradasi ekosistem, seperti Rantau Rasau dan Kuala Jambi, yang memerlukan intervensi restorasi atau peningkatan perlindungan sumber daya alamnya.

Distribusi ini menegaskan bahwa kapasitas penyediaan sumber daya genetik tidak hanya menjadi aset ekologis, melainkan juga potensi pembangunan berbasis konservasi, baik dalam skema pertanian berkelanjutan, pengembangan plasma nutfah lokal, hingga ketahanan pangan

jangka panjang. Strategi pelestarian dan pemanfaatan jasa ekosistem ini perlu diarahkan pada kecamatan-kecamatan dengan kategori tinggi dan sangat tinggi, sekaligus memperkuat rehabilitasi di wilayah yang masih berada pada kategori rendah.

2) Jasa Pengaturan

Jasa pengaturan (*regulating services*) merupakan salah satu kategori penting dalam sistem jasa ekosistem yang memiliki peran utama dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jasa pengaturan berperan dalam menyediakan berbagai manfaat ekologis yang tidak langsung terlihat, tetapi sangat esensial bagi kelangsungan kehidupan dan keberlanjutan pembangunan wilayah. Fungsi ini meliputi pengaturan iklim, pengendalian kualitas udara dan air, mitigasi bencana seperti banjir dan kebakaran lahan, serta proses-proses ekosistem seperti penyerbukan, siklus hara, dan pembentukan tanah.

Ekosistem yang sehat berkontribusi terhadap kestabilan iklim lokal maupun global melalui penyimpanan karbon di lahan gambut dan kawasan hutan, serta membantu meminimalkan efek perubahan iklim. Selain itu, lahan basah, hutan mangrove, dan ekosistem pesisir memainkan peran penting dalam menyerap polutan, menyaring air, serta menahan abrasi dan intrusi air laut. Di wilayah seperti Tanjung Jabung Timur yang memiliki keragaman ekoregion, jasa pengaturan menjadi sangat penting dalam mendukung ketahanan lingkungan, terutama mengingat tekanan pembangunan dan perubahan penggunaan lahan yang kian meningkat.

Pengakuan terhadap fungsi jasa pengaturan ini menjadi landasan penting dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Melalui analisis spasial distribusi jasa ekosistem pengaturan, pemerintah daerah dapat menetapkan strategi perlindungan dan pemanfaatan lahan secara lebih tepat, berbasis data dan berbasis ekosistem. Narasi dan data berikutnya menguraikan kontribusi masing-masing ekoregion

terhadap jasa pengaturan, dimulai dari pengaturan iklim sebagai salah satu elemen krusial.

a) Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Salah satu bentuk jasa ekosistem pengaturan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah peran ekosistem dalam pengaturan iklim. Analisis distribusi spasial dan kontribusi jasa ekosistem iklim menunjukkan dominasi peran signifikan dari kawasan lahan gambut (*peat land*). Kawasan ini memberikan kontribusi terbesar baik dari segi luas maupun persentase, terutama pada kategori "Sedang" hingga "Sangat Tinggi". Berdasarkan hasil analisa tahun 2024, distribusi jasa ekosistem iklim di wilayah ini tersebar di berbagai ekoregion dengan variasi tingkat kontribusi. Dari hasil perhitungan interval tersebut didapatkan distribusi kondisi jasa ekosistem di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diuraikan melalui Tabel 2.14 berikut ini.

Tabel 2.14

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Iklim di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	315,197	0,062	27.576,580	5,428	2.008,072	0,395	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluvio-marine		-	2,510	0,000	18,613	0,004		-	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	13.411,097	2,640	266.089,001	52,371	33.918,679	6,676	139.359,105	27,429
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	2.433,998	0,479	9.942,917	1,957		-	4.326,044	0,851
Total	8.340,505	1,642	16.162,802	3,181	303.685,151	59,771	35.926,751	7,071	143.965,669	28,335

Sumber: Hasil Analisa 2024

Pada kategori "Sedang", lahan gambut menyumbang seluas 266.089,001 hektar (52,371 persen), disusul kategori "Sangat Tinggi" seluas 139.359,105

hektar (27,429 persen), dan kategori "Tinggi" sebesar 33.918,679 hektar (6,676 persen). Hal ini menegaskan fungsi penting lahan gambut sebagai penyangga iklim regional dan penyimpan karbon alami, sekaligus menunjukkan urgensi perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan terhadap ekosistem ini. Sebaliknya, ekoregion seperti dataran fluviomarin dan lembah antar perbukitan menunjukkan kontribusi yang sangat rendah terhadap jasa ekosistem iklim. Luas kawasan dengan fungsi iklim pada kategori "Sedang" di dataran fluviomarin hanya sebesar 18,613 hektar (0,004 persen), sedangkan lembah antar perbukitan mencatatkan 58,040 hektar (0,011 persen). Kategori "Sangat Tinggi" di dataran fluviomarin bahkan hanya mencakup 6,600 hektar (0,001 persen), mengindikasikan peran yang relatif minimal dari kawasan tersebut dalam fungsi pengaturan iklim.

Adapun dataran aluvial menunjukkan luasan yang signifikan pada kategori "Sedang", yakni sebesar 27.576,580 hektar (5,428 persen), meskipun kontribusinya berkurang drastis pada kategori "Tinggi" dan "Sangat Tinggi". Di sisi lain, kawasan pesisir menyumbang kontribusi terbatas, dengan luasan terbesar tercatat pada kategori "Sedang" seluas 9.942,917 hektar (1,957 persen) dan "Sangat Tinggi" seluas 4.326,044 hektar (0,851 persen).

Secara total, peran jasa ekosistem iklim di Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh kategori "Sedang" dengan cakupan 303.685,151 hektar (59,771 persen), diikuti oleh kategori "Sangat Tinggi" seluas 143.965,669 hektar (28,335 persen). Sementara kategori "Tinggi" berkontribusi sebesar 35.926,751 hektar (7,071 persen). Proporsi luas pada kategori "Sangat Rendah" dan "Rendah" tergolong kecil, yakni hanya 1,642 persen dan 3,181 persen dari keseluruhan wilayah, mengindikasikan bahwa sebagian besar kawasan memiliki potensi sedang hingga tinggi dalam mendukung fungsi pengaturan iklim.

Temuan ini mempertegas pentingnya strategi konservasi berbasis ekosistem, khususnya terhadap lahan gambut dan kawasan aluvial yang secara

ekologis memiliki fungsi strategis dalam menjaga kestabilan iklim mikro dan makro di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b) Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir

Pengelolaan tata air dan pengendalian banjir merupakan bagian krusial dari jasa ekosistem pengaturan yang berperan dalam menjaga stabilitas wilayah, terutama di daerah rawan banjir dan dengan kontur ekosistem basah seperti yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan hasil analisis tahun 2024 (lihat Tabel 2.15), distribusi jasa ekosistem dalam fungsi ini didominasi oleh kawasan lahan gambut yang secara signifikan memberikan kontribusi terbesar. Pada kategori “Sedang”, kawasan ini mencakup luas 265.646,164 hektar atau sekitar 52,284 persen dari total wilayah yang berperan dalam fungsi tata kelola air dan banjir. Peran ini meningkat pada kategori “Sangat Tinggi” yang mencapai 146.022,585 hektar (28,740 persen) dan juga signifikan dalam kategori “Tinggi” sebesar 34.361,516 hektar (6,763 persen). Angka-angka ini mencerminkan pentingnya lahan gambut sebagai kawasan penyangga air alami sekaligus pengatur hidrologi regional.

Tabel 2.15
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tata Kelola Air dan Banjir di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	288,773	0,057	27.576,580	5,428	2.008,072	0,395	300,344	0,059
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluviomarin		-		-	18,613	0,004		-	9,110	0,002
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	6.747,617	1,328	265.646,164	52,284	34.361,516	6,763	146.022,585	28,740
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	76,455	0,015	9.865,980	1,942	76,937	0,015	6.683,587	1,315
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	303.165,377	59,669	36.446,525	7,173	153.015,626	30,116

Sumber: Hasil Analisa 2024

Kontribusi yang lebih rendah dicatatkan oleh kawasan pesisir, yang memiliki peran sedang sebesar 9.865,980 hektar (1,942 persen), dan peran sangat tinggi seluas 6.683,587 hektar (1,315 persen). Sementara itu, dataran aluvial memberikan kontribusi dominan hanya pada kategori “Sedang” seluas 27.576,580 hektar (5,428 persen), namun menurun drastis pada kategori “Sangat Tinggi” menjadi hanya 300,344 hektar (0,059 persen). Ini menandakan bahwa meskipun kawasan aluvial cukup luas, perannya dalam pengendalian banjir masih bersifat sedang dan belum optimal dalam kategori tertinggi.

Beberapa ekoregion lainnya menunjukkan peran yang sangat terbatas. Misalnya, lembah antar perbukitan hanya mencatat kontribusi kecil pada kategori “Sedang” dengan luas 58,040 hektar (0,011 persen) dan tidak tercatat pada kategori lin. Dataran fluvio marin bahkan hanya menyumbang 18,613 hektar (0,004 persen) pada kategori “Sedang” dan 9,110 hektar (0,002 persen) pada kategori “Sangat Tinggi”, menandakan minimnya kontribusi jasa ekosistem tata air dari wilayah ini.

Secara agregat, distribusi peran jasa ekosistem tata kelola air dan banjir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling dominan berada pada kategori “Sedang” dengan cakupan total 303.165,377 hektar atau 59,669 persen dari keseluruhan luasan relevan. Ini diikuti oleh kategori “Sangat Tinggi” dengan 153.015,626 hektar (30,116 persen) dan kategori “Tinggi” sebesar 36.446,525 hektar (7,173 persen). Kategori “Sangat Rendah” dan “Rendah” menyumbang jauh lebih kecil, masing-masing hanya 1,642 persen dan 1,400 persen.

Data tersebut menegaskan perlunya strategi pengelolaan tata air berbasis ekosistem, khususnya penguatan fungsi kawasan gambut dan pesisir sebagai penyimpan air alami dan penyeimbang siklus hidrologi. Kebijakan restorasi dan konservasi pada kawasan ini perlu menjadi prioritas guna menjaga daya tampung lingkungan terhadap risiko banjir dan ketidakstabilan air permukaan.

c) Jasa Ekosistem Pengaturan Bencana

Fungsi pengaturan ekosistem dalam konteks pengurangan risiko bencana merupakan komponen vital dalam menjaga keberlanjutan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama karena karakteristik geografisnya yang rentan terhadap banjir, abrasi, dan kebakaran lahan. Berdasarkan hasil analisis tahun 2024, luasan tertinggi peran ekosistem dalam mitigasi bencana berada pada kategori “Sedang”, yaitu sebesar 303.695,501 hektar (59,773 persen). Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar ekosistem di wilayah ini berfungsi dalam kapasitas sedang untuk mengurangi potensi dampak bencana (lihat Tabel 2.16).

Tabel 2.16
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Bencana di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	8,826	0,002	1.441,919	0,284	27.576,580	5,428	2.034,496	0,400	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluviomarin		-		-	18,613	0,004	2,510	0,000	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	66,262	0,013	13.599,499	2,677	266.098,290	52,373	40.572,870	7,986	139.359,105	27,429
Pesisir (Coast)		-	336,844	0,066	9.943,978	1,957	2.356,482	0,464	4.326,044	0,851
Total	75,088	0,015	15.378,262	3,027	303.695,501	59,773	44.966,358	8,850	143.965,669	28,335

Sumber: Hasil Analisa 2024

Lahan gambut tampil sebagai ekoregion dengan kontribusi paling besar pada berbagai tingkat kategori mitigasi bencana. Pada kategori “Sedang” saja, kawasan ini menyumbang seluas 266.098,290 hektar (52,373 persen). Fungsi ini meningkat pada kategori “Tinggi” dengan 40.572,870 hektar (7,986 persen) dan sangat signifikan pula pada kategori “Sangat Tinggi” sebesar 139.359,105 hektar (27,429 persen). Hal ini menegaskan bahwa ekosistem

gambut berperan sebagai benteng ekologis dalam meredam intensitas dan frekuensi bencana seperti kebakaran lahan dan banjir. Di sisi lain, wilayah pesisir juga mencatat peran yang cukup berarti, khususnya pada kategori “Sedang” dengan luasan 9.943,978 hektar (1,957 persen) dan “Sangat Tinggi” sebesar 4.326,044 hektar (0,851 persen). Ini menunjukkan bahwa kawasan pesisir tidak hanya penting dalam perlindungan pantai, tetapi juga turut andil dalam menjaga kestabilan ekosistem dari potensi bencana laut seperti abrasi.

Kontribusi dari dataran aluvial relatif besar dalam kategori “Sedang”, yaitu 27.576,580 hektar (5,428 persen), meskipun turun drastis pada kategori “Sangat Tinggi” menjadi 273,920 hektar (0,054 persen). Wilayah dataran fluviomarin dan lembah antar perbukitan memiliki kontribusi yang sangat terbatas. Dataran fluviomarin hanya menyumbang 18,613 hektar (0,004 persen) pada kategori “Sedang” dan 6,600 hektar (0,001 persen) pada kategori “Sangat Tinggi”. Sementara lembah antar perbukitan hanya muncul dalam kategori “Sedang” seluas 58,040 hektar (0,011 persen).

Adapun kategori kontribusi terendah secara total, yaitu “Sangat Rendah” dan “Rendah”, masing-masing hanya mencakup 75,088 hektar (0,015 persen) dan 15.378,262 hektar (3,027 persen). Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar ekoregion di Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara fungsional telah memberikan peran yang signifikan dalam pengurangan risiko bencana.

Secara keseluruhan, pemetaan ini memberikan dasar kuat bagi penetapan kebijakan pengelolaan risiko bencana berbasis lanskap. Perlindungan dan restorasi kawasan gambut serta penguatan kapasitas adaptif di wilayah pesisir perlu mendapat prioritas guna menjaga ketahanan ekologis terhadap dinamika ancaman bencana yang terus berkembang.

d) Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air

Jasa ekosistem dalam bentuk pemurnian air memiliki peran penting dalam menjaga kualitas sumber daya air, terutama dalam konteks lingkungan yang menghadapi tekanan tinggi dari aktivitas manusia. Berdasarkan hasil

analisis tahun 2024, kontribusi terbesar terhadap fungsi ekosistem pemurnian air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada kategori “Sedang”, dengan cakupan 303.685,151 hektar atau sekitar 59,771 persen. Disusul oleh kategori “Sangat Tinggi” sebesar 188.932,027 hektar (37,185 persen), yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah kabupaten memiliki kemampuan ekologis yang cukup baik dalam proses penjernihan alami air (lihat Tabel 2.17).

Tabel 2.17
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pemurnian Air di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	288,773	0,057	27.576,580	5,428		-	2.308,416	0,454
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluvio-marine		-		-	18,613	0,004		-	9,110	0,002
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	6.747,617	1,328	266.089,001	52,371	9,289	0,002	179.931,975	35,414
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	76,455	0,015	9.942,917	1,957	1,061	0,000	6.682,526	1,315
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	303.685,151	59,771	10,350	0,002	188.932,027	37,185

Sumber: Hasil Analisa 2024

Secara ekoregion, lahan gambut kembali muncul sebagai kontributor utama dalam fungsi pemurnian air. Pada kategori “Sedang”, kawasan ini mencakup 266.089,001 hektar (52,371 persen), dan pada kategori “Sangat Tinggi” sebesar 179.931,975 hektar (35,414 persen). Fungsi penting ini menggambarkan peran sistem gambut sebagai biofilter alami yang sangat efektif dalam menyaring kontaminan dan menjaga keseimbangan kualitas air tanah maupun air permukaan.

Dataran aluvial berkontribusi dominan hanya pada kategori “Sedang” dengan luas 27.576,580 hektar (5,428 persen), dan dalam kategori “Sangat Tinggi” hanya mencakup 2.308,416 hektar (0,454 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun luas wilayahnya cukup signifikan,

kapasitas alami dataran aluvial dalam fungsi pemurnian air masih relatif terbatas pada level tertinggi. Sementara itu, wilayah pesisir memberikan kontribusi sedang sebesar 9.942,917 hektar (1,957 persen) dan sangat tinggi sebesar 6.682,526 hektar (1,315 persen). Kontribusi ini, meskipun tidak besar, tetap relevan dalam konteks dinamika perairan pesisir dan filtrasi air melalui ekosistem mangrove dan endapan sedimen.

Dataran fluviomarin dan lembah antar perbukitan menunjukkan kontribusi yang sangat rendah terhadap fungsi ini. Dataran fluviomarin hanya menyumbang 18,613 hektar (0,004 persen) pada kategori “Sedang” dan 9,110 hektar (0,002 persen) pada kategori “Tinggi”, sementara lembah antar perbukitan hanya mencatatkan 58,040 hektar (0,011 persen) dalam kategori “Sedang”. Kategori “Sangat Rendah” dan “Rendah” secara total hanya mencakup masing-masing 1,642 persen dan 1,400 persen, menandakan bahwa sebagian besar bentang lahan di Tanjung Jabung Timur telah memiliki kapasitas ekologis yang memadai dalam proses pemurnian air alami. Dengan demikian, hasil pemetaan ini memberikan arah penting dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Upaya konservasi terhadap lahan gambut dan rehabilitasi sistem aliran air di dataran rendah dapat diperkuat untuk meningkatkan kapasitas pemurnian alami yang menjadi fondasi penting bagi ketahanan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

e) Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah

Pengelolaan limbah yang efektif tidak hanya bergantung pada sistem teknis buatan manusia, tetapi juga sangat ditunjang oleh kemampuan alami suatu ekosistem dalam menyerap, menetralkan, dan mengurai bahan pencemar. Dalam konteks Kabupaten Tanjung Jabung Timur, fungsi pengaturan limbah oleh ekosistem menunjukkan kontribusi ekologis yang signifikan, dengan dominasi luas pada kategori “Sedang” sebesar 339.102,478 ha atau 66,742 persen dari total wilayah yang dianalisis. Ini mengindikasikan

bahwa lebih dari separuh bentang alam kabupaten memiliki kapasitas ekosistem sedang dalam mendukung pengelolaan limbah secara alami.

Tabel 2.18
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	288,773	0,057	29.584,652	5,823		-	300,344	0,059
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluvimarin		-		-	18,613	0,004		-	9,110	0,002
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	6.747,617	1,328	299.574,132	58,962	442,837	0,087	146.013,296	28,738
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	76,455	0,015	9.867,041	1,942	76,937	0,015	6.682,526	1,315
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	339.102,478	66,742	519,774	0,102	153.005,276	30,114

Sumber: Hasil Analisa 2024

Lahan gambut menjadi tulang punggung utama dalam peran ini. Dengan cakupan 299.574,132 hektar (58,962 persen) pada kategori “Sedang”, kawasan ini berperan sebagai sistem penyangga alami yang mampu mengikat dan menetralkan polutan melalui proses biologis dan kimiawi yang berlangsung di dalam struktur tanah gambut. Bahkan pada kategori “Sangat Tinggi”, lahan gambut mencakup 146.013,296 hektar (28,738 persen), memperlihatkan kapasitasnya yang luar biasa dalam pengelolaan limbah berbasis alam.

Kontribusi lainnya berasal dari wilayah dataran aluvial dan pesisir. Dataran aluvial memberikan peran sedang sebesar 29.584,652 hektar (5,823 persen), serta sedikit pada kategori “Sangat Tinggi” seluas 300,344 hektar (0,059 persen). Adapun kawasan pesisir berkontribusi pada peran sedang sebesar 9.867,041 hektar (1,942 persen) dan pada kategori “Sangat Tinggi” sebesar 6.682,526 hektar (1,315 persen). Ini memperlihatkan bahwa sistem

vegetasi pesisir seperti mangrove masih menyimpan potensi sebagai filter alami terhadap limbah, terutama di area muara sungai dan garis pantai.

Sebaliknya, ekoregion lain seperti lembah antar perbukitan dan dataran fluviomarin menunjukkan kontribusi yang sangat rendah. Lembah antar perbukitan hanya tercatat pada kategori “Sedang” sebesar 58,040 hektar (0,011 persen), sementara dataran fluviomarin menyumbang 18,613 hektar (0,004 persen) pada kategori yang sama dan 9,110 hektar (0,002 persen) pada kategori “Tinggi”.

Secara keseluruhan, selain dominasi besar pada kategori “Sedang”, peran jasa ekosistem dalam pengaturan limbah juga terlihat pada kategori “Sangat Tinggi” sebesar 153.005,276 hektar (30,114 persen). Sebaliknya, kategori “Sangat Rendah” dan “Rendah” hanya mencakup 1,642 persen dan 1,400 persen, menunjukkan bahwa sebagian besar ekosistem di wilayah ini telah memiliki fungsi ekologis yang relevan dalam mendukung pengelolaan limbah secara berkelanjutan.

Narasi ini menegaskan pentingnya kebijakan perlindungan lahan gambut dan kawasan pesisir sebagai benteng ekologi dalam mendukung sistem pengelolaan limbah berbasis alam (*nature-based solutions*). Optimalisasi potensi ini perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang memadukan teknologi dan konservasi untuk mencapai ketahanan lingkungan jangka panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

f) Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara

Fungsi pengaturan kualitas udara merupakan salah satu peran ekologis penting yang dijalankan oleh berbagai tipe ekosistem di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan hasil analisis tahun 2019, kontribusi jasa ekosistem terhadap kualitas udara paling dominan berada pada kategori “Tinggi” dengan cakupan sebesar 268.275,082 hektar atau 52,802 persen. Disusul oleh kategori “Sangat Tinggi” sebesar 143.965,669 hektar (28,335 persen) dan kategori “Sedang” sebesar 80.386,777 hektar (15,822 persen).

Sebaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di kabupaten ini memiliki kapasitas ekologis yang kuat dalam mendukung penyerapan dan penyaringan polutan udara secara alami.

Tabel 2.19
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Kualitas Udara di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	288,773	0,057	9.105,974	1,792	20.505,102	4,036	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-		-		-	58,040	0,011		-
Dataran Fluvimarin		-		-	21,123	0,004		-	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	6.747,617	1,328	67.542,557	13,294	239.128,603	47,065	139.359,105	27,429
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	76,455	0,015	3.717,123	0,732	8.583,337	1,689	4.326,044	0,851
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	80.386,777	15,822	268.275,082	52,802	143.965,669	28,335

Sumber: Hasil Analisa 2024

Lahan gambut memberikan kontribusi tertinggi dalam mendukung kualitas udara. Pada kategori “Tinggi”, lahan ini menyumbang sebesar 239.128,603 hektar (47,065 persen), sementara dalam kategori “Sangat Tinggi” mencapai 139.359,105 hektar (27,429 persen). Selain berperan sebagai penyimpan karbon, kawasan gambut juga berfungsi sebagai penyeimbang emisi gas rumah kaca, menjadikannya sangat strategis dalam mitigasi pencemaran udara.

Dataran aluvial memiliki peran yang cukup bervariasi. Wilayah ini menyumbang 9.105,974 hektar (1,792 persen) pada kategori “Sedang” dan 20.505,102 hektar (4,036 persen) pada kategori “Tinggi”, meskipun kontribusi pada kategori “Sangat Tinggi” relatif kecil yakni 273,920 hektar (0,054 persen). Hal ini mencerminkan bahwa fungsi ekologis dataran aluvial dalam

pengaturan udara bersifat pelengkap, tetapi tetap relevan terutama di wilayah padat aktivitas.

Wilayah pesisir dan dataran fluviomarin turut memberikan kontribusi, meskipun dalam skala yang lebih terbatas. Pesisir menyumbang 8.583,337 hektar (1,689 persen) pada kategori “Tinggi” dan 4.326,044 hektar (0,851 persen) pada kategori “Sangat Tinggi”. Adapun dataran fluviomarin mencatatkan 21,123 hektar (0,004 persen) pada kategori “Sedang” dan 6,600 hektar (0,001 persen) pada kategori “Sangat Tinggi”. Sementara lembah antar perbukitan tercatat hanya dalam kategori “Tinggi” seluas 58,040 hektar (0,011 persen). Kategori kontribusi terendah yaitu “Sangat Rendah” dan “Rendah” secara agregat hanya mencakup 8.340,505 hektar (1,642 persen) dan 7.112,845 hektar (1,400 persen), menunjukkan bahwa mayoritas ekoregion memiliki kapasitas sedang hingga tinggi dalam mendukung kualitas udara.

Secara keseluruhan, hasil ini memperkuat urgensi pelestarian dan pengelolaan kawasan gambut serta ekosistem lainnya sebagai penyaring udara alami. Penguatan kebijakan berbasis ekosistem untuk pengendalian pencemaran udara menjadi langkah krusial dalam menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

g) Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami

Penyerbukan alami merupakan salah satu fungsi ekologis penting dalam mendukung produktivitas ekosistem dan ketahanan pangan. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, fungsi jasa ekosistem penyerbukan menunjukkan kontribusi yang sangat dominan dalam kategori “Tinggi” dan “Sangat Tinggi”. Berdasarkan hasil analisis tahun 2024, kategori “Tinggi” mencakup luas 339.611,902 hektar atau 66,842 persen dari total wilayah yang teridentifikasi mendukung proses penyerbukan. Sementara itu, kategori “Sangat Tinggi” mencakup 143.965,669 hektar (28,335 persen), menunjukkan bahwa lebih

dari 95 persen wilayah memiliki kapasitas yang sangat signifikan dalam mendukung keberlangsungan proses penyerbukan alami (lihat Tabel 2.20).

Lahan gambut merupakan ekoregion dengan kontribusi terbesar dalam kedua kategori tersebut. Kawasan ini menyumbang 300.007,680 hektar (59,047 persen) pada kategori “Tinggi” dan 139.359,105 hektar (27,429 persen) pada kategori “Sangat Tinggi”. Peran lahan gambut dalam menjaga habitat penyerbuk alami seperti serangga dan burung, menjadikannya aset ekologis strategis dalam menjaga stabilitas produksi tanaman serta regenerasi vegetasi alami.

Tabel 2.20
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	31,307	0,006	1.445,862	0,285	-	-	29.584,652	5,823	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan	-	-	-	-	-	-	58,040	0,011	-	-
Dataran Fluvimarin	-	-	2,510	0,000	-	-	18,613	0,004	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	75,551	0,015	20.253,690	3,986	-	-	300.007,680	59,047	139.359,105	27,429
Pesisir (Coast)	1,061	0,000	2.693,326	0,530	-	-	9.942,917	1,957	4.326,044	0,851
Total	107,919	0,021	24.395,388	4,801	-	-	339.611,902	66,842	143.965,669	28,335

Sumber: Hasil Analisa 2024

Kontribusi signifikan lainnya datang dari dataran aluvial, khususnya pada kategori “Tinggi” dengan luas 29.584,652 hektar (5,823 persen) dan “Sangat Tinggi” sebesar 273,920 hektar (0,054 persen). Ekoregion pesisir juga memberikan dukungan melalui keberadaan vegetasi mangrove dan ekoton pesisir yang menjadi habitat berbagai spesies penyerbuk, dengan kontribusi sebesar 9.942,917 hektar (1,957 persen) pada kategori “Tinggi” dan 4.326,044 hektar (0,851 persen) pada kategori “Sangat Tinggi”.

Sebaliknya, peran pada kategori “Rendah” dan “Sangat Rendah” tercatat sangat kecil, masing-masing hanya 24.395,388 hektar (4,801 persen) dan 107,919 hektar (0,021 persen). Dataran fluvimarin menyumbang sangat

terbatas di kategori “Rendah” sebesar 2,510 hektar, sementara lembah antar perbukitan hanya tercatat pada kategori “Tinggi” dengan 58,040 hektar (0,011 persen). Tidak terdapat kontribusi dalam kategori “Sedang”, mengindikasikan bahwa fungsi penyerbukan di kabupaten ini cenderung terpolarisasi antara peran sangat tinggi dan rendah, tergantung kondisi ekosistemnya.

Hasil ini menegaskan pentingnya pelestarian kawasan gambut, pesisir, dan dataran aluvial sebagai habitat vital bagi spesies penyerbuk alami. Strategi perlindungan keanekaragaman hayati harus dikaitkan langsung dengan pemanfaatan jasa ekosistem penyerbukan untuk mendukung keberlanjutan sistem pertanian dan konservasi lanskap alami di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

h) Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dan penyakit merupakan salah satu fungsi ekologis penting dari jasa ekosistem yang mendukung ketahanan pertanian dan kesehatan lingkungan. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, peran ekosistem dalam mengendalikan hama dan penyakit didominasi oleh kategori “Tinggi” dan “Sangat Tinggi”, yang secara akumulatif mencakup lebih dari 80 persen dari keseluruhan luas wilayah yang dianalisis.

Tabel 2.21 menunjukkan bahwa kategori “Tinggi” tercatat sebagai kontribusi terbesar, mencakup 268.275,082 hektar atau 52,802 persen dari total wilayah. Sedangkan kategori “Sangat Tinggi” mencakup 143.965,669 hektar (28,335 persen). Lahan gambut menunjukkan kontribusi paling signifikan dalam fungsi ini, yaitu sebesar 239.128,603 hektar (47,065 persen) dalam kategori “Tinggi” dan 139.359,105 hektar (27,429 persen) dalam kategori “Sangat Tinggi”. Keanekaragaman hayati dan struktur ekosistem gambut yang kompleks memungkinkan terbentuknya sistem pengendalian biologis alami terhadap populasi hama dan penyakit tanaman maupun vektor penyakit.

Selain gambut, dataran aluvial juga menunjukkan kontribusi penting, khususnya pada kategori “Tinggi” sebesar 20.505,102 hektar (4,036 persen) dan “Sedang” seluas 9.079,550 hektar (1,787 persen). Ini mengindikasikan peran dataran rendah yang cenderung subur dalam mendukung keseimbangan hayati yang membantu pengendalian organisme pengganggu tanaman secara alami.

Tabel 2.21

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Penyakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	31,307	0,006	1.445,862	0,285	9.079,550	1,787	20.505,102	4,036	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-		-		-	58,040	0,011		-
Dataran Fluviomarin		-	2,510	0,000	18,613	0,004		-	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	66,262	0,013	20.262,979	3,988	60.879,077	11,982	239.128,603	47,065	139.359,105	27,429
Pesisir (Coast)		-	2.694,387	0,530	1.359,580	0,268	8.583,337	1,689	4.326,044	0,851
Total	97,569	0,019	24.405,738	4,804	71.336,820	14,040	268.275,082	52,802	143.965,669	28,335

Sumber: Hasil Analisa 2024

Ekoregion pesisir turut memberikan peran dalam fungsi ini. Pada kategori “Tinggi”, kawasan pesisir menyumbang 8.583,337 hektar (1,689 persen), sedangkan pada kategori “Sangat Tinggi” mencapai 4.326,044 hektar (0,851 persen). Vegetasi pantai, seperti mangrove, memiliki peran sebagai habitat alami predator alami hama serta penyeimbang sistem ekologi di wilayah muara. Sebaliknya, lembah antar perbukitan hanya tercatat memberikan kontribusi kecil dalam kategori “Tinggi” sebesar 58,040 hektar (0,011 persen). Sementara dataran fluviomarin mencatat peran yang sangat terbatas, yakni hanya 18,613 hektar (0,004 persen) dalam kategori “Sedang” dan 6,600 hektar (0,001 persen) dalam kategori “Sangat Tinggi”. Adapun kategori kontribusi terendah, yakni “Sangat Rendah” dan “Rendah”, hanya mencakup masing-masing 0,019 persen dan 4,804 persen dari total luasan. Hal

ini mempertegas bahwa secara umum, wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kapasitas ekologis yang baik dalam mendukung pengendalian hama dan penyakit melalui mekanisme alami.

Hasil ini menggarisbawahi pentingnya strategi konservasi dan perlindungan ekosistem, khususnya lahan gambut, sebagai bagian dari pendekatan ekosistem dalam mengelola risiko hama dan penyakit. Pendekatan ini bukan hanya mendukung pertanian berkelanjutan, tetapi juga memperkuat daya dukung lingkungan hidup secara keseluruhan.

i) Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Pengaturan iklim merupakan salah satu fungsi ekosistem yang paling krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, khususnya di wilayah tropis basah seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 2.22

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	541,302	0,107	3.369,728	0,663	18.102,704	3,563		-	97.393,342	19,169
Dendang	781,014	0,154	1.517,753	0,299	26.344,358	5,185		-	5.649,334	1,112
Geragai	1.355,878	0,267	484,500	0,095	33.490,755	6,592	14.483,955	2,851	1.366,830	0,269
Kuala Jambi	315,597	0,062	1.014,521	0,200	9.857,375	1,940		-	767,799	0,151
Mendahara	474,745	0,093	712,487	0,140	40.364,329	7,944	7.503,973	1,477	3.477,014	0,684
Mendahara Ulu	378,378	0,074	2.760,287	0,543	32.569,037	6,410	12.940,418	2,547	10.696,851	2,105
Muara Sabak Barat	1.027,155	0,202	842,430	0,166	23.168,229	4,560	998,405	0,197	2.592,094	0,510
Muara Sabak Timur	953,897	0,188	1.820,908	0,358	37.680,784	7,416		-	45,136	0,009
Nipah Panjang	450,069	0,089	783,264	0,154	26.636,527	5,243		-	1.419,981	0,279
Rantau Rasau	1.659,766	0,327	713,622	0,140	17.965,206	3,536		-	7,820	0,002
Sadu	402,704	0,079	2.143,302	0,422	37.505,847	7,382		-	20.549,468	4,045
Total	8.340,505	1,642	16.162,802	3,181	303.685,151	59,771	35.926,751	7,071	143.965,669	28,335

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Tabel 2.22 menunjukkan hasil analisis tahun 2024, kontribusi jasa ekosistem dalam fungsi pengaturan iklim tersebar secara tidak merata di setiap kecamatan, dengan dominasi luas berada pada kategori “Sedang” sebesar 303.685,151 hektar (59,771 persen), disusul oleh kategori “Sangat Tinggi” sebesar 143.965,669 hektar (28,335%), dan “Tinggi” sebesar 35.926,751 hektar (7,071 persen).

Kecamatan yang memberikan kontribusi paling besar pada kategori “Sangat Tinggi” adalah Berbak, dengan luas mencapai 97.393,342 hektar (19,169 persen), menunjukkan bahwa wilayah ini menyimpan potensi ekologi sangat penting dalam menyerap karbon dan menstabilkan iklim mikro. Disusul oleh Sadu sebesar 20.549,468 hektar (4,045 persen), dan Mendahara Ulu dengan 10.696,851 hektar (2,105 persen). Ketiganya menjadi wilayah prioritas dalam strategi konservasi berbasis jasa ekosistem iklim. Sementara itu, pada kategori “Tinggi”, Geragai dan Mendahara Ulu juga menonjol, masing-masing sebesar 14.483,955 hektar (2,851 persen) dan 12.940,418 hektar (2,547 persen), mengindikasikan stabilitas ekosistem yang cukup baik dalam fungsi pengaturan iklim di luar zona utama konservasi. Kecamatan Mendahara, dengan luas 7.503,973 hektar (1,477 persen), juga masuk dalam jajaran penting.

Kategori “Sedang” tersebar luas di hampir seluruh kecamatan, dengan penyumbang terbesar adalah Mendahara sebesar 40.364,329 hektar (7,944 persen) dan Muara Sabak Timur dengan 37.680,784 hektar (7,416 persen), disusul oleh Sadu dan Geragai masing-masing sekitar 7 persen dari total wilayah. Ini mengindikasikan kapasitas ekosistem yang cukup memadai untuk mempertahankan fungsi pengaturan iklim secara merata di seluruh wilayah kabupaten.

Pada sisi lain, kecamatan dengan kontribusi rendah dan sangat rendah tercatat antara lain Rantau Rasau (1.659,766 hektar dan 713,622 hektar dalam kategori sangat rendah dan rendah), serta Kuala Jambi dan Berbak, meskipun memiliki peran penting dalam kategori sangat tinggi, juga menunjukkan area

dengan kapasitas rendah dalam beberapa segmen wilayahnya. Hal ini menunjukkan adanya variasi spasial yang perlu dikelola dengan pendekatan berbeda.

Secara keseluruhan, persebaran peran jasa ekosistem pengaturan iklim menurut kecamatan memberikan dasar penting bagi perencanaan wilayah berbasis ekosistem. Kecamatan dengan kapasitas sangat tinggi perlu difokuskan pada kebijakan perlindungan dan pengendalian konversi lahan, sementara wilayah dengan kapasitas sedang hingga rendah dapat diarahkan untuk program restorasi dan penguatan fungsi vegetasi penyangga iklim.

j) Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Menurut Kecamatan

Fungsi pengaturan tata air merupakan komponen vital dari jasa ekosistem yang menopang keseimbangan hidrologis suatu wilayah, terutama di daerah dengan tekanan alih fungsi lahan dan risiko banjir seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan hasil analisis tahun 2024, fungsi ini didominasi oleh kontribusi ekosistem pada kategori “Sedang” yang mencakup luas 303.165,377 hektar atau 59,669 persen dari total wilayah yang dianalisis. Diikuti oleh kategori “Sangat Tinggi” sebesar 153.015,626 hektar (30,116 persen) dan “Tinggi” sebesar 36.446,525 hektar (7,173 persen) (lihat Tabel 2.23).

Kecamatan Berbak mencatat kontribusi paling menonjol pada kategori “Sangat Tinggi”, yakni sebesar 100.094,135 hektar (19,700 persen), menunjukkan peran penting wilayah ini dalam menyimpan air dan menstabilkan tata air alami. Selain itu, Sadu dan Mendahara Ulu juga termasuk penyumbang utama dengan masing-masing 20.720,645 hektar (4,078 persen) dan 10.838,637 hektar (2,133 persen) dalam kategori yang sama. Ketiganya menjadi area prioritas konservasi tata air berbasis ekosistem. Dalam kategori “Tinggi”, kecamatan Geragai dan Mendahara menonjol dengan luasan masing-masing 14.483,955 hektar (2,851 persen) dan 7.580,910 hektar (1,492

persen). Kecamatan lain seperti Mendahara Ulu dan Muara Sabak Barat juga menunjukkan peran penting di kategori ini.

Tabel 2.23

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	541,302	0,107	668,935	0,132	17.664,853	3,477	437,851	0,086	100.094,135	19,700
Dendang	781,014	0,154	966,168	0,190	26.344,358	5,185	-	-	6.200,919	1,220
Geragai	1.355,878	0,267	344,317	0,068	33.490,755	6,592	14.483,955	2,851	1.507,013	0,297
Kuala Jambi	315,597	0,062	52,490	0,010	9.857,375	1,940	-	-	1.729,830	0,340
Mendahara	474,745	0,093	-	-	40.287,392	7,929	7.580,910	1,492	4.189,501	0,825
Mendahara Ulu	378,378	0,074	2.618,501	0,515	32.564,051	6,409	12.945,404	2,548	10.838,637	2,133
Muara Sabak Barat	1.027,155	0,202	310,433	0,061	23.168,229	4,560	998,405	0,197	3.124,091	0,615
Muara Sabak Timur	953,897	0,188	-	-	37.680,784	7,416	-	-	1.866,044	0,367
Nipah Panjang	450,069	0,089	179,876	0,035	26.636,527	5,243	-	-	2.023,369	0,398
Rantau Rasau	1.659,766	0,327	-	-	17.965,206	3,536	-	-	721,442	0,142
Sadu	402,704	0,079	1.972,125	0,388	37.505,847	7,382	-	-	20.720,645	4,078
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	303.165,377	59,669	36.446,525	7,173	153.015,626	30,116

Sumber: Hasil Analisa 2024

Kapasitas sedang dalam pengaturan tata air merata di seluruh kecamatan. Mendahara menyumbang tertinggi pada kategori ini, yakni 40.287,392 hektar (7,929 persen), diikuti oleh Muara Sabak Timur sebesar 37.680,784 hektar (7,416 persen) dan Sadu sebesar 37.505,847 hektar (7,382 persen). Kontribusi signifikan lainnya datang dari Geragai (33.490,755 hektar, 6,592 persen) dan Mendahara Ulu (32.564,051 hektar, 6,409 persen).

Sementara itu, kontribusi pada kategori “Rendah” dan “Sangat Rendah” relatif kecil. Hanya sekitar 1,400 persen dan 1,642 persen dari total luasan yang masuk dalam kategori ini, menandakan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi tata kelola air alami yang baik.

Data ini memberikan arah kebijakan yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam penguatan fungsi tata air secara ekologis. Kecamatan dengan kontribusi sangat tinggi perlu diberikan perhatian khusus melalui upaya perlindungan lahan basah, rehabilitasi daerah tangkapan air, dan pengendalian konversi lahan. Sementara wilayah yang tergolong dalam kapasitas sedang hingga tinggi dapat dioptimalkan melalui integrasi infrastruktur hijau dan pengelolaan lanskap terpadu.

k) Jasa Ekosistem Pengaturan Bencana Menurut Kecamatan

Pengaturan bencana melalui mekanisme ekosistem menjadi salah satu komponen penting dalam daya dukung lingkungan hidup, khususnya dalam mengantisipasi risiko banjir, kebakaran lahan gambut, dan abrasi pantai di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan hasil analisis tahun 2024, sebagian besar fungsi pengaturan bencana tercatat dalam kategori “Sedang” dengan luasan 303.695,501 hektar atau sekitar 59,773 persen dari total wilayah yang dikaji. Selanjutnya, kategori “Sangat Tinggi” mencakup 143.965,669 hektar (28,335 persen) dan “Tinggi” sebesar 44.966,358 hektar (8,850 persen).

Kecamatan Berbak memiliki kontribusi tertinggi dalam kategori “Sangat Tinggi”, yakni sebesar 97.393,342 hektar (19,169 persen). Hal ini memperkuat posisi Berbak sebagai kawasan strategis dalam mitigasi risiko bencana skala besar, terutama mengingat keberadaan kawasan konservasi dan ekosistem gambut yang luas. Selain itu, Sadu dan Mendahara Ulu juga termasuk dalam jajaran penting, dengan kontribusi masing-masing 20.549,468 hektar (4,045 persen) dan 10.696,851 hektar (2,105 persen) di kategori yang sama.

Untuk kategori “Tinggi”, kecamatan Geragai mencatatkan 14.624,138 hektar (2,878 persen), diikuti oleh Mendahara Ulu dengan 13.082,204 hektar (2,575 persen) dan Mendahara sebesar 8.216,460 hektar (1,617 persen). Wilayah-wilayah ini berfungsi sebagai penyangga penting dalam

memperlambat dampak bencana, baik melalui serapan air maupun penurunan potensi api di lahan gambut.

Tabel 2.24

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak		-	1.210,237	0,238	18.102,704	3,563	2.700,793	0,532	97.393,342	19,169
Dendang	66,262	0,013	1.680,920	0,331	26.344,358	5,185	551,585	0,109	5.649,334	1,112
Geragai		-	1.700,195	0,335	33.490,755	6,592	14.624,138	2,878	1.366,830	0,269
Kuala Jambi		-	368,087	0,072	9.857,375	1,940	962,031	0,189	767,799	0,151
Mendahara		-	474,745	0,093	40.364,329	7,944	8.216,460	1,617	3.477,014	0,684
Mendahara Ulu	8,826	0,002	2.988,053	0,588	32.569,037	6,410	13.082,204	2,575	10.696,851	2,105
Muara Sabak Barat		-	1.337,588	0,263	23.168,229	4,560	1.530,402	0,301	2.592,094	0,510
Muara Sabak Timur		-	953,897	0,188	37.691,134	7,418	1.810,558	0,356	45,136	0,009
Nipah Panjang		-	629,945	0,124	26.636,527	5,243	603,388	0,119	1.419,981	0,279
Rantau Rasau		-	1.659,766	0,327	17.965,206	3,536	713,622	0,140	7,820	0,002
Sadu		-	2.374,829	0,467	37.505,847	7,382	171,177	0,034	20.549,468	4,045
Total	75,088	0,015	15.378,262	3,027	303.695,501	59,773	44.966,358	8,850	143.965,669	28,335

Sumber: Hasil Analisa 2024

Kontribusi kategori “Sedang” tersebar merata, dengan nilai tertinggi berasal dari Mendahara (40.364,329 hektar, 7,944 persen), Muara Sabak Timur (37.691,134 hektar, 7,418 persen), dan Sadu (37.505,847 hektar, 7,382 persen). Distribusi ini mencerminkan kapasitas ekologis yang cukup luas di berbagai kecamatan dalam mendukung fungsi mitigatif secara pasif terhadap potensi bencana. Sebaliknya, kontribusi kecamatan dalam kategori “Rendah” dan “Sangat Rendah” relatif kecil. Kategori “Rendah” didominasi oleh Geragai (1.700,195 hektar, 0,335 persen) dan Mendahara Ulu (2.988,053 hektar, 0,588 persen), sementara kategori “Sangat Rendah” hanya tercatat 75,088 hektar (0,015 persen) secara total, menandakan bahwa sebagian besar wilayah sudah berada dalam ambang fungsi mitigasi yang optimal.

Distribusi spasial ini memperkuat pentingnya pendekatan ekosistem dalam pengurangan risiko bencana. Wilayah dengan kontribusi sangat tinggi

dan tinggi perlu difokuskan sebagai zona konservasi fungsional dan prioritas penanggulangan bencana berbasis alam, sementara wilayah berkapasitas sedang dapat diarahkan pada program rehabilitasi dan peningkatan fungsi tata ruang yang mendukung ketahanan iklim. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, keberadaan jasa layanan ekosistem, khususnya dalam kategori jasa pengaturan berperan penting dalam menjaga fungsi lingkungan hidup yang menopang kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.

I) Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Menurut Kecamatan

Salah satu fungsi utama dari jasa pengaturan adalah pemurnian air atau kemampuan ekosistem dalam menyaring dan membersihkan air secara alami. Fungsi ini sangat vital dalam mempertahankan kualitas air bersih bagi masyarakat serta mengurangi beban sistem pengolahan air buatan.

Tabel 2.25

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pemurnian Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	541,302	0,107	668,935	0,132	18.102,704	3,563		-	100.094,135	19,700
Dendang	781,014	0,154	966,168	0,190	26.344,358	5,185		-	6.200,919	1,220
Geragai	1.355,878	0,267	344,317	0,068	33.490,755	6,592		-	15.990,968	3,147
Kuala Jambi	315,597	0,062	52,490	0,010	9.857,375	1,940		-	1.729,830	0,340
Mendahara	474,745	0,093		-	40.364,329	7,944		-	11.693,474	2,301
Mendahara Ulu	378,378	0,074	2.618,501	0,515	32.569,037	6,410		-	23.779,055	4,680
Muara Sabak Barat	1.027,155	0,202	310,433	0,061	23.168,229	4,560		-	4.122,496	0,811
Muara Sabak Timur	953,897	0,188		-	37.680,784	7,416	10,350	0,002	1.855,694	0,365
Nipah Panjang	450,069	0,089	179,876	0,035	26.636,527	5,243		-	2.023,369	0,398
Rantau Rasau	1.659,766	0,327		-	17.965,206	3,536		-	721,442	0,142
Sadu	402,704	0,079	1.972,125	0,388	37.505,847	7,382		-	20.720,645	4,078
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	303.685,151	59,771	10,350	0,002	188.932,027	37,185

Sumber: Hasil Analisa 2024

Hasil analisa tahun 2024 menunjukkan bahwa jasa pemurnian air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebar secara tidak merata antar

kecamatan, dan diklasifikasikan ke dalam lima kategori ekoregion: Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi. Secara keseluruhan, kategori Sedang mendominasi dengan luas mencapai 303.685,15 ha atau sekitar 59,77 persen dari total wilayah jasa ekosistem pemurnian air. Diikuti oleh kategori Sangat Tinggi seluas 188.932,03 ha (37,19 persen) dan Sangat Rendah sebesar 8.340,51 ha (1,64 persen). Sementara kategori Rendah mencakup 7.112,85 ha (1,40 persen) dan kategori Tinggi sangat terbatas yaitu hanya 10,35 ha (0,002 persen).

Secara spasial, Kecamatan Berbak tercatat sebagai wilayah dengan luasan terbesar dalam kategori Sangat Tinggi, yaitu 100.094,14 Ha atau 19,70 persen, yang menunjukkan pentingnya kawasan ini dalam menjaga kualitas sumber daya air. Wilayah lain dengan kontribusi signifikan adalah Sadu (20.720,65 ha, 4,08 persen), Mendahara Ulu (23.779,06 ha, 4,68 persen), dan Geragai (15.990,97 ha, 3,15%). Kategori Sedang juga mendominasi di hampir seluruh kecamatan seperti Mendahara (40.364,33 ha) dan Muara Sabak Timur (37.680,78 ha), yang menegaskan luasnya area yang berperan aktif dalam proses pemurnian air alami.

Sementara itu, beberapa wilayah seperti Muara Sabak Timur hanya mencatat 10,35 ha (0,002 persen) dalam kategori Tinggi, dan sejumlah kecamatan lain seperti Rantau Rasau, Dendang, dan Kuala Jambi menunjukkan minimnya luas wilayah dalam kategori Sangat Tinggi, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam peningkatan fungsi ekosistem pemurnian air di masa mendatang.

Distribusi jasa ekosistem ini memberikan dasar penting bagi perumusan kebijakan lingkungan daerah, khususnya dalam konteks konservasi daerah tangkapan air, restorasi lahan basah, dan pengelolaan tata ruang berbasis fungsi ekologis. Perencanaan berbasis data spasial ini akan memperkuat upaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai ketahanan air dan pembangunan yang selaras dengan kapasitas alam.

m) Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah Menurut Kecamatan

Dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat, salah satu aspek penting dari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah keberadaan jasa layanan ekosistem, khususnya dalam kategori jasa pengaturan limbah. Fungsi ekologis ini mencerminkan kemampuan alami suatu wilayah dalam menyerap, menguraikan, dan menetralkan limbah, baik limbah domestik maupun industri, sehingga mampu mencegah pencemaran yang berdampak negatif terhadap kesehatan lingkungan dan manusia.

Tabel 2.26

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	541,302	0,107	668,935	0,132	17.664,853	3,477	437,851	0,086	100.094,135	19,700
Dendang	781,014	0,154	966,168	0,190	26.344,358	5,185	-	-	6.200,919	1,220
Geragai	1.355,878	0,267	344,317	0,068	47.974,710	9,442	-	-	1.507,013	0,297
Kuala Jambi	315,597	0,062	52,490	0,010	9.857,375	1,940	-	-	1.729,830	0,340
Mendahara	474,745	0,093	-	-	47.791,365	9,406	76,937	0,015	4.189,501	0,825
Mendahara Ulu	378,378	0,074	2.618,501	0,515	45.504,469	8,956	4,986	0,001	10.838,637	2,133
Muara Sabak Barat	1.027,155	0,202	310,433	0,061	24.166,634	4,756	-	-	3.124,091	0,615
Muara Sabak Timur	953,897	0,188	-	-	37.691,134	7,418	-	-	1.855,694	0,365
Nipah Panjang	450,069	0,089	179,876	0,035	26.636,527	5,243	-	-	2.023,369	0,398
Rantau Rasau	1.659,766	0,327	-	-	17.965,206	3,536	-	-	721,442	0,142
Sadu	402,704	0,079	1.972,125	0,388	37.505,847	7,382	-	-	20.720,645	4,078
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	339.102,478	66,742	519,774	0,102	153.005,276	30,114

Sumber: Hasil Analisa 2024

Berdasarkan hasil analisis tahun 2024, distribusi jasa ekosistem pengaturan limbah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diklasifikasikan ke dalam lima kategori ekoregion: Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi. Secara keseluruhan, kategori Sedang mendominasi dengan total luasan 339.102,48 ha atau setara dengan 66,74 persen dari total ekosistem

pengatur limbah. Selanjutnya, kategori Sangat Tinggi mencakup 153.005,28 ha (30,11 persen), sedangkan kategori Rendah dan Sangat Rendah masing-masing seluas 7.112,85 ha (1,40%) dan 8.340,51 ha (1,64 persen). Adapun kategori Tinggi sangat terbatas, yakni hanya 519,77 ha atau 0,10 persen dari total wilayah.

Secara spasial, Kecamatan Berbak tercatat sebagai wilayah dengan kontribusi terbesar dalam kategori Sangat Tinggi, yaitu seluas 100.094,14 ha (19,70 persen). Disusul oleh Sadu (20.720,65 Ha, 4,08 persen) dan Mendahara Ulu (10.838,64 ha, 2,13 persen). Wilayah lain seperti Mendahara (47.791,37 ha) dan Geragai (47.974,71 ha) memiliki kontribusi sangat besar dalam kategori Sedang, mengindikasikan kemampuan alami yang cukup tinggi dalam pengolahan limbah. Namun demikian, beberapa wilayah seperti Mendahara dan Mendahara Ulu juga menunjukkan nilai kecil dalam kategori Tinggi (masing-masing hanya 76,94 ha dan 4,99 ha), yang menandakan keterbatasan fungsi penyangga di bagian tertentu wilayahnya. Sementara itu, kecamatan seperti Kuala Jambi, Rantau Rasau, dan Nipah Panjang memiliki distribusi jasa pengatur limbah yang relatif terbatas pada kategori rendah dan sangat rendah, menunjukkan kebutuhan akan intervensi kebijakan pengelolaan limbah yang lebih aktif, termasuk melalui pendekatan ekosistem berbasis kawasan.

Dengan demikian, informasi spasial ini menjadi dasar strategis dalam perencanaan pengelolaan limbah daerah, penetapan kawasan lindung, dan penguatan tata kelola lingkungan berbasis jasa ekosistem. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu menjadikan data ini sebagai referensi dalam merumuskan program-program prioritas yang bersifat preventif dan ekologis terhadap potensi beban pencemaran yang terus meningkat.

n) Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara Menurut Kecamatan

Dalam konteks perencanaan pembangunan berkelanjutan, jasa pengaturan kualitas udara merupakan bagian penting dari klasifikasi jasa

ekosistem yang menopang daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan hasil analisis tahun 2024, distribusi jasa ekosistem kualitas udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dikategorikan ke dalam lima kelas, yaitu: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, yang tersebar di 11 kecamatan (lihat Tabel 2.27).

Tabel 2.27

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Kualitas Udara Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	541,302	0,107	668,935	0,132	16.044,021	3,158	4.759,476	0,937	97.393,342	19,169
Dendang	781,014	0,1537184	966,168	0,1901603	16.525,427	3,252519	10.370,516	2,0411152	5.649,334	1,1118966
Geragai	1.355,878	0,2668626	344,317	0,0677681	4.619,113	0,9091295	43.495,780	8,5607985	1.366,830	0,2690182
Kuala Jambi	315,597	0,062	52,490	0,010	1.349,012	0,266	9.470,394	1,864	767,799	0,151
Mendahara	474,745	0,093	-	-	3.181,962	0,626	45.398,827	8,935	3.477,014	0,684
Mendahara Ulu	378,378	0,074	2.618,501	0,515	5.420,739	1,067	40.230,502	7,918	10.696,851	2,105
Muara Sabak Barat	1.027,155	0,202	310,433	0,061	9.895,074	1,948	14.803,557	2,914	2.592,094	0,510
Muara Sabak Timur	953,897	0,188	-	-	3.371,506	0,664	36.130,186	7,111	45,136	0,0088836
Nipah Panjang	450,069	0,089	179,876	0,035	4.163,273	0,819	23.076,642	4,542	1.419,981	0,2794793
Rantau Rasau	1.659,766	0,327	-	-	1.194,390	0,235	17.484,438	3,441	7,820	0,0015391
Sadu	402,704	0,079	1.972,125	0,388	14.622,260	2,878	23.054,764	4,5376169	20.549,468	4,0445269
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	80.386,777	15,822	268.275,082	52,802	143.965,669	28,335

Sumber: Hasil Analisa 2024

Secara total, luas wilayah dengan kategori sangat tinggi dalam memberikan jasa pengaturan kualitas udara mencapai 143.965,67 hektare atau 28,34 persen dari total wilayah yang dianalisis. Kecamatan Berbak tercatat sebagai wilayah dengan kontribusi tertinggi dalam kategori ini, yaitu 97.393,34 hektare atau 19,17 persen, disusul oleh Kecamatan Mendahara (3.477,01 ha; 0,68 persen) dan Mendahara Ulu (10.696,85 ha; 2,10 persen).

Sebaliknya, kecamatan seperti Muara Sabak Timur (45,14 ha; 0,009 persen) dan Rantau Rasau (7,82 ha; 0,0015 persen) menunjukkan peran yang sangat terbatas dalam kategori sangat tinggi.

Kategori tinggi memiliki distribusi luas terbesar, yaitu mencapai 268.275,08 hektare atau 52,80 persen, dengan Kecamatan Geragai (43.495,78 ha; 8,56 persen) dan Mendahara (45.398,83 ha; 8,93 persen) sebagai penyumbang utama. Sementara itu, kategori sedang mencakup 80.386,78 hektare (15,82 persen), dengan konsentrasi tinggi di Kecamatan Dendang dan Sadu. Kategori rendah dan sangat rendah secara berturut-turut hanya mencakup 7.112,85 hektare (1,40 persen) dan 8.340,51 hektare (1,64 persen).

Distribusi ini mencerminkan adanya kesenjangan spasial dalam kontribusi ekoregion terhadap penyediaan jasa kualitas udara. Wilayah dengan hutan lebat dan tutupan vegetasi alami umumnya berada dalam kategori tinggi dan sangat tinggi, sehingga menegaskan pentingnya perlindungan kawasan ini dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan.

o) Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami Menurut Kecamatan

Penyerbukan alami merupakan salah satu bentuk jasa pengaturan yang sangat vital dalam menjaga keberlanjutan ekosistem, terutama dalam mendukung produksi pertanian, menjaga keanekaragaman hayati, dan keseimbangan rantai makanan. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, distribusi dan peran jasa ekosistem penyerbukan alami telah dipetakan berdasarkan lima kategori tingkat peran: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, berdasarkan luasan (dalam hektar) dan persentase wilayah per kecamatan.

Tabel 2.28

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	541,302	0,107	668,935	0,132	16.044,021	3,158	4.759,476	0,937	97.393,342	19,169
Dendang	781,014	0,1537184	966,168	0,1901603	16.525,427	3,252519	10.370,516	2,0411152	5.649,334	1,1118966
Geragai	1.355,878	0,2668626	344,317	0,0677681	4.619,113	0,9091295	43.495,780	8,5607985	1.366,830	0,2690182
Kuala Jambi	315,597	0,062	52,490	0,010	1.349,012	0,266	9.470,394	1,864	767,799	0,151
Mendahara	474,745	0,093	-	-	3.181,962	0,626	45.398,827	8,935	3.477,014	0,684
Mendahara Ulu	378,378	0,074	2.618,501	0,515	5.420,739	1,067	40.230,502	7,918	10.696,851	2,105
Muara Sabak Barat	1.027,155	0,202	310,433	0,061	9.895,074	1,948	14.803,557	2,914	2.592,094	0,510
Muara Sabak Timur	953,897	0,188	-	-	3.371,506	0,664	36.130,186	7,111	45,136	0,0088836
Nipah Panjang	450,069	0,089	179,876	0,035	4.163,273	0,819	23.076,642	4,542	1.419,981	0,2794793
Rantau Rasau	1.659,766	0,327	-	-	1.194,390	0,235	17.484,438	3,441	7,820	0,0015391
Sadu	402,704	0,079	1.972,125	0,388	14.622,260	2,878	23.054,764	4,5376169	20.549,468	4,0445269
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	80.386,777	15,822	268.275,082	52,802	143.965,669	28,335

Sumber: Hasil Analisa 2024

Berdasarkan hasil analisis tahun 2024, jasa penyerbukan alami paling dominan berada dalam kategori tinggi, yang mencakup 268.275,08 hektare atau sekitar 52,80 persen dari total wilayah yang dianalisis. Kecamatan dengan kontribusi terbesar dalam kategori ini antara lain Mendahara (45.398,83 ha; 8,94 persen), Geragai (43.495,78 ha; 8,56 persen), dan Muara Sabak Timur (36.130,19 ha; 7,11 persen). Sementara itu, kategori sangat tinggi memiliki total luasan sebesar 143.965,67 hektar atau 28,33 persen. Kecamatan Berbak menjadi penyumbang tertinggi dalam kategori ini, yaitu 97.393,34 hektar atau 19,17 persen, disusul Mendahara Ulu (10.696,85 ha; 2,11 persen) dan Sadu (20.549,47 ha; 4,04 persen). Adapun kategori sedang mencakup 80.386,78 hektare atau 15,82 persen, tersebar merata di sebagian besar kecamatan. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah masing-masing hanya

mencakup 7.112,85 hektare (1,40 persen) dan 8.340,51 hektare (1,64 persen), dengan kontribusi terbesar berasal dari kecamatan seperti Muara Sabak Barat dan Rantau Rasau.

Distribusi spasial jasa penyerbukan alami ini menunjukkan pentingnya kawasan ekoregion tertentu dalam menopang fungsi ekologis yang mendukung produksi pertanian dan ketahanan pangan. Data ini menjadi dasar strategis dalam pengambilan kebijakan tata ruang dan perlindungan kawasan bernilai ekosistem tinggi untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

p) Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama Menurut Kecamatan

Pengendalian hama secara alami merupakan bagian dari jasa pengaturan dalam ekosistem yang berperan penting menjaga keseimbangan hayati dan produktivitas lahan pertanian. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, analisis spasial tahun 2024 menunjukkan bahwa distribusi jasa ekosistem pengendalian hama tersebar dengan tingkat intensitas berbeda di seluruh kecamatan, diklasifikasikan ke dalam lima kategori: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi (lihat Tabel 2.29).

Sebagian besar wilayah berada pada kategori tinggi, dengan total luas mencapai 268.275,08 hektar atau 52,80 persen. Kecamatan-kecamatan dengan kontribusi terbesar pada kategori ini meliputi Mendahara (45.398,83 hektar; 8,94 persen), Geragai (43.495,78 hektar; 8,56 persen), serta Muara Sabak Timur (36.130,19 hektar; 7,11 persen). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki kapasitas ekosistem yang signifikan dalam mendukung fungsi pengendalian hama alami.

Tabel 2.29

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak		-	3.911,030	0,770	13.343,228	2,626	4.759,476	0,937	97.393,342	19,169
Dendan	66,2	0,01304	2.232,50	0,43939	15.973,8	3,14395	10.370,51	2,04111	5.649,334	1,11189

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
g	62	16	5	95	42	65	6	52		66
Geragai		0	1.840,378	0,3622215	4.478,930	0,8815388	43.495,780	8,5607985	1.366,830	0,2690182
Kuala Jambi		-	1.330,118	0,262	386,981	0,076	9.470,394	1,864	767,799	0,151
Mendahara		-	1.187,232	0,234	2.469,475	0,486	45.398,827	8,935	3.477,014	0,684
Mendahara Ulu	31,307	0,006	3.107,358	0,612	5.278,953	1,039	40.230,502	7,918	10.696,851	2,105
Muara Sabak Barat		-	1.869,585	0,368	9.363,077	1,843	14.803,557	2,914	2.592,094	0,510
Muara Sabak Timur		-	2.774,805	0,546	1.550,598	0,305	36.130,186	7,111	45,136	0,0088836
Nipah Panjang		-	1.233,333	0,243	3.559,885	0,701	23.076,642	4,542	1.419,981	0,2794793
Rantau Rasau		-	2.373,388	0,467	480,768	0,095	17.484,438	3,441	7,820	0,0015391
Sadu		-	2.546,006	0,501	14.451,083	2,844	23.054,764	4,5376169	20.549,468	4,0445269
Total	97,569	0,019	24.405,738	4,804	71.336,820	14,040	268.275,082	52,802	143.965,669	28,335

Sumber: Hasil Analisa 2024

Kategori sangat tinggi mencakup 143.965,67 hektar atau 28,33 persen, yang didominasi oleh Kecamatan Berbak (97.393,34 hektar; 19,17 persen) dan Sadu (20.549,47 hektar; 4,04 persen). Sementara itu, kategori sedang memiliki luasan total 71.336,82 hektar atau 14,04 persen, dengan konsentrasi tinggi di Kecamatan Dendang dan Sadu. Kategori rendah hanya mencakup 24.405,74 hektar atau 4,80 persen, dan tersebar di hampir seluruh kecamatan, sedangkan kategori sangat rendah hanya mencakup 97,57 hektar atau 0,019 persen, dengan nilai terendah berada di Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu.

Distribusi ini menegaskan bahwa jasa pengendalian hama alami merupakan salah satu fungsi ekosistem yang strategis bagi keberlanjutan produksi pertanian dan pengurangan ketergantungan terhadap pestisida kimia. Oleh karena itu, wilayah dengan kontribusi tinggi dan sangat tinggi dalam fungsi ekosistem ini perlu mendapatkan perlindungan dan menjadi prioritas dalam kebijakan tata ruang dan perlindungan keanekaragaman hayati di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3) Jasa Budaya

Salah satu kategori yang krusial adalah jasa budaya (cultural ecosystem services), yakni manfaat non-material yang diperoleh masyarakat dari ekosistem melalui pengalaman, simbolisme, dan interaksi sosial yang terjalin dengan alam. Jasa ini mencakup unsur estetika, rekreasi, warisan dan identitas budaya, nilai spiritual dan keagamaan, serta fungsi edukatif yang memperkuat keterikatan manusia dengan lingkungannya. Dalam konteks Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jasa budaya berkontribusi pada penguatan kearifan lokal dan pengembangan pariwisata berbasis alam, sekaligus berperan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat secara holistik.

a) Jasa Ekosistem Tempat Tinggal

Salah satu elemen penting dari jasa budaya adalah jasa ekosistem tempat tinggal, yang menunjukkan kapasitas ekosistem dalam menyediakan ruang layak huni dan menunjang kehidupan manusia secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis tahun 2024, distribusi luas dan peran jasa ekosistem tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh kategori “sedang”, yang mencapai 413.404,83 hektar atau 81,366 persen dari total wilayah yang dianalisis. Lahan gambut menjadi ekosistem yang paling besar kontribusinya, yaitu 381.557,71 hektar (setara 75,098 persen), mengindikasikan bahwa kawasan ini menjadi basis utama penyediaan ruang hidup di daerah tersebut (lihat Tabel 2.30).

Kategori “rendah” mencakup 54.624,20 hektar (atau 10,751 persen), tersebar di berbagai ekoregion seperti dataran aluvial, lahan gambut, dan wilayah pesisir. Sementara itu, kawasan dengan kategori “tinggi” mencakup 31.733,83 hektar (6,246 persen), menunjukkan potensi signifikan untuk pengembangan permukiman dan kegiatan sosial-budaya apabila dikelola secara berkelanjutan. Luas area dengan nilai “sangat tinggi” adalah 8.242,94 hektar (1,622 persen), dan “sangat rendah” hanya sebesar 75,09 hektar (0,015

persen), yang menandakan keterbatasan dalam mendukung fungsi tempat tinggal pada wilayah-wilayah tertentu.

Tabel 2.30
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tempat Tinggal di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	8,826	0,002	1.748,864	0,344	20.827,927	4,099	7.619,459	1,500	1.130,665	0,223
Lembah Antar Perbukitan	-	-	-	-	58,040	0,011	-	-	-	-
Dataran Fluvioamarin	-	-	25,213	0,005	2,510	0,000	-	-	-	-
Lahan Gambut (Peat Land)	66,262	0,013	47.357,082	9,321	381.557,705	75,098	23.863,095	4,697	6.851,882	1,349
Pesisir (Coast)	-	-	5.493,040	1,081	10.958,646	2,157	251,273	0,049	260,389	0,051
Total	75,088	0,015	54.624,199	10,751	413.404,828	81,366	31.733,827	6,246	8.242,936	1,622

Sumber: Hasil Analisa 2024

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan kawasan lahan gambut dan wilayah pesisir secara bijak dalam konteks perencanaan ruang dan pembangunan permukiman. Selain menjadi penyedia ruang fisik, jasa ekosistem tempat tinggal juga membawa nilai sosial dan budaya yang melekat dalam struktur kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai budaya ke dalam kebijakan lingkungan dan tata ruang menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan warisan budaya daerah.

b) Jasa Ekosistem Rekreasi

Selanjutnya, salah satu bentuk nyata dari jasa budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah jasa ekosistem rekreasi. Berdasarkan hasil analisis tahun 2024 pada Tabel 2.31, distribusi luas dan peran ekosistem rekreasi menunjukkan dominasi pada kategori “rendah”, yang mencapai 307.742,42 hektar atau setara dengan 60,570 persen dari total luasan yang dianalisis. Kawasan lahan gambut menjadi kontributor terbesar dalam

kategori ini dengan 269.410,03 hektar (53,025 persen), diikuti oleh dataran aluvial dan wilayah pesisir.

Tabel 2.31
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Rekreasi di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.757,690	0,346	29.255,226	5,758	22,481	0,004	273,920	0,054	26,424	0,005
Lembah Antar Perbukitan	-	-	58,040	0,011	-	-	-	-	-	-
Dataran Fluvio-marine	18,613	0,004	-	-	-	-	-	-	9,110	0,002
Lahan Gambut (Peat Land)	43.829,861	8,627	269.410,032	53,025	-	-	136.217,748	26,810	10.238,385	2,015
Pesisir (Coast)	1.184,762	0,233	9.019,123	1,775	-	-	95,764	0,019	6.663,699	1,312
Total	46.790,926	9,209	307.742,421	60,570	22,481	0,004	136.587,432	26,883	16.937,618	3,334

Sumber: Hasil Analisa 2024

Kategori “tinggi” menempati urutan kedua dengan luas 136.587,43 hektar (26,883 persen), yang tersebar di lahan gambut dan kawasan pesisir. Sementara itu, kategori “sangat tinggi” mencapai 16.937,62 hektar (3,334 persen), menunjukkan masih terbatasnya wilayah yang memiliki potensi optimal untuk aktivitas rekreasi berbasis ekosistem. Pada sisi lain, kategori “sangat rendah” mencakup 46.790,93 hektar (9,209 persen) dan “sedang” hanya 22,48 hektar (0,004 persen), yang memperlihatkan masih banyak kawasan yang belum memiliki nilai rekreasi yang kuat atau belum dikelola untuk tujuan tersebut. Kawasan yang termasuk dalam kategori sangat rendah sebagian besar tersebar di dataran aluvial dan lahan gambut.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luasan wilayah yang besar, pengembangan fungsi rekreasi dari ekosistem masih memerlukan peningkatan, baik melalui penyediaan infrastruktur penunjang, promosi wisata alam, maupun perlindungan kawasan bernilai tinggi secara ekologis dan estetis. Optimalisasi jasa

ekosistem rekreasi ini berpotensi mendukung pembangunan ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup melalui pendekatan pariwisata berbasis ekosistem (*ecotourism*).

c) Jasa Ekosistem Estetika

Salah satu aspek penting dari jasa budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah jasa ekosistem estetika, yang menunjukkan nilai keindahan lanskap sebagai bagian dari identitas ruang dan aset sosial budaya daerah. Pada Tabel 2.32 distribusi luas dan peran jasa ekosistem estetika didominasi oleh kategori “rendah”, dengan luas mencapai 307.742,42 hektar atau setara 60,570 persen. Kawasan lahan gambut menjadi penyumbang terbesar dalam kategori ini, yaitu seluas 269.410,03 hektar (53,025 persen), disusul oleh dataran aluvial dan wilayah pesisir.

Tabel 2.32
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Estetika di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.757,690	0,346	29.255,226	5,758	22,481	0,004	273,920	0,054	26,424	0,005
Lembah Antar Perbukitan	-	-	58,040	0,011	-	-	-	-	-	-
Dataran Fluvionar	18,613	0,004	-	-	-	-	-	-	9,110	0,002
Lahan Gambut (Peat Land)	43.829,861	8,627	269.410,032	53,025	-	-	136.217,748	26,810	10.238,385	2,015
Pesisir (Coast)	1.184,762	0,233	9.019,123	1,775	-	-	95,764	0,019	6.663,699	1,312
Total	46.790,926	9,209	307.742,421	60,570	22,481	0,004	136.587,432	26,883	16.937,618	3,334

Sumber: Hasil Analisa 2024

Kategori “tinggi” mencakup 136.587,43 hektar (26,883 persen), yang tersebar signifikan di lahan gambut dan sebagian kawasan pesisir. Sementara kategori “sangat tinggi” mencapai 16.937,62 hektar (3,334 persen), menunjukkan potensi estetika lanskap yang sangat menonjol di lokasi-lokasi

tertentu, terutama lahan gambut dan pesisir, yang dapat dikembangkan sebagai kawasan strategis untuk wisata berbasis alam atau konservasi budaya.

Di sisi lain, kategori “sangat rendah” tercatat seluas 46.790,93 hektar (9,209 persen), sementara “sedang” hanya 22,48 hektar (0,004 persen). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah belum dioptimalkan dari sisi keindahan lanskap atau belum ditata untuk fungsi visual dan estetis dalam perencanaan ruang.

Secara keseluruhan, data ini menegaskan pentingnya strategi pengelolaan lanskap yang memperhatikan nilai estetika dan kearifan lokal. Optimalisasi ekosistem estetika dapat dilakukan melalui restorasi vegetasi alami, penataan ruang terbuka hijau, pengembangan destinasi wisata berbasis alam, serta pelibatan masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai visual lingkungan. Dengan demikian, jasa estetika tidak hanya menjadi nilai tambah bagi pembangunan fisik, tetapi juga sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada keseimbangan ekologis dan sosial budaya.

d) Jasa Ekosistem Tempat Tinggal Menurut Kecamatan

Jasa ekosistem tempat tinggal, yaitu kapasitas ekosistem dalam menunjang kehidupan manusia melalui penyediaan ruang bermukim yang layak, aman, dan terintegrasi secara ekologis dengan lingkungannya. Berdasarkan hasil analisis tahun 2024, distribusi luas dan peran jasa ekosistem tempat tinggal menurut kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada dalam kategori “sedang”, dengan total luas mencapai 413.404,83 hektar atau 81,366 persen. Kecamatan Berbak memiliki luasan terbesar dalam kategori ini, yaitu 104.826,67 hektar (20,632 persen), diikuti oleh Mendahara Ulu (51.031,63 hektar atau 10,044 persen) dan Mendahara (46.630,34 hektar atau 9,178 persen). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan permukiman berada pada tingkat kesesuaian ekologis sedang, yang masih memungkinkan

untuk pengembangan berkelanjutan dengan intervensi penataan ruang dan infrastruktur (lihat Tabel 2.33).

Tabel 2.33

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tempat Tinggal Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	-	-	6.508,468	1,281	104.826,670	20,632	7.530,636	1,482	541,302	0,107
Dendang	66,262	0,0130416	8.615,527	1,6956999	16.571,435	3,2615742	8.324,483	1,6384169	714,752	0,1406768
Geragai	-	0	1.653,744	0,3254883	45.002,793	8,8574073	3.169,503	0,6238186	1.355,878	0,2668626
Kuala Jambi	-	-	869,787	0,171	10.432,425	2,053	337,483	0,066	315,597	0,062
Mendahara	-	-	5.426,798	1,068	46.630,338	9,178	0,667	0,000	474,745	0,093
Mendahara Ulu	8,826	0,002	7.948,526	1,564	51.031,627	10,044	8,921	0,002	347,071	0,068
Muara Sabak Barat	-	-	923,081	0,182	17.927,648	3,529	8.750,429	1,722	1.027,155	0,202
Muara Sabak Timur	-	-	927,901	0,183	37.940,755	7,467	678,172	0,133	953,897	0,1877451
Nipah Panjang	-	-	2.381,267	0,469	23.897,316	4,703	2.561,189	0,504	450,069	0,0885822
Rantau Rasau	-	-	151,788	0,030	18.205,880	3,583	328,980	0,065	1.659,766	0,3266736
Sadu	-	-	19.217,312	3,782	40.937,941	8,057	43,364	0,0085349	402,704	0,0792598
Total	75,088	0,015	54.624,199	10,751	413.404,828	81,366	31.733,827	6,246	8.242,936	1,622

Sumber: Hasil Analisa 2024

Kategori “rendah” mencakup 54.624,20 hektar (10,751 persen) dan tersebar merata di seluruh kecamatan, dengan kontribusi terbesar berasal dari Sadu (19.217,31 hektar atau 3,782 persen) dan Dendang (8.615,53 hektar atau 1,696 persen). Sementara kategori “tinggi” tercatat sebesar 31.733,83 hektar (6,246 persen), yang secara signifikan terdapat di Muara Sabak Barat (8.750,43 hektar) dan Dendang (8.324,48 hektar), menandakan adanya potensi kawasan hunian yang secara ekologis sangat mendukung. Kategori “sangat tinggi” menunjukkan luasan sebesar 8.242,94 hektar (1,622 persen), tersebar pada kecamatan seperti Rantau Rasau (1.659,77 hektar), Muara

Sabak Timur (953,90 hektar), dan Muara Sabak Barat (1.027,16 hektar), yang dapat dikategorikan sebagai wilayah prioritas pengembangan permukiman ramah lingkungan atau kawasan wisata berbasis komunitas. Adapun kategori “sangat rendah” hanya mencakup 75,09 hektar (0,015 persen), yang hampir seluruhnya berada di Kecamatan Dendang (66,26 hektar).

Secara umum, persebaran jasa ekosistem tempat tinggal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih memiliki kapasitas ekologis yang moderat dalam mendukung fungsi permukiman. Oleh karena itu, penguatan perencanaan wilayah berbasis daya dukung lingkungan, perlindungan terhadap kawasan berpotensi tinggi, serta mitigasi terhadap tekanan lahan di kawasan bernilai rendah, menjadi penting dalam memastikan pembangunan permukiman yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim serta dinamika sosial-ekonomi lokal.

e) Jasa Ekosistem Rekreasi Menurut Kecamatan

Bentuk lain dari jasa budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah jasa ekosistem rekreasi. Berdasarkan hasil analisis tahun 2024, distribusi luas dan peran ekosistem rekreasi menurut kecamatan menunjukkan dominasi pada kategori “rendah”, dengan total luas 307.742,42 hektar atau setara dengan 60,570 persen. Kecamatan Mendahara dan Mendahara Ulu tercatat sebagai penyumbang terbesar dalam kategori ini, masing-masing sebesar 45.797,30 hektar (9,014 persen) dan 40.581,51 hektar (7,987 persen), diikuti oleh Muara Sabak Timur, Nipah Panjang, dan Geragai (lihat Tabel 2.34).

Tabel 2.34
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Rekreasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	6.481,527	1,276	12.393,563	2,439		-	97.804,252	19,250	2.727,734	0,537
Dendang	8.681,789	1,7087415	19.409,751	3,8202089		0	5.649,334	1,1118966	551,585	0,1085624
Geragai	1.653,744	0,3254883	48.021,161	9,4514797		0	1.366,830	0,2690182	140,183	0,0275907

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Kuala Jambi	101,988	0,020	10.123,474	1,992		-		-	1.729,830	0,340
Mendahara	2.468,808	0,486	45.797,302	9,014	22,481	0,004	595,961	0,117	3.670,477	0,722
Mendahara Ulu	7.897,359	1,554	40.581,508	7,987		-	10.641,844	2,095	201,779	0,040
Muara Sabak Barat	923,081	0,182	24.581,141	4,838		-	2.592,094	0,510	531,997	0,105
Muara Sabak Timur	872,426	0,172	37.772,605	7,434		-	0,011	0,000	1.855,683	0,3652338
Nipah Panjang	1.178,572	0,232	26.087,900	5,135		-	217,286	0,043	1.806,083	0,3554716
Rantau Rasau	151,788	0,030	19.473,184	3,833		-	7,820	0,002	713,622	0,1404544
Sadu	16.379,844	3,224	23.500,832	4,625		-	17.712,000	3,4860592	3.008,645	0,5921587
Total	46.790,926	9,209	307.742,421	60,570	22,481	0,004	136.587,432	26,883	16.937,618	3,334

Sumber: Hasil Analisa 2024

Kategori “tinggi” mencakup 136.587,43 hektar (26,883 persen), dengan kontribusi terbesar berasal dari Berbak (97.804,25 hektar), menandakan potensi tinggi wilayah tersebut untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata alam dan ruang publik berbasis konservasi. Kecamatan lainnya seperti Sadu (17.712,00 hektar) dan Mendahara Ulu (10.641,84 hektar) juga berkontribusi signifikan dalam kategori ini. Kategori “sangat tinggi” mencakup 16.937,62 hektar (3,334 persen) yang tersebar di beberapa kecamatan dengan potensi khusus, seperti Mendahara (3.670,48 hektar), Sadu (3.008,65 hektar), dan Kuala Jambi (1.729,83 hektar). Luasan ini menandakan kawasan dengan keunggulan alami dan estetika yang tinggi serta memiliki nilai rekreatif yang dapat dioptimalkan melalui perencanaan dan promosi wisata berbasis ekosistem. Adapun kategori “sangat rendah” mencakup 46.790,93 hektar (9,209 persen) dengan luasan terbesar di Kecamatan Sadu (16.379,84 hektar) dan Dendang (8.681,79 hektar), sedangkan kategori “sedang” hanya 22,48 hektar (0,004 persen) yang tercatat berada di Kecamatan Mendahara.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa potensi jasa rekreasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat besar namun belum

sepenuhnya dioptimalkan. Perlu strategi pembangunan yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pengembangan kawasan wisata berbasis alam, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga fungsi ekosistem rekreatif di wilayah masing-masing.

f) Jasa Ekosistem Estetika Menurut Kecamatan

Jasa ekosistem estetika yang menggambarkan potensi visual dan keindahan bentang alam untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, harmonis, dan bernilai tinggi. Tabel 2.35 memperlihatkan distribusi luas dan peran jasa ekosistem estetika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan dominasi pada kategori “rendah”, yaitu seluas 307.742,42 hektar atau 60,570 persen dari total wilayah yang dikaji. Kecamatan dengan kontribusi tertinggi dalam kategori ini antara lain Geragai (48.021,16 hektar), Mendahara (45.797,30 hektar), dan Mendahara Ulu (40.581,51 hektar), yang merepresentasikan kawasan dengan potensi estetika lanskap yang belum sepenuhnya dikembangkan.

Tabel 2.35
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Estetika Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	6.481,527	1,276	12.393,563	2,439		-	97.804,252	19,250	2.727,734	0,537
Dendang	8.681,789	1,7087415	19.409,751	3,8202089		0	5.649,334	1,1118966	551,585	0,1085624
Geragai	1.653,744	0,3254883	48.021,161	9,4514797		0	1.366,830	0,2690182	140,183	0,0275907
Kuala Jambi	101,988	0,020	10.123,474	1,992		-	-	-	1.729,830	0,340
Mendahara	2.468,808	0,486	45.797,302	9,014		-	595,961	0,117	3.670,477	0,722
Mendahara Ulu	7.897,359	1,554	40.581,508	7,987	22,481	0,004	10.641,844	2,095	201,779	0,040
Muara Sabak Barat	923,081	0,182	24.581,141	4,838		-	2.592,094	0,510	531,997	0,105
Muara Sabak Timur	872,426	0,172	37.772,605	7,434		-	0,011	0,000	1.855,683	0,3652338
Nipah Panjang	1.178,572	0,232	26.087,900	5,135		-	217,286	0,043	1.806,083	0,3554716

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Rantau Rasau	151,788	0,030	19.473,184	3,833		-	7,820	0,002	713,622	0,1404544
Sadu	16.379,844	3,224	23.500,832	4,625		-	17.712,000	3,4860592	3.008,645	0,5921587
Total	46.790,926	9,209	307.742,421	60,570	22,481	0,004	136.587,432	26,883	16.937,618	3,334

Sumber: Hasil Analisa 2024

Kategori “Tinggi” menempati posisi kedua dengan luasan 136.587,43 hektar (26,883 persen), di mana Berbak menjadi penyumbang terbesar dengan 97.804,25 hektar, disusul oleh Sadu (17.712,00 hektar) dan Mendahara Ulu (10.641,84 hektar). Kawasan-kawasan ini menunjukkan potensi tinggi untuk pengembangan wisata berbasis keindahan alam dan tata ruang berbasis estetika lingkungan. Kategori “Sangat Tinggi” mencakup 16.937,62 hektar (3,334 persen), tersebar pada kecamatan seperti Mendahara (3.670,48 hektar), Sadu (3.008,65 hektar), dan Kuala Jambi (1.729,83 hektar), yang dapat dikembangkan menjadi kawasan unggulan berbasis jasa ekosistem estetika. Sebaliknya, kategori “Sangat Rendah” memiliki luasan 46.790,93 hektar (9,209 persen) yang tersebar merata, dengan luasan tertinggi di Sadu (16.379,84 hektar) dan Dendang (8.681,79 hektar), menunjukkan perlunya revitalisasi lanskap dan penataan visual ruang publik di wilayah-wilayah tersebut. Kategori “Sedang” hanya ditemukan di satu titik dengan luasan 22,48 hektar (0,004 persen) yang tercatat di Kecamatan Mendahara Ulu, menandakan adanya potensi terbatas namun tetap perlu dikelola agar tidak terdegradasi.

Secara keseluruhan, distribusi ini mencerminkan bahwa jasa ekosistem estetika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menunjukkan potensi yang signifikan, namun belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penataan ruang yang adaptif dan berbasis karakter visual lanskap, disertai dengan perlindungan kawasan bernilai estetika tinggi untuk mendukung pengembangan pariwisata alam, kenyamanan permukiman, serta pelestarian identitas ekologis wilayah.

4) Jasa Pendukung

Dalam kerangka klasifikasi jasa ekosistem, jasa pendukung berperan sebagai fondasi utama yang memungkinkan berlangsungnya seluruh fungsi ekosistem lainnya. Jasa ini tidak secara langsung dimanfaatkan oleh manusia, tetapi menyediakan prasyarat ekologis penting bagi kelangsungan hidup, seperti pembentukan tanah, siklus nutrien, fotosintesis, dan penyediaan habitat bagi keanekaragaman hayati. Dalam konteks kebijakan lingkungan daerah, jasa pendukung memiliki nilai strategis dalam menjamin ketahanan ekologi jangka panjang, khususnya dalam upaya konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim.

a) Jasa Ekosistem Tanah

Salah satu bentuk nyata dari jasa pendukung adalah jasa ekosistem tanah, yang mencerminkan kemampuan kawasan dalam mendukung pembentukan, pelestarian, dan fungsi ekologis tanah sebagai media tumbuh dan penyimpan karbon. Berdasarkan hasil analisis tahun 2024, distribusi luas dan peran jasa ekosistem tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh kategori “tinggi”, yang mencakup 315.776,09 hektar atau 62,151 persen dari total kawasan yang dikaji. Kontribusi terbesar berasal dari ekoregion lahan gambut, yakni 279.728,78 hektar, menunjukkan fungsi vital lahan gambut sebagai sistem penunjang utama pembentukan tanah dan penyimpan karbon alami (lihat Tabel 2.36).

Kategori “sangat tinggi” mencakup 136.067,66 hektar (26,781 persen), yang hampir seluruhnya juga didominasi oleh lahan gambut (135.774,91 hektar), disusul secara terbatas oleh dataran aluvial dan wilayah pesisir. Hal ini menegaskan urgensi perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan terhadap kawasan gambut sebagai elemen kunci jasa ekosistem pendukung di daerah ini.

Tabel 2.36

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,97 2	0,22 9		-	7.934,656	1,56 2	21.965,193	4,323	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-		-		-	58,040	0,011		-
Dataran Fluvimarin		-		-	2,510	0,00 0	25,213	0,005		-
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,14 4	1,36 2	9,289	0,00 2	37.264,90 3	7,33 4	279.728,77 9	55,05 6	135.774,91 1	26,72 3
Pesisir (Coast)	260,389	0,05 1	1,061	0,00 0	2.684,210	0,52 8	13.998,861	2,755	18,827	0,004
Total	8.340,50 5	1,64 2	10,35 0	0,00 2	47.886,27 9	9,42 5	315.776,08 6	62,15 1	136.067,65 8	26,78 1

Sumber: Hasil Analisa 2024

Kategori “sedang” mencakup 47.886,28 hektar (9,425 persen), tersebar pada berbagai ekoregion, termasuk dataran aluvial (7.934,66 hektar) dan pesisir (2.684,21 hektar), yang menunjukkan peran penting tanah mineral dalam menopang fungsi ekologis di kawasan non-gambut. Sementara itu, kategori “sangat rendah” dan “rendah” hanya mencakup 8.340,51 hektar (1,642 persen) dan 10,35 hektar (0,002 persen) secara berurutan, yang menunjukkan area dengan kapasitas ekologis terbatas untuk mendukung fungsi tanah.

Temuan ini menekankan bahwa pengelolaan lahan gambut yang baik akan menjadi kunci utama dalam mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan ekosistem tanah harus diarahkan pada rehabilitasi kawasan rentan, penguatan pengawasan lahan gambut, dan pemanfaatan berkelanjutan berdasarkan kapasitas ekologis masing-masing wilayah.

b) Jasa Ekosistem Siklus Hara

Siklus hara yaitu proses alami di mana unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dialirkan melalui tanah, air, organisme, dan

atmosfer untuk menunjang pertumbuhan tanaman, produktivitas lahan, serta kestabilan ekosistem. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jasa ini menjadi sangat penting mengingat keberadaan ekosistem gambut, pesisir, dan lahan aluvial yang memiliki peran besar dalam penyimpanan dan distribusi unsur hara.

Tabel 2.37
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Siklus Hara di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	288,773	0,057	27.576,580	5,428	2.008,072	0,395	300,344	0,059
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluvimarin		-		-	18,613	0,004		-	9,110	0,002
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	6.747,617	1,328	265.655,453	52,286	34.361,516	6,763	146.013,296	28,738
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	76,455	0,015	9.867,041	1,942	76,937	0,015	6.682,526	1,315
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	303.175,727	59,671	36.446,525	7,173	153.005,276	30,114

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Tabel 2.37 menunjukkan distribusi luas dan peran jasa ekosistem siklus hara menunjukkan dominasi pada kategori “Tinggi”, yaitu seluas 315.776,09 hektar atau 62,151 persen dari total wilayah yang dianalisis. Kontribusi terbesar berasal dari lahan gambut, dengan luas 279.728,78 hektar, yang dikenal sebagai ekosistem dengan kapasitas tinggi dalam menyimpan dan mendaur ulang unsur hara organik. Ini menunjukkan bahwa gambut tidak hanya penting dalam mitigasi karbon, tetapi juga berperan sebagai reservoir nutrisi alami. Kategori “Sangat Tinggi” mencakup 136.067,66 hektar (26,781 persen), yang juga sebagian besar berasal dari lahan gambut (135.774,91 hektar), menguatkan posisi kawasan ini sebagai pusat siklus hara regional. Selain itu, dataran aluvial dan pesisir turut memberikan kontribusi terbatas

dalam kategori ini, menambah kompleksitas dinamika ekosistem wilayah pesisir timur Jambi. Kategori “Sedang” meliputi 47.886,28 hektar (9,425 persen), tersebar pada dataran aluvial (7.934,66 hektar) dan pesisir (2.684,21 hektar), menunjukkan bahwa kawasan-kawasan ini masih memiliki fungsi ekologis dalam mendukung sirkulasi hara, meski tidak sekuat lahan gambut. Adapun kategori “Sangat Rendah” sebesar 8.340,51 hektar (1,642 persen) dan “Rendah” hanya 10,35 hektar (0,002 persen), menggambarkan area dengan fungsi sirkulasi hara yang sangat terbatas dan memerlukan intervensi pengelolaan ekologis, seperti konservasi vegetasi penutup dan pemulihan struktur tanah.

Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap ekosistem siklus hara, khususnya di kawasan gambut dan aluvial, sangat penting bagi kelestarian fungsi ekologis dan keberlanjutan produktivitas lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu menempatkan kawasan bernilai tinggi dalam siklus hara sebagai zona prioritas konservasi dan restorasi ekologis.

c) Jasa Ekosistem Produksi Primer

Produksi primer yang terdiri dari proses biologis di mana tumbuhan hijau dan organisme fotosintetik lainnya mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Produksi primer menjadi dasar dari rantai makanan dan menopang keseluruhan fungsi ekosistem, termasuk produktivitas lahan, penyimpanan karbon, dan ketahanan biodiversitas.

Berdasarkan hasil analisa tahun 2024, distribusi luas dan peran jasa ekosistem produksi primer di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan dominasi pada kategori “Sedang”, dengan total luas mencapai 303.695,50 hektar atau 59,773 persen dari total wilayah yang dikaji. Kontribusi terbesar berasal dari lahan gambut, yakni sebesar 266.098,29 hektar (atau 52,373 persen), mengindikasikan bahwa kawasan gambut memiliki peran kunci

dalam mendukung proses fotosintesis alami secara berkelanjutan (lihat Tabel 2.38).

Tabel 2.38
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Produksi Primer di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	288,773	0,057	27.576,580	5,428	2.034,496	0,400	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluvio-marine		-		-	18,613	0,004	2,510	0,000	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	6.747,617	1,328	266.098,290	52,373	40.572,870	7,986	139.359,105	27,429
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	76,455	0,015	9.943,978	1,957	2.356,482	0,464	4.326,044	0,851
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	303.695,501	59,773	44.966,358	8,850	143.965,669	28,335

Sumber: Hasil Analisa 2024

Kategori “Sangat Tinggi” mencakup 143.965,67 hektar (28,335 persen), di mana lahan gambut kembali mendominasi dengan luas 139.359,11 hektar. Ini menegaskan bahwa ekosistem gambut tidak hanya penting dalam aspek hidrologi dan mitigasi karbon, tetapi juga sangat vital dalam kapasitasnya sebagai pusat produksi primer alami. Kategori “Tinggi” tercatat sebesar 44.966,36 hektar (8,850 persen), dengan sumbangan utama dari lahan gambut (40.572,87 hektar) dan pesisir (2.356,48 hektar). Sedangkan kategori “Rendah” memiliki total luas 7.112,85 hektar (1,400 persen) dan kategori “Sangat Rendah” mencakup 8.340,51 hektar (1,642 persen), yang tersebar antara lain di ekoregion dataran aluvial dan pesisir.

Data tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi alami yang kuat dalam mendukung produktivitas biologis primer, terutama pada lahan gambut. Oleh karena itu, strategi pengelolaan ekosistem ke depan perlu difokuskan pada

perlindungan dan optimalisasi fungsi produksi primer ini, melalui kebijakan konservasi vegetasi alami, restorasi lahan terdegradasi, serta pemantauan kesehatan ekosistem berbasis data.

d) Jasa Ekosistem Biodiversitas

Biodiversitas tidak hanya menjadi indikator kesehatan ekosistem, tetapi juga berperan sebagai penopang utama keseimbangan ekologis, stabilitas pangan, dan potensi pengembangan sumber daya genetika di masa depan. Dalam konteks Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jasa ekosistem biodiversitas menjadi sangat strategis mengingat karakteristik wilayahnya yang kaya akan ekosistem lahan gambut, pesisir, dan kawasan air tawar tropis.

Tabel 2.39
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Biodiversitas di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	18.785,803	3,697	9.079,550	1,787	2.034,496	0,400	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-	58,040	0,011		-		-		-
Dataran Fluvionmarin		-		-	18,613	0,004	2,510	0,000	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	211.514,704	41,630	61.331,203	12,071	40.572,870	7,986	139.359,105	27,429
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	8.582,855	1,689	1.437,578	0,283	2.356,482	0,464	4.326,044	0,851
Total	8.340,505	1,642	238.941,402	47,028	71.866,944	14,145	44.966,358	8,850	143.965,669	28,335

Sumber: Hasil Analisa 2024

Berdasarkan hasil analisis spasial tahun 2024, kategori “Rendah” menempati proporsi terbesar dalam distribusi jasa ekosistem biodiversitas, dengan total luas 238.941,40 hektar atau 47,028 persen. Kontribusi terbesar datang dari lahan gambut, yang menyumbang 211.514,70 hektar (41,630 persen), menunjukkan peran krusial kawasan ini sebagai habitat penting

berbagai spesies flora dan fauna. Dataran aluvial dan kawasan pesisir juga ikut menyumbang, masing-masing sebesar 18.785,80 hektar dan 8.582,86 hektar. Kategori “Sangat Tinggi” menempati posisi berikutnya dengan luas 143.965,67 hektar (28,335 persen), didominasi oleh lahan gambut seluas 139.359,11 hektar, yang secara ekologis memiliki kompleksitas struktural tinggi, menjadikannya tempat berkembang biak alami bagi banyak spesies endemik dan migran. Kawasan pesisir menyumbang tambahan 4.326,04 hektar, menunjukkan potensi kawasan mangrove dan estuaria sebagai kantong keanekaragaman hayati pesisir.

Sementara itu, kategori “Sedang” mencakup 71.866,94 hektar (14,145 persen), dengan sumbangan utama dari lahan gambut (61.331,20 hektar) dan dataran aluvial (9.079,55 hektar). Ini mengindikasikan bahwa meskipun tidak semua wilayah memiliki fungsi biodiversitas yang tinggi, terdapat potensi yang dapat diperkuat melalui restorasi atau konservasi kawasan. Adapun kategori “Tinggi” sebesar 44.966,36 hektar (8,850 persen) tersebar di berbagai ekoregion, sedangkan “Sangat Rendah” mencakup 8.340,51 hektar (1,642 persen) yang didominasi oleh lahan gambut dan dataran aluvial. Wilayah-wilayah ini memerlukan pengelolaan intensif agar tidak mengalami degradasi lebih lanjut yang dapat mengancam biodiversitas lokal.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki aset biodiversitas yang sangat kuat, terutama pada ekosistem gambut dan pesisir. Pemanfaatan potensi ini harus diimbangi dengan perlindungan dan pengelolaan berbasis ekoregion, melalui pendekatan konservasi berbasis masyarakat, perlindungan kawasan kunci keanekaragaman hayati, serta integrasi nilai-nilai biodiversitas ke dalam perencanaan pembangunan lintas sektor.

e) Jasa Ekosistem Tanah

Tanah merupakan medium vital yang menopang siklus biologis, pertumbuhan vegetasi, dan interaksi organisme dalam ekosistem. Sebagai bagian dari jasa pendukung, jasa ekosistem tanah tidak hanya berfungsi

sebagai penyangga produksi biomassa, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas struktur lanskap, penyimpanan karbon, dan pemurni alami air. Oleh karena itu, kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan jasa ekosistem tanah yang optimal menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberlanjutan lingkungan hidup.

Tabel 2.40
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	541,302	0,107		-	10.900,364	2,145	10.599,009	2,086	97.366,401	19,164
Dendang	781,014	0,1537184		0	9.842,236	1,9371396	18.019,875	3,5466548	5.649,334	1,1118966
Geragai	1.355,878	0,2668626		0	3.654,003	0,7191774	44.805,207	8,8185187	1.366,830	0,2690182
Kuala Jambi	315,597	0,062		-	1.352,004	0,266	10.287,691	2,025	-	-
Mendahara	474,745	0,093		-	713,154	0,140	50.825,625	10,003	519,024	0,102
Mendahara Ulu	378,378	0,074		-	2.769,208	0,545	45.560,527	8,967	10.636,858	2,094
Muara Sabak Barat	1.027,155	0,202		-	9.592,859	1,888	15.416,205	3,034	2.592,094	0,510
Muara Sabak Timur	953,897	0,188	10,350	0,002	2.488,730	0,490	37.047,737	7,292	0,011	2,165E-06
Nipah Panjang	450,069	0,089		-	3.344,453	0,658	25.278,033	4,975	217,286	0,042766
Rantau Rasau	1.659,766	0,327		-	1.042,602	0,205	17.636,226	3,471	7,820	0,0015391
Sadu	402,704	0,079		-	2.186,666	0,430	40.299,951	7,9317984	17.712,000	3,4860592
Total	8.340,505	1,642	10,350	0,002	47.886,279	9,425	315.776,086	62,151	136.067,658	26,781

Sumber: Hasil Analisa 2024

Berdasarkan hasil analisis tahun 2024, kategori “Tinggi” menjadi kelas dominan dalam distribusi jasa ekosistem tanah menurut kecamatan, dengan luasan mencapai 315.776,09 hektar atau 62,151 persen. Beberapa kecamatan yang berkontribusi besar dalam kategori ini antara lain Mendahara (50.825,63 hektar), Mendahara Ulu (45.560,53 hektar), serta Geragai (44.805,21 hektar). Capaian ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki kondisi

tanah yang baik dalam mendukung berbagai fungsi ekologis dasar, termasuk dalam peranannya sebagai fondasi struktur vegetatif dan habitat mikroorganisme tanah.

Kategori “Sangat Tinggi” mencakup 136.067,66 hektar (26,781 persen), dengan kontribusi terbesar datang dari Berbak (97.366,40 hektar) dan Sadu (17.712,00 hektar). Kawasan-kawasan ini memiliki karakteristik tanah yang kaya secara ekologis dan berpotensi sebagai zona konservasi atau budidaya ramah lingkungan berbasis tanah organik alami. Sementara itu, kategori “Sedang” meliputi 47.886,28 hektar (9,425 persen) yang tersebar merata di hampir semua kecamatan, seperti Dendang, Muara Sabak Barat, dan Nipah Panjang. Luasan ini menandakan adanya potensi yang masih bisa ditingkatkan melalui praktik-praktik pengelolaan tanah berkelanjutan seperti konservasi bahan organik dan rehabilitasi tanah kritis.

Kategori “Sangat Rendah” dan “Rendah” hanya mencakup porsi kecil yakni masing-masing sebesar 8.340,51 hektar (1,642 persen) dan 10,35 hektar (0,002 persen). Kecamatan yang masuk dalam kategori ini antara lain Rantau Rasau, Geragai, dan Kuala Jambi. Keberadaan wilayah dengan kapasitas jasa tanah yang sangat terbatas ini menjadi perhatian khusus dalam strategi pemulihan ekosistem, terutama untuk mencegah erosi, pemadatan tanah, dan kehilangan kesuburan biologis.

Keseluruhan distribusi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki fondasi ekologis yang kuat dalam bentuk jasa ekosistem tanah, namun tetap membutuhkan tata kelola yang responsif terhadap perbedaan karakteristik antarwilayah. Upaya peningkatan kualitas dan konservasi tanah berbasis ekoregion sangat diperlukan untuk memperkuat daya dukung lingkungan dan mendukung perencanaan ruang yang berkelanjutan.

f) Jasa Ekosistem Siklus Hara

Siklus hara merupakan proses alami yang memungkinkan unsur-unsur penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium tersirkulasi dalam ekosistem,

menopang pertumbuhan tanaman dan keseimbangan biologis tanah. Dalam konteks jasa ekosistem, siklus hara masuk dalam kategori jasa pendukung, yang berperan fundamental dalam menjaga produktivitas lahan dan stabilitas lingkungan. Keberlangsungan siklus hara yang sehat juga mencerminkan kondisi tanah yang aktif secara biologis dan tidak mengalami degradasi parah.

Tabel 2.41

Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Siklus Hara Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	541,302	0,107	668,935	0,132	17.664,853	3,477	437,851	0,086	100.094,135	19,700
Dendang	781,014	0,1537184	966,168	0,1901603	26.344,358	5,1850717	-	-	6.200,919	1,220459
Geragai	1.355,878	0,2668626	344,317	0,0677681	33.490,755	6,5916189	14.483,955	2,8507184	1.507,013	0,2966089
Kuala Jambi	315,597	0,062	52,490	0,010	9.857,375	1,940	-	-	1.729,830	0,340
Mendahara	474,745	0,093	-	-	40.287,392	7,929	7.580,910	1,492	4.189,501	0,825
Mendahara Ulu	378,378	0,074	2.618,501	0,515	32.564,051	6,409	12.945,404	2,548	10.838,637	2,133
Muara Sabak Barat	1.027,155	0,202	310,433	0,061	23.168,229	4,560	998,405	0,197	3.124,091	0,615
Muara Sabak Timur	953,897	0,188	-	-	37.691,134	7,418	-	-	1.855,694	0,3652359
Nipah Panjang	450,069	0,089	179,876	0,035	26.636,527	5,243	-	-	2.023,369	0,3982376
Rantau Rasau	1.659,766	0,327	-	-	17.965,206	3,536	-	-	721,442	0,1419935
Sadu	402,704	0,079	1.972,125	0,388	37.505,847	7,382	-	-	20.720,645	4,0782178
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	303.175,727	59,671	36.446,525	7,173	153.005,276	30,114

Sumber: Hasil Analisa 2024

Hasil analisa menunjukkan bahwa jasa ekosistem siklus hara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagian besar berada pada kategori “Sedang”, dengan total luas mencapai 303.175,73 hektar atau 59,671 persen. Kecamatan Mendahara menyumbang luas terbesar dalam kategori ini, yaitu 40.287,39 hektar, disusul oleh Muara Sabak Timur (37.691,13 hektar), serta Sadu (37.505,85 hektar). Ini mencerminkan bahwa tanah di sebagian besar

wilayah tersebut masih memiliki kapasitas moderat dalam mendaur ulang unsur hara secara alami.

Kategori “Sangat Tinggi” mencakup 153.005,28 hektar (30,114 persen), dengan kontribusi terbesar berasal dari Berbak (100.094,14 hektar) dan Sadu (20.720,65 hektar). Kawasan-kawasan ini berpotensi besar sebagai zona perlindungan fungsi tanah dan basis produksi berkelanjutan karena kemampuan ekosistemnya dalam mempertahankan sirkulasi hara yang efisien. Kategori “Tinggi” justru lebih terbatas, dengan total hanya 36.446,53 hektar (7,173 persen), yang tersebar di kecamatan seperti Mendahara Ulu (12.945,40 hektar) dan Geragai (14.483,96 hektar). Meskipun kontribusinya lebih kecil, kawasan-kawasan ini tetap menunjukkan potensi penguatan fungsi ekosistem melalui pengelolaan organik dan sistem agroforestri.

Sementara itu, kategori “Rendah” hanya mencakup 7.112,85 hektar (1,400 persen) dan kategori “Sangat Rendah” sebesar 8.340,51 hektar (1,642 persen). Kecamatan dengan luasan terbesar dalam kategori ini antara lain Geragai, Muara Sabak Barat, dan Rantau Rasau. Wilayah-wilayah tersebut perlu menjadi prioritas pemulihan ekologi karena berisiko mengalami penurunan kualitas tanah secara lebih cepat apabila tidak ditangani dengan pendekatan konservasi tanah dan air. Distribusi ini menegaskan bahwa upaya mempertahankan dan memperkuat siklus hara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus dibarengi dengan praktik-praktik pemanfaatan lahan yang tidak merusak, restorasi kawasan marginal, serta peningkatan kapasitas kelembagaan lokal dalam mengelola lahan secara ekologis dan berkelanjutan.

g) Jasa Ekosistem Produksi Primer Menurut Kecamatan

Produksi primer merupakan salah satu aspek vital dalam siklus ekologis yang berada dalam kelompok jasa pendukung. Fungsi ini merujuk pada kemampuan ekosistem untuk menghasilkan biomassa melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dan organisme autotrof lainnya. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, produksi primer tidak hanya

menopang rantai makanan alami, tetapi juga menjadi dasar produktivitas sektor pertanian dan kehutanan.

Tabel 2.42
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Produksi Primer Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	541,302	0,107	668,935	0,132	18.102,704	3,563	2.700,793	0,532	97.393,342	19,169
Dendang	781,014	0,1537184	966,168	0,1901603	26.344,358	5,1850717	551,58524	0,1085624	5.649,334	1,1118966
Geragai	1.355,878	0,2668626	344,317	0,0677681	33.490,755	6,5916189	14.624,138	2,8783091	1.366,830	0,2690182
Kuala Jambi	315,597	0,062	52,490	0,010	9.857,375	1,940	962,031	0,189	767,799	0,151
Mendahara	474,745	0,093	-	-	40.364,329	7,944	8.216,460	1,617	3.477,014	0,684
Mendahara Ulu	378,378	0,074	2.618,501	0,515	32.569,037	6,410	13.082,204	2,575	10.696,851	2,105
Muara Sabak Barat	1.027,155	0,202	310,433	0,061	23.168,229	4,560	1.530,402	0,301	2.592,094	0,510
Muara Sabak Timur	953,897	0,188	-	-	37.691,134	7,418	1.810,558	0,356	45,136	0,0088836
Nipah Panjang	450,069	0,089	179,876	0,035	26.636,527	5,243	603,388	0,119	1.419,981	0,2794793
Rantau Rasau	1.659,766	0,327	-	-	17.965,206	3,536	713,622	0,140	7,820	0,0015391
Sadu	402,704	0,079	1.972,125	0,388	37.505,847	7,382	171,177	0,0336909	20.549,468	4,0445269
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	303.695,501	59,773	44.966,358	8,850	143.965,669	28,335

Sumber: Hasil Analisa 2024

Tabel 2.42 menunjukkan bahwa distribusi jasa ekosistem produksi primer menunjukkan bahwa mayoritas wilayah berada dalam kategori “Sedang”, dengan luas mencapai 303.695,50 hektar atau sekitar 59,773 persen. Kontribusi terbesar berasal dari Kecamatan Mendahara (40.364,33 hektar), Muara Sabak Timur (37.691,13 hektar), dan Sadu (37.505,85 hektar), yang mencerminkan dominasi wilayah dataran rendah dan lahan gambut produktif sebagai kawasan dengan proses fotosintesis yang cukup intensif. Kategori “Sangat Tinggi” mencakup 143.965,67 hektar (28,335 persen), yang sebagian besar didominasi oleh Kecamatan Berbak dengan luas 97.393,34 hektar, serta

Sadu (20.549,47 hektar) dan Mendahara Ulu (10.696,85 hektar). Kawasan ini memiliki potensi ekologis yang luar biasa dalam mendukung ketersediaan biomassa alami yang tinggi, baik untuk fungsi ekologis maupun pemanfaatan ekonomis yang berkelanjutan.

Adapun kategori “Tinggi” mencakup 44.966,36 hektar (8,850 persen), tersebar di sejumlah kecamatan seperti Geragai (14.624,14 hektar) dan Mendahara Ulu (13.082,20 hektar). Wilayah-wilayah ini mencerminkan kapasitas ekosistem yang kuat dalam mendukung aktivitas vegetatif, namun tetap memerlukan pengelolaan yang seimbang agar tidak menimbulkan tekanan ekologis berlebih. Sementara itu, kategori “Rendah” dan “Sangat Rendah” masing-masing hanya mencakup 7.112,85 hektar (1,400 persen) dan 8.340,51 hektar (1,642 persen), tersebar di hampir seluruh kecamatan dalam porsi kecil. Kategori ini umumnya mencerminkan wilayah dengan tingkat vegetasi rendah, kemungkinan akibat konversi lahan, degradasi tanah, atau tekanan antropogenik yang tinggi.

Distribusi jasa ekosistem produksi primer ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi daya dukung ekosistem yang relatif stabil, dengan wilayah-wilayah kunci yang perlu dijaga agar tetap berfungsi sebagai pusat produksi biomassa alami. Pemanfaatan potensi ini sebaiknya diintegrasikan dengan kebijakan perlindungan kawasan, pengendalian perubahan tutupan lahan, dan penerapan praktik pengelolaan lanskap berkelanjutan.

h) Jasa Ekosistem Biodiversitas Menurut Kecamatan

Keanekaragaman hayati (biodiversitas) merupakan pondasi dari ketahanan ekosistem, yang menjamin fleksibilitas dan adaptabilitas lingkungan dalam menghadapi perubahan. Sebagai bagian dari kategori jasa pendukung, fungsi biodiversitas menyediakan habitat, menjaga keseimbangan rantai makanan, serta mendukung proses-proses ekologis penting seperti penyerbukan, regenerasi hutan, dan penyimpanan genetik alami.

Analisis di dalam Tabel 2.43 menunjukkan bahwa distribusi jasa ekosistem biodiversitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh kategori “rendah”, yang mencapai 238.941,40 ha atau 47,028 persen dari total wilayah yang ditinjau. Kecamatan dengan kontribusi terbesar dalam kategori ini antara lain Mendahara (37.817,92 ha), Muara Sabak Timur (36.130,19 ha), serta Mendahara Ulu (29.903,60 ha). Hal ini mencerminkan potensi ekosistem yang masih berperan menjaga biodiversitas namun berada dalam tekanan, baik dari aktivitas penggunaan lahan maupun degradasi habitat.

Kategori “sangat tinggi” mencakup 143.965,67 hektar (28,335 persen) yang menunjukkan wilayah dengan nilai konservasi tinggi. Wilayah ini terutama berada di Kecamatan Berbak (97.393,34 hektar) dan Sadu (20.549,47 hektar). Kawasan-kawasan ini dapat dikembangkan sebagai zona konservasi keanekaragaman hayati atau taman ekologi daerah karena kapasitasnya dalam mendukung spesies langka, endemik, atau dilindungi.

Tabel 2.43
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Biodiversitas Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Berbak	541,302	0,107	4.990,560	0,982	13.781,079	2,712	2.700,793	0,532	97.393,342	19,169
Dendang	781,014	0,15371	11.336,684	2,23127	15.973,842	3,14395	551,585	0,10856	5.649,334	1,11189
Geragai	1.355,878	0,26686	29.356,142	5,77784	4.478,930	0,88153	14.624,138	2,87830	1.366,830	0,26901
Kuala Jambi	315,597	0,062	9.522,884	1,874	386,981	0,076	962,031	0,189	767,799	0,151
Mendahara	474,745	0,093	37.817,917	7,443	2.546,412	0,501	8.216,460	1,617	3.477,014	0,684
Mendahara Ulu	378,378	0,074	29.903,599	5,886	5.283,939	1,040	13.082,204	2,575	10.696,851	2,105
Muara Sabak Barat	1.027,155	0,202	14.115,585	2,778	9.363,077	1,843	1.530,402	0,301	2.592,094	0,510
Muara Sabak Timur	953,897	0,188	36.130,186	7,111	1.560,948	0,307	1.810,558	0,356	45,136	0,00888
Nipah Panjang	450,069	0,089	23.256,518	4,577	3.559,885	0,701	603,388	0,119	1.419,981	0,27947
Rantau Rasau	1.659,766	0,327	17.484,438	3,441	480,768	0,095	713,622	0,140	7,820	0,00153
Sadu	402,704	0,079	25.026,889	4,926	14.451,083	2,844	171,177	0,03369	20.549,468	4,04452

Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Total	8.340,505	1,642	238.941,402	47,028	71.866,944	14,145	44.966,358	8,850	143.965,669	28,335

Sumber: Hasil Analisa 2024

Sementara itu, kategori “Sedang” mencakup 71.866,94 hektar (14,145 persen), termasuk di antaranya wilayah Geragai (4.478,93 hektar), Mendahara Ulu (5.283,94 hektar), dan Muara Sabak Barat (9.363,08 hektar). Ini merupakan zona transisi ekologis yang penting untuk dipertahankan dan ditingkatkan melalui strategi restorasi lanskap dan pengelolaan berbasis masyarakat. Kategori “Tinggi” menempati 44.966,36 hektar (8,850 persen) dan tersebar di berbagai wilayah seperti Geragai (14.624,14 hektar) dan Mendahara Ulu (13.082,20 hektar), yang memperlihatkan potensi penguatan fungsi habitat alami melalui integrasi dalam rencana tata ruang dan kawasan lindung. Sebaliknya, kategori “Sangat Rendah” hanya mencakup 8.340,51 hektar (1,642 persen), menunjukkan wilayah dengan nilai biodiversitas yang relatif terbatas. Kawasan ini termasuk beberapa bagian di Rantau Rasau, Muara Sabak Barat, dan Dendang, yang perlu diberi perhatian melalui intervensi berbasis rehabilitasi habitat atau penguatan koridor ekologis.

Dengan komposisi distribusi ini, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki peluang besar dalam menjaga dan meningkatkan daya dukung ekologis wilayahnya melalui pendekatan konservasi biodiversitas yang terpadu. Pelibatan masyarakat lokal, penguatan kelembagaan lingkungan, dan penyelarasan rencana tata ruang dengan zonasi ekosistem bernilai tinggi akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan jasa ekosistem biodiversitas di masa depan.

4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

a. Kondisi Energi

1) Konsumsi Listrik Per Kapita

Penggunaan listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai sarana penerangan untuk kegiatan rumah tangga, perdagangan dan jasa,

pemerintahan serta fasilitas sosial maupun penerangan umum dilayani oleh PT. PLN (Persero). Sebagian besar listrik yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sisanya diusahakan sendiri oleh masyarakat dengan tenaga diesel. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

Indikator	Jumlah Rumah Tangga	Realisasi 2024				
		Jumlah Pelanggan Rumah Tangga PLN	Jumlah Rumah Tangga Non PLN	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga (PLN & Non PLN)	RE PLN (%)	RE Total (%)
Konsumsi Listrik Per Kapita	71.332	66.173	5.141	71.314	92,78	99,99

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Tabel 2.44 menunjukkan pada tahun 2024, kondisi elektrifikasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan capaian yang sangat signifikan dalam pemerataan akses energi listrik bagi rumah tangga. Berdasarkan data resmi dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2025), jumlah total rumah tangga yang tercatat di wilayah ini mencapai 71.332 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66.173 rumah tangga telah menjadi pelanggan listrik dari PLN, sedangkan 5.141 rumah tangga memperoleh akses listrik dari sumber non-PLN seperti pembangkit mandiri, solar home system (SHS), atau jaringan desa melalui mekanisme swadaya masyarakat maupun program pemerintah non-PLN.

Secara keseluruhan, total rumah tangga yang telah menikmati layanan kelistrikan baik dari PLN maupun non-PLN mencapai 71.314 rumah tangga. Hal ini mencerminkan tingkat Rasio Elektrifikasi (RE) secara total sebesar 99,99 persen, menempatkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu daerah dengan kinerja elektrifikasi hampir universal di Provinsi Jambi. Adapun RE khusus untuk pelanggan PLN berada pada angka 92,78 persen,

yang menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil rumah tangga (sekitar 7,21 persen) yang mengandalkan sumber energi listrik alternatif di luar jaringan PLN.

Tingginya capaian rasio elektrifikasi ini mengindikasikan keberhasilan berbagai program strategis yang telah dilaksanakan, baik melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat. Kondisi ini juga memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan yang inklusif, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta pencapaian target-target pembangunan energi nasional.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa masih terdapat sejumlah kecil rumah tangga yang belum terjangkau oleh layanan kelistrikan PLN. Oleh karena itu, intervensi lanjutan melalui program elektrifikasi desa terpencil, penguatan infrastruktur distribusi listrik, dan optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan di tingkat lokal menjadi krusial untuk memastikan keterjangkauan dan keberlanjutan akses energi secara merata di seluruh pelosok Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

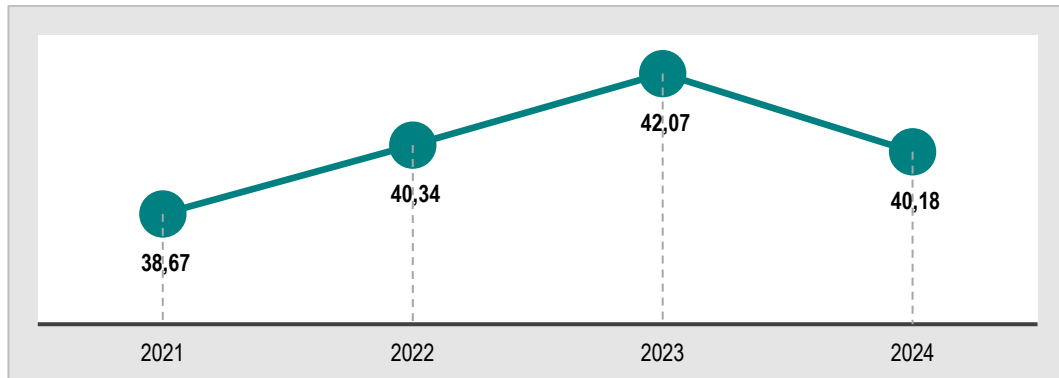
b. Kondisi Air

1) Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Ketersediaan air minum layak, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, menjadi fondasi dalam mewujudkan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

Gambar 2.4
 Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum di
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Data terkait persentase rumah tangga yang terlayani air minum menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun dalam empat tahun terakhir. Pada 2021 menunjukkan angka 38,67 persen meningkat menjadi 40,34 persen pada 2022. Selanjutnya capaian tersebut mengalami peningkatan lagi pada 2023 sebesar 42,07, namun pada 2024 mengalami penurunan sebesar 40,18 persen, capaian ini bahkan berada di bawah persentase capaian dua tahun sebelumnya. Ini berarti bahwa akses rumah tangga terhadap air minum layak masih sangat rendah dan butuh intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan penyediaan di setiap rumah tangga yang masih belum mendapat akses penyediaan air minum.

c. Kemandirian Pangan

1) Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan digunakan untuk mengukur

beberapa indikator dalam menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah (Badan Pangan Nasional, 2024).

Tabel 2.45
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024

Indeks Ketahanan Pangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	69,79	72,21	70,65	71,22	69,99
Provinsi Jambi	70,00	74,18	69,50	72,17	68.23
Nasional	61,4	59,2	60,2	-	71.2

Sumber: diolah dari Badan Pangan Nasional, 2024

Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional tahun 2020 hingga 2024 dapat diketahui bahwa Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung bersifat fluktuatif pada tahun 2020 sebesar 69,79 kemudian naik menjadi 72,21 kemudian turun 70,65 kemudian naik 71,22 pada tahun 2023 dan turun lagi pada tahun 2024 menjadi 69,99. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan.

Data Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur jika dibandingkan dengan data Provinsi Jambi dan Nasional juga cenderung bersifat fluktuatif dimana pada tahun 2020 data indeks ketahanan pangan lebih rendah dari data Provinsi Jambi, namun lebih tinggi daripada data nasional yang hanya 61,4. Pada tahun 2021 data indeks ketahanan pangan Kabupaten Tanjung Timur lebih rendah daripada Provinsi Jambi namun lebih rendah daripada data nasional yang hanya 59,2. Pada tahun 2022 data indeks ketahanan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi daripada data Provinsi Jambi dan Nasional. Pada tahun 2023 data indeks ketahanan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih rendah daripada data Provinsi Jambi. Sementara itu pada tahun 2024 data indeks ketahanan pangan lebih rendah

daripada Provinsi Jambi dan lebih rendah daripada data level nasional. Hal ini menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum stabil.

2) Prevalensi Ketidacukupan Pangan

Indeks Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu (Badan Pangan Nasional, 2024). Indeks ini digunakan untuk mengukur jumlah penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan yaitu energi minimum untuk hidup sehat dan aktif di suatu wilayah (nasional atau provinsi atau kabupaten/kota) pada tahun tertentu.

Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional pada tahun 2024 angka prevalensi ketidacukupan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif dari 9,89 di tahun 2020 turun menjadi 8,37 tahun 2021 kemudian naik 11,31 tahun 2022 naik menjadi 12,32 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 13,25. Dalam perhitungan ini jika semakin besar nilai angka prevalensi ketidacukupan pangan, maka semakin banyak proporsi jumlah penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi energi minimum untuk hidup sehat dan aktif di suatu wilayah.

Tabel 2.46

Indeks Pravalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024

Indeks Pravalensi Ketidacukupan Pangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	9,89	8,37	11,31	12,32	13,25
Provinsi Jambi	9,12	9,25	12,14	12,83	10,58
Nasional	8,34	8,49	10,21	8,53	8,27

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Data Prevalensi Ketidacukupan Pangan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 Kabupaten Tanjung Jabung Timur jika dibandingkan dengan data Provinsi Jambi dan Nasional juga bersifat fluktuatif pada tahun 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi daripada data Provinsi Jambi dan Nasional. Kemudian mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga tahun 2024 dibandingkan data Provinsi Jambi dan Nasional.

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Aspek lingkungan hidup merupakan bagian integral dari layanan urusan wajib yang perlu diintegrasikan dalam setiap aspek pembangunan. Hal ini mencakup upaya pelestarian sumber daya alam, pengelolaan limbah, kualitas air dan udara, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Sebagai bagian dari perencanaan, penting untuk menetapkan kebijakan yang mengatur penggunaan lahan secara berkelanjutan, mempromosikan energi bersih, serta menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam segala proyek infrastruktur. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan juga penting, yang dapat dicapai melalui edukasi dan program-program berbasis komunitas.

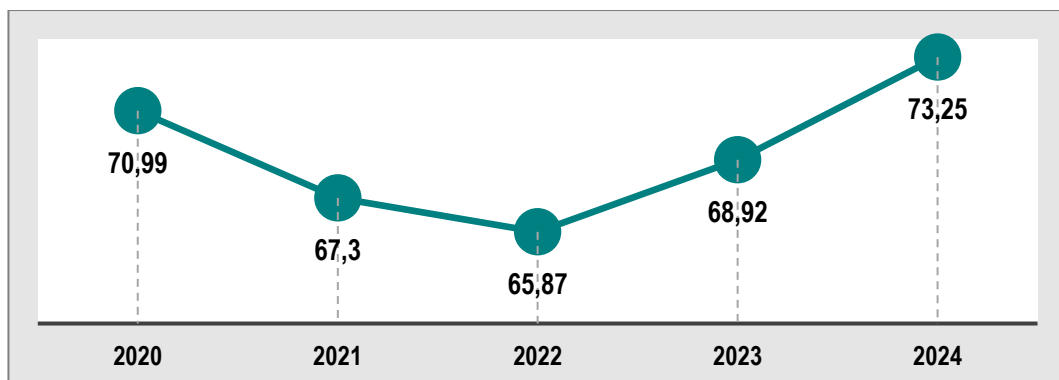
Implementasi strategi lingkungan hidup harus mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal tersebut mencakup integrasi teknologi ramah lingkungan dalam industri dan sektor lainnya, serta pengembangan infrastruktur hijau di kawasan strategis. Pemantauan kualitas lingkungan secara teratur, pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian polusi adalah langkah-langkah penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas hidup. Kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan perlindungan area pesisir juga perlu diintegrasikan untuk menjaga kekayaan alam Tanjung Jabung Timur. Dengan fokus pada aspek lingkungan hidup, dokumen perencanaan daerah tidak hanya akan memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi

juga menjaga keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang, memastikan pembangunan yang harmonis antara manusia dan alam.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Data indikator lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan tantangan dan upaya berkelanjutan dalam pengelolaan kualitas lingkungan. Terdapat empat indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan hidup, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan.

Gambar 2.5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024

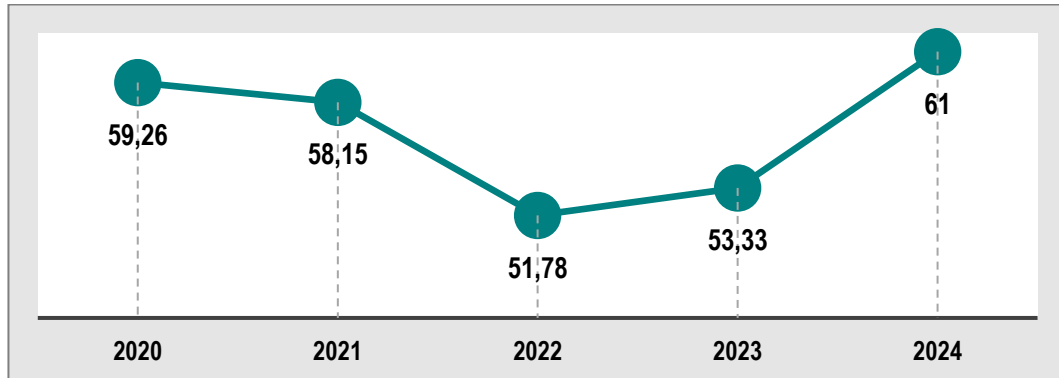


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Secara umum, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami fluktuasi selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IKLH tercatat sebesar 70,99, kemudian menurun pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi 67,3 dan 65,87. Namun, terdapat tren pemulihan pada tahun 2023 dan 2024, dengan nilai meningkat menjadi 68,92 dan mencapai 73,25. Hal ini mencerminkan adanya pemulihan kualitas lingkungan secara bertahap, yang dapat dikaitkan dengan peningkatan program perlindungan lingkungan dan pengendalian pencemaran yang lebih efektif.

Gambar 2.6

Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

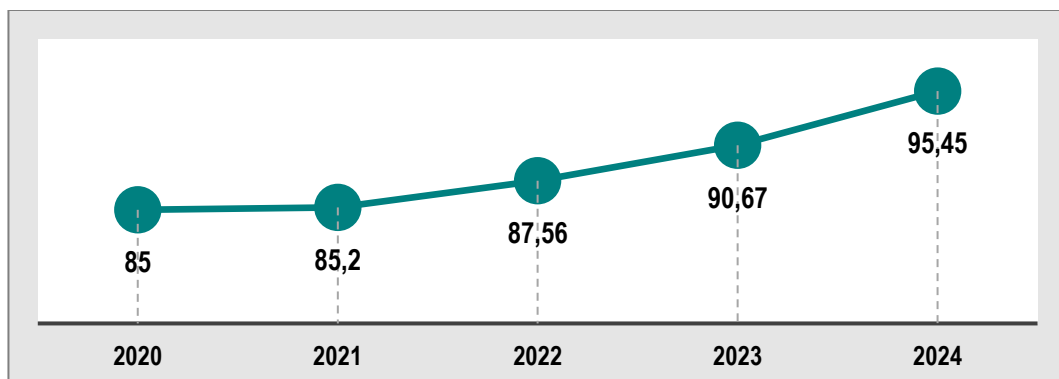


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Indeks Kualitas Air, yang menjadi indikator penting dalam menjaga daya dukung ekosistem dan kesehatan masyarakat, menunjukkan nilai yang relatif rendah dibandingkan indikator lainnya. Nilai indeks ini sempat berada pada titik terendah di tahun 2022 sebesar 51,78, yang kemudian mengalami peningkatan bertahap menjadi 53,33 di tahun 2023 dan 61,00 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan perbaikan dalam pengelolaan kualitas sumber daya air, namun masih diperlukan intervensi yang lebih terintegrasi untuk mencapai standar yang ideal.

Gambar 2.7

Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

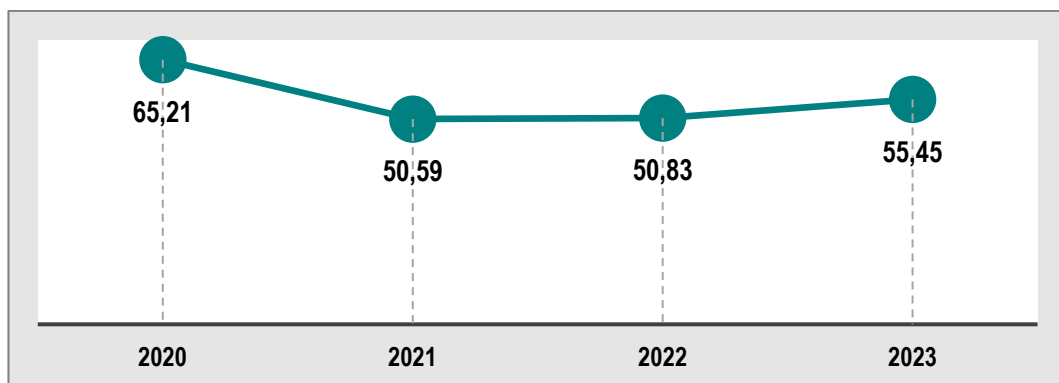


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Sebaliknya, Indeks Kualitas Udara memperlihatkan kinerja yang sangat baik dan konsisten meningkat. Dari angka 85,00 pada tahun 2020, indeks ini

terus menunjukkan tren positif hingga mencapai 95,45 pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan pengendalian emisi dan pengelolaan polusi udara, serta menunjukkan keberhasilan pengendalian aktivitas yang berpotensi mencemari udara, seperti pembakaran lahan dan emisi transportasi.

Gambar 2.8
Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Sementara itu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 dan 2022 dengan nilai berturut-turut 50,59 dan 50,83, dari posisi awal 65,21 pada tahun 2020. Penurunan ini dapat disebabkan oleh peningkatan alih fungsi lahan dan deforestasi di beberapa wilayah. Meskipun terjadi sedikit peningkatan menjadi 55,45 pada tahun 2023, belum terdapat data yang tersedia untuk tahun 2024, sehingga perlu perhatian khusus terhadap isu pengendalian alih fungsi lahan, terutama di kawasan strategis ekologis.

Secara keseluruhan, capaian indikator lingkungan hidup ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengalami kemajuan dalam beberapa aspek kualitas lingkungan, khususnya dalam hal udara dan IKLH secara umum. Namun demikian, tantangan masih perlu dihadapi terutama dalam pengelolaan kualitas air dan tutupan lahan. Oleh karena itu, arah kebijakan lingkungan ke depan perlu difokuskan pada

penguatan kapasitas kelembagaan, pengawasan yang lebih intensif, serta perluasan program restorasi dan rehabilitasi lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Layak

Sanitasi layak merujuk pada fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat dasar kebersihan dan aksesibilitas, seperti jamban sehat yang tidak mencemari lingkungan, serta memiliki saluran pembuangan yang memadai. Sementara itu, sanitasi aman merupakan kategori yang lebih tinggi dari sanitasi layak. Sanitasi ini tidak hanya mencakup fasilitas yang layak, tetapi juga memastikan bahwa limbah manusia diolah secara aman baik di tempat maupun melalui sistem pengumpulan dan pengolahan terpusat. Oleh karena itu, seluruh sanitasi aman juga merupakan sanitasi layak, namun tidak sebaliknya.

Tabel 2.47
Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Aman dan Layak di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Akses Sanitas Aman	N/A	N/A	N/A	0,48
Akses Sanitasi Layak	45,93	47,16	48,96	46,38

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2025, yang mencakup rentang waktu 2021 hingga 2024, perkembangan akses rumah tangga terhadap sanitasi menunjukkan dinamika yang perlu dicermati. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tercatat sebesar 45,93 persen. Capaian ini meningkat menjadi 47,16 persen pada tahun 2022, dan kembali mengalami peningkatan menjadi 48,96 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 46,38 persen. Tren ini

menunjukkan bahwa meskipun secara umum terjadi peningkatan dalam dua tahun awal, capaian pada tahun terakhir mengalami kemunduran.

Di sisi lain, data mengenai akses rumah tangga terhadap sanitasi aman tidak tersedia pada tahun 2021 hingga 2023. Baru pada tahun 2024 tercatat bahwa hanya 0,48 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman. Angka ini sangat rendah dan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih bergantung pada fasilitas sanitasi yang belum memenuhi standar pengelolaan limbah yang aman dan berkelanjutan. Perbedaan yang sangat signifikan antara cakupan sanitasi layak dan sanitasi aman di tahun 2024 menjadi indikasi bahwa infrastruktur pengolahan limbah, baik secara onsite (misalnya tangki septik yang memenuhi standar) maupun *offsite* (seperti sistem pengolahan air limbah terpusat), masih sangat terbatas.

c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Sistem jaringan persampahan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi:

- 1) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional di Kecamatan mendahara Ulu dengan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*) dengan daerah pelayanan meliputi kecamatan Mendahara Ulu, sebagian Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mendahara Ilir;
- 2) Tempat pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Kelurahan Parit Culum I dengan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*) di Kecamatan Muara Sabak Barat melayani Kecamatan Dendang, Kecamatan Muara Sabak Barat, Sebagian Kecamatan Geragai, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Nipah Panjang;
- 3) Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Proses Pengelolaan sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum belum tertangani dengan baik, terlihat dengan masih kurangnya jumlah

TPS dan tong-tong sampah rumah tangga yang menghiasi jalan-jalan pemukiman warga di perkotaan maupun di pedesaan. Berikut timbulan sampah per tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut.

Tabel 2.48

Data Timbulan Sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Kecamatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mendahara	4.826	4.826	4.826	4.826	5.164
Mendahara Ulu	3.468	3.468	3.468	3.468	3.356
Geragai	4,277	4,277	4,277	4,277	5.566
Dendang	2.752	2.752	2.752	2.752	2.972
Muara Sabak Barat	3.302	3.302	3.302	3.302	3.347
Muara Sabak Timur	5.744	5.744	5.744	5.744	6.188
Kuala Jambi	2.693	2.693	2.693	2.693	2.858
Rantau Rasau	4.349	4.349	4.349	4.349	4.587
Berbak	1.814	1.814	1.814	1.814	1.958
Nipah Panjang	4.683	4.683	4.683	4.683	5.056
Sadu	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
Jumlah (ton)	40.148	40.148	40.148	40.148	43.292

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Data timbulan sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan variasi antarwilayah kecamatan dengan kecenderungan peningkatan pada tahun terakhir. Sebagian besar kecamatan mencatatkan angka timbulan sampah yang stabil dari tahun 2020 hingga 2023, yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024. Kecenderungan ini mencerminkan dinamika sosial-ekonomi dan pertumbuhan aktivitas permukiman yang turut memengaruhi volume sampah di daerah.

Kecamatan dengan timbulan sampah terbesar secara konsisten adalah Muara Sabak Timur, yang mencatat angka sebesar 6.188 ton pada tahun 2024, meningkat dari 5.744 ton pada empat tahun sebelumnya. Kecenderungan serupa juga terlihat di Geragai dan Mendahara, yang mengalami peningkatan dari kondisi stabil di angka 4.277 ton dan 4.826 ton, menjadi 5.566 ton dan

5.164 ton pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan peran penting kecamatan-kecamatan tersebut sebagai kawasan pertumbuhan dengan intensitas aktivitas penduduk yang tinggi.

Kecamatan lainnya seperti Rantau Rasau, Nipah Panjang, dan Muara Sabak Barat juga menunjukkan pola yang serupa, meskipun dalam skala yang lebih moderat. Timbulan sampah di Rantau Rasau, misalnya, meningkat dari 4.349 ton menjadi 4.587 ton pada tahun 2024. Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Mendahara Ulu, Berbak, dan Sadu cenderung mencatatkan volume yang relatif stabil, dengan angka tetap sepanjang lima tahun terakhir termasuk Kecamatan Sadu yang mempertahankan nilai sebesar 2.240 ton setiap tahun.

Stabilitas data pada sebagian besar kecamatan hingga tahun 2023 mencerminkan efektivitas sistem pengelolaan sampah yang masih berlangsung dalam ritme yang konsisten, sementara peningkatan yang mulai muncul pada tahun 2024 dapat menjadi indikator awal atas bertambahnya beban lingkungan akibat pertumbuhan aktivitas penduduk. Oleh karena itu, informasi ini berperan penting sebagai dasar penyusunan kebutuhan infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang adaptif terhadap tren perkembangan wilayah.

d. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Penanganan sampah yang terlayani dihitung berdasarkan jumlah sampah yang diangkut ke fasilitas TPA. Berdasarkan data lima tahun terakhir, cakupan pelayanan sampah yang terlayani tercatat secara kumulatif mengalami peningkatan terbatas. Tabel 2.49 menunjukkan bahwa total volume sampah yang terlayani pada tahun 2020-2022 berada pada angka yang konstan, yaitu sebesar 15.696 ton per tahun. Peningkatan mulai terlihat pada tahun 2023 dan 2024, dengan jumlah mencapai 15.762 ton per tahun, yang mencerminkan tambahan pelayanan sebesar 66 ton dari Kecamatan Mendahara. Persentase di bawah dihitung berdasarkan penanganan sampah

yang terlayani dengan jumlah timbulan sampah yang ada di Kabupaten Tanung Jabung Timur.

Tabel 2.49
Penanganan Sampah Terlayani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024

Kecamatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mendahara	0	0	0	66	66
Mendahara Ulu	0	0	0	0	0
Geragai	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409
Dendang	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132
Muara Sabak Barat	7.263	7.263	7.263	7.263	7.263
Muara Sabak Timur	964	964	964	964	964
Kuala Jambi	482	482	482	482	482
Rantau Rasau	964	964	964	964	964
Berbak	0	0	0	0	0
Nipah Panjang	482	482	482	482	482
Sadu	0	0	0	0	0
Jumlah (Ton)	15.696	15.696	15.696	15.762	15.762
Persentase	39,09	39,09	39,09	39,27	36,41

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Berdasarkan persentase di atas, dapat disimpulkan bahwa penangan sampah terlayani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah seperti armada pengangkutan dan kapasitas dari TPA yang sudah sangat penuh dan belum ada penambahan kapasitas.

6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak memiliki atau tidak pernah menghitung data spesifik terkait penurunan intensitas emisi gas rumah kaca. Perhitungan yang pernah dilakukan yang beririsan secara langsung adalah terkait indeks kualitas udara (IKA) yang sudah termasuk pada pembahasan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Ketidaktersediaan data emisi gas rumah kaca dapat memengaruhi pemerintah daerah dalam pengambilan

keputusan berbasis bukti/data, sehingga pemerintah daerah sulit untuk memetakan wilayah mana saja yang termasuk wilayah ramah lingkungan dan bebas emisi.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menghitung estimasi penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi tahun 2025-2045 sebagai acuan angka target sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tanjung Jabung Timur
tahun 2025-2030

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Emisi GRK (Ton CO ₂ Eq)	756.439,59	832.091,03	918.909,19	1.014.763,89	1.107.215,59	1.210.457,15

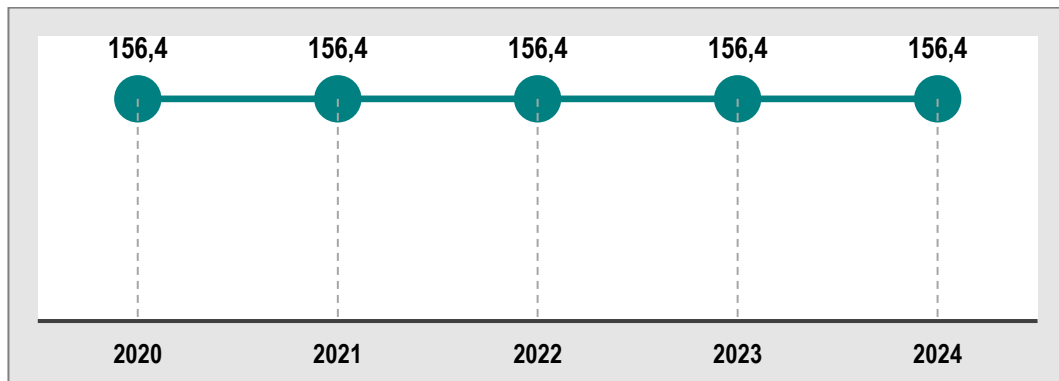
Sumber: Bappenas, 2025

b. Indeks Risiko Bencana

Dalam indeks risiko bencana, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 tergolong tinggi sebagaimana Gambar 2.9 berikut.

Gambar 2.9
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun, 2020-2024



Keterangan: Kelas Risiko Tinggi

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), 2025

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara konsisten tercatat berada dalam kategori risiko tinggi berdasarkan hasil pemetaan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Nilai indeks yang dicatat pada setiap tahun selama periode tersebut adalah 156,4, tanpa mengalami perubahan signifikan sejak tahun 2020 hingga 2024. Nilai ini menempatkan kabupaten ini dalam kelas risiko tinggi, yang berarti daerah tersebut memiliki potensi kerentanan yang besar terhadap bencana alam maupun non-alam, baik dari aspek bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), maupun kapasitas (*capacity*).

Stabilitas nilai indeks pada angka tinggi tersebut menunjukkan bahwa risiko bencana bersifat struktural dan sistemik, bukan hanya bersumber dari intensitas kejadian bencana semata, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas adaptif dan mitigatif pada tingkat kelembagaan, infrastruktur, serta masyarakat. Hal ini menjadi peringatan strategis bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya berfokus pada respons pasca bencana, tetapi juga

melakukan transformasi tata kelola risiko secara proaktif melalui perencanaan pengurangan risiko bencana yang berbasis risiko (*risk-informed development*).

Beberapa faktor penyumbang risiko tinggi tersebut mencakup kerentanan terhadap bencana banjir, abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta perubahan iklim yang memperburuk ketidakpastian cuaca dan menambah tekanan terhadap sistem sosial-ekologis masyarakat pesisir dan wilayah gambut. Dalam konteks ini, nilai IRB 156,4 mengindikasikan urgensi peningkatan kapasitas kelembagaan, sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta penguatan literasi masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim.

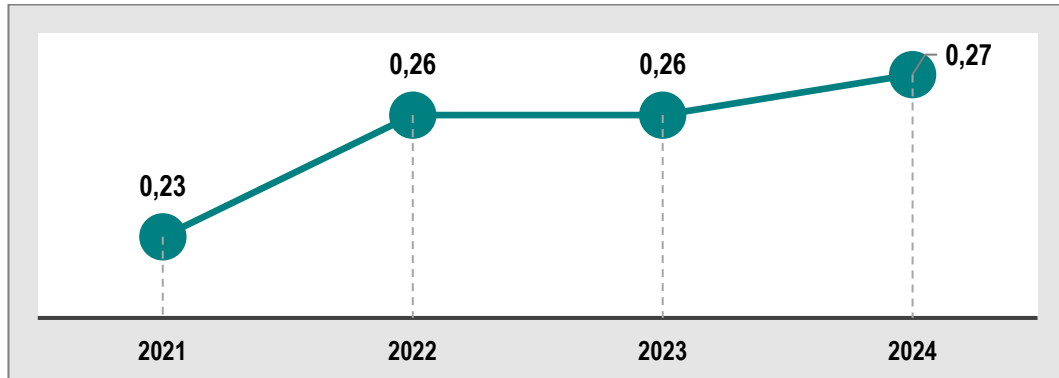
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu menjadikan hasil pemetaan IRBI ini sebagai dasar perencanaan strategis dalam RPJMD maupun dokumen turunan seperti Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Kontinjensi, serta integrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selain itu, sinergi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah pusat serta mitra pembangunan menjadi penting untuk mendorong resiliensi jangka panjang di tengah peningkatan frekuensi dan intensitas bencana akibat perubahan iklim global.

c. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah yang diukur melalui Indeks Kapasitas Daerah merupakan indikator penting untuk menilai kesiapsiagaan dan kemampuan adaptif suatu wilayah dalam menghadapi ancaman bencana. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tren Indeks Kapasitas Daerah dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan meskipun masih berada dalam kategori rendah. Indeks Ketahanan Daerah yang diukur melalui Indeks Kapasitas Daerah merupakan indikator penting untuk menilai kesiapsiagaan dan kemampuan adaptif suatu wilayah dalam menghadapi ancaman bencana. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tren Indeks Kapasitas Daerah dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan meskipun masih berada dalam kategori rendah.

Gambar 2.10

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2024



Keterangan: Kelas Risiko Rendah

Sumber: Bapperida Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Pada tahun 2021, indeks kapasitas tercatat sebesar 0,23 dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,26 pada tahun 2022 dan 2023, sebelum naik menjadi 0,27 pada tahun 2024. Meskipun kenaikannya relatif lambat, hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kapasitas kelembagaan, sosial, dan infrastruktur dasar yang mendukung ketahanan daerah, walaupun belum cukup signifikan untuk keluar dari klasifikasi “rendah”.

Kondisi ini menggambarkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menghadapi tantangan serius dalam hal kesiapan sistemik terhadap bencana. Indeks ini mencerminkan kapasitas daerah dalam beberapa aspek utama, antara lain: sistem kelembagaan (keberadaan BPBD, regulasi, dan SOP penanggulangan bencana), kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat, infrastruktur pendukung evakuasi dan mitigasi, serta integrasi pengurangan risiko dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rendahnya kapasitas ini menjadi salah satu faktor penyumbang tetap tingginya Indeks Risiko Bencana (IRBI) di kabupaten ini, yang sejak 2020 hingga 2024 stagnan pada angka 156,4 (kategori tinggi). Artinya, meskipun risiko bahaya tidak meningkat, kapasitas untuk mengelola risiko tersebut belum mengalami peningkatan yang sepadan.

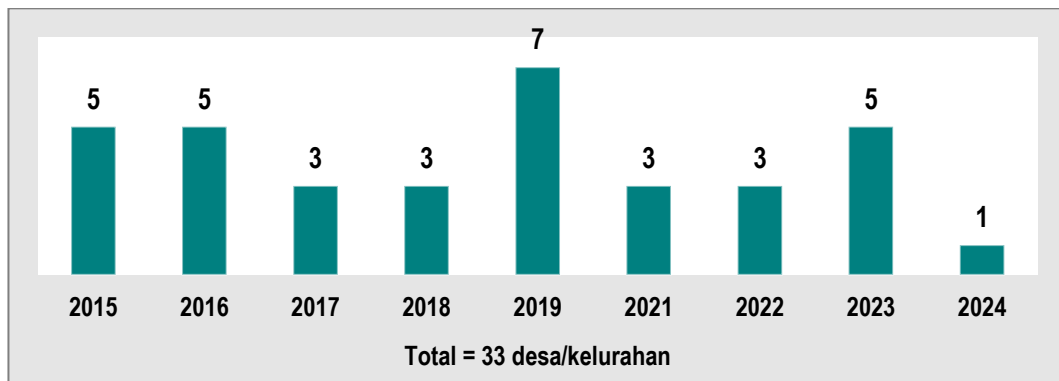
Pemerintah daerah perlu memanfaatkan tren kenaikan indeks ini sebagai momentum untuk mempercepat pembangunan daerah yang tangguh

bencana. Dengan mendorong integrasi pengurangan risiko ke dalam RPJMD dan program lintas sektor, diharapkan Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terus meningkat ke kategori menengah atau tinggi di tahun-tahun mendatang, sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Salah satu strategi dalam mitigasi bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dengan meningkatkan keswadayaan masyarakat, salah satunya dengan membentuk desa tangguh bencana.

Gambar 2.11

Jumlah Desa Tangguh Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2024



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Dalam upaya memperkuat ketangguhan wilayah terhadap risiko bencana, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membentuk sejumlah Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) secara bertahap sejak tahun 2015. Berdasarkan data valid yang telah dikompilasi, terdapat total 25 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang telah dibentuk selama periode sepuluh tahun terakhir.

Pembentukan Destana dimulai pada tahun 2015 dengan membentuk 5 desa, menandai komitmen awal pemerintah daerah dalam membangun sistem kesiapsiagaan berbasis komunitas. Tren ini berlanjut pada tahun 2016 dengan kembali membentuk 5 desa/kelurahan, mempertahankan konsistensi penguatan kapasitas lokal dalam menghadapi bencana. Tahun 2017 menyumbang 3 lokasi tambahan, disusul oleh 3 desa lainnya pada tahun 2018,

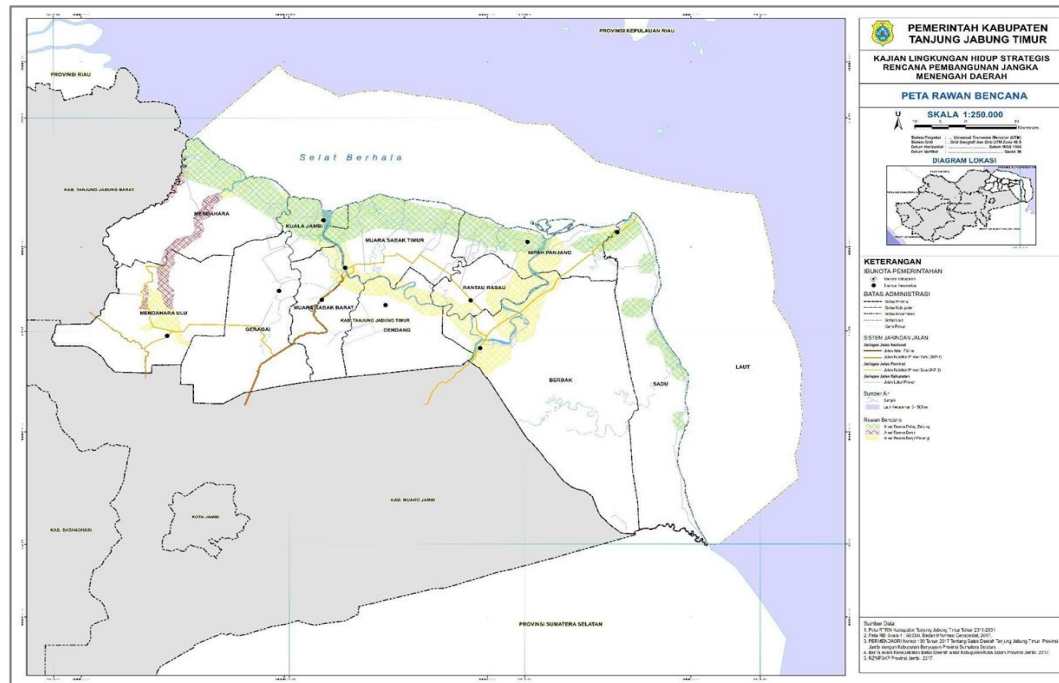
menunjukkan kesinambungan program meskipun dengan intensitas yang lebih rendah.

Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2019 dengan pembentukan 6 desa/kelurahan baru, menjadikan tahun tersebut sebagai periode ekspansi terbesar selama satu dekade terakhir. Upaya ini mencerminkan perhatian pemerintah daerah terhadap wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi. Di tahun-tahun berikutnya, tercatat pembentukan 3 desa/kelurahan pada 2021, dan masing-masing 3 desa/kelurahan juga pada tahun 2022 dan 2023. Sementara pada tahun 2024, terdapat 1 desa/kelurahan yang resmi dibentuk sebagai Destana.

Dengan pembentukan secara bertahap dan terencana, capaian ini mencerminkan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dalam pengurangan risiko bencana berbasis wilayah. Ke depan, penguatan kelembagaan, pelibatan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor tetap menjadi kunci dalam memperluas cakupan dan efektivitas program Destana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Salah satu fondasi penting dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah adalah Peta Rawan Bencana adalah. Tanpa peta yang akurat, perencanaan tidak bisa efektif, dan ketahanan wilayah sulit dicapai. Berikut tampilan peta rawan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambar 2.12
Peta Rawan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025



Sumber: BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Gambar 2.12 menampilkan peta rawan bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2025 sebagaimana disusun oleh BPBD setempat. Peta ini menunjukkan wilayah-wilayah yang memiliki potensi risiko bencana berdasarkan karakteristik geografis dan historis kejadian bencana di daerah tersebut. Visualisasi spasial ini berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan strategi mitigasi risiko bencana dan perencanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko. Kehadiran peta ini menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan yang berorientasi pada ketahanan daerah.

Selain itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki sistem jaringan evakuasi bencana yang berupa:

- Jalur evakuasi bencana banjir meliputi pengembangan ruas jalan yang terdapat di Kecamatan Muara Sabak timur, Kecamatan Berbak dan Kecamatan Dendang;

- Jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan meliputi pengembangan ruas jalan yang terdapat di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara Timur, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Sadu, Kecamatan Dendang, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai dan Kecamatan Berbak;
- Jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan banjir ROB meliputi pengembangan ruas jalan yang terdapat di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, dan Kecamatan Sadu;
- Jalur evakuasi bencana abrasi meliputi pengembangan ruas jalan yang terdapat di Kecamatan Berbak, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Kuala Jambi; dan
- Ruang evakuasi bencana berupa bangunan publik dan/atau ruang terbuka sebagai tempat evakuasi bencana.

7. Demografi

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Namun penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan, jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, dan persebaran penduduk yang tidak seimbang ditambah daya dukung alam dan lingkungan yang terbatas, akan menimbulkan masalah dan beban bagi negara/daerah. Kualitas dan kuantitas sumber daya alam akan mengalami penurunan yang cepat jika angka pertumbuhan penduduk terus meningkat. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya

apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk akan menjadi beban pembangunan.

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2) yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk suatu negara atau daerah bisa diartikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal atas daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi penduduk adalah kumpulan manusia yang telah menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk dalam suatu daerah dapat bertumbuh negatif maupun positif. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah dari penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna dalam memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah pada masa yang akan datang titik dengan diketahui jumlah dari penduduk maka akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk dalam aspek sosial, ekonomi maupun politik.

Pertumbuhan dari penduduk memengaruhi secara langsung upaya peningkatan mutu maupun manfaat sumber daya manusia. pertumbuhan penduduk juga bisa berpengaruh terhadap kemampuan sumber daya alam untuk memberikan daya dukung dan daya tampung.

Tabel 2.51
Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024

Kondisi Kependudukan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (Jiwa)	229.813	231.772	234.134	236.727	244.905
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,1	0,64	0,94	0,99	0,95

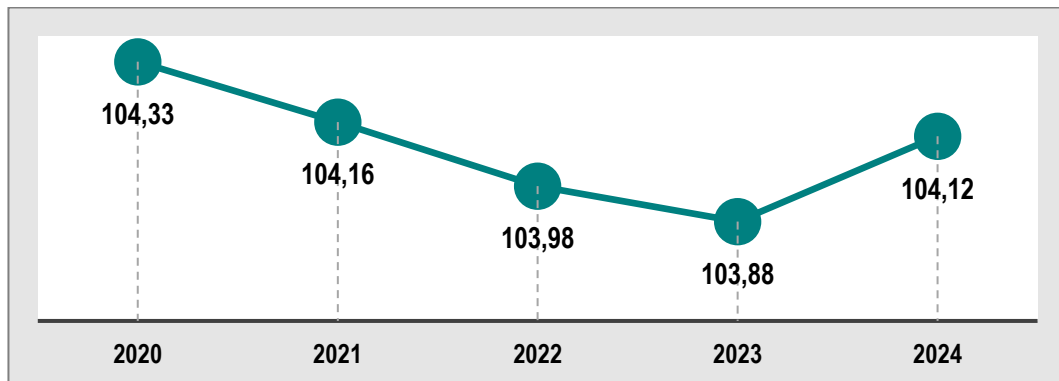
Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2020-2024 (data diolah)

Data jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil, dengan peningkatan jumlah penduduk dari 229.813 jiwa pada tahun 2020 menjadi 244.905 jiwa pada tahun 2024. Laju pertumbuhan tahunan yang berada dalam kisaran moderat, yaitu antara 0,64 persen hingga 1,10 persen, mencerminkan dinamika demografi yang terkontrol dan berkelanjutan. Stabilitas ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki struktur demografi yang kondusif sebagai potensi pembangunan daerah. Jumlah penduduk yang terus meningkat menjadi indikator adanya cadangan tenaga kerja yang melimpah, yang jika dikelola secara optimal, dapat menjadi penggerak utama dalam sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri kecil, dan jasa. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu tinggi juga memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan secara lebih terarah, tanpa tekanan berlebihan terhadap infrastruktur dasar. Hal ini menjadikan aspek kependudukan sebagai potensi strategis, bukan beban, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

b. Rasio Penduduk

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indeks *Sex Ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Gambar 2.13
Sex Ratio Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

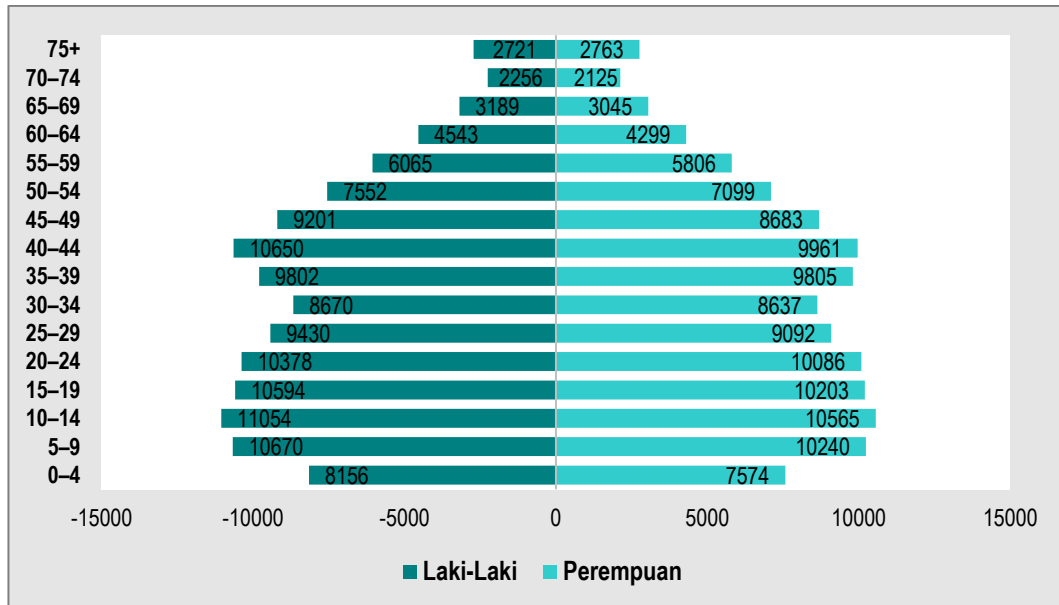


Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2025

Grafik di atas menunjukkan perkembangan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020–2024. Rasio jenis kelamin ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Secara umum, tren rasio jenis kelamin di wilayah ini mengalami fluktuasi yang relatif stabil, dengan nilai yang tetap berada di atas angka 100, yang menandakan bahwa jumlah penduduk laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan sepanjang periode tersebut.

Fluktuasi yang terjadi cenderung tidak signifikan secara ekstrem, yang mengindikasikan stabilitas demografis antara laki-laki dan perempuan di wilayah ini. Rasio jenis kelamin yang relatif seimbang seperti ini dapat menjadi indikator positif bagi perencanaan sosial dan ekonomi, terutama dalam mendukung struktur tenaga kerja, perencanaan pendidikan, dan program kesehatan berbasis gender. Dengan demikian, dinamika rasio jenis kelamin ini perlu tetap dipantau untuk memastikan pemerataan akses dan pelayanan publik yang responsif gender, terutama di sektor-sektor strategis seperti ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat.

Gambar 2.14
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2024



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024, struktur demografi daerah ini menunjukkan pola yang masih didominasi oleh kelompok usia muda dan usia produktif. Kelompok usia 10–14 tahun, 15–19 tahun, dan 20–24 tahun memiliki jumlah penduduk tertinggi, dengan distribusi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mencerminkan adanya potensi besar dalam sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pendidikan, pelatihan kerja, dan ketenagakerjaan. Sementara itu, jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) relatif lebih sedikit, yang menunjukkan beban ketergantungan masih rendah. Pola piramida yang melebar di bagian tengah menunjukkan bahwa Tanjung Jabung Timur tengah memasuki fase bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih dominan. Kondisi ini memberikan peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sistem layanan dasar yang responsif terhadap kebutuhan penduduk usia produktif.

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat memberikan gambaran mengenai sebaran dan konsentrasi penduduk di suatu wilayah, yang sangat relevan untuk alokasi sumber daya, pengembangan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik yang efisien dan merata. Berdasarkan data tahun 2024, total luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 5.087,07 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 244.905 jiwa, sehingga rata rata kepadatan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 mencapai 48,73 jiwa per km². Angka ini menunjukkan kepadatan rata-rata yang cukup moderat untuk skala kabupaten.

Tabel 2.52

Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan Penduduk per km ²
Mendahara	537,79	26.972	50,15
Mendahara Ulu	554,23	18.462	33,31
Geragai	556,30	28.415	51,08
Dendang	381,52	17.599	46,13
Muara Sabak	277,47	24.799	89,38
Muara Sabak	387,94	34.133	87,99
Kuala Jambi	114,95	15.046	130,89
Rantau Rasau	117,52	26.616	226,48
Berbak	1.169,17	11.024	9,43
Nipah Panjang	308,32	27.674	89,76
Sadu	620,85	14.165	22,82
Jumlah	5.087,07	244.905	48,73

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2025 (data diolah)

Dari tabel di atas, kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kecamatan Rantau Rasau menjadi kecamatan terpadat dengan 226,48 jiwa per km², diikuti oleh Kuala Jambi (130,89 jiwa/km²), dan Nipah Panjang (89,76 jiwa/km²). Kecamatan-kecamatan ini memiliki tingkat kepadatan yang berada di atas rata-rata kabupaten, yaitu sekitar 48,73 jiwa/km², mencerminkan konsentrasi

penduduk yang relatif tinggi, terutama di wilayah yang lebih mudah diakses atau memiliki aktivitas ekonomi yang padat. Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Muara Sabak Barat (89,38 jiwa/km²) dan Muara Sabak Timur (88,02 jiwa/km²) juga menunjukkan kepadatan tinggi, namun masih berada sedikit di bawah angka kecamatan terpadat. Sebaliknya, kecamatan seperti Berbak (9,43 jiwa/km²), Sadu (22,82 jiwa/km²), dan Mendahara Ulu (33,31 jiwa/km²) tergolong memiliki kepadatan penduduk yang rendah, jauh di bawah rata-rata kabupaten. Wilayah-wilayah ini umumnya memiliki luas geografis yang besar dan kemungkinan terbatasnya aksesibilitas atau aktivitas permukiman, yang memengaruhi persebaran penduduk. Temuan ini mencerminkan bahwa karakteristik geografis dan potensi ekonomi turut menentukan konsentrasi penduduk di masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

d. Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk menurut agama memperlihatkan bahwa pemeluk agama islam dengan jumlah terbesar merupakan mayoritas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jumlah terbesar berikutnya berturut turut Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha dan Hindu. Keragaman penganut agama ini memerlukan pembinaan untuk menumbuhkan rasa toleransi dan tenggang rasa antar pemeluk agama agar tidak muncul konflik yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Gambaran komposisi jumlah penganut agama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53

Komposisi Jumlah Penganut Agama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

Kecamatan	Agama					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Mendahara	26.948	29	1	NA	NA	NA
Mendahara Ulu	17.919	408	35	7	7	NA
Geragai	27.496	724	155	2	2	NA
Dendang	17.313	228	33	32	32	NA

Kecamatan	Agama					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Muara Sabak Barat	24.319	401	52	NA	NA	4
Muara Sabak Timur	33.873	220	19	NA	NA	1
Kuala Jambi	14.990	38	1	NA	NA	NA
Rantau Rasau	26.108	418	87	NA	NA	NA
Berbak	10.934	57	28	1	1	NA
Nipah Panjang	27.454	158	7	NA	NA	NA
Sadu	14.095	6	NA	40	40	NA
Jumlah	241.449	2687	418	82	133	5

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2025 (Diolah)

Data komposisi jumlah penganut agama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Islam, dengan jumlah mencapai 241.449 jiwa. Agama Protestan menjadi kelompok terbesar kedua sebanyak 2.687 jiwa, diikuti Katolik sebanyak 418 jiwa, Budha 133 jiwa, Hindu 82 jiwa, dan lainnya 5 jiwa. Kecamatan dengan populasi Islam tertinggi adalah Muara Sabak Timur, sementara penganut non-Islam tersebar terbanyak di Geragai dan Rantau Rasau. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan keberagaman keyakinan di wilayah ini, meskipun dominasi Islam sangat kuat di hampir seluruh kecamatan.

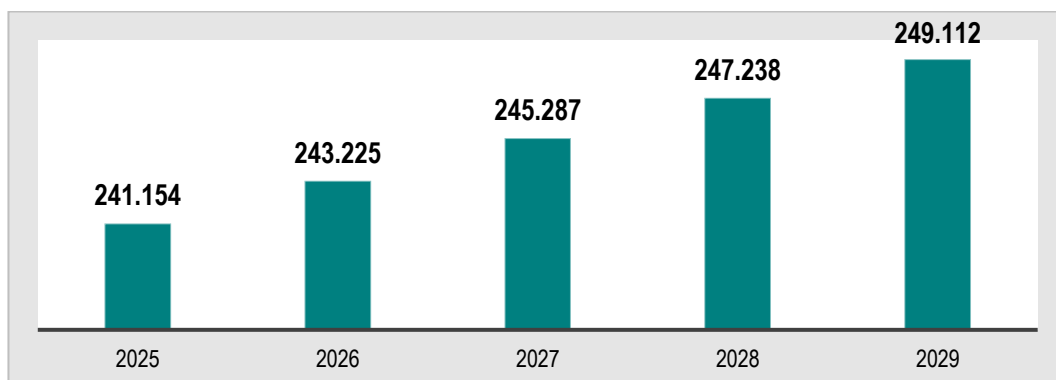
e. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029

1) Perkembangan Jumlah Penduduk

Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan adalah jumlah penduduk. Karena, perkembangan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan kebijakan pembangunan akan berpengaruh pada ketidakseimbangan ekologis. Hal tersebut dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat yang jumlahnya semakin berkembang, dapat seimbang dengan fasilitas yang disediakan. Berdasarkan hasil penghitungan, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meningkat hingga tahun 2029, hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.15

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029

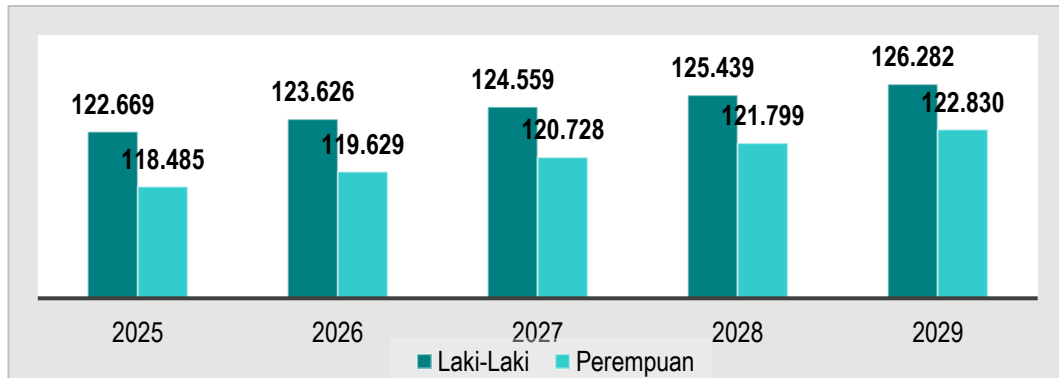


Sumber: RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2025 hingga 2029, terlihat adanya tren peningkatan populasi secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2025, jumlah penduduk tercatat sebesar 241.154 jiwa, dan mengalami peningkatan menjadi 249.112 jiwa pada tahun 2029. Ini menunjukkan adanya pertambahan sekitar 7.958 jiwa dalam rentang lima tahun. Fenomena ini lazim terjadi pada wilayah yang mulai memasuki fase transisi demografis, di mana angka kelahiran cenderung menurun sementara angka harapan hidup meningkat. Kondisi tersebut memiliki beberapa implikasi terhadap kebutuhan akan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan) masih akan meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk. Secara keseluruhan, proyeksi ini menegaskan pentingnya pemantauan dinamika penduduk secara berkelanjutan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berbasis bukti dan responsif terhadap perubahan demografis.

Data proyeksi jumlah penduduk di atas dapat dianalisis lebih dalam dengan membagi berdasarkan gender. Metode ini sangat penting guna menentukan intervensi kebijakan berbasis gender sehingga kebijakan publik dapat tepat sasaran. Adapun proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.16
 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029



Sumber: RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045

Berdasarkan grafik proyeksi jumlah penduduk menurut jenis kelamin untuk periode 2025 hingga 2029, terdapat kecenderungan bahwa jumlah penduduk laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan di setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan tren demografis yang umum terjadi, di mana pada awalnya angka kelahiran laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Selama periode lima tahun tersebut, rata-rata selisih penduduk antara laki-laki dan perempuan berkisar antara 4.000 hingga 4.500 jiwa. Dari sisi pertumbuhan, baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan jumlah secara konsisten tiap tahun. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat ketimpangan signifikan dalam tren pertumbuhan antar jenis kelamin, sehingga proporsi laki-laki dan perempuan tetap relatif seimbang. Secara umum, data ini mencerminkan struktur demografis yang stabil dan menunjukkan arah pertumbuhan penduduk yang seimbang dari sisi jenis kelamin, yang dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

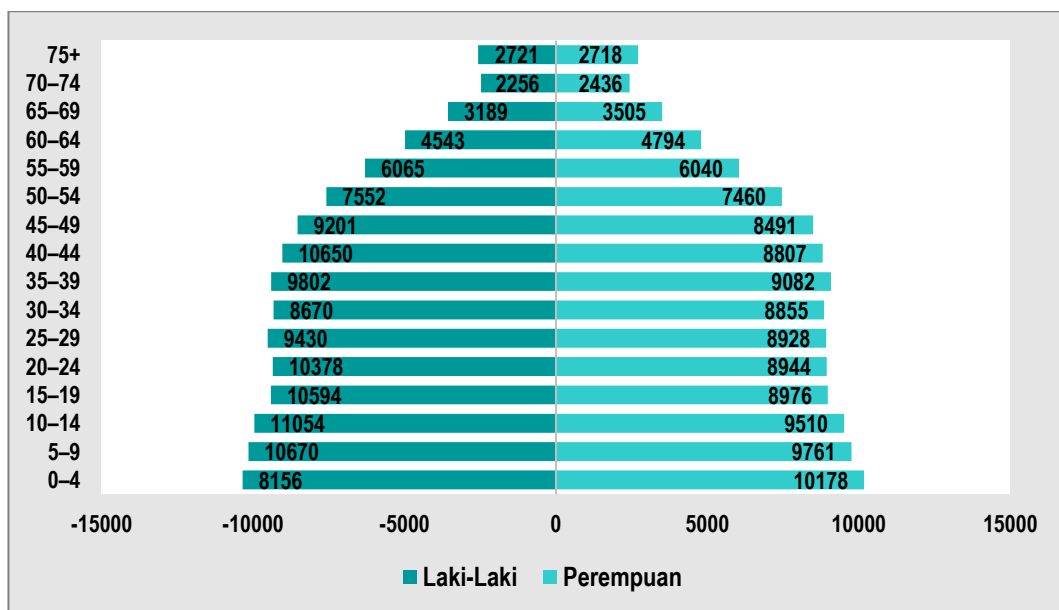
2) Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk lazim disajikan menggunakan piramida penduduk guna menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu populasi atau kelompok. Berdasarkan hasil proyeksi, distribusi penduduk Kabupaten

Tanjung Jabung Timur mengalami perkembangan yang pesat pada penduduk usia tua. Hal tersebut dapat terlihat dari piramida penduduk yang bersifat ekspansif berubah menjadi piramida stasioner pada tahun 2030. Hal tersebut perlu diantisipasi karena penduduk lansia akan semakin bertambah sehingga kebijakan yang bersifat inklusif bagi lansia perlu dikembangkan.

Gambar 2.17

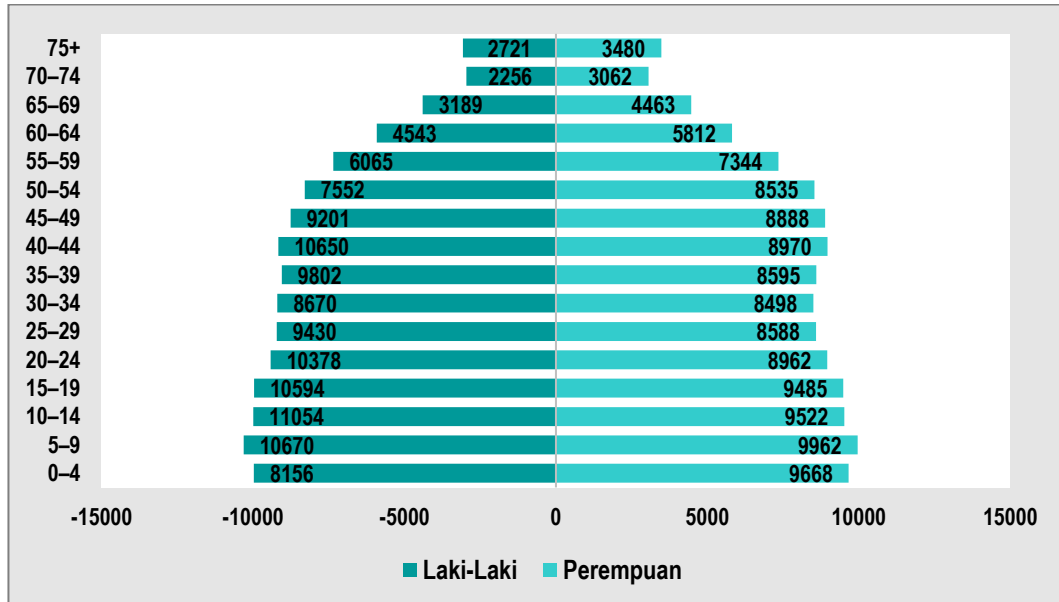
Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025



Sumber: RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045

Pada tahun 2025 diproyeksikan distribusi penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak jauh berbeda dengan distribusi penduduk tahun 2020. Hal tersebut terlihat dari jumlah penduduk terbanyak didominasi oleh usia 0-4 tahun dan 5-9 tahun. Tentu hal tersebut juga berimplikasi pada jumlah kelahiran bayi yang masih cukup tinggi. Sementara, penduduk dengan usia 70-74 tahun masih menjadi kelompok umur yang paling sedikit jumlahnya, namun terdapat sedikit perkembangan jumlah apabila dibandingkan dengan tahun 2020.

Gambar 2.18
Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2030



Sumber: RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045

Proyeksi distribusi penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2030 tidak berbeda jauh dengan tahun 2020 maupun 2025. Kendati demikian, penduduk usia 5-9 tahun mendominasi distribusi penduduk dan disusul dengan penduduk usia 0-4 tahun, penduduk usia 10-14 tahun dan penduduk usia 15-19 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa gelombang usia muda yang akan menjadi penduduk usia produktif akan mendominasi distribusi penduduk. Maka, pada tahun 2030 ini dapat menjadi titik awal mempersiapkan secara detail mengenai langkah-langkah menangkap peluang bonus demografi pada tahun mendatang.

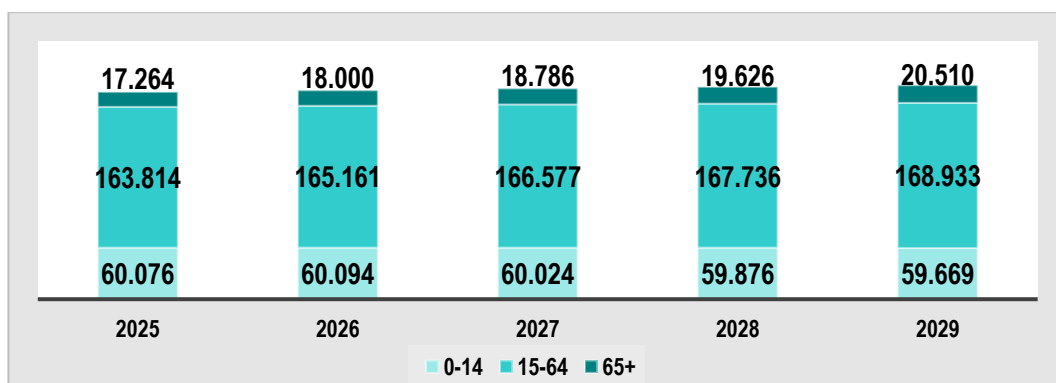
3) Bonus Demografi

Bonus demografi diartikan sebagai kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (penduduk usia kerja) lebih besar dibandingkan usia nonproduktif atau kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (biasanya antara 15-64 tahun) lebih tinggi daripada penduduk usia dependen (anak-anak dan lansia). Bonus demografi juga ditandai dengan kecenderungan penurunan

tingkat kelahiran dan tingkat kematian sehingga menyebabkan komposisi penduduk kategori anak-anak menjadi turun dan penduduk lanjut usia (lansia) cenderung meningkat (BPS, 2020). Dalam definisi tersebut, maka saat ini kabupaten Tanjung Jabung Timur sedang mengalami bonus demografi hingga tahun 2029. Struktur penduduk mengalami pergeseran, dimana terjadi penurunan komposisi anak menandakan bahwa jumlah anak dalam keluarga menjadi lebih sedikit sehingga secara tidak langsung dapat mendukung produktivitas anggota keluarga yang aktif dalam kegiatan ekonomi, karena mereka jadi dapat lebih fokus bekerja atau menjalankan usaha, dibandingkan apabila jumlah anak dalam keluarga lebih banyak. Namun, data ini juga menunjukkan bahwa persentase penduduk produktif dalam dua puluh tahun yang akan datang semakin menurun. Oleh karena itu, Kabupaten Tanjung Jabung perlu memanfaatkan bonus demografi ini dengan optimal.

Gambar 2.19

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2029



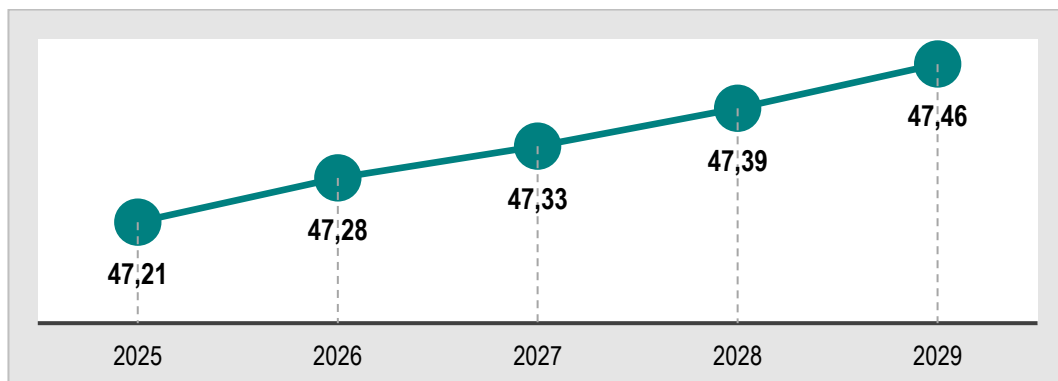
Sumber: RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045

Selain bonus demografi, data komposisi penduduk menurut umur juga menginformasikan tentang rasio ketergantungan, yaitu perbandingan komposisi usia non-produktif dengan usia produktif. Indikator ini mengindikasikan daya dukung antar generasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu menghubungkan kelompok yang berpotensi untuk bergantung dengan kelompok yang aktif secara ekonomi. Indikator ini juga

dapat dirinci menurut kelompok umur, yaitu kelompok anak-anak dan usia lanjut. Rasio ketergantungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih didominasi ketergantungan penduduk umur anak-anak (0-14 tahun). Rasio ketergantungan yang tinggi pada kelompok umur anak-anak berimplikasi munculnya kebutuhan investasi yang lebih tinggi pada pembangunan sekolah dan perawatan anak. Secara perlahan, rasio ketergantungan penduduk usia anak-anak mulai turun dari waktu ke waktu, tetapi rasio ketergantungan penduduk lansia (65 tahun ke atas) meningkat sebagai dampak dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama penurunan angka kematian bayi dan peningkatan umur harapan hidup. Selain itu, meskipun Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperkirakan akan masih mengalami bonus demografi hingga tahun 2045, namun proyeksi penduduk juga menunjukkan rasio beban ketergantungan semakin meningkat (lihat Gambar 2.20).

Gambar 2.20

Angka Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2029



Sumber: RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045

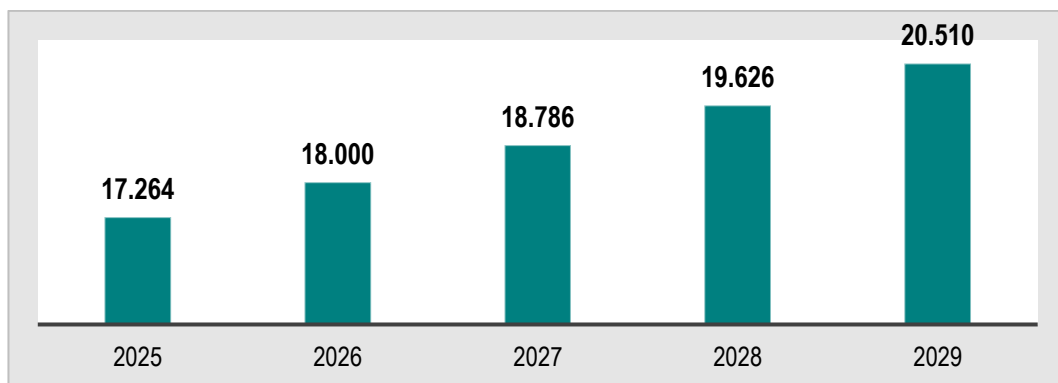
Dalam metode Cheung *et al.* (2003) suatu negara atau daerah dinyatakan telah mengalami bonus demografi, ketika rasio ketergantungan (*dependency ratio*) berada di bawah 50. Dalam definisi ini maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya bisa menikmati bonus demografi hingga tahun 2029.

4) Penduduk Usia Tua

Pada tahun 2030, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pertama. Sementara pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami fase bonus demografi kedua atau lebih dikenal sebagai ageing population. Hal tersebut juga dialami oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2029. Ledakan penduduk usia tua dapat ditangkap sebagai sebuah tantangan perekonomian dan kesejahteraan lansia Kabupaten Tanjung Jabung Timur, apabila tidak dikelola dengan baik. Peningkatan jumlah penduduk usia tua dapat dilihat berdasarkan hasil proyeksi berikut.

Gambar 2.21

Proyeksi Penduduk Usia Tua Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2029



Sumber: RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045

Berdasarkan data proyeksi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) untuk periode 2025 hingga 2029, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dan signifikan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia tua tercatat sebanyak 17.264 jiwa, dan meningkat setiap tahun hingga mencapai 20.510 jiwa pada tahun 2029. Dengan demikian, dalam kurun waktu lima tahun, terjadi kenaikan sebesar 3.246 jiwa atau sekitar 18,8% dari total awal.

Peningkatan ini mencerminkan fenomena ageing population yang mulai dialami oleh banyak wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini bisa disebabkan oleh meningkatnya angka harapan hidup, perbaikan layanan kesehatan, serta penurunan angka kelahiran.

Dengan meningkatnya jumlah lansia, pemerintah daerah maupun nasional perlu mengantisipasi tantangan-tantangan yang muncul, serta mengintegrasikan perspektif lansia ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta prakiraan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang. Kondisi ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti: pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), selanjutnya indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi di antaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan per kapita.

1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan asas penting dalam pembentukan sebuah masyarakat yang stabil, makmur, dan berdaya saing. Ia merujuk kepada tahap kemakmuran yang dinikmati oleh individu atau kumpulan dalam sesebuah negara, berdasarkan keupayaan mereka memenuhi keperluan asas serta mencapai kualiti hidup yang lebih baik.

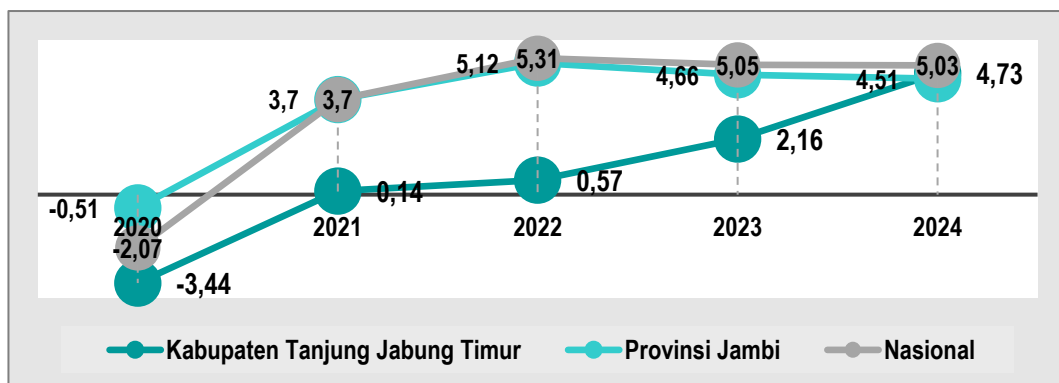
a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk mengevaluasi sejauh mana perekonomian berjalan di suatu daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan perubahan PDRB dengan menggunakan harga konstan dari tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh semua sektor

kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam waktu satu tahun. Berdasarkan nilai konstan tahun 2010, jumlah PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023. Kenaikan ini terjadi karena ada peningkatan produksi di semua bidang usaha yang sudah terlepas dari pengaruh inflasi. Jumlah PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tahun 2024 berdasarkan harga konstan tahun 2010, mencapai 18,70 triliun rupiah. Angka ini naik dari 17,85 triliun rupiah di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024 ada pertumbuhan ekonomi sebesar 4,73 persen secara keseluruhan.

Gambar 2.22

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jika dibandingkan data Provinsi Jambi dan Nasional dari tahun 2020-2024 secara umum selalu lebih rendah. Laju pertumbuhan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meningkat setiap tahunnya, namun tetap lebih rendah dibandingkan Provinsi Jambi dan Nasional. Adanya kenaikan bertahap ini mengindikasikan adanya perbaikan fundamental dalam aktivitas ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meskipun laju pertumbuhannya tergolong di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung sejalan dengan tren Provinsi Jambi. Keduanya mengalami kontraksi hampir

sama (4,73) dan (4,51) pada tahun 2024. Namun sejak tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional selalu lebih tinggi daripada Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur turut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi provinsi, namun mungkin belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi sektoralnya.

Secara nasional, Indonesia mengalami kontraksi lebih dalam pada 2020 (-2,07 persen) tetapi menunjukkan pemulihan yang jauh lebih kuat dibandingkan Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Jambi, yakni mencapai 3,7 persen pada 2021 dan melesat ke angka 5,31 persen pada 2022. Sementara Tanjung Jabung Timur dan Nasional hanya tumbuh sekitar 2-4 persen pada 2023-2024, nasional mampu mempertahankan pertumbuhan stabil di atas 5 persen. Ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi di daerah-daerah seperti Tanjung Jabung Timur masih lebih lambat dan berisiko tertinggal dari kemajuan nasional. Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha juga menunjukkan dinamika pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pasca pandemi COVID-19. Dari tahun 2020 hingga 2024, berbagai sektor mengalami fluktuasi pertumbuhan, mencerminkan ketahanan yang berbeda-beda antara lapangan usaha.

Tabel 2.54

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha/Industri		2020	2021	2022	2023	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	2,54	0,13	2,50	4,92	2,93
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-6,50	-1,17	-1,20	-0,39	4,06
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1,25	-0,20	1,89	1,25	3,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,05	6,77	10,39	4,94	9,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste	6,81	4,86	4,48	-3,42	2,57

Lapangan Usaha/Industri		2020	2021	2022	2023	2024**
	Management and Remediation Activities					
F	Konstruksi/Construction	-0,09	6,87	-0,14	9,87	8,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-3,01	2,56	4,88	7,98	6,53
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Warehousing	-2,01	7,23	9,37	4,47	7,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-7,24	4,03	6,86	9,32	7,65
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	7,73	5,15	6,85	7,09	5,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	1,72	2,80	-0,40	2,76	3,05
L	Real Estat/Real Estate Activities	-0,18	2,86	1,40	6,79	5,93
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-5,50	2,05	10,23	11,90	10,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	-2,41	2,57	-0,22	1,01	9,30
P	Jasa Pendidikan/Education	0,40	0,94	2,33	1,72	11,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	6,13	4,15	-1,29	6,33	13,86
R,S, T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	-2,12	3,04	4,40	5,01	5,32
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		-3,44	0,14	0,57	2,16	4,73

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Data pada Tabel 2.54 menunjukkan, ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami pemulihan pasca pandemi, namun masih diwarnai ketimpangan antarsektor. Pertumbuhan ini menunjukkan pemulihan ekonomi secara agregat, meskipun komposisinya masih timpang antara sektor produktif dan sektor konsumtif. Lima kategori yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2024 meliputi: Pelayanan Kesehatan dan Aktivitas Sosial dengan angka 13,86 persen; Layanan Pendidikan sebesar 11,03 persen; Layanan Perusahaan yang mencapai 10,15 persen; Penyediaan Listrik dan Gas

yang berada di 9,91 persen; dan Administrasi Pemerintah, Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib yang mencatat angka 9,30 persen.

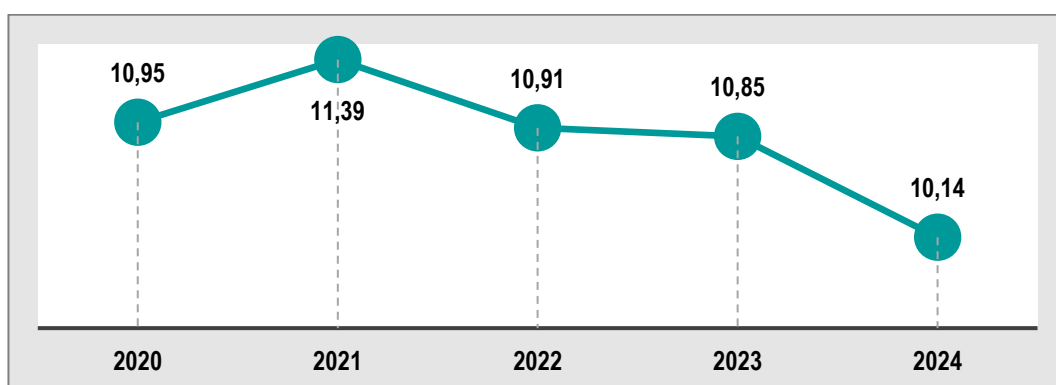
Sementara lima kategori yang mengalami pertumbuhan paling rendah di tahun 2024 adalah: Penyediaan Air, Pengelolaan Limbah, Limbah dan Daur Ulang dengan angka 2,57 persen; Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan angka 2,93 persen; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan angka 3,05 persen; Sektor Industri Pengolahan dengan angka 3,79 persen; dan Sektor Pertambangan dan Penggalan dengan angka 4,06 persen.

b. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan digunakan untuk mengukur kesuksesan pembangunan. Angka kemiskinan, dihitung berdasarkan persentase penduduk miskin di suatu wilayah. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, persentase penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami perkembangan yang tidak lebih baik jika dibandingkan dengan penurunan di tingkat provinsi maupun nasional.

Gambar 2.23

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2025

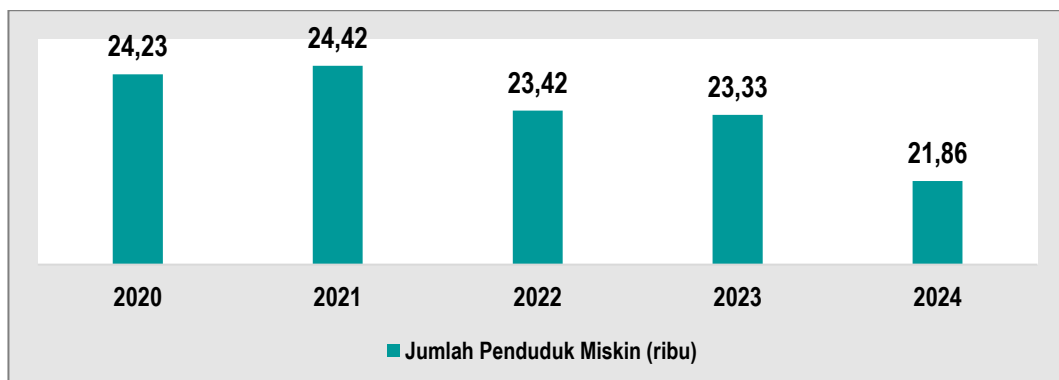
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan adanya fluktuasi cenderung menurun dalam periode 2020-

2024. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 10,95 persen, kemudian meningkat pada tahun 2021 sebesar 11,39 persen, dimana ini merupakan puncak persentase kemiskinan pada periode yang diamati. Namun, sejak tahun 2022-2024 persentase penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin menurun menjadi 10,91 persen, berlanjut pada tahun 2023 menjadi 10,85 persen, pencapaian paling baik pada tahun 2024, dimana persentase penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat ditekan hingga sebesar 10,14 persen.

Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terlihat kesesuaian antara persentase kemiskinan yang menunjukkan puncak peningkatan tahun 2021 menjadi 24.420 jiwa, kemudian pada tahun 2022 secara agregat menurun menjadi 23.420 jiwa, dan terus menurun pada tahun 2023 dan tahun 2024 menjadi 23.330 jiwa dan 21.860 jiwa yang dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.24

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

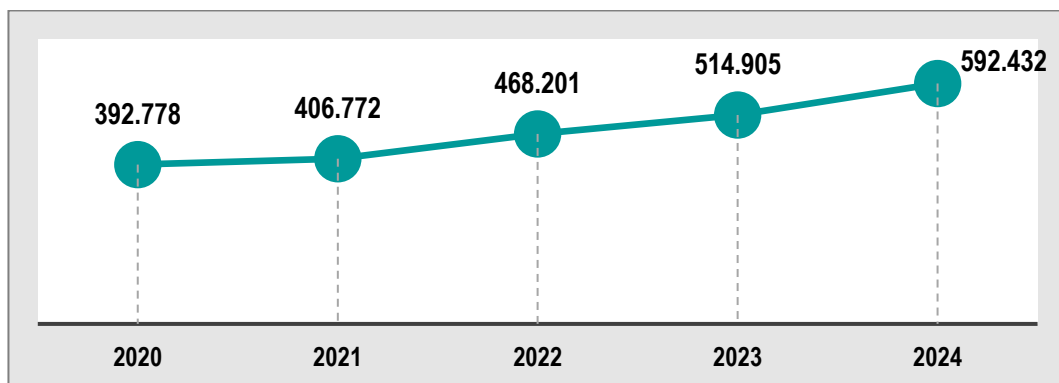


Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2025

Fluktuasi dari angka kemiskinan tersebut juga berkaitan dengan ketergantungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap sektor primer. Sektor primer yang menyumbang PDRB terbesar dapat dengan mudah bergeser dan memengaruhi kondisi ekonomi pada suatu wilayah dengan sangat cepat. Namun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki sektor

primer lain selain pertambangan dan galian, yaitu pertanian. Sektor pertanian inilah yang menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedikit lebih kuat dalam menghadapi *shock* ekonomi bahkan ketika terjadi pandemi COVID-19. Garis Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.25
Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2025

Garis kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 592.432 per kapita per bulan. Artinya, setiap individu yang memiliki rata-rata pengeluaran atau pendapatan bulanan di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan merupakan ambang batas minimum kebutuhan dasar baik pangan maupun non-pangan yang harus dipenuhi seseorang dalam periode tertentu. Kenaikan garis kemiskinan dari Rp 392.778 pada tahun 2020 menjadi Rp 592.432 pada tahun 2024 mencerminkan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat, yang juga dapat dipengaruhi oleh inflasi dan perubahan pola konsumsi.

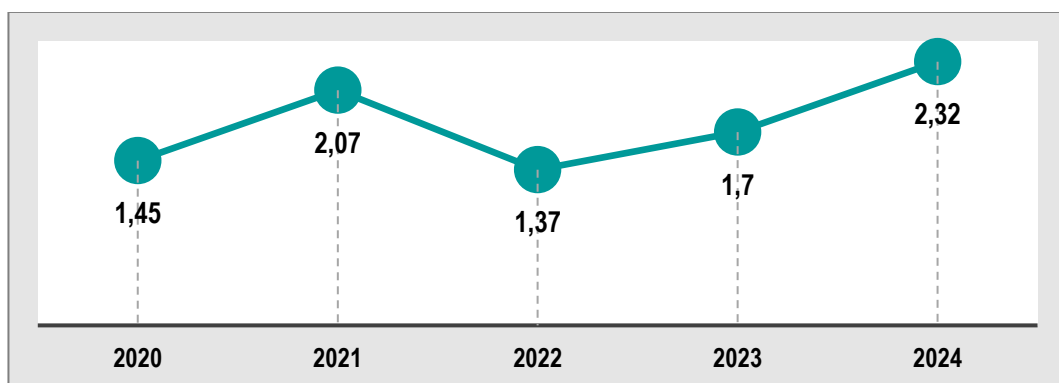
Penduduk miskin menggambarkan individu atau rumah tangga yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Mereka adalah kelompok yang secara ekonomi dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk mengukur tingkat kemiskinan pada umumnya dilakukan dengan menggunakan indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan. Dimana

Kedua indeks tersebut dapat menjelaskan sejauh mana dan seberapa parah kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat miskin.

Vulnerability atau kerentanan terhadap kemiskinan. Dalam konteks ini, kerentanan terhadap kemiskinan terkait dengan kelompok masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan tetapi sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan karena perubahan yang terjadi, dikenal sebagai kelompok *near poor*. Namun demikian data mengenai kelompok *near poor* ini tidak tersedia, untuk itu kerentanan didekati melalui dua mekanisme, yakni Angka Kedalaman Kemiskinan dan Angka Keparahan Kemiskinan. Semakin dalam Angka kemiskinan dan keparahan kemiskinan maka akan semakin banyak orang yang berada pada jalur kerentanan. Persoalan kemiskinan bukan hanya tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, oleh karena itu perlu diperhatikan juga indeks kedalaman (*Poverty Gap Index*) dan indeks keparahan (*Poverty Severity Index*). Dengan demikian, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan atas kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan.

Gambar 2.26

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



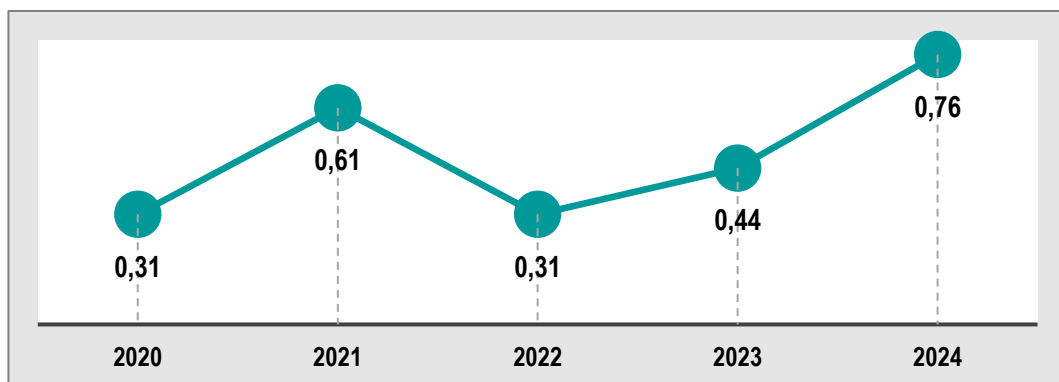
Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan di suatu wilayah. Indeks

kedalaman kemiskinan mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kabupaten Tanjung Timur menunjukkan fluktuasi dimana, pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebesar 1,45. Terjadi kenaikan signifikan menjadi 2,07, lalu mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 1,37. Kemudian, nilai indeks sedikit meningkat kembali pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 1,70 dan 2,32 yang berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin kembali menjauh dari garis kemiskinan.

Gambar 2.27

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan konsumsi atau pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan ditandai dengan semakin tinggi nilai keparahan kemiskinan, menandakan semakin parah kondisi kemiskinan karena banyak penduduk miskin yang berada jauh di bawah garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2021 dan 2024. Tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 0,61 yang mana hal itu mengindikasikan ketimpangan yang cukup tinggi di antara kelompok masyarakat miskin itu sendiri. Artinya, sebagian penduduk miskin berada

dalam kondisi yang sangat jauh dari garis kemiskinan, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Walaupun sempat mengalami penurunan nilai indeks di tahun 2022, nilai indeks keparahan kemiskinan kembali meningkat secara signifikan di tahun 2024 menjadi 0,76. Tentu hal tersebut menjadi perhatian penting bagi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengentaskan kemiskinan sehingga tidak terjadi ketimpangan yang ekstrim.

c. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.55
PDRB Per Kapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024
(Juta Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	8,5	9,3	10,9	10,5	11,4
Provinsi	57,9	64,7	76,2	79,8	86,7
Nasional	57,2	62,3	71,0	75,0*	78,6

Sumber: BPS, 2025

PDRB Per kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan dari 8,5 juta rupiah pada tahun 2020 terus meningkat menjadi 11,4 juta di tahun 2024. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, tabungan, dan kebijakan

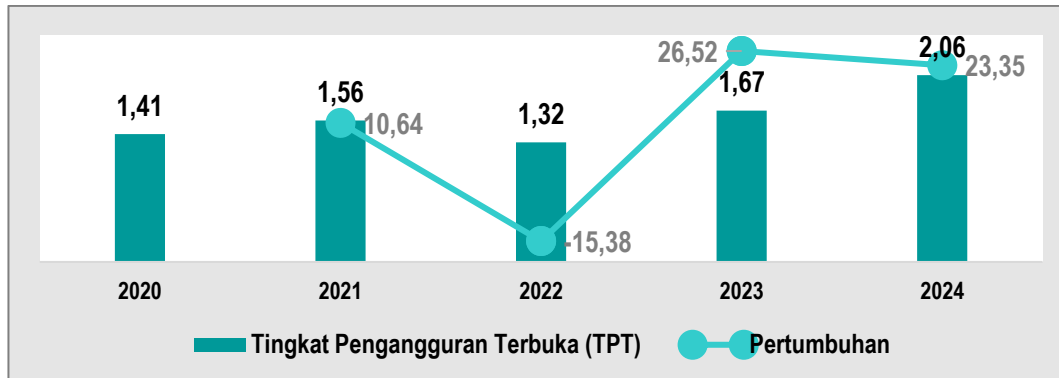
pemerintah. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, investasi, dan tabungan, serta semakin efektif kebijakan pemerintah, maka PDRB per kapita akan meningkat. Meskipun mengalami peningkatan namun angka ini masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

Pada Provinsi Jambi PDRB Per kapita sebesar 57,9 juta di tahun 2020 yang kemudian terus meningkat hingga 86,7 juta di tahun 2024. Sementara itu, di level nasional PDRB Per kapita juga terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 57,2 juta hingga mencapai 78,6 juta di tahun 2024. Perolehan PDRB Per kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang di bawah rata-rata provinsi dan nasional ini mencerminkan perbaikan pembangunan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depannya.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja. Berikut merupakan gambaran TPT di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024.

Gambar 2.28
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Gambar 2.28 menunjukkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020–2024. Tren ini mencerminkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia kerja belum sepenuhnya diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru yang memadai, yang berpotensi menjadi hambatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pengangguran terbuka menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam serapan tenaga kerja, baik karena minimnya akses terhadap kesempatan kerja, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, maupun stagnasi di sektor-sektor produktif.

Peningkatan TPT yang cukup tajam pada tahun 2023 dan 2024 dapat diindikasikan sebagai dampak dari menurunnya kesempatan kerja yang tersedia, sehingga semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap. Oleh karena itu, kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam merumuskan kebijakan peningkatan akses dan perluasan pasar kerja di masa mendatang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi tahun 2020- 2024 disajikan pada Tabel 2.56 berikut.

Tabel 2.56

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Jambi	5,13	5,09	4,59	4,53	4,48
Kerinci	2,43	2,32	2,63	2,48	2,51
Merangin	4,86	4,83	4,69	4,35	4,18
Sarolangun	5,71	5,52	5,22	5,09	5,03
Batanghari	4,42	4,26	3,53	3,85	4,49
Muaro Jambi	5,43	5,59	5,35	5,40	5,27
Tanjung Jabung Timur	1,41	1,56	1,32	1,67	2,06
Tanjung Jabung Barat	2,16	2,53	2,88	2,95	3,20
Tebo	2,95	2,83	1,38	1,71	2,50
Bungo	5,94	5,86	5,50	5,23	4,67
Kota Jambi	10,49	10,66	8,95	8,27	7,38
Kota Sungai Penuh	5,56	3,00	2,49	3,80	4,30

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

TPT Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 yang mencapai 2,06 persen tersebut merupakan capaian terendah di antara 11 kabupaten/kota serta di bawah capaian Provinsi Jambi yang sebesar 4,48 persen. Ini artinya jumlah orang tidak terserap di pasar kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih sedikit dibandingkan Kabupaten/Kota yang lain dalam Provinsi Jambi.

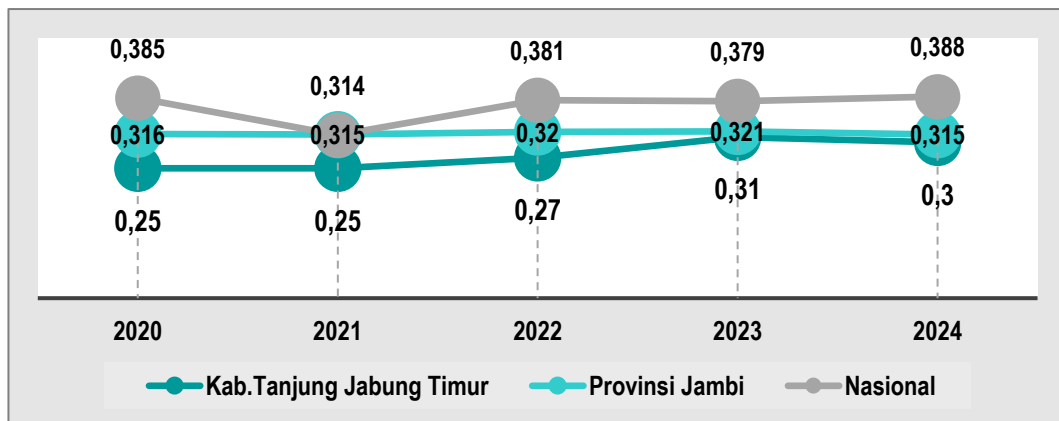
e. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu wilayah. Rasio Gini menghasilkan angka antara 0 dan 1, dimana nilai 0 mengindikasikan adanya kesetaraan sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan ekstrem. Analisis Rasio Gini dalam evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Dengan mengevaluasi Rasio Gini, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi daerah atau kelompok masyarakat yang mengalami ketimpangan yang tinggi, sehingga dapat merancang program dan kebijakan

yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi kesenjangan dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut merupakan kondisi Rasio Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020-2024.

Gambar 2.29
Perkembangan Angka Rasio Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Gambar 2.29 menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki capaian yang selalu lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan nasional. Hal ini tergambarkan jelas terjadi sejak tahun 2010 di mana capaian Rasio Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan nasional. Hal ini dapat dilihat dari data tahun 2020 hingga 2024 yang menunjukkan bahwa angka Rasio Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,25 dari tahun 2020 hingga tahun 2021 kemudian naik menjadi 0,27 di tahun 2022 kemudian naik 0,31 di tahun 2023 dan turun menjadi 0,30 di tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya ketidakstabilan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Terdapat beberapa hal yang dapat diduga menjadi penyebab rendahnya indeks gini kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pertama, tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Menghubungkan antara sumber PDRB dengan angka Rasio Gini yang rendah menjadi fokus yang penting untuk didiskusikan. Sektor utama penyumbang PDRB adalah sektor pertambangan,

sektor ini tentu memiliki pendapatan yang tinggi dan secara rasional tenaga kerja yang terlibat dalam sektor ini tidak banyak, maka seharusnya akan terjadi ketimpangan antargolongan pendapatan antarsektor. Kondisi lain yang menyebabkan rendah capaian Indeks Gini karena ketimpangan antarwilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meskipun masing-masing wilayah di kecamatan Kabupaten Tanjung Timur memiliki potensi namun potensi tersebut pengolahannya belum maksimal. Faktor penyebab perbedaan di antaranya kemampuan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum mendukung. Kondisi ini menyebabkan perbedaan tingkat kemakmuran antarwilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

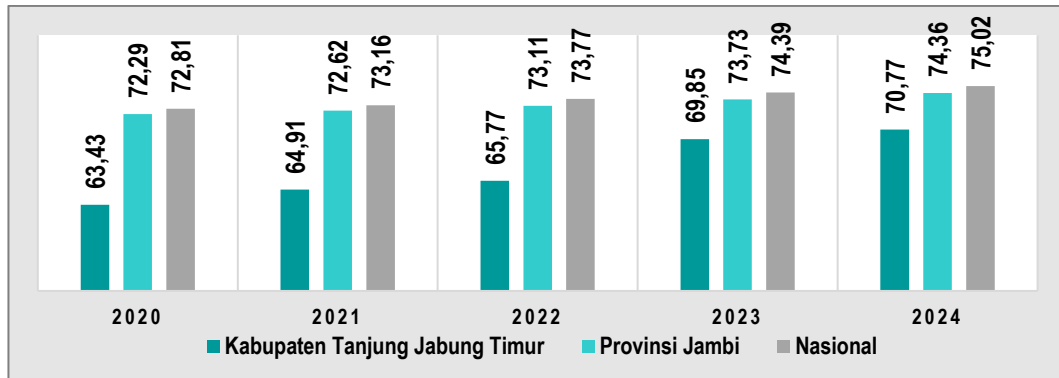
Dengan data tersebut maka dapat ditarik pemahaman bahwa meskipun Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tingkat ketimpangan yang rendah, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan kondisi nyata di masyarakat yang ditunjukkan oleh data tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari pada Provinsi Jambi dan Nasional.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator makro yang berkaitan dengan aspek pengembangan sumber daya manusia diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur perkembangan sumber daya manusia pada suatu daerah. IPM memiliki komponen pengungkit yang dapat menggambarkan kondisi pertumbuhan tersebut melalui tiga aspek utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Perbandingan capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Nasional dalam rentang tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 2.30 berikut.

Gambar 2.30

Capaian Angka IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Dengan penghitungan metode lama, capaian dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Nasional tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Namun perubahan cara perhitungan IPM yang terjadi pada tahun 2010 menyebabkan relatif turunnya IPM di semua wilayah, baik daerah maupun nasional. Namun dapat dilihat pada Gambar 2.30 bahwa turunnya kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih rendah dari angka nasional maupun provinsi. Sejak tahun tersebut, posisi IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berada di bawah angka nasional dan provinsi. Perubahan indikator pengungkit memang membuat seluruh angka capaian menurun, namun angka nasional dan provinsi mampu dipulihkan dengan baik dan kembali lagi ke capaian yang baik seperti sebelum adanya perubahan indikator. Di sisi lain, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga sudah mampu secara perlahan memulihkan kondisi IPM-nya, meskipun masih di bawah angka nasional dan Provinsi Jambi.

Untuk menganalisis capaian yang masih rendah setelah adanya perubahan indikator pengungkit pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka masing-masing indikator pengungkit pada setiap aspek harus diperhatikan. Pada sektor pendidikan berkaitan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), sektor kesehatan berkaitan dengan Usia

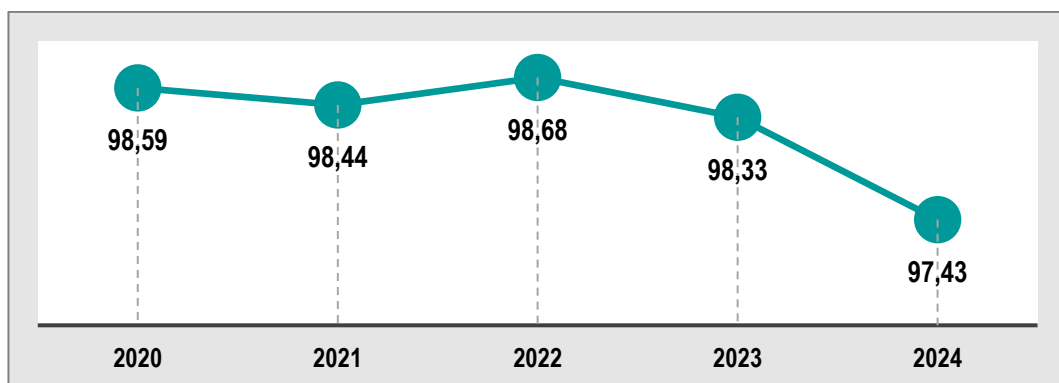
Harapan Hidup (UHH), dan pada sektor ekonomi melalui daya beli masyarakat berkaitan dengan pengeluaran per kapita.

g. Rasio Kesempatan Kerja

Rasio kesempatan bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau menggambarkan permintaan tenaga kerja.

Gambar 2.31

Rasio Kesempatan Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.31, rasio kesempatan kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan secara bertahap, terutama pada tahun terakhir. Rasio kesempatan kerja yang sebelumnya cukup tinggi, yaitu 98,59 persen pada tahun 2020, mengalami penurunan menjadi 98,44 persen di 2021, kemudian sempat meningkat ke titik tertinggi 98,68 persen pada tahun 2022. Namun setelah itu terjadi penurunan yang lebih nyata, menjadi 98,33 persen di 2023, dan mencapai titik terendahnya sebesar 97,43 persen pada tahun 2024.

Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja mulai mengalami tekanan, terutama pada tahun 2024. Meskipun rasio ini masih tergolong tinggi secara umum, tren

penurunannya menjadi sinyal penting bahwa jumlah angkatan kerja yang tidak terserap meningkat, yang berpotensi memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat jika tidak ditangani. Kondisi ini perlu direspons melalui strategi peningkatan kualitas tenaga kerja, diversifikasi sektor ekonomi, serta penguatan ekosistem wirausaha dan investasi daerah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan.

2. Kesehatan untuk Semua

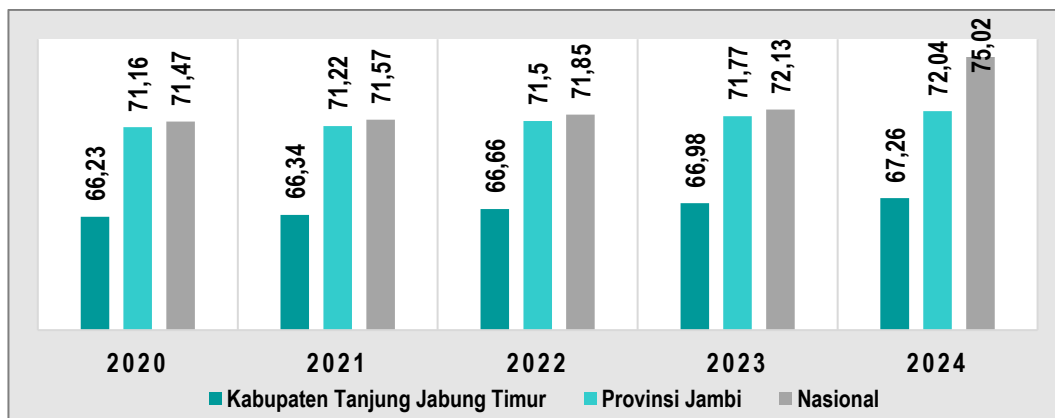
Penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kesehatan masyarakat.

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan usia seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH diketahui melalui jumlah umur semua orang yang meninggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dijumlah kemudian dibagi jumlah orang yang meninggal pada tahun tersebut. Maka, angka kematian bayi yang berusia 0 tahun turut memengaruhi capaian UHH di Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara signifikan. Perbandingan tren data UHH di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Nasional disajikan pada Gambar 2.32 berikut.

Gambar 2.32

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data pada gambar di atas, pada tahun 2024 UHH di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat sebesar 67,26 tahun, meningkat dari 66,23 tahun pada tahun 2020. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan secara bertahap dalam aspek kesehatan dan sosial masyarakat. Namun, jika dibandingkan dengan capaian UHH di tingkat Provinsi Jambi dan Nasional, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tertinggal cukup signifikan. Pada tahun 2024, UHH Provinsi Jambi mencapai 72,04 tahun, sedangkan UHH Nasional telah berada di angka 75,02 tahun.

Ketimpangan ini menegaskan pentingnya evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Komponen utama yang menjadi perhatian adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Ketiga aspek ini sangat erat kaitannya dengan kualitas layanan kesehatan, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti gizi dan sanitasi lingkungan.

Dengan rata-rata usia harapan hidup yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional, Pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur perlu meningkatkan intervensi yang bersifat promotif dan preventif dalam bidang kesehatan. Hal ini menjadi krusial mengingat rendahnya UHH dapat berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat, khususnya dalam usia kerja. Jika kondisi kesehatan tidak optimal, maka partisipasi dalam angkatan kerja pun dapat terganggu, sebagaimana terlihat pada data tahun-tahun sebelumnya dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) belum menunjukkan performa yang optimal.

b. Indeks Keluarga Sehat

Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, IKS mengalami kenaikan sebesar 0,30 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0,20 persen. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebesar 0,50 persen dan 0,70 persen. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan dalam derajat kesehatan keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk meningkatkan Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih harus menyelesaikan menyangkut masalah kesehatan lingkungan dan perilaku kesehatan masyarakat Tanjung Jabung Timur. Untuk meningkatkan indeks keluarga sehat maka ada dua hal yang wajib untuk diperhatikan yaitu:

- Kesehatan Lingkungan terhadap akses air bersih. Persoalan akses terhadap air bersih masih harus terus diperhatikan agar seluruh penduduk Tanjung Jabung Timur dapat menggunakan air yang berkualitas (layak) diminum. Air berkualitas adalah Air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah.

- **Perilaku Kesehatan.** Pemerintah harus berupaya untuk melakukan sosialisasi terkait dengan perilaku hidup sehat seperti melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang menitikberatkan pada kesadaran masyarakat untuk meninggalkan pola pola hidup kotor yang berdampak pada timbulnya penyakit. Pendekatan STBM dilakukan untuk mengajak masyarakat menuju hidup sehat tertuang dalam program pemerintah untuk mengubah perilaku masyarakat secara higienis menuju hidup sehat melalui 5 (lima) pilar memberi perubahan yang signifikan pada perilaku masyarakat. 5 (lima) pilar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 yaitu pilar 1 (satu) mengubah perilaku masyarakat untuk tidak membuang air besar sembarangan, menuntut masyarakat untuk memiliki jamban yang sehat; pilar 2 (dua) membiasakan pola hidup masyarakat untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan fasilitas air mengalir, untuk itu diperlukan sarana fasilitas yang menyediakan air mengalir dan saluran untuk pembuangan air limbah; pilar 3 (tiga) menyediakan air layak minum bagi masyarakat dan masyarakat memiliki perilaku mampu mengelola makanan secara sehat dengan mencuci makanan dengan air bersih dan air yang mengalir; pilar 4 (empat) membudayakan masyarakat membuang sampah pada tempat yang disesuaikan dengan jenis sampah yaitu melakukan pemilahan jenis sampah organik dan sampah anorganik; pilar 5 (lima) Setiap rumah tangga memiliki saluran limbah cair menuju saluran pembuangan air limbah yang sudah memenuhi kriteria saluran limbah sehat dan tidak mencemarkan lingkungan sekitarnya.

c. Prevalensi Stunting

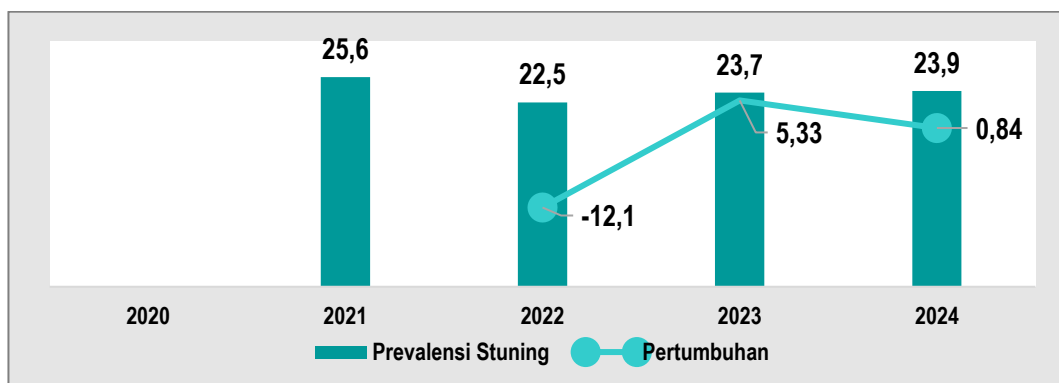
Menurut standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), suatu wilayah dikategorikan baik apabila prevalensi balita pendek (stunting) kurang dari 20 persen dan prevalensi balita kurus (wasting) kurang

dari 5 persen. Sebaliknya, suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut jika prevalensi balita pendek di bawah 20 persen namun prevalensi balita kurus mencapai 5 persen atau lebih. Dengan demikian, angka stunting di Tanjung Jabung Timur yang masih berada di atas ambang batas WHO menunjukkan bahwa permasalahan gizi anak masih menjadi tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia.

Perkembangan tren prevalensi stunting Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 2021-2024 dapat dilihat secara visual melalui grafik berikut, yang menggambarkan fluktuasi tingkat stunting beserta laju pertumbuhannya dari tahun ke tahun.

Gambar 2.33

Prevalensi Stunting Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024 (data diolah)

Kondisi kesehatan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas individu dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Salah satu indikator penting dari kondisi kesehatan adalah angka prevalensi stunting, yang mencerminkan status gizi kronis pada balita. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, angka prevalensi stunting pada tahun 2024 tercatat sebesar 23,9 persen, mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 23,7 persen. Data ini menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting belum berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Meskipun pada tahun 2022 sempat terjadi penurunan signifikan sebesar -12,1 persen, tren tersebut kembali meningkat pada 2023 dan terus berlanjut di 2024 meskipun dengan laju pertumbuhan yang melambat 0,84 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbaikan gizi masyarakat belum cukup stabil, dan situasi ini turut berdampak terhadap tingginya angka kemiskinan dan rendahnya produktivitas tenaga kerja di daerah.

Selain prevalensi stunting, berbagai indikator antropometri lainnya turut menunjukkan bahwa masalah gizi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menjadi persoalan serius yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi masyarakat.

Tabel 2.57

Status Gizi Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Jenis Antropometri	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Gizi Buruk	NA	NA	0,1	0,02	1,7
Angka Wasting	NA	NA	9,7	11,2	9,7
Angka Obesitas	NA	NA	3,2	6,2	5
Angka Undeweight	NA	NA	21	16,4	17,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024 (data diolah)

Pertama, angka gizi buruk mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024. Setelah menunjukkan nilai sangat rendah pada tahun 2022 0,1 persen dan bahkan hampir tidak ada pada tahun 2023 0,02 persen,, angka ini melonjak menjadi 1,7 persen di tahun 2024. Kenaikan drastis ini perlu mendapat perhatian khusus, karena gizi buruk merupakan bentuk malnutrisi akut yang paling parah dan sangat berisiko terhadap kematian bayi dan balita.

Kedua, angka *wasting* (berat badan menurut tinggi badan rendah), yang menunjukkan adanya masalah gizi akut, juga mengalami fluktuasi. Angka ini meningkat dari 9,7 persen pada tahun 2022 menjadi 11,2 persen pada 2023, kemudian kembali menurun ke angka semula 9,7 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih melebihi ambang batas WHO

sebesar 5 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah ini masih menghadapi masalah gizi akut serius.

Ketiga, angka obesitas pada balita juga menunjukkan dinamika yang mengkhawatirkan. Setelah meningkat dari 3,2 persen pada tahun 2022 menjadi 6,2 persen pada 2023, angka obesitas mengalami penurunan menjadi 5 persen pada 2024. Kendati mengalami penurunan, angka ini tetap menandakan adanya ketidakseimbangan asupan gizi, yang dapat berdampak pada risiko penyakit tidak menular di masa depan.

Keempat, angka *underweight* (berat badan kurang menurut umur) mengalami penurunan dari 21 persen pada 2022 menjadi 16,4 persen pada 2023, namun kembali meningkat menjadi 17,9 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan gizi anak belum berjalan secara konsisten.

Secara keseluruhan, data antropometri ini mengonfirmasi bahwa masalah gizi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersifat kompleks dan tidak hanya terbatas pada stunting. Masih tingginya angka *wasting* dan *underweight*, disertai munculnya obesitas dan peningkatan gizi buruk, mengindikasikan adanya *triple burden of malnutrition* (gizi kurang, gizi lebih, dan kekurangan mikronutrien) yang dihadapi masyarakat. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa masalah kesehatan dan gizi merupakan faktor fundamental yang memengaruhi produktivitas dan kemiskinan, serta memerlukan intervensi lintas sektor yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berbasis data.

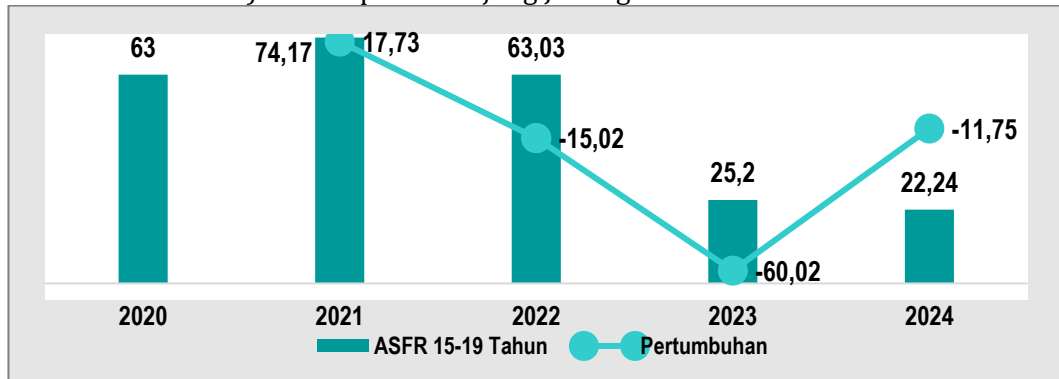
d. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur

Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) 15-19 Tahun merupakan salah satu indikator penting dalam upaya pencegahan stunting. Kehamilan pada remaja berisiko tinggi menyebabkan komplikasi kehamilan dan kelahiran, serta berdampak langsung terhadap status gizi dan kesehatan bayi yang dilahirkan. Oleh karena itu, tingginya ASFR pada kelompok usia 15-19 tahun dapat menjadi kontributor terhadap

meningkatnya angka stunting, terutama jika kehamilan terjadi tanpa kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi yang memadai.

Gambar 2.34

Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19 Tahun) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik, terjadi fluktuasi signifikan pada ASFR kelompok usia 15-19 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, ASFR tercatat sebesar 63 dan meningkat menjadi 74,17 di tahun 2021, mencerminkan pertumbuhan sebesar 17,73 persen. Namun, angka ini kemudian menurun menjadi 63,03 di tahun 2022 -15,02 persen, diikuti oleh penurunan tajam pada tahun 2023 menjadi 25,2 -60,02 persen, dan kembali menurun menjadi 22,24 di tahun 2024 -11,75 persen.

Tren penurunan ASFR ini, khususnya setelah tahun 2021, menunjukkan indikasi positif dalam upaya pengendalian kehamilan remaja, yang merupakan komponen penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kehamilan pada usia remaja memiliki korelasi kuat terhadap berbagai isu pembangunan, seperti tingginya angka putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, dan prevalensi stunting. Oleh karena itu, penurunan angka fertilitas remaja mencerminkan adanya perbaikan dalam kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi serta peningkatan

efektivitas program pendidikan dan kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan pilar fundamental dalam membentuk individu yang kuat dan berdaya saing. Tidak hanya sebagai sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan, pendidikan juga membekali seseorang agar mampu berkontribusi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, menciptakan peluang, serta meningkatkan taraf hidup. Akses pendidikan yang adil dan berkualitas menjadi kunci dalam membangun fondasi masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan.

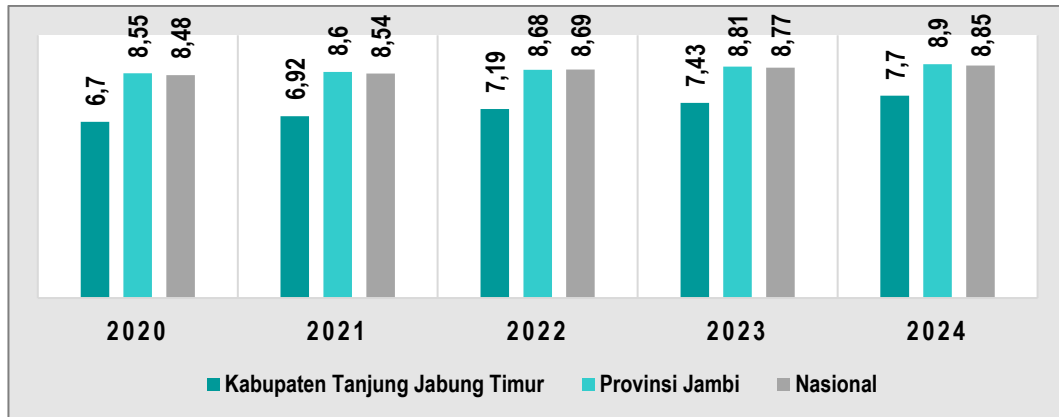
Dengan menyediakan sistem pendidikan yang inklusif, sebuah komunitas dapat menumbuhkan lingkungan yang mendorong inovasi, memperkuat tatanan sosial, dan mendukung setiap individu untuk mencapai potensi maksimalnya. Oleh karena itu, investasi di bidang pendidikan merupakan langkah strategis menuju masa depan yang lebih cerah, sekaligus menciptakan masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan sejahtera. Pendidikan juga menjadi indikator penting dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Pendidikan merupakan komponen penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercermin dari komponen pendidikan yang dibangun pada suatu daerah. Komponen pertama pada sektor pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh semua jenis pendidikan yang dijalani. Perbandingan tren data RLS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Nasional disajikan pada Gambar 2.35 berikut.

Gambar 2.35

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Tren perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, RLS berada pada angka 6,7 tahun dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 7,7 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan partisipasi pendidikan di wilayah tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jambi dan Nasional, angka RLS Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tertinggal cukup signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Provinsi Jambi mencatat RLS sebesar 8,9 tahun, sedangkan capaian nasional 8,85 tahun.

Capaian yang belum memuaskan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya anak yang bersekolah di luar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga dianggap sebagai putus sekolah. Adanya perbedaan data riil dalam perhitungan putus sekolah menjadi salah satu alasan rendahnya angka RLS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan hasil FGD penyusunan evaluasi RPJPD.

Melihat kondisi tersebut maka angka rata-rata lama sekolah harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk untuk ditingkatkan dengan memberi kesempatan bagi penduduk miskin melalui pendidikan gratis, dan bantuan beasiswa sesuai jenjang pendidikan.

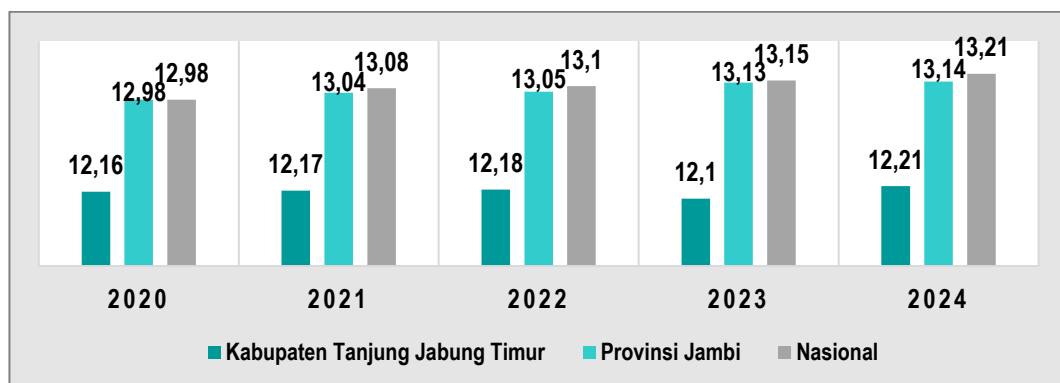
memperbaiki pengetahuan orang dengan memberi edukasi pentingnya sekolah untuk masa depan anak dan memperbaiki akses pendidikan sehingga terdapat pemerataan pendidikan di seluruh wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Memberikan lebih banyak beasiswa dan/atau bantuan pendidikan kepada siswa sesuai jenjang pendidikan. Dengan adanya beasiswa dan bantuan pendidikan ini diharapkan mencegah anak putus sekolah dan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah melalui pendidikan kesetaraan serta sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Mengingat bahwa faktor penyebab putus sekolah tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga faktor perhatian orangtua, budaya, kurangnya minat bersekolah, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan, dan sebagainya, maka upaya sosialisasi kepada masyarakat sangat perlu dilakukan.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan ukuran lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mendapatkan segala jenis pendidikan pada waktu tertentu. Gambar 2.36 menyajikan perbandingan tren data HLS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Nasional.

Gambar 2.36

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggantikan Angka Melek Huruf sejak tahun 2010. Indikator ini mencerminkan ekspektasi lama waktu anak usia 7 tahun ke atas dalam menyelesaikan pendidikan formal. Berdasarkan data pada grafik, HLS Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020 hingga 2024 cenderung stagnan dan berada pada tingkat yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jambi dan Nasional.

Pada tahun 2020, HLS Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat sebesar 12,16 tahun dan hanya mengalami kenaikan marginal menjadi 12,21 tahun pada 2024. Ini berarti, anak-anak di wilayah ini secara rata-rata hanya diproyeksikan menyelesaikan pendidikan hingga kelas IX atau setara dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara itu, capaian HLS Provinsi Jambi mencapai 13,14 tahun dan capaian nasional mencapai 13,21 tahun di tahun 2024, yang menunjukkan harapan pendidikan hingga tamat tingkat SLTA atau kelas XII.

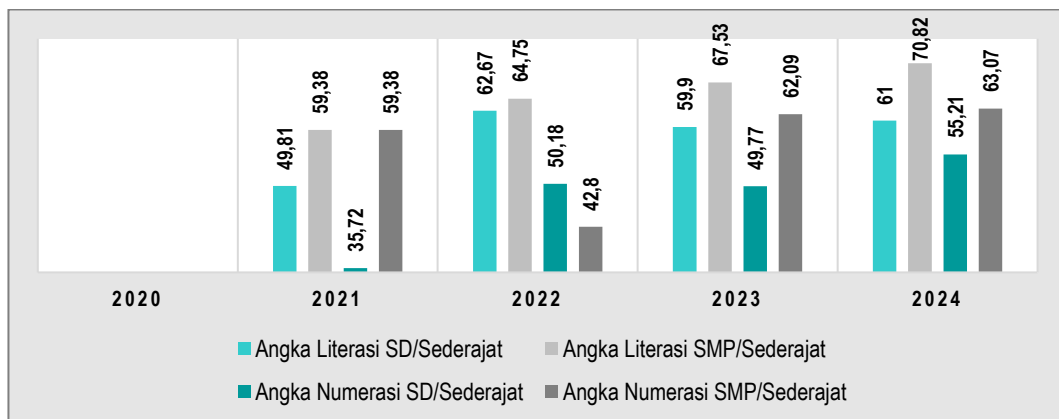
Rendahnya capaian HLS ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam memberikan kesempatan pendidikan jangka panjang bagi anak-anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini secara langsung akan berdampak terhadap pertumbuhan IPM daerah karena pendidikan menjadi salah satu pilar utama pembangunan manusia. Dengan HLS yang masih rendah, kualitas sumber daya manusia di masa depan juga akan terhambat, terutama dalam hal kompetensi dan kesiapan kerja.

Untuk itu, perlu adanya perhatian serius dari pemerintah daerah dalam memperluas akses dan keberlanjutan pendidikan menengah dan tinggi. Program seperti pendidikan gratis, beasiswa pendidikan menengah, penyediaan sarana dan prasarana sekolah, serta peningkatan kualitas guru sangat penting untuk mendorong anak-anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar tidak hanya dapat mengenyam pendidikan dasar, tetapi juga menyelesaikan pendidikan hingga jenjang lebih tinggi.

c. Angka Literasi/Numerasi

Angka Literasi dan Numerasi merupakan indikator penting yang menggambarkan kemampuan dasar individu dalam memahami, menggunakan, dan mengolah informasi berbasis teks dan angka dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan sistem pendidikan dalam membekali peserta didik dengan keterampilan esensial, tetapi juga menunjukkan kesiapan individu untuk berpartisipasi secara produktif dalam masyarakat dan dunia kerja. Tingginya tingkat literasi dan numerasi di suatu daerah menunjukkan bahwa penduduknya memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses informasi, mengambil keputusan secara rasional, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi. Gambar 2.37 menyajikan tren data Angka Literasi dan Numerasi pada tingkat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambar 2.37
Angka Literasi dan Numerasi SD/ Sederajat dan SMP/ Sederajat di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2020-2024 (data diolah)

Tren perkembangan angka literasi dan numerasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, baik pada jenjang SD/ sederajat maupun SMP/ sederajat. Pada tahun 2021, capaian angka literasi SD/ sederajat berada pada angka 49,81 dan meningkat menjadi 61 pada tahun 2024. Untuk jenjang SMP/ sederajat, angka

literasi juga mengalami kenaikan dari 59,38 menjadi 70,82 pada periode yang sama. Sementara itu, angka numerasi SD/ sederajat meningkat dari 35,72 pada tahun 2021 menjadi 55,21 di tahun 2024. Hal serupa terjadi pada jenjang SMP/ sederajat, di mana angka numerasi naik dari 59,38 menjadi 63,07.

Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas proses pembelajaran, terutama dalam aspek kemampuan dasar membaca dan berhitung yang menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pendidikan jangka panjang. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target nasional dan capaian provinsi Jambi, tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih memerlukan penguatan, khususnya pada jenjang sekolah dasar yang masih menunjukkan capaian di bawah 65 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap pendidikan semakin membaik, kualitas pembelajaran masih menjadi tantangan utama, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan. Oleh karena itu, dalam konteks penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu menetapkan peningkatan angka literasi dan numerasi sebagai salah satu fokus utama pembangunan sumber daya manusia. Intervensi kebijakan seperti peningkatan kapasitas guru, penyediaan bahan ajar literasi dan numerasi yang kontekstual, serta penguatan budaya baca dan pembelajaran aktif di sekolah perlu diprioritaskan. Di samping itu, upaya sosialisasi pentingnya keterampilan dasar ini kepada orang tua dan masyarakat juga menjadi kunci dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih mendukung dan inklusif.

d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 60,48 persen, mengalami peningkatan sebesar 2,51 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 57,97 persen. Penguasaan literasi dalam segala aspek kehidupan memang menjadi tulang punggung kemajuan peradaban suatu bangsa. Seseorang yang memiliki

kemampuan literasi rendah dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada penurunan kualitas hidup, sosial, bahkan ekonomi. Dampak lain yang bisa ditimbulkan dari rendahnya kemampuan literasi masyarakat adalah rendahnya sebuah kualitas diri karena pada dasarnya kemampuan literasi turut memengaruhi bentuk etika dan moral seseorang. Ketika seseorang memiliki kemampuan literasi yang rendah maka orang tersebut akan memiliki pengetahuan yang sangat sedikit, moral yang tidak sesuai hingga beberapa penyimpangan sosial yang terjadi disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi pada masyarakat. Hal tersebut akan memengaruhi kualitas dirinya, ia akan banyak sekali tertinggal informasi baik tentang sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya termasuk teknologi. Dengan demikian, literasi yang baik pada masyarakat akan menunjang efektivitas pembelajaran di sekolah sehingga dapat menjadi motivasi untuk melanjutkan pendidikan. di sisi lain, pada tataran komunitas masyarakat yang memiliki literasi yang baik akan menjadi daya dukung sosial untuk menempuh pendidikan formal yang tinggi.

Penyebab rendahnya literasi masyarakat yakni pertama, rendahnya masyarakat yang gemar membaca. Berdasarkan persentase Tingkat Gemar Membaca di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat hanya sebesar 68,86 persen pada tahun 2024. Tingkat literasi masyarakat memiliki hubungan yang vertikal terhadap kualitas masyarakat. Dalam prosesnya masyarakat akan mendapatkan keterampilan-keterampilan baru melalui proses membaca, sehingga rendahnya minat baca akan berdampak pada rendahnya keterampilan dan keahlian masyarakat mengenal hal-hal baru. Selain disebabkan oleh minat baca yang rendah, penyebab kedua rendahnya literasi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni aksesibilitas perpustakaan yang masih rendah dengan rasio perpustakaan yang rendah yakni 357 perpp. Kondisi serupa juga terjadi pada jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang hanya 1,01 persen selama 5 tahun ke belakang dan tanpa perubahan. Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat menjadi sulit

untuk memperoleh akses dan layanan perpustakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

e. Indeks Literasi Digital

Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat ini belum memiliki Indeks Literasi Digital yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Padahal, Indeks Literasi Digital memiliki peran penting sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana masyarakat mampu mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik.

Ketiadaan data terkait Indeks Literasi Digital di tingkat daerah menunjukkan pentingnya penyusunan indikator yang lebih komprehensif untuk memetakan tingkat literasi digital masyarakat secara luas. Tanpa adanya indikator yang jelas dan terukur, perumusan kebijakan peningkatan kapasitas digital masyarakat menjadi kurang tepat sasaran.

Namun demikian, upaya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung peningkatan literasi telah mulai diinisiasi, khususnya melalui sektor perpustakaan. Salah satu inovasi yang telah dikembangkan adalah aplikasi I-Pustaka, sebuah platform digital yang menyediakan layanan perpustakaan berbasis daring. Hingga tahun 2024, aplikasi ini telah menyediakan 1.853 judul koleksi digital dengan total 3.724 eksemplar buku yang dapat diakses oleh masyarakat secara online.

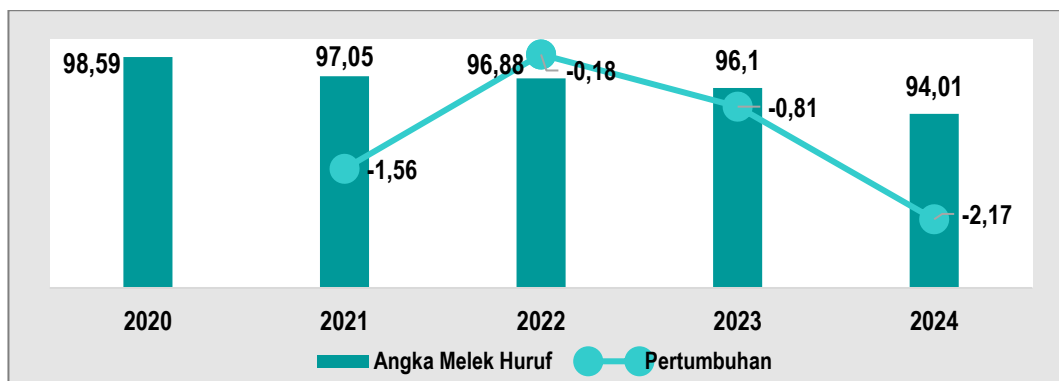
Capaian penggunaan aplikasi ini menunjukkan adanya respons yang cukup positif dari masyarakat, yang terlihat dari jumlah kunjungan sebanyak 565 pengguna, 173 anggota terdaftar, dan 656 transaksi peminjaman buku yang telah dilakukan secara digital. Fakta ini menandakan bahwa transformasi digital dalam layanan perpustakaan mulai berjalan dan memberikan manfaat nyata, meskipun masih diperlukan penguatan dari sisi kebijakan dan pengukuran literasi digital secara menyeluruh.

f. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) menjadi tolak ukur penting untuk melihat kualitas sumber daya manusia. AMH merupakan indikator dalam urusan pendidikan yang secara langsung merepresentasikan tingkat melek huruf atau tingkat buta huruf di suatu wilayah. Perhitungan AMH dilakukan dengan melihat proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis tanpa harus memahami atau mengerti apa yang dibaca dan ditulis. AMH dahulu digunakan secara umum sebagai salah satu indikator penting yang merepresentasikan meratanya pendidikan di sebuah wilayah, hal tersebut dikarenakan keterampilan membaca dan menulis dianggap sebagai sebuah dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu AMH perlahan tidak lagi dianggap sebagai sebuah tolak ukur penting yang merepresentasikan akses, kualitas, maupun sistem pendidikan di suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena capaian AMH di seluruh daerah telah melonjak pesat, salah satunya dengan program wajib belajar 9 tahun. Bahkan AMH yang sebelumnya masuk ke dalam indikator komposit IPM dikeluarkan dan diganti dengan HLS. Gambar 2.38 menyajikan perbandingan tren data AMH di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambar 2.38

Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024 (data diolah)

Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama lima tahun terakhir justru menunjukkan tren penurunan secara bertahap.

Pada tahun 2020, AMH tercatat sebesar 98,59 persen, dan terus menurun hingga mencapai 94,01 persen pada tahun 2024. Penurunan ini cukup signifikan, yaitu sebesar 4,58 poin persentase dalam kurun waktu lima tahun.

Rata-rata pertumbuhan (tepatnya penurunan) per tahun adalah sekitar -1,14 persen. Penurunan paling tajam terjadi antara tahun 2023 ke 2024, yaitu sebesar -2,17 persen, sedangkan penurunan paling kecil tercatat pada tahun 2022 sebesar -0,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa meskipun penurunan sempat melambat, tren penurunan berlanjut dan bahkan memburuk pada tahun-tahun terakhir.

Fenomena ini menjadi perhatian penting, karena angka melek huruf merupakan indikator dasar dalam pengukuran kualitas sumber daya manusia, terutama dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penurunan angka melek huruf dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya akses pendidikan, terbatasnya program pemberantasan buta huruf bagi kelompok usia dewasa, atau tantangan sosial ekonomi yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal maupun non-formal.

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja merupakan komponen krusial dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Keduanya tidak hanya menjamin keamanan dan kenyamanan pekerja dalam menjalankan aktivitas ekonominya, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup dan produktivitas. Dengan demikian, integrasi perlindungan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja dalam kerangka pembangunan manusia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga membentuk fondasi sosial yang kokoh untuk menghadapi tantangan masa depan secara adil dan inklusif. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap kebijakan dan intervensi pembangunan.

a. Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko sosial ekonomi yang dihadapi pekerja, seperti kecelakaan kerja, penyakit, PHK, hingga masa pensiun. Cakupan kepesertaan dalam program jaminan sosial menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana sistem perlindungan tenaga kerja telah menjangkau berbagai kelompok pekerja, baik formal maupun informal.

Tabel 2.58

Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Per Sektor Usaha
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

Sektor Usaha	Jumlah			
	Potensi	Pencapaian	%	Sisa
Pertanian, Perkebunan, Perburuan, Perikanan	25.050	8.536	34,08	16.514
Pertambangan Dan Pengalihan	987	282	28,27	705
Industri Pengolahan	12.192	1.577	12,93	10.615
Listrik,Gas Dan Air	556	392	70,5	164
Konstruksi	3.960	757	20,51	2.933
Perdagangan,Rumah Makan Dan Jasa Akomodasi	23.408	3.032	12,95	20.376
Transportasi,Pergudangan Dan Komunikasi	4.619	354	7,66	4.265
Lembaga Keuangan, Asuransi, Real Estate, Usaha Persawaan Dan Jasa Prusahaan	2.646	217	8,2	2.429
Jasa Kemasyarakatan	10.179	8.480	83,31	1.699
Jumlah	83.327	23.627	28,35	59.700

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024 (diolah)

Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsos) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 masih tergolong rendah, dengan total pencapaian sebesar 23.627 pekerja dari potensi 83.327, atau setara dengan 28,35 persen dari total tenaga kerja potensial yang seharusnya terlindungi. Artinya, masih terdapat 59.700 pekerja yang belum tercover program Jamsos, yang mencerminkan adanya kesenjangan perlindungan ketenagakerjaan di tingkat daerah.

Jika dilihat berdasarkan sektor, tingkat cakupan tertinggi tercatat pada sektor Jasa Kemasyarakatan dengan persentase sebesar 83,31 persen (8.480 dari 10.179 pekerja). Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa publik telah memiliki kesadaran dan akses yang relatif baik terhadap program perlindungan sosial. Di sisi lain, cakupan yang tinggi juga terlihat pada sektor Listrik, Gas, dan Air sebesar 70,5 persen. meskipun jumlah total tenaga kerjanya relatif kecil (392 dari 556 pekerja).

Sebaliknya, sejumlah sektor strategis justru mencatatkan tingkat cakupan yang masih sangat rendah. Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi hanya mencatat cakupan sebesar 7,66 persen, sementara Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi yang memiliki potensi besar (23.408 pekerja) baru mencakup 12,95 persen (3.032 pekerja). Sektor Industri Pengolahan, yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja lokal, juga hanya mencatat cakupan 12,93 persen, menyisakan lebih dari 10.000 pekerja yang belum terlindungi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya intervensi strategis dari pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan sosialisasi, kemudahan akses kepesertaan, serta regulasi yang mendorong pemberi kerja di sektor informal maupun UMKM untuk mendaftarkan pekerjaannya dalam program Jamsos. Peningkatan cakupan jaminan sosial ini sangat penting tidak hanya untuk melindungi pekerja dari risiko sosial ekonomi, tetapi juga sebagai indikator kesejahteraan dan ketahanan tenaga kerja di daerah dalam jangka panjang.

5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Distribusi penduduk menurut agama memperlihatkan bahwa agama Islam dengan jumlah terbesar merupakan mayoritas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jumlah Terbesar berikutnya berturut-turut Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha dan Hindu. Keragaman penganut agama ini memerlukan pembinaan untuk menumbuhkan rasa toleransi dan tenggang rasa antar pemeluk agama agar tidak muncul konflik yang berpotensi

mengganggu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Gambaran komposisi jumlah penganut agama di Kabupaten Tanjung jabung Timur tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.59 berikut.

Tabel 2.59

Data Distribusi Masyarakat Berdasarkan Agama di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2023

Kecamatan	Agama					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Mendahara	26.561	29	1	-	-	-
Mendahara Ulu	17.048	408	35	6	-	-
Geragai	26.524	724	155	1	3	-
Dendang	16.958	228	33	-	3	-
Muara Sabak Barat	23.150	401	52	-	21	4
Muara Sabak Timur	32.695	220	19	-	14	1
Kuala Jambi	14.783	38	1	-	9	-
Rantau Rasau	25.590	418	87	-	-	-
Berbak	10.739	57	28	1	-	-
Nipah Panjang	26.620	158	7	-	64	-
Sadu	13.567	6	-	36	24	-
Jumlah	234.235	2.678	418	44	138	5

Sumber: data Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2023

Data yang disajikan menggambarkan distribusi penduduk berdasarkan agama di sepuluh kecamatan dengan total penduduk mencapai 234.235 jiwa. Mayoritas penduduk di seluruh kecamatan menganut agama Islam, yang jumlahnya sangat dominan dibandingkan dengan agama lain. Kecamatan Muara Sabak Timur menjadi wilayah dengan jumlah pemeluk Islam terbanyak, mencapai 32.695 jiwa, diikuti oleh Mendahara dan Nipah Panjang yang juga memiliki populasi Islam yang besar. Sementara itu, kecamatan Berbak memiliki jumlah penduduk Islam paling sedikit, yaitu 10.739 jiwa. Agama-agama minoritas seperti Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan lainnya tersebar di berbagai kecamatan dengan jumlah yang jauh lebih kecil, namun tetap menunjukkan adanya keberagaman agama di wilayah tersebut.

Keberagaman agama minoritas terlihat cukup signifikan di beberapa kecamatan tertentu. Misalnya, Kecamatan Muara Sabak Barat memiliki jumlah pemeluk agama non-Islam yang relatif besar, dengan 401 Protestan, 52 Katolik, 21 Budha, dan 4 lainnya, menunjukkan komunitas yang cukup beragam. Kecamatan Geragai dan Rantau Rasau juga memiliki jumlah pemeluk Protestan yang cukup tinggi, masing-masing 724 dan 418 jiwa. Selain itu, Nipah Panjang menonjol dengan jumlah pemeluk Budha yang mencapai 64 jiwa, sedangkan Sadu memiliki jumlah pemeluk Hindu dan Budha yang cukup menonjol, masing-masing 36 dan 24 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Islam adalah agama mayoritas, komunitas agama lain tetap eksis dan berkontribusi pada keragaman sosial di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, pola distribusi agama di kecamatan-kecamatan ini menunjukkan dominasi yang kuat dari agama Islam, namun dengan keberadaan agama minoritas yang tersebar dan beragam. Agama Protestan menjadi kelompok minoritas terbesar kedua, diikuti oleh Katolik dan Budha yang tersebar di beberapa kecamatan dengan jumlah yang lebih kecil. Agama Hindu dan kategori “Lainnya” memiliki jumlah yang sangat kecil dan hanya ditemukan di beberapa kecamatan saja. Data ini mencerminkan sebuah masyarakat yang mayoritas beragama Islam namun tetap hidup berdampingan dengan komunitas agama lain, menciptakan sebuah mozaik keberagaman yang unik dan penting untuk dipahami dalam konteks sosial dan budaya wilayah tersebut.

6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Semakin indeks keluarga sehat akan berdampak semakin membaik Indeks Kualitas Keluarga yang juga menjadi landasan kualitas ketahanan sosial masyarakat yang sejahtera dan menjadi pilar penyangga pembangunan suatu bangsa, antara lain dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan tolok ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan Pembangunan Keluarga dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Semakin tinggi capaian Indeks

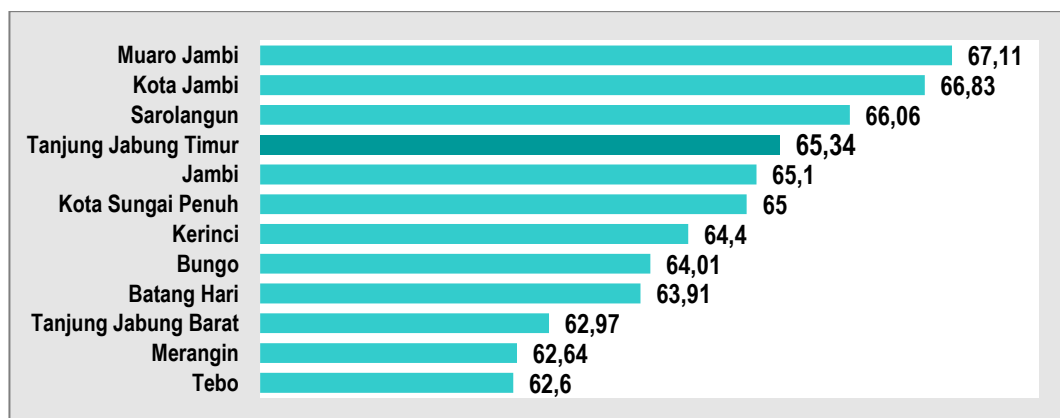
Kualitas Keluarga menunjukkan adanya peningkatan kualitas keluarga di Indonesia. Indek Kualitas Keluarga pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur di proxikan oleh Indek Perlindungan Anak dan Indek Pembangunan Gender. Sayang data indeks perlindungan anak belum ada data namun indeks pembangunan gender mengalami peningkatan hal menunjukkan kesetaraan gender makin meningkat untuk memperbaiki kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera agar dapat keluar dari garis kemiskinan.

a. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dalam suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana anak-anak terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi, sekaligus mengukur akses mereka terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik kualitas perlindungan anak yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat, yang mencerminkan upaya kolektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara maksimal.

Gambar 2.39

Indeks Perlindungan Anak Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2023



Sumber: KemenPPPA, 2023

Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada angka 65,34. Capaian ini menempatkan Tanjung Jabung Timur di posisi tengah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi. Kabupaten ini masih berada di bawah Kota Jambi (67,11), Kota Sungai Penuh (65,10), dan Kota Jambi (66,83), namun berada di atas beberapa wilayah seperti Bungo (64,01), Tanjung Jabung Barat (62,97), dan Tebo (62,60).

Meskipun angka IPA Tanjung Jabung Timur sudah melampaui ambang 65 persen, namun belum menunjukkan capaian yang optimal dalam konteks perlindungan anak. Jika dibandingkan dengan wilayah dengan indeks tertinggi di provinsi, selisih angkanya masih cukup mencolok. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak di Tanjung Jabung Timur perlu terus diperkuat, baik dari sisi kebijakan, ketersediaan layanan ramah anak, maupun partisipasi masyarakat.

Posisi menengah ini mengindikasikan bahwa tantangan terhadap perlindungan anak masih cukup signifikan, mulai dari akses terhadap pendidikan dan kesehatan, risiko kekerasan, hingga kebutuhan akan sistem pengaduan dan penanganan kasus yang responsif. Untuk itu, peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan SDM penyedia layanan anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak anak menjadi langkah yang sangat penting dalam mendorong perbaikan IPA di Tanjung Jabung Timur ke depannya.

b. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga hingga saat ini belum tersedia pada level kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini juga berlaku pada Indeks Kualitas Keluarga (IKK), yang keberadaannya masih terbatas pada tingkat provinsi dan nasional. Padahal, IKK merupakan tolok ukur penting yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Indeks Kualitas Keluarga.

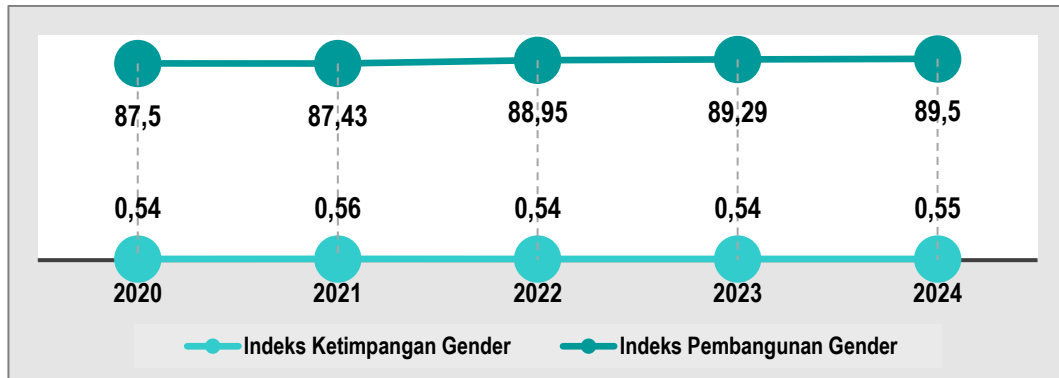
Indeks ini dirancang untuk mengukur kualitas kehidupan keluarga dari berbagai dimensi, seperti ketahanan ekonomi, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan anak dan perempuan. Ketiadaan data IKK di level daerah menyulitkan pemerintah kabupaten dalam melakukan pemetaan yang akurat terhadap kondisi keluarga, serta menghambat proses perumusan kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi pada penguatan ketahanan keluarga.

Ketersediaan data IKK di tingkat lokal sangat penting agar pemerintah daerah dapat menyusun program intervensi yang lebih tepat sasaran dan mampu mengatasi berbagai tantangan sosial dari akar permasalahannya, termasuk isu kemiskinan ekstrem, kekerasan dalam rumah tangga, hingga persoalan stunting. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis untuk mendorong pelaksanaan pengukuran IKK secara berkala di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan keluarga.

c. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesenjangan atau ketimpangan gender dalam suatu negara atau wilayah. Nilai IKG memberikan gambaran tentang seberapa besar kesenjangan antara pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kekuasaan politik. Untuk mengukur kesetaraan gender memerlukan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.40
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.40 menjelaskan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender. Kedua indeks ini memberikan wawasan yang berbeda tentang bagaimana laki-laki dan perempuan meningkatkan kesejahteraannya hidupnya. Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur perbedaan antara pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*, HDI) untuk perempuan dan laki-laki.

Selama lima tahun terakhir, capaian IPG Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan tren yang positif. Terlihat adanya peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, dimana indeks mencapai angka mendekati 90 persen pada tahun 2024. Ini menandakan bahwa kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di kabupaten ini terus membaik, dengan perempuan semakin memperoleh kesempatan yang setara dalam pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi.

Namun demikian, nilai IKG yang relatif stagnan dan tetap berada pada angka yang rendah, meskipun tidak terlihat fluktuatif secara ekstrem, menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi tantangan. Hal ini tercermin dari tingkat IKG yang mendekati 0,5, artinya masih terjadi tingkat kesenjangan yang tinggi antara pria dan wanita dalam semua aspek kehidupan.

d. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil partisipasi dan pemberdayaan pemuda di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh belum dilakukannya pengukuran terhadap lima domain utama yang menjadi komponen kunci dalam penyusunan IPP, yaitu: (1) pendidikan, (2) kesehatan dan kesejahteraan, (3) lapangan dan kesempatan kerja, (4) kepemimpinan dan partisipasi, serta (5) gender dan diskriminasi. Ketiadaan pengukuran terhadap kelima domain ini menyebabkan nilai indikator IPP secara faktual tercatat nol (0), yang tidak mencerminkan realitas sosial maupun potensi pemuda yang sesungguhnya

Kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan kepemudaan, yang berimplikasi pada terbatasnya informasi sebagai dasar perumusan kebijakan yang berpihak pada pemuda. Tanpa data yang memadai, intervensi kebijakan menjadi tidak tepat sasaran, dan peluang untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah pun terhambat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk membangun sistem pengumpulan dan pelaporan data IPP yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat kabupaten. Penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta pelibatan aktif organisasi kepemudaan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem evaluasi IPP yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga reflektif terhadap kebutuhan dan potensi pemuda secara nyata.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) terkait kondisi kualitas tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ketergantungan penduduk dalam mencapai kesejahteraan, sebagaimana terjabarkan berikut ini.

a. Angka Ketergantungan

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dipertimbangkan dalam pembangunan. Pemanfaatan penduduk usia produktif diperhatikan sebagai faktor kunci dalam kemajuan pembangunan. Untuk mengukur rasio ketergantungan memerlukan data jumlah penduduk produktif dan nonproduktif dapat dilihat pada Tabel 2.60 di bawah ini.

Tabel 2.60
Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Usia ≤ 15 Tahun	55.654	55.419	55.297	59.720	58.529
Jumlah Penduduk Usia ≥ 64 Tahun	14.282	15.261	16.320	15.964	16.099
Jumlah Penduduk Tidak Produktif	69.936	70.680	71.617	75,684	74.539
Jumlah Penduduk Usia 15 s/d 64 Tahun	159.877	70.680	162.547	161.043	170.547
Rasio Ketergantungan	44,57	44,86	45,03	47	43,60

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada tahun 2024 adalah 43,60 yang artinya 100 orang usia produktif menanggung beban 43 orang usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Artinya jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari pada jumlah penduduk non produktif (usia 0-14 tahun dan > 65 tahun).

b. Kualitas Tenaga Kerja

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan keuntungan yang besar dalam mengurangi disparitas kesejahteraan ekonomi karena berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup. Arsitektur persebaran jumlah pekerja di suatu daerah menunjukkan lapangan pekerjaan yang menjadi tumpuan pergerakan ekonomi pada suatu daerah. Status pekerjaan secara umum terbagi menjadi dua jenis yakni pekerja formal dan informal.

Pekerjaan formal meliputi status pekerjaan berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, selain itu merupakan pekerjaan informal.

Tabel 2.61

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	22.965	12.620	35.585
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	6.561	3.382	9.943
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	8.626	1.583	10.209
Buruh/Karyawan/Pegawai	19.148	8.362	27.510
Pekerja Bebas	18.263	3.380	27.510
Pekerja Keluarga/tidak dibayar	4.233	5.760	9.993
Jumlah	79.796	35.087	114.883

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024 (diolah)

Kondisi tenaga kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa struktur pekerjaan masyarakat masih didominasi oleh sektor informal, khususnya berusaha sendiri dan pekerja bebas. Dari total 114.883 penduduk yang bekerja, 35.585 orang (30,98) berstatus berusaha sendiri, disusul oleh pekerja bebas sebanyak 27.510 orang (23,94%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di kabupaten ini menggantungkan penghidupannya pada sektor informal yang tidak memiliki jaminan kerja tetap.

Sementara itu, jumlah tenaga kerja dengan status buruh/karyawan/pegawai tercatat sebanyak 27.510 orang (23,94%), yang mencerminkan proporsi pekerja formal yang relatif kecil dibandingkan dengan pekerja informal. Jumlah pekerja yang berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar hanya sebesar 10.209 orang (8,89%), dan yang dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar sebesar 9.943 orang (8,65%). Sedangkan pekerja keluarga/tidak dibayar berjumlah 9.993 orang (8,70%), yang sebagian besar berasal dari perempuan.

Dari segi jenis kelamin, terdapat ketimpangan yang cukup tinggi, di mana jumlah pekerja laki-laki mencapai 79.796 orang, hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan perempuan yang hanya 35.087 orang. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tenaga kerja perempuan masih cukup rendah di berbagai jenis pekerjaan, khususnya pada kategori pekerja bebas dan berusaha sendiri.

Tabel 2.62

Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sekolah Dasar/Lebih Rendah	65.238	54,41	60.499	52,37	66.300	99,85	57.023	99,6	52.648	99,31
Sekolah Menengah Pertama	21.952	18,21	23.158	30,05	20.990	98,12	22.929	100	19.778	98,79
Sekolah Menengah Atas	25.102	20,94	21.125	20,88	23.695	96,82	28.780	95,94	32.546	95,88
Perguruan Tinggi	7.604	6,34	7.735	6,70	8.103	96,25	9.116	94,2	9.911	96,08
Jumlah	119.896	100	115.517	100	119.088	98,68	117.848	98,33	114.883	97,94

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2020-2024 (diolah)

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki pekerja rentan yang terdiri dari pekerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Pekerja rentan ini mengalami fluktuasi beriringan dengan angkatan kerja. Keahlian menjadi salah satu faktor pendukung kapasitas pekerja untuk dapat bekerja. Keahlian dapat diperoleh salah satunya melalui pendidikan formal. Penyerapan tenaga kerja pada umumnya menerapkan pendidikan sebagai salah satu syarat utama.

Dilihat dari penyerapan tenaga kerja berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020-2024, pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar atau lebih rendah secara

konsisten mendominasi sebagai kelompok pendidikan yang paling banyak diserap dalam dunia kerja. Pada tahun 2020, sebesar 54,41 persen tenaga kerja berasal dari jenjang pendidikan ini. Meskipun pada tahun-tahun berikutnya jumlah absolutnya sempat meningkat, proporsinya terhadap total tenaga kerja menunjukkan penurunan, yakni menjadi 52,37 persen di tahun 2021 dan terus menurun hingga mencapai 45,83 persen pada tahun 2024.

Penurunan ini terjadi seiring dengan peningkatan proporsi tenaga kerja dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya, pekerja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan peningkatan signifikan dalam persentase pada tahun 2021, yakni sebesar 30,05 persen, meskipun angkanya kembali menurun menjadi 17,21 persen pada tahun 2024. Di sisi lain, tenaga kerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami fluktuasi, dengan proporsi sebesar 20,94 persen di tahun 2020, turun menjadi 20,88 persen di 2021, lalu meningkat menjadi 28,32 persen pada 2023, dan terus naik hingga 28,32 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.63

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Lulusan S1/S2/S3	5.078	NA	5.586	8.419	8.638
Rasio Lulusan S1/S2/S3 (Tenaga Kerja)	0,02	0.00	0,02	0,03	0,03
Jumlah Penduduk	229.206	232.048	233.102	236.727	238.975

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Kondisi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa kontribusi tenaga kerja lulusan perguruan tinggi (S1/S2/S3) terhadap pasar kerja masih sangat rendah. Meskipun jumlah lulusan S1/S2/S3 mengalami peningkatan dari 5.078 orang pada tahun 2020 menjadi 8.638 orang pada tahun 2024, namun rasio lulusan tersebut terhadap jumlah penduduk atau tenaga kerja tetap berada pada angka yang sangat

rendah, yaitu hanya sekitar 0,02 persen pada tahun 2020 dan 2022, serta 0,03 persen pada tahun 2023 dan 2024.

Rendahnya rasio ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan tingkat penyerapan mereka dalam dunia kerja lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa lulusan pendidikan tinggi belum sepenuhnya terserap secara optimal dalam sektor-sektor pekerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, baik karena terbatasnya lapangan kerja yang sesuai, kurangnya daya saing, atau karena minimnya peluang kerja berbasis keahlian.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang lebih relevan dengan kebutuhan industri lokal, memperluas akses kesempatan kerja, serta mendorong wirausaha berbasis inovasi untuk menampung potensi SDM terdidik. Tanpa intervensi yang tepat, ketidakseimbangan ini dapat menghambat efektivitas pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan adalah kegiatan ekonomi yang mengubah bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang jadi atau barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Industri pengolahan mencakup berbagai sektor, seperti industri makanan, minuman, tekstil, kimia, farmasi, dan lain-lain. Sektor industri pengolahan memegang peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi nasional disamping juga memberi peluang kesempatan kerja. Untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan sektor industri pengolahan maka data statistik industri yang aktual dan akurat sangat dibutuhkan. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Nasional 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel 2.64 berikut.

Tabel 2.64

Rasio Industri Pengolahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024

Rasio Industri Pengolahan	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1,25	-0,20	1,89	1,25	3,79
Provinsi Jambi	3,29	6,71	10,20	4,19	2,63
Nasional	2,55	2,43	2,41	2,52	2,64

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat pertumbuhan industri pengolahan yang berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, pertumbuhan industri pengolahan sebesar (1,25) persen, namun mengalami kontraksi sebesar (-0,20) persen pada tahun 2021. Selanjutnya pertumbuhannya kembali menjadi positif semenjak tahun 2022 hingga mencapai (3,79) persen pada tahun 2024. Meskipun mengalami pertumbuhan yang meningkat di tahun 2022 hingga tahun 2024, namun angka ini masih di bawah rata-rata Provinsi Jambi dan Nasional.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai pertumbuhan yang di atas rata-rata Provinsi Jambi dan Nasional hanya di tahun 2024 dengan nilai sebesar (3,79) persen. Sementara itu, ditahun-tahun lainnya selalu di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah turut membantu pertumbuhan industri pengolahan di level provinsi dan nasional.

b. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor akomodasi, makan, dan minum (Akmamin) adalah persentase kontribusi sektor ini terhadap total PDRB suatu daerah. Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur presentase rasio PDRB Makan dan Minum dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Tahun 2020 sebesar 0,45 persen kemudian turun menjadi 0,42 persen kemudian turun lagi di tahun 2022 menjadi 0,39 persen kemudian naik menjadi 0,44 persen di tahun 2023 -2024. Naik turunnya rasio PDRB di sektor makanan dan minum dapat disebabkan oleh berbagai hal

seperti jumlah wisatawan, tingkat pengeluaran wisatawan, dan pertumbuhan bisnis di sektor makanan dan minuman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jika dibandingkan dengan data provinsi dan nasional, rasio PDRB makan dan minum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.65 berikut.

Tabel 2.65

Rasio PDRB Makan dan Minum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0,45	0,42	0,39	0,44	0,44
Provinsi Jambi	1,19	1,11	1,05	1,09	1,10
Nasional	2,55	2,43	2,41	2,52	2,64

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Sejalan dengan data Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jika dibandingkan dengan data Provinsi Jambi, rasio PDRB makan dan minum juga menampilkan adanya fluktuasi dari tahun 2020 sebesar 1,19 persen kemudian turun di tahun 2021 hingga 1,11 persen kemudian turun menjadi 1,05 persen di tahun 2022 hingga akhirnya naik di tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat nasional menunjukkan dominasi yang jauh lebih tinggi, dengan rasio PDRB sektor ini konsisten berada di atas 2,4 persen, bahkan meningkat menjadi 2,64 persen pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan besarnya kontribusi sektor pariwisata, perhotelan, restoran, dan layanan konsumsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum.

Berdasarkan perbandingan ini, terlihat bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tertinggal dalam memanfaatkan potensi sektor akomodasi dan makan-minum dibandingkan provinsi maupun nasional. Ketertinggalan ini dapat disebabkan oleh minimnya infrastruktur pendukung,

promosi pariwisata yang belum optimal, rendahnya investasi swasta di sektor ini, serta keterbatasan daya saing pelaku usaha lokal. Ke depannya pengembangan sektor ini perlu dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan diberikan perhatian khusus mengingat potensi besarnya dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis lokal. Pendekatan berbasis budaya, ekowisata, dan penguatan UMKM kuliner lokal dapat menjadi strategi penting dalam mengangkat kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah.

c. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

PDRB Ekonomi Kreatif merupakan jumlah nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi kreatif. Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat ini belum melakukan perhitungan terkait proporsi PDRB Ekonomi Kreatif sehingga data tidak tersedia.

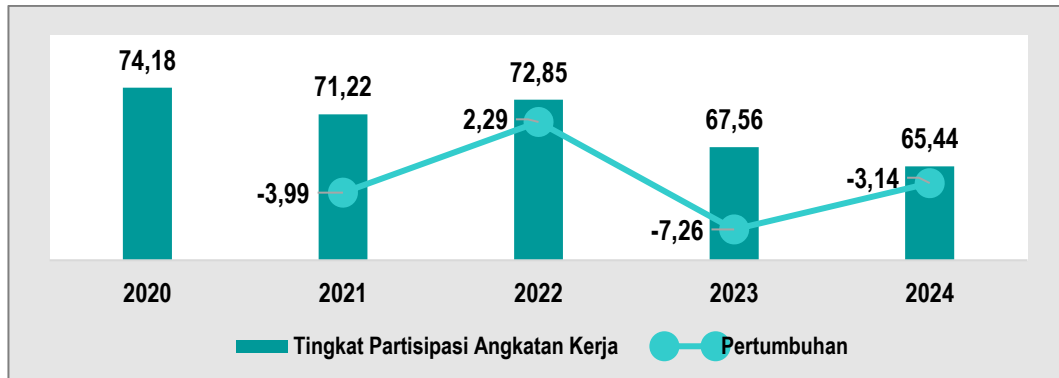
d. Rasio Kewirausahaan

Menurut Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 rasio kewirausahaan merupakan perbandingan populasi Wirausaha terhadap populasi angkatan kerja Indonesia. Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat ini belum melakukan perhitungan rasio kewirausahaan sehingga data belum tersedia.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya potensi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan/pasokan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Gambar 2.41
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 74,18 persen, kemudian menurun menjadi 71,22 persen pada tahun 2021 atau turun sebesar minus 3,99 persen. Pada tahun 2022, TPAK mengalami peningkatan sebesar 2,29 persen menjadi 72,85 persen, namun kembali mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 67,56 persen atau turun sebesar minus 7,26 persen. Pada tahun 2024, tren penurunan masih berlanjut dengan capaian TPAK sebesar 65,44 persen, atau minus 3,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Rata-rata pertumbuhan TPAK Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020-2024 menunjukkan penurunan yang konsisten, mencerminkan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja yang cukup bagi angkatan kerja. Capaian TPAK tahun 2024 yang sebesar 65,44 persen menandakan semakin sedikitnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kesulitan angkatan kerja dalam memperoleh pekerjaan cukup tinggi, atau dengan kata lain, rendahnya TPAK menunjukkan keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia.

Penurunan TPAK dalam dua tahun terakhir dapat menunjukkan adanya beberapa potensi tantangan di sektor ketenagakerjaan daerah, seperti

berkurangnya peluang kerja, meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang tidak aktif secara ekonomi (misalnya karena pendidikan, pengangguran, atau pekerjaan informal yang tidak tercatat), serta rendahnya partisipasi perempuan atau kelompok rentan dalam dunia kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 serta perbandingannya dengan Provinsi Jambi dan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi dan Kabupaten dalam
Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Wilayah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)(Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Jambi	67,79	67,17	67,84	68,75	68,87
Kerinci	69.55	70.90	73.53	71.89	77,64
Merangin	70.17	69.85	69.50	71.17	74,73
Sarolangun	68.58	64.86	66.74	66.52	68,10
Batanghari	67.02	68.81	63.42	62.01	63,53
Muaro Jambi	61.63	62.78	67.21	74.38	67.09
Tanjung Jabung Timur	74.18	71.22	72.85	67.56	65.44
Tanjung Jabung Barat	74.83	73.89	70.00	70.17	68.15
Tebo	71.13	70.65	69.02	70.13	69.11
Bungo	64.89	63.58	67.83	70.30	67.80
Kota Jambi	64.12	63.12	64.52	64.85	66.38
Kota Sungai Penuh	66.05	71.12	63.74	3.80	66,37

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa maka posisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan 65,44 persen berada di bawah rata-rata provinsi, jika dibandingkan dengan rata-rata TPAK Provinsi Jambi yang berada pada angka 68,87 persen di tahun 2024. Selain itu, juga mengalami penurunan yang lebih tajam dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain seperti Kerinci 77,64 persen dan Merangin 74,73 persen.

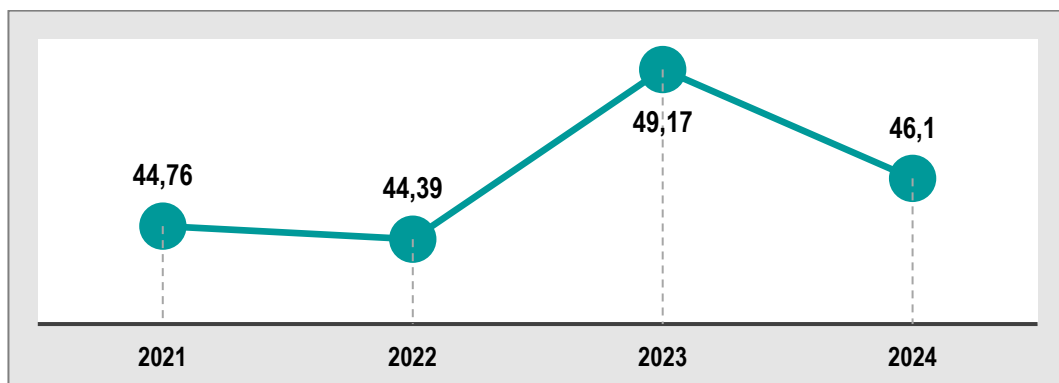
Tren ini menunjukkan pentingnya perhatian lebih terhadap kebijakan perluasan kesempatan kerja, pelatihan keterampilan tenaga kerja, serta peningkatan kualitas data ketenagakerjaan di Tanjung Jabung Timur. Pemerintah daerah perlu merespons penurunan TPAK ini dengan mendorong

program peningkatan kapasitas angkatan kerja, fasilitasi wirausaha, dan penyelarasan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri lokal agar produktivitas dan partisipasi tenaga kerja dapat kembali ditingkatkan.

f. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan salah satu parameter penting yang merefleksikan tingkat kreativitas, kemampuan, dan efektivitas pemerintah daerah dalam menciptakan inovasi sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Pada konteks Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pemantauan indeks ini selama periode 2019 hingga 2024 memberikan gambaran dinamika inovasi yang terjadi serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Data yang tersedia menunjukkan perkembangan nilai indeks inovasi dari tahun ke tahun, meskipun terdapat beberapa ketidaklengkapan data pada awal periode (2019 dan 2020).

Gambar 2.42
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2024



Sumber: Data Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2024, terlihat bahwa nilai indeks mulai tercatat pada tahun 2021 dengan angka 44,76, kemudian menurun sedikit menjadi 44,39 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terdapat peningkatan signifikan mencapai 49,17 sebelum kembali mengalami penurunan ke angka 46,10 pada

tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan adanya dinamika dan tantangan dalam proses inovasi daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal.

Penurunan kecil pada tahun 2022 dapat disebabkan oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, tantangan implementasi kebijakan inovasi, atau perubahan prioritas pembangunan daerah. Sedangkan peningkatan pada tahun 2023 menunjukkan adanya upaya revitalisasi inovasi, kemungkinan melalui perbaikan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, atau penguatan kolaborasi lintas sektor. Namun, penurunan kembali pada tahun 2024 mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme inovasi dan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan peningkatan indeks.

Secara keseluruhan, indeks inovasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berada dalam kategori menengah, yang menandakan potensi besar namun juga kebutuhan yang mendesak untuk penguatan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan inovasi berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat. Pengembangan inovasi daerah harus didukung oleh data yang lengkap dan akurat serta monitoring berkelanjutan agar dapat menjadi basis pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan mampu mengakselerasi pembangunan daerah secara signifikan.

3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

a. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan pencapaian transformasi ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Dalam komponen pembentuk indeks ekonomi hijau terdapat 3 dimensi yang digunakan yaitu 1) Dimensi Ekonomi 2) Dimensi Sosial dan 3) Dimensi Lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau merupakan indikator baru sehingga Organisasi Perangkat Daerah terkait

belum melakukan perhitungan mengenai indeks ekonomi hijau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Indeks ekonomi biru merupakan pembangunan yang berbasis pada nilai ekonomi sumber daya laut Indonesia, yang menciptakan nilai tambah pada rantai suplai (langsung dan tidak langsung) sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan (Badan Pusat Statistik, 2024). Indeks Ekonomi Biru digunakan untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja ekonomi biru di berbagai daerah di Indonesia. Dalam pengukuran indeks ekonomi biru terdapat 26 uraian yang menjadi indikator dalam pembentukan indeks ekonomi biru.

Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 dapat diketahui bahwa dari beberapa indikator pembentuk indeks ekonomi biru masih banyak indikator-indikator pembentuk lainnya yang belum tersedia. Meskipun begitu, berdasarkan indikator volume produksi perikanan (tangkap) dapat diketahui bahwa volume produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangatlah besar mencapai 25.935,76 ton, volume produksi budidaya tambak mencapai 297,7 tambak serta 670,7 kolam, jumlah perahu/kapal penangkap ikan mencapai 1.919 unit, luas kawasan konservasi perairan 4.115 (juta Ha), jumlah nelayan dan pembudidaya ikan 4.115 orang, jumlah pekerja perempuan di sektor perikanan 907 (orang) serta rata-rata konsumsi protein dari ikan per kapita (kkal) per hari mencapai 39 Puluhan Kkal/Hari. Berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai potensi ekonomi biru yang besar dilihat dari besarnya jumlah produksi ikan dan potensi SDA yang memadai.

Tabel 2.67
Indikator Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Dinas Perikanan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Peran sektor perikanan dalam Produk Domestik Bruto (PDB)(%)	%	-	
2	Volume produksi perikanan (tangkap)	Ton	25.935,76	
3	Volume produksi budidaya tambak	Tambak	297,7	
		Kolam	670,7	
4	Volume produksi akuakultur laut (ratus ribu ton)	Ton	-	
5	Volume produksi budidaya rumput laut (ratus ribu ton)	Ton	-	
6	Volume ekspor ikan olahan (puluh ribu ton)	Ton	-	
7	Volume produksi garam (puluh ribu ton)	Ton	-	
8	Jumlah perahu/kapal penangkap ikan (ribu unit)	Unit	1.919	
9	Volume ekspor perikanan (puluh ribu ton)	Ton	-	
10	Kontribusi ekspor produk perikanan terhadap total ekspor (%)	%	-	
11	Volume ekspor perikanan hidup dan segar (puluh ribu ton)	Ton	-	
12	Jumlah kapal perikanan tangkap laut - kapal motor > 30 GT (puluh unit)	Unit	-	
13	Jumlah pelabuhan perikanan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (unit pelabuhan)	Unit	2	
14	Kawasan terumbu karang berkualitas baik (%)	%	-	
15	Kawasan lamun berkualitas baik (%)	%	-	
16	Luas kawasan konservasi perairan (Juta Ha)	Ha	4.115	
17	Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan	Orang	4.115	
18	Jumlah pekerja perempuan di sektor perikanan (orang)	Orang	907	599 UPI
19	Jumlah peserta pelatihan perikanan (orang)	Orang	7	
20	Persentase penduduk sektor perikanan dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat (%)	%	-	
21	Persentase penduduk di sektor perikanan dengan ijazah minimal SMA atau sederajat (%)	%	-	
22	Inversed 'Persentase penduduk di sektor perikanan penerima Program Indonesia	%	-	

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
	Pintar (PIP) (%)			
23	Rata-rata konsumsi kalori ikan per kapita (puluh kkal) per hari	Puluh Kkal/Hari	39	
24	Rata-rata konsumsi protein dari ikan per kapita (kkal) per hari	Puluh Kkal/Hari	39	
25	Persentase penduduk bekerja di sektor perikanan yang memiliki jaminan kesehatan (%)	%	-	
26	Inversed Persentase Penduduk Pesisir yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan (%)	%	-	

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

c. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

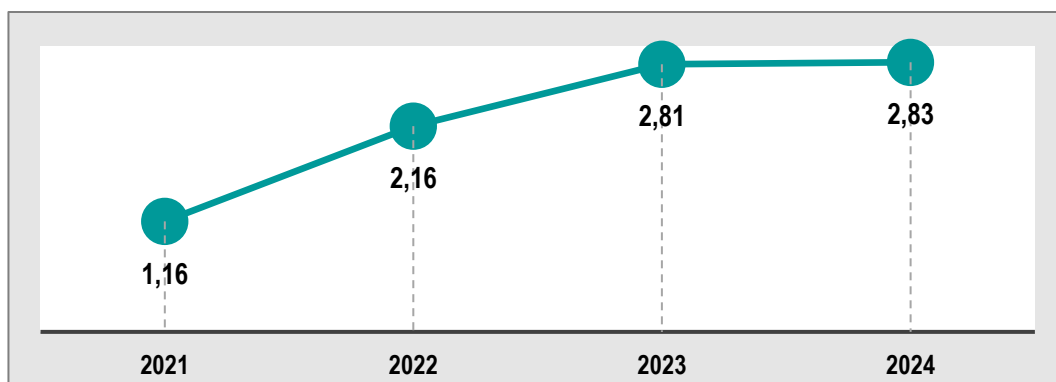
Terdapat enam infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yang bertujuan meningkatkan bauran energi primer di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pertama, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di Kecamatan Sadu, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Dendang, Kecamatan Geragai, Kecamatan Mendahara Ulu, dan Kecamatan Berbak. Kedua, Solar sel sebagai upaya pengadaan energi listrik bagi masyarakat yang tertinggal di daerah terpencil. Ketiga, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 400 Megawatt. Keempat, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kecamatan Muara Sabak Timur. Kelima, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kecamatan Muara Sabak Barat. Keenam, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 7,2 MW di Kecamatan Sadu dan Kecamatan Mendahara.

4. Transformasi Digital

Kinerja aspek komunikasi dan informatika di Kabupaten Jabung Timur mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat pada capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2023 sebesar 2,81 dengan predikat kurang. Lompatan kinerja ini tentu harus menjadi modal

untuk meraih capaian yang lebih tinggi dengan predikat sangat baik bahkan menuju capaian memuaskan.

Gambar 2.43
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Jika dilihat lebih dalam, nilai SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 yaitu 2,83 dalam kategori baik. Dapat dilihat bahwa pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah memberikan perhatian serius agar dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, mengingat saat ini semua pemerintah dituntut untuk dapat memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat yang dapat di akses di manapun dan kapanpun. Tentu hal ini akan berpengaruh terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pemerintah.

Tabel 2.68
Data Capaian Kinerja Telekomunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kecamatan	64,71	82,35	83,45	82,35	N/A
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	75,27	77,42	82,80	82,80	N/A
3	Persentase Penduduk yang Menggunakan Telephone/HP	74,76	79,73	83,65	86,70	N/A

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	39,60	50,35	61,27	66,19	N/A
5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Capaian dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara tahun 2020-2023 menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi. cakupan pengembangan dan pemberdayaan informasi di tingkat kecamatan meningkat dari 75,27 persen menjadi 82,35 persen, sementara cakupan layanan telekomunikasi naik dari 74,79 persen menjadi 82,20 persen. persentase penduduk yang menggunakan telepon/HP juga bertambah dari 76,29 persen menjadi 83,65 persen, dan rumah tangga dengan akses internet melonjak dari 39,60 persen menjadi 66,19 persen. kemajuan ini mengindikasikan peningkatan akses dan adopsi teknologi di kalangan penduduk, didorong oleh urbanisasi, peningkatan daya beli, dan upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur digital. dalam perencanaan pembangunan daerah, kemajuan ini membuka peluang untuk mengintegrasikan lebih lanjut teknologi digital dalam layanan publik pendidikan, dan ekonomi, menyoroti kebutuhan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur TIK dan program literasi digital untuk memastikan inklusi dan manfaat teknologi bagi semua lapisan masyarakat. Sementara untuk data 2024 masih belum dilakukan pengukuran.

Tabel 2.69

Indikator Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Jaringan Backhome	1	1	1	1	1
Jumlah Data Center	1	1	1	1	1
Jumlah Cloud Computing	1	1	1	1	1
Jumlah Menara Telekomunikasi (Unit)	82	84	87	95	100
Persentase Cakupan Jaringan	26	25	23	16	17

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Telekomunikasi (%)					
Jumlah Desa Blank Spot	24	23	21	15	16
Kelurahan	3	3	2	3	3
Desa	21	20	20	13	13

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Data terkait infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi di kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2019-2023 menunjukkan beberapa tren penting. Pertama, terdapat kestabilan dalam jumlah jaringan Backbone, data-center, dan cloud computing, yang semuanya tetap pada satu unit selama periode lima tahun terakhir. Hal ini mengidentifikasi bahwa tidak terjadi penambahan atau pengurangan signifikan dalam infrastruktur TIK utama daerah. Di sisi lain, terjadi peningkatan jumlah menara telekomunikasi dari 82 unit pada tahun 2019 menjadi 100 unit pada tahun 2023, yang mencerminkan upaya untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan telekomunikasi namun, menarik untuk dicatat bahwa meskipun ada penambahan menara, pada tahun 2019 menjadi 16 pada tahun 2023, dengan penurunan baik di kelurahan maupun desa. Penurunan persentase cakupan jaringan telekomunikasi meskipun ada penambahan menara mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan kepadatan penduduk, urbanisasi yang lebih luas, atau perluasan wilayah geografis yang memerlukan cakupan. Kurangnya peningkatan infrastruktur inti seperti Jaringan *Backbone*, *Data Center*, dan *Cloud Computing* mungkin juga membatasi kemampuan untuk meningkatkan cakupan secara efektif. Dampak dari tren ini dalam perencanaan pembangunan daerah sangat signifikan. Pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan dan modernisasi infrastruktur TIK, termasuk pembangunan jaringan *backbone* dan fasilitas data, untuk memastikan cakupan yang lebih luas dan layanan yang lebih andal.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mendorong percepatan transformasi digital melalui penyediaan akses internet publik di berbagai area strategis, seperti taman kota, fasilitas umum, dan pusat layanan

masyarakat, guna menunjang aktivitas pelaku usaha dan UMKM dalam memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing melalui platform digital. Dalam pilar masyarakat, pemerintah daerah berkomitmen menyediakan konektivitas internet yang merata hingga ke sekolah-sekolah, sebagai upaya memperkuat pembelajaran berbasis digital bagi generasi muda. Sementara itu, dalam pilar pemerintahan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara bertahap menerapkan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Implementasi manajemen SPBE ini menjadi fondasi dalam mewujudkan birokrasi yang responsif dan berbasis data, yang selaras dengan arah pembangunan digital nasional dan mendukung ekosistem digital yang inklusif di daerah. namun dalam konteks ini pemerintah kabupaten tanjung jabung timur belum memiliki data terkait jumlah distriusi wifi secara keseluruhan, hal ini akan menjadi catatan untuk kabupaten secara umum mencatat jumlah distribusi wifi di seluruh kabupaten.

5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal (aset tetap) yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB menunjukkan besarnya investasi dalam aset tetap pada suatu unit usaha, yang merupakan komponen penting dalam menghitung Produk Domestik Bruto (PDB).

Tabel 2.70

Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3.616,09	3.907,53	4.151,67	5.019,28	5.650.83
Provinsi Jambi	46.354,76	51.559,91	55.711,02	64.002,61	70.058,09
Nasional	4.897.049,7	5.227.853,9	5.697.279,2	6.090.676,7	6.452.530,7

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan meningkat setiap tahunnya selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 PMTB Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat sebesar Rp. 3.616,09 miliar, PMTB ini terus meningkat hingga tercatat mencapai Rp. 5.650.83 miliar di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya investasi pembangunan yang stabil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meskipun di bawah rata-rata Provinsi Jambi dan Nasional.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) jika dibandingkan provinsi dan nasional juga menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan yang positif setiap tahunnya. Pada level provinsi PMTB tercatat sebesar Rp. 46.354,76 miliar di tahun 2020 kemudian terus meningkat hingga Rp. 70.058,09 di tahun 2024. Hal ini sejalan dengan level nasional yang tercatat sebesar Rp. 4.897.049, miliar di tahun 2020 kemudian terus meningkat hingga Rp.6.452.530,7 miliar di tahun 2024. Jika dibandingkan data level provinsi dan nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah turut aktif dalam pembangunan investasi di tingkat provinsi dan nasional namun masih terbatas pada skala lokal, dengan dominasi pada sektor pertambangan dan galian. Daya tarik investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih relatif masih rendah, kemungkinan karena keterbatasan infrastruktur penunjang, akses pasar yang sempit, dan tingkat produktivitas ekonomi lokal yang masih belum optimal. Peningkatan PMTB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih disebabkan oleh belanja pemerintah daerah dan pusat, ketimbang investasi swasta langsung, sehingga keberlanjutan dan dampak ekonominya masih perlu diperkuat.

b. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, net ekspor barang dan jasa merupakan transaksi ekspor yang dikurangi oleh transaksi impor. Transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di

wilayah ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPR, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non-residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Tanjung Jabung Timur di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Tabel 2.71

Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	8.237,81	9.743,68	12.767,53	10.711,61	11.655,02
Provinsi Jambi	41.369,58	55.453,46	84.235,88	81.989,78	94.537,92
Nasional	2.676.513,5	3.635.835,4	4.799.743,0	4.544.889,6	4.911.155,7

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Net ekspor memiliki porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Secara total, dalam kurun waktu 2020-2024 nilai net ekspor barang dan jasa menunjukkan fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2020 nilai net ekspor barang dan jasa atas dasar harga berlaku sebesar Rp.8.237,81 miliar rupiah kemudian berturut-turut sebesar Rp. 9.743,68 miliar rupiah (2021) dan Rp. 12.767,53 miliar rupiah (2022); Rp.10.711,61 miliar rupiah (2023); dan Rp.11.655,02 miliar rupiah (2024). Hal serupa juga dialami pada data net ekspor provinsi yang menampilkan adanya fluktuasi dari tahun 2020 sebesar Rp. 41.369,58 miliar kemudian naik ditahun 2021 sebesar Rp. 55.453,46 miliar dan naik di tahun 2022 sebesar Rp. 84.235,88 dan turun di tahun 2023 menjadi Rp.81.989,78 miliar kemudian naik lagi ditahun 2024 menjadi Rp.94.537,92 miliar. Sementara itu, di tingkat nasional, Indonesia justru mengalami surplus perdagangan barang dan jasa yang signifikan. Pada tahun 2020, nilai net ekspor nasional sebesar Rp2.676 triliun, dan terus meningkat hingga mencapai Rp4.911 triliun pada tahun 2024. Kinerja positif ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan hilirisasi industri, peningkatan ekspor komoditas unggulan, serta pertumbuhan sektor jasa ekspor, seperti logistik, pariwisata, dan digital ekonomi.

Namun demikian net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jambi dan nasional masih di bawah rata-rata. Kesenjangan antara kinerja net ekspor daerah dan nasional ini menegaskan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan

Provinsi Jambi belum sepenuhnya terintegrasi dalam rantai nilai ekspor nasional. Penguatan struktur ekonomi lokal, peningkatan kapasitas produksi sektor unggulan, serta pembangunan infrastruktur logistik dan industri bernilai tambah menjadi kunci penting untuk mengurangi ketergantungan impor dan mendorong kemampuan daerah dalam menghasilkan surplus perdagangan. Dengan mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi lokal dan memperkuat integrasi pasar, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat meningkatkan kemampuan ekspornya dan turut berkontribusi terhadap kinerja perdagangan nasional secara lebih seimbang dan berkelanjutan.

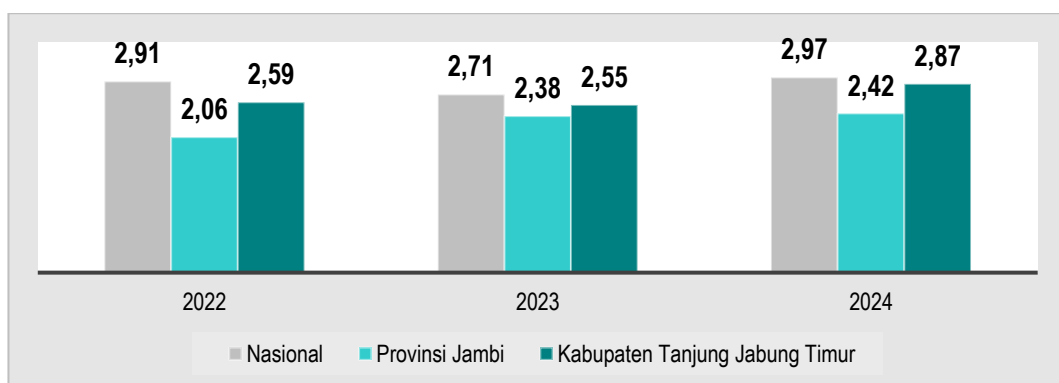
6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur

Sektor infrastruktur ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian ini dilihat berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Pilar Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pilar Infrastruktur menilai ketersediaan serta kualitas layanan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

Gambar 2.44

Capaian Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Capaian IDSD Pilar Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada rentang tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 2,59 menjadi 2,87. Capaian kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 2024 masih jauh berada di atas provinsi yang berada pada angka 2,42. Namun, capaian tersebut masih di bawah capaian nasional sebesar 2,97. Secara keseluruhan, meskipun IDSD Pilar infrastruktur Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan, tetapi perolehan tersebut masih sangat rendah.

1) Kualitas Infrastruktur Jalan Berdasarkan Kondisi

Kondisi infrastruktur jalan merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat pelayanan dasar dan konektivitas wilayah. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2025), total panjang jalan di wilayah ini bervariasi antara 1.167,396 km hingga 1.235,17 km selama periode 2020 hingga 2024. Namun demikian, analisis terhadap kualitas jalan berdasarkan kondisi fungsional menunjukkan tren yang memprihatinkan, terutama dengan meningkatnya proporsi jalan rusak berat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.72
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024

Kondisi Jalan	Tahun									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Baik	229,269	19,47	230,689	19,59	160,665	13,01	160,609	13,00	156,291	13,39
Sedang	674,756	57,29	675,016	57,31	635,615	51,46	66,873	5,41	38,27	3,28
Rusak	128,308	10,89	106,128	9,01	231,97	18,78	410,967	33,27	19,593	1,68
Rusak Berat	145,437	12,35	165,937	14,09	206,92	16,75	596,721	48,31	953,242	81,66
Jumlah	1177,770	100	1177,770	100	1235,170	100	1235,17	100	1167,396	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Pada tahun 2020, jalan dalam kondisi baik tercatat sepanjang 229,269 km (19,47 persen), sementara jalan dengan kondisi rusak berat baru mencakup 145,437 km (12,35 persen). Namun dalam lima tahun terakhir,

terjadi penurunan signifikan terhadap proporsi jalan baik, yakni hanya tersisa 156,291 km (13,39 persen) pada 2024. Pada saat yang sama, jalan dengan kondisi rusak berat melonjak drastis menjadi 953,242 km (81,66 persen), yang menandakan penurunan kualitas infrastruktur secara sistemik.

Puncak penurunan kualitas infrastruktur terjadi pada tahun 2023 dan 2024, di mana proporsi jalan rusak dan rusak berat secara kumulatif mencapai 81,58 persen dan 83,34 persen, masing-masing. Tren ini diperparah oleh anjloknya panjang jalan dalam kondisi sedang, dari 674,756 km (57,29 persen) pada 2020 menjadi hanya 38,27 km (3,28 persen) pada 2024. Sementara jalan rusak ringan juga menurun drastis dari 128,308 km (10,89 persen) menjadi 19,593 km (1,68 persen) dalam kurun waktu yang sama.

Penurunan ini mengindikasikan terbatasnya pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jalan, yang mengakibatkan pergeseran signifikan dari kategori jalan baik dan sedang ke kategori rusak berat. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aksesibilitas wilayah, efisiensi logistik, mobilitas penduduk, serta kepuasan layanan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah pedesaan dan kawasan perbatasan antar kecamatan.

2) Kualitas Infrastruktur Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan

Jenis permukaan jalan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas layanan infrastruktur transportasi serta keterjangkauan akses antar kawasan. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2025), sepanjang tahun 2020 hingga 2024, terdapat dinamika yang cukup signifikan dalam komposisi jenis permukaan jalan di wilayah ini, dengan total panjang jalan berkisar antara 1.167,396 km hingga 1.235,17 km.

Tabel 2.73

Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Jenis Permukaan	Tahun									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Rigid	44,211	3,75	46,041	3,91	52,397	4,24	57,356	4,64	72,679	6,23
Aspal	226,271	19,21	229,561	19,49	235,165	19,04	236,25	19,13	226,633	19,41
Klas B	701,449	59,56	786,95	66,82	831,437	67,31	838,906	67,92	543,493	46,56
Tanah	205,839	17,48	115,218	9,78	116,171	9,41	102,658	8,31	324,591	27,80
Jumlah	1177,770	100	1177,770	100	1235,170	100	1235,17	100	1167,396	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Pada tahun 2020, permukaan jalan didominasi oleh kelas agregat atau jalan dengan permukaan jenis Klas B (non-aspal, berkerikil, dan berpasir) sepanjang 701,449 km atau 59,56 persen dari total jaringan jalan. Namun, pada tahun 2024, panjang jalan Klas B mengalami penurunan drastis menjadi hanya 543,493 km (46,56 persen), menandai pergeseran signifikan dalam struktur infrastruktur permukaan jalan. Sebaliknya, jalan dengan permukaan tanah meningkat tajam dari 205,839 km (17,48 persen) pada 2020 menjadi 324,591 km (27,80 persen) pada 2024, yang menunjukkan indikasi regresi kualitas infrastruktur jalan di beberapa wilayah. Lonjakan panjang jalan tanah tersebut dapat menjadi refleksi atas degradasi fisik jalan atau lambatnya proses peningkatan mutu jalan di wilayah perdesaan dan kawasan terluar.

Sementara itu, proporsi jalan dengan permukaan aspal relatif stabil dalam rentang 226-236 km (sekitar 19 persen), meskipun mengalami sedikit fluktuasi tiap tahun. Hal yang menarik adalah peningkatan positif terjadi pada jalan berpermukaan rigid pavement (beton), yang naik dari 44,211 km (3,75 persen) pada 2020 menjadi 72,679 km (6,23 persen) pada 2024. Ini mencerminkan adanya intervensi pembangunan dan peningkatan kualitas jalan strategis yang bersifat permanen dan tahan lama, khususnya di pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan prioritas ekonomi.

Perubahan pola jenis permukaan ini berdampak langsung pada Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, karena masyarakat cenderung menilai ketersediaan dan kenyamanan transportasi dari kualitas fisik jalan. Penurunan panjang jalan beraspal dan Klas B serta peningkatan signifikan jalan tanah mengindikasikan penurunan kualitas pelayanan di beberapa kawasan, terutama di daerah hinterland dan jalur akses produksi.

3) Kualitas Infrastruktur Jembatan Berdasarkan Kondisi

Ketersediaan dan kondisi jembatan memegang peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, kelancaran arus barang dan orang, serta aksesibilitas layanan dasar, khususnya di daerah yang memiliki karakteristik geografis dengan banyak badan air seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2025, total jumlah jembatan yang terdata selama lima tahun terakhir relatif stabil, yakni berkisar antara 482 hingga 525 unit, namun kondisi fungsional jembatan menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.

Tabel 2.74
Jumlah Jembatan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024

Kondisi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	176	181	251	251	255
Sedang	N/A	N/A	77	75	73
Rusak	349	344	28	28	60
Rusak Berat	N/A	N/A	126	128	96
Jumlah	525	525	482	482	484

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Pada tahun 2020, kondisi infrastruktur jembatan masih sangat didominasi oleh jembatan rusak, dengan jumlah mencapai 349 unit dari total 525 atau sekitar 66,48 persen. Sementara jembatan dalam kondisi baik hanya berjumlah 176 unit, dan tidak terdapat jembatan dengan klasifikasi rusak berat maupun sedang pada tahun tersebut. Ini mengindikasikan

keterlambatan rehabilitasi struktural serta backlog pemeliharaan yang besar pada awal periode.

Namun, pada tahun 2022 terjadi pergeseran signifikan dalam klasifikasi kondisi jembatan. Jumlah jembatan dalam kondisi baik melonjak menjadi 251 unit, diikuti oleh peningkatan klasifikasi sedang sebanyak 77 unit, dan pencatatan awal untuk jembatan rusak berat sebanyak 126 unit. Jumlah jembatan dalam kondisi rusak ringan turun drastis menjadi hanya 28 unit, menandakan adanya proses klasifikasi ulang atau intervensi pemeliharaan yang memperjelas kondisi aktual di lapangan.

Hingga tahun 2024, terdapat 255 jembatan (52,69 persen) dalam kondisi baik, sementara jumlah jembatan rusak berat mencapai 96 unit (19,83 persen), dan jembatan rusak sedang sebanyak 73 unit (15,08 persen). Sisa 60 unit (12,40 persen) masih berada dalam kondisi rusak ringan. Walaupun proporsi jembatan dalam kondisi baik mengalami peningkatan yang positif dibandingkan awal periode, akumulasi jembatan dalam kondisi tidak layak (rusak dan rusak berat) masih mencakup lebih dari 32 persen dari total jembatan yang ada.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dari sisi pengelolaan dan rehabilitasi infrastruktur jembatan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menghadapi tantangan besar dalam pemeliharaan preventif, klasifikasi teknis, dan percepatan pembangunan jembatan yang tahan bencana. Ketimpangan antara jembatan fungsional dan jembatan dalam kondisi kritis berisiko menghambat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pelayanan publik terutama di daerah rawan banjir atau akses terluar.

4) Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi Pertanian

Jaringan irigasi pertanian memegang peranan penting dalam mendukung produktivitas lahan pertanian, terutama di wilayah dengan karakteristik rawa dan pasang surut seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keberadaan jaringan irigasi yang layak tidak hanya menjamin ketersediaan air secara merata, tetapi juga menjadi penentu keberlangsungan musim tanam

yang efisien dan terjadwal. Berdasarkan data jaringan irigasi kewenangan kabupaten untuk tahun 2021 hingga 2024, luasan jaringan irigasi pertanian yang tercatat dalam kondisi baik masih terbatas namun menunjukkan konsistensi pada beberapa titik lokasi.

Ketersediaan dan keberfungsian jaringan irigasi pertanian merupakan elemen krusial dalam menunjang produktivitas lahan dan ketahanan pangan daerah. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai wilayah dengan potensi lahan rawa yang luas memiliki 35 daerah irigasi rawa (D.I.R.) yang tersebar di berbagai kecamatan seperti Sadu, Dendang, Geragai, Nipah Panjang, Berbak, Muara Sabak Timur, dan Mendahara. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2025), total luas areal irigasi mencapai sekitar 14.500 ha, namun luas areal fungsional pertanian yang berhasil terairi masih menunjukkan fluktuasi sepanjang tahun.

Tabel 2.75

Jaringan Irigasi Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2024

No.	Daerah Irigasi Rawa	Kecamatan	Luasan (Ha)	Luas Areal Fungsional Pertanian (Ha)			
				2021	2022	2023	2024
1	D.I.R. Air Hitam Laut	Sadu	112	N/A	N/A	N/A	N/A
2	D.I.R. Baku Tuo	Sadu	164	27	27	27	27
3	D.I.R. Dendang I - II	Dendang	200	66	66	66	66
4	D.I.R. Kampung Laut	Kuala Jambi	400	N/A	N/A	N/A	N/A
5	D.I.R. Lagan Hulu	Geragai	319	N/A	N/A	N/A	N/A
6	D.I.R. Lagan Simpang Pandan	Geragai	500	165	165	165	165
7	D.I.R. Lambur I - II	Muara Sabak Timur	220	466	477	477	477
8	D.I.R. Lambur Luar	Muara Sabak Timur	800	405	405	450	450
9	D.I.R. Marga Mulya	Rantau Rasau	950	93	93	93	93
10	D.I.R. Mendahara Hulu	Mendahara Ulu	200	N/A	N/A	N/A	N/A
11	D.I.R. Mendahara Ilir	Mendahara	500	N/A	N/A	N/A	N/A
12	D.I.R. Muara Sabak	Muara Sabak Timur	240	N/A	N/A	N/A	N/A
13	D.I.R. Pamusiran	Nipah Panjang	85	142	142	142	142
14	D.I.R. Pamusiran Luar	Nipah Panjang	400	492	597	680	680
15	D.I.R. Pangkal Duri	Mendahara	175	N/A	N/A	N/A	N/A
16	D.I.R. Penganyut	Berbak	700	25	25	25	25
17	D.I.R. Rantau Rasau Desa	Berbak	320	135	224	260	260
18	D.I.R. Sei. Cemara	Sadu	50	N/A	N/A	N/A	N/A
19	D.I.R. Sei. Itik / Sei. Lokan	Sadu	330	N/A	N/A	N/A	N/A

No.	Daerah Irigasi Rawa	Kecamatan	Luasan (Ha)	Luas Areal Fungsional Pertanian (Ha)			
				2021	2022	2023	2024
20	D.I.R. Sei. Jambat	Sadu	550	78	78	78	78
21	D.I.R. Sei. Palas	Berbak	920	66	66	66	115
22	D.I.R. Sei. Raya Dalam	Nipah Panjang	950	48	48	80	80
23	D.I.R. Sei. Sayang	Sadu	125	167	167	167	167
24	D.I.R. Siau Dalam	Muara Sabak Timur	600	N/A	N/A	N/A	N/A
25	D.I.R. Siau I - II	Muara Sabak Timur	550	119	119	119	119
26	D.I.R. Simbur Naik	Muara Sabak Timur	900	334	334	400	400
27	D.I.R. Simpang Jelita / Pulau Burung	Nipah Panjang	444	42	42	42	42
28	D.I.R. Simpang Kacang	Sadu	300	N/A	N/A	N/A	N/A
29	D.I.R. Telago Limo	Berbak	640	300	300	300	550
30	D.I.R. Teluk Kijing	Nipah Panjang	225	N/A	N/A	N/A	N/A
31	D.I.R. Teluk Dawan	Muara Sabak Barat	151,92	N/A	N/A	N/A	80
32	D.I.R. Karya Bakti	Rantau Rasau	469,90	N/A	N/A	N/A	N/A
33	D.I.R. Sungai Rambut	Berbak	219,32	N/A	N/A	N/A	N/A
34	D.I.R. Rawasari	Berbak	754,09	N/A	N/A	N/A	N/A
35	D.I.R. Singkep	Muara Sabak Barat	31,00	N/A	N/A	N/A	N/A
Total			14.500	3.170	3.375	3.170	3.375
Persentase			50.	51,55	54,89	51,55	54,89

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Pada tahun 2021, total luas areal pertanian fungsional yang terairi tercatat sebesar 3.170 ha, atau baru mencakup sekitar 51,55 persen dari potensi jaringan yang tersedia. Nilai ini menunjukkan keterbatasan optimalisasi fungsi irigasi yang disebabkan oleh berbagai kendala teknis, seperti kerusakan infrastruktur saluran, sedimentasi, dan belum meratanya sistem pemeliharaan daerah irigasi.

Seiring waktu, terjadi peningkatan signifikan luasan areal fungsional menjadi 4.016 ha pada tahun 2024, dengan cakupan pemanfaatan irigasi mencapai 57,64 persen. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja dan efisiensi pemanfaatan jaringan irigasi, khususnya pada daerah irigasi dengan dukungan teknis dan kelembagaan petani yang relatif baik, seperti D.I.R. Lambur I-II, D.I.R. Pamusiran Luar, D.I.R. Simbur Naik, serta D.I.R. Telago Limo.

Namun demikian, capaian ini masih menyisakan sekitar 42 persen jaringan irigasi yang belum termanfaatkan secara optimal, baik karena faktor

teknis, sosial, maupun kelembagaan. Beberapa D.I.R., seperti Kampung Laut, Mendahara Hulu, Muara Sabak, dan Sei. Lokan, masih menunjukkan nihilnya pemanfaatan lahan irigasi hingga tahun 2024.

Secara umum, peningkatan luas areal irigasi yang berfungsi menunjukkan arah positif dalam mendukung pembangunan sektor pertanian berkelanjutan di Tanjung Jabung Timur. Namun capaian ini harus diakselerasi melalui kebijakan berbasis data dan perencanaan spasial agar jaringan irigasi dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani lokal.

5) Ketersediaan Air Minum Aman dan Layak

Air minum “layak” merujuk pada sumber air yang berasal dari sarana yang secara teknis mampu menyediakan air dengan kualitas dan kuantitas memadai, seperti sambungan rumah, sumur bor, atau hidran umum, tetapi belum tentu memenuhi seluruh aspek kualitas air yang aman untuk dikonsumsi langsung tanpa perlakuan tambahan. Sementara itu, air minum “aman” mengacu pada kualitas air yang telah memenuhi standar baku mutu kesehatan secara kimia, fisik, dan mikrobiologis, sehingga aman dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, seluruh air minum yang aman pasti tergolong layak, namun tidak seluruh air minum layak dapat dikategorikan aman.

Tabel 2.76

Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman dan Layak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Akses Air Minum Aman	N/A	N/A	N/A	N/A
Akses Air Minum Layak	38,67	40,34	42,07	40,18

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021–2024, terlihat bahwa indikator

akses air minum aman belum tersedia (N/A) dalam keempat tahun tersebut. Ketidadaan data ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam sistem pemantauan kualitas air minum, khususnya dari sisi pengujian secara laboratorium untuk memastikan parameter keamanan air yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini menjadi catatan penting bagi perencanaan pembangunan daerah, karena tanpa data mengenai air minum yang aman, pemerintah daerah kesulitan dalam mengukur capaian kualitas hidup masyarakat secara komprehensif.

Di sisi lain, tren akses rumah tangga terhadap air minum layak menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2021, proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak berada pada angka 38,67 persen. Angka ini meningkat menjadi 40,34 persen pada 2022, dan naik lagi menjadi 42,07 persen pada 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 40,18 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan kinerja pelayanan air minum yang layak, baik dari sisi infrastruktur, manajemen distribusi, maupun aspek keberlanjutan sumber air.

Sebagai data pembanding, di bawah ini dijelaskan akses air minum yang telah didata oleh BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai data pembanding dalam melihat kondisi pelayanan air minum antar kecamatan. Meskipun data BPS yang tersedia tahun 2024, data ini cukup relevan untuk menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam melihat jumlah pelanggan dan penyaluran air ke setiap kecamatan.

Tabel 2.77

Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan	Nilai (Rp)
Mendahara	N/A	N/A	N/A
Mendahara Ulu	248	16.267	58.679.500
Geragai	143	25.215	64.222.500
Muara Sabak Barat	192	1.996	20.623.500
Muara Sabak Timur	337	53.022	141.839.500
Kuala Jambi	N/A	N/A	N/A

Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan	Nilai (Rp)
Dendang	1.956	240.278	661.622.750
Rantau Rasau	1.952	306.464	828.075.750
Berbak	N/A	N/A	N/A
Nipah Panjang	685	51.922	180.275.750
Sadu	655	82.428	241.560.000
Total	6.168	777.592	2.196.899.250

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024, jumlah pelanggan air bersih tercatat sebanyak 6.168 pelanggan dengan total volume air yang disalurkan mencapai 777.592 meter kubik. Nilai pendapatan yang diperoleh dari pendistribusian air bersih ini mencapai Rp 2.196.899.250.

Distribusi pelanggan dan volume air yang disalurkan menunjukkan variasi antar kecamatan. Kecamatan Rantau Rasau menjadi kecamatan dengan volume penyaluran air tertinggi, yaitu sebanyak 306.464 meter kubik dengan jumlah pelanggan mencapai 1.952 pelanggan. Kecamatan ini menyumbang nilai terbesar kedua, yaitu Rp 828.075.750. Selanjutnya, Kecamatan Dendang tercatat sebagai kecamatan dengan penyaluran air terbesar kedua, yaitu sebanyak 240.278 meter kubik, melayani sebanyak 1.956 pelanggan dengan total nilai pendapatan mencapai Rp 661.622.750.

Kecamatan lainnya yang mencatatkan volume penyaluran air cukup signifikan adalah Kecamatan Sadu dengan total volume air yang disalurkan sebanyak 82.428 meter kubik kepada 655 pelanggan, menghasilkan pendapatan Rp 241.560.000. Kecamatan Muara Sabak Timur memiliki jumlah pelanggan sebanyak 337 dengan penyaluran air sebanyak 53.022 meter kubik, menghasilkan nilai pendapatan sebesar Rp 141.839.500. Diikuti oleh Kecamatan Nipah Panjang yang menyalurkan air sebanyak 51.922 meter kubik kepada 685 pelanggan, dengan nilai pendapatan Rp 180.275.750.

Di sisi lain, beberapa kecamatan memiliki angka penyaluran air yang lebih rendah, antara lain Kecamatan Geragai dengan volume air sebanyak 25.215 meter kubik kepada 143 pelanggan dan nilai pendapatan Rp

64.222.500, Kecamatan Mendahara Ulu dengan 16.267 meter kubik air yang disalurkan kepada 248 pelanggan serta pendapatan sebesar Rp 58.679.500, serta Kecamatan Muara Sabak Barat yang mencatatkan angka terendah dengan penyaluran air hanya sebanyak 1.996 meter kubik kepada 192 pelanggan, dengan pendapatan Rp 20.623.500.

Data ini menunjukkan bahwa terdapat disparitas yang signifikan dalam penyediaan air bersih antar kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan konsentrasi penggunaan air tertinggi berada di Kecamatan Rantau Rasau dan Dendang. Kondisi ini merefleksikan perlunya peningkatan infrastruktur air bersih serta strategi distribusi yang lebih merata, khususnya di kecamatan-kecamatan dengan tingkat penyaluran air rendah.

b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang melalui berbagai intervensi strategis, termasuk penanganan kawasan permukiman kumuh, penyediaan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin, dan pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pada lingkungan permukiman. Indikator-indikator ini menjadi parameter penting dalam menilai tingkat kelayakan hunian serta kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan dan pengurangan ketimpangan wilayah.

Tabel 2.78

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Permukiman Kumuh (Ha)	132,52	127,06	125,86	94	N/A
Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Memperoleh Rumah Layak Huni	272	60	259	287	225
Persentase luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani	4,12	0,94	4,12	4,76	3,92
Jumlah Permukiman yang sudah Dilengkapi PSU	0	0	1 unit	N/A	1 unit

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Data menunjukkan bahwa selama periode 2020 hingga 2023, terdapat penurunan signifikan luas kawasan permukiman kumuh dari 132,52 hektar pada tahun 2020 menjadi 94 hektar pada tahun 2023, sebelum tidak tersedia data pada tahun 2024. Persentase kawasan kumuh dengan luasan 10-15 hektar yang berhasil ditangani juga meningkat dari 0,94 persen di tahun 2021 menjadi 4,76 persen di tahun 2023, meskipun kembali sedikit menurun menjadi 3,92 persen di tahun 2024. Sementara itu, jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh rumah layak huni mengalami fluktuasi, tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 287 rumah tangga, kemudian menurun menjadi 225 rumah tangga di tahun 2024.

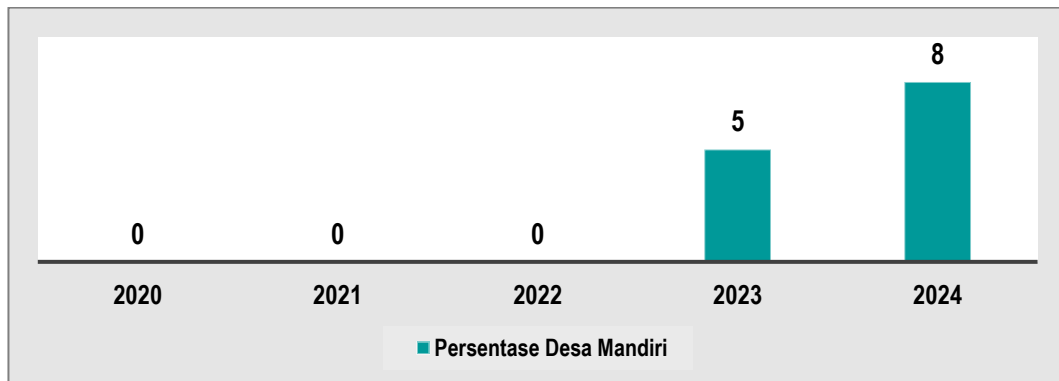
Sejauh ini, penyediaan PSU di lingkungan permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam lima tahun terakhir masih sangat terbatas. Permukiman yang telah dilengkapi PSU terdapat sebanyak 2 unit perumahan dari total 5 unit perumahan. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan perumahan yang lebih terarah, peningkatan integrasi lintas sektor, serta penyediaan anggaran yang memadai untuk memastikan setiap rumah tangga dapat mengakses hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan.

c. Persentase Desa Mandiri

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran sentral dalam pembangunan Indonesia. Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan dan anggaran kepada desa untuk mengelola potensi lokal, memperkuat pemerintahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah meningkatnya jumlah desa mandiri, yaitu desa yang memiliki kapasitas kuat dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi serta mampu mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri. Namun, hingga kini, persentase desa mandiri di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan desa. Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur persentase desa mandiri secara umum dari tahun 2020 hingga

tahun 2024 telah menunjukkan adanya peningkatan, meskipun masih belum optimal.

Gambar 2.45
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2024

Pada kategori Desa Mandiri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur persentase jumlahnya dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan sudah adanya peningkatan, meskipun belum signifikan. Pada tahun 2020 sebesar 0%, 2021 (0%), 2022 (0%), kemudian naik menjadi 5% di tahun 2023 dan naik menjadi sebesar (8%) di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berupaya melakukan pembangunan desa mandiri dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir. Kemajuan pembangunan positif ini perlu adanya intervensi lebih lanjut, baik dalam bentuk pendampingan kelembagaan, penguatan kapasitas SDM aparatur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, hingga percepatan digitalisasi pelayanan publik di desa.

7. Stabilitas Ekonomi Makro

a. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak adalah suatu alat untuk menilai hasil penerimaan pajak di suatu negara. Namun, dalam beragam sumber, rasio pajak bukanlah satu-satunya indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pajak. Meski begitu, sampai sekarang rasio pajak tetap menjadi ukuran yang dianggap

memberikan wawasan menyeluruh mengenai situasi perpajakan di suatu negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Beberapa faktor yang dapat memengaruhi rasio pajak, antara lain tingkat kepatuhan pajak, efektivitas administrasi perpajakan, dan potensi ekonomi informal (shadow economy). Adapun rasio pajak daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.79

Rasio Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024

Rasio Pajak Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	0,00088	0,00075	0,00089	0,00080
Provinsi Jambi	0,13	0,15	0,15	0,16	0,17
Nasional	1,16	1,17	1,22	1,14	1,13

Sumber: BPS, 2025

Rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama lima tahun terakhir, menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2020 sebesar (1) kemudian turun menjadi (0,00088) di tahun 2021 kemudian turun di tahun 2022 menjadi (0,00075) kemudian naik lagi di tahun 2023 menjadi (0,00089) kemudian turun lagi di tahun 2024 menjadi (0,00080). Penurunan yang signifikan di tahun 2020 ke tahun-tahun berikutnya, kemungkinan besar disebabkan oleh perbaikan dalam mekanisme pemungutan pajak, perluasan basis pajak, peningkatan kesadaran wajib pajak, atau digitalisasi sistem pajak daerah. Hal ini merupakan sinyal positif bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai mengarahkan kebijakan fiskal untuk lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Rasio pajak daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2020-2024 apabila dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan Nasional masih di bawah rata-rata. Ketimpangan rasio pajak daerah terhadap provinsi dan nasional mengindikasikan bahwa potensi ekonomi daerah tidak sepenuhnya

digunakan sebagai sumber penerimaan pajak. Sebagian besar kegiatan ekonomi, terutama di sektor informal seperti pertanian, perdagangan kecil dan perusahaan mikro, tidak terserap secara optimal dalam sistem pajak daerah. Hal ini merupakan bentuk tantangan struktural dalam memperluas standar penilaian pajak, yang mengindikasikan perbaikan manajemen pajak dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kewajiban perpajakan.

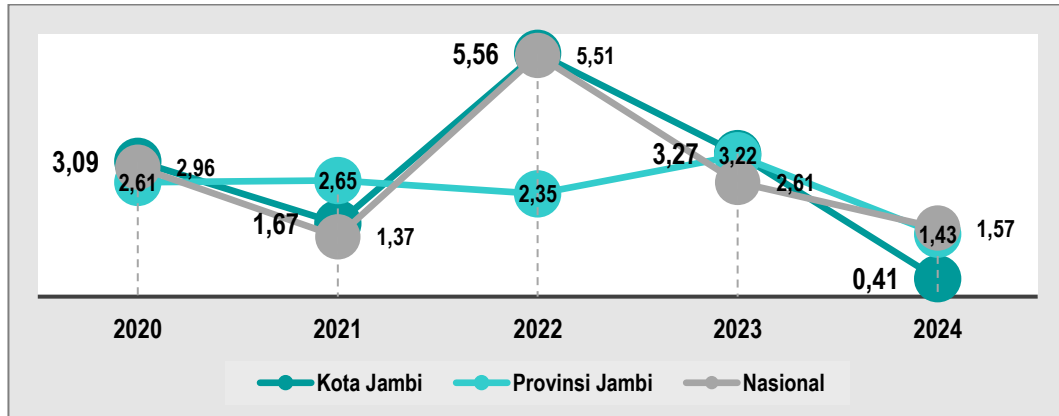
b. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah keadaan di mana terjadi peningkatan harga-harga barang dan layanan secara umum mengalami peningkatan dalam suatu ekonomi dalam periode waktu tertentu. Waktu yang ditentukan. Kenaikan harga-harga tersebut dapat mengakibatkan penurunan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa, meningkatnya biaya hidup, serta menyebabkan pengaruh terhadap kestabilan ekonomi wilayah. Pengukuran tingkat inflasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan harga barang dan jasa dalam suatu waktu tertentu. Dilaksanakan dengan cara membandingkan indeks harga pada waktu tertentu, dengan harga yang terdapat pada periode sebelumnya.

Oleh sebab itu, pemahaman mendalam tentang inflasi sangat penting untuk merumuskan strategi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Tingkat inflasi suatu daerah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui survei daerah namun, secara umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak menjadi daerah yang disurvei untuk melakukan penilaian terhadap tingkatan inflasi oleh sebab itu, tingkat Inflasi Kota Jambi dijadikan sebagai acuan inflasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun tingkat inflasi di Kota Jambi, Provinsi Jambi serta perbandingannya dengan nasional dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2.46

Perbandingan Inflasi Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Tingkat inflasi di Kota Jambi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sebesar 3,09 kemudian turun di tahun 2021 menjadi hanya 1,67 kemudian naik di tahun 2022 lalu turun kembali di tahun 2023 dan tahun 2024. Fluktuasi ini sejalan dengan tingkat inflasi Provinsi Jambi dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 tingkat inflasi sebesar 2,61 kemudian naik menjadi 2,65 di tahun 2021 kemudian turun menjadi 2,35 di tahun 2022 lalu naik menjadi 3,22 di tahun 2023 dan turun kembali di tahun 2024 menjadi 1,43. Hal serupa juga dialami ditingkat nasional dimana laju inflasi Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami fluktuasi.

Tingkat inflasi pada tahun 2020 mencapai 2,96 kemudian turun menjadi 1,37 di tahun 2021 lalu mencapai puncaknya pada tahun 2022 hingga mencapai 5,51, angka ini berbanding terbalik dengan Provinsi Jambi yang justru menurun di tahun 2022. Pada tahun 2023 tingkat inflasi menurun 2,61 namun berbanding terbalik dengan Provinsi Jambi yang mencapai puncaknya di tahun 2023, dimana tingkat inflasi sebesar 3,22. Pada tahun 2024 tingkat inflasi di Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Nasional sama-sama menurun dengan angka Kota Jambi sebesar 0,41, Provinsi Jambi sebesar 1,43 dan Nasional sebesar 1,57. Fluktuasi angka inflasi di Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Nasional

ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti a) meningkatnya permintaan b) biaya produksi dan c) jumlah uang yang beredar.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan publik langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik diukur dari indeks kepuasan layanan dan tata kelola pemerintah yang diperoleh dari survei yang dilakukan secara rutin oleh beberapa organisasi perangkat daerah yang langsung berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Tabel 2.80
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
IKM Pelayanan Perizinan	88,83	88,47	89,57	N/A	92,06
IKM Pelayanan Kependudukan	92	98,10	98,20	98,30	98,40
IKM Pelayanan Komunikasi dan Informatika	N/A	N/A	81,03	N/A	N/A
IKM Pelayanan Pendidikan	82,25	83,02	83,05	N/A	N/A
IKM Pelayanan Kesehatan	89,23	97,72	93,39	91,97	91,14
IKM Pelayanan Perpustakaan	88,31	88,35	88,43	N/A	N/A

Sumber: LKPI, 2024 (Diolah)

Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap berbagai layanan pemerintah dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan gambaran umum yang positif dengan catatan adanya variasi pada beberapa jenis layanan. Layanan perizinan secara umum menunjukkan tren peningkatan kepuasan, dari 88,83 pada 2020 dan mengalami sedikit penurunan pada 2021, namun kondisi ini masih perlu ditingkatkan tidak hanya pada keenam OPD tersebut, tetapi pada semua OPD yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan terbaik oleh pemerintah bagi masyarakat sehingga dapat meminimalisir berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan di berbagai sektor pelayanan. Secara umum, hampir semua jenis pelayanan mengalami peningkatan kualitas yang signifikan, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Pelayanan perizinan, misalnya, menunjukkan tren kenaikan yang stabil dari nilai 85,08 pada tahun 2018 menjadi 89,57 pada tahun 2022, menandakan proses perizinan yang semakin efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan kependudukan bahkan mengalami lonjakan yang sangat signifikan, dari 85 pada 2018 menjadi 98,20 pada 2022, yang menunjukkan kemudahan akses dan kepuasan tinggi masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan di kabupaten ini.

Selain itu, sektor pelayanan lain juga menunjukkan perkembangan positif meskipun dengan variasi tertentu. Pelayanan komunikasi dan informatika baru tercatat pada tahun 2022 dengan nilai IKM sebesar 81,03, menandakan adanya perhatian baru dan peningkatan kualitas layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pelayanan pendidikan yang mulai tercatat sejak 2019 juga menunjukkan peningkatan yang stabil dari 82,21 menjadi 83,05 pada 2022, meskipun pertumbuhannya relatif lambat dibandingkan sektor lain. Pelayanan kesehatan mengalami fluktuasi, dengan nilai IKM sempat turun pada 2019 (80,74) namun kemudian melonjak tajam hingga mencapai 97,72 pada 2021 sebelum sedikit menurun menjadi 93,39 pada 2022, tetap menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dari masyarakat. Pelayanan perpustakaan juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 81,16 pada 2018 menjadi 88,43 pada 2022, menandakan peningkatan kualitas layanan informasi dan literasi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan sebuah komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas

pelayanan publik yang berdampak positif pada kepuasan masyarakat secara menyeluruh.

Selanjutnya selain indeks kepuasan masyarakat dilakukan pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintah (Tabel 2.82) yang merupakan alat ukur yang penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya. Indeks ini mengakomodasi berbagai aspek pemerintahan, mulai dari inovasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), hingga pelayanan publik. Data yang dihadirkan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020 hingga 2024 memperlihatkan perkembangan capaian di ketiga indikator utama tersebut. Meski data tahun belum tersedia, pengukuran data dari tahun 2021 hingga 2024 sudah dapat memberikan gambaran tren dan dinamika tata kelola pemerintahan di daerah tersebut.

Tabel 2.81

Indeks Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	N/A	44,76	44,39	49,17	46,10
Indeks SPBE	N/A	1,16	2,16	2,81	2,83
Indeks Pelayanan Publik	N/A	3,32	3,31	3,37	N/A

Sumber: Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Indeks Inovasi Daerah merefleksikan secara komprehensif tentang alat atau metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi dan kemampuan inovasi suatu daerah atau wilayah yang mencakup aspek inovasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada, upaya inovasi, investasi riset dan pengembangan, kolaborasi industri-akademisi, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Indeks Inovasi Daerah mulai tercatat pada tahun 2021 dengan nilai 44,76. Setelah itu terjadi sedikit penurunan ke angka 44,39 pada tahun 2022, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada 2023 menjadi 49,17, dan kembali turun ke 46,10

pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya mendorong inovasi di tingkat pemerintah daerah, masih terjadi fluktuasi yang dapat mengindikasikan berbagai hambatan dan tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya dan pelaksanaan kebijakan inovasi yang belum optimal.

Selanjutnya, indeks SPBE yang mengukur stabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintah daerah yang meliputi stabilitas, efektivitas, akuntabilitas, kinerja dan transparansi. Indeks ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kualitas tata kelola suatu negara atau wilayah, serta membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan atau reformasi diperlukan sehingga lebih mudah dilaksanakan. Indeks SPBE memperlihatkan tren yang positif dengan peningkatan nilai yang konsisten sejak tahun 2021 (1,16) hingga tahun 2023 (2,81) dan stabil di 2,83 pada tahun 2024. Hal ini menandakan kemajuan signifikan dalam penerapan teknologi informasi dan digitalisasi proses pemerintahan. Peningkatan indeks SPBE ini juga menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas layanan pemerintahan elektronik, yang esensial dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan. Dengan kata lain indeks SPBE di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih cukup baik, sehingga sangat perlu untuk dilakukan pengembangan, peningkatan dan perbaikan menjadi lebih baik.

Demikian juga pada indeks pelayanan publik yang merupakan indeks yang mengukur kualitas dan efisiensi layanan publik yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga publik lainnya kepada masyarakat. Indeks ini biasanya mencakup beberapa aspek, seperti ketersediaan layanan, kecepatan pelayanan, responsivitas, aksesibilitas, keadilan, dan kepuasan pengguna. Pengukuran indeks pelayanan publik dapat membantu pemerintah atau lembaga publik dalam mengevaluasi kinerja mereka dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta mendeteksi area-area yang perlu diperbaiki. Indeks pelayanan publik ini bisa menjadi alat untuk meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik. Data menunjukkan bahwa indeks pelayanan publik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan tren positif dengan nilai 3,37 pada tahun 2023 dan masih di bawah indeks pelayanan publik nasional. Kondisi ini menunjukkan masih belum maksimalnya pelayanan publik yang ada sehingga perlu ditingkatkan kembali. Dapat dilihat pula nilai Indeks Pelayanan Publik relatif stabil selama periode 2021 hingga 2023, yaitu dari 3,32 pada 2021, sedikit menurun ke 3,31 pada 2022, dan naik kembali ke 3,37 pada 2023. Stabilitas ini mencerminkan adanya konsistensi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, meskipun perlu ada peningkatan berkelanjutan agar pelayanan publik semakin responsif, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Data 2024 untuk Indeks Pelayanan Publik belum tersedia sehingga tidak bisa dianalisis lebih lanjut.

Secara keseluruhan, indeks tata kelola Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan kemajuan, khususnya dalam hal penerapan teknologi pemerintahan berbasis elektronik. Namun, indeks inovasi dan pelayanan publik masih menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal kesinambungan inovasi dan peningkatan kualitas layanan. Data ini menjadi pijakan strategis bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah perbaikan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan secara holistik, dengan fokus pada peningkatan kapasitas inovasi, optimalisasi digitalisasi, dan peningkatan mutu pelayanan publik demi tercapainya pemerintahan yang efektif dan efisien.

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Dalam rangka menjalankan proses bisnis utama penyelenggaraan pemerintahan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan, maka roda manajemen harus digerakkan oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Terdapat 10 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum,

transparansi, kesetaraan, data tanggap kepala pemangku kepentingan, berorientasi pada visi, akuntabilitas, pengawasan, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalisme. Pada konteks Indonesia, tata kelola pemerintahan yang baik diukur melalui indikator kinerja makro yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja Nilai SAKIP, Opini BPK dan Indeks Persepsi Anti Korupsi; birokrasi yang kapabel dengan indikator kinerja Indeks Kelembagaan, Indeks SPBE dan Indeks Profesionalitas ASN; serta pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja indeks pelayanan publik. Capaian kinerja tata kelola Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2,82.

Tabel 2.82
Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	C	C	CC
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai AKIP	CC	CC	B	B	B
Nilai LPPD		2,55	2,7044	2,666	N/A
Indeks Perencanaan	N/A	N/A	Baik	Baik	Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	A
Indeks Demokrasi	75,53	72,91	71,19	72,95	75,50
Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	33,85	55,35	86,46

Sumber: Data Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Jika dianalisis dari tabel di atas, indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Tahun 2020-2022 stagnan pada Kategori C dengan predikat Kurang. Hal tersebut adalah isyarat peringatan tentang tantangan serius yang dihadapi sebuah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Untuk mencapai perubahan positif, diperlukan komitmen tinggi dari pemimpin daerah, perbaikan kapasitas SDM aparatur, dan keterlibatan aktif masyarakat. Tanpa tindakan segera dan berkelanjutan, daerah tersebut dapat terperangkap dalam siklus reformasi yang lambat atau bahkan mundur. Selain

itu, kinerja akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga masih jauh dari kata ideal. Hal tersebut terlihat dari capaian nilai AKIP yang masih mendapatkan CC pada tahun 2020-2021 dan nilai B pada tahun 2022. Tentu kenaikan nilai ini perlu diapresiasi, namun nilai tersebut masih jauh dari kondisi ideal akuntabilitas kinerja pemerintahan yang dapat digambarkan dengan nilai AA.

Sementara, akuntabilitas keuangan Pemerintah Tanjung Jabung Timur sudah baik apabila dilihat dari Opini BPK dengan capaian kinerja WTP dari tahun 2020-2024. Hal tersebut dapat menjadi modal penting bagi Pemerintah Tanjung Jabung Timur untuk senantiasa menghindari fraud dalam setiap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pelayanan publik Pemerintah Tanjung Jabung Timur juga dapat dikatakan sebagai kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Tanjung Jabung Timur dengan predikat A pada tahun 2020-2024.

Di sisi lain, terdapat dua hal yang perlu ditingkatkan lagi oleh Pemerintah Tanjung Jabung Timur. Pertama, kondisi demokrasi di Tanjung Jabung Timur terus mengalami penurunan dari tahun 2020-2022. Hal tersebut menjadi ancaman terhadap kehidupan berdemokrasi dan berbangsa masyarakat Tanjung Jabung Timur. Namun di tahun 2023 dan 2024, nilai indeks demokrasi kembali meningkat. Selain itu, reformasi hukum di Tanjung Jabung Timur masih sangat rendah. Hal tersebut terlihat pada capaian Indeks Reformasi Hukum di Tanjung Jabung Timur masih sebesar 33,85 dengan predikat kurang.

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Salah satu aspek sosial yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kondisi masyarakat yang tentram, tertib dan merasa terlindungi. Hal tersebut dapat mendorong suatu daerah menjadi kota/kabupaten yang layak huni yang menggambarkan lingkungan

dan suasana kota/kabupaten yang nyaman sebagai tempat tinggal dan nyaman untuk beraktivitas berdasarkan berbagai faktor fisik dan non-fisik (Wheeler, 2004). Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan faktor non-fisik yang memengaruhi suatu daerah dapat dikatakan layak huni. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari angka kriminalitas.

Tabel 2.83
Angka Kriminalitas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Jenis Kriminal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Narkoba	35	46	56	N/A	N/A
Jumlah Kasus Pembunuhan	0	1	0	N/A	N/A
Jumlah Kejahatan Seksual	0	1	0	N/A	N/A
Jumlah Kasus Penganiayaan	7	5	8	N/A	N/A
Jumlah Kasus Pencurian	13	18	17	N/A	N/A
Jumlah Kasus Penipuan	2	1	3	N/A	N/A
Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	1	0	N/A	N/A
Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	107	87	140	N/A	N/A
Jumlah Penduduk	229,813	231,772	234,164	236,727	238,975
Angka Kriminalitas (8)/(9)	0.05%	0.04%	0.06%	N/A	N/A

Sumber: Data LPPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Data angka kriminalitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang variatif pada berbagai jenis tindak kejahatan. Kasus narkoba mencatat peningkatan signifikan dari 35 kasus pada tahun 2020 menjadi 56 kasus pada tahun 2022, menunjukkan perlunya perhatian khusus pada penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Kasus pembunuhan dan kejahatan seksual relatif rendah dan fluktuatif dengan angka 0-1 kasus dalam kurun waktu tersebut, menandakan insiden yang masih dapat dikendalikan namun tetap memerlukan pengawasan ketat. Kejahatan penganiayaan dan pencurian memperlihatkan pola yang berubah ubah, dengan jumlah penganiayaan naik turun antara 5 hingga 8 kasus, sementara pencurian meningkat dari 13 kasus pada 2020 menjadi 18 kasus pada 2021 dan sedikit menurun ke 17 kasus pada

2022. Kasus penipuan dan pemalsuan uang terpantau dalam jumlah kecil dan juga berfluktuasi, memperlihatkan bahwa jenis kejahatan ini tidak dominan namun tetap ada potensi risiko yang harus diantisipasi.

Secara keseluruhan, jumlah tindak kriminal per tahun mengalami variasi signifikan dari 107 kasus pada 2020, turun menjadi 87 kasus pada 2021, dan kemudian melonjak tajam menjadi 140 kasus pada 2022. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk yang meningkat secara bertahap dari sekitar 229.813 jiwa pada 2020 menjadi 234.164 jiwa pada 2022, maka angka kriminalitas secara proporsional (rasio kasus terhadap jumlah penduduk) pun mengalami perubahan dari 0,05 persen pada 2020 menjadi 0,06 persen pada 2022. Hal ini mengindikasikan adanya tren peningkatan risiko kriminalitas di masyarakat meskipun secara absolut dalam jumlah kasus terdapat fluktuasi. Oleh karena itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kejahatan melalui strategi yang terfokus pada isu narkoba, penguatan pengawasan keamanan lingkungan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk merespons berbagai bentuk tindak kejahatan agar kondisi keamanan masyarakat dapat terjaga secara optimal dan berkelanjutan. Namun, berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas terdapat beberapa kekurangan yakni belum dihitungnya angka kriminalitas di tahun 2023 dan 2024.

Di sisi lain, penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelesaian pelanggaran terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan dan perlindungan warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, upaya pemerintah daerah dalam menegakkan Perda dan mengelola pelanggaran K3 menunjukkan konsistensi yang tinggi sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja dan masyarakat yang aman, sehat, serta tertib sesuai dengan regulasi yang berlaku. Data yang tersedia menjadi cerminan nyata efektivitas pelaksanaan kebijakan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada.

Tabel 2.84
Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100	100	100	100	100
Persentase Penegakan Perda	100	100	100	100	100

Sumber: Data Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Berdasarkan data persentase penegakan Perda dan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa kedua indikator tersebut mencapai angka 100 persen secara konsisten setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat teguh dan efektif dalam menegakkan peraturan daerah serta sangat responsif dalam menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi dalam ranah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang mencapai 100 persen menandakan tidak adanya kasus yang dibiarkan tanpa tindakan penyelesaian, mencerminkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat serta koordinasi yang baik antar instansi terkait. Demikian pula, Persentase Penegakan Perda yang selalu penuh mengindikasikan bahwa seluruh aturan daerah yang berlaku telah diimplementasikan dengan sungguh-sungguh, tanpa adanya pelanggaran yang merugikan upaya menciptakan lingkungan hidup dan kerja yang kondusif. Konsistensi angka sempurna ini sangat menggembirakan karena menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga disiplin hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam aspek perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, untuk mempertahankan dan memperkuat hasil ini, perlu dilakukan evaluasi berkala dan peningkatan kesadaran masyarakat agar penerapan Perda dan pelaksanaan K3 tidak hanya menjadi kewajiban formal tetapi juga pemahaman dan budaya yang mendarah daging di masyarakat.

Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada kurun waktu 2020 hingga 2024, pemerintah daerah berfokus pada peningkatan kapasitas dan efektivitas unsur-unsur pelaksana perlindungan masyarakat yang meliputi Polisi Pamong Praja, Linmas (Perlindungan Masyarakat), serta infrastruktur pendukung seperti Pos Siskamling dan manajemen kebakaran pada wilayah layanan yang telah ditetapkan. Data kinerja ini menjadi indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan publik khususnya di bidang perlindungan masyarakat yang berkaitan langsung dengan keamanan warga dan ketahanan sosial.

Tabel 2.85

Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	4,8	4,7	4,7	N/A	N/A
Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	20,2	20,1	19,9	10,2	4,2
Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa / Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit

Sumber: Data Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Kinerja pelayanan umum perlindungan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya stabilitas sekaligus beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk mengalami penurunan minor dari 4,8 pada tahun 2020 menjadi 4,7 pada tahun 2021 dan 2022, yang meskipun relatif kecil, menandakan pentingnya menjaga konsistensi jumlah personel guna memastikan penegakan peraturan daerah berjalan efektif dan menjaga ketertiban masyarakat. Hal serupa juga terjadi pada jumlah Linmas yang menurun dari 20,2 pada tahun 2020 menjadi 20,1 per 10.000 penduduk

pada tahun 2021. Pada tahun berikutnya angka ini terus menurun menjadi 19,9 di tahun 2022, 10,2 pada tahun 2023, dan 4,2 di tahun 2024. dimana Linmas berperan sebagai ujung tombak keamanan lingkungan sehingga penurunan ini perlu diantisipasi agar kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di sektor ini tetap optimal untuk perlindungan dan pengamanan masyarakat. Data terkait rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan tidak tersedia, yang mengindikasikan perlunya pengumpulan dan evaluasi data lebih lanjut sebagai bagian dari peningkatan keamanan berbasis komunitas, mengingat Pos Siskamling merupakan elemen krusial dalam pencegahan tindak kejahatan secara lokal. Namun, capaian positif dapat dilihat pada tingkat waktu tanggap (*response time*) manajemen kebakaran yang tetap stabil di angka 15 menit sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024, mencerminkan kesiapsiagaan dan efektivitas layanan dalam menangani insiden kebakaran yang sangat vital untuk keselamatan masyarakat. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun ada kestabilan pada beberapa aspek pelayanan, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas personel perlinmas dan Polisi Pamong Praja serta memperbaiki sistem pendataan dan pemanfaatan Pos Siskamling guna meningkatkan keamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat secara menyeluruh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks daya saing daerah merupakan ukuran komprehensif yang mencerminkan potensi dan kapabilitas suatu wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Indeks ini memperhitungkan berbagai dimensi penting, seperti lingkungan pendukung, sumber daya manusia (SDM), pasar, dan ekosistem inovasi yang secara kolektif berkontribusi pada skor total yang disebut IDSD (Indeks Daya Saing Daerah). Analisis terhadap indeks ini menjadi sangat penting untuk mengevaluasi posisi dan performa suatu kabupaten atau provinsi terhadap standar nasional serta pembandingan antarprovinsi.

Tabel 2.86

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	P.9	P.10	P.11	P.12	
Nasional	4,3	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	4,36	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
Provinsi Jambi	4,36	2,38	3,45	3,16	3,85	3,74	1,81	3,78	2,22	4,38	5,25	2,53	3,25
Kab. Tanjung Jabung Timur	4,14	2,55	4,12	3,54	3,59	3,06	1,52	2,61	0,17	4,35	3,18	1,09	2,83

Sumber: Data Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disajikan melalui berbagai indikator, yakni Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia (SDM), Pasar, dan Ekosistem Inovasi, memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi daya saing kabupaten ini dibandingkan dengan tingkat nasional dan provinsi Jambi. Dari data yang telah terpaparkan di tabel 2.86, terlihat bahwa secara umum skor IDSD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 2,83, berada sedikit di bawah tingkat nasional (3,44) dan provinsi Jambi (3,25). Fokus pada indikator SDM dan Pasar memperlihatkan performa yang cukup menonjol dengan skor masing-masing 4,12 dan 3,54, menandakan adanya potensi dan kekuatan di sektor sumber daya manusia dan aktivitas pasar yang relatif baik. Namun, terdapat catatan penting pada unsur Ekosistem Inovasi dan beberapa variabel lain seperti unsur pendukung 7, 9, dan 12 yang menunjukkan nilai rendah, bahkan salah satu indikator mencapai 0,17, mengindikasikan perlunya perhatian khusus pada aspek inovasi dan lingkungan pendukung yang menjadi fondasi penting untuk peningkatan daya saing yang berkelanjutan. Dengan demikian, Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus lebih meningkatkan sinergi antara berbagai elemen penunjang pembangunan, khususnya dalam penguatan ekosistem inovasi dan lingkungan pendukung, agar dapat mengakselerasi pertumbuhan daya saing secara menyeluruh. Perbandingan dengan tingkat nasional dan provinsi menggarisbawahi peluang perbaikan sekaligus strategi yang perlu diimplementasikan untuk menutup gap kinerja tersebut, sekaligus

mendorong Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi daerah yang lebih kompetitif di masa depan.

4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

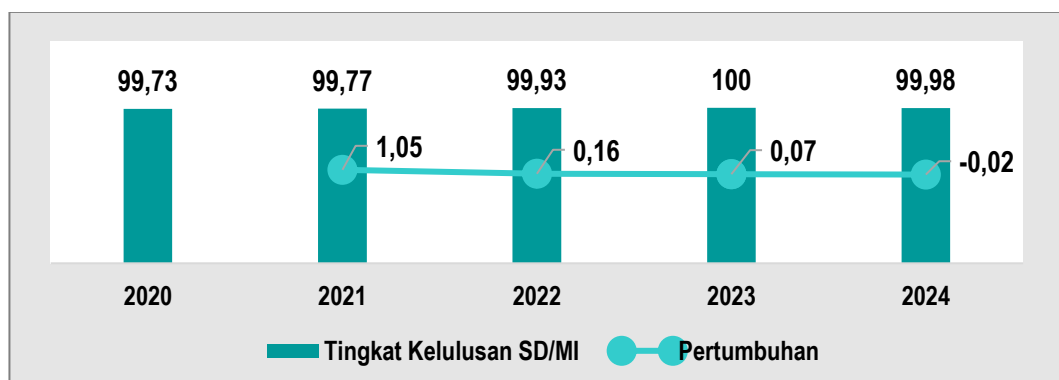
1) Urusan Pendidikan

Fungsi pendidikan sangat strategis dan penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat, bahkan berkorelasi dengan upaya-upaya peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Oleh karenanya, fungsi pendidikan merupakan salah satu prioritas urusan wajib yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

a) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka Pendidikan yang Ditamatkan merupakan proporsi jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan wajib 13 tahun. Sesuai dengan konsep tersebut, Angka pendidikan yang ditamatkan untuk SD dan SMP merupakan persentase jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan SD dan SMP terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Pencapaian Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/ sederajat dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.47 berikut.

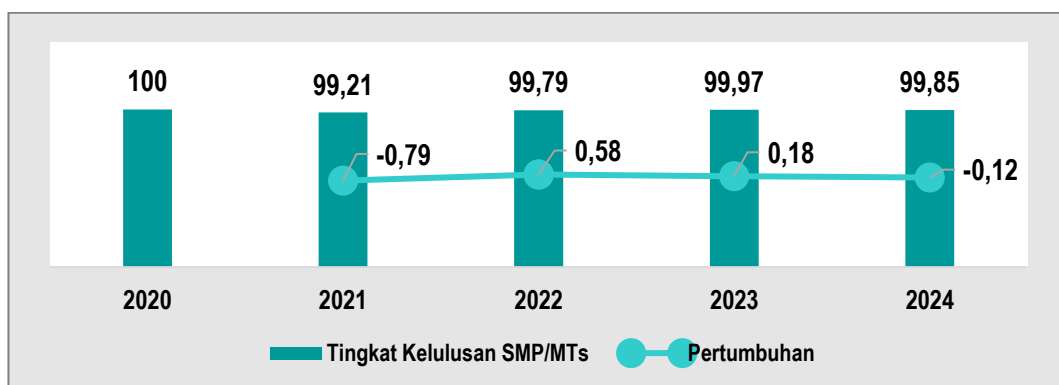
Gambar 2.47
Tingkat Kelulusan SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024



Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

Tingkat kelulusan SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuatif cenderung tetap. Pada Tahun 2020 sebesar 99,73 persen mengalami peningkatan pada tahun 2021-2023 menjadi berturut-turut sebesar 99,77 persen, 99,93 persen dan 100 persen. Akan tetapi, mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 99,98 persen. Secara rata-rata laju pertumbuhan tingkat kelulusan SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 5 tahun terakhir dari tahun 2020- 2024 adalah tumbuh sebesar 0,3 persen per tahun.

Gambar 2.48
Tingkat Kelulusan SMP/ Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024



Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

Tingkat kelulusan SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode yang sama berfluktuatif cenderung tetap. Kondisi ini tergambar dari tingkat kelulusan SMP/ sederajat sebesar 100 persen pada tahun 2020, kemudian turun kembali menjadi 99,21 persen pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022-2024 meningkat menjadi 99,79 persen, 99,97 persen dan 99,85 persen. Secara rata-rata laju pertumbuhan tingkat kelulusan SMP Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2020-2024 tumbuh sebesar 0,03 persen per tahun.

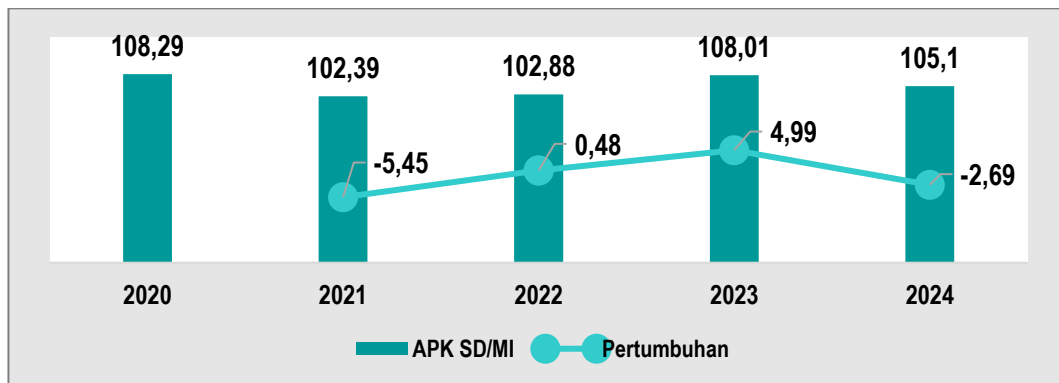
b) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah

penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Secara umum, Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar tingkat (APK) SD/ sederajat selama tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.49

APK SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



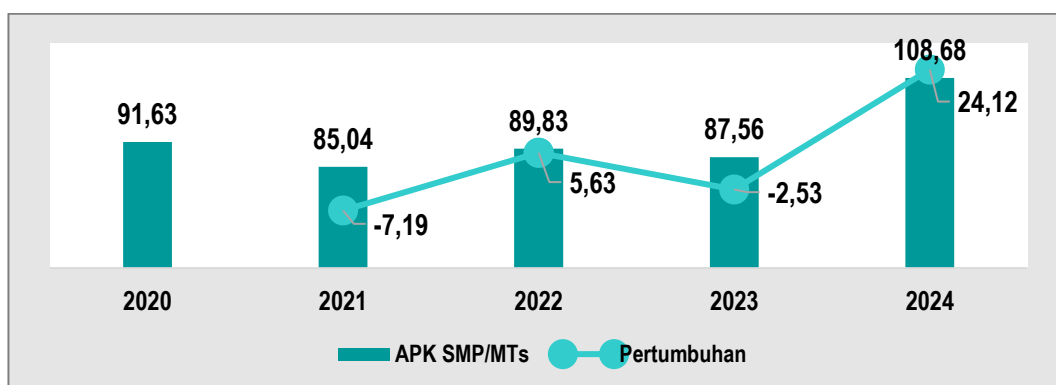
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuatif cenderung tetap sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2020 APK SD/ sederajat sebesar 108,29 persen mengalami penurunan menjadi 102,39 persen pada tahun 2021, selanjutnya meningkat pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 102,88 persen dan 108,01 persen. Pada tahun 2024, mengalami penurunan menjadi 105,1 persen. Rata-rata pertumbuhan turun sebesar minus 0,16 persen dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 4,99 persen dan pertumbuhan terendah pada tahun 2021 sebesar -5,45 persen.

Berbeda dengan APK SD, untuk APK SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2020-2024 berfluktuatif cenderung meningkat. Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2020 sebesar 88,84 persen

menjadi 91,63 persen, namun pada tahun 2021 APK SMP/ sederajat menurun menjadi 85,04 persen dan kembali meningkat menjadi sebesar 89,83 persen pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 87,56 persen dan mengalami lonjakan peningkatan pada tahun 2024 sebesar 108,68 persen. Rata-rata pertumbuhan pertahun APK SMP/ Sederajat adalah tumbuh sebesar 5 persen.

Gambar 2.50
APK SMP/ Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



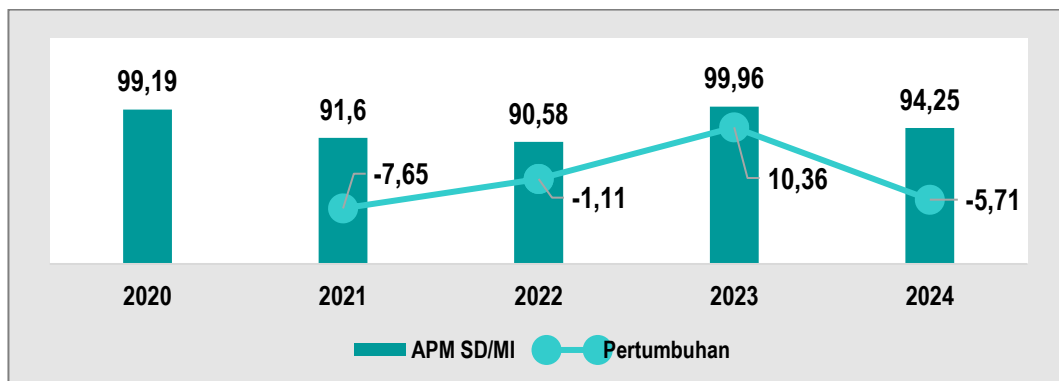
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

c) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD/MI yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu

lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100. Gambar berikut menunjukkan APM SD/sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode 2020-2024.

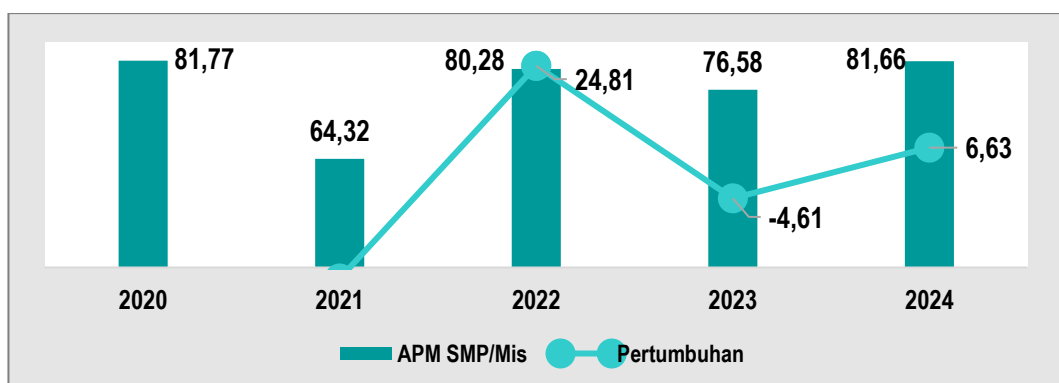
Gambar 2.51
APM SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Capaian APM SD/sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2020-2024 berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020 APM SD/Sederajat sebesar 99,19 persen. Selanjutnya menurun menjadi 91,6 persen dan 90,58 persen pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 99,96 persen, dan turun kembali menjadi 95,24 persen pada tahun 2024. Adapun laju pertumbuhan capaian APM SD/sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir rata-rata turun sebesar minus 1,02 persen per tahun.

Gambar 2.52
APM SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

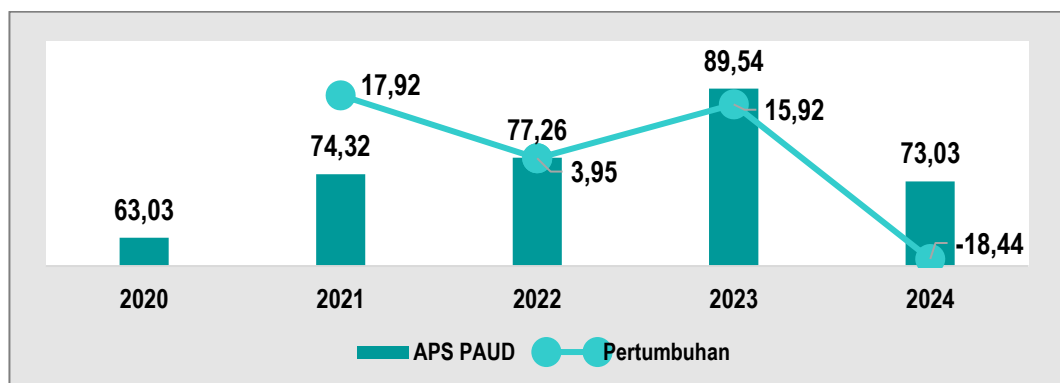
Adapun capaian APM SMP/ sederajat persen tahun 2020-2024 berfluktuasi cenderung meningkat. Pada tahun 2020 sebesar 81,87 persen, namun pada tahun 2021 menurun menjadi 64,32 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi sebesar 80,28 dan menurun kembali menjadi 76,58 persen pada tahun 2023. Lalu mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 sebesar 81,66 persen. Laju pertumbuhan capaian APM SMP/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun tumbuh dengan rata-rata 1,09 persen per tahun.

d) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Gambar berikut menunjukkan APS PAUD Usia 5-6 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2020-2024.

Gambar 2.53

APS PAUD Usia 5-6 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

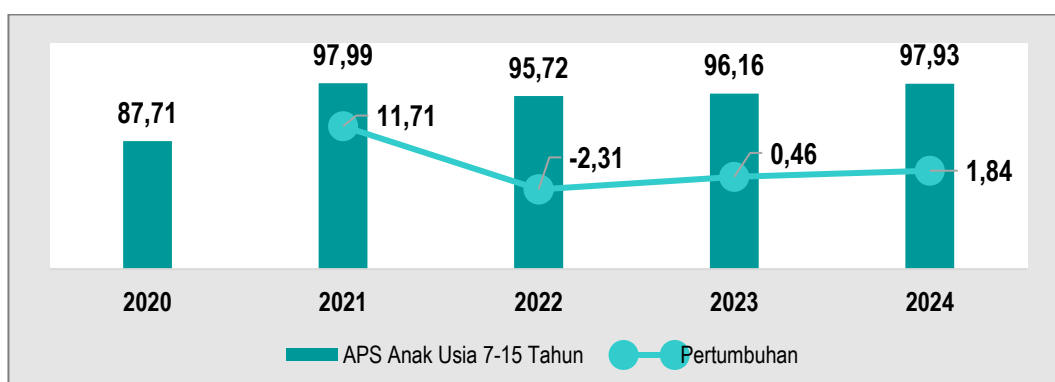


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Capaian APS PAUD Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2020-2024 berfluktuatif cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 APS PAUD menunjukkan angka 63,03 persen lalu mengalami peningkatan sebesar 74,31 persen dan 77,26 persen pada tahun 2021 dan

2022. Selanjutnya pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi sebesar 89,54 dan menurun kembali menjadi 73,03 persen pada tahun 20. Adapun Laju pertumbuhan APS PAUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan tren fluktuatif, dengan peningkatan signifikan hingga 2023 diikuti oleh penurunan tajam sebesar -18,44 persen pada tahun 2024.

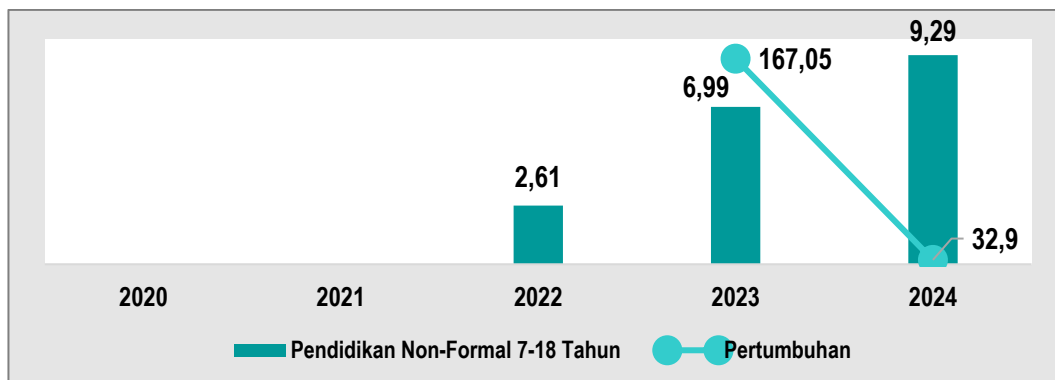
Gambar 2.54
APS SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Sama halnya dengan APS PAUD Usia 5-6 Tahun, Capaian APS Usia 7-15 tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2020-2024 juga berfluktuatif cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 97,99 persen dari hanya 87,71 persen pada tahun 2020. Namun menurun menjadi 95,99 persen pada 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024 kembali meningkat berturut-turut menjadi 96,16 persen dan 97,93 persen. Adapun laju pertumbuhan capaian APS Anak Usia 7-15 Tahun menunjukkan tren yang relatif stabil dengan fluktuasi kecil, diawali lonjakan pada 2021 lalu sedikit menurun pada 2022, dan kembali meningkat secara bertahap hingga 2024.

Gambar 2.55
APS Pendidikan Non-Formal Usia 7-18 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Di sisi lain APS Pendidikan Non-Formal Usia 7-18 Tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 dan 2024 mengalami lonjakan peningkatan sebesar 6,99 persen dan 9,29 persen dari hanya 2,61 persen pada tahun 2022. Adapun,, laju pertumbuhan capaian APS Pendidikan Non-Formal Usia 7-18 tahun menunjukkan lonjakan sangat tinggi pada 2023 sebesar 167,05 persen, lalu melambat secara signifikan menjadi 32,9 persen pada tahun 2024.

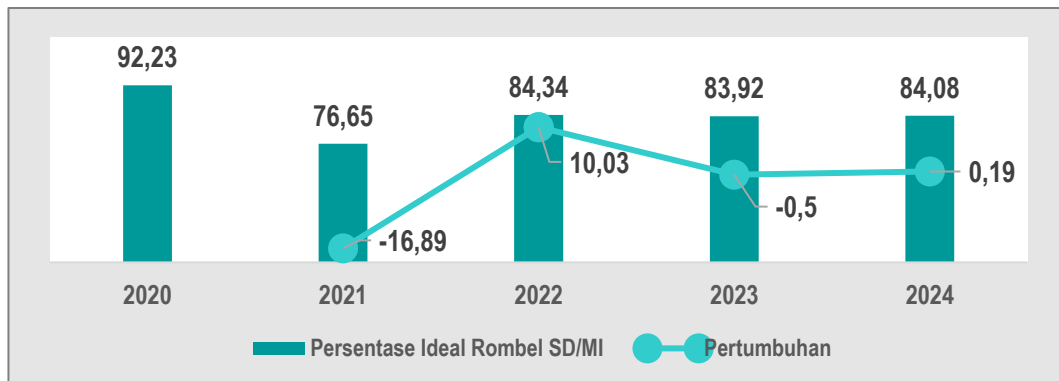
e) Persentase Rasio Ideal Rombel

Rombel atau rombongan belajar adalah tempat pertemuan antara siswa dan guru, Rombel yang ideal jika memiliki siswa minimal 20 orang dan maksimal 32 orang siswa. Gambar 2.56 menunjukkan Capaian Persentase Ideal Rombel SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2020-2024.

Capaian Persentase Ideal Rombel SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2020-2024 berfluktuatif cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 92,23 persen, namun menurun menjadi 76,65 persen pada tahun 2021. Selanjutnya Pada tahun 2022 meningkat menjadi 84,34 persen dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 83,92 persen. Mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi kembali 84,08 persen. Adapun rata-rata laju pertumbuhan capaian Persentase

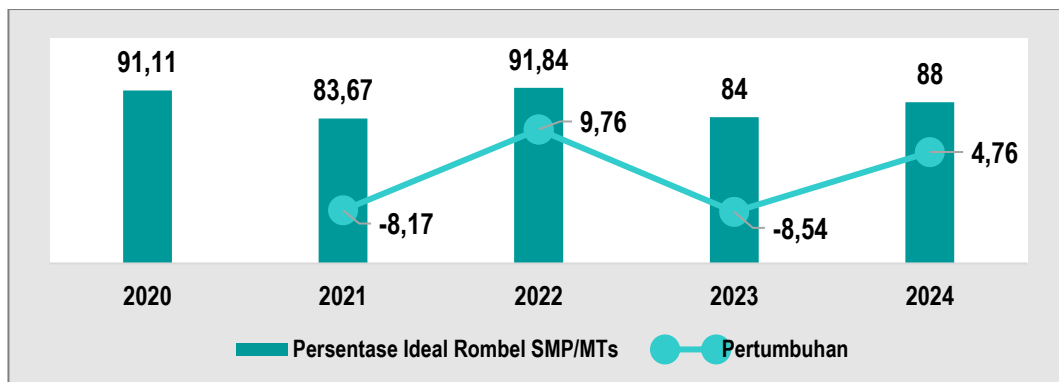
Ideal Rombel SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur turun sebesar minus 1,79 persen per tahun.

Gambar 2.56
Persentase Rasio Ideal Rombel SD/ Sederajat Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024



Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

Gambar 2.57
Persentase Rasio Ideal Rombel SMP/ Sederajat Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024



Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

Persentase Ideal Rombel SMP/ Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 berfluktuasi cenderung menurun. Pada tahun tahun 2020 sebesar 91,11 persen, namun menurun menjadi 83,67,65 persen pada tahun 2021. Selanjutnya Pada tahun 2022 meningkat menjadi 91,85 persen dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 83,92 persen. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 88 persen. Adapun rata-rata

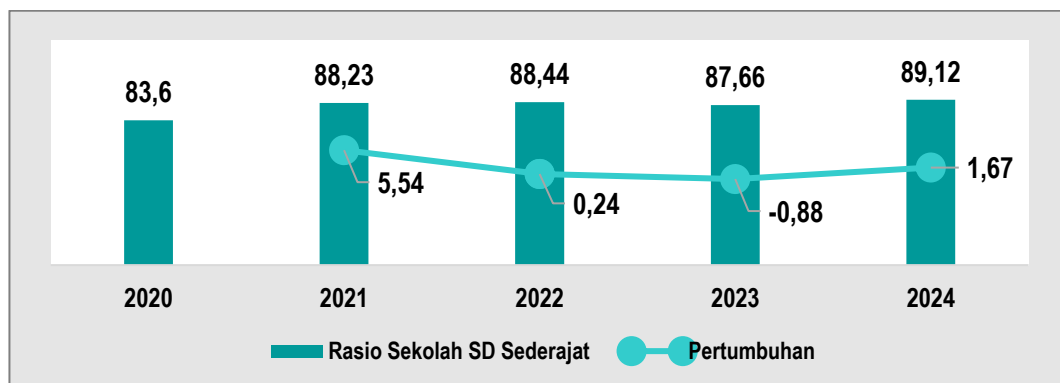
laju pertumbuhan capaian Persentase Ideal Rombel SD/ sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur turun sebesar minus 0,55 persen per tahun.

f) Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah adalah Jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar dan menengah pertama. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah pertama.

Gambar 2.58

Persentase Rasio Sekolah SD/ Sederajat Terhadap Penduduk Berusia 7-12 Tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

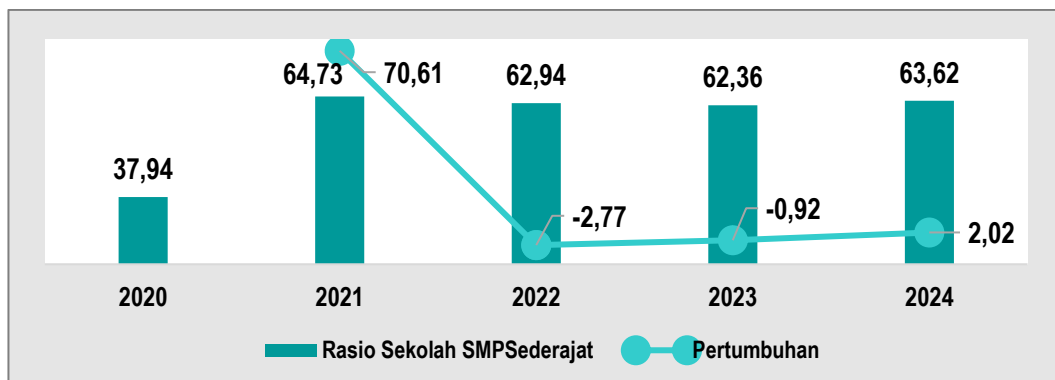


Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

Rasio sekolah SD/ sederajat terhadap penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif cenderung meningkat, dimulai pada tahun 2020 mencapai 83,6 persen terjadi peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 88,23 persen dan 88,44 persen. Selanjutnya menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 87,66 persen, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 sebesar 89,12 persen. Gambar 2.59 menunjukkan rasio sekolah SD/ sederajat terhadap penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 1,62 persen.

Gambar 2.59

Persentase Rasio Sekolah SMP/Sederajat Terhadap Penduduk Berusia 13-15 Tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

Selanjutnya Rasio sekolah SMP/ sederajat terhadap penduduk 13-15 tahun juga cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024. Gambar ini menunjukkan angka rasio sekolah SMP/ sederajat terhadap penduduk berusia 13-15 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai angka 37,94 persen di tahun 2020 selanjutnya mengalami fluktuasi hingga mencapai angka 63,62 persen pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan Rasio sekolah SMP/ sederajat terhadap penduduk 13-15 tahun tumbuh sebesar 17,23 persen per tahun.

g) Rasio Guru terhadap Murid

Rasio Guru terhadap Murid adalah perbandingan antara jumlah guru dan jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Rasio murid dan guru merupakan indikator untuk mengetahui berapa banyak murid yang berada dalam tanggung jawab satu guru. Semakin kecil nilai rasio guru-murid berarti semakin efektif proses belajar mengajar yang dilakukan sehingga diharapkan mutu pendidikan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Tabel 2.87

Rasio Guru SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Tingkat	Tahun					Tren
	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
Jumlah Guru SD/MI	1.045	1.184	1.604	1.001	1.687	Meningkat
Jumlah Murid SD/MI	23.902	23.232	23.086	23.147	22.862	Menurun
Rasio	14,58	19,62	14,39	13,94	13,09	Fluktuatif

Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

Rasio guru terhadap murid SD/ sederajat periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel diatas. Rasio guru terhadap murid SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2020-2024 diperoleh angka rata-rata sebesar 15,12 atau 1 guru bertanggung jawab terhadap 15,07 orang murid.

Tabel 2.88

Rasio Guru SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Tingkat	Tahun					Tren
	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
Jumlah Guru SMP/MTs	579	477	571	625	628	Meningkat
Jumlah Murid SMP/MTs	7.231	6.908	7.001	7.291	7.481	Meningkat
Rasio	12,49	14,48	12,26	11,70	11,12	Fluktuatif

Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

Sementara itu untuk rasio guru terhadap murid SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2020-2024 diperoleh angka rata-rata sebesar 12,41 atau 1 guru bertanggung jawab terhadap 12,41 orang murid.

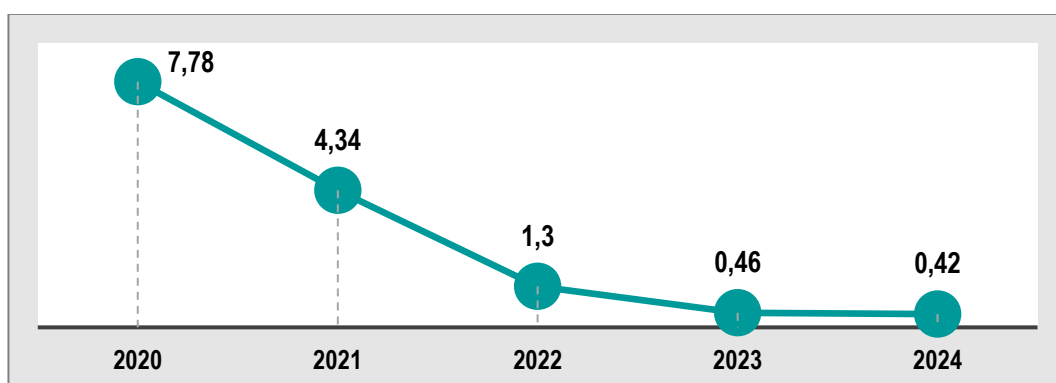
h) Angka Putus Sekolah

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa atau anak didik dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Anak yang putus sekolah tentu memiliki alasan mengapa mereka harus berhenti sekolah. Faktor intelegensi dan faktor ekonomi merupakan sebagian faktor yang dapat menjadi penyebab

anak putus sekolah. Angka Putus Sekolah adalah proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Putus Sekolah SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.60.

Gambar 2.60

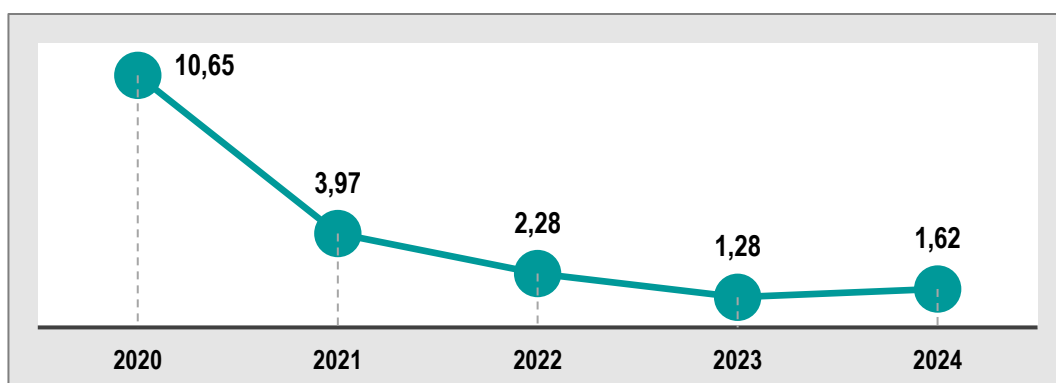
Angka Putus Sekolah SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

Gambar 2.61

Angka Putus Sekolah SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

Angka Putus Sekolah SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2020-2024 berfluktuasi cenderung meningkat. Pada

Tahun 2020 sebesar 7,78 persen, namun menurun pada tahun 2021-2024 berturut-turut sebesar 4,34 persen, 1,3 persen, 0,46 persen dan 0,42 persen. Rata-rata Angka Putus Sekolah SD/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 2,86 persen.

Sama halnya dengan Angka Putus Sekolah SD/ sederajat, Angka Putus Sekolah SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2020-2024 berfluktuasi cenderung meningkat. Pada Tahun 2020 sebesar 10,65 persen, namun menurun pada tahun 2021-2023 berturut-turut sebesar 3,97 persen, 2,87 persen dan 1,28 persen. Dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 1,62 persen. Rata-rata Angka Putus Sekolah SMP/ sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 3,92 persen.

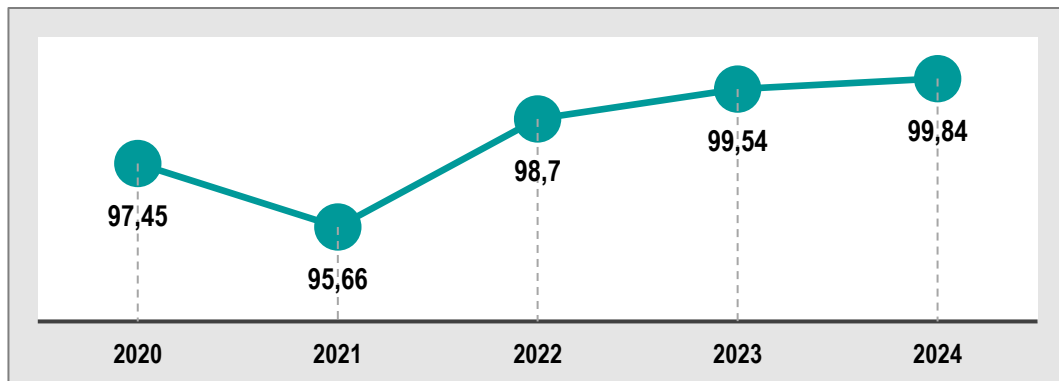
Terhadap kecenderungan peningkatan Angka Putus Sekolah SD/ Sederajat dan SMP/ Sederajat ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam perencanaan ke depan sehingga dapat melaksanakan program dan kegiatan untuk menekan Angka Putus Sekolah tersebut.

i) Angka Melanjutkan Sekolah ke jenjang selanjutnya

Angka melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya merupakan proporsi jumlah anak usia sekolah yang melanjutkan pendidikan dan bersekolah dari satu jenjang ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sesuai dengan konsep tersebut, angka melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya untuk SD merupakan persentase jumlah anak usia sekolah yang melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP. Sedangkan untuk SMP, merupakan persentase anak usia sekolah yang melanjutkan pendidikan dari SMP ke SMA. Secara umum, Angka melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka keberlanjutan pendidikan masyarakat.

Pencapaian Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/ sederajat ke SMP/ sederajat dalam kurun waktu tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.62.

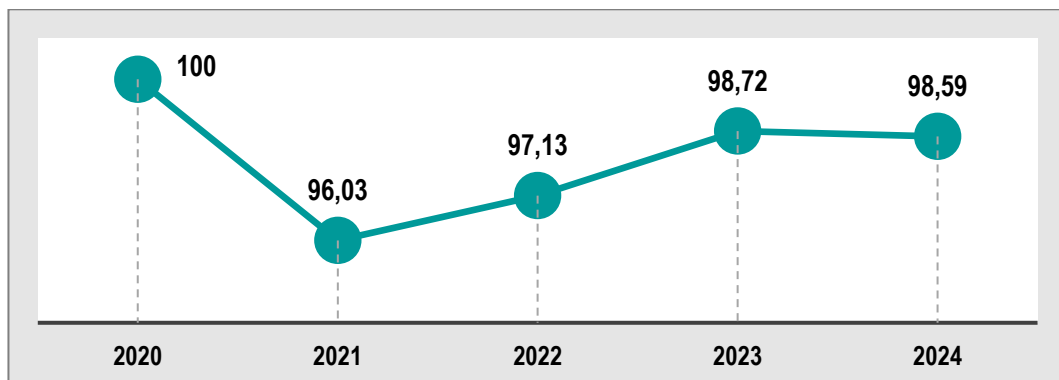
Gambar 2.62
Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/Sederajat ke SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/Sederajat ke SMP/Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020-2024 berfluktuatif cenderung meningkat. Rata-rata Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/Sederajat ke SMP/ Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020-2024 sebesar 98,24 persen, atau masih terdapat siswa SD/ sederajat yang tidak melanjutkan sekolah ke SMP/ sederajat sebesar 1,76 persen.

Gambar 2.63
Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/Sederajat ke SMA/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

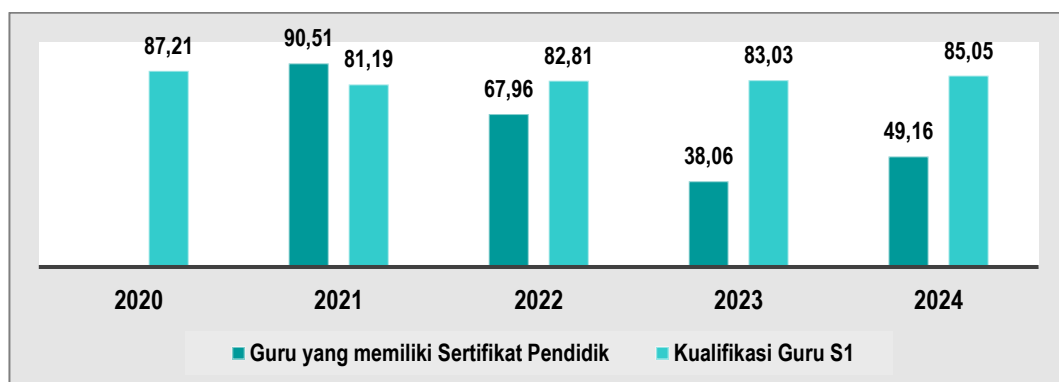
Sama halnya dengan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/Sederajat ke SMA/Sederajat juga berfluktuatif cenderung meningkat. Rata-rata Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/Sederajat ke SMP/Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020-2024 sebesar 98,10 persen, atau masih terdapat siswa SMP/Sederajat yang tidak melanjutkan sekolah ke SMA/Sederajat sebesar 1,90 persen.

j) Guru yang memiliki Kualifikasi S1/D4 dan Sertifikat Pendidik

Seorang guru harus mampu memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Di samping itu harus terampil dalam menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Untuk itu guru harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata I atau Diploma IV.

Gambar 2.64

Persentase Guru Memiliki Sertifikat Pendidik dan Kualifikasi Guru S1 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 memiliki kualifikasi guru S1/D4 rata-rata sebesar 83,86 persen, masih terdapat 16,14 persen yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4. Perkembangan tahun 2020-2024 selalu meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan turun sebesar minus 0,55 persen per tahun.

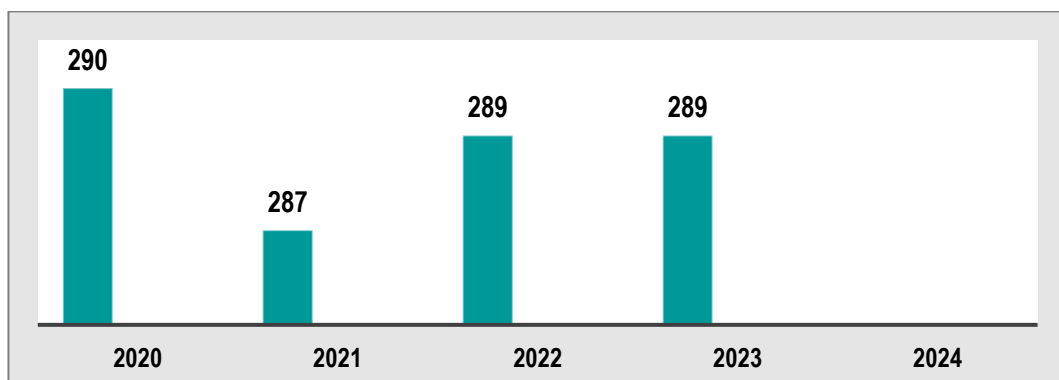
2) Urusan Kesehatan

a) Perkembangan Jumlah Posyandu di Kabupaten

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi. Melalui posyandu diharapkan dapat menekan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dengan sasaran Imunisasi, Pelayanan KIA, Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; perbaikan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan masyarakat. Perkembangan Jumlah posyandu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Gambar 2.65 berikut.

Gambar 2.65
Perkembangan Jumlah Posyandu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Dari data di atas terlihat jumlah posyandu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 berfluktuatif cenderung menurun dimana pada tahun 2020 jumlah posyandu sebanyak 290 unit, menurun tahun 2021 menjadi 287 unit dan kembali bertambah tahun 2022 hingga 2024 menjadi 289 unit.

b) Jumlah Puskesmas dan Jaringannya

Jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 tetap tidak mengalami penurunan atau peningkatan. Jumlah puskesmas sebanyak 17 unit, puskesmas perawatan sebanyak 10 unit, puskesmas pembantu 58 unit, polindes 31 unit, dan poskesdes 23 unit. Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga medis, yang termasuk tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dr/drg spesialis. Kecukupan tenaga ini secara kualitas dan kuantitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi.

Tabel 2.89

Jumlah Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024

Jenis Sarana	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Puskesmas	7	17	17	17	17
Puskesmas Perawatan	10	10	10	10	10
Puskesmas Pembantu	58	58	58	58	58
Polindes	31	31	31	31	31
Poskesdes	23	23	23	23	23

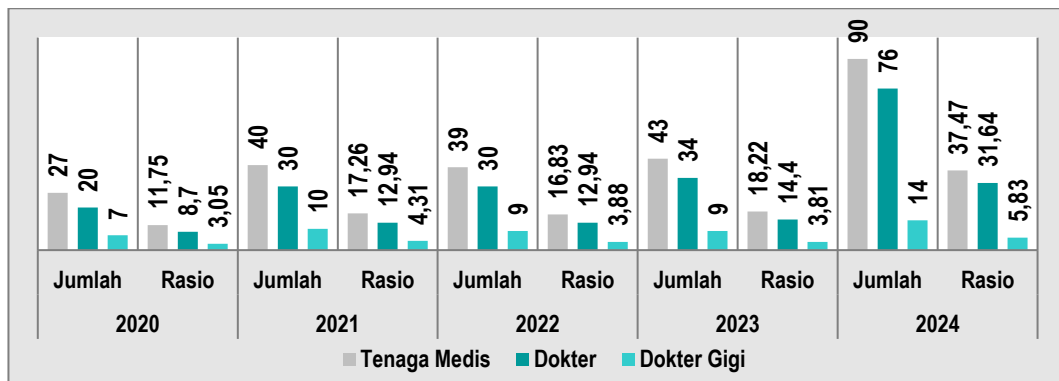
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

c) Jumlah dan Ratio Tenaga Medis

Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat secara signifikan pada tahun 2024. Pada tahun 2020 jumlah tenaga medis tercatat sebanyak 27 orang dengan rasio 11,75 per 100.000 penduduk, meningkat menjadi 40 orang (rasio 17,26) pada tahun 2021. Tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 39 orang (rasio 16,83), kemudian

meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 43 orang (rasio 18,22). Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah tenaga medis mencapai 90 orang dan rasio 37,47 per 100.000 penduduk.

Gambar 2.66
Jumlah dan Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



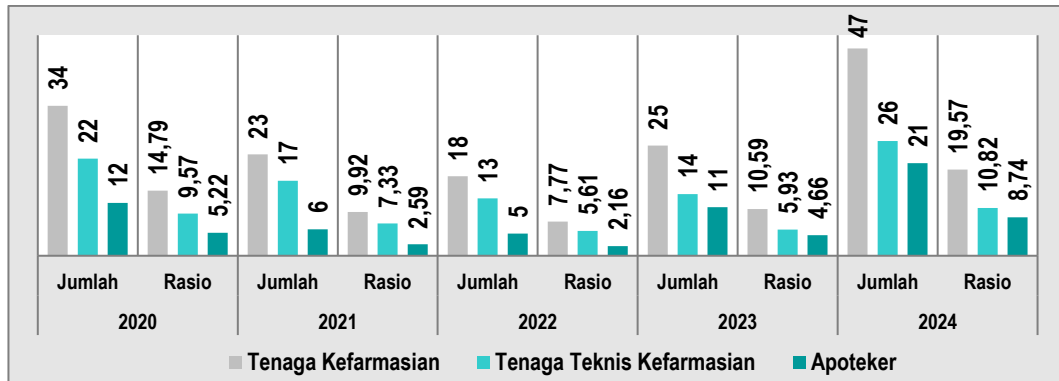
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk juga menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020, rasio dokter umum tercatat 8,70, naik menjadi 12,94 pada tahun 2021 dan tetap stabil di angka yang sama pada tahun 2022. Pada tahun 2023, rasio dokter umum meningkat menjadi 14,4, dan melonjak tajam pada tahun 2024 menjadi 31,64 per 100.000 penduduk dengan jumlah dokter sebanyak 76 orang.

Rasio Dokter Gigi juga menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio dokter gigi tercatat 3,05, meningkat menjadi 4,31 pada tahun 2021. Selanjutnya, terjadi penurunan menjadi 3,88 pada tahun 2022 dan 3,81 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali menjadi 5,83 per 100.000 penduduk dengan jumlah dokter gigi sebanyak 14 orang.

Rasio tenaga kefarmasian dan gizi dihitung berdasarkan akumulasi dari jumlah tenaga yang bekerja di Puskesmas maupun Rumah Sakit. Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan asisten apoteker, sedangkan tenaga gizi mencakup lulusan DI, DIII Gizi (SPAG dan AKZI), serta DIV Gizi.

Gambar 2.67
Jumlah dan Rasio Tenaga Kefarmasian Medis Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



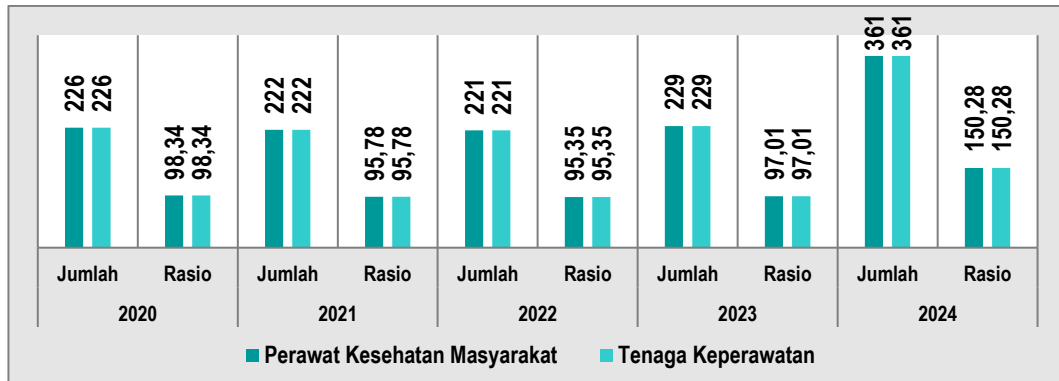
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Jumlah dan rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan signifikan pada tahun 2024. Pada tahun 2020, jumlah tenaga kefarmasian sebanyak 34 orang dengan rasio 14,79 per 100.000 penduduk, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 23 orang (rasio 9,92) dan tahun 2022 menjadi 18 orang (rasio 7,77). Selanjutnya, jumlah tenaga kefarmasian kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 25 orang (rasio 10,59) dan melonjak tajam pada tahun 2024 menjadi 47 orang dengan rasio 19,57 per 100.000 penduduk.

Jika dilihat lebih rinci, jumlah tenaga teknis kefarmasian pada tahun 2020 sebanyak 22 orang (rasio 9,57), kemudian menurun pada 2021 dan 2022 masing-masing menjadi 17 orang (rasio 7,33) dan 13 orang (rasio 5,61). Pada tahun 2023 jumlahnya naik menjadi 14 orang (rasio 5,93) dan meningkat signifikan di tahun 2024 menjadi 26 orang dengan rasio 10,82 per 100.000 penduduk. Sementara itu, jumlah apoteker juga mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 12 orang (rasio 5,22), menurun menjadi 6 orang (rasio 2,59) di tahun 2021 dan 5 orang (rasio 2,16) pada 2022. Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 11 orang (rasio 4,66), dan pada tahun 2024 meningkat cukup signifikan menjadi 21 orang dengan rasio 8,74 per 100.000 penduduk.

Gambar 2.68

Jumlah dan Rasio Tenaga Keperawatan Medis Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

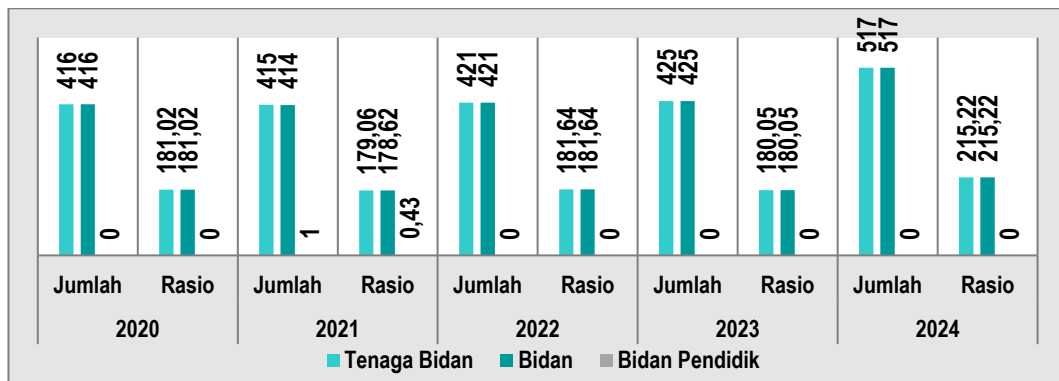
Rasio tenaga perawat per 100.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat tajam pada tahun 2024. Pada tahun 2020, rasio tenaga keperawatan tercatat 98,34 per 100.000 penduduk, menurun menjadi 95,78 pada 2021 dan 95,35 pada 2022. Tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan menjadi 97,01, dan melonjak signifikan pada tahun 2024 menjadi 150,28 per 100.000 penduduk.

Dari sisi jumlah, tenaga keperawatan berjumlah 226 orang pada tahun 2020, sedikit menurun pada 2021 dan 2022 masing-masing menjadi 222 dan 221 orang, lalu meningkat menjadi 229 orang di tahun 2023, dan bertambah signifikan menjadi 361 orang pada tahun 2024. Adapun jenis tenaga keperawatan yang tersedia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat ini hanya terdiri dari Perawat Kesehatan Masyarakat, baik lulusan S1, D4, maupun SMA/ sederajat. Sementara itu, tenaga keperawatan khusus seperti Perawat Kesehatan Jiwa, Perawat Geriatri, Perawat Medikal Bedah, Perawat Maternitas, dan Perawat Kesehatan Anak belum tersedia selama lima tahun terakhir.

Rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio tenaga bidan tercatat 181,02 per 100.000 penduduk, mengalami sedikit penurunan menjadi 179,06 pada tahun

2021. Selanjutnya, rasio kembali meningkat menjadi 181,64 pada tahun 2022 dan 180,05 pada tahun 2023. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024, yaitu mencapai 215,22 per 100.000 penduduk.

Gambar 2.69
Jumlah dan Rasio Tenaga Bidan Medis Per 100.000 Penduduk di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Dari sisi jumlah, tenaga bidan berjumlah 416 orang pada tahun 2020, sedikit menurun menjadi 415 orang di tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 421 orang pada tahun 2022 dan 425 orang pada tahun 2023. Pada tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah tenaga bidan menjadi 517 orang. Adapun dari jenis tenaga bidan yang tersedia, hampir seluruhnya merupakan tenaga bidan fungsional, dengan tidak terdapat bidan pendidik selama tahun 2020, 2022, hingga 2024. Hanya pada tahun 2021 tercatat 1 orang bidan pendidik, dengan rasio sangat kecil yaitu 0,43 per 100.000 penduduk.

d) Jumlah dan Rasio Tenaga Medis

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nurdin Hamzah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk dengan fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum; 2) Pengkoordinasian Rumah Sakit Umum; dan 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh RSUD Nurdin Hamzah dalam

pelaksanaan kegiatan salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), seperti kurangnya tenaga dokter umum dan tenaga dokter spesialis yang tidak menetap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 2.90

Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bed Occupation Rate (%)	37,42	29,31	18,79	14,83	20,54
Average Length of Stay (Hari)	3	4	5	3	3
Bed Turn Over (Kali)	37,42	28	14	19	29
Turn Over Interval (Hari)	5	9	21	16	10
Net Death Rate (%)	0,01	0,01	0,05	12,73	11,22
Gross Death Rate (%)	0,04	0,01	0,08	34,42	27,22
Jumlah Tempat Tidur (Unit)	66	68	113	109	109
Jumlah Kematian (Jiwa)	141	117	152	73	80
Jumlah Rawat Jalan/Out patient (Jiwa)	17.626	11.896	11.687	17.491	21.949
Jumlah Rawat Inap/In patient (Jiwa)	3.234	1.954	1.815	1.937	2.766

Sumber: RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025 (diolah)

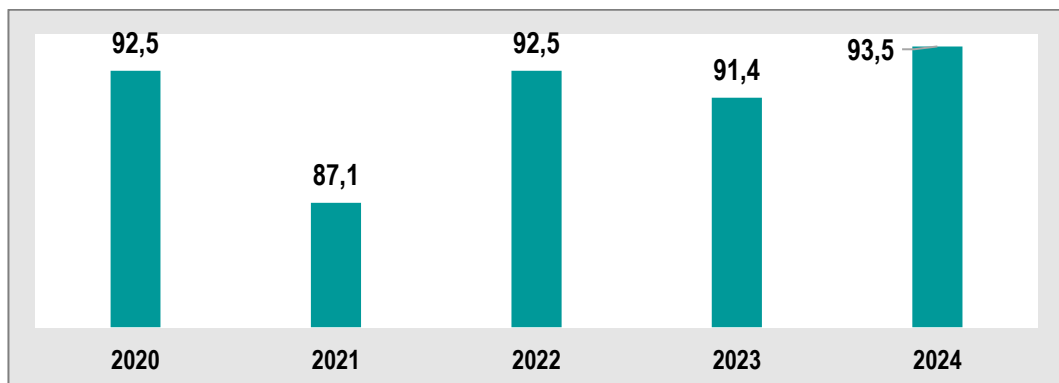
Pelayanan RSUD Nurdin Hamzah meliputi Bed Occupation Rate (persen), Average Length of Stay (Hari), Bed Turn Over (Kali), Turn Over Interval (Hari), Net Death Rate (persen), Gross Death Rate (persen), Jumlah Tempat Tidur (Unit), Jumlah Kematian (Jiwa), Jumlah Rawat Jalan/outpatient (Jiwa). Peningkatan maupun penurunan masing-masing persentase pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nurdin Hamzah disajikan pada Tabel 2.90.

e) Desa UCI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Desa atau Kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Sedangkan imunisasi dasar lengkap adalah Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang telah mendapatkan 1 dosis imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT- HB-HIB, 4 dosis imunisasi polio oral, dan 1 dosis imunisasi campak/MR. Imunisasi dasar sangat penting diberikan sewaktu bayi (usia 0-11 bulan) untuk memberikan kekebalan dari

penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Tanpa imunisasi anak-anak mudah terserang berbagai penyakit, kecacatan dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Imunisasi juga memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia termasuk peningkatan umur harapan hidup. Persentase Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Gambar 2.70.

Gambar 2.70
Persentase Desa UCI Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Cakupan desa UCI selama lima tahun terakhir mengalami perubahan, pada tahun 2020 yaitu 92,5 persen kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 87,1 persen dan di tahun 2022 mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 92,5 persen. Tahun 2023 kembali menurun menjadi 91,4 persen, mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 93,5 persen.. Beberapa penyebab masih terdapat beberapa desa yang belum mencapai UCI antara lain karena kurang pemahaman masyarakat akan pentingnya Pelaksanaan Imunisasi dasar terhadap bayi berumur 0-11 bulan. Masih terdapat kelemahan terhadap koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa dan tenaga kesehatan, diperlukannya upaya ketuk pintu atau pun sweeping turun ke desa sehingga sasaran terhadap Imunisasi dapat tercapai, ditambah lagi isu status kehalalan dari vaksin itu sendiri yang sempat menjadi polemik di tengah masyarakat.

f) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan atau yang disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun realisasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91

Realisasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	89,45	86,28	88,04	96,86	91,47
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	64,74	68,33	70,13	76,44	82,33
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir umur 0-28 hari yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru	96,16	97,05	91,86	97,53	92,18
Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita usia 12-59 bulan yang mendapat	82,68	77,57	64,1	88,18	94,53
Pelayanan Kesehatan Pada Usia	Persentase anak usia pendidikan dasar yang	76,98	83,5	74,24	92,28	95,24
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase WNI usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan	22,78	27,79	21,23	52,68	62,54
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase WNI usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai	87,93	30,64	80,02	80,27	87,57
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan	13,31	23,79	18,56	27,06	30,69
Pelayanan	Persentase penderita	96,24	76,18	113,31	100	100

Uraian	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
Pelayanan Kesehatan Orang	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	97,49	95,4	94,54	93,41	93,29
	Persentase orang terduga tuberkulosis yang dilakukan	30,1	19,43	56,19	41,37	72,82
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	31,52	56,22	49,34	66,75	78,19

Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

Secara umum, cakupan pelayanan kesehatan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin mengalami peningkatan signifikan, masing-masing mencapai 91,47 persen dan 83,23 persen pada tahun 2024. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir juga stabil tinggi, menembus 92,18 persen di tahun 2024.

Cakupan pelayanan balita dan anak usia sekolah dasar meningkat, masing-masing mencapai 88,14 persen dan 94,72 persen pada tahun 2024. Untuk usia produktif, pelayanan skrining kesehatan menunjukkan pertumbuhan positif dari 22,78 persen pada 2020 menjadi 62,54 persen pada 2024. Begitu pula pada usia lanjut (di atas 60 tahun), cakupan skrining meningkat tajam dari 87,93 persen menjadi 87,57 persen, setelah sempat turun drastis di 2021. Cakupan pelayanan penderita hipertensi mengalami peningkatan konsisten, dari 13,31 persen pada 2020 menjadi 30,69 persen pada 2024. Penderita diabetes melitus juga menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 100 persen pada 2023 dan 2024. Pelayanan untuk ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) tetap tinggi di atas 95 persen, meskipun mengalami sedikit penurunan pada 2024 menjadi 93,29 persen. Cakupan pelayanan bagi orang yang terdiagnosis tuberkulosis dan risiko HIV juga meningkat. Pelayanan TB naik dari 30,1 persen pada 2020 menjadi 72,82 persen 2024, sedangkan cakupan HIV naik dari 31,52 persen menjadi 78,15 persen.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencerminkan dinamika pembangunan infrastruktur dasar yang sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik, produktivitas ekonomi wilayah, dan kualitas hidup masyarakat. Melalui indikator kinerja kunci (IKK) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah ditetapkan selama periode 2021 hingga 2024, dapat dilihat pada Tabel 2.92 terkait arah capaian dan tantangan yang dihadapi dalam penyediaan layanan infrastruktur secara menyeluruh.

Tabel 2.92

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh rumah layak huni	272	60	259	287
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	51,55	54,89	59,15	57,64
Persentase tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	76,90	64,47	18,42	16,67
Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	85,35	88,12	88,24	89,27
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi menunjukkan tren peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2021, cakupan layanan irigasi terhadap lahan pertanian mencapai 51,55 persen, meningkat menjadi 54,89 persen di tahun 2022, dan mencapai 59,15 persen pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penyesuaian menjadi 57,64 persen, hal ini disebabkan oleh bertambahnya cakupan luas kewenangan irigasi yang memperbesar basis perhitungan. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa program pengembangan

jaringan irigasi pertanian telah berjalan secara progresif dalam mendukung ketahanan pangan dan pemanfaatan sumber daya air secara efisien.

Sebaliknya, persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten menunjukkan tren penurunan cukup tajam. Setelah sempat mencapai 76,90 persen pada tahun 2021, angka ini turun menjadi 64,47 persen di tahun 2022, dan menurun drastis menjadi hanya 16,67 persen pada 2024. Penurunan ini disinyalir berkaitan erat dengan meningkatnya proporsi jalan dalam kondisi rusak berat serta belum optimalnya program pemeliharaan dan rehabilitasi jalan. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat dalam sektor peningkatan kualitas jalan, terutama untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan distribusi hasil pertanian serta perikanan.

Dari sisi sumber daya manusia, capaian persentase tenaga teknis atau analis yang memiliki sertifikat kompetensi menunjukkan tren positif dan stabil. Mulai dari 85,35 persen pada 2021, angka ini terus meningkat hingga mencapai 89,27 persen pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan komitmen daerah dalam meningkatkan profesionalisme dan kapasitas teknis aparatur pelaksana di bidang PUPR, sebagai bagian dari strategi penguatan tata kelola dan mutu pekerjaan konstruksi.

Namun demikian, indikator rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kesalahan konstruksi masih menunjukkan belum dihitung secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan dua kemungkinan utama: rendahnya mekanisme pelaporan terhadap proyek yang berhasil tanpa temuan teknis, atau masih adanya tantangan dalam pengawasan kualitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ke depan, aspek pengawasan mutu konstruksi perlu menjadi perhatian penting agar kualitas belanja modal infrastruktur benar-benar mencerminkan nilai manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, gambaran kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini menunjukkan kemajuan dalam cakupan layanan irigasi dan penguatan kapasitas SDM, namun juga menggarisbawahi perlunya

perbaikan menyeluruh terhadap kualitas jalan dan pengawasan teknis proyek. Data ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan strategi pembangunan sektor PUPR yang lebih responsif, efisien, dan berbasis hasil nyata.

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyediaan perumahan yang layak huni dan pengembangan kawasan permukiman yang terencana dengan baik, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan. Selain itu, pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan juga dapat lebih mudah diakses dengan adanya perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan baik. Dengan demikian, aspek ini menjadi salah satu pilar penting dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Indikator kinerja kunci (IKK) urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.93

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	16.115	15.371	7.358	7.256	6.627
Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	4,12	0.94	4,12	4,76	3,92
Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Memperoleh Rumah Layak Huni	272	60	259	287	225
Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	21.901	20.587	19.827	1.029	951

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, capaian indikator pada urusan perumahan dan kawasan permukiman menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak mengalami penurunan signifikan, dari 16.115 rumah tangga pada tahun 2020 menjadi hanya 6.627 rumah tangga di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan perlunya penguatan infrastruktur air bersih dan upaya perlindungan aksesibilitas air minum bagi masyarakat. Penanganan kawasan kumuh seluas 10-15 hektar tercatat meningkat pada 2023 sebesar 4,76 persen, setelah sebelumnya turun menjadi 0,94 persen di tahun 2021. Meskipun demikian, tren pengurangan kawasan kumuh tetap perlu dijaga melalui program rehabilitasi kawasan terintegrasi.

Capaian rumah layak huni bagi rumah tangga miskin menunjukkan pola yang relatif fluktuatif, dengan puncak tertinggi sebesar 287 rumah tangga pada 2023, namun menurun kembali menjadi 225 rumah tangga pada 2024. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di permukiman sangat terbatas, hanya terealisasi satu unit pada tahun 2022 dan satu unit lagi pada tahun 2024. Di sisi lain, peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman menurun drastis dari 21.901 rumah tangga pada 2020 menjadi hanya 951 pada 2024, menandakan tantangan serius dalam pengelolaan sanitasi domestik. Sementara itu, tiga indikator lainnya, yaitu sertifikasi dan registrasi perancang rumah, fasilitasi rumah bagi korban bencana, serta fasilitasi rumah bagi warga terdampak relokasi, seluruhnya menunjukkan capaian nol persen selama lima tahun terakhir, mencerminkan belum optimalnya intervensi terhadap aspek legalitas, mitigasi bencana, dan dampak sosial relokasi dalam sektor perumahan daerah. Hal ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat pemenuhan hak dasar atas hunian yang layak dan aman di wilayah tersebut.

5) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum tidak hanya berfokus pada penegakan hukum dan peraturan, tetapi juga melibatkan upaya preventif dan partisipatif untuk menjaga keharmonisan sosial serta mencegah terjadinya gangguan keamanan yang dapat mengancam stabilitas kehidupan bermasyarakat. Perlindungan masyarakat menjadi pilar penting dalam memastikan bahwa setiap individu dan kelompok dapat menjalankan aktivitasnya dengan rasa aman, terlindungi dari ancaman maupun bencana, serta mendapatkan respons cepat dan tepat dari aparat terkait ketika menghadapi situasi darurat.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya manusia, teknologi, dan kebijakan yang mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban yang berkelanjutan. Melalui koordinasi yang efektif antara aparat keamanan, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat itu sendiri, tercipta sinergi yang memperkuat sistem keamanan lokal. Selain itu, pengembangan kapasitas aparat seperti Polisi Pamong Praja, Linmas, serta sistem tanggap darurat menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, urusan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama.

6) Urusan Sosial

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan dari negara Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 terkait kesejahteraan sosial yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban

menjamin kesejahteraan masyarakatnya yakni terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Seseorang atau keluarga dengan kondisi dimana memiliki hambatan atau gangguan dalam menjalankan fungsi sosialnya dan oleh sebab itu tidak dapat menjalankan hubungan yang baik dengan lingkungannya yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar, seseorang dengan kondisi tersebut disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Setiap daerah memiliki kewajiban dalam memberikan perhatian terhadap PMKS.

Tabel 2.94
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelayanan Urusan Sosial
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	50%	50%	55%	60%	65%
Persentase Masyarakat Miskin yang menerima bantuan sosial	70%	75%	80%	82%	84%
Persentase Masyarakat Miskin yang menerima jaminan sosial (desil 1-4)	60%	70%	80%	82%	83%
Persentase masyarakat miskin yang menerima bantuan pemberdayaan sosial (desil 1 dan 2)	10%	10%	12%	14%	16%
Persentase Peningkatan Jumlah PMKS Mandiri	50%	50%	55%	60%	65%
Persentase Masyarakat Disabilitas Mandiri	8 %	10%	12%	13%	17%

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Dalam hal pelayanan urusan sosial, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020-2024. Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial meningkat dari 50 persen pada 2020 menjadi 65 persen pada 2024. Sejalan dengan itu, persentase peningkatan jumlah PMKS Mandiri juga tumbuh dari 50 persen menjadi 65 persen, menandakan adanya perbaikan dalam intervensi sosial yang mendorong kemandirian. Persentase masyarakat miskin yang menerima

bantuan sosial juga mengalami pertumbuhan signifikan, dari 70 persen menjadi 84 persen dalam lima tahun. Sementara itu, persentase masyarakat miskin yang menerima jaminan sosial (desil 1-4) meningkat dari 60 persen pada 2020 menjadi 83 persen pada 2024.

Kemajuan juga terlihat pada persentase masyarakat miskin yang menerima bantuan pemberdayaan sosial (desil 1 dan 2) yang naik dari 10 persen menjadi 16 persen, mencerminkan perhatian khusus pada kelompok miskin ekstrem. Selain itu, persentase masyarakat disabilitas mandiri meningkat cukup signifikan, dari 8 persen menjadi 17 persen, menunjukkan adanya dorongan terhadap inklusi dan kemandirian kelompok penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memperkuat layanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan melalui peningkatan akses, cakupan, dan keberlanjutan program sosial yang dijalankan selama lima tahun terakhir.

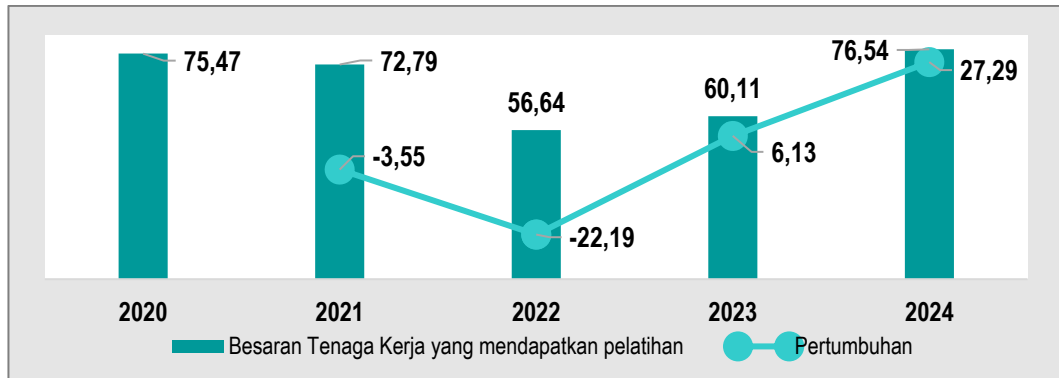
7) Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang memengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan memengaruhi *output* produksi.

Indikator untuk mengukur keberhasilan Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan, Besaran Tenaga Kerja yang ditempatkan serta Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama. Pelatihan bagi tenaga kerja diperlukan untuk meningkatkan kompetensi sehingga dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja.

Gambar 2.71

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

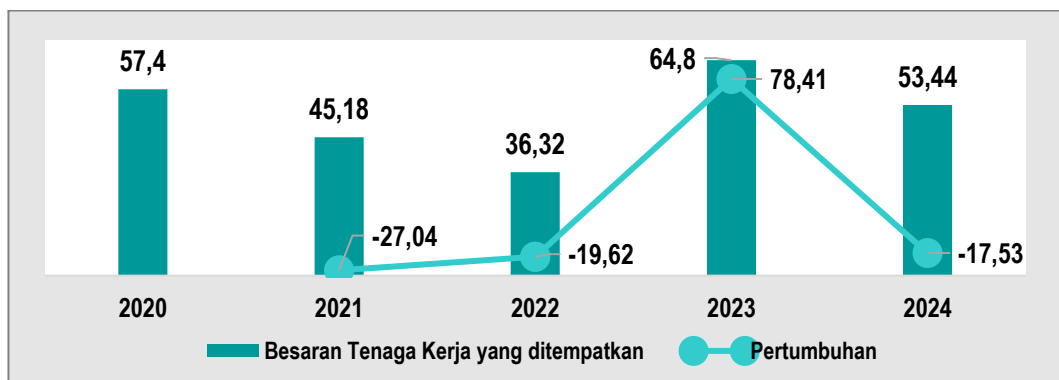


Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

Perkembangan Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan tahun 2020-2024 berfluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2020 sebesar 75,47 persen menurun pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 72,79 persen dan 56,64 persen. Pada tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan sebesar 60,11 persen dan 76,54 persen. Rata-rata perkembangan Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan tumbuh sebesar 1,92 persen per tahun. Besaran tenaga kerja yang ditempatkan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.72

Besaran Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

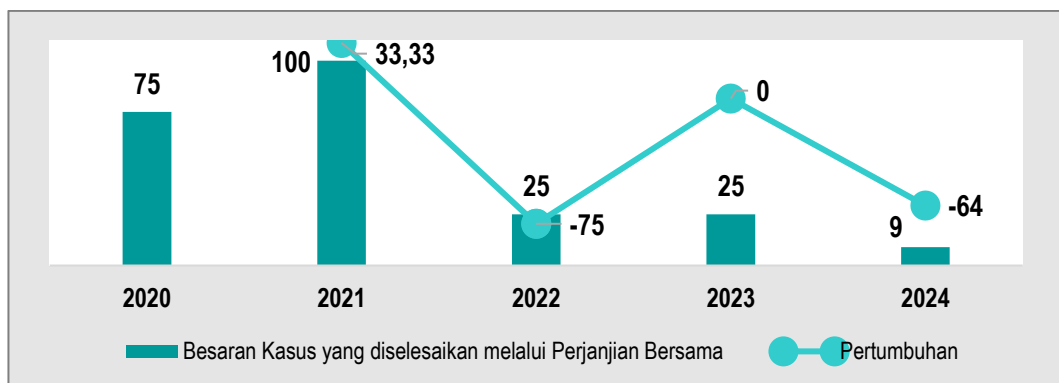


Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

Besaran Tenaga Kerja yang ditempatkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi cenderung meningkat. Pada tahun 2020 sebesar 57,4

persen, menurun pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 45,18 persen dan 36,32 persen. Setelah itu mengalami lonjakan peningkatan pada tahun 2023 menjadi 64,8 persen, namun turun kembali menjadi 53,44 persen pada tahun 2024. Rata-rata perkembangan Besaran Tenaga Kerja yang ditempatkan tumbuh sebesar 3,56 persen per tahun.

Gambar 2.73
Besaran Kasus yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

Perselisihan antara tenaga kerja dan perusahaan diselesaikan melalui forum bipartit maupun tripartit. Besaran kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama antara tenaga kerja dan perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2020 sebesar 75 persen menurun di tahun 2024 menjadi 9 persen.

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan sejahtera. Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mendukung hak-hak dasar perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik, sehingga mereka dapat mencapai potensi terbaiknya dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Di sisi lain, perlindungan anak merupakan tanggung jawab penting untuk memastikan anak-anak

terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan emosional. Dengan demikian, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak hanya menyangkut pemenuhan hak-hak dasar, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang menghargai dan melindungi setiap individu, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, sehingga tercipta generasi yang sehat, berdaya, dan siap menghadapi masa depan.

Tabel 2.95

Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus KDRT	NA	3	3	7	2
Jumlah Kasus KDRT Terselesaikan	NA	3	NA	7	2
Jumlah Kasus Kekerasan Anak	10	13	21	28	20
Jumlah Kasus Kekerasan Anak Terselesaikan	10	13	21	28	20
Rasio KDRT Perempuan	NA	NA	NA	NA	NA
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Anak dari Tindakan Kekerasan	10	13	21	28	20
Indeks Kesejahteraan Anak	NA	NA	NA	NA	NA
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan	NA	3	3	7	10
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	NA	NA	NA	NA	NA
Anggaran Responsif Gender (ARG)	NA	NA	NA	NA	162.529.893
Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadapi dinamika yang fluktuatif terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak dan perempuan. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus KDRT anak mulai tercatat sejak tahun 2021 dengan 3 kasus, bertahan di angka yang sama pada 2022, meningkat menjadi 7 kasus pada 2023, dan menurun menjadi 2 kasus pada 2024. Jumlah kasus yang berhasil diselesaikan pun mengalami fluktuasi serupa, seluruh kasus terselesaikan

pada tahun 2021 dan 2023,. Kasus kekerasan terhadap anak secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan dari 10 kasus pada tahun 2020 menjadi 28 kasus pada 2023, sebelum turun menjadi 20 kasus pada tahun 2024. Meskipun demikian, seluruh kasus pada periode 2020-2024 tercatat telah diselesaikan. Hal ini mencerminkan adanya respons yang cukup baik dari pihak berwenang dalam menangani laporan kekerasan terhadap anak. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan juga mengalami peningkatan signifikan. Dari 3 kasus pada 2021 dan 2022, angkanya melonjak menjadi 7 kasus pada 2023, dan mencapai 10 kasus pada 2024.

Satu kemajuan penting pada tahun 2024 adalah alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) yang tercatat sebesar Rp. 162.529.893, menunjukkan adanya upaya konkret pemerintah dalam mengarusutamakan perspektif gender dalam kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, persentase pelaksanaan pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar masih belum dilaporkan, sehingga dampaknya terhadap pencegahan kekerasan belum dapat diukur secara pasti.

Meskipun terdapat peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam beberapa tahun terakhir, tingkat penyelesaian kasus terutama terhadap anak menunjukkan capaian yang positif. Namun, masih diperlukan perbaikan dalam pencatatan indikator strategis seperti IPHA, indeks kesejahteraan anak, dan pemantauan pelaksanaan layanan Puspaga, guna mendukung penyusunan kebijakan perlindungan anak dan perempuan yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui peningkatan partisipasi di berbagai sektor, baik di lembaga pemerintah, swasta, maupun legislatif. Pemberdayaan perempuan diharapkan tidak hanya memberikan keamanan dan hak yang layak, tetapi juga membuka peluang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan serta pembangunan sosial dan ekonomi. Partisipasi perempuan yang meningkat dalam angkatan kerja dan posisi

kepemimpinan akan memperkuat kontribusi mereka dalam masyarakat, memperkuat daya saing, dan menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan.

Tabel 2.96

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta, DPR, dan Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	26,67	26,67	26,67	26,67	20
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	8	8	8	8	8
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	NA	NA	NA	NA	NA
Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	1,41	1,56	72,85	67,56	41,47
Jumlah OPD yang Mengimplementasikan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	32	32	32	32	32

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang relatif stagnan pada beberapa sektor, dan fluktuatif pada sektor lainnya. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tercatat sebesar 26,67 persen dari tahun 2020 hingga 2023, sebelum mengalami penurunan menjadi 20 persen pada tahun 2024. Penurunan ini perlu menjadi perhatian, mengingat keterwakilan perempuan di sektor publik sangat penting untuk mendorong kebijakan yang inklusif dan sensitif gender. Sementara itu, proporsi kursi DPRD yang diduduki oleh perempuan tetap konstan di angka 8 kursi selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan belum adanya peningkatan representasi politik perempuan dalam lembaga legislatif daerah.

Data partisipasi perempuan di lembaga swasta tidak tersedia sepanjang periode 2020-2024, sehingga analisis terhadap sektor swasta tidak dapat dilakukan secara utuh. Namun, fluktuasi yang cukup signifikan terlihat pada partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, yang meningkat tajam dari 1,41 persen pada tahun 2020 menjadi 72,85 persen pada tahun 2022, sebelum

menurun kembali menjadi 41,42 persen pada tahun 2024. Perubahan drastis ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor struktural dan sosial yang memengaruhinya, seperti kondisi ekonomi, kebijakan ketenagakerjaan, serta peran domestik yang masih melekat pada perempuan. Dalam hal penguatan kelembagaan, jumlah OPD yang mengimplementasikan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) tercatat konsisten sebanyak 32 OPD sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Ini menunjukkan adanya komitmen struktural dalam mendorong pengarusutamaan gender (PUG) di tingkat pemerintahan daerah, meskipun masih perlu dioptimalkan dalam aspek implementatif dan dampaknya terhadap kebijakan nyata.

9) Urusan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling mendasar. Tanpa akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi, pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, urusan pangan menjadi bagian penting yang harus ditangani secara serius. pentingnya pembangunan sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya fokus pada peningkatan produksi komoditas tertentu, melainkan juga melakukan diversifikasi pangan lokal, memperkuat cadangan pangan strategis, serta mengembangkan sistem distribusi yang efisien dan adil.

Untuk mengetahui ketersediaan pangan, informasi mengenai pengadaan pangan menjadi penting. Ketersediaan pangan mencakup produksi, Pasokan, Cadangan pangan dan bantuan Pangan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan makanan suatu wilayah atau negara. Pengukuran tingkat ketahanan pangan dilakukan melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan tingkat ketersediaan dan kualitas gizi dan variasi pola konsumsi penduduk.

Tabel 2.97

Kebutuhan, Produksi dan Ketersediaan Pangan Per Kapita Per Tahun
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kebutuhan Pangan (Kg)	NA	NA	20.405	20.414	17.155
Ketersediaan Pangan Berdasarkan Produksi (Kg)	NA	NA	35.867	33.786	36.010
Ketersediaan Pangan dari Luar Daerah (Kg)	NA	NA	4.506	9.818	5.381
Ketersediaan Pangan (Kg)	NA	NA	40.373	43.604	41.391

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Berdasarkan data kebutuhan pangan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat diketahui bahwa kebutuhan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersifat fluktuatif. Hal ini juga sejalan dengan data ketersediaan pangan berdasarkan produksi yang juga bersifat fluktuatif, begitupula dengan data ketersediaan pangan dari luar yang fluktuatif dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Secara keseluruhan total ketersediaan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggambarkan kondisi yang fluktuatif dari tahun 2022 sebesar 40.373 kg kemudian naik menjadi 43.604 kemudian turun lagi menjadi 41.391 di tahun 2024.

Penggambaran kondisi pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersifat fluktuatif antara kebutuhan pangan dengan ketersediaan pangan menunjukkan bahwa kondisi pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada dalam kondisi belum stabil. Dinamika ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti produksi, distribusi, maupun konsumsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang beragam. Faktor konsumsi dapat dilihat dari pola pangan harapan. Pola Pangan Harapan merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. PPH mengacu pada kebutuhan gizi yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi kesehatan internasional lainnya. PPH menekankan pentingnya mengonsumsi berbagai macam

makanan dari berbagai kelompok pangan, termasuk sumber karbohidrat kompleks (seperti beras, gandum, dan umbi-umbian), protein nabati dan hewani, lemak sehat, sayuran, buah-buahan, dan susu serta produk olahannya. Prinsip utama yang menjadi dasar PPH ini adalah keseimbangan proporsi pangan, variasi atau ragamnya, frekuensi dan porsi makan serta kualitas makanan. Semua itu merupakan kesatuan yang dapat mendukung tercapainya PPH. Adapun skor pola pangan harapan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.98.

Tabel 2.98

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	93,1	90,9	93,3	95,0	93,5
Provinsi Jambi	85,4	86,4	93,4	93,1	NA
Nasional	86,30	96,7	92,9	94,1	93,5

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2020-2024

Berdasarkan data skor pola pangan harapan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2020 hingga tahun 2024, dapat diketahui bahwa skor PPH Tanjung Jabung Timur mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sebesar 93,1 kemudian menurun di tahun 2021 menjadi 90,9 kemudian naik lagi di tahun 2022 -2023 dan turun kembali di tahun 2024. Meskipun mengalami fluktuasi, namun skor PPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata di atas skor PPH Provinsi Jambi dan Nasional. Hal ini merupakan indikasi baik bahwa tingkat ketersediaan dan kualitas gizi dan variasi pola konsumsi penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata telah lebih baik daripada Provinsi Jambi dan Nasional. PPH didasarkan pada prinsip bahwa pola makan yang seimbang dan beragam adalah kunci untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah terjadinya berbagai penyakit.

10) Urusan Lingkungan Hidup

Aspek lingkungan hidup merupakan bagian integral dari layanan urusan wajib yang perlu diintegrasikan dalam setiap aspek pembangunan. Hal ini mencakup upaya pelestarian sumber daya alam, pengelolaan limbah, kualitas air dan udara, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Sebagai bagian dari perencanaan, penting untuk menetapkan kebijakan yang mengatur penggunaan lahan secara berkelanjutan, mempromosikan energi bersih, serta menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam segala proyek infrastruktur. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan juga penting, yang dapat dicapai melalui edukasi dan program-program komunitas.

Implementasi strategi lingkungan hidup harus mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal tersebut mencakup integrasi teknologi ramah lingkungan dalam industri dan sektor lainnya, serta pengembangan infrastruktur hijau di kawasan strategis. Pemantauan kualitas lingkungan secara teratur, pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian polusi adalah langkah-langkah penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas hidup. Kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan perlindungan area pesisir juga perlu diintegrasikan untuk menjaga kekayaan alam Tanjung Jabung Timur. Dengan fokus pada aspek lingkungan hidup, dokumen perencanaan daerah tidak hanya akan memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang, memastikan pembangunan yang harmonis antara manusia dan alam.

Tabel 2.99

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Lingkungan Hidup di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,99	67,3	65,87	68,92	73,25
Indeks Kualitas Air	59,26	58,15	51,78	53,33	61,00
Indeks Kualitas Udara	85,00	85,2	87,56	90,67	95,45

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,21	50,59	50,83	55,45	N/A
Jumlah Penanganan Sampah Terlayani (ton)	15.696	15.696	15.696	15.762	15.762
Jumlah Timbulan Sampah Terolah (ton)	40.148	40.148	40.148	40.148	43.292
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,99	67,3	65,87	68,92	73,25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Dari komponen pembentuk IKLH, Indeks Kualitas Air mengalami penurunan tajam dari 59,26 (2020) menjadi titik terendah 51,78 pada 2022, sebelum naik kembali ke angka 61,00 pada 2024. Indeks Kualitas Udara secara konsisten mengalami peningkatan dari 85,00 menjadi 95,45 pada periode yang sama, mencerminkan pengendalian emisi yang efektif. Sebaliknya, Indeks Kualitas Tutupan Lahan sempat anjlok dari 65,21 di tahun 2020 menjadi 50,59 pada 2021, namun menunjukkan pemulihan hingga 55,45 di tahun 2023 (data 2024 tidak tersedia), mengindikasikan upaya konservasi dan penataan ruang yang mulai membuahkan hasil.

Dalam hal pengelolaan sampah, volume penanganan sampah terlayani relatif stagnan di angka 15.696 ton dari tahun 2020-2022, lalu sedikit meningkat menjadi 15.762 ton pada 2023 dan 2024. Di sisi lain, jumlah timbulan sampah yang dapat diolah juga meningkat dari 40.148 ton (2020-2023) menjadi 43.292 ton pada 2024, mengindikasikan meningkatnya kebutuhan terhadap kapasitas pengelolaan dan teknologi daur ulang sampah. Peningkatan ini menuntut penguatan kelembagaan dan sarana prasarana pengelolaan sampah yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Secara umum, meskipun tantangan masih ada, arah kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai menunjukkan perbaikan kualitas secara agregat, terutama pada tahun 2024. Ke depan, sinergi lintas sektor serta penguatan kapasitas daerah dalam pemantauan kualitas lingkungan dan pengelolaan sampah menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

11) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu pilar dasar dari pemerintahan. Ini adalah sistem yang mencatat informasi penting tentang penduduk suatu negara atau wilayah, termasuk kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan identifikasi personal lainnya untuk membantu memastikan hak-hak dasar individu, mendukung kebijakan pemerintah, dan melindungi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, sistem ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh populasi yang dapat dinilai berdasarkan capaian kinerja pelayanan penduduk. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilihat pada Tabel berikut, indikator-indikator untuk melihat capaian kinerja pelayanan kependudukan dilihat berdasarkan; Rasio penduduk ber-KTP, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Kepemilikan KTP, Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

Tabel 2.100

Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio penduduk ber-KTP	70,26	70,40	71,07	71,99	98,94
Rasio bayi berakte kelahiran	97,40	96,93	97,85	98,48	98,04
Rasio pasangan berakte nikah	25,04	32,62	38,80	44,89	50,14
Kepemilikan KTP	160.159	161.356	165.272	169.484	175.681
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	457,95	482,66	494,66	520,36	534,52
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	227.941	229.206	232.542	235.433	240.223
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	164.204	165.554	172.253	173.192	177.553

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Selama periode lima tahun, rasio penduduk ber KTP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan yang konsisten. Dari tahun 2019 hingga 2023, rasio penduduk yang memiliki KTP naik dari 70,26 persen

menjadi 98,94 persen. Ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kependudukan, seperti pembuatan KTP. Kemudian rasio bayi berakte kelahiran mengalami fluktuasi selama periode lima tahun. Pada tahun 2019, rasio ini sebesar 97,40 persen menurun tahun 2020 menjadi 96,93 persen, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 97,85 persen dan 98,84 persen, dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 98,04 persen. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Termasuk perubahan dalam kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan kelahiran, perubahan dalam kebijakan pelayanan kependudukan, atau perubahan dalam tindakan promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Data menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam rasio pasangan yang memiliki akte nikah selama periode lima tahun. Pada tahun 2019, rasio ini hanya sebesar 25,04 persen, namun meningkat secara signifikan menjadi 50,14 persen pada tahun 2023. Peningkatan signifikan ini mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pendaftaran pernikahan dan pelayanan kependudukan. Walaupun belum mencapai angka maksimal, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan konsistensi dalam pelayanan kependudukan terkait dengan pendaftaran pernikahan. Upaya edukasi dan sosialisasi terus-menerus dapat membantu mempertahankan tren positif ini dan memastikan bahwa semua pasangan memahami pentingnya memiliki akta nikah.

Kemudian indikator kepemilikan KTP, dari data yang disajikan dapat disimpulkan bahwa terjadi tren pertumbuhan positif dalam kepemilikan KTP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, jumlah kepemilikan KTP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 160.159, dan setiap tahunnya terjadi peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2020, jumlah kepemilikan KTP meningkat menjadi 161.356, kemudian mengalami pertumbuhan lebih lanjut pada tahun 2021 menjadi 165.272. Tahun 2022 mencatat peningkatan lagi hingga 169.484, dan pada tahun 2023,

angka kepemilikan KTP mencapai 175.681. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin tertarik dan aktif dalam mengurus dokumen identitas mereka. Pertumbuhan ini juga mencerminkan efektivitas pelayanan kependudukan dalam mengakomodasi kebutuhan penduduk.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk memberikan gambaran tentang sejauh mana pelayanan kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada tahun 2019, rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk adalah sebesar 457,95, yang mengindikasikan bahwa sekitar 46 persen penduduk baru lahir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memiliki akta kelahiran pada tahun tersebut. Tahun berikutnya, pada 2020, angka ini meningkat menjadi 482,66, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pencatatan kelahiran. Selanjutnya, pada tahun 2021, rasio tersebut naik lagi menjadi 494,66, menunjukkan komitmen yang terus meningkat dalam mengurus akta kelahiran. Pada tahun 2022, rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mencapai 520,36, menandakan bahwa pelayanan kependudukan terus berkembang dan lebih banyak kelahiran tercatat dengan baik. Pada tahun 2023, rasio ini meningkat menjadi 534,52, menandakan peningkatan yang berkelanjutan dalam pencatatan kelahiran. Hal ini mencerminkan upaya yang kuat dalam meningkatkan pelayanan kependudukan, terutama dalam hal pencatatan kelahiran.

Kemudian, dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2023, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan capaian kinerja pelayanan kependudukan yang signifikan. Capaian tersebut tercermin dari data ketersediaan database kependudukan skala kabupaten yang menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah penduduk mencapai 227.941 orang, yang kemudian meningkat menjadi 229.206 orang pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terus berlanjut, mencapai 232.542 pada tahun 2021, 235.433 pada tahun 2022, dan akhirnya mencapai 240.233 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, peningkatan ketersediaan database kependudukan dalam rentang waktu

tahun 2019 hingga 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencerminkan capaian positif dalam pelayanan kependudukan dan potensi untuk pengembangan lebih lanjut dalam hal pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Penting untuk terus memantau dan memelihara kualitas data serta memastikan bahwa pelayanan kependudukan terus meningkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selama periode 2019 hingga 2023, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat capaian kinerja yang positif dalam pelayanan kependudukan, terutama dalam hal penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah KTP Nasional yang diterbitkan selama periode tersebut. Pada tahun 2019, jumlah KTP Nasional berbasis NIK yang diterbitkan mencapai 164.204, lalu meningkat menjadi 165.554 pada tahun 2020, 172.253 pada tahun 2021, 173.192 pada tahun 2022, dan mencapai 177.553 pada tahun 2023. Dalam rangkaian peningkatan capaian kinerja pelayanan kependudukan, penting untuk terus memantau dan memelihara sistem penerbitan KTP Nasional berbasis NIK. Hal ini akan memastikan bahwa penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap mendapatkan layanan yang berkualitas dan bahwa data kependudukan tetap akurat.

12) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan fondasi utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, desa bukan hanya entitas administratif, melainkan pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi denyut nadi pembangunan nasional. Pemberdayaan desa bukan sekadar memberikan bantuan atau program pembangunan fisik, tetapi mencakup upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan mereka sendiri. Salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah peningkatan kapasitas aparatur desa dan

kelembagaan lokal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), kelompok tani, kelompok perempuan, dan pemuda desa. Dalam mengukur pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat berdasarkan Indeks Desa Membangun.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di desa. IDM mengidentifikasi status desa dalam cakupan survei dengan lima status yakni Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Perkembangan IDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada Tabel 2.101.

Tabel 2.101

Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Kategori Desa	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mandiri	0	0	0	4	6
Maju	10	11	10	18	21
Berkembang	41	44	41	40	37
Tertinggal	20	17	20	11	9
Sangat Tertinggal	2	1	2	0	0

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2024

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 dapat diketahui bahwa desa terbagi menjadi

desa 1) Mandiri 2) Maju 3) Berkembang 4) Tertinggal dan 5) Sangat Tertinggal. Secara umum desa-desa pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, didominasi oleh desa Kategori Berkembang yang jumlah rata-rata tiap tahunnya selalu di atas 40 desa berkembang. Sementara itu, desa dengan jumlah paling sedikit ditempati oleh desa dengan Kategori Sangat Tertinggal yang jumlahnya hanya 5 desa tertinggal dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum desa-desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih ada di tahap berkembang menuju desa maju. Ini mengindikasikan bahwa pembangunan desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah mulai nampak perkembangannya. Melalui indeks desa membangun dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih ada ditahap berkembang menuju sejahtera dan maju.

13) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk merupakan objek dan subjek dalam pembangunan. Apabila dikelola dengan baik, maka penduduk akan menjadi modal pembangunan yang sangat esensial untuk maju dan terus berkembang. Penduduk dan pembangunan memiliki kaitan yang erat. Hubungan antara keduanya adalah bersifat timbal balik atau resiprokal. Artinya di satu sisi, perubahan yang terjadi pada variabel- variabel kependudukan disebabkan oleh pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Tetapi di sisi lain, pembangunan juga dipengaruhi oleh perubahan variabel-variabel kependudukan. Salah satu aspek penting dari proses demografi yang terkena dampak pembangunan adalah fertilitas atau kelahiran. Sementara itu variabel penting dalam menjelaskan fertilitas adalah usia perkawinan. Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102

Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,10	0,64	0,94	0,99	1,03
Total Fertility Rate (TFR)	2,75	4,00	2,36	2,34	2,25
Peserta Program KB Aktif (Jiwa)	39.916	25.447	26.600	29.106	28.424
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR)	54,48	69,16	69,16	74,02	73,19
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	14,67	12,10	17,76	8,8	6,52
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ ASFR 15-19 Tahun)	63,00	74,14	63,03	25,20	22,42
Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	NA	54,43	54,43	59,55	61,06

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki laju pertumbuhan penduduk yang fluktuatif sejak tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2023, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) meningkat menjadi 0,99 persen, naik sebesar 0,05 persen dibandingkan tahun 2022 yang tercatat 0,94 persen. Dari sisi angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR), tahun 2021 mencatat nilai tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 4,00, sebelum menurun secara signifikan menjadi 2,34 di tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 2,25 pada tahun 2024. Penurunan angka kelahiran ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor seperti perubahan pola perkawinan, efektivitas penggunaan kontrasepsi, serta kondisi biologis pasca persalinan dan menyusui.

Hal tersebut selaras dengan tren peserta program KB aktif, yang mengalami penurunan drastis dari 39.916 jiwa pada tahun 2020 menjadi 25.447 jiwa pada tahun 2021, yang bertepatan dengan meningkatnya angka kelahiran di tahun tersebut. Namun demikian, jumlah peserta KB kembali meningkat menjadi 26.600 jiwa pada tahun 2022, dan mencapai 29.106 jiwa pada 2023, menunjukkan pemulihan partisipasi terhadap program KB.

Angka prevalensi kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR*) juga menunjukkan tren yang membaik. Setelah sempat berada di

angka 54,48 persen pada tahun 2020, MCPR meningkat menjadi 69,16 persen pada 2021 dan 2022, dan naik lagi menjadi 74,02 persen pada 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 73,19 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan usia reproduktif di daerah ini semakin memiliki akses dan kesadaran dalam penggunaan metode kontrasepsi modern.

Sementara itu, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) mengalami tren menurun yang cukup signifikan, dari 14,67 persen pada tahun 2020, menjadi 12,10 persen pada 2021, kemudian naik menjadi 17,76 persen pada 2022, tetapi turun drastis menjadi 8,8 persen pada 2023 dan kembali menurun menjadi 6,52 persen di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam layanan KB dan perluasan akses terhadap informasi serta alat kontrasepsi.

Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) menunjukkan penurunan tajam dari 74,14 pada 2021 menjadi 25,20 pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 22,42 pada 2024, menunjukkan keberhasilan dalam upaya pencegahan kehamilan remaja. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan setiap tahun, dari 54,43 pada tahun 2021 dan 2022, menjadi 59,55 pada tahun 2023, dan naik kembali menjadi 61,06 pada tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan perbaikan dalam dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga sebagai hasil dari program-program pembangunan keluarga yang terintegrasi.

14) Urusan Perhubungan

Aspek perhubungan merupakan salah satu layanan urusan wajib yang memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Perencanaan perhubungan harus mempertimbangkan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan terminal, yang penting untuk mendukung mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi. Ini termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk

memastikan aksesibilitas dan keamanan, serta pengembangan transportasi umum yang efisien dan ramah lingkungan untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Selain itu, penting juga untuk mengintegrasikan sistem transportasi dengan kawasan strategis, yang akan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan konektivitas antarwilayah juga krusial, terutama di daerah yang terluar, untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang setara ke layanan dan fasilitas.

Selanjutnya, dalam konteks perencanaan perhubungan, perlu diintegrasikan aspek keselamatan dan keamanan transportasi. Hal ini mencakup penerapan standar keselamatan yang ketat untuk semua moda transportasi, pengawasan yang efektif, serta respons cepat terhadap situasi darurat. Pengembangan teknologi informasi dalam sistem transportasi, seperti sistem informasi geografis (GIS) dan aplikasi berbasis teknologi untuk memantau dan mengatur lalu lintas, juga dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan. Di samping itu, kebijakan perhubungan harus inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak, dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang ramah dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, sektor perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup warganya.

Tabel 2.103

Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas	81,8	81,8	81,8	81,8
Konektivitas Laut	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	33,33	6,00	6,00	6,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Tabel 2.103 memberikan gambaran umum terkait Kinerja sektor perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode 2021-2024 menunjukkan dinamika yang perlu mendapat perhatian dalam kerangka penguatan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Evaluasi indikator kunci menunjukkan adanya penurunan dan stagnasi pada sejumlah parameter utama yang merefleksikan tantangan dalam mewujudkan konektivitas wilayah yang optimal.

Rasio konektivitas sebagai indikator utama yang mencerminkan keterhubungan infrastruktur transportasi antar kawasan mengalami penurunan tajam. Pada tahun 2021 sampai 2024, rasio konektivitas tercatat sebesar 81,8 persen. Dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terdapat 2 kecamatan yang belum memiliki trayek angkutan transportasi darat dari atau ke Ibu kota Kabupaten. Hal ini menunjukkan masih belum optimal dalam mendukung mobilitas antarwilayah yang efisien dan efektif. Selain itu juga mengindikasikan keterbatasan aksesibilitas serta belum optimalnya distribusi infrastruktur transportasi darat di daerah.

Persentase kelengkapan jalan terhadap kondisi ideal juga mengalami stagnasi. Setelah mencatat angka 33,33 persen pada tahun 2021, capaian indikator ini turun drastis menjadi 6,00 persen pada tahun 2022 dan tetap berada di angka yang sama hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan lambatnya perkembangan pembangunan atau peningkatan kualitas jaringan jalan, baik dalam kuantitas maupun pemenuhan standar teknis jalan sesuai kondisi ideal yang ditetapkan. Secara keseluruhan, kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal perluasan dan pemeliharaan jaringan transportasi darat, serta pengembangan konektivitas laut yang belum tergarap. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan strategis yang mencakup perencanaan infrastruktur terpadu, peningkatan alokasi anggaran, penguatan kemitraan dengan sektor swasta, serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi

berbasis data untuk mendorong akselerasi pembangunan sektor perhubungan yang inklusif dan berkelanjutan.

15) Urusan Komunikasi dan Informatika

Data persentase aplikasi informatika yang dimanfaatkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan pemerintahan dan administrasi daerah. Indikator ini mengukur seberapa besar aplikasi-aplikasi informatika yang telah dilaksanakan dan digunakan dibandingkan dengan target aplikasi yang direncanakan, memberikan gambaran mengenai kemajuan digitalisasi pemerintah daerah.

Pemanfaatan aplikasi informatika dalam pelayanan pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan digitalisasi dan efisiensi layanan publik. Data persentase aplikasi informatika yang dimanfaatkan mencerminkan sejauh mana perangkat teknologi informasi yang tersedia telah diadopsi secara optimal dalam mendukung berbagai fungsi administrasi dan pelayanan kepada masyarakat selama periode 2020 hingga 2024.

Tabel 2.104

Persentase Aplikasi Informatika yang Dimanfaatkan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Rumusan/ Formulasi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Aplikasi Informatika yang Dimanfaatkan	Jumlah Aplikasi yang dimanfaatkan dibagi jumlah target aplikasi dikali seratus persen	-	-	-	10/14*100	11/14*100
Nilai		-	-	-	71,43	78,57

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Data persentase aplikasi informatika yang dimanfaatkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2023, persentase pemanfaatan tercatat

sebesar 71,43% dari total target aplikasi yang direncanakan, meningkat menjadi 78,57% pada tahun 2024. Persentase ini dihitung berdasarkan jumlah aplikasi yang benar-benar dimanfaatkan dibandingkan dengan target aplikasi yang ditetapkan, yang berarti semakin banyak aplikasi dari target yang berhasil dioperasikan secara efektif. Meskipun data tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia, tren peningkatan ini menandakan adanya kemajuan yang signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk mendukung proses digitalisasi pemerintahan daerah. Peningkatan ini juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aplikasi teknologi informasi guna mempercepat pelayanan publik, mempermudah akses informasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk menjaga dan memperkuat tren positif ini, perlu terus dilakukan evaluasi aplikasi yang dimanfaatkan, pelatihan pengguna agar dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut, serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat mewujudkan pemerintahan yang modern dan berdaya saing tinggi di era digital.

16) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (KUKM) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional sekaligus kekuatan ekonomi kerakyatan yang tersebar luas di seluruh pelosok daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, peran KUKM sangat strategis karena mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing masyarakat secara langsung. Dalam konteks perencanaan daerah, KUKM harus dipandang bukan hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial. Koperasi, misalnya, tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas, memperbaiki akses terhadap pembiayaan dan pasar, serta melatih anggotanya

untuk mandiri dan partisipatif. Perkembangan dalam urusan koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105

Capaian Kinerja Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi yang Aktif	50	72	81	87	103
Persentase KSP/USP Aktif	N/A	7	10	12	17
Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	N/A	50	30	20	47
Persentase Koperasi sehat	N/A	56	64	52,31	81
Persentase Koperasi yang mendapatkan Diklat perkoperasian	N/A	51	59	29,23	95
Persentase Koperasi Mandiri	N/A	0	2,08	4,17	6,25
Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	N/A	14,15	20,24	16,59	23,21
Persentase Usaha Mikro Aktif	N/A	64,04	64,81	54,97	57,86
Persentase Usaha Menengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan: N/A(Not Available)

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Berdasarkan data capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diketahui bahwa persentase koperasi aktif terus meningkat dari tahun 2020 sebanyak 50 hingga tahun 2024 sebanyak 103 koperasi yang aktif. Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang semakin membaik disetiap tahunnya. Di sisi lain, persentase Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP) yang aktif dari tahun 2020 hingga tahun 2024, relatif kecil berkisar hanya 7-17 persen. Sementara itu, persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi mengalami fluktuasi dari tahun 2021 sebesar 50 persen kemudian menurun menjadi 30 persen di tahun 2022, hingga akhirnya meningkat di tahun 2024 sebesar 47 persen. Di sisi lain persentase koperasi sehat rata-rata terus meningkat dari tahun 2021 sebesar 56 persen hingga akhirnya meningkat di tahun 2024 sebesar 81 persen. Begitupula dengan persentase koperasi yang mendapatkan diklat persentasenya terus meningkat dari tahun

2021 sebesar 51 persen hingga tahun 2024 sebesar 95 persen. Namun di sisi lain persentase koperasi mandiri hanya mengalami perkembangan persentase berkisar 2-6 persen hingga tahun 2024. Data ini mengindikasikan bahwa perkembangan jumlah koperasi tidak diringi dengan kemandirian koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur urusan mengenai usaha menengah sepenuhnya diserahkan pada level provinsi, sehingga tidak mengurus usaha menengah dan hanya urusan mikro. Dalam ranah usaha mikro hingga tahun 2024 rata-rata persentasenya selalu di atas 50 persen, persentase ini terbilang besar dan menunjukkan adanya perkembangan usaha mikro aktif yang semakin baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sejalan dengan perkembangan usaha mikro aktif yang semakin baik, persentase usaha mikro yang difasilitasi juga semakin meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2024 meskipun persentasenya tidak sampai 50 persen. Perkembangan urusan koperasi dan usaha mikro yang semakin baik ini ditunjang oleh berbagai faktor seperti modal, kualitas produk, dan pemasaran dari koperasi dan usaha mikro. Hal ini dapat menjadi potensi pertumbuhan ekonomi yang baik bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depannya.

17) Urusan Penanaman Modal

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, urusan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Dalam melihat tren investasi penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat berdasarkan Kinerja Penanaman Modal dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Adapun data kinerja penanaman modal dapat dilihat pada Tabel 2.106

Tabel 2.106
Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2023

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)	225	326	392	486
Jumlah Investor Berskala Internasional (PMA)	-	-	-	3
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (milyar rupiah)	2.539.258	286.291	264.244	537.514
Jumlah nilai investasi berskala internasional (PMA) (milyar rupiah)	1.183.081	29.573	22.583	29.288

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2023

Berdasarkan data kinerja penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat beberapa tren yang dapat dilihat. Pertama, jumlah investor berskala nasional (PMDN) mengalami peningkatan yang signifikan dari 225 pada tahun 2020 menjadi 486 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meningkat dalam periode tersebut. Namun, untuk investor berskala nasional (PMA), data menunjukkan tren yang berbeda. Jumlah investor PMA mengalami penurunan drastis menjadi 0 pada tahun 2020 hingga 2022 dan kembali menjadi 3 investor pada tahun 2023. Penurunan ini dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpastian regulasi, perubahan kebijakan investasi, atau faktor ekonomi lainnya yang memengaruhi minat investor asing untuk berinvestasi di Tanjung Jabung Timur.

Data menunjukkan jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) dan (PMA). Nilai investasi PMDN mengalami penurunan dari tahun 2020 mencapai Rp 2.539 Triliun Rupiah tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun-

tahun berikutnya. Sementara itu, nilai investasi PMA mencatat angka yang tinggi pada tahun 2020, tetapi kemudian menurun drastis pada tahun-tahun berikutnya. Analisis data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil menarik minat investor berskala nasional (PMDN) dalam beberapa tahun terakhir, namun membutuhkan perhatian lebih dalam menggaet investor asing (PMA). Adapun pengaruh dari iklim investasi tersebut, terlihat dari nilai investasi pada sektor-sektor yang ada di Tanjung Jabung Timur yang menjadi tidak stabil. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.107

Nilai Investasi Berdasarkan Sektor Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2023 dalam Miliar Rupiah

Sektor	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Pertanian	70.539	112.87	84.857	114.501
Industri Makanan	5.243.589	136.993	167.738	405.230
Industri Kimia	1.012	4.142	6.027	9.146
Peternakan	16.805	19.873	-	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2023

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa secara umum nilai investasi yang besar selalu dimiliki oleh sektor pertanian dan industri perdagangan, hal ini mengingat bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang sebagian masyarakatnya adalah petani dan memiliki potensi pertanian yang besar. Namun, sektor pertanian menunjukkan fluktuasi nilai investasi yang signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan, sebelum akhirnya mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan 2023. Faktor pendorong fluktuasi nilai investasi di Tanjung Jabung Timur dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan harga komoditas sektor pertanian yang kurang stabil dan kondisi ekonomi nasional yang terguncang akibat pandemi COVID-19.

Tabel 2.108
Nilai Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2023

Sektor	Nilai			
	2020	2021	2022	2023
Perdagangan	-	9.377	1.924	14.161
Reparasi	-	-	-	790
Konstruksi dan Jasa Lainnya	435	10.199	6.510	9.246
Listrik	-	22.432	-	-
Real Estate	143	1.770	-	-
Total	5.261.076	305.038	266.056	566.741

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Kemudian, sektor industri makanan menunjukkan peningkatan nilai investasi yang konsisten dari tahun ke tahun, menunjukkan daya tarik dan potensi sektor ini dalam menarik investasi. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan akan produk makanan, sehingga Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi pasar yang besar, dan keberlanjutan sektor dapat menjadi salah satu hal yang menjanjikan di masa depan. Selanjutnya, sektor peternakan juga mengalami peningkatan nilai investasi yang cukup stabil. Hal ini berkaitan erat dengan potensi sumber daya alam dan pertanian yang mendukung sektor peternakan di Tanjung Jabung Timur yang juga menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi yang besar. Sedangkan beberapa sektor seperti perdagangan, industri lainnya, serta konstruksi dan jasa lainnya menunjukkan fluktuasi nilai investasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sebab sektor ini didominasi oleh konstruksi negara yang besarannya tergantung pada anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kemudian, fluktuasi pada sektor perdagangan dan industri dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi pasar, perubahan kebijakan, dan tingkat permintaan dari masyarakat yang cenderung fluktuatif.

18) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang

memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dalam definisi tersebut, maka karakteristik penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh pemuda dengan usia angkatan kerja. Penduduk usia angkatan kerja tersebut seharusnya menjadi potensi bagi kemajuan Tanjung Jabung Timur, namun upaya optimal untuk pemberdayaan pemuda ini belum cukup dilakukan.

Tabel 2.109
Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	46	46	46	46	46
Persentase Wirausaha Muda terhadap total wirausaha	0,47	0,50	0,58	0,61	0,73
Jumlah organisasi olahraga	31	31	31	31	31
Jumlah prestasi olahraga	NA	NA	NA	NA	26
Jumlah atlet berprestasi	NA	NA	NA	NA	170
Jumlah pemuda berwirausaha	283	306	375	416	542
Jumlah pemuda berprestasi selain olahraga	NA	NA	43	46	NA

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Dari sisi kelembagaan dan pengembangan organisasi pemuda, tidak terdapat perkembangan berarti dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Persentase organisasi pemuda yang aktif tercatat tetap stagnan di angka 46 persen selama lima tahun berturut-turut. Demikian pula dengan jumlah organisasi olahraga yang tidak mengalami peningkatan, yakni tetap sebanyak 31 organisasi sejak tahun 2020 hingga 2024. Sementara itu, jumlah atlet berprestasi sempat mencapai 210 orang pada tahun 2022, namun menurun menjadi 170 orang dan tidak mengalami perubahan hingga 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas organisasi pemuda maupun dukungan terhadap bidang olahraga belum mendapatkan perhatian yang optimal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Minimnya dinamika dalam

pembinaan organisasi dan olahraga mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih progresif untuk mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan sosial, kepemimpinan, dan prestasi olahraga.

Sebaliknya, dari sisi kewirausahaan, tren menunjukkan perkembangan yang lebih positif. Data menunjukkan bahwa jumlah pemuda yang berwirausaha meningkat secara konsisten dari 283 orang pada tahun 2020 menjadi 542 orang pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya minat yang terus tumbuh dalam bidang kewirausahaan di kalangan pemuda. Namun, perlu dicermati bahwa persentase wirausaha muda terhadap total wirausaha justru tercatat sangat rendah pada tahun 2024, yaitu hanya sebesar 0,73 persen. Angka ini menurun tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan tren meningkat, dari 56,6 persen di tahun 2020 hingga mencapai 83,6 persen pada tahun 2023. Penurunan drastis tersebut menandakan adanya kemungkinan perubahan metode perhitungan atau ketidaksesuaian data pada tahun terakhir, yang perlu ditindaklanjuti.

Selain itu, prestasi pemuda di luar bidang olahraga juga mengalami sedikit peningkatan, dari 43 prestasi pada tahun 2022 menjadi 46 prestasi pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa pemuda di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi dalam bidang wirausaha dan prestasi non-olahraga yang patut untuk terus dikembangkan melalui program-program pendampingan, pelatihan keterampilan, serta akses terhadap permodalan dan jaringan usaha.

19) Urusan Statistik

Indeks Pembangunan Statistik merupakan indikator penting yang menggambarkan kapabilitas suatu daerah dalam mengelola data statistik sebagai fondasi untuk perencanaan pembangunan yang berbasis bukti. Indeks ini mencerminkan kualitas, ketersediaan, dan kemajuan pengelolaan informasi statistik yang sangat diperlukan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang akurat dan terukur. Melalui pengembangan indeks ini, pemerintah daerah

diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola data statistik guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika perubahan yang terjadi di tingkat lokal maupun nasional.

Tabel 2.110
Data Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Statistik	-	-	-	1,15 (Cukup)	2,20 (Cukup)

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Meskipun data untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 tidak tersedia, capaian pada tahun 2023 dan 2024 memberikan gambaran positif mengenai kemajuan pembangunan statistik di daerah ini. Pada tahun 2023, IPS tercatat sebesar 1,15 yang menunjukkan kategori "Cukup", menandakan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik yang dihasilkan serta pengelolaan sistem statistik daerah yang mulai lebih terstruktur dan terintegrasi. Peningkatan ini menjadi indikator penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

Memasuki tahun 2024, Indeks Pembangunan Statistik mengalami lonjakan signifikan menjadi 2,20, yang menunjukkan kemajuan yang lebih baik dan konsolidasi yang kuat dalam pengembangan sistem statistik daerah. Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta teknologi informasi yang mendukung pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik. Dengan IPS yang semakin meningkat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin mampu menyediakan data yang akurat dan

relevan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan

20) Urusan Persandian

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan Persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi; dan memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Pelaksanaan persandian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah tahun 2019-2023 pada Tabel 2.111.

Tabel 2.111

Kinerja Persandian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Dari data yang tersedia, terlihat bahwa persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020 hingga 2024 tetap rendah, yaitu sebesar 9,3 persen dari 100 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kabupaten ini menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan persandian yang memadai dalam komunikasi antar perangkat

daerah. Persentase yang rendah ini mengakibatkan beberapa konsekuensi penting dalam konteks keamanan data dan sistem informasi pemerintahan.

Keamanan data dan sistem informasi pemerintahan adalah aspek kritis dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi penting yang digunakan oleh entitas pemerintahan. Dalam lingkungan digital yang semakin kompleks dan potensi ancaman yang semakin berkembang, teknologi persandian menjadi sarana utama untuk melindungi data sensitif dan menjaga keamanan komunikasi. Keterbatasan dalam adopsi teknologi persandian dapat meningkatkan risiko terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data, serta potensi gangguan dalam komunikasi antar perangkat daerah.

21) Urusan Kebudayaan

Tata kelola pengembangan kebudayaan telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang pemajuan kebudayaan. Maka atas dasar tersebut pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dalam upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diselenggarakan melalui kebijakan teknis bidang kebudayaan, pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengelolaan cagar budaya, kesenian dan sejarah, hingga pemberdayaan dan pengembangan pemuda berbudaya.

Tabel 2.112

Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	2	2	2	5	5
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	23,8	24	28	23,8	24
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	2	2	2	10

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Kondisi tersebut digambarkan dari data yang menunjukkan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sejak tahun 2020-2022 tidak mengalami perubahan yakni hanya sebanyak 2 festival, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 5 festival. Sedangkan dari sisi persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan adanya peningkatan sebesar 28 persen di tahun 2022 dari 23,8 persen pada tahun 2020, namun menurun menjadi 23,8 persen pada tahun 2023. Lalu kembali meningkat menjadi 24 persen pada tahun 2024. Selain itu dari sisi karya budaya yang direvitalisasi mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2021-2023 hanya sebanyak 2 karya menjadi 10 karya pada tahun 2024.

Hal ini menunjukkan kondisi permasalahan dalam hal belum maksimalnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, belum lengkap terdatanya beda peninggalan sejarah dan rendahnya pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata (Dokumen LPPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2024). Maka perlu adanya perhatian pemerintah dalam hal pelestarian dan pengembangan budaya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

22) Urusan Perpustakaan

Indonesia menjadi negara pada urutan kedua terbawah pada ruang lingkup literasi yang ada di dunia, kondisi ini menggambarkan kondisi minat baca masyarakat di Indonesia sangat rendah yakni sebesar 0,001 persen (UNESCO. 2022). Angka tersebut bermakna dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Badan Pusat Statistik memberikan laporan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia secara keseluruhan berada di angka 59,52, dengan durasi membaca 4-5 jam per minggu dan 4-5 buku per triwulan (BPS, 2022).

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, data perkembangan perpustakaan umum selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga 2024 dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, rasio perpustakaan persatuan

penduduk, jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, persentase pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat, dan jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun pada Tabel 2.113.

Tabel 2.113
Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	6.460	6.720	11.576	14.500	16.450
Rasio Perpustakaan per satuan penduduk	357	357	357	357	357
Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	10.576	10.576	10.576	10.576	11.717
Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1,01	1,01	1,01	1,01	1.01
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	538	560	964	1.208	1.370

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Tingkat kunjungan ke perpustakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah pengunjung tercatat sebanyak 6.460 orang, kemudian mengalami peningkatan menjadi 6.720 orang pada tahun 2021, 11.576 orang pada 2022, 14.500 orang pada 2023, dan mencapai angka tertinggi sebanyak 16.450 orang pada tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan juga meningkat dari 538 orang pada 2020 menjadi 1.370 orang per bulan pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan minat masyarakat terhadap layanan perpustakaan umum di daerah.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pengguna potensial perpustakaan, tingkat kunjungan tersebut masih tergolong rendah. Hal ini turut dipengaruhi oleh rendahnya rasio tenaga pustakawan bersertifikat, yang sejak tahun 2020

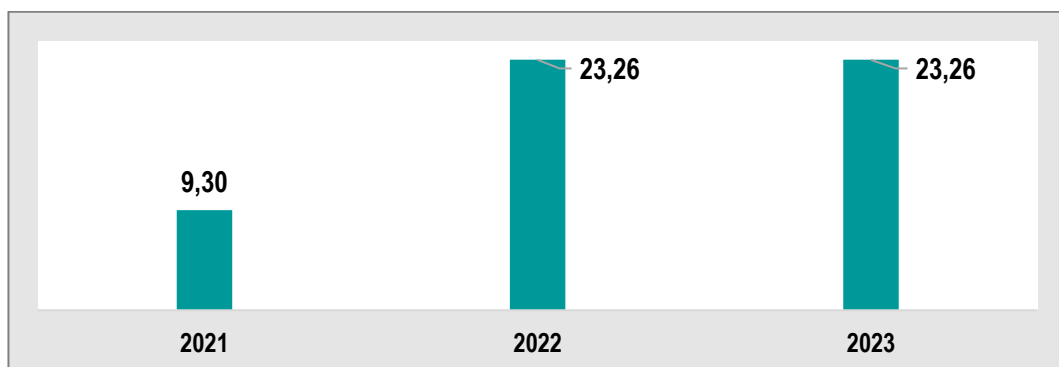
hingga 2024 stagnan pada angka 1,01 persen, tanpa menunjukkan adanya peningkatan. Keterbatasan jumlah tenaga profesional yang kompeten di bidang perpustakaan menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan pelayanan dan kualitas pengelolaan perpustakaan daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan kunjungan, optimalisasi fungsi perpustakaan belum sepenuhnya tercapai, baik dari sisi SDM pustakawan maupun dari upaya perluasan akses dan promosi literasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi antara peningkatan kapasitas pustakawan, pengembangan koleksi buku, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara lebih merata.

23) Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip daerah merupakan aspek penting dari administrasi pemerintahan yang seringkali terlupakan tetapi memiliki dampak yang signifikan pada efisiensi, akuntabilitas, dan pemeliharaan warisan sejarah daerah. Pengelolaan kearsipan daerah atau kinerja pengelolaan arsip daerah merupakan faktor penting dalam pemeliharaan sejarah, efisiensi operasional, dan akuntabilitas pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dapat dilihat dari Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku pada Gambar 2.74.

Gambar 2.74
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Berdasarkan data yang disajikan menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan arsip di tingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih sangat rendah. Persentase OPD pada dari tahun 2021 berjumlah 9,3 persen yang meningkat pada tahun 2023 dengan persentase 23,26 persen. Walaupun sudah menunjukkan upaya yang signifikan untuk menaikkan persentase OPD yang mengelola arsip secara baku, namun angka tersebut masih sangat jauh. Tingkat pengelolaan arsip yang rendah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah masalah serius yang perlu segera diatasi. Peningkatan sumber daya, kesadaran, dan penegakan aturan dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di seluruh OPD dan mencegah potensi risiko hukum serta kerugian administratif.

24) Urusan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang dimaksud dengan urusan kelautan dan perikanan adalah segala urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan. Indikator yang digunakan untuk mengukur urusan ini adalah 1) Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan 2) Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi). Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur hal yang menjadi akar permasalahan dari urusan kelautan dan perikanan adalah kesejahteraan nelayan dan pembudidaya masih rendah . Penyebab dari permasalahan ini antara lain laut pesisir dan pulau-pulau kecil belum menjadi sumber nilai tambah ekonomi, hal ini dapat dilihat dari indikator rendahnya pertumbuhan produksi sektor perikanan terhadap PDRB.

Berdasarkan data jumlah produksi sektor perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diketahui bahwa sektor perikanan perairan laut mendominasi produksi ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari tahun 2020 jumlah produksi ikan sebesar 26.834,44, mengalami penurunan di tahun 2021 hingga tahun 2020 dan kemudian mengalami peningkatan di tahun 2023

sebesar 27.461,40. Peringkat kedua terdapat perikanan kolam yang juga mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2022 hingga akhirnya mencapai puncak produksi perikanan tertinggi di tahun 2023. Pada peringkat ketiga terdapat jenis ikan perairan umum yang juga mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Peringkat keempat diikuti dengan ikan jenis tambak, keram jaring apung dan mina padi. Meningkatnya jumlah produksi ikan di tahun 2020 hingga tahun 2023 secara keseluruhan di tahun 2020 sebesar 27.986,0 hingga akhirnya mencapai puncaknya di tahun 2023 sebesar 28.765,05 menunjukkan bahwa sektor perikanan mengalami pertumbuhan produksi ikan yang baik. Hal ini dapat menjadi potensi ekonomi di sektor perikanan bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 2.114
Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun 2020-2023

Perikanan	Tahun Produksi (Ton)			
	2020	2021	2022	2023
Perairan Laut	26.834,44	24.503,61	23.543,72	27.461,40
Perairan Umum	347,91	321,54	311,02	335,9
Kolam	522,06	531,92	354,02	660,65
Tambak	273,18	275,92	510,23	296,9
Keramba Jaring Apung (KJA)	-	-		-
Mina Padi	8,41	8,48	9,9	11,2
Jumlah (Ton)	27.986,00	25.641,47	24.728,89	28.765,05

Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

Selain produksi, perkembangan sektor perikanan yang lain di antaranya Jumlah Olahan Hasil Perikanan, Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat dan Benih Ikan. Pada Periode 2020-2024 untuk ke tiga sektor perikanan tersebut mengalami penurunan. Jumlah Olahan Hasil Perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat dari tahun 2020 sebesar 901,5 meningkat menjadi 11.386,85 ton pada tahun 2023. Tingkat Konsumsi Ikan masyarakat meningkat dari 37,55 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 39 Kg/Kapita pada tahun 2024. Produksi Benih Ikan meningkat sebesar 594.100 ekor pada tahun 2020 menjadi 767.926 ekor pada tahun 2023. Perkembangan Jumlah Olahan Hasil

Perikanan, Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat dan Benih Ikan dapat dilihat pada Tabel 2.115.

Tabel 2.115

Perkembangan Jumlah Olahan Hasil Perikanan, Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat dan Produksi Benih Ikan Tahun 2020-2024

Sub Sektor	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Olahan Hasil Perikanan	901,5	9.198,60	10.326,60	11.386,85	-
Benih Ikan/Ekor	594.100	605.982	698.115	767.926	-
Tingkat Konsumsi ikan Masyarakat	37,55	39,4	42,28	46,18	39 Puluh Kkal/Hari

Sumber: LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

25) Urusan Pariwisata

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki keanekaragaman alam dan budaya cukup kaya, dengan pesisir langsung menghadap Selat Malaka dan hutan rawa di dalamnya. Wilayah ini menawarkan destinasi seperti Taman Nasional Berbak, hutan mangrove, pantai, mata air panas, dan situs sejarah, menjadikan sektor pariwisata sebagai potensi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selain itu, keanekaragaman ekosistem di Tanjung Jabung Timur, yang mencakup spesies tumbuhan dan hewan yang langka, menawarkan peluang untuk ekowisata dan pengamatan satwa liar. Dengan konektivitas yang baik melalui berbagai moda transportasi darat, sungai, dan laut, Tanjung Jabung Timur dapat diakses secara relatif mudah oleh pengunjung dari berbagai wilayah, walaupun infrastruktur yang ada masih perlu ditingkatkan. Salah satu aspek infrastruktur yang perlu perbaikan adalah terkait dengan jumlah tempat tidur, yang merupakan faktor penting bagi wisatawan saat merencanakan perjalanan ke suatu lokasi.

Keterbatasan tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara langsung memengaruhi data mengenai durasi kunjungan wisatawan. Meskipun begitu, jumlah pengunjung ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur

terus menunjukkan perkembangan yang baik dari tahun 2020 hingga 2024. Secara lebih rinci, hal ini dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.116
Kinerja Pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	25,687	38,974	59,517	46,447	48,120
Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2	2	2	2	2
Jumlah Destinasi Wisata	12	12	13	13	13
Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengelola Objek Wisata	7	7	7	8	8

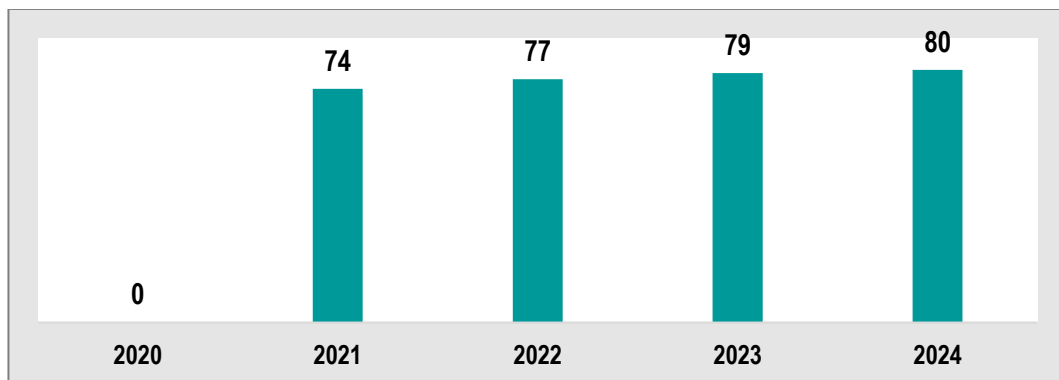
Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Berdasarkan data kinerja pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan wisata (orang) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimulai pada tahun 2020 sebesar 25,687 orang kemudian terus meningkat hingga tahun 2024 mencapai 48,120 orang. Meningkatnya jumlah wisatawan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti keindahan alam, daya tarik budaya, promosi yang efektif, kemudahan akses, dan peningkatan kualitas layanan pariwisata.

Berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah wisatawan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, rata-rata lama tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif stagnan dari tahun 2020 selama 2 hari tinggal hingga tahun 2024 juga selama 2 hari tinggal. Selain rata-rata lama tinggal yang relatif stagnan, jumlah destinasi wisata juga relatif stagnan keberagamannya dari tahun 2020 sebanyak 12 jenis destinasi wisata kemudian menjadi 13 jenis destinasi wisata di tahun 2024. Selama kurun waktu lima tahun terakhir hanya terjadi penambahan 1 jenis destinasi wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini juga sejalan dengan jumlah kelompok masyarakat yang mengelola objek wisata dari tahun 2020 sebanyak 7 kelompok masyarakat hingga tahun 2024 sebanyak 8 kelompok masyarakat yang mengelola objek

wisata. Selama lima tahun terakhir juga hanya terjadi penambahan 1 kelompok masyarakat yang mengelola objek wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Meskipun jumlah kelompok masyarakat yang mengelola objek wisata relative stagnan dari tahun 2020-2024, namun fasilitas rumah makan di Kabupaten Tanjung Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 74 rumah makan terus meningkat menjadi 80 rumah makan di tahun 2024. Sementara itu jumlah rumah makan dan minum pada tahun 2020 belum diketahui jumlahnya (data tidak tersedia).

Gambar 2.75
Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Data-data ini mencerminkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi untuk terus dikembangkan ke depannya. Semakin beragamnya jumlah rumah makan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat menjadi daya tarik untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depannya.

26) Urusan Pertanian

Urusan pertanian adalah segala urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan petani. Pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang menopang kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar dalam

mengembangkan pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional dan sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Dalam konteks pembangunan daerah, urusan pertanian tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sektor pertanian daerah meliputi produksi pertanian, luas lahan, produktivitas pertanian, pendapatan petani, serta berbagai indikator lainnya. Indikator tersebut memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan sektor pertanian, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai indikator tersebut dirangkum oleh capaian kinerja pertanian seperti disajikan dalam Tabel berikut ini. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, kinerja makro sektor pertanian cukup fluktuatif.

Tabel 2.117
Kinerja Sektor Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	24,16	23,14	21,44	24,22	24,16
Pertumbuhan Sektor Pertanian	2,54	0,13	2,50	4,92	2,93

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Berdasarkan data kinerja sektor pertanian dapat diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2020 hingga tahun 2024 sama-sama mengalami fluktuasi. Adanya fluktuasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan pertumbuhan sektor pertanian menunjukkan bahwa kinerja sektor pertanian belum stabil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Belum optimalnya kinerja sektor pertanian ini, kemungkinan bisa

disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selain melihat pada kinerja sektor pertanian, urusan pertanian juga dapat dilihat dari jumlah sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan data jumlah produksi sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2021 hingga tahun 2024 yang mengalami stabilitas dan fluktuasi pada jenis tertentu. Penyebab dari fluktuasi jumlah produksi sektor pertanian, dikarenakan oleh beberapa faktor seperti iklim cuaca yang tidak menentu sehingga menyulitkan para petani untuk bercocok tanam. Pembatasan aktivitas selama pandemi Covid 19 juga mempengaruhi dalam produksi padi dan Jagung. Produksi Kedelai, kacang tanah, pada periode 2021 -2024. Adapun rincian lengkap mengenai jumlah produksi sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Tabel 2.118.

Tabel 2.118
Jumlah Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021-2024

Jenis	Produksi Hasil Pertanian (Ton)			
	2021	2022	2023	2024
Padi (ton)	31.485	35.867	36.229	36.362
Jagung (ton)	10.974	5.614	4.197	4.278
Kedelai (ton)	195	202	206	71,02
Kacang Tanah (ton)	47	62	63	74
Kacang Hijau (ton)	3,42	3,48	0	2,22
Ubi Kayu (ton)	2.201	2.741	2.381	2.397
Ubi Jalar (ton)	853	1.047	789	910

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Jumlah produksi sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 hingga tahun 2024 menunjukkan adanya stabilitas pada jenis pertanian padi dan kedelai. Sementara itu pada jenis lainnya menampilkan angka fluktuasi yang cukup signifikan, pada jenis jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Angka statistik ini mencerminkan bahwa produksi hasil pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah stabil dan kuat pada jenis pertanian pokok seperti padi, namun masih belum stabil dan kuat pada

jenis pertanian lainnya. Hal ini menjadi indikasi pembangunan ekonomi yang positif di Kabupaten Tanjung Timur. Mengingat jenis pertanian pokok seperti padi merupakan jenis pertanian yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan berdampak besar pada pembangunan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Luas Panen sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.119

Luas Panen Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2024

Jenis	Luas Panen Pertanian (Ha)			
	2021	2021	2021	2021
Padi (ha)	7.450	7.450	7.450	7.450
Jagung (ha)	1.575	1.575	1.575	1.575
Kedelai (ha)	148	148	148	148
Kacang Tanah (ha)	32	32	32	32
Kacang Hijau (ha)	3	3	3	3
Ubi Kayu (ha)	95	95	95	95
Ubi Jalar (ha)	42	42	42	42

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Luas panen pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan pada jenis padi, sementara itu luas panen pertanian pada jenis lain seperti Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar mengalami fluktuasi naik dan turun. Data ini mengindikasikan besarnya potensi panen pada jenis padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan belum stabilnya potensi panen pertanian pada jenis lainnya. Meskipun begitu hal ini dapat menjadi arah pembangunan ekonomi pertanian yang positif bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur kedepannya, mengingat pada jenis padi luas panen pertanian terus meningkat. Peningkatan realisasi produktivitas dan luas panen pertanian pada jenis padi akan menjadi pertanda baik bagi pembangunan ekonomi Tanjung Jabung Timur kedepannya.

27) Urusan Kehutanan

Urusan kehutanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kontribusi strategis dalam menjaga integritas ekologis wilayah. Meskipun dalam kewenangannya urusan kehutanan telah dialihkan menjadi urusan pemerintah provinsi, akan tetapi pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan terbatas yang tercermin dalam indikator luas kawasan lindung yang mencapai 200.960 hektar, sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031. Indikator kinerja ini menjadi salah satu representasi keberhasilan pengelolaan tata ruang dan kebijakan pelestarian hutan serta kawasan konservasi di tingkat daerah. Luasan tersebut tidak hanya menggambarkan komitmen terhadap perlindungan kawasan esensial, tetapi juga menjadi indikator terhadap efektivitas intervensi kebijakan kehutanan dalam menghadapi ancaman deforestasi, alih fungsi lahan, dan degradasi gambut.

Tabel 2.120

Luas Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kawasan Lindung	Lokasi	Luas (Ha)
Hutan Lindung	Kec. Berbak, Kec. Mendahara Ulu, Kec. Mendahara, Kec. Dendang, Kec. Geragai, Kec. Muara Sabak Barat	24.529
Hutan Lindung Gambut	Kec. Berbak, Kec. Mendahara Ulu, Kec. Mendahara, Kec. Sadu, Kec. Dendang, Kec. Geragai, Kec. Muara Sabak Barat	37.382
Sempadan Pantai	Kec. Mendahara, Kec. Sadu, Kec. Nipah Panjang, Kec. Kuala Jambi, Kec. Muara Sabak Timur	1.526
Sempadan Sungai	Kec. Berbak, Kec. Mendahara Ulu, Kec. Mendahara, Kec. Sadu, Kec. Nipah Panjang, Kec. Dendang, Kec. Geragai, Kec. Kuala Jambi, Kec. Muara Sabak Barat, Kec. Rantau Rasau	12.536
Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur	Kec. Mendahara, Kec. Nipah Panjang, Kec. Kuala Jambi, Kec. Muara Sabak Timur	3.390
Taman Hutan Raya	Kec. Berbak, Kec. Rantau Rasau	2.313
Taman Nasional Berbak	Kec. Berbak, Kec. Sadu	119.283
Total		200.960

Sumber: RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031

Komposisi kawasan lindung ini menunjukkan fokus yang kuat pada konservasi gambut dan keanekaragaman hayati. Taman Nasional Berbak, dengan luasan mencapai 119.283 hektar, mendominasi kawasan konservasi dan memiliki peran sentral dalam fungsi hidrologi dan penyerapan karbon. Di samping itu, terdapat Hutan Lindung Gambut seluas 37.382 hektar dan Hutan Lindung seluas 24.529 hektar, yang tersebar di berbagai kecamatan dan berfungsi sebagai kawasan perlindungan ekosistem rawa serta pengendali bencana banjir dan kebakaran hutan. Indikator lain, seperti kawasan sempadan sungai (12.536 ha) dan sempadan pantai (1.526 ha), mencerminkan perhatian terhadap perlindungan ekosistem riparian dan pesisir yang rawan abrasi dan pencemaran.

Keberadaan Taman Hutan Raya (2.313 ha) dan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur (3.390 ha) juga menandakan adanya integrasi antara fungsi pelestarian dan pemanfaatan jasa lingkungan untuk edukasi, penelitian, serta wisata berbasis konservasi. Dengan demikian, indikator-indikator ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan kawasan konservasi yang memadai secara kuantitatif. Namun demikian, tantangan tetap berada pada aspek kualitas pengelolaan, pengawasan, dan pemulihan kawasan kritis, termasuk dalam memperkuat peran kelembagaan, sistem informasi kehutanan daerah, serta integrasi antara perencanaan sektoral dan spasial. Oleh sebab itu, indikator ini dapat menjadi basis evaluatif dalam penyusunan kebijakan kehutanan berbasis bukti dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

28) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada dasarnya telah dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, namun pemerintah daerah kabupaten masih memiliki kewenangan untuk mengelola dan menguatkan sumber energi daerahnya sendiri agar pasokan listriknya dapat dikelola dengan baik dan tujuan lainnya agar pemda menjadi bagian dalam

peningkatan bauran energi baru terbarukan di dalam sumber energinya. Meskipun tidak ada data yang tersedia terkait kondisi eksisting energi baru terbarukan (potensi dan pemanfaatan) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun berikut dijabarkan kondisi energi primer yang mendominasi sumber energi di Tanjung Jabung Timur.

Pada periode 2018-2022, data lifting minyak bumi dan gas bumi (Migas) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Untuk minyak bumi, terdapat peningkatan sebesar 14,17 persen dari 866.653 barrel, pada tahun 2018 menjadi 989.319 barrel, pada 2019. Namun, tren ini berbalik dengan penurunan drastis sebesar 43,15 persen pada tahun 2020 menjadi 562.335 barrel. Tahun berikutnya, lifting minyak bumi sedikit meningkat sebesar 2,39 persen ke 575.731 barel, sebelum turun lagi pada tahun 2022 sebesar 39,52 persen menjadi 348.047 barrel. Sementara itu, lifting gas bumi menurun 5,74 persen dari 9.581.386 MMBTU pada 2018 menjadi 9.031.182 MMBTU pada 2019, diikuti penurunan tajam sebesar 60,31 persen pada 2020, peningkatan 58,58 persen pada 2021, dan penurunan lagi sebesar 47,33 persen pada 2022.

Tabel 2.121

Lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lifting Minyak Bumi (Barrel)	866.653	989.319	562.335	575.731	348.047
Lifting Gas Bumi (MMBTUJ)	9.581.386	9.031.182	3.583.802	5.686.360	2.994.420

Sumber: LPPD, 2022

Tren ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam industri migas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi termasuk perubahan dalam teknologi pengeboran, regulasi pemerintah, fluktuasi harga global, dan dinamika permintaan pasar. Pertumbuhan positif yang diikuti oleh penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun mungkin

mencerminkan dampak dari peristiwa ekonomi atau politik yang besar. Dalam konteks pembangunan daerah, data ini menggarisbawahi pentingnya strategi diversifikasi dan manajemen risiko dalam sektor energi, terutama dalam menghadapi tantangan global yang cepat berubah dan kompleks yang mungkin memengaruhi produksi dan pendapatan dari industri Migas.

Akibat dari ketidakstabilan ini adalah potensi gangguan dalam pendapatan daerah, yang mungkin memengaruhi pembiayaan berbagai proyek pembangunan dan pelayanan publik. Dampaknya terhadap pembangunan daerah bisa sangat signifikan; penurunan pendapatan dari sektor Migas dapat menyebabkan keterbatasan dalam investasi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lain yang vital bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ini menggarisbawahi perlunya strategi diversifikasi ekonomi dan perencanaan yang hati-hati dalam manajemen sumber daya alam, agar perekonomian lokal tetap tahan terhadap fluktuasi dalam industri yang sangat penting ini.

29) Urusan Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyebaran, penjualan, dan promosi barang dari berbagai bidang ekonomi di suatu daerah. Sektor perdagangan sangat penting karena berpengaruh pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan juga memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat. Kesuksesan urusan di bidang perdagangan bisa dilihat dari seberapa besar sumbangannya terhadap PDRB dan analisis nilai ekspor bersih yang dimiliki. PDRB adalah ukuran total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh semua sektor ekonomi di area tertentu selama waktu tertentu. Sumbangan sektor perdagangan kepada PDRB menunjukkan seberapa cepat sektor itu tumbuh dan seberapa penting perannya dalam ekonomi daerah. Hasil kerja di bidang perdagangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.122

Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022*	2023	2024
Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB	9,17	8,46	8,46	9,92	10,11
Pertumbuhan sektor perdagangan	-3,10	2,56	4,88	7,98	6,53
Jumlah Pedagang	± 4.327	±4.327	±4.327	NA	1015
Nilai ekspor bersih perdagangan (antardaerah)	-	-	-		

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tanjung Jabung Timur, 2025

Data kinerja urusan perdagangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan gambaran yang menarik tentang kontribusi dan pertumbuhan sektor perdagangan dalam perekonomian daerah. Pada awal periode, sektor perdagangan menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan kontribusi yang semakin meningkat terhadap PDRB, mencapai 9,17 persen pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan sebesar -3,10 persen, sebelum pulih kembali dengan pertumbuhan 2,56 persen pada tahun 2021. Angka ini terus naik di tahun 2022 mencapai 4,88 persen, kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2023 angka pertumbuhan perdagangan mencapai 7,98 persen dan akhirnya turun lagi di tahun 2024 menjadi 6,53 persen.

Selama periode lima tahun tersebut, jumlah pedagang relatif stabil, mencapai sekitar ± 4.327 pedagang. Stabilitas jumlah pedagang ini mungkin mencerminkan kondisi persaingan dan stabilitas pelaku usaha di sektor perdagangan lokal. Meskipun demikian, penurunan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2021 dan 2022 dari 8,68 persen menjadi 8,48 persen perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan peran sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi sektor perdagangan di Tanjung Jabung Timur tersebut didukung oleh adanya fasilitas akomodasi pasar yang mendukung. Salah satunya seperti tersedianya 31 pasar tradisional di Tanjung Jabung Timur yang saat ini tersebar di 11 kecamatan. Adapun hal ini dapat dicermati pada Tabel 2.123.

Tabel 2.123
Jumlah Pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

No.	Nama Pasar	Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Kode Pos	Latitude	Longitude	Kondisi
1.	Pasar Rakyat Muara Sabak Barat	Jalan Pasar Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat	Parit Culum I	Muara Sabak Barat	36763	-1,2383	103,8010453	Baik
2.	Pasar Rabu Sido Mukti	Jalan Sultan Thaha RT. 03 Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang	Sido Mukti	Dendang	36763	-1,1697	104,096877	Baik
3.	Pasar Rakyat Muara Sabak Timur	Muara Sabak Timur	Muara Sabak Ilir	Muara Sabak Timur	36762	-1,1257	103,857262	Data Tidak Tersedia
4.	Pasar Trimulyo	Desa Trimulyo Kecamatan Rantau Rasau	Tri Mulyo	Rantau Rasau	36772	-1,1011	104,023798	Rusak Sedang
5.	Pasar Sungai Toman	jl. Lintas Jambi - Ma. Sabak	Sungai Toman	Mendahara Ulu	36766	-1,2357	103,42035	Rusak Ringan
6.	Pasar Rabu (pasar Kud Harapan Baru)	jl. Lintas Jambi - Ma. Sabak	Pematang Rahim	Mendahara Ulu	36766	-1,2505	103,544098	Rusak Berat
7.	Pasar Bukit Tempurung	Bukit Tempurung Dusun Suka Mulia RT 07	Bukit Tempurung	Mendahara Ulu	36766	-1.32171'	103.496467'	Baik
8.	Pasar Bukit Tempurung	Jl. Lintas Tungkal - Jambi	Simpang Tuan	Mendahara Ulu	36766	-1.276853'	103.484236'	Rusak Sedang
9.	Pasar Kalangan Jumat Menteng	Mendahara Tengah	Mendahara Tengah	Mendahara	36765	-1,0125	103,591693	Baik
10.	Pasar Senin Bakti Idaman	Desa Bakti Idaman	Bakti Idaman	Mendahara	36765	-1,0645	103,575871	Baik
11.	Pasar Harian Mendahara	Jl. Batanghari RT 08 RW 03	Mendahara Ilir	Mendahara	36765	-0,9552	103,6765	Rusak Ringan
12.	Pasar Sabtu Mendahara	JL. Suhada RT 14 RW 02	Mendahara Ilir	Mendahara	36765	-0,9584	103,676318	Baik
13.	Pasar Sabtu Dusun Launcing	JL. Poros Mendahara RT 15	Lagan Tengah	Geragai	36764	-1,0806	103,714794	Baik
14.	Pasar Toliymaryo	Sungai Tawar RT 02 Dusun Indah 01	Sungai Tawar	Mendahara	36765	-0,9974	103,623338	Baik
15.	Pasar Blok D	JL. Pasar Minggu RW 01	Pandan Jaya	Geragai	36764	-1,1857	103,72418	Baik
16.	Pasar Kaget Jumat	Dusun Mawar Rt 08	Simbur Naik	Muara Sabak Timur	36762	-1,0384	104,025955	Rusak Ringan
17.	Pasar Kampung Laut	JL. Masjid Raya	Kampung Laut	Kuala Jambi	36760	-1,0331	103,80421	Rusak Ringan
18.	Pasar Rakyat Teluk Majelis	Teluk Majelis	Teluk Majelis	Kuala Jambi	36760	-1,0624	103,784767	Baik
19.	Pelita Sk 17 Bangun	Bangun Karya	Bangun Karya	Rantau Rasau	36772	-1,168	104,09602	Baik

No.	Nama Pasar	Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Kode Pos	Latitude	Longitude	Kondisi
	Karya							
20.	Pasar Rakyat Catur Rahayu	Dusun Kemang Jln. SMP RT. 22 Desa Catur Rahayu	Catur Rahayu	Dendang	36763	-1,2342	103,894009	Baik
21.	Pasar Rakyat Rantau Indah	RT.18 Kelurahan Rantau Indah	Rantau Indah	Dendang	36763	-1,1987	103,948226	Baik
22.	Pasar Lambur 1	Desa Lambur 1	Lambur I	Muara Sabak Timur	36762	-1,1164	103,970403	Baik
23.	Pasar Desa Lambur	Dusun Polewali Rt 05	Lambur	Muara Sabak Timur	36762	-1,0127	103,951416	Baik
24.	Pasar Mencolok	RT.02 Dusun Mencolok Laut Desa Mencolok	Mencolok	Mendahara Ulu	36766	-1,2152	103,50584	Rusak Ringan
25.	Pasar Sido Mulyo	RT. 20 Parit Jawa Timur Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu	Sungai Beras	Mendahara Ulu	36766	-1,1264	103,525985	Rusak Sedang
26.	Pasar Usaha Famili	RT.18 Usaha Famili Desa Sinar Wajo Dusun Sungai Putat Kecamatan Mendahara Ulu	Sinar Wajo	Mendahara Ulu	36766	-1,1503	103,520076	Rusak Ringan
27.	Pasar Ruko	RT. 02 Muara Sabak Ulu	Muara Sabak Ulu	Muara Sabak Timur	36763	-1,1293	103,851761	Rusak Ringan
28.	Pasar Rakyat Mayang Mangurai	Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang	Nipah Panjang li	Nipah Panjang	36771	-1,5139	104,1132096	Rusak Ringan
29.	Pasar Rakyat Ktm Kota Baru	Desa Kota Baru	Kota Baru	Geragai	36764	-1,2857	103,741045	Rusak Ringan
20.	Pasar Lambur 2	JL. Dusun Sukorejo Desa Lambur II	Lambur li	Muara Sabak Timur	36762	-1,1121	103,995945	Baik
31.	Pasar Jumat Suka Maju	Desa Suka Maju	Suka Maju	Geragai	36764	-1,2079	103,793166	Rusak Ringan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Namun dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas kondisi pasar berada dalam kondisi baik dan rusak ringan. Meskipun sudah ada pada kondisi baik dan rusak ringan tetap diperlukan adanya upaya peningkatan pasar yang lebih mumpuni di Tanjung Jabung Timur. Untuk mengoptimalkan potensi perdagangan dan meningkatkan nilai ekspor bersih perdagangan, diperlukan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi. Langkah-langkah seperti pengembangan pasar menuju pasar digital, peningkatan kualitas produk, penguatan kerja sama antar sektor dan daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu mendorong pertumbuhan perdagangan yang berkelanjutan dan berdaya saing di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

30) Urusan Perindustrian

Sektor industri merujuk pada bagian dari perekonomian suatu wilayah yang melibatkan kegiatan produksi, pengolahan, dan manufaktur barang atau produk. Sektor industri memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah karena berkontribusi secara signifikan terhadap penciptaan nilai tambah, peningkatan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Sehingga, industri juga menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing wilayah. Adapun kinerja sektor industri di Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020 -2024 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.124
Kontribusi Sektor Industri Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
a	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,16	23,14	21,44	24,22	24,16
b	Pertambangan dan Penggalian	35,73	38,80	43,14	35,94	36,04
c	Industri Pengolahan	8,96	8,27	7,73	8,53	8,05
d	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
a	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,16	23,14	21,44	24,22	24,16
	Limbah dan Daur Ulang					
f	Konstruksi	5,85	5,79	5,15	-	-
g	Transportasi dan Pergudangan	1,46	1,43	1,43	1,65	1,65
h	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,45	0,42	0,39	0,44	0,44
i	Informasi dan Komunikasi	2,23	2,11	1,92	2,08	2,02
j	Jasa Keuangan	1,04	0,99	0,89	0,97	0,95
k	Real Estat	0,79	0,76	0,79	0,77	0,75
l	Jasa Perusahaan	1,63	1,58	1,63	1,98	2,06
m	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,03	2,79	2,37	2,47	2,56
n	Jasa Pendidikan	4,26	4,08	3,64	3,86	3,98
o	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,72	0,62	0,69	0,73
p	Jasa lainnya	0,38	0,35	0,33	0,38	0,38

Sumber: BPS, 2025

Data kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran komprehensif tentang pentingnya sektor industri dalam menggerakkan perekonomian daerah. Dengan kontribusi yang tinggi, mencapai 70,12 persen pada tahun 2022 dan menunjukkan tingkat kontribusi yang relatif stabil di atas 50 persen pada tahun-tahun berikutnya, sektor industri sebenarnya mampu untuk menjadi tulang punggung utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah ini.

Tabel 2.125

Pertumbuhan Sektor Industri Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Pertumbuhan Sektor Industri	2,95	6,06	6,61	-	-
a	Industri Pengolahan	1,25	-0,20	1,89	1,25	3,79
b	Pertambangan dan Penggalian	-6,50	-1,17	-1,20	-0,39	4,06
c	Pengadaan Listrik dan Gas	4,05	5,76	0,15	4,94	9,91
d	Pengadaan Air, Pengelolaan	6,81	4,86	4,48	3,42	5,57

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
e	Konstruksi	-0,09	6,87	0,14	0,87	8,57
f	Transportasi & Pergudangan	-2,01	7,23	9,37	4,47	7,00
g	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,24	4,03	6,86	9,32	7,65
h	Informasi dan Komunikasi	7,73	5,15	6,85	7,09	5,04
i	Jasa Keuangan	1,72	2,80	0,33	2,76	3,05
j	Real Estat	-0,18	2,86	1,40	6,79	5,93
k	Jasa Perusahaan	-5,50	2,05	10,23	11,90	10,15
l	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,41	2,57	-0,22	1,01	9,30
m	Jasa Pendidikan	0,40	0,94	2,33	1,72	11,03
n	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,13	4,15	-1,29	6,33	3,86
o	Jasa lainnya	-2,12	3,04	4,40	5,01	5,32

Sumber: BPS, 2025

Data menunjukkan penurunan kontribusi subsektor pertambangan dan penggalan dari tahun 2020 sebesar 35,73 menjadi 36,04 persen pada tahun 2024. Dalam konteks ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan sektor ini tetap berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Selain itu, subsektor Industri Pengolahan juga memainkan peran krusial dalam perekonomian daerah dengan kontribusi yang stabil selama periode lima tahun tersebut.

Meskipun mengalami sedikit fluktuasi, kontribusi subsektor industri pengolahan menurun dari 8,96 persen pada tahun 2020 menjadi 8,05 persen pada tahun 2024. Penguatan dan diversifikasi subsektor Industri Pengolahan akan menjadi langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing wilayah. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa sektor industri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memerlukan adanya strategi baru sebab pertumbuhan sektor industri selama lima tahun ini

justru mengalami penurunan. Adapun pernyataan tersebut dapat dilihat melalui data sebagai berikut.

Data pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan gambaran positif tentang peran sektor industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun pertumbuhannya mengalami penurunan, namun selama lima tahun terakhir, sektor industri mencatatkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan dengan angka rata-rata sekitar 6 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan kontribusi yang signifikan dari sektor industri terhadap PDRB dan menegaskan pentingnya sektor ini dalam menggerakkan perekonomian wilayah ini. Dalam data tersebut, subsektor Pertambangan dan Penggalian menjadi salah satu poin penting dalam pertumbuhan sektor industri. Meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun, subsektor ini tetap menjadi kontributor utama dalam sektor industri. Selain itu, subsektor Industri Pengolahan juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun tidak selalu stabil pada setiap tahun. Pentingnya penguatan sektor industri ini menjadi acuan dalam upaya meningkatkan produksi barang dan produk di daerah ini.

Meskipun sektor industri secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang positif, terdapat beberapa subsektor yang perlu mendapat perhatian lebih dalam pengelolaannya. Misalnya, subsektor Transportasi dan Pergudangan serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami fluktuasi dan penurunan pertumbuhan pada beberapa tahun. Oleh karena itu, strategi pengembangan yang lebih terarah dan program pendukung diperlukan untuk memastikan pertumbuhan yang berkesinambungan dalam subsektor ini.

31) Urusan Transmigrasi

Dalam konteks layanan urusan pilihan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, aspek transmigrasi memainkan peran penting, khususnya dalam meningkatkan status dan pembangunan desa. Transmigrasi, yang merupakan

pemindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang kurang berkembang, dapat menjadi alat strategis untuk menyeimbangkan distribusi penduduk, mengurangi kepadatan di daerah asal, dan memajukan daerah tujuan. Dalam rencana pembangunan jangka panjang, transmigrasi dapat membantu dalam mengembangkan infrastruktur, ekonomi, dan layanan sosial di desa-desa yang menjadi tujuan transmigrasi. Ini dapat mencakup pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan akses ke layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta pengembangan ekonomi lokal melalui pertanian, perikanan, atau kegiatan industri lainnya.

Pada wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menggambarkan urusan transmigrasi dapat dilihat berdasarkan pendapatan per kapita wilayah transmigran. Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata pendapatan per kapita wilayah transmigran mencapai Rp.2.000.000/hektar lahan perkebunan kelapa sawit. Pendapatan per kapita ini mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang ada pada wilayah transmigran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga tahun 2024.

Pada tahun 2024 sudah ada 86 persen program transmigrasi yang sudah dilaksanakan atau dibina oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur urusan transmigrasi. Sejauh ini pemerintah telah berupaya dalam membina warga transmigran sehingga warga transmigran sudah berada ditahap kemandirian.

Pengembangan kawasan transmigrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah berkembang cukup baik sehingga tidak ada pengembangan wilayah transmigrasi baru di tahun 2024. Para transmigran sudah ada pada tahap kemandirian, dimana sudah ada 86 persen penduduk transmigran Tanjung Jabung Timur yang sudah diberdayakan dan dibina serta mandiri.

32) Urusan Sekretariat Daerah

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan indikator kunci yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi tata

kelola pemerintahan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah. Melalui evaluasi yang komprehensif terhadap berbagai aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kinerja, nilai SAKIP menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya secara akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil. Data Nilai SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020 hingga 2024 akan memberikan gambaran tentang progres perbaikan manajemen kinerja pemerintah kabupaten, sekaligus menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkesinambungan. Narasi ini penting untuk memahami posisi dan dinamika kinerja pemerintah daerah dalam konteks reformasi birokrasi dan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Tabel 2.126

Nilai SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Bobot	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perencanaan Kinerja	30	19,8	20,16	21	21,96	22,02
Pengukuran Kinerja	30	12,16	12,21	15,53	15,58	15,61
Pelaporan Kinerja	15	9,96	9,96	10,28	10,58	10,61
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,9	16,20	13,6	13,98	14,14
Nilai Hasil Evaluasi	100	57,82	58,53	60,41	62,10	62,38
Tingkat AKuntabilitas Kinerja		CC	CC	B	B	B

Sumber: Data Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Pada periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan perkembangan yang positif dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Tahun 2020 nilai SAKIP sebesar 57,82 dengan nilai CC meningkat menjadi B dengan nilai 60,41 pada tahun 2023. Tahun 2024 terdapat peningkatan nilai Evaluasi menjadi 62,38 namun masih dalam kategori B. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu

menjalankan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan.

Secara rinci, capaian kinerja pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan di semua aspek utama. Perencanaan kinerja yang memiliki bobot 30 mencapai nilai 22,02, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 21,96. Pengukuran kinerja juga mengalami peningkatan dari 15,58 menjadi 15,61, sementara pelaporan kinerja naik dari 10,58 menjadi 10,61. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memiliki bobot 25 juga menunjukkan kemajuan dari 13,98 menjadi 14,14. Peningkatan di semua indikator ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola kinerja yang lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu memberikan layanan publik yang lebih optimal dan memenuhi harapan masyarakat.

33) Urusan Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung fungsi dan tugas legislasi di tingkat lokal. Kinerja Sekretariat Dewan mencerminkan efisiensi, transparansi, dan kemampuan untuk menyelenggarakan proses legislasi yang baik, yang pada gilirannya akan memengaruhi pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja ini dilihat dari indikator Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan tepat waktu tahun 2018-2022 pada Tabel 2.127.

Tabel 2.127

Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				2024
	2020	2021	2022	2023	
Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan tepat waktu	160%	100%	200%	N/A	N/A

Sumber: Bagian Hukum Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Apabila ditilik pada tabel di atas, secara keseluruhan kinerja sekretariat dewan kabupaten tanjung jabung timur 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi walaupun sudah menunjukkan kinerja yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 persentase peraturan daerah yang ditetapkan tepat waktu mencapai 160 persen atau 8 Perda dengan target 5 Perda. Sedangkan di tahun 2021, Perda yang ditetapkan tepat waktu sesuai dengan target pada tahun tersebut yaitu 4 perda atau dengan capaian 100 persen. Kemudian tahun 2022 kembali mengalami kenaikan, Perda yang ditetapkan tepat waktu dengan capaian 200 persen atau dua kali lipat dari target pada tahun tersebut.

34) Unsur Perencanaan

Dalam rangka meraih cita-cita Indonesia sebagai negara yang maju dan berdaya saing global, perencanaan pembangunan daerah telah menjadi fondasi utama yang mendorong transformasi nasional. Sebagai negara kepulauan yang luas dan kaya akan sumber daya alam serta budaya, Indonesia memiliki tantangan unik dalam merumuskan strategi perencanaan pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi instrumen utama yang memandu arah serta prioritas pembangunan pada tingkat lokal. RPJMD adalah dokumen strategis yang merinci langkah-langkah konkrit yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Menilai persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD, persentase konsistensi Program RKPD ke dalam APBD dan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW, merupakan sasaran strategis untuk meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah. Adapun capaian kinerja perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024 terlihat pada Tabel 2.128.

Tabel 2.128

Kinerja Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%
Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2025

Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencapai kinerja perencanaan pembangunan yang luar biasa, mencapai persentase 100% dalam pelaksanaan rencana pembangunan strategisnya. Keberhasilan ini adalah hasil dari komitmen kuat pemerintah daerah, kolaborasi erat dengan masyarakat, serta manajemen sumber daya yang efisien. Semua inisiatif dan proyek pembangunan telah berjalan sesuai jadwal, dan dampaknya telah terasa di seluruh lapisan masyarakat.

Pencapaian ini tercermin dalam berbagai aspek pembangunan. Dari sisi ekonomi, daerah ini berhasil menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor vital. Sosial dan pendidikan juga berkembang pesat, dengan tingkat akses pendidikan yang lebih tinggi dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, upaya berkelanjutan dalam menjaga lingkungan juga ditekankan, dengan program perlindungan lingkungan yang kuat dan berkelanjutan.

35) Unsur Keuangan

Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran pencapaian pemerintah daerah dalam rangka mengelola keuangan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Kinerja keuangan Pemerintah Tanjung Jabung Timur secara umum telah menunjukkan hasil yang positif sebagaimana dapat dilihat dari lima hal yaitu Persentase SILPA terhadap APBD, Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, dan Persentase Peningkatan PAD sebagaimana diidentifikasi pada Tabel 2.129.

Tabel 2.129
Kinerja Keuangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%
Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2025

Kinerja keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari persentase konsistensi program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang secara penuh diintegrasikan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) setiap tahun dengan nilai 100 persen. Pencapaian ini menandakan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya matang secara konseptual, tetapi juga diimplementasikan secara sistematis dan terstruktur dalam dokumen kerja tahunan. Integrasi yang erat tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan jangka menengah daerah dapat dijabarkan ke dalam program-program operasional yang nyata dan terukur, sehingga pemanfaatan anggaran dan sumber daya lebih tepat sasaran dan efektif.

Konsistensi ini juga berlanjut pada tahap berikutnya, yakni integrasi program RKPD ke dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang juga mempertahankan angka 100 persen selama lima tahun berturut-turut. Selain itu, kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang terjaga sempurna sangat mengindikasikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan dikawal dalam kerangka

pengelolaan ruang yang terencana dengan baik, mengedepankan prinsip keberlanjutan dan keteraturan tata ruang. Kinerja keuangan yang konsisten ini menunjukkan tingkat koordinasi antar perangkat daerah yang solid dan komitmen kuat dalam menjamin keselarasan antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan.

36) Unsur Kepegawaian

Dalam konteks penunjang urusan kinerja pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, aspek kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan memegang peran kunci sebagai layanan urusan pilihan dalam dokumen perencanaan daerah. Efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menuntut sistem rekrutmen, penilaian, dan pengembangan yang kuat. Pendidikan dan pelatihan terus menerus bagi ASN merupakan investasi strategis untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, manajemen layanan publik, dan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan kebijakan kepegawaian yang fokus pada peningkatan kualifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan mekanisme penilaian kinerja yang adil dan transparan menjadi penting. Upaya ini akan memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki tenaga kerja yang terampil dan profesional, yang akan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 2.130

Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	47,92	45,497	66
Nilai Aspek Kualifikasi Pendidikan	-	-	12,59	12,958	13,121

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
ASN pada IP ASN					
Nilai Aspek Kompetensi ASN pada IP ASN	-	-	5,32	5,63	26,10
Nilai Aspek Kinerja pada IP ASN	-	-	25,05	21,91	22
Nilai Aspek Disiplin pada IP ASN	-	-	4,96	4,999	5

Sumber: Data LKPJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2022-2024

Terdapat peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022-2024. Pada tahun 2022 Indeks Profesionalitas ASN sebesar 47,92 meningkat menjadi 66 pada tahun 2024. Pada tahun 2024 Komponen yang dinilai termasuk kualifikasi pendidikan (13,121), kompetensi (26,10), kinerja (22), dan disiplin (5). Skor ini menandakan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik. Penyebab skor rendah ini mungkin berkaitan dengan proses perekrutan, pelatihan, dan pengelolaan ASN. Dalam perencanaan pembangunan daerah, data ini penting karena menunjukkan perlunya inisiatif untuk meningkatkan pelatihan, pengembangan kompetensi, dan manajemen kinerja ASN, yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah.

37) Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Unsur Pendidikan dan Pelatihan dalam konteks pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kompetensi, kapabilitas, dan profesionalisme pegawai negara. Data jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya merupakan indikator kunci yang mencerminkan upaya sistematis pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Peningkatan kompetensi ASN tidak hanya penting untuk menjawab tantangan dinamika tugas dan fungsi pemerintahan yang semakin kompleks, tetapi juga menjadi modal utama dalam mewujudkan pelayanan publik berkualitas, efektif, dan efisien.

Melalui pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang terpadu dan terarah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen untuk memperkuat kapasitas aparatur sebagai fondasi utama dalam mendukung visi pembangunan daerah yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Narasi ini menjadi titik awal untuk menggali lebih dalam mengenai capaian dan strategi peningkatan kompetensi ASN yang telah dan akan dilaksanakan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah. Namun, dalam konteks Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum terdapat data terkait Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya. Hal ini akan menjadi catatan penting bagi penyelenggara perangkat daerah untuk mengevaluasi dan mencatat kembali terkait data ASN yang ditingkatkan kompetensinya.

38) Unsur Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penelitian dan pengembangan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah unsur penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Ini tercermin melalui beberapa indikator yang mengukur dampak dari upaya penelitian dan pengembangan dalam administrasi pemerintahan antara lain; Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dapat dilihat pada Tabel 2.131.

Tabel 2.131

Kinerja Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Penyelesaian Masalah Daerah	100	100	100	100	100
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	33	50	100	100	100
Persentase perangkat daerah yang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah					
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100	100	100	100	100

Sumber: Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025

Berdasarkan tabel 2.131 dapat disimpulkan bahwa dalam indikator persentase kajian berbasis bukti pada penyelesaian masalah daerah memiliki peningkatan yang signifikan. hal ini ditandakan dengan pemanfaatan 100 persen kajian yang dilakukan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal serupa juga terjadi pada persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang meningkat dari 33 persen pada tahun 2020 menjadi 50 persen pada tahun 2021 dan menjadi 100 pada 2022 hingga 2024. namun pada persentase perangkat daerah yang difasilitasi belum ada hasil pengukuran. sementara di sisi persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah memiliki persentase yang sangat memuaskan yakni 100 persen sejak 2020 hingga 2024.

39) Unsur Pengawasan

Data kinerja pengawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan penting dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Nilai maturitas SPIP yang awalnya berada pada level 2 (Berkembang) dengan skor stabil 2,88 selama tiga tahun pertama, menunjukkan adanya konsistensi dalam upaya pengendalian internal. Namun, terdapat lonjakan ke level 3 (Terdefinisi) pada tahun 2023 dan 2024, yang menandakan kematangan dan pendefinisian proses pengawasan yang lebih sistematis dan terstruktur. Di sisi lain, persentase tindak lanjut temuan pengawasan mengalami fluktuasi signifikan, terutama penurunan drastis pada tahun 2022 yang diikuti dengan data tidak tersedia untuk tahun 2023 dan 2024. Jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga meningkat secara signifikan khususnya pada tahun 2023 yang

menandakan adanya peningkatan aktivitas pengawasan. Meskipun nilai level APIP tetap pada level 2 hingga tahun 2023, ada indikasi kenaikan ke level 3 pada tahun 2024 yang mencerminkan peningkatan kapabilitas aparat pengawas dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif.

Tabel 2.132

Kinerja Pengawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Maturitas SPIP	2,887 Level 2 Berkembang	2,887 Level 2 Berkembang	2,879 Level 2 Berkembang	3,02 Level 3 Terdefinisi	3,07 Level 3 Terdefinisi
Persentase Tindak Lanjut Temuan	74,29%	77,93%	14,18%	64,7%	66,70%
Jumlah Temuan BPK	11	31	24	73	N/A
Nilai Level APIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.132, dapat dilihat bahwa peningkatan nilai maturitas SPIP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari level 2 ke level 3 menunjukkan kemajuan signifikan dalam penguatan pengendalian intern pemerintah yang lebih terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik. Persentase Tindak lanjut temuan berfluktuasi cenderung menurun. Pada tahun 2020 persentase tindak lanjut temuan sebesar 74,29 persen menurun pada tahun 2023 menjadi 64,70 persen. Hal ini menunjukkan diperlukan peningkatan pengawasan sehingga tindak lanjut temuan ini dapat segera diselesaikan. Lonjakan jumlah temuan BPK pada tahun 2023 menunjukkan intensifikasi audit dan potensi adanya isu yang perlu segera ditindaklanjuti untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Perubahan level APIP dari level 2 ke level 3 pada tahun 2024 menjadi sinyal positif terkait peningkatan kapabilitas pengawasan internal yang berdampak pada kualitas dan efektivitas proses pengawasan. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan suatu dinamika pengawasan yang menunjukkan usaha

berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern serta kapasitas pengawas di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meskipun masih memerlukan perhatian khusus pada aspek tindak lanjut temuan dan pengelolaan data pengawasan.

40) Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum merupakan salah satu komponen fundamental dalam tata kelola pemerintahan daerah yang mencakup berbagai aspek administrasi, manajemen, dan pelaksanaan fungsi pemerintahan secara menyeluruh. Unsur ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel demi tercapainya tujuan pembangunan serta pelayanan publik yang optimal. Melalui peningkatan kinerja unsur pemerintahan umum, diharapkan tercipta mekanisme kerja pemerintahan yang terpadu dan sinergis, mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat, serta memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi tantangan dinamis dan kompleksitas tugas pemerintahan.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah .

Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya

merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Dari sisi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 atau 7 kali berturut-turut, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Opini ini merupakan cerminan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjalankan administrasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Perubahan standar akuntansi pemerintahan dari *Cash To Accrual Basis* ke *Full Accrual* mampu diupayakan dengan baik sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian bisa didapatkan sejak tahun 2017. Opini ini juga merupakan bukti telah baiknya kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan dan aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain

Pendapatan yang Sah, aspek belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dan aspek pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2020-2024 memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika pengelolaan anggaran dalam konteks pembangunan daerah. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama lima tahun terakhir mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan kapasitas fiskal yang dimiliki. Data ini tidak hanya menunjukkan pencapaian kinerja keuangan, tetapi juga mengungkap berbagai tantangan struktural yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran daerah. Berdasarkan pengamatan mendalam terhadap data realisasi APBD, dapat diidentifikasi beberapa pola penting yang menggambarkan kondisi fiskal daerah secara makro, sekaligus mengungkap aspek-aspek unik dalam pengelolaan keuangan daerah dari Tabel 2.133.

Tabel 2.133
Realisasi APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	49.646.511.512,85	81.601.471.901,75	59.208.362.622,07	60.648.425.452,67	70.645.652.760,91
	B. Pendapatan Transfer	965.997.528.438,16	1.050.089.360.137,00	1.071.455.743.770,00	1.092.157.537.667,00	1.149.117.388.356,00
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	36.961.230.000,00	31.439.105.000,00	0,00	0,00	534.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.052.605.269.951,01	1.163.129.937.038,75	1.130.664.106.392,07	1.152.805.963.119,67	1.220.297.041.116,91
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	682.285.896.838,60	673.630.420.585,05	747.252.319.461,00	714.858.637.737,83	775.786.958.745,69
	B. Belanja Modal	229.225.479.692,59	229.947.374.962,13	290.561.403.375,02	314.463.078.843,00	332.153.888.426,34
	C. Belanja Tak Terduga	36.935.841.330,64	280.866.511,00	3.151.839.914,00	609.000.000,00	462.162.500,00
	D. Belanja Transfer	146.914.433.676,00	145.346.442.316,00	139.107.418.196,00	148.750.979.097,00	152.042.522.453,00
	JUMLAH BELANJA	1.095.361.651.538,17	1.049.205.104.374,18	1.180.072.980.946,02	1.178.681.695.677,93	1.260.445.532.125,03
	SURPLUS/DEFISIT	-42.756.381.587,16	113.924.832.664,57	-49.408.874.553,95	-25.875.732.558,26	-40.148.491.008,12
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	83.051.530.000,00	38.295.050.000,00	151.723.570.000,00	98.828.692.083,86	66.952.959.525,60
	B. Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	499.643.000,00	3.486.000.000,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	81.051.531.342,60	37.795.404.966,24	148.237.566.637,81	92.828.692.083,86	61.952.959.525,60
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA)	38.295.149.755,44	151.720.237.630,81	98.828.692.083,86	66.952.959.525,60	21.804.468.517,48

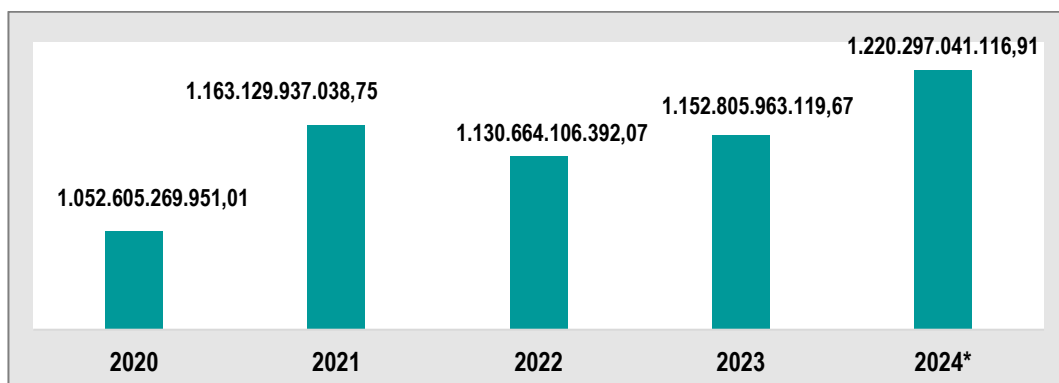
*: Angka sementara

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Secara makro, realisasi APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2020-2024 menunjukkan beberapa pola penting dalam kinerja keuangan daerah. Dari sisi Pendapatan, Pendapatan Transfer konsisten menjadi penyumbang utama, meningkat dari Rp965.997.528.438,16 pada tahun 2020 menjadi Rp1.149.117.388.356,00 di tahun 2024, dengan pertumbuhan rata-rata 4,47 persen per tahun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi signifikan, mencapai puncak Rp81.601.471.901,75 di tahun 2021 sebelum turun ke Rp59.208.362.622,07 di tahun 2022, dan akhirnya pulih ke Rp70.645.652.760,91 di tahun 2024. Pertumbuhan PAD yang mencapai 64,33 persen pada 2020-2021 diikuti penurunan 27,43 persen di tahun berikutnya menunjukkan kerentanan dalam kemandirian fiskal daerah. Yang menarik, komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan drastis sebesar 57,47 persen rata-rata, bahkan sempat nihil di 2022-2023, mengindikasikan ketergantungan pada sumber pendapatan tidak berkelanjutan.

Gambar 2.76

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran 2020-2024

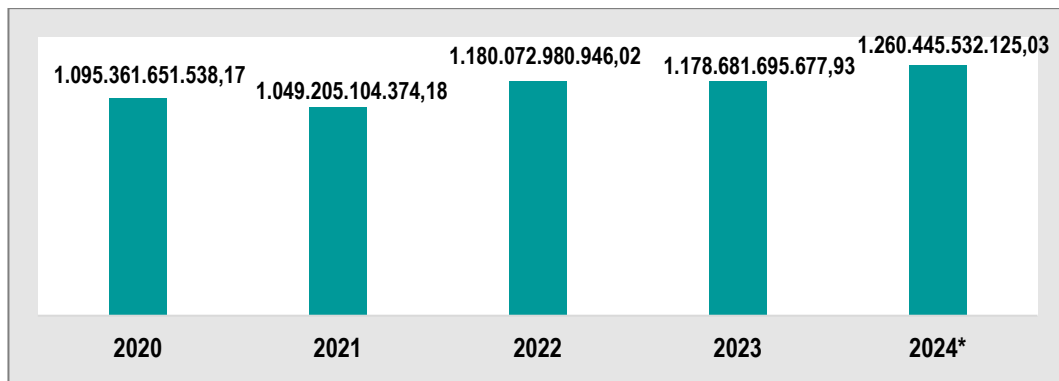


Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Pada sisi Belanja, terjadi peningkatan signifikan dalam alokasi Belanja Modal dari Rp229.225.479.692,59 di tahun 2020 menjadi Rp332.153.888.426,34 di tahun 2024, dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 26,37 persen pada periode 2021-2022. Namun demikian, porsi belanja modal terhadap total

belanja masih berkisar antara 20-25 persen, sementara Belanja Operasi tetap dominan dengan realisasi Rp775.786.958.745,69 di tahun 2024. Yang patut dicatat adalah fluktuasi ekstrem pada Belanja Tak Terduga yang turun drastis dari Rp36.935.841.330,64 di tahun 2020 menjadi hanya Rp462.162.500,00 di tahun 2024, dengan pertumbuhan yang sangat volatil antara penurunan 99,24 persen hingga kenaikan 1.022,26 persen.

Gambar 2.77
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran 2020-2024



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Kondisi surplus-defisit menunjukkan ketidakstabilan dengan surplus tertinggi Rp113.924.832.664,57 di tahun 2021 yang kemudian berubah menjadi defisit di tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan daerah juga mengalami gejolak dengan Penerimaan Pembiayaan mencapai puncak Rp151.723.570.000,00 di tahun 2022 sebelum turun ke Rp66.952.959.525,60 di tahun 2024. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menunjukkan tren penurunan dari Rp151.720.237.630,81 di tahun 2021 menjadi hanya Rp 21.804.468.517,48 di tahun 2024, mengindikasikan berkurangnya cadangan fiskal daerah. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya penguatan basis pendapatan asli daerah, penajaman prioritas belanja, serta penguatan tata kelola keuangan daerah untuk menciptakan stabilitas fiskal yang berkelanjutan.

1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Analisis kinerja pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2020-2024 mengungkap dinamika fiskal yang kompleks, mencerminkan interaksi antara kapasitas keuangan lokal, kebijakan transfer pemerintah pusat, dan tantangan pembangunan ekonomi daerah. Data realisasi pendapatan menunjukkan pola pertumbuhan yang tidak merata, dengan beberapa komponen seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi signifikan, sementara Dana Perimbangan tetap menjadi penopang utama meski dengan tren yang bervariasi antar jenis transfer. Laju pertumbuhan PAD rata-rata sebesar 13,96 persen selama lima tahun terakhir patut diapresiasi, namun volatilitasnya—termasuk penurunan drastis sebesar minus 27,43 persen pada 2022—mengisyaratkan kerentanan struktur pendapatan daerah. Sementara itu, kontraksi berturut-turut pada Retribusi Daerah (rata-rata minus 13,38 persen per tahun) dan ketergantungan pada komponen pendapatan insidental seperti Hibah menuntut evaluasi mendalam

dalam kerangka penguatan kemandirian fiskal. Analisis berikut akan mengurai tren strategis, tantangan struktural, serta peluang intervensi kebijakan yang teridentifikasi dari perkembangan pendapatan daerah ini, sebagai dasar perumusan rekomendasi dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Kinerja dari pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.134 dan Tabel 2.135.

Tabel 2.134
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

No	Sumber Pendapatan	Pendapatan (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Pendapatan Asli Daerah	49.646.511.512,85	81.601.471.901,75	59.208.362.622,07	60.648.425.452,67	70.645.652.760,91
1.1	Pajak Daerah	15.859.280.136,99	19.776.698.793,50	23.152.323.336,80	20.165.846.039,50	23.432.665.969,00
1.2	Retribusi Daerah	1.775.339.753,00	1.836.406.808,43	1.331.496.540,00	1.175.420.975,00	967.324.109,00
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.731.659.232,59	7.088.808.214,73	8.078.242.319,72	8.343.002.417,00	9.534.665.315,94
1.4	Lain-lain PAD yang sah	25.280.232.390,27	52.899.558.085,09	26.646.300.425,55	30.964.156.021,17	36.710.997.366,97
2	Dana Perimbangan	833.560.000.000,00	887.570.000.000,00	927.150.000.000,00	935.938.411.990,00	1.006.574.285.092,00
2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	143.340.000.000,00	173.580.000.000,00	195.870.000.000,00	170.844.961.876,00	236.943.471.670,00
2.2	Dana Alokasi Umum	521.920.000.000,00	514.770.000.000,00	514.070.000.000,00	532.830.000.000,00	443.832.578.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	168.300.000.000,00	199.220.000.000,00	217.210.000.000,00	232.260.000.000,00	205.443.204.422,00
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	25.280.232.390,27	31.439.105.000,00	0,00	0,00	534.000.000,00
3.1	Hibah	369.612.300,00	314.391.050,00	0,00	0,00	534.000.000,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	50.490.000.000,00	55.960.000.000,00	63.370.000.000,00	64.992.274.677,00	61.185.973.264,00
3.4	Dana penyesuaian dan otonoim khusus	81.940.000.000	106.560.000.000	80.940.000.000	82.200.000.000	78.017.130.000,00
3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	9.030.000.000,00	3.340.000.000,00

*: Angka sementara

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Tabel 2.135
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

No	Sumber Pendapatan	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan
		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024*	
1	Pendapatan Asli Daerah	64,33%	-27,43%	2,43%	16,49%	13,96%
1,1	Pajak Daerah	24,69%	17,08%	-12,90%	16,20%	11,27%
1,2	Retribusi Daerah	3,44%	-27,50%	-11,75%	-17,71%	-13,38%
1,3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	5,30%	13,96%	3,28%	14,29%	9,21%
1,4	Lain-lain PAD yang sah	109,30%	-49,62%	16,21%	18,56%	23,61%
2	Dana Perimbangan	6,48%	4,46%	0,95%	7,55%	4,86%
2,1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	21,09%	12,83%	-12,78%	38,69%	14,96%
2,2	Dana Alokasi Umum	-1,37%	-0,14%	3,65%	-16,70%	-3,64%
2,3	Dana Alokasi Khusus	18,37%	9,03%	6,93%	-11,55%	5,69%
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	109,30%	-49,62%	16,21%	-98,28%	-5,60%
3,1	Hibah	109,30%	-49,63%	16,21%	-98,28%	-5,60%
3,2	Dana Darurat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3,3	Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	10,83%	13,24%	16,81%	-5,86%	13,63%
3,4	Dana penyesuaian dan otonoim khusus	30,11%	-24,36%	1,56%	-5,09%	2,44%
3,5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	-63,01%	-15,75%

*: Angka sementara

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Berdasarkan kedua tabel di atas, realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan dinamika yang menarik dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,96 persen selama periode 2020-2024. Namun, tren ini tidak linier, melainkan ditandai oleh fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021, PAD mengalami lonjakan sebesar 64,33 persen menjadi Rp81.601.471.901,75, didorong oleh peningkatan tajam pada komponen Lain-lain PAD yang Sah sebesar 109,27 persen (dari Rp25.280.232.390,2 menjadi Rp25.280.232.390,27). Namun demikian di tahun berikutnya, PAD justru turun drastis sebesar minus 27,43 persen yang mengindikasikan ketergantungan pada sumber pendapatan yang bersifat tidak konsisten.

Di sisi lain, komponen PAD yang paling stabil adalah Pajak Daerah, dengan pertumbuhan rata-rata 11,13 persen, meskipun sempat mengalami kontraksi sebesar 12,90 persen pada tahun 2023. Retribusi Daerah terus menurun dengan rata-rata 13,38 persen per tahun, mencapai titik terendah Rp967.324.109,00 di tahun 2024. Hal ini mengisyaratkan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas sistem retribusi daerah. Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan konsisten rata-rata 9,21 persen.

Dana Perimbangan sebagai tulang punggung pendapatan daerah tumbuh rata-rata 4,86 persen per tahun, mencapai Rp1.006.574.285.092,00 di tahun 2024. Dana Bagi Hasil Pajak menunjukkan kinerja terbaik dengan pertumbuhan rata-rata 14,96 persen dan lonjakan 38,69 persen di tahun 2024. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum mengalami tren negatif (rata-rata -3,64 persen) dengan penurunan signifikan 16,70 persen di tahun 2024. Dana Alokasi Khusus tumbuh moderat 5,69 persen rata-rata, namun terkoreksi 11,55 persen di tahun 2024, mencerminkan sensitivitas terhadap perubahan kebijakan alokasi pusat.

Kelompok pendapatan ini menunjukkan volatilitas ekstrim dengan pertumbuhan rata-rata negatif 5,60 persen. Hibah mengalami fluktuasi drastis dari Rp314.391.050,00 di 2021 menjadi nihil di 2022-2023, kemudian muncul kembali Rp534.000.000,00 di 2024. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tumbuh rata-rata 13,63 persen, namun terkoreksi 5,86 persen di tahun 2024. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus menunjukkan pola tidak stabil dengan pertumbuhan 30,11 persen di 2021 diikuti penurunan 24,36 persen di 2022. Bantuan Keuangan dari Provinsi baru muncul di 2023 sebesar Rp9.030.000.000,00 kemudian turun drastis 63,01 persen di 2024. Volatilitas ini mempertegas pentingnya diversifikasi sumber pendapatan agar tidak bergantung pada komponen yang bersifat insidental.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2020-2024 menunjukkan dinamika struktural yang kompleks, mencerminkan respons fiskal terhadap berbagai tantangan pembangunan dan kebijakan keuangan daerah. Realisasi belanja yang bergerak dari Rp1.095.361.651.538,17 di tahun 2020 menjadi Rp1.260.445.532.125,03 di tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata 3,77 persen per tahun, mengindikasikan pola alokasi anggaran yang selektif namun masih menghadapi ketidakstabilan dalam beberapa komponen penting. serta mencerminkan respons kebijakan fiskal terhadap berbagai tantangan dan prioritas pembangunan. Berdasarkan kajian mendalam terhadap data realisasi belanja selama lima tahun terakhir, dapat diidentifikasi beberapa pola penting yang menggambarkan karakteristik dan kecenderungan pengeluaran daerah pada Tabel 2.136.

Tabel 2.136
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

N0	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	BELANJA						
A	Belanja Operasi	682.285.896.838,60	673.630.420.585,05	747.252.319.461,00	714.858.637.737,83	775.786.958.745,69	3,46%
1	Belanja Pegawai	441.480.445.891,00	407.563.061.948,00	394.088.274.533,00	386.629.792.313,25	434.450.716.042,00	-0,13%
2	Belanja Barang dan Jasa	189.124.900.747,60	242.128.766.226,37	325.599.113.650,00	295.361.011.886,58	302.460.513.071,69	13,90%
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	108.000.000,00	0,00%
5	Belanja Hibah	50.228.050.200,00	22.809.147.410,68	27.228.571.278,00	32.617.047.038,00	38.263.559.104,00	0,47%
6	Belanja Bantuan Sosial	1.452.500.000,00	1.129.445.000,00	336.360.000,00	125.786.500,00	94.180.000,00	-45,05%
7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	9.030.000.000,00	3.340.000.000,00	-31,51%
B	Belanja Modal	229.225.479.693,00	229.947.374.962,00	290.561.403.375,00	314.463.078.843,00	332.153.888.426,34	10,13%
1	Belanja Tanah	764.880.000,00	433.812.965,00	636.221.000,00	113.862.400,00	15.000.000,00	-41,39%
2	Belanja Peralatan dan Mesin	53.299.679.648,00	51.406.129.983,00	31.447.159.821,00	59.869.144.481,00	36.420.421.814,00	2,21%
3	Belanja Gedung dan Bangunan	37.434.428.683,00	47.749.272.486,00	50.297.667.168,00	82.870.788.074,00	80.687.204.008,00	23,75%

NO	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	135.927.576.812,00	126.096.460.538,00	204.369.092.804,00	167.268.472.489,00	208.822.979.050,34	15,38%
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.798.914.550,00	4.261.698.990,00	3.811.262.582,00	4.043.775.400,00	4.798.532.169,00	37,77%
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	297.036.000,00	1.409.751.385,00	93,65%
C	Belanja Tidak Terduga	36.935.841.331,00	280.866.511,00	3.151.839.914,00	609.000.000,00	462.162.500,00	204,54%
D	Belanja Transfer	146.914.433.676,00	145.346.442.316,00	139.107.418.196,00	148.750.979.097,00	152.042.522.453,00	0,95%
1	Belanja Bagi Hasil	1.967.537.000,00	1.930.294.681,00	2.331.937.048,00	2.277.510.769,00	2.338.708.759,00	4,82%
2	Belanja Bantuan Keuangan	144.946.896.676,00	143.416.147.635,00	136.775.481.148,00	146.473.468.328,00	149.703.813.694,00	0,90%
	TOTAL BELANJA	1.095.361.651.538,17	1.049.205.104.374,18	1.180.072.980.946,02	1.178.681.695.677,93	1.260.445.532.125,03	3,77%

*: Angka sementara

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024 (data diolah)

Tabel 2.137
Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	
	BELANJA					
A	Belanja Operasi	-1,27%	10,93%	-4,34%	8,52%	3,46%
1	Belanja Pegawai	-7,68%	-3,31%	-1,89%	12,37%	-0,13%
2	Belanja Barang dan Jasa	28,03%	34,47%	-9,29%	2,40%	13,90%
3	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Belanja Hibah	-54,59%	19,38%	19,79%	17,31%	0,47%
6	Belanja Bantuan Sosial	-22,24%	-70,22%	-62,60%	-25,13%	-45,05%
7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	-%	-%	-63,01%	-31,51%
B	Belanja Modal	0,31%	26,36%	8,23%	5,63%	10,13%
1	Belanja Tanah	-43,28%	46,66%	-82,10%	-86,83%	-41,39%
2	Belanja Peralatan dan Mesin	-3,55%	-38,83%	90,38%	-39,17%	2,21%
3	Belanja Gedung dan Bangunan	27,55%	5,34%	64,76%	-2,63%	23,75%
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-7,23%	62,07%	-18,15%	24,84%	15,38%
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	136,90%	-10,57%	6,10%	18,66%	37,77%
6	Belanja Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	374,61%	93,65%
C	Belanja Tidak Terduga	-99,24%	1022,18%	-80,68%	-24,11%	204,54%
D	Belanja Transfer	-1,07%	-4,29%	6,93%	2,21%	0,95%
1	Belanja Bagi Hasil	-1,89%	20,81%	-2,33%	2,69%	4,82%
2	Belanja Bantuan Keuangan	-1,06%	-4,63%	7,09%	2,21%	0,90%
	TOTAL BELANJA	-4,21%	12,47%	-0,12%	6,94%	3,77%

*: Angka sementara

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024 (data diolah)

Belanja Operasi mendominasi struktur pengeluaran dengan porsi rata-rata 61,55 persen dari total belanja, menunjukkan pertumbuhan rata-rata 3,46 persen, namun dengan fluktuasi signifikan yaitu meningkat dari Rp682.285.896.838,60 di tahun 2020 menjadi Rp775.786.958.745,69 di tahun 2024. Komponen Belanja Pegawai mengalami tren negatif rata-rata -0,13 persen, mencapai titik terendah Rp386.629.792.313,25 di tahun 2023 sebelum pulih 12,37 persen di 2024. Sebaliknya, Belanja Barang dan Jasa tumbuh pesat rata-rata 13,90 persen dari Rp189.124.900.747,60 menjadi Rp302.460.513.071,69, meski sempat turun 9,29 persen di 2023. Belanja Bantuan Sosial justru menunjukkan penurunan ekstrem rata-rata -45,05 persen per tahun.

Belanja Modal menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan rata-rata 10,13 persen, meningkat dari Rp229.225.479.693,00 ke Rp332.153.888.426,34. Namun, pola pertumbuhannya tidak stabil: dari kenaikan 26,36 persen di 2022 turun menjadi 5,63 persen di 2024. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai komponen utama justru mengalami pertumbuhan rata-rata 15,38 persen, sementara Belanja Tanah menunjukkan penurunan rata-rata -41,39 persen meski dengan nilai absolut yang kecil (dari Rp764.880.000,00 ke Rp15.000.000,00). Belanja Gedung dan Bangunan sangat volatil dengan lonjakan 64,76 persen di 2023 diikuti penurunan -2,63 persen di 2024.

Temuan kritis dalam analisis ini mengungkap volatilitas ekstrem pada Belanja Tidak Terduga yang mengalami lonjakan 1.022,18 persen di tahun 2022 kemudian turun drastis -80,68 persen di tahun berikutnya, disertai disparitas pertumbuhan yang signifikan antar komponen belanja modal yang mencerminkan inkonsistensi dalam pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, penurunan drastis pada alokasi Belanja Bantuan Sosial menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas program perlindungan sosial. Pola-pola ini secara keseluruhan mengindikasikan urgensi untuk melakukan stabilisasi belanja operasional melalui optimalisasi alokasi anggaran, menjamin konsistensi belanja modal yang berorientasi pada

proyek-proyek strategis, serta memperkuat sistem perencanaan anggaran untuk mengurangi ketergantungan pada belanja tak terduga.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Untuk sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan penyertaan modal/ investasi dan pembayaran pokok utang.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja. Mengacu kepada konsep pembiayaan tersebut maka analisis pembiayaan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2020-2024 dapat dilakukan. Hasil perhitungan komponen pembiayaan tersebut dimuat pada Tabel 2.138.

Tabel 2.138
Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

Deskripsi Pembiayaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Penerimaan					
Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya	38.295.150.000,00	38.295.149.755,44	151.720.237.630,81	98.828.692.083,86	66.952.959.525,60
Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan Pembiayaan	83.051.531.342,60	38.295.047.966,24	151.723.566.637,81	98.828.692.083,86	66.952.959.525,60
Pengeluaran					
Total Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	499.640.000,00	3.486.000.000,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	81.051.531.342,60	37.795.404.966,24	148.237.566.637,81	92.828.692.083,86	61.952.959.525,60
SiLPA	38.295.149.755,44	151.720.237.630,81	98.828.692.083,86	66.952.959.525,60	21.804.468.517,48

*: Angka sementara

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Berdasarkan data pembiayaan selama lima tahun terakhir, dapat diamati bahwa posisi pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur senantiasa berada dalam kondisi surplus. Nilai pembiayaan netto menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap positif, dimulai dari Rp81.051.531.342,60 pada tahun 2020, mencapai puncaknya di tahun 2022 sebesar Rp148.237.566.637,81, dan kemudian mengalami penurunan bertahap hingga mencapai Rp61.952.959.525,60 di tahun 2024.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menunjukkan dinamika yang menarik. Setelah tercatat sebesar Rp38.295.149.755,44 pada tahun 2020, SiLPA mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp151.720.237.630,81 di tahun 2021. Pola ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan, baik dalam hal realisasi fisik yang mencapai 100 persen maupun optimalisasi proses pengadaan barang/jasa melalui sistem e-tendering. Namun, tren penurunan SiLPA pada tiga tahun berikutnya dari Rp98.828.692.083,86 di tahun 2022 menjadi Rp21.804.468.517,48 di tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor pada komponen penerimaan dan belanja daerah yang cukup fluktuatif.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan, terlihat pola peningkatan yang konsisten dari Rp2.000.000.000,00 di tahun 2020 menjadi Rp5.000.000.000,00 di tahun 2024. Kenaikan ini terjadi pada komponen Penyertaan Modal Daerah terutama pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang perlu diimbangi dengan evaluasi terhadap efektivitas alokasi dana pembiayaan untuk memastikan bahwa peningkatan pengeluaran tersebut sejalan dengan pencapaian *output* dan *outcome* yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, kondisi surplus pembiayaan netto dan fluktuasi SiLPA mencerminkan perlunya penguatan tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam hal perencanaan anggaran yang lebih akurat dan pengendalian belanja yang lebih ketat. Peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dan sinergi antar OPD menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.

2.2.2 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Struktur keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam periode 2019-2023 menunjukkan dinamika yang menarik dalam pengelolaan aset dan kewajiban daerah. Analisis terhadap komponen neraca ini mengungkap berbagai kecenderungan penting yang mencerminkan kapasitas fiskal dan efektivitas pengelolaan kekayaan daerah. Data selama lima tahun terakhir memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan posisi keuangan daerah yang menjadi dasar penting dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD). Analisis ini mengungkap beberapa temuan kunci termasuk volatilitas aset lancar, konsistensi investasi jangka panjang, pertumbuhan aset tetap yang stabil, struktur kewajiban yang minimal, dan penguatan ekuitas daerah. Temuan ini menjadi dasar penting untuk penyusunan strategi pengelolaan kekayaan daerah yang lebih efektif dalam RPJMD mendatang.

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non-lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Total aset Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu dari Rp2.105.115.398.002,91 menjadi Rp2.373.970.431.394,39. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan total aset menjadi Rp 2.200.091.083.659,82. Jika dilihat lebih detail, Aset Lancar menunjukkan fluktuasi yang cukup ekstrem. Peningkatan drastis dari Rp81.461.026.695,68 di tahun 2020 menjadi Rp186.825.226.594,70 di tahun 2021 dan Rp154.564.120.471,16 di tahun 2022, sebelum akhirnya anjlok menjadi Rp63.598.940.093,50 di tahun 2024. Penurunan drastis di tahun 2024 ini dapat dijelaskan oleh dua faktor utama: pertama, nilai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang kecil, mengindikasikan bahwa dana kas yang tersedia di akhir periode anggaran cenderung sedikit karena sebagian besar telah digunakan; kedua, banyaknya persediaan yang Nilai Perolehan Hak Daerah (NPHD)-nya telah terbit, yang berarti aset lancar berupa persediaan telah dialihkan menjadi aset tetap atau telah digunakan, sehingga secara akuntansi tidak lagi dicatat sebagai aset lancar. Kombinasi SiLPA yang minim dan realisasi persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa pada tahun 2024, likuiditas pemerintah daerah mengalami pengetatan, baik karena efisiensi penggunaan anggaran maupun karena konversi aset lancar menjadi bentuk lain.

Investasi Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan konsisten dari Rp46.014.357.000,00 di tahun 2020 menjadi Rp61.000.000.000,00 di tahun 2024. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam berinvestasi untuk pembangunan jangka panjang, yang berpotensi memberikan manfaat di masa depan. Salah satu komponen signifikan dari investasi ini adalah adanya penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000.000,00 di Bank Jambi, yang mengindikasikan upaya diversifikasi investasi daerah serta dukungan terhadap institusi keuangan regional.

Aset Tetap, yang merupakan komponen terbesar dari total aset, menunjukkan tren kenaikan yang stabil dari Rp1.884.410.850.092,01 di tahun 2020 menjadi Rp2.045.873.821.437,08 di tahun 2024. Kenaikan ini dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan fasilitas publik, yang berdampak positif pada pelayanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun demikian, pada tahun 2024, kenaikan aset tetap ini terjadi di tengah adanya beberapa penyesuaian, termasuk berkurangnya belanja modal dan adanya penghapusan aset, misalnya aset yang keberadaannya tidak jelas seperti kendaraan rusak yang dilelang. Hal ini menunjukkan adanya upaya penertiban dan pembersihan data aset oleh pemerintah daerah untuk mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya.

Aset Lainnya menunjukkan peningkatan dari Rp93.229.164.215,22 di tahun 2020 menjadi Rp109.222.085.062,05 di tahun 2023, namun kemudian menurun drastis menjadi Rp29.618.322.129,24 di tahun 2024. Penurunan signifikan aset lainnya di tahun 2024 ini perlu diinvestigasi lebih lanjut. Salah satu penyebabnya adalah adanya penghapusan aset lainnya pada tahun tersebut, yang kemungkinan besar terkait dengan aset-aset lama yang sebelumnya ditempatkan dalam kategori ini. Selain itu, faktor utama penurunan drastis ini juga disebabkan oleh merosotnya nilai Dana Transfer Dana (TDF) yang sebelumnya tercatat di kategori aset lainnya, di mana pada

tahun 2024 nilai TDF menurun tajam dari Rp 54 miliar menjadi hanya Rp 14 miliar. Kombinasi dari penghapusan aset lama dan penurunan drastis dana TDF ini menjelaskan mengapa kategori aset lainnya mengalami kontraksi yang sangat besar pada tahun 2024.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non-permanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non-permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa

lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Total kewajiban Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan pola yang sangat tidak biasa. Pada tahun 2020, total kewajiban adalah Rp3.964.367.583,49. Namun, pada tahun 2021, kewajiban ini melonjak drastis menjadi Rp18.399.832.255,12, sebelum kemudian turun tajam menjadi Rp1.685.538.355,34 di tahun 2022. Setelah itu, terjadi kenaikan lagi menjadi Rp3.712.358.871,70 di tahun 2023 dan melonjak sangat tinggi menjadi Rp12.189.145.201,09 di tahun 2024.

Pola kewajiban jangka pendek yang tidak stabil ini, terutama lonjakan ekstrem di tahun 2021 dan 2024, mengindikasikan kemungkinan adanya utang jangka pendek yang besar yang harus dilunasi dalam waktu singkat. Lonjakan ini bisa disebabkan oleh pinjaman jangka pendek, utang usaha yang jatuh tempo, atau pembayaran kewajiban lainnya. Khususnya pada tahun 2024, peningkatan kewajiban jangka pendek yang signifikan ini sebagian besar disebabkan oleh adanya retensi (utang belanja) yang tidak dapat dibayarkan sepenuhnya karena terbatasnya dana kas di bank. Kondisi ini menyoroti potensi masalah likuiditas jangka pendek yang perlu dikelola dengan cermat untuk memastikan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban tepat waktu.

Kewajiban Jangka Panjang konsisten nol sepanjang periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak memiliki utang jangka panjang atau telah berhasil melunasi seluruh kewajiban jangka panjangnya, yang merupakan indikator positif dalam hal keberlanjutan fiskal daerah.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Paparan neraca daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2020-2024 disajikan seperti berikut ini.

Ekuitas Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum menunjukkan tren kenaikan yang stabil dari Rp2.101.151.030.419,42 di tahun 2020 menjadi Rp2.370.258.072.522,69 di tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, ekuitas sedikit menurun menjadi Rp2.204.576.032.985,83. Kenaikan ekuitas secara umum menunjukkan bahwa aset daerah lebih besar daripada kewajibannya, yang merupakan indikator kesehatan keuangan yang baik. Penurunan di tahun 2024, meskipun tidak drastis, perlu dikaji lebih lanjut kaitannya dengan penurunan aset di tahun yang sama. Ekuitas merupakan modal daerah, dan penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya penghapusan aset yang mengurangi nilai aset daerah secara keseluruhan, sehingga berdampak pada ekuitas. Selain itu, berkurangnya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) juga berkontribusi pada penurunan ekuitas, karena SiLPA mencerminkan akumulasi surplus kas pemerintah daerah yang merupakan bagian dari ekuitas. Dengan SiLPA yang kecil, kontribusi terhadap peningkatan ekuitas menjadi terbatas.

Hubungan antara Ekuitas dan Kewajiban sangat penting. Meskipun kewajiban mengalami lonjakan, ekuitas masih jauh lebih besar daripada kewajiban, menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajibannya. Namun, pola fluktuasi kewajiban yang ekstrem, terutama peningkatan di tahun 2024, perlu diperhatikan agar tidak menggerus ekuitas secara signifikan di masa mendatang, terutama jika disertai dengan penurunan aset dan SiLPA yang terus menerus.

Tabel 2.139
Neraca Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024

No	Uraian	Nilai (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	ASET					
	Aset Lancar	81.461.026.695,68	186.825.226.594,70	154.564.120.471,16	141.645.591.438,40	63.598.940.093,50
	Investasi Jangka Panjang	46.014.357.000,00	46.514.000.000,00	50.000.000.000,00	56.000.000.000,00	61.000.000.000,00
	Aset Tetap	1.884.410.850.092,01	1.921.351.603.726,23	1.915.131.434.619,89	2.067.102.754.893,94	2.045.873.821.437,08
	Aset Lainnya	93.229.164.215,22	92.816.067.015,22	108.101.668.891,22	109.222.085.062,05	29.618.322.129,24
	JUMLAH ASET	2.105.115.398.002,91	2.247.506.897.336,15	2.227.797.223.982,27	2.373.970.431.394,39	2.200.091.083.659,82
B	KEWAJIBAN					
	Kewajiban Jangka Pendek	35.187.315,00	93.912.995,00	0,00	0,00	12.189.145.201,09
	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.964.367.583,49	18.399.832.255,12	1.685.538.355,34	3.712.358.871,70	12.189.145.201,09
C	EKUITAS					
	Ekuitas	1.744.071.352.226,74	0,00	0,00	2.270.452.390.192,32	2.204.576.032.985,83
	JUMLAH EKUITAS	1.744.071.352.226,74	0,00	0,00	2.270.452.390.192,32	2.204.576.032.985,83
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.748.035.719.810,23	18.399.832.255,12	1.685.538.355,34	2.274.164.749.064,02	2.216.765.178.186,92

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

2.2.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebuah tuntutan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksudkan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan. Untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah dan defisit anggaran yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan asumsi-asumsi yang akurat sebagai dasar rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita dan tingkat inflasi; dan (ii) pokok-pokok kebijakan fiskal daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah, seperti perkiraan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan strategi peningkatan pendapatan daerah dan proyeksi variabel-variabel keuangan daerah di atas maka proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 2.140.

Tabel 2.140
Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026 -2030

Kode Rek.	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN	1.070.891.767.836,00	1.097.977.413.283,15	1.125.752.690.404,02	1.154.235.214.706,58	1.183.443.053.327,97	1.213.394.736.662,52
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87.390.250.251,00	89.888.357.758,53	92.461.408.491,28	95.111.650.746,02	97.841.400.268,40	100.653.042.276,45
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	43.671.774.415,00	44.981.927.647,45	46.331.385.476,87	47.721.327.041,18	49.152.966.852,41	50.627.555.857,98
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	1.064.808.000,00	1.096.752.240,00	1.129.654.807,20	1.163.544.451,42	1.198.450.784,96	1.234.404.308,51
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.050.000.000,00	9.321.500.000,00	9.601.145.000,00	9.889.179.350,00	10.185.854.730,50	10.491.430.372,42
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	33.603.667.836,00	34.488.177.871,08	35.399.223.207,21	36.337.599.903,43	37.304.127.900,53	38.299.651.737,55
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	983.501.517.585,00	1.008.089.055.524,62	1.033.291.281.912,74	1.059.123.563.960,56	1.085.601.653.059,57	1.112.741.694.386,06
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	930.754.529.000,00	954.023.392.225,00	977.873.977.030,63	1.002.320.826.456,39	1.027.378.847.117,80	1.053.063.318.295,75
	1) Dana Perimbangan	861.665.614.000,00	883.207.254.350,00	905.287.435.708,75	927.919.621.601,47	951.117.612.141,51	974.895.552.445,04
	a) Dana Transfer Umum	745.049.371.000,00	763.675.605.275,00	782.767.495.406,88	802.336.682.792,05	822.395.099.861,85	842.954.977.358,39
	(1) DBH	192.011.834.000,00	196.812.129.850,00	201.732.433.096,25	206.775.743.923,66	211.945.137.521,75	217.243.765.959,79
	(2) DAU	553.037.537.000,00	566.863.475.425,00	581.035.062.310,63	595.560.938.868,39	610.449.962.340,10	625.711.211.398,60
	b) Dana Transfer Khusus	116.616.243.000,00	119.531.649.075,00	122.519.940.301,88	125.582.938.809,42	128.722.512.279,66	131.940.575.086,65
	(1) DAK Fisik dan	-	-	-	-	-	-
	(2) DAK Non Fisik	116.616.243.000,00	119.531.649.075,00	122.519.940.301,88	125.582.938.809,42	128.722.512.279,66	131.940.575.086,65
	2) Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-
	3) Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
	4) Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-
	5) Dana Desa	69.088.915.000,00	70.816.137.875,00	72.586.541.321,88	74.401.204.854,92	76.261.234.976,29	78.167.765.850,70
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.746.988.585,00	54.065.663.299,62	55.417.304.882,11	56.802.737.504,17	58.222.805.941,77	59.678.376.090,32
	1) Pendapatan Bagi Hasil	43.446.988.585,00	44.533.163.299,62	45.646.492.382,11	46.787.654.691,67	47.957.346.058,96	49.156.279.710,43
	2) Bantuan Keuangan	9.300.000.000,00	9.532.500.000,00	9.770.812.500,00	10.015.082.812,50	10.265.459.882,81	10.522.096.379,88
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
	a. Hibah	-	-	-	-	-	-
	b. Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
	c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-

Kode Rek.	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.	BELANJA	1.109.891.767.836,00	1.136.977.413.283,15	1.164.752.690.404,02	1.193.235.214.706,58	1.222.443.053.327,98	1.252.394.736.662,51
5.1	BELANJA OPERASI	810.220.990.520,28	832.246.046.885,03	850.160.304.520,33	872.324.819.967,61	893.667.933.336,35	916.079.404.378,50
5.1.01	Belanja Pegawai	484.500.220.922,00	493.120.133.131,61	492.523.311.030,89	517.454.241.222,77	542.891.014.971,46	565.925.840.938,86
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.415.348.205,76	302.242.438.595,21	320.168.663.271,57	316.786.750.805,44	312.116.604.175,78	311.493.249.250,53
5.1.03	Belanja Subsidi	70.395.942,46	71.516.784,42	72.650.814,03	73.844.259,55	74.962.062,10	74.962.062,10
5.1.04	Belanja Hibah	36.082.471.087,47	36.656.975.045,49	37.238.238.530,96	37.849.956.502,82	38.422.902.570,93	38.422.902.570,93
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	152.554.362,59	154.983.328,30	157.440.872,86	160.027.177,03	162.449.556,08	162.449.556,08
5.2	BELANJA MODAL	140.303.266.974,22	143.711.234.001,25	147.212.178.492,73	150.838.497.787,86	154.484.315.911,72	158.218.254.707,59
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.356.871.015,95	13.681.309.476,92	14.014.599.392,51	14.359.824.989,40	14.706.906.874,80	15.062.377.848,16
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.376.790.321,93	38.284.672.737,93	39.217.324.350,46	40.183.375.810,69	41.154.621.758,88	42.149.343.054,10
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	87.240.571.404,57	89.359.645.301,97	91.536.532.586,78	93.791.377.924,49	96.058.347.633,91	98.380.110.777,18
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.048.427.697,82	2.098.184.016,42	2.149.297.805,99	2.202.242.067,70	2.255.471.012,31	2.309.986.518,73
5.2.06	Belanja Modal Dana BOS	280.606.533,95	287.422.468,00	294.424.356,99	301.676.995,58	308.968.631,82	316.436.509,42
5.2.07	Belanja Modal BLUD	-	-	-	-	-	-
2.3.	BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	157.367.510.341,50	159.020.132.396,87	165.380.207.390,97	168.071.896.951,11	172.290.804.079,91	176.097.077.576,41
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	4.473.658.241,50	2.303.933.994,37	4.746.104.028,41	3.421.941.004,48	3.524.599.234,62	3.111.717.609,99
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.473.658.241,50	2.303.933.994,37	4.746.104.028,41	3.421.941.004,48	3.524.599.234,62	3.111.717.609,99
2.4.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	152.893.852.100,00	156.716.198.402,50	160.634.103.362,56	164.649.955.946,63	168.766.204.845,29	172.985.359.966,43
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	143.593.852.100,00	147.183.698.402,50	150.863.290.862,56	154.634.873.134,13	158.500.744.962,48	162.463.263.586,54
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	9.300.000.000,00	9.532.500.000,00	9.770.812.500,00	10.015.082.812,50	10.265.459.882,81	10.522.096.379,88
	SURPLUS/(DEFISIT)	(39.000.000.000,00)	(39.000.000.000,00)	(39.000.000.000,00)	(39.000.000.000,00)	(39.000.000.000,00)	(39.000.000.000,00)
C	PEMBIAYAAN	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
4.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
4.1.1.	Penggunaan SiLPA	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
4.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	39.000.000.000,00	39.000.000.000,00	39.000.000.000,00	39.000.000.000,00	39.000.000.000,00	39.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	-	0,00	(0,00)	-0,00	0,00
	TOTAL APBD	1.110.891.767.836,00	1.137.977.413.283,15	1.165.752.690.404,02	1.194.235.214.706,58	1.223.443.053.327,97	1.253.394.736.662,52

Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2026-2030 mengindikasikan dinamika fiskal yang perlu di cermati secara seksama dalam penyusunan RPJMD. Secara agregat, Jumlah Pendapatan daerah diproyeksikan tumbuh dari Rp1.318.985.314.934,57 pada tahun 2026 menjadi Rp1.453.524.896.862,53 pada tahun 2030 dengan pertumbuhan rata-rata yang disesuaikan sebesar 2.46 persen per tahun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang konsisten. Komponen ini meningkat dari tahun 2026 senilai Rp73.499.737.132,45 menjadi Rp79.558.479.223,7 di tahun 2030. Hal ini didorong oleh potensi daerah dan wacana pemekaran Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pengelolaan berbagai sumber PAD, termasuk retribusi daerah melalui maksimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola. Namun, struktur Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer yang mencapai Rp1.332.623.872.030,44 atau lebih dari 90 persen dari total pendapatan pada tahun 2030. Salah satu asumsi meningkatnya pendapatan transfer ini dikarenakan adanya Kolaborasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk pertukaran data dan informasi dalam rangka pengejaran pajak pusat dan daerah. Namun demikian, meskipun PAD menunjukkan pertumbuhan stabil, ketergantungan pada transfer pemerintah pusat tetap tinggi. Selain itu, adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) turut berkontribusi pada peningkatan DAU.

Di sisi Belanja Daerah, total pengeluaran untuk belanja daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1.364.643.068.185,44 di tahun 2026 menjadi Rp1.624.108.536.312,54 di tahun 2030, dengan pertumbuhan rata-rata 2,48 persen per tahun. Belanja Operasi diproyeksikan meningkat dari Rp807.128.751.879,02 di tahun 2026 menjadi 873.662.118.294,51 di tahun 2030, seiring dengan adanya penerimaan CPNS dan P3K yang berdampak pada

peningkatan Belanja Pegawai. Belanja Modal menunjukkan pertumbuhan paling signifikan, yaitu rata-rata 10,13 persen per tahun dari tahun 2020-2024. Rata-rata pertumbuhan Belanja Modal untuk tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami pertumbuhan 10 persen setiap tahun dari Rp401.906.204.995,87 di tahun 2026 menjadi Rp588.430.874.734,46. Proyeksi ini menggambarkan optimisme pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program-program unggulan daerah di masa depan.

Tren Defisit Anggaran menjadi tantangan serius, dengan proyeksi defisit meningkat dari Rp-45.657.753.250,87 di tahun 2026 menjadi Rp-170.583.639.450,01 di tahun 2030. Di sisi lain, Tren defisit ini mengindikasikan adanya potensi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. Peningkatan belanja yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pendapatan menjadi faktor utama dalam proyeksi defisit ini.

Lebih lanjut, analisis terhadap Pembiayaan Daerah menunjukkan bahwa Penerimaan Pembiayaan, yang diasumsikan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, diproyeksikan menurun secara signifikan dari Rp85.341.873.348,69 pada tahun 2026 menjadi Rp-86.626.164.668,29 pada tahun 2030. Hal ini sejalan dengan tren defisit yang diproyeksikan, di mana SiLPA yang tersedia untuk menutupi defisit semakin menipis. Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan relatif stabil. Akibatnya, Pembiayaan Netto menunjukkan tren penurunan yang signifikan, dari Rp67.765.637.876,97 pada tahun 2026 menjadi Rp-86.626.164.668,29 pada tahun 2030. Hal ini semakin memperkuat perlunya pengelolaan fiskal yang prudent dan upaya peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan untuk menghindari ketergantungan pada pembiayaan dari SiLPA dan menjaga stabilitas keuangan daerah.

Perhitungan kerangka pendanaan daerah merupakan suatu hal yang krusial bagi perencanaan baik dalam jangka menengah maupun jangka pendek. Hal ini akan memberikan gambaran mengenai sumber daya finansial

yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program, proyek, dan kegiatan yang direncanakan. Adapun perhitungan dari kerangka pendanaan ini akan menghasilkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Dengan analisis ini akan didapatkan informasi yang sangat berharga mengenai sejauh mana pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan keuangannya, apakah akan cukup untuk menutupi seluruh belanja yang direncanakan, atau apakah perlu adanya penyesuaian anggaran untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja.

Tabel 2.141

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026-2030

No	Uraian	Proyeksi Kapasitas Riil Daerah					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	1.070.891.767.836,00	1.097.977.413.283,15	1.125.752.690.404,02	1.154.235.214.706,58	1.183.443.053.327,97	1.213.394.736.662,52
2	Pencairan dana cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0
3	Penerimaan Pembiayaan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
A	Total penerimaan (jumlah 1+2+3)	1.110.891.767.836,00	1.137.977.413.283,15	1.165.752.690.404,02	1.194.235.214.706,58	1.223.443.053.327,97	1.253.394.736.662,52
Dikurangi							
4	Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	969.588.500.861,78	993.266.179.281,90	1.017.540.511.911,30	1.042.396.716.918,72	1.067.958.737.416,26	1.094.176.481.954,92
5	Pengeluaran pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
B	Total pengurang	970.588.500.861,78	994.266.179.281,90	1.018.540.511.911,30	1.043.396.716.918,72	1.068.958.737.416,26	1.095.176.481.954,92
(A-B)	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	140.303.266.974,22	143.711.234.001,25	147.212.178.492,73	150.838.497.787,86	154.484.315.911,72	158.218.254.707,60

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa meskipun proyeksi pendapatan daerah menunjukkan tren peningkatan dari Rp1.070.891.767.836 pada tahun 2025 menjadi Rp1.213.394.736.662,52 pada tahun 2030, laju pertumbuhan belanja daerah diproyeksikan cenderung stabil. Hal ini tercermin dalam proyeksi surplus/defisit yang bergerak stabil sebesar Rp39.000.000.000 pada tahun 2025 sampai tahun 2030. Defisit yang diproyeksikan ini secara langsung mengurangi kapasitas riil pendanaan pembangunan dari sumber internal daerah. Meskipun penerimaan pembiayaan, yang diasumsikan bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, diproyeksikan masih dapat menutupi sebagian defisit pada awal periode proyeksi, yaitu sebesar Rp39.000.000.000 pada tahun 2025-2030.

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2025-2030 ini mengindikasikan adanya tren peningkatan kemampuan fiskal untuk mendanai pembangunan. Peningkatan pendapatan daerah diproyeksikan dapat mengimbangi laju pertumbuhan belanja. Secara keseluruhan, proyeksi ini memberikan sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu mengambil tindakan proaktif dan strategis dalam mengelola keuangan daerah agar tetap memiliki kapasitas yang memadai untuk membiayai pembangunan dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah di masa mendatang.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dianalisis berdasarkan lima pokok permasalahan yaitu permasalahan terkait pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan ekonomi, infrastruktur, kewilayahan dan lingkungan hidup, serta permasalahan terkait tata kelola pemerintahan daerah.

1. Permasalahan Infrastruktur Kewilayahan

Kualitas infrastruktur kewilayahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menghadapi tantangan signifikan yang berdampak terhadap konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian infrastruktur kewilayahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Pilar Infrastruktur, yang pada tahun 2022 sebesar 2,59 kemudian menurun pada tahun 2023 sebesar 2,55. Pada tahun 2024 meningkat sebesar 2,87, berada di atas capaian Provinsi Jambi sebesar 2,42. Namun capaian tersebut masih di bawah skor nasional yang sudah mencapai 3,43 pada 2024.

Permasalahan utama terletak pada rendahnya kualitas jaringan infrastruktur jalan, yang menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antarwilayah. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pemenuhan standar pelayanan infrastruktur dasar, khususnya pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yang menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan wilayah yang inklusif dan berdaya saing.

Selain itu, layanan transportasi publik yang belum optimal turut memperburuk kualitas mobilitas masyarakat, terutama dari aspek kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan. Hal ini menunjukkan keterbatasan dalam tata kelola dan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Rendahnya kualitas layanan transportasi tersebut mencerminkan adanya hambatan dalam penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang memadai, serta kurangnya investasi pada moda transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan di sektor perhubungan.

Permasalahan berikutnya muncul dalam aspek perumahan dan kawasan permukiman, di mana akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang tertata masih terbatas. Rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman menunjukkan ketimpangan dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman, seperti sanitasi, drainase, dan

jalan lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan belum optimalnya pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah guna mendorong perbaikan kualitas permukiman secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tabel 2.142
Analisis Permasalahan Inti Infrastruktur Kewilayahan di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Urusan
Kualitas Infrastruktur Daerah Masih Rendah	Kualitas Aksesibilitas Konektivitas Antar Wilayah Masih Rendah	Akses masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang berkualitas masih rendah	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kualitas layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau masih rendah	Urusan Perhubungan
	Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih rendah	Akses Perumahan dan Permukiman Berkualitas Masih Rendah	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Hasil DKT, 2025

Berdasarkan Tabel 2.142 dapat dilihat permasalahan inti atau permasalahan pokok ada pada capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Pilar Infrastruktur yang masih rendah dan selanjutnya permasalahan ini diuraikan menjadi masalah dan akar masalah yang menyebabkannya. Permasalahan kualitas aksesibilitas konektivitas antarwilayah merupakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan, serta permasalahan kualitas perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan perumahan dan kawasan permukiman. Berikut uraian masalah yang dibagi menjadi dua masalah dan beberapa akar masalah.

a) Kualitas Aksesibilitas Konektivitas Antarwilayah Masih Rendah

Rendahnya kualitas aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kualitas infrastruktur daerah di

Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum optimal. Kondisi ini ditandai dengan capaian nilai Indeks Konektivitas Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masih rendah. Analisis permasalahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.143
Analisis Masalah Kualitas Aksesibilitas Konektivitas Antarwilayah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
Kualitas Aksesibilitas Konektivitas Antar Wilayah Masih Rendah	Akses masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang berkualitas masih rendah	Aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman masih rendah	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kualitas layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau masih rendah	Kualitas layanan transportasi darat masih rendah	Urusan Perhubungan
		Kualitas layanan transportasi sungai masih rendah	

Sumber: Hasil DKT, 2025

Beberapa akar masalah yang diidentifikasi menjadi penyebab rendahnya kualitas aksesibilitas konektivitas antarwilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dijelaskan sebagai berikut.

1) Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Jalan yang Berkualitas Masih Rendah

Akar masalah ini dapat dilihat pada capaian kualitas layanan infrastruktur jalan yang masih rendah. Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman masih rendah ditunjukkan dengan capaian tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengalami tren penurunan dari 76,90 persen pada 2021 menjadi 16,67 persen pada 2024. Beberapa faktor utama yang menyebabkan akses masyarakat terhadap

infrastruktur jalan yang berkualitas masih rendah di wilayah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Hal ini tercermin karena terbatasnya jaringan jalan antarkecamatan dan desa yang memenuhi standar teknis, baik dari segi struktur maupun kondisi fisik. Akar permasalahan ini berasal dari keterbatasan akses masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang berkualitas, yang disebabkan oleh minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, keterbatasan kapasitas teknis dalam perencanaan wilayah, serta tantangan geografis seperti kondisi lahan gambut dan wilayah perairan yang menyulitkan pembangunan fisik.

2) Kualitas Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau Masih Rendah

Akar masalah berikutnya adalah kualitas layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau yang masih rendah yang dapat dilihat pada capaian melalui Rasio Konektivitas pada tahun 2021 sebesar 0,26 persen menurun menjadi 0,02 persen pada 2024. Beberapa faktor utama yang menyebabkan akses masyarakat terhadap kualitas layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau masih rendah di wilayah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Pertama, kualitas layanan transportasi darat yang masih rendah ditunjukkan dengan capaian persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang dalam kondisi ideal masih rendah. Pada tahun 2021 persentasenya mencapai 33,33 persen menurun pada 2024 sebesar 6,00 persen. Capaian tersebut menunjukkan penurunan jaringan jalan eksisting yang mendekati kondisi ideal dan mencerminkan tingkat keterpenuhan infrastruktur konektivitas wilayah secara fungsional dan spasial yang masih belum baik.

Kedua, kualitas layanan transportasi sungai yang masih rendah yang ditunjukkan dengan tidak adanya data terkait pembangunan dermaga yang menjadi tempat untuk melancarkan aktivitas mobilitas barang atau material.

Sehingga dalam hal ini dibutuhkan pembangunan infrastruktur sungai yang dapat memfasilitasi dan mendukung jalur keluar masuknya logistik di kawasan Tanjung Jabung Timur.

b) Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Masih Rendah

Rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman juga turut menyebabkan kualitas infrastruktur daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum optimal. Kondisi ini ditandai dengan masih rendahnya capaian Indeks Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini tercermin dari terbatasnya akses terhadap hunian layak, infrastruktur dasar yang belum memadai, serta lemahnya penataan ruang permukiman. Sehingga berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat dan meningkatnya permukiman kumuh, terutama di wilayah padat dan pinggiran. Analisis permasalahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Tabel 2.144 berikut.

Tabel 2.144
Analisis Masalah Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih rendah	Akses perumahan dan permukiman berkualitas masih rendah	Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Masih Rendah	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan PUPR
		Kawasan permukiman kumuh masih tinggi	
		Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) masih rendah	
		Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum	

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
		(PSU) tingkat kemampuan menengah masih rendah	
		Akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum masih rendah	
		Layanan persampahan masih rendah	
		Akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah masih rendah	

Sumber: Hasil DKT, 2025

Identifikasi terhadap akar masalah yang menjadi penyebab rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Akses Perumahan dan Permukiman Berkualitas Masih Rendah

Rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman turut memperparah kondisi infrastruktur daerah secara keseluruhan, karena berimplikasi pada rendahnya kualitas hidup masyarakat di wilayah permukiman. Hal ini dapat dilihat pada capaian Indeks Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masih rendah. Beberapa faktor utama yang menyebabkan akses perumahan dan kawasan permukiman masih rendah di wilayah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Pertama, pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, korban bencana dan yang terkena dampak relokasi akibat kebijakan pemerintah masih rendah. Hal ini dibuktikan pada capaian Persentase Rumah Tangga Miskin yang Memperoleh Rumah Layak Huni masih rendah, Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni masih rendah dan Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni juga masih rendah.

Kedua, pengelolaan kawasan permukiman yang masih rendah dilihat pada capaian persentase luas kawasa kumuh 10-15 Ha yang ditangani menunjukkan penurunan dari 4,12 persen pada 2020 menjadi 3,92 persen pada 2024. Penurunan persentase kawasan kumuh yang ditangani mencerminkan masih terbatasnya intervensi program peningkatan kualitas permukiman, baik dari sisi pembiayaan, kolaborasi lintas sektor, maupun pelibatan masyarakat secara aktif.

Ketiga, masih rendahnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman yang dapat dilihat pada capaian Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU yang masih belum optimal. Rendahnya penyediaan PSU mencerminkan keterbatasan anggaran, lemahnya integrasi perencanaan kawasan, serta minimnya pengawasan terhadap pengembang, sehingga berdampak pada kualitas layanan dasar di lingkungan permukiman.

Keempat, masih rendahnya peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, registrasi bidang permukiman dan kawasan permukiman yang dapat dibuktikan pada capaian Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang masih belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Rendahnya capaian sertifikasi dan registrasi menunjukkan lemahnya tata kelola dan regulasi teknis, serta kurangnya kapasitas kelembagaan dalam memastikan standar mutu perencanaan permukiman dan infrastruktur PSU secara profesional.

Kelima, masih rendahnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang dapat dibuktikan pada capaian Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum pada 2024 yang terlayani hanya sebesar 40,18 persen, sedangkan total rumah tangga yang belum terlayani sebesar 59,82 persen. Rendahnya layanan air minum mencerminkan keterbatasan cakupan infrastruktur SPAM, kurangnya investasi, serta belum optimalnya

pengelolaan dan distribusi yang berkelanjutan terutama di wilayah terpencil dan pesisir.

Keenam, masih rendahnya pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan regional yang dilihat pada capaian Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah yang mengalami penurunan dari 39,10 persen pada 2020 menjadi sebesar 38,17 persen pada 2024. Penurunan proporsi layanan pengumpulan sampah mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan persampahan, keterbatasan armada dan SDM, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan partisipasi pengelolaan sampah rumah tangga.

Ketujuh, masih rendahnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang dibuktikan pada capaian Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) yang masih rendah. Rendahnya capaian akses sanitasi aman menunjukkan keterbatasan infrastruktur air limbah, kurangnya investasi sistem terpusat, serta belum optimalnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi aman dan sehat.

2. Permasalahan Pembangunan Ekonomi

Ekonomi merupakan fondasi utama dalam kehidupan masyarakat dan negara. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menjadi penentu kualitas hidup, distribusi kekayaan, serta daya saing suatu bangsa di tingkat global. Namun, di balik pencapaian indikator makroekonomi seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), masih tersimpan berbagai permasalahan ekonomi yang kompleks dan berlapis. Permasalahan ini tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan kerapuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, memahami dan menganalisis permasalahan ekonomi menjadi langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Banyak daerah dan negara yang masih bergantung pada sektor-sektor ekonomi primer seperti pertambangan. Ketergantungan ini menjadikan ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga pasar global, perubahan iklim, dan guncangan eksternal lainnya. Misalnya, ketika harga komoditas turun, pendapatan masyarakat langsung terdampak. Kurangnya diversifikasi ekonomi juga membatasi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan peluang usaha baru.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Namun jika dilihat dari indikator tujuannya, pertumbuhan ekonomi, indeks gini dan pendapatan per kapita yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih bersifat fluktuatif dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Permasalahan perekonomian yang fluktuatif dan terancam tidak berkelanjutan menjadi inti permasalahan di kabupaten ini. Permasalahan ini dibagi menjadi permasalahan ekonomi disektor a) primer yaitu ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan galian masih tinggi sementara sektor perikanan dan pertanian masih rendah, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masih mendominasi sebesar 36,04 persen di tahun 2024. Di sisi lain, sektor perikanan dan pertanian kontribusinya terhadap PDRB masih lebih rendah hanya 24,16 persen di tahun 2024. Sementara itu, permasalahan ekonomi disektor b) sekunder yaitu daya saing pasar produk unggulan daerah masih rendah dapat dilihat dari pertumbuhan sektor industri pengolahan. Pertumbuhan kategori industri pengolahan berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, pertumbuhan industri pengolahan sebesar 1,25 persen, namun mengalami kontraksi sebesar 0,20 persen pada tahun 2021. Selanjutnya pertumbuhannya kembali menjadi positif semenjak tahun 2022 hingga mencapai 3,79 persen pada tahun 2024.

Kategori Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 8,05 persen terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024

yang merupakan kontribusi terbesar keempat. Secara nominal, industri pengolahan berkembang dari 1,75 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 2,19 triliun pada tahun 2024. Permasalahan ekonomi di sektor c) tersier yaitu masih rendahnya pertumbuhan sektor perdagangan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun 2020 sebesar 1,25 kemudian mengalami pertumbuhan negatif -0,20 di tahun 2021, naik menjadi 1,89 di tahun 2022, lalu turun menjadi 1,25 di tahun 2023, naik kembali di tahun 2024 menjadi 3,79. Dilihat dari sektor pertumbuhan akomodasi, makan minum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menunjukkan fluktuasi, dimana pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -7,24, lalu naik menjadi 4,03 di tahun 2021, naik lagi di tahun 2022 menjadi 6,86, kemudian naik di tahun 2023 menjadi 9,32 dan turun kembali di tahun 2024 menjadi 7,65.

Tabel 2.145

Analisis Inti Masalah, Masalah dan Urusan yang Terlibat

Inti Masalah	Masalah	Urusan yang Terlibat
Perekonomian Tanjung Jabung Timur Fluktuatif dan terancam tidak berkelanjutan	1.Ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan galian masih tinggi (sektor perikanan dan pertanian rendah)	Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Pertanian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Transmigrasi
	2.Daya saing pasar produk unggulan daerah masih rendah	Urusan Perindustrian Urusan Penanaman Modal Urusan Koperasi dan UMK
	3.Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Urusan Pariwisata Urusan Perdagangan

Sumber: Hasil DKT, 2025

Adapun penjabaran dari masing-masing permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut ini:

a. Ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan galian masih tinggi (sektor perikanan dan pertanian rendah)

Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur hal yang menjadi akar permasalahan dari urusan kelautan dan perikanan adalah kesejahteraan nelayan dan pembudidaya masih rendah . Penyebab dari akar permasalahan ini antarlain a) laut pesisir dan pulau-pulau kecil belum menjadi sumber nilai tambah ekonomi, hal ini dapat dilihat dari indikator rendahnya pertumbuhan produksi sektor perikanan terhadap PDRB b) Kurangnya produksi perikanan tangkap, hal ini dapat dilihat dari indikator persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap c) Kurangnya produksi perikanan budidaya, hal ini dapat dilihat dari indikator persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur d) kurangnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati, hal ini dapat dilihat dari indikator luas kawasan konservasi laut e) kurangnya konsumsi ikan oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari indikator angka konsumsi ikan per kapita/tahun/hari di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur hal yang menjadi akar permasalahan dari urusan pertanian adalah Kesejahteraan petani masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa serabut permasalahan antarlain 1) distribusi dan kualitas sarana dan prasarana produksi masih rendah, hal ini dapat dilihat dari indikator Peningkatan produksi tanaman pangan, Peningkatan produksi hortikultura, peningkatan produksi komoditas peternakan, peningkatan produksi produktivitas Perkebunan 2) terbatasnya distribusi dan kualitas prasarana dasar pertanian, hal ini dapat dilihat dari indikator peningkatan produktivitas pertanian (nilai PDRB sektor pertanian (tidak termasuk perikanan): luas lahan) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3) Kurangnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, hal ini dapat dilihat dari a) Produksi peternakan yang baik (Asuh: Aman, Sehat, Utuh, Hallal)/Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) b) Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki

sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) c) Terpenuhinya kebutuhan SDM pengendali kesehatan hewan ternak 4) Kurangnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, hal ini dapat dilihat dari indikator berupa a) Persentase penanganan dampak bencana pertanian b) Persentase Asuransi Usaha Pertanian /Peningkatan persentase AUTF 5) Kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian masih rendah, hal ini dapat dilihat dari indikator persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan 6) Masih rendahnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian, hal ini dapat dilihat dari a) Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan, b) Persentase jumlah cakupan bina usaha kelompok tani, c) Persentase kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi.

Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur urusan pangan yang menjadi akar permasalahan adalah terbatasnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau. Beberapa faktor penyebab yang menjadi serabut masalah dari akar permasalahan ini di antaranya: a) Kurangnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan hal ini dapat diketahui dari indikator persentase jumlah cadangan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur b) Kurangnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator skor pola pangan harapan c) Kurangnya penanganan kerawanan pangan. Hal ini dapat dilihat dari indikator persentase daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. d) Kurangnya pengawasan mutu dan keamanan pangan. Hal ini dapat dilihat dari indikator persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan.

Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur hal yang menjadi akar masalah dari urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah kurangnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa. Serabut masalah yang menjadi penyebab kurangnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa antarlain: a) Kurangnya kualitas penataan desa. Hal ini dapat dilihat dari indikator persentase fasilitas penataan desa di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur. b) Kurangnya efektivitas kerja sama desa. Hal ini dapat dilihat dari indikator persentase fasilitasi kerja sama desa. c) Kurangnya pembinaan terhadap pemerintahan desa. Hal ini dapat dilihat dari persentase peningkatan kapasitas aparatur Desa dan Anggota BPD. d) Kurangnya pembinaan kelembagaan desa. Hal ini dapat dilihat dari persentase fasilitasi pemberdayaan kelembagaan desa. e) Kurangnya cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa. Hal ini dapat dilihat dari indikator persentase sarana dan prasarana perkantoran desa dalam kondisi baik. Berdasarkan data dari Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022, persentase sarana dan prasarana perkantoran desa yang berada pada kondisi baik f) Kurangnya pengawasan dan pendampingan terhadap program ekonomi desa. Hal ini dapat dilihat indikator persentase BUMDes yang aktif di Kabupten Tanjung Jabung Timur.

Belum optimalnya pembinaan eks transmigrasi dan pengawasan kawasan transmigrasi menjadi akar masalah dari permasalahan transmigrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini dapat dilihat dari Indikator: pendapatan per kapita wilayah transmigrasi (proksi menggunakan persentase penduduk esk transmigran miskin). Sementara itu serabut permasalahan yang menjadi penyebab inti masalah antarlain Belum tersedianya program transmigrasi baru hal ini dapat dilihat dari Indikator: persentase program transmigrasi yang dilaksanakan. Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan kawasan eks transmigrasi hal ini dapat dilihat dari Indikator: persentase luas wilayah yang berkembang. Masih banyaknya lahan eks transmigrasi yang belum bersertifikat, hal ini dapat dilihat dari indikator: persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan.

Tabel 2.146

Analisis Masalah Ketergantungan Terhadap Sektor Pertambangan dan Galian Masih Tinggi (Sektor Perikanan dan Pertanian Rendah)

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
Ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan galian masih tinggi (sektor perikanan dan pertanian rendah)	Kesejahteraan nelayan dan pembudidaya masih rendah	Laut pesisir dan pulau-pulau kecil belum menjadi sumber nilai tambah ekonomi	Urusan kelautan dan perikanan Urusan Pertanian Urusan Pangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Transmigrasi
		Kurangnya produksi perikanan tangkap	
		Kurangnya produksi perikanan budidaya	
		Kurangnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	
		Kurangnya konsumsi ikan oleh masyarakat	
	Kesejahteraan petani masih rendah	Distribusi dan kualitas sarana dan prasarana produksi masih rendah	
		Terbatasnya distribusi dan kualitas prasarana dasar pertanian	
		Kurangnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	
		Kurangnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	
		Kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian masih rendah	
		Masih rendahnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	
		Akses masyarakat terhadap irigasi masih rendah	
	Terbatasnya ketersediaan dan Cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Kurangnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan pangan	
		Kurangnya diversifikasi dan ketahanan masyarakat	
		Kurangnya penanganan kerawanan pangan	
		Kurangnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	
	Kurangnya pemberdayaan	Kurangnya kualitas penataan desa	

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
	masyarakat dan kemandirian desa	Kurangnya efektivitas kerjasama desa	
		Kurangnya pembinaan terhadap pemerintahan desa	
		Kurangnya pembinaan kelembagaan desa	
		Kurangnya cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa	
		Kurangnya pengawasan dan pendampingan terhadap program ekonomi desa	
	Belum optimalnya pembinaan eks transmigrasi dan pengawasan kawasan transmigrasi	Belum tersedianya program transmigrasi baru	
		Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan kawasan eks transmigrasi	
		Masih banyaknya lahan eks transmigrasi yang belum bersertifikat	

Sumber: Hasil DKT, 2025

b. Daya saing pasar produk unggulan daerah masih rendah

Hal yang menjadi akar permasalahan dari urusan perindustrian adalah daya saing industri pengolahan masih rendah hal ini dapat dilihat dari indikator: kontribusi sektor industri pengolahan masih rendah terhadap PDRB. Sementara itu serabut permasalahan yang menjadi penyebab dari inti masalah antaralain: a) Rendahnya realisasi pembangunan industri, hal ini dapat dilihat dari indikator: persentase realisasi investasi sektor industri b) Masih rendahnya realisasi izin pelaku usaha industri hal ini dapat dilihat dari indikator: persentase izin usaha industri yang Diterbitkan c) Terbatasnya informasi industri di wilayah daerah, hal ini dapat dilihat dari indikator: tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini.

Pada Kabupaten Tanjung Jabung timur hal yang menjadi akar permasalahan dari urusan penanaman modal adalah kurangnya iklim investasi yang kompetitif. Hal ini disebabkan oleh beberapa serabut masalah yang menjadi penyebab akar masalah ini antaralain: 1) Kurangnya minat

investor untuk berinvestasi di daerah, hal ini dapat dilihat dari indikator realisasi total terhadap target investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2) Terbatasnya jangkauan promosi penanaman modal, hal ini dapat dilihat dari indikator persentase peningkatan investor yang berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat legalitas izin usaha dan legalitas izin non usaha, hal ini dapat dilihat dari indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 4) Pelaksanaan pengendalian penanaman modal belum optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha 5) Terbatasnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal, hal ini dapat dilihat dari indikator persentase pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal 6) Kurangnya efektivitas kerja sama penanaman modal, hal ini dapat dilihat dari indikator persentase Kerja sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sementara itu, pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur hal yang menjadi akar permasalahan dari urusan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah adalah terbatasnya kontribusi Koperasi dan usaha mikro (UMK) dalam perekonomian. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa serabut masalah yang menjadi penyebab akar permasalahan ini seperti: a) kualitas layanan izin usaha koperasi simpan pinjam yang masih kurang, hal ini dapat dilihat dari indikator pertumbuhan volume usaha koperasi b) kurangnya pembinaan dan pengawasan koperasi, hal ini dapat dilihat dari indikator persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi c) kurangnya kinerja pengelolaan koperasi hal ini dapat dilihat dari indikator persentase koperasi yang aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur d) Terbatasnya kualitas SDM perkoperasian, hal ini dapat dilihat dari indikator persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan e) Produktivitas koperasi yang masih kurang hal ini dapat dilihat dari indikator persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas f) Terbatasnya kapasitas UMK yang tangguh dan mandiri, hal ini

dapat dilihat dari indikator 1) persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke formal 2) pertumbuhan wirausaha g) Daya saing UMK yang masih kurang hal ini dapat dilihat dari indikator Proporsi Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor h) Kurangnya legalitas koperasi, hal ini dapat dilihat dari indikator Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha.

Tabel 2.147

Analisis Masalah Daya Saing Pasar Produk Unggulan Daerah Masih Rendah

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
Daya saing pasar produk unggulan daerah masih rendah	Terbatasnya kontribusi koperasi dan usaha mikro (UMK) dalam perekonomian	Kualitas layanan izin usaha koperasi simpan pinjam yang masih kurang	Urusan Perindustrian Urusan Penanaman Modal Urusan Koperasi dan UMK
		Kurangnya pembinaan dan pengawasan koperasi	
		Kurangnya kinerja pengelolaan koperasi	
		Terbatasnya kualitas SDM perkoperasian	
		Produktivitas koperasi yang masih kurang	
		Terbatasnya kapasitas UMK yang tangguh dan mandiri	
		Daya saing UMK yang masih kurang	
		Kurangnya legalitas koperasi	
	Daya saing industri pengolahan masih rendah	Rendahnya realisasi pembangunan industri	
		Masih rendahnya realisasi izin pelaku usaha industri	
		Terbatasnya informasi industri di wilayah daerah	
	Kurangnya iklim investasi yang kompetitif	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di daerah	
		Terbatasnya jangkauan promosi penanaman modal	
		Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat legalitas izin usaha dan legalitas izin non usaha	
		Pelaksanaan pengendalian	

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
		penanaman modal belum optimal	
		Terbatasnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	
		Kurangnya efektivitas kerjasama penanaman modal	

Sumber: Hasil DKT, 2025

c. Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah

Hal yang menjadi akar masalah dari urusan pariwisata di Kabupaten Tanjung Timur adalah kurangnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif. Serabut masalah yang menjadi penyebab akar permasalahan ini antarlain 1) Daya tarik destinasi pariwisata yang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari a) persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan b) persentase peningkatan kualitas dan kuantitas produk pariwisata 2) Terbtasnya jangkauan pemasaran pariwisata, hal ini dapat dilihat dari indikator persentase peningkatan media pemasaran pariwisata 3) Kurangnya kualitas ekosistem kreatif, hal ini dapat dilihat dari indikator persentase pelaku ekonomi kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual 4) Kapasita SDM pengelola pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari indikator Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi.

Hal yang menjdi akar masalah dari urusan perdagangan adalah Kurangnya nilai tambah perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator: Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Sementara itu beberapa hal yang menjadi serabut permasalahan di antaranya a) Kurangnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha, hal ini disarkan pada indikator: persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi. b) Kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi masih terbatas, hal ini dapat dilihat dari indikator: persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya c) Kelancaran distribusi dan stabilitas harga

barang kebutuhan pokok dan barang penting masih terbatas (barang dalam pengawasan) hal ini dapat dilihat dari indikator: Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (barang dalam pengawasan) d) Pelaku usaha yang berorientasi ekspor masih terbatas, hal ini dapat dilihat dari indikator: nilai ekspor barang yang berasal dari wilayah d) Kurangnya tertib niaga dan mutu produk, hal ini dapat dilihat dari indikator: Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen e) Kurangnya tertib niaga dan mutu produk, hal ini dapat dilihat dari indikator: Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen f) Terbatasnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, hal ini dapat dilihat dari indikator: 1) Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan 2) Persentase penggunaan produk dalam negeri (usulan opd).

Tabel 2.148

Analisis Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Perdagangan dan Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Kurangnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Daya tarik destinasi pariwisata yang masih rendah	Urusan Pariwisata Urusan Perdagangan
		Terbatasnya jangkauan pemasaran pariwisata	
		Kurangnya kualitas ekosistem kreatif	
		Kapasita SDM pengelola pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih rendah	
	Kurangnya nilai tambah perdagangan	Kurangnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	
		Kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi masih terbatas	
		Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masih terbatas (barang dalam pengawasan) Pelaku usaha yang	

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
		berorientasi ekspor masih terbatas	
		Kurangnya tertib niaga dan mutu produk	
		Terbatasnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	
		Terbatasnya kemampuan pengelola sarana perdagangan	

Sumber: Hasil DKT, 2025

3. Permasalahan Lingkungan Hidup

Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga kualitas lingkungan hidupnya, sebagaimana tercermin dalam fluktuasi dan kecenderungan menurun pada sejumlah indikator utama. Secara umum, kualitas lingkungan hidup di wilayah ini masih berada dalam kategori sedang namun tidak stabil. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan tren positif dengan nilai Tanjung Jabung Timur menurun dari 70,99 pada tahun 2020 menjadi 65,87 pada 2022, sebelum kembali meningkat menjadi 73,25 pada 2024, dan masih di atas skor IKLH Nasional sebesar 72,54 dan IKLH Provinsi Jambi sebesar 72,44. Dinamika ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan belum mampu secara konsisten menekan degradasi yang terjadi di sektor-sektor kritis. Permasalahan lingkungan hidup di daerah ini tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan daerah secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan perlu dilakukan melalui pendekatan integratif, berbasis bukti, serta diperkuat dengan tata kelola yang adaptif.

Tabel 2.149

Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Urusan
Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah	Masih rendahnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Masih Rendah	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan PUPR
		Masih Rendahnya Kualitas Tutupan Lahan	

Sumber: Hasil DKT, 2025

Masalah utama yang teridentifikasi adalah masih rendahnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Kualitas air yang menurun sering kali disebabkan oleh pembuangan limbah domestik dan industri tanpa pengolahan yang memadai, serta pencemaran dari aktivitas pertanian intensif. Kualitas udara yang rendah kerap dikaitkan dengan kebakaran lahan, emisi kendaraan, dan aktivitas pembakaran terbuka. Sementara itu, rendahnya tutupan lahan dipicu oleh aktivitas pertambangan, konversi lahan hutan dan mangrove untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, dan pemukiman yang tidak terkontrol. Ketiga aspek ini saling terkait dan memperkuat tekanan terhadap ekosistem lokal, mengakibatkan berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan secara keseluruhan.

Terdapat beberapa akar masalah yang diidentifikasi menjadi penyebab rendahnya kualitas air, udara dan tutupan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.150

Analisis Masalah Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
Masih rendahnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Masih Rendah	Penanganan Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Masih Rendah	Urusan Lingkungan Hidup
		Rendahnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan	

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
		Lingkungan yang Diterbitkan	
		Kurangnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masih Rendah	
		Masih rendahnya tata Kelola persampahan	
	Masih Rendahnya Kualitas Tutupan Lahan	Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Masih Rendah	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kualitas Penataan Ruang yang Masih Rendah	

Sumber: Hasil DKT, 2025

a. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Masih Rendah

Pengendalian pencemaran lingkungan yang masih rendah merupakan salah satu akar masalah utama yang menyebabkan turunnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Masalah ini bersifat struktural dan sistemik, serta ditopang oleh sejumlah serabut masalah yang mengindikasikan lemahnya instrumen kelembagaan, teknis, dan sosial dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Ketidakefektifan pengendalian ini memunculkan dampak ekologis yang luas, tercermin dalam fluktuasi negatif berbagai indikator lingkungan yang selama lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang belum stabil dan berkelanjutan. Kondisi ini menuntut evaluasi menyeluruh atas tata kelola lingkungan hidup daerah, khususnya dalam hal pengawasan, partisipasi publik, dan efektivitas implementasi regulasi.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan pengendalian pencemaran lingkungan masih rendah di wilayah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, salah satu penyebab lemahnya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah belum optimalnya penanganan bahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Meskipun data menunjukkan bahwa persentase pengelolaan limbah B3 telah mencapai

100 persen selama periode 2020-2024, capaian ini cenderung bersifat administratif dan tidak menjelaskan kedalaman teknis penanganannya. Ketidakhadiran fasilitas pengolahan limbah yang memadai, minimnya sistem transportasi limbah yang aman, serta keterbatasan kapasitas teknis di tingkat pelaksana dapat menyebabkan potensi pencemaran tetap tinggi. Pengelolaan limbah B3 yang tidak terintegrasi juga dapat menyebabkan kebocoran ke lingkungan, khususnya pada sektor industri dan fasilitas layanan kesehatan, yang berdampak pada kualitas air dan tanah dalam jangka panjang.

Kedua, meskipun tingkat kepatuhan terhadap izin lingkungan meningkat signifikan, dari 74 persen pada 2020 menjadi 100 persen pada 2024, realitas lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan tersebut lebih bersifat formalitas dokumen dibandingkan kepatuhan substansial terhadap implementasi rencana pengelolaan lingkungan. Banyak pelaku usaha yang belum secara konsisten melaksanakan mitigasi dampak lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen persetujuan lingkungan, seperti pengelolaan limbah cair, pengendalian emisi, dan pelestarian lahan. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum lingkungan serta lemahnya monitoring dan evaluasi berkala membuat pengendalian pencemaran hanya bersifat reaktif, bukan preventif, sehingga tidak mampu menghentikan degradasi kualitas air, udara, dan tutupan lahan secara efektif.

Ketiga, lemahnya sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik antar-OPD, sektor swasta, maupun masyarakat sipil menjadi faktor berikutnya yang memperburuk efektivitas pengendalian pencemaran. Kinerja lintas sektor dalam perlindungan lingkungan masih belum terkoordinasi secara optimal, dan banyak program hanya bersifat sektoral tanpa pendekatan ekosistem terpadu. Rendahnya respons dan aksi dari lembaga non-lingkungan terhadap isu pencemaran menunjukkan bahwa isu lingkungan belum diarusutamakan dalam agenda pembangunan daerah. Hal ini berkontribusi terhadap stagnasi upaya pemulihan lingkungan dan lambannya respon terhadap kerusakan yang terjadi, sebagaimana tercermin dalam fluktuasi

Indeks Kualitas Air dan penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan selama periode lima tahun terakhir.

Keempat, lemahnya tata kelola persampahan di daerah ini. Dengan timbulan sampah yang meningkat dari 40.147 ton menjadi 41.294 ton per tahun antara 2020-2024, kapasitas pengelolaan sampah tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Persentase pengelolaan sampah justru menurun dari 39,10 persen menjadi 38,17 persen pada 2024. Ketimpangan ini memperbesar volume sampah yang tidak terkelola dan berpotensi mencemari badan air, udara, dan kawasan terbuka. Minimnya infrastruktur pengolahan sampah, rendahnya penerapan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*), dan belum masifnya edukasi masyarakat membuat sampah menjadi salah satu sumber pencemar utama yang tidak terkendali. Hal ini memperburuk kualitas lingkungan secara umum, terutama di kawasan permukiman padat dan daerah aliran sungai.

b. Rendahnya Kualitas Tutupan Lahan

Penurunan kualitas tutupan lahan merupakan salah satu masalah mendasar yang berkontribusi langsung terhadap degradasi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tutupan lahan yang baik berperan penting dalam menjaga fungsi ekologis wilayah, seperti mengatur siklus air, menyerap emisi karbon, mencegah erosi, serta menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati. Ketika kualitas tutupan lahan menurun, maka terjadi peningkatan tekanan terhadap kualitas air dan udara, yang pada akhirnya menurunkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara keseluruhan. Berdasarkan data, nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengalami penurunan signifikan dari 65,21 pada tahun 2020 menjadi hanya 50,83 pada 2022, dan tidak tercatat pada tahun 2024, mengindikasikan lemahnya kapasitas pengendalian dan pemulihan lahan di daerah tersebut.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan kualitas tutupan lahan masih rendah di wilayah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama,

pengelolaan keanekaragaman hayati yang masih rendah menjadi faktor kunci yang mempercepat degradasi tutupan lahan di wilayah ini. Wilayah Tanjung Jabung Timur memiliki kawasan pesisir, rawa, dan hutan mangrove yang semestinya berperan sebagai penyangga ekosistem dan penjaga kestabilan tutupan lahan. Namun, lemahnya perlindungan terhadap ekosistem tersebut, minimnya zonasi kawasan konservasi berbasis ekoregion, dan belum optimalnya restorasi kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi telah menyebabkan berkurangnya area vegetatif alami. Dalam konteks ini, beberapa wilayah yang memiliki potensi biodiversitas tinggi, mengalami tekanan lahan akibat pembukaan kawasan untuk aktivitas ekonomi tanpa mekanisme perlindungan yang memadai. Akibatnya, fungsi ekologis seperti penyerapan karbon dan pengaturan siklus hidrologi ikut terganggu, berimplikasi pada penurunan kualitas udara dan air.

Kedua, rendahnya kualitas penataan ruang yang menyebabkan tidak terkontrolnya perubahan penggunaan lahan. Tata ruang yang disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga terjadi ketimpangan antara ruang lindung dan ruang budidaya. Konversi kawasan berhutan, sempadan sungai, dan lahan mangrove menjadi permukiman, perkebunan, atau infrastruktur berjalan tanpa pengawasan spasial yang ketat. Di beberapa kecamatan alih fungsi lahan berjalan cepat karena belum adanya instrumen pemantauan zonasi berbasis geospasial secara real-time. Lemahnya penegakan RTRW juga membuat rencana tata ruang menjadi dokumen administratif semata, bukan alat kendali pemanfaatan lahan secara ekologis dan berkelanjutan.

4. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perkembangan suatu daerah dapat diukur dari perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM)nya karena SDM merupakan modal utama dalam pembangunan. Pembangunan bidang sosial mencakup pembangunan manusia, juga masyarakat yang meliputi pembangunan kependudukan,

pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pembangunan masyarakat. Pembangunan di berbagai sektor tersebut merupakan rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia guna mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pembangunan manusia merupakan isu yang sangat penting. Penduduk dalam pembangunan mempunyai peran sebagai pelaku (subjek) dan juga sebagai tujuan (objek). Kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan modal dasar pembangunan suatu negara. Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas (misalnya, mengurangi jumlah penduduk miskin, menurunkan tingkat pengangguran, dan menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi semua penduduk). Dengan SDM yang berkualitas, perekonomian suatu negara dapat berkembang secara optimal dan mampu bersaing dengan negara-negara lain di tingkat global.

Kualitas sumber daya manusia hingga hari ini masih menjadi tantangan Indonesia. Pada tahun 2024, tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu sebesar 52,73 persen dan Sekolah Dasar sebesar 23,83 persen, sedangkan yang berpendidikan diploma/sarjana hanya sekitar 12,82 persen (BPS,2024). Kualitas sumber daya manusia ini sangat terkait dengan kualitas sarana pendidikan, kesehatan, dan akses ke infrastruktur dasar. Dalam perspektif sosial, pembangunan tidak saja berfokus dalam pembangunan ekonomi. Negara bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat terhadap risiko pembangunan ekonomi. Fokus dan perhatian utama dalam paradigma pembangunan adalah manusia karena manusia merupakan tujuan akhir pembangunan. Setiap individu harus dapat dipastikan agar memiliki kesempatan yang sama dalam memperluas pilihan-pilihannya. Konsep ini akan menjamin bahwa semua individu mempunyai capaian pembangunan manusia yang sama, adil, dan merata. Kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah dicapai.

Untuk dapat menjelaskan kondisi eksisting pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka analisis ini menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. IPM ini telah dijadikan sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) karena IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan manusia suatu wilayah/negara, dan bagi Indonesia (BPS, 2020). Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek dari IPM yang perlu diperhatikan, yaitu status pencapaian dan tingkat kecepatan.

Berdasarkan status pencapaian, IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam lima tahun terakhir (2020-2024) berada dalam kategori sedang ($60 \leq \text{Nilai IPM} < 70$) dengan posisi paling rendah jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan Provinsi Jambi. Dengan demikian secara rata-rata, pembangunan manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih di bawah rata-rata pembangunan manusia di Jambi secara keseluruhan. Sementara, berdasarkan tingkat kecepatan, pertumbuhan IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Jambi, namun hanya mencapai 3,86 persen. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih rendah. Padahal, konsep pembangunan manusia memiliki dua sisi yang harus seimbang, sisi pertama adalah peningkatan kapabilitas fisik penduduk seperti perbaikan derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Dengan demikian dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih rendah, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.151.

Tabel 2.151

Inti Masalah dan Masalah Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Inti Masalah	Masalah	Urusan yang Terlibat
Kualitas Pembangunan Manusia Masih Rendah	Kualitas Pendidikan Rendah	Pendidikan dan Perpustakaan
	Derajat Kesehatan Masyarakat Rendah	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Kualitas Hidup Layak Masih Rendah	Tenaga Kerja, Sosial, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan
	Masih Ada Kesenjangan Pembangunan Manusia Antargender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tenaga Kerja

Sumber: Hasil DKT, 2025

Penjelasan secara lengkap terkait 4 (empat) masalah tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Kualitas Pendidikan Rendah

Kualitas pendidikan adalah fondasi utama bagi pembangunan masyarakat dan kemajuan suatu wilayah karena berperan dalam membentuk individu yang berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing. Analisis Masalah Kualitas Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,7 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di wilayah ini hanya mengenyam pendidikan setingkat kelas 2 SMP atau belum menyelesaikan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Sementara, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 tercatat sebesar 12,21 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak yang berusia 7 tahun di wilayah tersebut diperkirakan akan menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMA. HLS Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang capaiannya masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional ini mencerminkan keterbatasan untuk keberlanjutan pendidikan di Tanjung Jabung Timur. RLS dan HLS yang rendah ini bisa menjadi indikasi bahwa

kualitas pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk menjamin penduduk dapat memperoleh pendidikan sesuai dengan usianya belum sepenuhnya berhasil. Masalah kualitas pendidikan yang masih rendah ini disebabkan oleh beberapa akar masalah yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.152.

Tabel 2.152

Analisis Masalah Kualitas Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
Kualitas pendidikan masih rendah	Tingkat Intekektualitas Anak Usia Sekolah Rendah	Masih Terdapat Anak yang Tidak Bersekolah	Pendidikan Perpustakaan
		Kualitas Kurikulum Pendidikan Dasar Rendah	
		Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidik Rendah	
		Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan Masih Rendah	
	Tingkat Literasi Masyarakat Rendah	Layanan Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rendah	
		Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Rendah	
		Kualitas Perpustakaan dan Pustakawan rendah	

Sumber: Hasil DKT, 2025

Beberapa akar masalah yang diidentifikasi menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dijelaskan sebagai berikut.

1) Tingkat Intekektualitas Anak Usia Sekolah Rendah

Kualitas pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, yang salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat intekektualitas anak usia sekolah. Rendahnya tingkat intekektualitas ini tercermin dari capaian angka literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Berdasarkan data tahun 2024, angka literasi di

tingkat SD hanya mencapai 61 persen, sedangkan di tingkat SMP sebesar 70,82 persen. Sementara itu, angka numerasi di tingkat SD tercatat sebesar 55,21 persen, dan pada tingkat SMP sebesar 63,07 persen. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kemampuan dasar siswa dalam membaca, memahami, serta menggunakan konsep matematika masih belum optimal.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat intelektualitas anak usia sekolah di wilayah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, masih terdapat anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan formal. Hal ini tercermin dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2024, di mana partisipasi anak usia 5-6 tahun (PAUD) hanya mencapai 73,03 persen, anak usia 7-15 tahun (SD-SMP) sebesar 97,93 persen, dan untuk pendidikan kesetaraan pada anak usia 7-18 tahun hanya sebesar 9,29 persen. Selain itu, kasus putus sekolah juga masih terjadi, dengan angka 0,42 persen pada jenjang SD dan 1,62 persen pada jenjang SMP.

Kedua, Kualitas Kurikulum Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat ini masih tergolong rendah, yang ditandai dengan belum optimalnya implementasi Kurikulum Merdeka serta ketiadaan pengembangan kurikulum muatan lokal (Mulok) di satuan pendidikan. Berdasarkan data, belum pernah ada satu pun sekolah di wilayah ini yang mengembangkan kurikulum Mulok secara mandiri yang berbasis pada potensi, budaya, dan karakteristik daerah setempat. Kurikulum Mulok yang dilaksanakan saat ini masih mengacu pada struktur Kurikulum 2013 (K-13) dan bersifat generik, belum menggambarkan kekhasan lokal yang seharusnya menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan memperkuat identitas daerah. Di sisi lain, penerapan Kurikulum Merdeka juga belum merata di seluruh sekolah dasar, yang menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas institusi pendidikan dalam melakukan inovasi kurikulum, baik dari sisi SDM, sarana prasarana, maupun dukungan regulasi.

Ketiga, Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 masih tergolong rendah, yang

ditunjukkan oleh hanya 49,16 persen guru yang memiliki sertifikat pendidik, meskipun 85,05 persen guru telah berkualifikasi pendidikan minimal S1. Ketimpangan antara kualifikasi akademik dan kepemilikan sertifikat pendidik ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar guru telah memenuhi syarat pendidikan formal, banyak di antaranya belum mengikuti atau lulus proses sertifikasi, sehingga berimplikasi pada kualitas pengajaran, pemenuhan standar nasional pendidikan, serta pemerataan distribusi guru kompeten di wilayah ini.

Keempat, Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan Masih Rendah, yang salah satunya tercermin dari tidak adanya penerbitan atau pembaruan izin satuan pendidikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan oleh persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan atau diperbarui sebesar 0 persen sejak lima tahun terakhir, yang berarti tidak ada satuan pendidikan baru yang diresmikan maupun pembaruan legalitas institusi yang dilakukan. Kondisi ini mengindikasikan stagnasi dalam pengembangan kelembagaan pendidikan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Ketiadaan pembaruan izin juga dapat mencerminkan lemahnya pengawasan, evaluasi, dan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang ada, serta minimnya inisiatif atau kebutuhan akan pendirian sekolah baru, terutama di wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Akibatnya, distribusi institusi pendidikan menjadi tidak merata dan berpotensi memperluas kesenjangan akses pendidikan antarwilayah dalam kabupaten.

2) Tingkat Literasi Masyarakat Rendah

Salah satu akar permasalahan dari rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah tingkat literasi masyarakat yang masih rendah. Kondisi ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang pada tahun 2024 hanya mencapai 60,48 persen, menunjukkan bahwa pembangunan literasi belum berjalan optimal. Beberapa faktor yang turut menyebabkan kondisi tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, rendahnya layanan perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya literasi masyarakat. Hal ini tercermin dari Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang pada tahun 2024 hanya mencapai 68,86 persen, yang masih dikategorikan dalam tingkat sedang. Meskipun menunjukkan adanya minat baca, angka ini belum mencerminkan budaya literasi yang kuat.

Kedua, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, yang ditunjukkan oleh tidaknya terdapat data atau dokumentasi mengenai jumlah naskah kuno yang dimiliki, disimpan, maupun direvitalisasi oleh lembaga terkait. Ketiadaan data ini mencerminkan belum adanya upaya yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengarsipkan, dan melestarikan kekayaan intelektual lokal yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi.

Ketiga, Kualitas Perpustakaan dan Pustakawan rendah yang tercermin dari persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat hanya sebesar 1,01 persen pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pengelola perpustakaan di daerah tersebut belum memiliki kompetensi yang dibuktikan secara formal melalui sertifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Rendahnya jumlah tenaga bersertifikat berdampak langsung pada kualitas layanan perpustakaan, mulai dari pengelolaan koleksi, penyusunan katalog, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, keterbatasan tenaga profesional juga menghambat upaya pengembangan program literasi berbasis perpustakaan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat umum.

b. Derajat Kesehatan Masyarakat Rendah

Rendahnya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat dipengaruhi oleh rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan masyarakat menjadi faktor dasar yang penting dalam menciptakan kualitas hidup yang baik dan mendukung produktivitas

yang optimal. Data menunjukkan bahwa UHH Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 berada di angka 67,26 tahun masih di bawah capaian rata-rata provinsi dan nasional. Kesehatan yang rendah berdampak langsung pada kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam sektor ekonomi dan pendidikan, yang pada gilirannya menghambat peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. Kondisi ini juga menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal, sehingga memperlambat laju pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Tanpa kesehatan yang baik, masyarakat tidak dapat berfungsi secara maksimal terhadap keberhasilan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Masalah derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah ini disebabkan oleh beberapa akar masalah yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.153.

Tabel 2.153

Analisis Masalah Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan Terlibat
Derajat Kesehatan Masyarakat rendah	Kualitas Kesehatan Masyarakat rendah	Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat rendah	Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Mutu dan distribusi SDM Kesehatan	
		Kualitas dan distribusi sediaan farmasi dan alat Kesehatan rendah	
		Kualitas pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan masih rendah	
	Kualitas Gizi Masyarakat rendah	Kondisi Asupan Gizi Masyarakat yang Rendah	
		Ketersediaan sanitasi yang belum optimal	
		Tingkat Kelahiran pada Perempuan usia remaja masih tinggi	
	Belum terwujudnya keluarga berkualitas	Pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk masih rendah	
		Pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam pembinaan KB masih rendah	
		Pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) rendah	

Sumber: Hasil DKT, 2025

Beberapa akar masalah yang diidentifikasi menjadi penyebab rendahnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dijelaskan sebagai berikut.

1) Kualitas Kesehatan Masyarakat rendah

Kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, yang ditunjukkan oleh berbagai indikator kesehatan dasar yang belum mencapai standar ideal. Salah satu indikator paling mencolok adalah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 121,06 per 100.000 kelahiran hidup, yang menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi akses, kualitas layanan, maupun kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi. Selain itu, Angka Kematian Balita (AKB) juga masih berada pada level 4,20 per 1.000 kelahiran hidup, mencerminkan masih lemahnya penanganan kesehatan anak usia dini dan gizi balita. Beban penyakit menular dan tidak menular juga menjadi perhatian, seperti prevalensi tuberkulosis (TB) yang mencapai 134,9 per 100.000 penduduk, serta kasus kusta (0,2), demam berdarah dengue (DBD) sebesar 47, dan HIV sebesar 0,002 per 100.000 penduduk. Di sisi lain, penyakit tidak menular menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, seperti hipertensi dengan angka prevalensi 7,39 dan diabetes melitus sebesar 0,62. Berbagai indikator ini mencerminkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menghadapi tantangan dalam memperkuat sistem kesehatan primer, meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, serta memperluas cakupan layanan preventif dan promotif yang merata dan berkualitas. Beberapa faktor yang turut menyebabkan kondisi tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, yang tercermin dari beberapa indikator kinerja pelayanan kesehatan dasar yang belum optimal. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan tahun 2024 hanya

mencapai 80,16, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan standar layanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk. Selain itu, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baru mencapai 88,01 persen, yang berarti masih ada sekitar 12 persen penduduk yang belum terjamin aksesnya terhadap layanan kesehatan melalui skema pembiayaan nasional. Hal ini dapat berdampak pada ketimpangan akses pelayanan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, persentase pelayanan persalinan yang dilakukan di fasilitas layanan kesehatan hanya sebesar 82,33 persen, menandakan bahwa sebagian ibu masih memilih atau terpaksa menjalani proses persalinan di luar fasilitas medis yang aman dan sesuai standar. Ketiga indikator tersebut secara keseluruhan mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan, baik untuk individu maupun komunitas, masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional yang perlu segera direspons melalui kebijakan yang komprehensif dan berbasis kebutuhan lokal.

Kedua, mutu dan distribusi sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Dari sisi mutu, persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kesehatan baru mencapai 68 persen, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat sepertiga tenaga kesehatan yang belum mengikuti peningkatan kapasitas atau pelatihan berbasis standar profesi. Hal ini berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan medis dan nonmedis di berbagai fasilitas kesehatan, terutama dalam menghadapi penyakit menular dan tidak menular yang kian kompleks. Sementara itu, dari sisi distribusi, hanya 41,18 persen Puskesmas yang memiliki jenis SDM kesehatan sesuai standar, menunjukkan ketimpangan dalam penyediaan tenaga kesehatan lintas profesi seperti dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan di tingkat layanan dasar. Di tingkat rumah sakit, capaian distribusi SDM kesehatan sesuai standar juga masih terbatas, yakni hanya sebesar 50 persen, yang artinya separuh dari

rumah sakit di kabupaten ini belum sepenuhnya memenuhi komposisi ideal tenaga kesehatan sesuai regulasi. Ketimpangan ini menandakan perlunya strategi yang lebih agresif dan sistematis dalam pemetaan kebutuhan, pemerataan penempatan, serta peningkatan kompetensi SDM kesehatan agar pelayanan dapat menjangkau seluruh wilayah secara adil dan profesional.

Ketiga, kualitas dan distribusi sediaan farmasi serta alat kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, yang berimplikasi pada belum optimalnya pelayanan kesehatan, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ketersediaan obat-obatan esensial, alat kesehatan dasar, serta logistik pendukung belum merata di seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Hal ini berdampak langsung pada penurunan kualitas pelayanan kuratif dan preventif yang seharusnya menjadi penopang utama dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Meskipun persentase cakupan ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan tidak tercatat secara sistematis dalam data resmi, laporan lapangan menunjukkan adanya keterbatasan baik dari sisi jenis, jumlah, maupun kontinuitas distribusi. Ketiadaan data kuantitatif tersebut juga menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan evaluasi dan perencanaan berbasis bukti, sehingga diperlukan sistem monitoring dan pelaporan yang lebih akurat dan terintegrasi antarlembaga.

Keempat, kualitas pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, yang tercermin dari rendahnya persentase rumah tangga yang menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pada tahun 2024, hanya 59,30 persen rumah tangga yang telah memenuhi indikator PHBS, seperti penggunaan air bersih, penggunaan jamban sehat, cuci tangan dengan sabun, serta pemberian ASI eksklusif dan aktivitas fisik teratur. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir separuh rumah tangga belum menerapkan perilaku dasar kesehatan secara konsisten, yang dapat berdampak pada tingginya risiko penyakit berbasis lingkungan dan rendahnya kualitas hidup keluarga. Rendahnya angka ini juga

mencerminkan masih terbatasnya efektivitas program promosi kesehatan, edukasi masyarakat, serta keterlibatan lintas sektor dalam mendukung perubahan perilaku sehat di tingkat rumah tangga.

Kelima, Kualitas gizi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, yang tercermin dari tingginya prevalensi stunting. Pada tahun 2024, prevalensi stunting di wilayah ini mencapai 23,9 persen, jauh di atas ambang batas yang ditetapkan WHO sebesar 20 persen dan masih melebihi target nasional sebesar 14 persen. Angka ini menunjukkan bahwa hampir satu dari empat balita mengalami gangguan pertumbuhan kronis akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas masa depan, dan berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi. Kondisi asupan gizi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menunjukkan permasalahan serius, yang ditunjukkan melalui berbagai indikator antropometri yang mengukur status gizi masyarakat. Berdasarkan data tahun 2024, prevalensi gizi buruk sebesar 1,7 persen menandakan masih adanya anak-anak yang mengalami kekurangan gizi sangat berat, yang berisiko tinggi terhadap kematian dan gangguan pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, angka wasting atau gizi kurang akut mencapai 9,7 persen, yang menunjukkan bahwa hampir satu dari sepuluh anak mengalami kekurangan berat badan terhadap tinggi badannya, mencerminkan adanya masalah asupan gizi dan penyakit infeksi dalam jangka pendek. Di sisi lain, masalah underweight atau berat badan kurang sebesar 17,9 persen menunjukkan bahwa hampir satu dari lima anak masih berada di bawah ambang berat badan ideal, baik karena kekurangan asupan maupun ketidakcukupan gizi kronis. Menariknya, persoalan gizi juga muncul dalam bentuk obesitas sebesar 5 persen, menandakan adanya ketidakseimbangan konsumsi energi dan pola makan tidak sehat yang juga mulai berkembang. Data ini mengindikasikan bahwa permasalahan gizi di daerah ini bersifat ganda (*double burden of malnutrition*), yaitu adanya kasus kekurangan dan

kelebihan gizi secara bersamaan, yang mencerminkan pola konsumsi yang belum seimbang, rendahnya literasi gizi, serta belum optimalnya program intervensi gizi masyarakat.

2) Belum terwujudnya keluarga berkualitas

Belum terwujudnya keluarga berkualitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang pada tahun 2024 hanya mencapai 61,06 persen, menunjukkan bahwa kondisi keluarga di wilayah ini belum sepenuhnya memenuhi indikator ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga sebagaimana diharapkan. Nilai iBangga yang masih berada pada kategori sedang mencerminkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan fungsi-fungsi dasar keluarga, seperti fungsi pengasuhan, perlindungan, ekonomi, sosial budaya, serta pembinaan moral dan spiritual. Beberapa faktor yang turut menyebabkan kondisi tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, upaya pengendalian pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, yang tercermin dari Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) yang mencapai 2,25 pada tahun 2024. TFR sebesar 2,25 berarti rata-rata setiap perempuan usia subur diperkirakan melahirkan lebih dari dua anak sepanjang hidupnya, angka ini masih berada di atas batas ideal pengendalian pertumbuhan penduduk yang ditetapkan nasional, yaitu 2,1. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program keluarga berencana telah berjalan, tingkat kelahiran belum sepenuhnya terkendali. Di sisi lain, tingkat kelahiran pada perempuan usia remaja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong tinggi, yang ditunjukkan oleh Angka Kelahiran Remaja (ASFR) usia 15-19 tahun sebesar 22,42 per 1.000 perempuan usia tersebut. Angka ini mengindikasikan bahwa lebih dari 22 remaja perempuan dari setiap 1.000 telah mengalami kehamilan dan persalinan, suatu kondisi yang mengkhawatirkan karena kehamilan pada

usia dini sangat berisiko bagi kesehatan ibu dan anak, serta berdampak pada kelangsungan pendidikan dan masa depan sosial-ekonomi remaja perempuan. Tingginya angka kelahiran remaja mencerminkan masih terbatasnya akses terhadap pendidikan kesehatan reproduksi, kurangnya komunikasi efektif dalam keluarga, serta belum optimalnya peran layanan kesehatan dan pendidikan dalam mencegah pernikahan dan kehamilan usia dini.

Kedua, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, meskipun angka partisipasi penggunaan alat kontrasepsi menunjukkan tren yang relatif baik. Pada tahun 2024, Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) tercatat sebesar 73,19 persen, menandakan bahwa sebagian besar perempuan usia subur telah menggunakan metode kontrasepsi modern. Namun demikian, angka ini belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pembinaan KB, karena masih terdapat 6,52 persen perempuan dengan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need). Artinya, masih ada perempuan yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak memiliki akses atau tidak menggunakan metode kontrasepsi yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran ber-KB dengan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas layanan yang diberikan.

Ketiga, tingkat pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, mengingat keluarga merupakan unit terkecil yang berperan penting dalam membentuk perilaku hidup sehat, ketahanan sosial, serta pola asuh dan gizi yang mendukung tumbuh kembang anggota keluarga, khususnya anak-anak dan ibu. Idealnya, pemberdayaan keluarga dapat tercermin dari partisipasi aktif dalam berbagai kelompok kegiatan ketahanan keluarga, seperti kelompok Bina Keluarga Balita (BKB),

Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Namun, hingga saat ini belum tersedia data resmi mengenai persentase keluarga yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga evaluasi terhadap efektivitas program pemberdayaan keluarga menjadi sulit dilakukan secara terukur dan objektif. Ketiadaan data ini menunjukkan masih lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan serta kurangnya perhatian terhadap aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan berbasis keluarga.

c. Kualitas Hidup Layak Masih Rendah

Salah satu faktor utama rendahnya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah ketidakmerataan kualitas hidup antar kawasan, yang tercermin dalam tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya daya beli penduduk. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di kabupaten ini mencapai 10,14 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jambi 7,10 persen dan rata-rata nasional 9,03 persen. Ketertinggalan tersebut diperkuat oleh tingkat pengeluaran per kapita masyarakat yang hanya 10.696 ribuan per tahun, lebih rendah daripada provinsi 11.621 ribuan maupun nasional 12.341 ribuan. Kombinasi tingginya kemiskinan dan rendahnya kemampuan konsumsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk belum menikmati standar hidup layak, sehingga memperlebar kesenjangan kesejahteraan dan menjadi penghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menghadapi tantangan serius dalam mengurangi tingkat kemiskinan sehingga berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang tidak merata. Terdapat beberapa akar masalah yang teridentifikasi menjadi penyebab kesenjangan kualitas hidup layak masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lihat Tabel 2.154).

Tabel 2.154

Analisis Masalah Kualitas Hidup Layak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
Kualitas hidup layak masih rendah	Kesejahteraan sosial yang inklusi masih rendah	Pemberdayaan sosial yang masih rendah	Tenaga Kerja Sosial Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan
		Rehabilitasi sosial yang masih rendah	
		Tingkat perlindungan dan jaminan sosial yang rendah	
	Kesempatan dan produktivitas tenaga kerja masih rendah	Belum terkelolanya informasi tenaga kerja	
		Produktivitas tenaga kerja masih rendah	
		Penempatan Tenaga Kerja masih rendah	
		Pekerja yang terlindungi masih rendah	
		Pekerja yang terlindungi hak dasarnya masih rendah	
	Peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olahraga masih rendah	Daya saing kepemudaan masih rendah	
		Pembudayaan dan prestasi olah raga masih rendah	
		Kualitas kepramukaan masih rendah	
	Tingkat berkebudayaan belum maju	Akses Masyarakat terhadap informasi Sejarah masih rendah	
		Warisan budaya yang dilestarikan masih rendah	

Sumber: Hasil DKT, 2025

Beberapa akar masalah yang diidentifikasi menjadi penyebab masih ada kesenjangan pembangunan manusia antargender di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dijelaskan sebagai berikut.

1) Kesejahteraan sosial yang inklusi masih rendah

Rendahnya kesejahteraan sosial yang inklusif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini tercermin dari tidak tersedianya data mengenai Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS), yang seharusnya menjadi indikator penting dalam mengukur pencapaian pembangunan sosial secara komprehensif, termasuk

aspek akses terhadap layanan dasar, perlindungan sosial, dan partisipasi masyarakat rentan. Ketidadaan data IKS tidak hanya menghambat proses pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan kesejahteraan sosial, tetapi juga menyulitkan penyusunan. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan data sosial yang akurat dan berkelanjutan. Akibatnya, intervensi sosial yang dilakukan berpotensi tidak merata dan kurang menjangkau kelompok-kelompok marjinal seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan rumah tangga miskin. Beberapa faktor yang turut menyebabkan kondisi tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, mutu dan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih memerlukan penguatan signifikan, baik dari sisi kapasitas maupun pemerataan peran di lapangan. Hal ini tercermin dari persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) atau relawan sosial yang terlibat dalam penanganan korban bencana baru mencapai 60 persen, yang berarti masih terdapat 40 persen relawan yang belum berperan aktif dalam situasi krisis, padahal keterlibatan langsung sangat penting dalam menjamin kecepatan dan ketepatan layanan. Selain itu, persentase SDM kesejahteraan sosial yang telah meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial baru mencapai 50 persen, menunjukkan bahwa separuh dari tenaga sosial yang ada belum mendapatkan pelatihan atau peningkatan kapasitas sesuai dengan tuntutan pelayanan sosial yang semakin kompleks. Selain itu, hingga saat ini hanya terdapat 2 lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi oleh Kementerian Sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Capaian ini menunjukkan rendahnya peningkatan kualitas lembaga dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Rendahnya jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi mencerminkan lemahnya kapasitas institusional dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini menjadi salah satu akar masalah yang menghambat

peningkatan derajat kehidupan layak, khususnya bagi kelompok rentan dan miskin.

Kedua, rehabilitasi sosial yang masih rendah, Kondisi ini ditunjukkan oleh Jumlah penerima layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun terakhir tercatat hanya 44 orang. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tersebar di wilayah tersebut, seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak jalanan, korban kekerasan, dan lainnya. Rendahnya jumlah penerima rehabilitasi sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan indikator lemahnya dukungan negara dalam mengangkat kehidupan kelompok rentan ke arah yang lebih layak dan bermartabat.

Ketiga, tingkat perlindungan dan jaminan sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, terutama dalam aspek kemandirian ekonomi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Meskipun persentase penerima manfaat yang kebutuhan dasarnya telah terpenuhi mencapai 100 persen, hal ini belum cukup menggambarkan keberhasilan program jaminan sosial secara menyeluruh. Tingkat kemandirian ekonomi penerima manfaat masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 1,64 persen, menandakan bahwa sebagian besar penerima bantuan sosial masih bergantung pada intervensi pemerintah dan belum mampu keluar dari kondisi rentan secara berkelanjutan. Selain itu, tingkat graduasi keluarga miskin rentan dari kemiskinan hanya 0,1 persen, menunjukkan bahwa program perlindungan sosial belum secara signifikan mengubah status sosial ekonomi kelompok sasaran. Sementara itu, dari sisi tata kelola, persentase daerah yang telah melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin mencapai 90 persen, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial secara terintegrasi.

2) Kesempatan dan produktivitas tenaga kerja masih rendah

Salah satu akar permasalahan dari rendahnya kualitas hidup layak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah masih rendahnya Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya mencapai 65,44 persen, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja belum sepenuhnya terserap atau berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif. Beberapa faktor yang turut menyebabkan kondisi tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, belum terkelolanya informasi tenaga kerja secara sistematis menjadi salah satu hambatan utama dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini ditunjukkan oleh tidaknya satu pun kecamatan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja, bahkan pada tingkat kabupaten pun belum tersedia data perencanaan ketenagakerjaan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Ketiadaan dokumen rencana tenaga kerja ini mencerminkan lemahnya sistem pendataan, pemetaan potensi, dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja di wilayah tersebut. Akibatnya, pemerintah daerah kesulitan dalam menyusun strategi penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan lokal, memperkirakan kebutuhan pelatihan vokasi, maupun mengarahkan lulusan pendidikan ke sektor-sektor ekonomi yang relevan. Kondisi ini juga menghambat integrasi program pembangunan ketenagakerjaan lintas sektor dan berpotensi memperburuk mismatch antara kualifikasi tenaga kerja dengan permintaan dunia usaha dan industri.

Kedua, produktivitas tenaga kerja masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya peningkatan produktivitas pada tenaga kerja di sektor-sektor prioritas. Meskipun terdapat upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan, seperti yang ditunjukkan oleh jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan sebesar 75,54% dari target, kenyataannya belum seluruh peserta memiliki kompetensi yang memadai. Pada tahun 2024, hanya 55 orang tenaga kerja yang dinyatakan lulus uji kompetensi dari total 200 peserta yang mendaftar. Fakta ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pelatihan yang diberikan dan kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah untuk meningkatkan kualitas pelatihan,

memperluas akses terhadap uji kompetensi, serta memperkuat keterkaitan antara pelatihan dan kebutuhan riil di lapangan kerja, terutama di sektor-sektor prioritas.

Ketiga, tingkat penempatan tenaga kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, yang tercermin dari persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan hanya sebesar 53,44 persen pada tahun 2024. Artinya, hampir separuh dari pencari kerja yang terdaftar belum memperoleh kesempatan kerja yang sesuai, baik di sektor formal maupun informal. Rendahnya angka penempatan ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, lemahnya konektivitas antara lembaga pelatihan kerja dengan dunia industri, serta terbatasnya informasi pasar kerja yang dapat diakses oleh masyarakat.

Keempat, tingkat perlindungan terhadap pekerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, yang terlihat dari persentase pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial hanya sebesar 28,35 persen pada tahun 2024, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di wilayah tersebut belum menikmati jaminan perlindungan ketenagakerjaan yang layak, termasuk dalam hal keselamatan kerja, jaminan sosial, upah yang adil, serta hak untuk berpartisipasi dalam dialog sosial antara pekerja dan pemberi kerja. Rendahnya cakupan ini mencerminkan masih lemahnya komitmen perusahaan terhadap standar ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan, serta terbatasnya kapasitas pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan oleh instansi terkait. Selain itu, banyak pekerja yang berada di sektor informal atau usaha kecil dan mikro yang belum tersentuh oleh sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga rentan terhadap risiko ekonomi dan sosial. Kondisi ini menuntut adanya upaya yang lebih serius dari pemerintah daerah untuk memperluas cakupan perlindungan pekerja, melalui penguatan regulasi, sosialisasi hak-hak pekerja, serta peningkatan kemitraan antara dunia usaha dan lembaga perlindungan ketenagakerjaan.

Kelima, perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, yang terlihat dari minimnya jumlah tenaga kerja yang memiliki perjanjian kerja resmi. Pada tahun 2024, hanya 650 pekerja yang tercatat memiliki perjanjian kerja secara formal, jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan total angkatan kerja di wilayah ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja masih berada dalam posisi kerja yang tidak terlindungi secara hukum, tanpa kepastian hak atas upah, jaminan sosial, waktu kerja, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. Rendahnya angka ini juga mengindikasikan tingginya tingkat informalitas ketenagakerjaan di daerah tersebut, serta lemahnya pengawasan ketenagakerjaan dan kesadaran pengusaha terhadap pentingnya pemenuhan hak normatif pekerja.

3) Peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olahraga masih rendah

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil partisipasi dan kontribusi pemuda dalam pembangunan, khususnya dalam bidang olahraga. Hal ini disebabkan oleh belum pernah dilakukannya pengukuran terhadap Indeks Partisipasi Olahraga, sehingga indikator ini secara faktual bernilai nol (0). Ketidadaan data ini mencerminkan lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi terhadap keterlibatan pemuda dalam aktivitas olahraga, baik di tingkat komunitas maupun dalam kerangka pembinaan prestasi. Akibatnya, potensi pemuda dalam membangun budaya hidup sehat, membentuk karakter disiplin, dan meraih prestasi olahraga tidak terdokumentasi secara sistematis dan sulit diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan kepemudaan. Ketidakhadiran indikator ini juga menyebabkan rendahnya visibilitas peran pemuda dalam sektor olahraga, yang seharusnya menjadi salah satu wahana strategis pembentukan daya saing dan identitas generasi muda. Beberapa

faktor yang turut menyebabkan kondisi tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, daya saing kepemudaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, yang salah satunya tercermin dari minimnya partisipasi pemuda dalam sektor kewirausahaan. Berdasarkan data tahun 2024, Rasio Wirausaha Pemuda hanya sebesar 0,81 persen, yang berarti hanya 542 orang dari total 67.018 pemuda yang terlibat aktif sebagai pelaku usaha. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas pemuda belum memiliki keterlibatan yang signifikan dalam kegiatan produktif berbasis ekonomi mandiri.

Kedua, pembudayaan dan prestasi olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, yang terlihat dari rendahnya persentase atlet yang berhasil meraih prestasi. Pada tahun 2024, dari total 639 atlet yang tercatat, hanya 170 atlet yang berhasil menorehkan prestasi, sehingga persentase atlet berprestasi hanya mencapai 26,60 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar atlet belum mencapai tingkat kompetitif yang memadai, baik di level daerah, provinsi, maupun nasional. Rendahnya capaian prestasi ini mengindikasikan masih terbatasnya pembinaan olahraga yang berkelanjutan, kurangnya fasilitas dan sarana latihan yang representatif, serta belum optimalnya dukungan terhadap pengembangan bakat sejak usia dini.

Ketiga, kualitas kepramukaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan oleh terbatasnya data partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepramukaan di luar lingkungan pendidikan formal. Berdasarkan data yang tersedia, seluruh Sekolah Dasar (226 SD) dan Sekolah Menengah Pertama (84 SMP) di wilayah ini telah menyelenggarakan kegiatan pramuka, yang mencerminkan keberadaan kelembagaan kepramukaan secara struktural di satuan pendidikan. Namun demikian, belum tersedia data yang menggambarkan sejauh mana keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan kepramukaan di luar sekolah, baik melalui Gugus

Depan komunitas, Kwartir Ranting, maupun Kwartir Cabang. Ketiadaan data ini menjadi indikator lemahnya sistem monitoring dan evaluasi partisipasi kepramukaan masyarakat secara menyeluruh, serta mencerminkan adanya kesenjangan antara ketersediaan program dan keterlibatan riil masyarakat. Padahal, gerakan pramuka memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kesadaran sosial generasi muda, sehingga peningkatan kualitas dan cakupan partisipasi masyarakat dalam kepramukaan perlu menjadi perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berdaya saing.

4) Tingkat berkebudayaan belum maju

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil pembangunan kebudayaan tingkat perangkat daerah. Hal ini disebabkan oleh belum pernah dilakukannya pengukuran terhadap Indeks Pembangunan Kebudayaan, sehingga indikator ini secara faktual bernilai nol (0). Ketiadaan data ini mencerminkan lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan dan pembangunan budaya daerah. Akibatnya, potensi budaya lokal tidak terdokumentasi secara sistematis dan sulit diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan kebudayaan. Beberapa faktor yang turut menyebabkan kondisi tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, akses masyarakat terhadap informasi sejarah lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, yang tercermin dari minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengunjungi dan mengenal situs-situs sejarah daerah. Pada tahun 2024, tercatat hanya 3.087 kunjungan wisata lokal ke lokasi-lokasi yang memuat narasi sejarah dan budaya lokal. Angka ini terbilang rendah jika dibandingkan dengan potensi kekayaan sejarah yang dimiliki kabupaten ini, termasuk berbagai objek budaya seperti makam tokoh sejarah, ritus tradisional, permainan rakyat, teknologi tradisional, serta seni dan tradisi lisan yang telah terdokumentasi selama

beberapa tahun terakhir. Rendahnya tingkat kunjungan ini mengindikasikan belum optimalnya promosi sejarah lokal, terbatasnya integrasi antara pelestarian budaya dengan sektor pariwisata, serta belum tersedianya media informasi yang menarik dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama generasi muda.

Kedua, pelestarian warisan budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, yang tercermin dari rendahnya persentase situs budaya yang telah dilestarikan secara resmi. Dari total 25 situs dan cagar budaya yang teridentifikasi hingga tahun 2024, hanya 6 situs yang telah dilestarikan, sementara 19 situs lainnya belum mendapat perlindungan atau penanganan pelestarian yang memadai. Dengan demikian, persentase warisan budaya yang dilestarikan baru mencapai 24 persen, menunjukkan masih minimnya perhatian terhadap pelestarian nilai sejarah dan kebudayaan lokal. Rendahnya tingkat pelestarian ini berpotensi menyebabkan degradasi identitas budaya daerah, hilangnya nilai-nilai kearifan lokal, serta menyulitkan pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata berbasis sejarah.

d. Masih Ada Kesenjangan Pembangunan Manusia Antar Gender

Kesenjangan pembangunan manusia antargender merupakan salah satu faktor yang menghambat peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini tercermin dari angka Indeks Pembangunan Gender sebesar 88,09. Meskipun angka tersebut sudah tinggi namun masih mengindikasikan adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai dimensi pembangunan. Pada komponen pembentuknya, masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Lebih lanjut, telah teridentifikasi beberapa akar masalah yang menjadi penyebab kesenjangan gender di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lihat Tabel 2.155).

Tabel 2.155
Analisis Masalah Pembangunan Manusia Antargender di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
Masih ada kesenjangan Pembangunan Manusia antargender	kesetaraan gender dan perlindungan anak masih rendah	Kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran Perempuan dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tenaga Kerja
		Kekerasan terhadap Perempuan masih tinggi	
		Kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan Perempuan dan anak masih rendah	
		Jaminan pemenuhan hak semua anak secara komprehensif masih rendah	
		Tingkat pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan masih rendah	

Sumber: Hasil DKT, 2025

Beberapa akar masalah yang diidentifikasi menjadi penyebab masih ada kesenjangan pembangunan manusia antargender di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dijelaskan sebagai berikut.

1) Kesetaraan gender dan perlindungan anak masih rendah

Tingkat kesetaraan gender dan perlindungan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa indikator kunci yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan keberdayaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat sebesar 0,55 yang menandakan masih adanya peran dan akses antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hal partisipasi ekonomi, representasi politik, dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) berada pada angka 65,10 persen, yang meskipun cukup tinggi secara nominal, namun

belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan peran strategis perempuan dalam ranah publik dan domestik. Beberapa faktor yang turut menyebabkan kondisi tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta peran perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum optimal, yang tercermin dari rendahnya alokasi anggaran yang responsif gender serta terbatasnya partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi. Berdasarkan data tahun 2024, alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) hanya tercatat sebesar Rp162.529.893.201, namun tanpa adanya proporsi yang jelas terhadap total belanja daerah, sulit untuk menilai apakah alokasi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan nyata perempuan dan kelompok rentan. Lebih lanjut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya mencapai 41,47 persen, angka yang cukup rendah dibandingkan laki-laki dan menunjukkan bahwa hampir separuh perempuan usia kerja belum berpartisipasi aktif dalam dunia kerja.

Kedua, tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan belum efektifnya sistem pencegahan kekerasan berbasis gender. Berdasarkan data tren kasus yang tercatat sepanjang tahun 2020 hingga 2024, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat secara signifikan dari 10 kasus pada 2020 menjadi 28 kasus pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 20 kasus pada 2024. Lonjakan kasus selama periode tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi risiko tinggi terhadap kekerasan, baik dalam ranah domestik, publik, maupun digital.

Ketiga, kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih rendah. Hal ini terlihat dari minimnya

pelaksanaan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan keluarga secara inklusif dan berperspektif gender serta hak anak. Selama lima tahun terakhir, tidak terdapat data pelaksanaan Puspaga, baik dari sisi fasilitas, tenaga konselor, maupun cakupan layanan, yang mencerminkan lemahnya komitmen kelembagaan dan sistem monitoring. Rendahnya intervensi berbasis keluarga ini berdampak pada belum optimalnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya kesadaran pengasuhan positif, dan terbatasnya dukungan terhadap peran perempuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan Puspaga, pelatihan SDM, dan integrasi program lintas sektor untuk menjadikan keluarga sebagai fondasi perlindungan sosial yang adil dan inklusif.

Keempat, jaminan pemenuhan hak semua anak secara komprehensif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, yang tercermin dari capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tahun 2024 sebesar 60,31. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak—meliputi hak atas identitas, kesehatan, pendidikan, perlindungan, serta partisipasi—belum terpenuhi secara optimal dan merata di seluruh wilayah. Nilai IPHA yang masih berada pada kategori sedang mencerminkan masih adanya kesenjangan dalam penyediaan layanan dasar yang ramah anak, serta belum maksimalnya upaya perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi.

Kelima, tingkat pencegahan dan penanganan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan berbagai bentuk perlakuan salah terhadap anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergolong rendah, meskipun secara nominal Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) telah mencapai angka 84,14 pada tahun 2024. Capaian tersebut secara kuantitatif tampak tinggi, namun belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, mengingat masih adanya kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak yang tidak dilaporkan atau belum tertangani secara komprehensif.

5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Tanjung Jabung Timur

Dalam Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat inti masalah yakni Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang masih belum optimal. adapun pembagian inti masalah tersebut kedalam lima masalah utama yakni (1) akuntabilitas kinerja belum optimal; (2) tata kelola keuangan daerah belum optimal; (3)pemerintahan masih belum berjalan efektif; (4) keamanan dan ketertiban bagi masyarakat masih rendah; dan (5) kualitas pelayanan publik masih rendah. adapun uraian dari permasalahan di atas sebagai berikut:

Tabel 2.156
Inti Masalah dan Masalah Aspek Tata Kelola Pemerintahan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Inti Masalah	Masalah	Urusan yang Terlibat
kualitas tata kelola pemerintahan belum optimal	akuntabilitas kinerja pemerintahan masih belum optimal dengan indikator nilai SAKIP	Urusan Perencanaan Urusan Pengawasan
	Tata kelola keuangan daerah belum optimal dengan indikator IPKD	Urusan Keuangan
	Pemerintahan masih belum berjalan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi	Urusan Kearsipan Urusan Penelitian dan Pengembangan Urusan Kesekretariatan Daerah Urusan DPRD Urusan Kepegawaian Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Persandian Urusan Statistik
	Keamanan dan Ketertiban bagi masyarakat masih rendah dengan indikator angka kriminalitas, indeks demokrasi indonesia, dan indeks Harmoni Indonesia	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Kualitas Pelayanan Publik masih rendah dengan indikator indeks pelayanan publik	Urusan Administrasi dan Pencacatan Sipil Urusan Penanaman Modal Urusan Rumah Sakit Urusan Kecamatan

Sumber: Hasil DKT, 2025

Penjelasan secara lengkap terkait 5 (lima) masalah tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan masih belum optimal

Dalam konteks upaya peningkatan mutu tata kelola pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja menjadi elemen krusial yang menentukan efektivitas dan transparansi penyelenggaraan pembangunan di Tanjung Jabung Timur. Namun, terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang menghambat optimalisasi akuntabilitas tersebut, terutama berkaitan dengan kualitas perencanaan dan pengawasan. Kualitas perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya optimal, yang tercermin dari kelemahan dalam proses perencanaan, pengendalian, serta evaluasi yang masih perlu diperkuat. Koordinasi dan sinkronisasi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan juga masih belum memadai, sehingga berdampak pada ketidakterpaduan program dan kegiatan. Selain itu, aspek pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan dengan maksimal, ditandai oleh masih adanya penyimpangan yang bersifat anggaran, proses, dan kewenangan serta kualitas pendampingan dan asistensi yang belum optimal. Akar masalah ini mencakup urusan perencanaan dan pengawasan yang memerlukan intervensi strategis untuk memperbaiki tata kelola, memastikan transparansi, dan mendorong akuntabilitas yang lebih kuat demi pencapaian kinerja pembangunan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

Tabel 2.157

Analisis Permasalahan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
Akuntabilitas Kinerja Masih Belum Optimal	Kualitas Perencanaan pembangunan daerah masih belum Optimal	Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi masih belum optimal	Urusan Perencanaan
		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah belum optimal	

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
	Belum optimalnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Masih terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran, proses, dan kewenangan	Urusan Pengawasan
		Kualitas pendampingan asistensi belum optimal	

Sumber: Hasil DKT, 2025

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang berakar pada aspek akuntabilitas kinerja yang belum optimal. Permasalahan ini terutama terlihat dari kualitas perencanaan pembangunan daerah yang masih belum mencapai standar yang diharapkan. Proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan belum berjalan secara efektif, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara rencana yang disusun dengan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja dalam perencanaan pembangunan juga masih lemah, yang menyebabkan tumpang tindih program dan kurangnya integrasi antar urusan yang terlibat. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perbaikan sistem perencanaan yang lebih terpadu dan terkoordinasi dengan baik agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

Selain perencanaan, aspek pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga menunjukkan kelemahan yang cukup krusial. Kualitas pengawasan yang belum memadai menyebabkan masih adanya praktik penyelewengan dan penyimpangan, baik dalam hal penggunaan anggaran, proses administrasi, maupun kewenangan yang diberikan. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme kontrol internal maupun eksternal yang seharusnya mampu mencegah dan mengatasi penyimpangan tersebut. Lebih lanjut, pendampingan dan asistensi yang diberikan kepada pelaksana program dan unit kerja terkait juga belum optimal, sehingga bimbingan teknis dan supervisi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tidak berjalan dengan efektif. Kondisi ini memperparah rendahnya akuntabilitas kinerja dan

menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan yang kompleks ini melibatkan dua urusan utama, yaitu urusan perencanaan dan urusan pengawasan. Urusan perencanaan harus mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem perencanaan yang lebih baik. Sementara itu, urusan pengawasan perlu memperkuat mekanisme kontrol dan meningkatkan kualitas pendampingan serta asistensi agar pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sinergi antara kedua urusan ini sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Tata Kelola Akuntabilitas Keuangan belum optimal

Tata kelola akuntabilitas keuangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks dan mendalam. Permasalahan utama yang muncul adalah pengelolaan keuangan daerah yang masih belum akuntabel dan transparan. Kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik serta efektivitas penggunaan anggaran daerah. Akuntabilitas keuangan yang belum optimal ini menjadi akar masalah yang memengaruhi berbagai aspek pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah.

Tabel 2.158
Analisis Permasalahan Tata Kelola Akuntabilitas Keuangan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
Tata Kelola Akuntabilitas keuangan belum optimal	Pengelolaan keuangan masih belum akuntabel dan transparan	Pengelolaan keuangan daerah yang masih rendah	Urusan Keuangan
		Tata Kelola aset daerah yang masih rendah	

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
		Pengelolaan pendapatan daerah masih rendah	

Sumber: Hasil DKT, 2025

Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari kurang optimalnya pengelolaan anggaran yang menyebabkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. Ketidakteraturan dalam pengelolaan anggaran ini tidak hanya berdampak pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga menimbulkan risiko penyalahgunaan dan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap mekanisme pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel agar setiap rupiah yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Selain itu, tata kelola aset daerah juga menunjukkan kondisi yang masih rendah. Pengelolaan aset yang kurang optimal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dan menghambat pemanfaatan aset secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah. Ketidakteraturan dalam pencatatan, pemeliharaan, dan pengawasan aset daerah menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi tata kelola keuangan secara keseluruhan. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan aset daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem keuangan daerah, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Lebih jauh lagi, pengelolaan pendapatan daerah juga masih berada pada tingkat yang rendah. Pendapatan daerah yang tidak optimal ini berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Rendahnya pengelolaan pendapatan daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya sistem pemungutan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber pendapatan, serta minimnya inovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah. Kondisi

ini memperlihatkan bahwa tata kelola keuangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih memerlukan perhatian mendalam untuk memperbaiki aspek pengelolaan keuangan, aset, dan pendapatan secara menyeluruh

c. Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum berjalan efektif

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang responsif, efisien, dan akuntabel, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadapi berbagai tantangan yang signifikan terkait efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil analisis, efektivitas pemerintahan masih belum optimal, yang tercermin dari sejumlah permasalahan mendasar di berbagai aspek tata kelola dan manajemen pemerintahan. Permasalahan tersebut meliputi rendahnya pengelolaan arsip daerah yang kurang dinamis serta lemahnya perlindungan dan penyelamatan arsip, di mana hal ini berdampak pada keterbatasan akses dan pemanfaatan arsip sebagai bagian penting dalam proses administrasi pemerintahan. Selain itu, pengambilan kebijakan yang kurang berbasis riset dan rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan juga menjadi faktor penghambat utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang evidence-based dan inovatif. Akuntabilitas kinerja daerah yang masih belum optimal, kualitas produk hukum yang dihasilkan, dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum berjalan efektif semakin mempertegas pentingnya perbaikan dalam tata kelola internal pemerintah daerah.

Tabel 2.159

Analisis Permasalahan Efektivitas Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
Pemerintahan masih belum berjalan efektif	Rendahnya pengelolaan arsip daerah	Kurangnya pengelolaan arsip yang dinamis dan statis	Urusan Kearsipan
		Perlindungan dan penyelamatan arsip yang masih rendah	
		Perizinan penggunaan arsip yang masih rendah	

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
		Akreditasi dan sertifikasi SDM arsip yang masih rendah	
	Rendahnya angka pengambilan kebijakan berbasis riset	Kurangnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Kurangnya pemanfaatan riset dan inovasi daerah	Urusan Penelitian dan Pengembangan
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja daerah	Tata kelola pemerintahan daerah belum optimal Belum optimalnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Urusan Kesekretariatan Daerah
	Belum optimalnya koordinasi pemerintahan antar-OPD	Kualitas kebijakan pemerintah dan otonomi daerah belum optimal Belum optimalnya kualitas produk hukum yang dihasilkan Belum optimalnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan Pembangunan Belum optimalnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa Belum optimalnya kualitas administrasi Pembangunan	
	Belum optimalnya kualitas pelayanan DPRD	Belum tepatnya kualitas perencanaan kegiatan DPRD	Urusan Kesekretariatan DPRD
	Manajemen SDM belum optimal	Tingkat kualitas pegawai daerah yang masih rendah Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN Pengelolaan pengembangan karir ASN dan penilaian kinerja ASN belum Optimal Belum optimalnya analisis kebutuhan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi	Urusan Kepegawaian
	Belum optimalnya peran riset dan inovasi dalam mendukung Pembangunan daerah	Kurangnya pemanfaatan riset dan inovasi daerah	Urusan Riset dan Pengembangan

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
	Belum optimalnya transformasi pelayanan publik berbasis digital	Belum optimalnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Belum optimalnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika
	Masih rendahnya pelayanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Masih rendahnya pelayanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Urusan Statistik
	Masih rendahnya Keamanan Informasi	Keamanan siber dan sandi pemerintah daerah yang masih rendah	Urusan Persandian

Sumber: Hasil DKT, 2025

Efektivitas pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, salah satunya adalah rendahnya pengelolaan arsip daerah. Pengelolaan arsip yang mencakup arsip dinamis dan statis masih belum berjalan secara optimal, sehingga berdampak pada lemahnya sistem dokumentasi dan penyimpanan informasi penting pemerintahan. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya perlindungan dan penyelamatan arsip yang seharusnya menjadi bagian integral dari tata kelola administrasi pemerintahan. Selain itu, perizinan penggunaan arsip yang masih minim juga menunjukkan kurangnya pengaturan dan pengawasan yang memadai dalam pemanfaatan arsip tersebut. Kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kearsipan yang belum terakreditasi dan bersertifikasi secara memadai semakin memperburuk kondisi ini, sehingga pengelolaan arsip daerah belum mampu mendukung kelancaran proses administrasi dan pengambilan keputusan yang efektif.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi efektivitas pemerintahan adalah rendahnya angka pengambilan kebijakan yang berbasis riset. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (kelitbangan) dalam perencanaan pembangunan daerah masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pengambilan keputusan belum

sepenuhnya didasarkan pada data dan analisis ilmiah yang valid, sehingga potensi inovasi dan solusi berbasis riset belum dimaksimalkan. Kurangnya pemanfaatan riset dan inovasi daerah ini tidak hanya menghambat kualitas kebijakan publik, tetapi juga mengurangi daya saing dan kemampuan adaptasi pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks. Urusan penelitian dan pengembangan yang seharusnya menjadi pilar penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif masih belum berfungsi secara optimal.

Selain itu, akuntabilitas kinerja daerah juga masih belum optimal, yang tercermin dari tata kelola pemerintahan daerah yang belum berjalan secara efektif dan efisien. Kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi standar yang diharapkan, sehingga berdampak pada implementasi kebijakan yang kurang konsisten dan kurang mendukung tujuan pembangunan. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga belum berjalan dengan baik, yang menyebabkan kurangnya sinergi dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Berbagai aspek seperti pengelolaan perekonomian, pembangunan, layanan pengadaan barang dan jasa, serta administrasi pembangunan masih menunjukkan kualitas yang belum optimal. Hal ini menandakan bahwa sistem koordinasi dan integrasi antar unit kerja perlu mendapat perhatian serius agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Manajemen sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pemerintahan. Tingkat kualitas pegawai daerah masih tergolong rendah, dengan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum optimal. Pengelolaan karir dan penilaian kinerja ASN juga belum berjalan secara efektif, sehingga potensi SDM belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kinerja pemerintahan. Selain itu, peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah masih kurang, yang berimplikasi pada lambatnya adaptasi terhadap perubahan dan inovasi

teknologi. Transformasi pelayanan publik berbasis digital juga belum optimal, baik dari segi jangkauan maupun kualitas komunikasi publik pemerintah daerah. Pengelolaan aplikasi informatika dan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan masih rendah, sementara keamanan informasi dan keamanan siber pemerintah daerah juga belum memadai. Semua faktor ini secara kolektif menghambat terciptanya pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

d. Keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum optimal

Keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Tingkat ketentraman dan ketertiban umum yang masih rendah menjadi masalah utama yang memengaruhi stabilitas sosial dan kenyamanan warga. Hal ini tercermin dari berbagai indikator yang menunjukkan bahwa kondisi ketertiban masyarakat belum mencapai standar yang diharapkan. Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi sektor yang sangat krusial dalam menjaga keamanan wilayah, namun kualitas pelayanan dalam penanggulangan bencana juga masih belum optimal. Layanan pencegahan, penanggulangan, serta penyelamatan baik kebakaran maupun non-kebakaran masih menunjukkan kelemahan yang berpotensi memperburuk situasi ketika terjadi insiden darurat.

Tabel 2.160

Analisis Permasalahan Keamanan dan Ketertiban bagi Masyarakat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
Keamanan dan ketertiban bagi Masyarakat	Tingkat ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	Tingkat ketentraman dan ketertiban umum masih rendah	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Kualitas pelayanan penanggulangan bencana belum optimal	
		Layanan pencegahan,	

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
		penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran belum optimal	
	Penguatan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan demokrasi dan HAM	Perlunya peningkatan kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Perlunya peningkatan etika dan budaya politik Belum optimalnya ketertiban ormas Belum optimalnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat Belum optimalnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Urusan Keamanan

Sumber: Hasil DKT, 2025

Pelayanan dalam hal penanggulangan bencana dan penyelamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum mencapai tingkat yang memadai. Kualitas layanan ini sangat penting untuk memastikan keselamatan masyarakat dan meminimalisir dampak negatif dari bencana alam maupun kejadian kebakaran. Namun, data menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan bencana masih belum optimal, yang dapat mengakibatkan respons yang lambat dan kurang efektif saat menghadapi situasi darurat. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat potensi risiko bencana yang selalu ada dan membutuhkan kesiapsiagaan serta koordinasi yang baik antar instansi terkait.

Selain aspek ketertiban dan penanggulangan bencana, penguatan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) juga masih menjadi tantangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kesadaran masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan perlu ditingkatkan agar tercipta masyarakat yang harmonis dan berintegritas. Selain itu, etika dan budaya politik yang sehat juga belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang

berdampak pada dinamika sosial-politik yang kurang kondusif. Ketertiban organisasi masyarakat (ormas) juga belum optimal, sehingga potensi konflik dan gesekan sosial masih berisiko terjadi.

Ketahanan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya juga masih menunjukkan kelemahan yang memengaruhi stabilitas dan kesejahteraan warga. Ketahanan yang kurang kuat ini berkontribusi pada rentannya masyarakat terhadap berbagai tekanan dan perubahan lingkungan sosial. Selain itu, penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat belum berjalan secara optimal, sehingga penyelesaian masalah sosial seringkali tidak tuntas dan berpotensi menimbulkan ketegangan berkepanjangan. Urusan keamanan menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena ketertiban dan keamanan yang terjaga akan mendukung terciptanya suasana yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

e. Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih rendah

Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan, yang berdampak langsung pada kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya masalah tersebut (Tabel 2.161).

Tabel 2.161

Analisis Permasalahan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
Kualitas pelayanan publik masih rendah	Pelayanan administratif kependudukan dan pencatatan sipil belum efektif dan efisien	Kualitas layanan pendaftaran penduduk belum optimal	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)
		Kualitas layanan pencatatan sipil belum optimal	
		Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan belum optimal	

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan yang Terlibat
	Perlunya peningkatan kualitas layanan perizinan	Belum optimalnya perizinan usaha berbasis risiko	Urusan penanaman modal
	Belum optimalnya pelayanan pemerintahan di kecamatan	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di kecamatan	Urusan Pelayanan Kecamatan
		Kurangnya SDM perencanaan di kecamatan	
	Perlunya peningkatan pelayanan Kesehatan	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan rumah sakit kelas C	Urusan Rumah Sakit
		Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan	

Sumber: Hasil DKT, 2025

Penyebab pertama terjadinya kualitas pelayanan publik yang masih rendah adalah pelayanan administrasi kependudukan masih rendah. hal ini dikarenakan tiga faktor fundamental yakni: a) kualitas layanan pendaftaran penduduk masih rendah; b) kualitas layanan pencatatan sipil masih rendah; c) pengelolaan Informasi administrasi kependudukan belum optimal. Akar masalah kedua adalah perlunya peningkatan kualitas layanan perizinan. adapun faktor utama dalam akar masalah ini adalah belum optimalnya perizinan usaha berbasis risiko. Akar masalah ketiga yaitu Belum optimalnya pelayanan pemerintahan di kecamatan, yang dimana hal tersebut disebabkan oleh: a) pelayanan pemerintahan belum optimal, baik dari segi sarana dan prasarana; b) kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menangani perencanaan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat. Sektor kesehatan pun menjadi faktor penyebab keempat masalah rendahnya kualitas pelayanan publik. hal ini disebabkan oleh dua faktor utama yakni: a) belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan rumah sakit kelas C; dan b) belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan.

2.3.2 Isu Strategis

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang dimaksud dengan isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dike depankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat memengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Beberapa isu strategis internal dan eksternal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di antaranya sebagai berikut ini:

Tabel 2.162
Isu Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
• Wilayah pesisir yang strategis • Produktivitas pertanian dan Perkebunan yang besar • Kaya akan bahan tambang	▪ Kualitas Infrastruktur Daerah Masih Rendah ▪ Perekonomian Tanjung Jabung Timur Fluktuatif dan terancam tidak berkelanjutan ▪ Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah ▪ Kualitas Pembangunan Manusia Masih Rendah ▪ Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang masih belum optimal	▪ Risiko Bencana Alam ▪ Alih Fungsi Lahan ▪ Investasi dan Permodalan ▪ Permukiman Layak Huni ▪ Transportasi	▪ Ketegangan Geopolitik antara Amerika Serikat dan China yang berdampak pada fluktuasi ekonomi Indonesia ▪ Tata Kelola Keuangan Global ▪ Bonus Demografi Global ▪ Perkembangan Teknologi ▪ Perubahan Iklim ▪ Persaingan SDA ▪ Pertumbuhan Kelas Menengah	▪ Pemanfaatan Ekonomi Laut yang Belum Optimal ▪ Pemanfaatan Potensi Wisata yang belum Optimal ▪ Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil ▪ Integrasi Domestik Terbatas serta Kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa ▪ Kepastian dan Penegakan Hukum masih Lemah	▪ Kebijakan Prioritas Provinsi Jambi ▪ Participating Interest (PI) Provinsi atas Eksploitasi Minyak dan Gas ▪ Pengembangan konektivitas antarwilayah	▪ Ketergantungan Ekonomi terhadap Sektor Pertambangan ▪ Kualitas Sumber daya Manusia yang Masih Rendah ▪ Masih Rendahnya Konektivitas Antar wilayah dan Penerapan Pembangunan Berkelanjutan ▪ Belum Optimalnya Pemanfaatan Letak Geografis yang Strategis ▪ Kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Masih Rendah ▪ Bonus Demografi dan Aging Population

1. Isu Strategis Internal

Isu strategis internal Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bisa menjadi sumber kelemahan serta keunggulan untuk pengembangan daerah tahun ini. Oleh karena itu, isu-isu strategis internal mencakup tantangan dalam pembangunan dan potensi yang dimiliki oleh Tanjung Jabung Timur. Dengan cara ini, isu-isu strategis internal berkaitan dengan tantangan yang sudah terjadi dan bisa menjadi hambatan dalam pengembangan pembangunan lima tahun mendatang, serta segala potensi yang ada sebagai sumber daya atau keunggulan untuk pembangunan di masa depan. Berikut merupakan isu strategis yang menjadi potensi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

1) Wilayah pesisir yang strategis

Kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terletak di bagian timur Provinsi Jambi, merupakan daerah dengan posisi geografis yang sangat strategis karena memiliki garis pantai yang panjang dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Potensi wilayah pesisir ini menjadi salah satu keunggulan utama kabupaten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan, perikanan, pariwisata, dan perdagangan maritim.

Sebagai daerah pesisir, Tanjung Jabung Timur kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan. Aktivitas nelayan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir. Selain hasil tangkapan laut, seperti ikan, udang, dan kepiting, kawasan ini juga potensial untuk dikembangkan sebagai sentra budidaya perikanan, termasuk tambak udang dan keramba jaring apung. Selain itu, letak strategis di jalur pelayaran internasional membuka peluang besar bagi pengembangan pelabuhan, kawasan industri berbasis perikanan, dan perdagangan antarpulau. Ke depan, jika didukung dengan infrastruktur yang memadai dan tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan, Kabupaten Tanjung Jabung

Timur dapat berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi pesisir di Sumatera.

2) Produktivitas Pertanian dan Perkebunan yang besar

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi penggunaan lahan yang baik untuk produktivitas pertanian dan perkebunan. Berbagai hasil pangan diperoleh dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Selain itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berpotensi menghasilkan komoditas perkebunan, salah satunya kelapa sawit. Komoditas ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena menjadi bahan baku utama minyak sawit mentah (CPO), yang memiliki permintaan pasar yang luas baik dalam negeri maupun ekspor. Potensi produktivitas pertanian dan perkebunan ini tentu dapat menjadi peluang pendapatan daerah jika dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pengembangan industri hilir, serta perbaikan infrastruktur distribusi menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3) Kaya akan bahan tambang

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kondisi morfologis yang kaya akan bahan tambang, seperti minyak dan gas bumi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki cadangan minyak bumi kurang lebih 250 juta barrel sedangkan gas alam cair potensinya 2 sebanyak Milyard Feet Cubic Gas sebagai potensi sumber daya hayati. Potensi besar tersebut telah menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat ini, dua perusahaan energi kelas dunia telah beroperasi di wilayah ini, yaitu Petronas dari Malaysia dan PetroChina, yang aktif melakukan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya meningkatkan kontribusi daerah dalam penyediaan energi nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja,

menggerakkan ekonomi lokal, serta mendorong transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor energi. Oleh karena itu potensi ini harus dikelola secara berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan, sektor pertambangan migas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat menjadi penggerak utama pembangunan daerah dan membuka peluang investasi jangka panjang yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah isu-isu strategis internal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dapat menjadi tantangan ke depannya.

1) Ketergantungan Ekonomi terhadap Sektor Pertambangan

Permasalahan utama pengembangan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup berat, yakni ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan. Namun demikian untuk mengarahkan pembangunan yang lebih berkelanjutan, baik bagi perekonomian, lingkungan, maupun kesejahteraan masyarakat, Tanjung Jabung Timur memiliki sejumlah potensi yang dapat menjadi modal dasar untuk mencapainya. Pada sisi pemerintahan, telah muncul kesadaran yang cukup baik untuk mulai mengembangkan potensi lokal non-tambang. Peraturan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal telah ada, misalnya adanya Perda tentang pengembangan industri pengolahan produk pertanian tertentu, meskipun implementasinya belum maksimal. Masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, namun demikian berbagai peraturan ini tetap dapat menjadi kekuatan untuk memperkuat pengembangan ekonomi berbasis sumber daya non-tambang.

Pada sisi masyarakat, pada dasarnya masyarakat Tanjung Jabung Timur adalah petani, baik pada bidang pangan, perkebunan maupun perikanan dan peternakan. Artinya secara tradisional, masyarakat bukan hidup di sektor tambang melainkan pada sektor pertanian. Kondisi ini merupakan modal bagi pembangunan ekonomi non-tambang. Namun demikian, potensi ini dapat hilang apabila pemerintah daerah tidak berupaya untuk melestarikan dan

mengembangkan potensi tersebut. Modal besar lain yang tidak dapat dipungkiri adalah melimpahnya sumber daya non-tambang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mulai dari potensi pertanian, perikanan, maupun kekayaan budaya lainnya. Kelapa, pinang, kopi, kakao adalah tanaman perkebunan yang telah menjadi bagian dari hidup masyarakat Tanjung Jabung Timur sejak dahulu. Seluruh potensi tersebut menjadi sumber hidup dan kesejahteraan saat Tanjung Jabung Timur memiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai tambahnya.

2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Rendah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tantangan besar terkait sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Masih dominannya tenaga kerja lulusan SD dan SMP menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja belum mengakses pendidikan menengah atas dan tinggi. Ini mengindikasikan terbatasnya kualitas dan akses terhadap pendidikan berkualitas, baik dari sisi fasilitas, tenaga pengajar, maupun keterjangkauan biaya. Kondisi ini pada gilirannya akan menghambat peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. SDM yang tidak kompeten akan menyulitkan pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian modern, industri pengolahan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selain itu, rendahnya kualitas SDM juga berpotensi memperbesar pengangguran terselubung, meningkatkan kemiskinan struktural, dan menghambat pelayanan publik yang berkualitas.

3) Masih Rendahnya Konektivitas Antarwilayah dan Penerapan Pembangunan Berkelanjutan

Permasalahan pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memang sangat kompleks dengan tantangan yang berat, seperti kerusakan lingkungan, keterbatasan akses, dan rendahnya daya saing. Padahal secara geografis, Tanjung Jabung Timur adalah bagian dari kawasan segitiga perdagangan lintas dunia, Indonesia, Malaysia, Singapura.

Dampak dari isu ini terhadap pembangunan dalam RPJMD lima tahun mendatang sangat signifikan, karena konektivitas yang lemah akan menurunkan daya saing investasi, memperlambat pengembangan kawasan potensial, dan memperbesar ketimpangan antarwilayah. Sementara itu, lemahnya integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan berisiko memperburuk degradasi lingkungan, terutama di kawasan pesisir, hutan mangrove, dan lahan pertanian.

4) Belum Optimalnya Pemanfaatan Letak Geografis yang Strategis

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki keberadaan yang strategis, yaitu terletak di hilir Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera. Keberadaan ini dapat menjadi peluang atau justru ancaman bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan hal ini tergantung pada cara pengelolaannya. Letak geografis ini juga dapat memberikan peluang bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah di daerah perbatasan serta kerja sama pendanaan pembangunan, meningkatkan infrastruktur industri yang memadai, terintegrasi, dan ramah lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat akibat pengurangan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah, dan melindungi dan mengelola Sungai Batanghari dengan baik. Namun, peraturan dan kebijakan ini juga dapat memberikan ancaman bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni menimbulkan perbedaan dan konflik antara daerah-daerah yang terlibat dalam kerja sama pengembangan wilayah, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat aktivitas industri dan pertambangan, serta menimbulkan banjir, erosi, dan pencemaran akibat Sungai Batanghari.

5) Kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Masih Rendah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tantangan besar dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kualitas tata kelola pemerintahan yang masih belum optimal menjadi isu

krusial yang memengaruhi efektivitas pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lima permasalahan utama yang melingkupi isu ini, yaitu belum optimalnya akuntabilitas kinerja, lemahnya tata kelola keuangan daerah, belum efektifnya penyelenggaraan pemerintahan, rendahnya tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat, serta masih rendahnya kualitas pelayanan publik, menunjukkan bahwa sistem birokrasi daerah belum berjalan secara profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dampaknya terhadap pembangunan dalam RPJMD lima tahun mendatang sangat besar, karena kelemahan dalam akuntabilitas dan pengelolaan keuangan akan menghambat efisiensi penggunaan anggaran, memperlambat realisasi program prioritas, dan menurunkan kepercayaan publik. Sementara itu, pemerintahan yang tidak berjalan efektif dan pelayanan publik yang rendah kualitasnya akan memperbesar ketimpangan akses masyarakat terhadap hak-hak dasar, serta memperlambat transformasi menuju pemerintahan yang bersih dan melayani. Di sisi lain, keamanan dan ketertiban yang belum terjaga secara optimal juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan iklim investasi di daerah.

6) Bonus Demografi dan *Aging Population*

Bonus demografi merupakan fenomena ketika suatu wilayah mengalami peningkatan proporsi penduduk usia produktif dalam populasi mereka. Bonus demografi terjadi ketika jumlah anggota populasi usia produktif (biasanya di antara 15-64 tahun) melebihi jumlah anggota populasi yang bergantung (anak-anak dan lansia). Pada saat ini hingga tahun 2030 Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada bonus demografi dimana jumlah penduduk berusia produktif lebih mendominasi keseluruhan penduduk. Namun, belum mampu diimbangi dengan pembukaan lapangan pekerjaan yang memadai sehingga tingkat pengangguran masih relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa bonus demografi tersebut belum termanfaatkan/terkelola dengan baik. Sementara di sisi lain mulai tahun 2028 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai memasuki *aging population* atau penuaan. Sehingga perlu

strategi yang tepat untuk dapat mengelolanya sehingga tidak menjadi beban pemerintah ke depan.

Selain isu-isu tersebut, terdapat isu-isu internal lainnya yang berasal dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029 yang perlu diintegrasikan dalam penyusunan dokumen Ranwal RPJMD ini, yaitu:

1) Risiko Bencana Alam

Berdasarkan karakteristik wilayah dengan kondisi saat ini, maka bencana yang rawan terjadi bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada 2 (dua) jenis yaitu bencana banjir dan tanah longsor. kejadian bencana alam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam tahun 2019-2021 mengalami peningkatan pada bencana banjir dimana pada tahun 2019 terjadi sebanyak 7 kali bencana banjir pada Desa Mendahara Ulu dan Desa Kecamatan Geragai, keadaan ini meningkat pada tahun 2020 sebanyak 9 kali bencana banjir yang melanda 4 Desa/Kelurahan meliputi Desa Mendahara Ulu, Desa Geragai, Desa Dendang, serta Desa Berbak dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan 12 kali bencana banjir yang melanda 3 Desa/Kelurahan. Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipicu beberapa faktor seperti Kawasan yang dilewati aliran sungai, musim hujan yang terjadi pada beberapa wilayah dengan intensitas tinggi serta kontur daerah yang agak landai. Selain bencana banjir yang melanda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bencana tanah longsor terjadi sebanyak 2 kali pada tahun 2021 tepatnya di Desa/Kelurahan Mendahara.

2) Alih Fungsi Lahan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu lumbung pangan Provinsi Jambi. Sentra padi yang berada dikawasan permukiman transmigrasi Kecamatan rantau rasau dan Nipah Panjang ini dikembangkan dengan harapan dapat meningkatkan efektifitas penggunaan lahan, agar dapat memproduksi 2 kali dalam setahun. Sentra padi yang berada dikawasan

transmigrasi Kecamatan Rantau Rasau dan Nipah Panjang. Luas Lahan sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019 berdasarkan SK Menteri ATRBPN 686-SK_PG-03_03-XII-2019 mencapai 10.583,49 Hektar pada tahun 2022 terjadi alih fungsi lahan, sebagian lahan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur beralih fungsi menjadi perkebunan dan permukiman. Luas lahan sawah berdasarkan data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 seluas 10.124,99 Hektar. Terdapat penurunan luas lahan sawah seluas 458,5 hektar.

3) Investasi dan Permodalan

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Namun, Sektor tertinggi dalam Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 berada pada sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai sekitar 43,02 persen, dan di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai sekitar 21,44 persen. Lalu sektor terendah terdapat pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai sekitar 0,02 persen dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai sekitar 0,08 persen. Ketimpangan ini mencerminkan dua hal penting dalam konteks isu investasi dan permodalan. Pertama, investasi masih terpusat pada sektor ekstraktif dan belum tersebar secara proporsional ke sektor lain yang berpotensi menciptakan pemerataan ekonomi dan lapangan kerja, seperti industri pengolahan, energi terbarukan, dan jasa publik. Kedua, sektor-sektor dengan kontribusi rendah terhadap PDRB tersebut cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan, baik dari investasi publik maupun swasta, sehingga kurang berkembang dan tidak mampu menopang transformasi ekonomi daerah secara inklusif.

Dampaknya terhadap pembangunan lima tahun ke depan cukup signifikan. Ketimpangan investasi ini akan memperbesar kesenjangan pendapatan antar kelompok dan wilayah, menghambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi baru yang lebih berkelanjutan, serta mengurangi resiliensi ekonomi daerah terhadap fluktuasi pasar global, terutama di sektor tambang. Oleh karena itu, RPJMD mendatang perlu merumuskan kebijakan investasi yang berkeadilan, mendorong permodalan di sektor hilirisasi, energi bersih, UMKM, dan layanan dasar, serta menciptakan ekosistem investasi yang berpihak pada keberlanjutan dan inklusi ekonomi.

4) Permukiman Layak Huni

Wilayah timur Provinsi Jambi merupakan bagian dari kawasan pantai timur Sumatera yang ditunjukkan dengan ciri-ciri tenggelamnya dataran rendah di bawah permukaan pada zaman QuarterTua oleh sebab itu wilayah ini agak datar dan keadaan tata airnya dikendalikan oleh gradient sangat kecil sehingga drainase terhambat dengan akibat penggenangan yang luas dan bersifat permanen membentuk rawa-rawa. Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu) merupakan dataran landai. Wilayah ini merupakan cekungan yang membentuk rawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak dapat menembus tanah atau mengalir sebagai run off, sehingga air terjebak berupa rawa. Air permukaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi masalah terutama pada musim penghujan yang berpotensi menggenangi areal permukiman. kondisi ini menyebabkan banyak permukiman masyarakat berada di lokasi yang rawan banjir dan kelembaban tinggi, yang pada akhirnya menurunkan standar kesehatan dan keselamatan penghuni. Permukiman di wilayah rawa yang jenuh air berisiko terhadap kerusakan fisik rumah, pencemaran air bersih, dan penyebaran penyakit berbasis lingkungan, seperti diare dan demam berdarah. Selain itu, biaya pembangunan dan pemeliharaan rumah di wilayah seperti ini relatif lebih

tinggi karena membutuhkan infrastruktur tambahan seperti tanggul, sistem drainase teknis, dan elevasi bangunan yang memadai.

5) Transportasi

Kondisi fisik dasar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang didominasi oleh permukiman berorientasi pada badan air, tersebar, dan mengelompok secara tidak merata menimbulkan tantangan besar dalam penyediaan prasarana transportasi yang andal dan efisien. Sebaran permukiman yang berada di wilayah rawa dan dataran rendah membuat pembangunan infrastruktur jalan menjadi sangat mahal, memerlukan konstruksi khusus (misalnya jalan timbunan atau jembatan pendek), serta sulit dipertahankan dalam jangka panjang akibat kondisi tanah yang labil dan sering tergenang. Hingga tahun 2024, kondisi jalan yang rusak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat lebih luas dibandingkan jalan dalam kondisi baik, yang secara langsung mencerminkan rendahnya aksesibilitas antarwilayah, khususnya ke kawasan pesisir dan pedalaman.

Isu ini berimplikasi langsung terhadap sektor transportasi, karena infrastruktur jalan yang rusak dan tidak memadai menyebabkan mobilitas barang dan orang menjadi tidak efisien, meningkatkan biaya logistik, memperlambat distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Selain itu, keterbatasan konektivitas jalan juga menjadi penghambat utama dalam pengembangan wilayah terpencil dan menurunkan daya tarik investasi karena tingginya risiko dan biaya distribusi.

2. Isu Strategis Eksternal

Analisis mengenai lingkungan eksternal berasal dari berbagai sumber informasi lokal, nasional, internasional (SDGs) dan lain-lain yang dapat memengaruhi progres pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Di bawah ini dijelaskan beberapa isu strategis eksternal yang bisa menjadi tantangan maupun

kesempatan untuk pembangunan Tanjung Jabung Timur dalam lima tahun ke depan.

a. Isu Strategis Provinsi

Dalam merencanakan arah perkembangan jangka menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun 2025 hingga 2030, dinamika di tingkat regional dan provinsi sangat penting. Memahami isu-isu penting yang ada di tingkat kawasan dan provinsi merupakan dasar yang krusial untuk memaksimalkan potensi pembangunan setempat. Oleh karena itu, dalam bagian ini, akan dibahas tantangan strategis yang melibatkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari perspektif yang lebih luas di tingkat regional dan provinsi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang diusulkan dapat menyatu dengan arah pengembangan yang lebih besar di daerah ini. Berikut adalah penjelasan mengenai isu-isu tersebut.

1) Kebijakan Prioritas Provinsi Jambi

Kebijakan prioritas Provinsi Jambi yang bisa menjadi peluang bagi pengembangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah PRO JAMBI Tangguh . Kebijakan prioritas ini memberikan peluang strategis bagi pengembangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini menawarkan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, industri rumah tangga, dan generasi milenial, yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat basis ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong inovasi usaha baru di kalangan pemuda. Selain itu, dukungan sarana untuk sektor primer seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan membuka ruang bagi peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan modernisasi alat produksi yang selama ini menjadi tantangan utama di wilayah pedesaan dan pesisir. Dengan memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki peluang untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat ketahanan pangan,

serta mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi antarkawasan. Program ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal dalam mempercepat transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah.

Selain itu, kebijakan prioritas Provinsi Jambi yang dapat menjadi isu strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Program PRO JAMBI Cerdas yang merupakan kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Jambi memberikan peluang besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu dapat mendorong perluasan akses pendidikan menengah, mengurangi angka putus sekolah, serta menciptakan kesetaraan kesempatan belajar bagi generasi muda di daerah-daerah terpencil dan pesisir. Selain itu, penyediaan beasiswa untuk jenjang S1, S2, dan S3 membuka peluang bagi masyarakat umum untuk melanjutkan pendidikan tinggi, sehingga mendukung peningkatan kompetensi, mobilitas sosial, dan ketersediaan tenaga kerja terampil di berbagai sektor pembangunan daerah. Sementara itu, program pendidikan vokasi berbasis kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan, baik dalam maupun luar negeri, merupakan peluang strategis untuk memperkuat keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri, sekaligus membangun ekosistem pendidikan vokasional yang responsif terhadap tantangan lokal. Keseluruhan program ini berpotensi mempercepat transformasi SDM unggul dan berdaya saing di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.

2) *Participating Interest (PI) Provinsi atas Eksploitasi Minyak dan Gas*

Isu participating interest (PI) atas eksploitasi minyak dan gas di Provinsi Jambi, termasuk di wilayah kerja yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, memiliki dampak yang signifikan terhadap arah dan keberhasilan pembangunan daerah. PI, yang merupakan hak partisipasi sebesar 10% bagi pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memberikan

peluang strategis bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara berkelanjutan. Jika dikelola secara profesional dan transparan, PI dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendanai prioritas pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar masyarakat. Selain itu, PI juga membuka ruang bagi pengembangan BUMD dan pelibatan tenaga kerja lokal dalam industri migas, yang dapat mendorong transfer teknologi dan peningkatan kompetensi SDM daerah. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait potensi kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta kesenjangan distribusi manfaat jika tidak disertai dengan tata kelola yang akuntabel dan partisipatif. Oleh karena itu, optimalisasi PI di Tanjung Jabung Timur harus dibarengi dengan penguatan kapasitas kelembagaan daerah, pengawasan lingkungan yang ketat, serta mekanisme pemanfaatan hasil yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

3) Pengembangan Konektivitas Antarwilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki peluang untuk meningkatkan konektivitas dan kerja sama antarwilayah, dengan memanfaatkan posisi dan potensi yang dimilikinya. Hal ini didukung pula dengan landasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pemerintahan daerah termasuk aspek kerja sama antar daerah dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah yang mengatur penyelenggaraan kerja sama antara daerah, baik kerja sama antar daerah, dengan pihak ketiga, maupun dengan lembaga di luar Negeri, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan pihak Ketiga, yang mencakup prosedur perjanjian kerja sama, pembinaan, dan pengawasan kerja

sama untuk memastikan kerja sama yang efektif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

b. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional adalah permasalahan atau tantangan yang memiliki dampak luas terhadap kepentingan nasional, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, maupun lingkungan. Isu-isu ini umumnya membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat karena berpotensi memengaruhi stabilitas negara, pembangunan nasional, dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Beberapa isu nasional yang dapat menjadi peluang bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur di antaranya:

1) Pemanfaatan Ekonomi Laut yang Belum Optimal

Indonesia memiliki peluang besar dalam ekonomi biru, namun masih menghadapi banyak masalah dalam pengembangannya. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemanfaatan sumber daya laut dan terbatasnya penggunaan Jalur Komunikasi Laut (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), sehingga kontribusi sektor maritim terhadap PDB masih di bawah 7,60 persen. Rendahnya kontribusi ekonomi biru ini dipengaruhi oleh manajemen Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang belum optimal dan pengembangan budidaya perikanan yang minim, kurangnya diversifikasi industri serta sektor baru yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut untuk menambah nilai ekonomi, serta terbatasnya perkembangan riset dan teknologi di bidang kelautan.

Rendahnya pemanfaatan ekonomi laut di tingkat nasional secara langsung memengaruhi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai daerah pesisir dengan potensi sumber daya laut yang melimpah, seperti perikanan tangkap, budidaya air payau, dan ekosistem mangrove, Tanjung Jabung Timur belum sepenuhnya mampu menjadikan sektor kelautan sebagai pilar utama ekonomi lokal. Minimnya infrastruktur pelabuhan perikanan, belum optimalnya pemanfaatan

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), serta rendahnya inovasi teknologi dan riset kelautan berdampak pada stagnasi nilai tambah dari sektor ini. Selain itu, keterbatasan akses terhadap Jalur Komunikasi Laut (SLoC) dan kurangnya integrasi dengan jaringan logistik nasional menghambat peluang ekspor hasil laut ke pasar yang lebih luas. Akibatnya, kontribusi sektor maritim terhadap PDRB daerah masih rendah, dan potensi ekonomi biru belum mampu mendorong pertumbuhan inklusif dan penciptaan lapangan kerja di wilayah pesisir. Oleh karena itu, Tanjung Jabung Timur perlu merespons isu ini dengan mendorong investasi pada sektor kelautan, memperkuat kelembagaan nelayan dan pembudidaya, serta mengembangkan industri hilir perikanan yang berbasis keberlanjutan dan teknologi.

2) Pemanfaatan Potensi Wisata yang Belum Optimal

Indonesia mempunyai kapasitas pariwisata yang besar, tetapi kinerjanya belum mencapai level tersebut. Hal ini terjadi karena masih ada keterbatasan pada atraksi, akses, fasilitas, dan kemampuan pengelolaan serta penerapan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, perubahan dalam minat pasar dan gangguan teknologi serta digitalisasi juga berpengaruh, ditambah lagi dengan bencana. Pariwisata yang tidak mencapai potensi sepenuhnya dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan dari devisa, penghasilan daerah, dan kesempatan kerja yang terkait dengan pariwisata. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata nasional berdampak langsung terhadap Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang sejatinya memiliki kekayaan potensi wisata alam seperti kawasan pesisir, hutan mangrove, taman nasional, serta budaya lokal yang unik. Keterbatasan dalam hal atraksi wisata yang dikembangkan, infrastruktur pendukung (seperti akses jalan, transportasi, dan akomodasi), serta minimnya promosi dan digitalisasi destinasi membuat daerah ini sulit menjadi tujuan wisata unggulan di Provinsi Jambi. Akibatnya, peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

3) Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil

UMKM dan koperasi memiliki peran besar dalam serapan tenaga kerja, yaitu sebesar 96,92 persen pada tahun 2019, namun kontribusi terhadap perekonomian masih rendah. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB masih 1,07 persen pada tahun 2019. Tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi adalah pekerja UMKM yang berkeahlian rendah (*low-skilled workers*), UMKM masih bergerak pada sektor yang bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, serta rendahnya jumlah koperasi yang bergerak pada sektor riil. Rendahnya kontribusi ekonomi dari UMKM dan koperasi kecil di tingkat nasional mencerminkan tantangan serupa yang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana sebagian besar pelaku ekonomi lokal merupakan usaha mikro dan kecil, serta koperasi berbasis komunitas. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk merespons isu ini dengan memperkuat ekosistem UMKM dan koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4) Integrasi Domestik Terbatas serta Kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa

Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam hal integrasi domestik, khususnya antara Jawa dan luar Jawa. Hal ini disebabkan oleh konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang belum optimal, sehingga menghambat angkutan barang dan penumpang antar pulau. Konektivitas yang terbatas dapat mengurangi mobilitas, distribusi, dan aksesibilitas masyarakat dan barang. Selain itu, pembangunan selama ini lebih terfokus pada Pulau Jawa, dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap nasional sebesar 57,8 persen pada tahun 2022. Sedangkan kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih pada angka 20,6 persen pada tahun 2022. Sebagai salah satu daerah di luar Jawa, kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten

Tanjung Jabung Timur dalam menyelesaikan isu ketimpangan antarwilayah, baik pada aspek SDM, infrastruktur, maupun anggaran pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan ketimpangan antarwilayah yang tinggi dapat mengurangi keseimbangan, kesetaraan, dan keadilan pembangunan.

5) Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal kepastian dan penegakan hukum. Salah satunya adalah potensi pelanggaran HAM masih tinggi, sebagaimana terlihat dari masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Pelanggaran HAM yang tinggi dapat mengurangi perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, pemulihan aset tindak pidana yang belum optimal, sebagaimana terlihat dari masih rendahnya nilai aset tindak pidana yang berhasil dikembalikan. Pemulihan aset tindak pidana yang belum optimal dapat mengurangi pencegahan, pemberantasan, dan pemulihan kerugian negara. Selanjutnya, pengawasan institusi penegak hukum masih lemah, sebagaimana terlihat dari masih adanya kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan aparat penegak hukum. Pengawasan institusi penegak hukum yang lemah dapat mengurangi independensi, integritas, dan profesionalisme penegak hukum. Terakhir, budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah, sebagaimana terlihat dari masih rendahnya tingkat kepatuhan, kesadaran, dan partisipasi hukum. Budaya hukum yang rendah dapat mengurangi ketaatan, keadilan, dan kedamaian hukum. Berbagai kondisi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mendorong kepastian dan penegakan hukum di tingkat lokal.

c. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional adalah permasalahan atau tantangan global yang berdampak lintas negara dan membutuhkan kerja sama antarbangsa untuk mengatasinya. Isu ini umumnya menyangkut aspek geopolitik,

keamanan global, ekonomi internasional, lingkungan hidup, hak asasi manusia, hingga perkembangan teknologi. Isu ini menjadi perhatian berbagai negara karena menyangkut stabilitas dan perdamaian dunia. Isu strategis internasional yang perlu diperhatikan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur di antaranya sebagai berikut ini:

1) Ketegangan Geopolitik antara Amerika Serikat dan China yang Berdampak pada Fluktuasi Ekonomi Indonesia

Sebagai negara berkembang dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia turut terdampak oleh dinamika ini. Ketegangan di Laut China Selatan misalnya, secara langsung mengancam kedaulatan dan keamanan maritim nasional. Di sisi ekonomi, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas ekspor-impor, terutama karena ketergantungan terhadap mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Selain itu, sebagai negara dengan kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia dihadapkan pada dilema diplomatik: bagaimana menjaga hubungan baik dengan kedua blok kekuatan dunia tanpa terjebak dalam politik berpihak. Dalam konteks ASEAN, Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk memimpin upaya menjaga kawasan tetap netral, damai, dan stabil.

Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok dapat memberikan dampak tidak langsung namun signifikan terhadap Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya dalam sektor perdagangan, investasi, dan stabilitas ekonomi lokal. Sebagai daerah yang memiliki potensi ekspor komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan—terutama kelapa, pinang, dan hasil laut—fluktuasi ekonomi global akibat konflik geopolitik dapat memengaruhi harga komoditas, permintaan pasar, dan jalur logistik. Ketergantungan Indonesia terhadap kedua negara sebagai mitra dagang utama dapat menciptakan ketidakpastian dalam rantai pasok dan ekspor, yang pada gilirannya berdampak pada pendapatan petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal di Tanjung Jabung Timur. Di sisi lain, potensi pengalihan investasi asing dari Tiongkok ke negara-negara ASEAN sebagai dampak dari konflik tersebut

dapat menjadi peluang jika daerah mampu menyiapkan infrastruktur, kebijakan insentif, dan SDM yang kompeten untuk menarik investor. Namun, jika tidak diantisipasi dengan baik, ketegangan ini juga bisa memperbesar risiko inflasi impor, melemahkan nilai tukar rupiah, dan menurunkan daya beli masyarakat, terutama yang bergantung pada produk impor dan bahan baku dari luar negeri. Dalam konteks ini, Tanjung Jabung Timur perlu meningkatkan ketahanan ekonomi lokal, mendorong diversifikasi pasar ekspor, serta memperkuat konektivitas dan posisi tawar daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

2) Tata Kelola Keuangan Global

Perancangan kebijakan fiskal baik di tingkat global maupun nasional pada tahun 2045 akan sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi dan jumlah penduduk. Pendapatan yang diperoleh oleh negara dan daerah akan sangat terkait dengan perubahan dalam struktur ekonomi dan efisiensi penduduk. Situasi ini berpotensi untuk mendorong peningkatan dalam penerimaan yang diperoleh oleh negara dan daerah.

Sehubungan dengan isu itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai kesempatan istimewa dalam bidang pengelolaan pemerintahan. Munculnya teknologi finansial seperti Fintech menjanjikan untuk menjadi kekuatan yang bisa mengubah keadaan di daerah ini, memberikan platform yang dapat sangat meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam keuangan. Ketika kebijakan fiskal di seluruh dunia mengalami perubahan, penerapan Fintech di Tanjung Jabung Timur menjadi cara untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan.

Penggunaan alat Fintech bisa mempermudah proses keuangan, memastikan bahwa aliran uang menjadi lebih aman dan mudah untuk ditelusuri. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan, tetapi juga menciptakan suasana di mana tindakan penipuan bisa berkurang. Oleh karena itu, mengintegrasikan Fintech dalam konteks pengelolaan keuangan global yang terus berubah menjadi kesempatan strategis bagi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk meningkatkan keandalan fiskal dan membangun dasar untuk pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang.

3) Bonus Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Penduduk dunia diprediksi akan berpusat di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan negara-negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi daya tarik bagi para investor pada kawasan tersebut. Di sisi lain, kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di kawasan Asia. Dengan adanya bonus demografi ini, tentunya Indonesia memerlukan strategi dan dukungan dari masing-masing daerah untuk dapat memaksimalkan peluang tersebut.

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus bertambah dalam lima tahun terakhir. Fenomena ini dapat menjadi peluang emas bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maupun sebaliknya. Proyeksi peningkatan populasi global menjadi 9,45 miliar pada tahun 2045, ditambah dengan meningkatnya persentase penduduk lanjut usia di Asia, menandakan potensi ancaman terhadap tenaga kerja lokal. Berkurangnya jumlah tenaga kerja dapat membebani produktivitas ekonomi sehingga memengaruhi lintasan pertumbuhan kawasan ini. Selain itu, meningkatnya beban pengeluaran kesehatan dan pensiun menjadi tantangan bagi kapasitas pemerintah daerah untuk menyediakan layanan sosial yang memadai. Seiring dengan semakin tak terbatasnya dunia akibat pertumbuhan populasi global, Tanjung Jabung Timur mungkin akan menghadapi tantangan dalam mempertahankan prioritas kepemilikan lahan dan mengelola izin

tinggal masyarakat setempat. Ancaman potensial ini dapat berdampak pada tatanan sosial dan dinamika penggunaan lahan di wilayah tersebut.

Selain itu, pertumbuhan populasi akan memerlukan lebih banyak fasilitas infrastruktur, seperti jalan raya, sekolah, dan rumah sakit, yang dapat membebani sumber daya dan kapasitas wilayah untuk menyediakan layanan yang memadai. Di sisi lain, inovasi dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan perekonomian dan produktivitas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan penerapan teknologi inovatif, produktivitas dan pendapatan petani dapat meningkat sehingga dapat berdampak pada peningkatan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan dan mempersiapkan perubahan-perubahan ini untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di kawasan ini.

4) Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Hal ini berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan utama dari isu ini adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru ini telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Krisis di berbagai sektor dapat menjadi ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Hal ini menyebabkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi secara global. Pada aspek geoekonomi, saat ini sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di negara berkembang melihat ketergantungan yang tinggi akan ekspor komoditas.

Dalam konteks ini, meningkatnya risiko konflik dan ketidakstabilan ekonomi merupakan ancaman besar bagi lanskap ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mengingat ketergantungan wilayah ini pada industri tertentu,

seperti pertanian dan ekstraksi sumber daya alam, setiap gangguan dalam dinamika ekonomi global dapat berdampak buruk pada ekonomi lokal. Selain itu, persaingan yang semakin ketat antarnegara berpotensi memengaruhi hubungan perdagangan internasional, yang mengarah pada penurunan akses pasar untuk produk-produk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketika kabupaten ini bergulat dengan tantangan yang ditimbulkan oleh ancaman-ancaman ini, penting untuk memanfaatkannya sebagai peluang dengan secara aktif terlibat dalam kerja sama regional dan multilateral, Tanjung Jabung Timur dapat menavigasi kompleksitas ekonomi global, membina kemitraan yang meningkatkan ketahanan ekonominya. Selain itu, fokus pada pengembangan produk yang berdaya saing tinggi yang disesuaikan dengan permintaan pasar yang sedang berkembang, memberikan jalan bagi kabupaten ini untuk memperkuat fondasi ekonominya dan memberikan kontribusi yang berarti bagi ekonomi global.

5) Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi merupakan salah satu isu strategis global yang paling cepat berubah dan berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan. Dampak dari perkembangan teknologi ini tidak hanya dirasakan di pusat-pusat kota besar, tetapi juga harus menjadi perhatian serius bagi daerah, termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi. Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, Tanjung Jabung Timur perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendorong efisiensi, produktivitas, dan daya saing wilayah. Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus menjadikan perkembangan teknologi sebagai peluang strategis dan bukan ancaman, supaya dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penerapan teknologi dapat menyederhanakan proses administrasi, membuat layanan publik lebih mudah diakses dan efisien. Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat memanfaatkan kemajuan ini untuk menciptakan sistem

pemerintahan yang lebih responsif dan ramah terhadap masyarakat. Investasi pada infrastruktur digital dan inisiatif e-government akan sangat penting dalam mewujudkan peluang ini. Teknologi akan memudahkan aksesibilitas terhadap pelayanan publik dan memperpendek arus layanan. Hal ini dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6) Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan salah satu isu strategis global yang paling mendesak dan berdampak luas terhadap kehidupan manusia. Kenaikan suhu bumi, naiknya permukaan air laut, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan abrasi pesisir telah menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi, terutama di daerah-daerah yang rentan secara geografis dan ekologis. Isu perubahan iklim ini menjadi sebagai salah satu fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini dilakukan agar dapat menetapkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus terintegrasi dalam berbagai sektor, mulai dari tata ruang wilayah, pertanian, kehutanan, kelautan, hingga infrastruktur. Dengan menjadikan perubahan iklim sebagai isu strategis dalam RPJMD, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan keselamatan generasi mendatang.

Salah satu ancaman utama yang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah potensi penurunan produktivitas dan kesejahteraan sektor-sektor sensitif di wilayah tersebut. Seiring dengan meningkatnya perubahan iklim, sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang sering kali sangat bergantung pada kondisi lingkungan, dapat mengalami gangguan. Perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem dapat berdampak buruk pada hasil panen, yang menyebabkan

penurunan produktivitas pertanian. Hal ini, pada gilirannya, memengaruhi mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sektor-sektor ini, yang berpotensi menyebabkan kesulitan ekonomi dan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan.

Selain itu, kondisi lingkungan yang memburuk dalam skala global turut berkontribusi terhadap memburuknya kondisi lingkungan lokal Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keterkaitan ekosistem berarti bahwa peristiwa seperti deforestasi, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati di tingkat global memiliki dampak langsung di tingkat lokal. Kabupaten ini dapat mengalami peningkatan kerentanan terhadap bencana lingkungan, seperti banjir, kekeringan, dan degradasi lahan, yang dapat memperburuk tantangan yang ada.

7) Persaingan Sumber Daya Alam (SDA)

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (SDA) akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan akan SDA sehingga mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran di antaranya efektivitas pengelolaan dan konservasi SDA, pengembangan teknologi, serta perubahan pola konsumsi dan produksi suatu daerah.

Eksplorasi sumber daya alam sering kali menyebabkan degradasi lingkungan. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan sumber daya alam, terdapat risiko memburuknya kondisi lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Eksplorasi yang berlebihan di sektor pertambangan dan sumber daya alam lainnya dapat menyebabkan deforestasi, erosi tanah, dan pencemaran air, yang berdampak negatif terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kualitas hidup masyarakat. Meningkatnya permintaan sumber daya alam secara global menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tekanan untuk memenuhi permintaan ini

dapat memaksa pemerintah untuk sangat selektif dalam mengeluarkan izin pemanfaatan sumber daya alam. Selektivitas ini berpotensi membatasi akses daerah terhadap sumber daya tertentu, memengaruhi pembangunan ekonomi dan menjadi ancaman bagi industri yang bergantung pada sumber daya tersebut.

Menyadari risiko yang terkait dengan ketergantungan yang berlebihan pada sektor pertambangan yang tidak berkelanjutan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat memanfaatkan peluang untuk mendiversifikasi kegiatan ekonominya. Mendorong dan berinvestasi di industri alternatif seperti pertanian berkelanjutan, ekowisata, atau energi terbarukan dapat berkontribusi pada ketahanan ekonomi. Diversifikasi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas, tetapi juga menciptakan lanskap ekonomi yang lebih berkelanjutan dan seimbang.

8) Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia diperkirakan terus bertambah setiap tahunnya, sekitar 140 juta individu. Pertumbuhan ini menciptakan peluang ekonomi. Proporsi kelas menengah yang meningkat pesat semakin mendorong penciptaan jenis dan lapangan kerja baru serta kebutuhan konsumsi yang beragam. Jenis pekerjaan baru ini berhubungan dengan teknologi tinggi serta bersifat fleksibel dan memiliki mobilitas yang tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis dan aktivitas ekonomi. Tren global yang memproyeksikan peningkatan substansial dalam populasi kelas menengah dunia, menghadirkan peluang dan ancaman yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Lonjakan populasi kelas menengah global menawarkan peluang ekonomi yang unik bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peningkatan sumber-sumber modal dan teknologi yang diantisipasi dari berbagai negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan jumlah kelas menengah sering kali mengarah pada peningkatan permintaan akan barang dan jasa yang beragam, terutama yang terkait dengan teknologi tinggi. Kawasan ini dapat

memanfaatkan tren ini dengan menarik investasi di sektor-sektor yang memenuhi kebutuhan kelas menengah yang terus berkembang, mendorong inovasi, dan mempromosikan lingkungan bisnis yang dinamis. Pertumbuhan kelas menengah dan atas menandakan potensi peningkatan ekonomi lokal. Tingkat konsumsi yang lebih tinggi yang terkait dengan kelas-kelas ini dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, kebijakan harus dirancang untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, perbaikan infrastruktur, dan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, yang selaras dengan kebutuhan dan preferensi kelas menengah yang terus berkembang.

Meskipun peluang ekonomi cukup menjanjikan, ada beberapa ancaman yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Risiko penurunan daya saing dan pangsa pasar Indonesia di negara-negara Asia yang memiliki produsen yang lebih murah menjadi perhatian penting. Seiring pasar global beradaptasi dengan tuntutan kelas menengah yang terus berkembang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu meningkatkan daya saingnya agar tidak kalah bersaing dengan alternatif yang lebih hemat biaya. Hal ini memerlukan pendekatan strategis untuk adopsi teknologi, pengembangan keterampilan, dan pembentukan kemitraan untuk mempertahankan dan berpotensi meningkatkan pangsa pasar.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS

3.1 Visi

Visi merupakan elemen fundamental dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ia berfungsi sebagai arah dan cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2025-2029, visi menjadi dasar pijakan untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Oleh karena itu dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029, yaitu:

“Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia”

Adapun penjelasan dari pernyataan visi adalah sebagai berikut:

- **Membangun:** Menurut KBBI, membangun berarti “mendirikan sesuatu (seperti rumah, gedung, jalan, dan sebagainya); membuat supaya menjadi maju (baik, sempurna, dan sebagainya)”. Dalam konteks ini, kata “membangun” menggambarkan komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pembangunan secara aktif, terencana, dan berkesinambungan di berbagai sektor kehidupan. Istilah ini mencerminkan upaya membenahi infrastruktur, meningkatkan layanan publik, mengembangkan ekonomi lokal, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
- **Bersama Rakyat:** “Bersama” dalam KBBI berarti “dengan; serentak (tidak sendiri-sendiri)”, sementara rakyat adalah “penduduk suatu

negara (yang diperintah)”. Dengan demikian, visi “bersama rakyat” menegaskan prinsip partisipatif dan inklusif dalam pembangunan daerah. Pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi mengedepankan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal, perempuan, pemuda, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat. Nilai ini sejalan dengan pendekatan pembangunan berbasis pentahelix yang mengintegrasikan unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.

- **Untuk Sejahtera:** Menurut KBBI, sejahtera berarti “aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan)”. Hal ini menggambarkan orientasi hasil pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan layak, pengurangan kemiskinan, dan jaminan sosial, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata di seluruh wilayah kabupaten.
- **Bahagia:** Dalam KBBI, bahagia didefinisikan sebagai “keadaan atau perasaan senang dan tenteram (bebas dari segala yang menyusahkan)”. Kondisi yang diharapkan dari dimensi pembangunan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, psikologis, dan sosial. Kebahagiaan diartikan sebagai perasaan aman, damai, dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga mencakup harmonisasi hubungan sosial, kelestarian lingkungan, keterlibatan budaya lokal, serta rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Visi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 telah selaras dengan Visi Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan Visi RPJMN 2025-2029, yang dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1

Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan Visi RPJMN 2025-2029

Visi RPJMN Tahun 2025-2029  Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Visi Provinsi Jambi Tahun 2025-2029  Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT	Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029  Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia

Adanya keselarasan visi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen mewujudkan pembangunan yang saling menguatkan bersama rakyat untuk mencapai kesejahteraan dan bahagia, yang mana sejalan dengan Visi Provinsi Jambi yang ingin mencapai keharmonisan melalui kondisi yang MANTAP (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional). Kedua visi daerah tersebut juga bersinergi dengan misi pembangunan nasional untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan Sumber Daya sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu keselarasan visi juga tergambar dari Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menekankan pembangunan berbasis partisipasi rakyat dan kesejahteraan masyarakat, merupakan bagian integral dari upaya membangun Indonesia dari daerah.

3.2 Misi

Dalam mencapai visi pembangunan dalam lima tahun mendatang, disusun Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antarwilayah

Misi pertama ini bertujuan untuk memperkuat integrasi antarwilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui pengembangan infrastruktur dasar yang andal, merata, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan, jembatan, dan akses transportasi publik yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta wilayah pesisir dan pedalaman. Misi ini juga mencakup penataan infrastruktur strategis yang berbasis tata ruang, penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan infrastruktur, dan penyediaan layanan dasar yang mendukung mobilitas penduduk dan distribusi logistik. Dengan meningkatkan konektivitas wilayah, diharapkan tercipta efisiensi antar sektor, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing daerah, sehingga mendukung percepatan transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan geografis serta perubahan iklim.

Misi 2 Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Memperkokoh struktur ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, tetapi juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Optimalisasi pengelolaan SDA dilakukan dengan prinsip keseimbangan ekologis, efisiensi pemanfaatan, dan daya dukung lingkungan. Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan kebijakan tata ruang, pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya air, serta rehabilitasi lahan kritis secara terencana. Pemanfaatan teknologi lingkungan, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan multipihak termasuk sektor swasta dan komunitas lokal akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, misi ini tidak hanya ditujukan untuk mengejar

pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dalam jangka panjang, dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal.

Misi 3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan Kondusif

Misi ini menekankan pentingnya pembangunan manusia dan pemerintahan yang baik sebagai dasar kemajuan daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelatihan keterampilan kerja agar masyarakat memiliki daya saing di berbagai bidang untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Untuk mendukung pengembangan SDM yang kuat, dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang kredibel, yaitu pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Pemerintah daerah akan terus memperbaiki sistem kerja birokrasi, memperkuat integritas aparatur, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan membangun manusia yang unggul dan pemerintahan yang dapat dipercaya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan mampu menjadi daerah yang maju, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan.

Tabel 3.1

Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMN 2025-2029 (Asta Cita)

Misi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita)
Misi 1 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antarwilayah Misi 3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan Kondusif	Misi 1 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Misi 3 Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Asta Cita 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Asta Cita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas Asta Cita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
Misi 2 Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	Misi 2 Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	Asta Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Asta Cita 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta

Misi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita)
		mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Asta Cita 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Asta Cita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

Selain itu, keselarasan antara visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 dengan visi dan misi RPJPD Tahun 2025–2045 merupakan landasan strategis yang memastikan arah pembangunan jangka menengah tetap berada dalam jalur pencapaian tujuan jangka panjang daerah. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan berperan sebagai instrumen operasional yang menguraikan tahap-tahap pembangunan daerah secara bertahap, terukur, dan berkesinambungan, sejalan dengan visi besar yang tertuang dalam RPJPD. Oleh karena itu, penjabaran misi-misi pembangunan dalam RPJMD tidak hanya merespons dinamika kebutuhan pembangunan daerah saat ini, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi pencapaian visi jangka panjang menuju Tanjung Jabung Timur yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan hingga tahun 2045. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Keselarasn Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045

Visi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029		Visi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045
“Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia”	SELARAS	“Tanjung Jabung Timur Negeri Maritim, Maju dan Berkelanjutan”
Misi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029		Misi RPJPD Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2025-2045
Misi 1 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antarwilayah	SELARAS	Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Daerah yang Merata dan Berkeadilan Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana Daerah yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Misi 2 Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	SELARAS	Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah Misi 4 Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
Misi 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan Kondusif	SELARAS	Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial Daerah Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Misi 4 Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Misi 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Daerah Misi 8 Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan Daerah

Setelah memastikan keselarasan antara visi dan misi RPJMD Tahun 2025–2029 dengan arah pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Tahun 2025–2045, langkah selanjutnya adalah memastikan target sasaran visi RPJPD Kabupaten Tanjung jabung Timur yang ingin dicapai pada pada periode I (RPJMD Tahun 2025-2029). Hal ini perlu untuk diperhatikan karen periode ini berfungsi sebagai fondasi awal dalam mencapai visi besar daerah, dengan menitikberatkan pada pembangunan yang bertahap, berkelanjutan, dan terukur. Target sasaran visi pada periode RPJMD pertama ini difokuskan untuk membangun landasan kokoh dalam aspek kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup, sehingga menjadi pijakan penting dalam mewujudkan transformasi pembangunan Tanjung Jabung Timur menuju visi 2045.

Tabel 3.3

Target sasaran Visi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Untuk Periode I RPJMD tahun 2025-2029

Sasaran Visi RPJPD	Indikator	Baseli ne	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Peningkat an Pendapat an Per Kapita	a. PDRB per Kapita (Rp Juta)	11,4	116,25	127,94	139,63	151,31	163,00
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	N/A	43,5	44,595	45,69	46,785	47,88
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolaha n (%)	8,05	8,37	8,68	9,00	9,31	9,63
Pengenta san Kemiskin	a. Tingkat Kemiskina n (%)	10,14	9,88	9,62	9,37	9,11	8,85

Sasaran Visi RPJPD	Indikator	Baseli ne	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
an dan Ketimpan gan	b. Rasio Gini	0,30	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30
	c. Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	N/A	10,60	10,66	10,72	10,77	10,83
	Pertumbuh an Ekonomi	4,73	4,76	4,78	4,81	4,83	4,86
Peningkat an Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	4,61	46,86	47,62	48,38	49,14	49,9
	Indeks Daya Saing Daerah	2,83	2,83	2,86	2,90	2,93	2,96
Peningkat an Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangu nan Manusia	70,77	70,94	71,11	71,28	71,44	71,61
Penuruna n Emisi GRK menuju <i>Net Zero Emmissio n</i>	Intensitas Emisi GRK (ton CO2e)	N/A	1.538.744 ,06	1.538.744 ,51	1.538.744 ,96	1.538.745 ,41	2.748.791 ,06
	Indeks Kualitas Lingkunga n Hidup Daerah	73,25	73,28	73,30	73,33	73,36	73,38

Lebih lanjut, untuk mengarahkan pembangunan daerah secara lebih terukur dan terfokus, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Indikator Utama Pembangunan (IUP) sebagai instrumen kunci

dalam mengawal pencapaian visi jangka panjang RPJPD. Penetapan target IUP ini menjadi landasan evaluatif dan acuan dalam penyusunan kebijakan serta pengendalian kinerja pembangunan daerah secara akuntabel dan berkesinambungan. Indikator utama pembangunan yang ingin dicapai selama periode pertama RPJMD Tahun 2025–2029, mencakup berbagai dimensi pembangunan strategis seperti pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, daya saing daerah, dan keberlanjutan lingkungan. Adapun target dari Indikator Utama Pembangunan (IUP)RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Periode I RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4

Target Indikator Utama Pembangunan (IUP)RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Periode I RPJMD Tahun 2025-2029

Indikator Makro	Baseline	Target Daerah					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tranformasi Sosial							
Kesehatan untuk Semua							
Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	67,26	67,54	67,82	68,11	68,39	68,67	68,95
Kesehatan ibu dan anak:							
a. Angka kematian ibu/100 ribu kelahiran hidup	71,50	71,5	69,20	66,90	64,60	62,30	62,30
b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23,7	23,7	23,23	22,76	22,29	21,35	20,88
Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):	N/A	17	15,125	13,25	11,375	9,5	7,625
a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	41	50,8	49,16	53,31	57,47	61,62	65,78
b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	87	90	90,44	90,88	91,32	92,2	92,64
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	87,87	90	98	98	98	98	98
Pendidikan Berkualitas yang Merata							
Hasil Pembelajaran:							
a. Skor Kompetensi Literasi hasil assessment Tingkat Nasional							
- SD	61,0	63,5	66,00	68,50	71,00	73,5	76,00
- SMP	70,82	71,92	73,02	74,12	75,22	76,32	77,42

Indikator Makro	Baseline	Target Daerah					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
b. Skor Kompetensi Numerasi hasil assessment Tingkat nasional							
- SD	55,21	58,11	61,01	63,91	66,81	69,71	72,61
- SMP	63,07	64,57	63,07	61,57	60,07	70,57	69,07
c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,7	7,8	7,96	8,12	8,28	8,44	8,60
d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,21	12,28	12,39	12,49	12,60	12,7	12,81
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	3,73	6,3	6,33	6,36	6,40	6,46	6,49
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	NA	10,85	12,57	14,29	16,02	19,46	21,18
Pemenuhan Jaminan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat							
Tingkat Kemiskinan (%)	10,14	9,88	7,44-8,08	5,94-6,60	4,43-5,12	2,93-3,73	2,93-3,73
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	NA	21,55	23,05	24,55	26,04	29,04	30,54
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan atau Dinas yang menangani ketenagakerjaan (Orang)	NA	12	13,64	15,28	16,93	20,21	21,85
Transformasi Ekonomi							
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi							
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,05	8,365	8,68	9,00	9,31	9,625	9,94
Pengembangan Pariwisata							
a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,44	0,49	0,51	0,53	0,56	0,6	0,62
b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	NA	0,03	0,04	0,06	0,07	0,1	0,11
Distribusi PDRB sektor tersier (%)	25,63	25,65	25,67	25,69	25,71	25,73	25,75
Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD							
a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non	NA	0,47	0,60	0,73	0,85	1,11	1,24

Indikator Makro	Baseline	Target Daerah					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
pertanian pada level kabupaten (%)							
b. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten (%)	NA	4,6	4,64	4,68	4,72	4,8	4,84
c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	NA	5,24	5,55	5,86	6,18	6,8	7,11
d. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	NA	0,8	0,93	1,06	1,20	1,46	1,59
e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0	0	0,05	0,10	0,16	0,26	0,31
Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik							
a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	NA	1,96-2,01	1,79-1,98	1,64-1,94	1,59-1,91	1,52-1,87	1,49-1,80
b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	NA	10	11,76	13,52	15,28	18,8	20,56
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	41,47	43,00	44,50	46,00	47,50	49,00	50,50
Tingkat Penguasaan IPTEK							
a. Pengeluaran Iptek dan inovasi (persen APBD)	NA	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36
b. Indeks inovasi daerah	46,1	46,86	46,10	45,34	44,58	49,9	49,14
Penerapan Ekonomi Hijau							
Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:							
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	NA	27,3	29,90	32,51	35,11	40,32	42,92
Transformasi Digital							
Indeks Transformasi Digital Nasional	NA	42,3	41,88	41,45	41,03	44	43,58
Produktivitas Ekonomi							
Indeks Harga Konsumen	106,35	106,6	106,87	107,14	107,41	107,7	107,97
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	20,70	20,02	19,94	19,86	19,78	19,62	19,54
Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	42,7	42,47	41,96	41,45	40,93	39,91	39,40
Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi							
Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan							
a. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	NA	40	41,10	42,20	43,30	45,5	46,60
b. Persentase Desa Mandiri (%)	NA	0,00	0,68	1,36	2,04	2,74	3,42
Transformasi Tata Kelola							

Indikator Makro	Baseline	Target Daerah					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tata Laksana Pemerintah yang Efektif dan Efisien							
Indeks Reformasi Hukum	86,46	87,05	87,64	88,23	88,82	89,41	90,00
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,83	2,83	2,85	2,87	2,90	2,92	2,96
Indeks Pelayanan Publik	3,27	3,39	3,51	3,64	3,76	3,88	4,00
Indeks Integritas Kabupaten (hasil SPI)	75,63	76,46	77,02	77,57	78,13	79,24	79,80
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi							
Penegakan Peraturan Daerah							
a. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b. Persentase Capaian Pelaksanaan	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka kriminalitas (per 100.000 penduduk)	NA	160	155,16	150,32	145,48	135,80	130,96
Persentase penyelesaian konflik	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stabilitas Ekonomi Makro							
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,08	0,08	0,11	0,14	0,18	0,24	0,27
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	5,79	7,4	7,48	7,55	7,63	7,7	7,78
Rasio Pajak Daerah terhadap PAD (%)	33,120	33,4	33,80	34,20	34,60	35,00	35,40
Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD (%)	1,37	1,4	1,48	1,55	1,63	1,7	1,78
Indeks Akses Keuangan Daerah	NA	4,25	4,38	4,52	4,65	4,78	4,91
Tingkat Inflasi (%)	1,16	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
Ketimpangan Antar Wilayah dan Pendapatan Berkurang							
Ketimpangan Berkurang							
Rasio Gini	0,30	0,31-0,315	0,31-0,314	0,31-0,313	0,31-0,312	0,300-0,305	0,300-0,305
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	2,87	2,91	2,95	2,99	3,03	3,07	3,11
Persentase implementasi kerjasama daerah dari kerjasama yang dibangun	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100,00
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi							
Beragam Maslahat dan Berkebudayaan Maju							
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	NA	60,15	60,60	61,04	61,49	62,38	62,83
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	NA	71,64	71,78	71,92	72,06	72,2	72,34

Indikator Makro	Baseline	Target Daerah					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif							
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,06	61,1	61,13	61,15	61,18	61,2	61,23
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,55	0,54	0,53	0,51	0,50	0,49	0,48
Lingkungan Hidup Berkualitas							
Kualitas Lingkungan Hidup							
a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	NA	73,28	73,30	73,33	73,36	73,38	73,41
b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	NA	7	7,38	7,75	8,13	8,5	8,88
c. Pengelolaan Sampah							
- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	NA	6	8,82	11,63	14,45	20,08	22,90
- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	NA	15,89	19,59	23,29	26,99	34,39	38,09
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan							
Ketahanan Energi, Air, dan Pangan							
a. Ketahanan Energi							
- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	NA	1.814	1893,96	1973,92	2053,88	2.213,80	2293,76
b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	13,25	12,32	11,79	11,26	10,74	9,68	9,15
c. Ketahanan Air							
- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	NA	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13
- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	NA	25,66	28,27	30,88	33,49	38,71	41,32
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim							
Indeks Resiko Bencana (IRB)	156,4	152,24	151,18	150,11	149,05	147,98	131,46
Intensitas Emisi GRK (ton CO ₂ eq)	NA	1.538.74 4,06	1.538.74 4,51	1.538.74 4,96	1.538.74 5,41	2.748.79 1,06	2.748.79 1,51
a. Kumulatif	NA	1.538.74 4,06	1.538.74 4,51	1.538.74 4,96	1.538.74 5,41	2.748.79 1,06	2.748.79 1,51
b. Tahunan							

3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah rumusan yang lebih spesifik mengenai "apa" yang ingin dicapai dalam jangka menengah (5 tahun) untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Tujuan ini merupakan jembatan antara visi yang bersifat umum dan sasaran yang lebih operasional. Untuk RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2025-2029, tujuan pembangunan daerah akan berfokus pada beberapa pilar utama, yaitu:

Misi 1 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antarwilayah

Tujuan 1.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah

Upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur daerah menjadi salah satu pilar utama dari program pembangunan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan konektivitas wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tujuan ini berakar dari visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2025-2029, yakni "Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia". Visi ini diturunkan ke dalam misi pertama yang secara eksplisit menekankan pada aspek infrastruktur, yaitu "Peningkatan Infrastruktur Dasar guna Terwujudnya Konektivitas Antarwilayah". Misi tersebut menegaskan pentingnya pemerataan infrastruktur yang terkoneksi dari desa hingga ke tingkat kabupaten sebagai landasan utama dalam mendukung pergerakan ekonomi lokal, memperkuat interaksi sosial masyarakat, dan memperluas akses terhadap layanan publik yang adil dan merata.

Tujuan pembangunan ini tidak hanya dipahami sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong transformasi sosial ekonomi secara menyeluruh. Peningkatan kualitas infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan keterjangkauan akses layanan dasar yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang didominasi oleh lahan gambut dan wilayah pesisir memperkuat urgensi

pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas infrastruktur daerah memiliki peran sentral dalam mencapai struktur wilayah yang konektif, produktif, dan berdaya saing, sejalan dengan cita-cita pembangunan yang inklusif dan merata sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sasaran 1.1.1 Terwujudnya Aksesibilitas dan Konektivitas antarwilayah yang Berkualitas

Sasaran ini akan mengakomodasi percepatan konektivitas antarwilayah yang masih rendah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara umum, sasaran ini mencakup akses masyarakat terhadap infrastruktur jalan dalam kondisi mantap yang menunjukkan penurunan dari 2021 sebesar 76,90 persen menjadi 16,67 persen pada 2024. Selanjutnya, jenis permukaan jalan masih didominasi oleh permukaan tanah sebesar 27,80 persen dan Klas B sebesar 46,56 persen dari total keseluruhan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Demikian juga dengan kualitas layanan transportasi yang dilihat dari rasio konektivitas menunjukkan penurunan dari 0,26 persen pada 2021 menjadi 0,02 pada 2024. Karakteristik wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bercorak pesisir memperlihatkan kualitas layanan transportasi sungai yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur penyeberangan sungai seperti dermaga dan transportasi sungai. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan rendahnya kualitas aksesibilitas dan konektivitas tersebut, diperlukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang andal, peningkatan rasio konektivitas layanan transportasi darat dan sungai, serta pengembangan sarana penyeberangan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah pesisir. Peningkatan ini diharapkan mampu mendorong mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi yang lebih merata, sekaligus memperkuat integrasi wilayah sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sasaran 1.1.2 Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas

Sasaran kedua dari tujuan peningkatan kualitas infrastruktur daerah difokuskan pada penataan dan peningkatan mutu permukiman, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penyediaan layanan dasar publik. Sasaran ini memiliki relevansi tinggi terhadap luas permukiman kumuh yang menunjukkan tren positif dengan berkurangnya luas permukiman kumuh dari 141,22 Ha pada 2020 menjadi 114,94 Ha pada 2023, sementara pengurangan luas permukiman kumuh menunjukkan peningkatan dari 4,12 persen pada 2020 menjadi 4,76 pada 2023. Oleh karena itu dengan terwujudnya sasaran ini, pemenuhan layanan infrastruktur permukiman akan lebih optimal jika memperhatikan kondisi kepadatan penduduk yang dihuni oleh masyarakat miskin dari wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Misi 2 Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Misi ini dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pemanfaatan teknologi sebagai bentuk inovasi dalam mengelola dan meningkatkan daya saing potensi daerah secara berkelanjutan dengan memberdayakan sektor-sektor strategis, mempromosikan potensi investasi daerah guna mendukung penciptaan lapangan kerja. Penguatan komponen struktur ekonomi dan investasi daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, melalui pemanfaatan teknologi sebagai wujud inovasi difokuskan pada sektor unggulan yang dikelola masyarakat pada sektor Pertanian dan Perikanan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan menjaga lingkungan.

Tujuan 2.1 Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Perekonomian menjadi salah satu sumber penting untuk membangun daerah yang lebih baik. Apabila perekonomian daerah tidak baik, akan memengaruhi kinerja pembangunan daerah di sektor lainnya. Oleh karena itu

Pemerintah Tanjung Jabung Timur berupaya untuk memperkuat struktur ekonomi dengan mengoptimalkan SDA dan potensi daerah lainnya. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mewujudkan tujuan ini antara lain: 1) pertumbuhan ekonomi 2) indeks gini dan 3) pendapatan per kapita dan 4) kemiskinan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ada tiga sasaran ekonomi yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu: 1) Terwujudnya daya saing sektor pertanian dan perikanan 2) Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah 3) Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan pariwisata.

Sasaran 2.1.1 Terwujudnya Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan

Dalam rangka mencapai sasaran ini, indikator kinerja yang digunakan adalah pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemerintah kabupaten telah mempersiapkan berbagai hal di antaranya PDRB Per Kapita Tanjung Jabung Timur berdasarkan harga berlaku ditargetkan sebesar Rp 350-450 juta. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi sektor pertambangan dan pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Tanjung Jabung Timur memiliki potensi yang cukup besar di bidang pertanian yang meliputi hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang dapat memperkuat industri pengolahan. Keberlanjutan industri pengolahan sangat didukung oleh industri hijau yang berbasis pada inovasi dan inklusivitas. Selain itu, dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan Tanjung Jabung Timur yang berkelanjutan dengan cara yang ramah lingkungan.

Diharapkan akan ada peningkatan besar pada Indeks Ekonomi Biru Indonesia di Tanjung Jabung Timur. Potensi dari sumber daya laut dan pengolahan hasil laut membuka peluang untuk perkembangan industri pengolahan ikan dan memiliki efek positif pada penciptaan lapangan kerja, dengan target mencapai 12 - 13,22 persen pada tahun 2030. Keberlanjutan

dalam pengolahan industri merupakan faktor krusial untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pendekatan yang bertanggung jawab dalam sektor pengolahan membutuhkan penerapan prinsip keberlanjutan di seluruh aspek rantai nilai, mulai dari pengelolaan bahan baku sampai pembuangan limbah.

Sasaran 2.1.2 Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang lebih spesifik, terukur, dan rinci, yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui rangkaian kegiatan atau tindakan, dan membantu mengarahkan energi dan sumber daya secara efektif. Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya saing produk unggulan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur indikator kinerja yang digunakan adalah pertumbuhan sektor industri pengolahan dan indeks daya saing daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kedua indikator ini dapat melihat dan mengukur sejauh mana daya saing produk unggulan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sasaran 2.1.3 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang lebih spesifik, terukur, dan rinci, yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui rangkaian kegiatan atau tindakan, dan membantu mengarahkan energi dan sumber daya secara efektif. Sasaran ketiga adalah meningkatnya pertumbuhan sektor tersier. Sektor tersier, yang juga dikenal sebagai sektor jasa, mencakup berbagai jenis kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan produk fisik secara langsung, tetapi menyediakan layanan atau jasa kepada konsumen atau bisnis lain. Sektor tersier terdiri atas : 1) Perdagangan : Jual beli barang dan jasa, baik grosir maupun eceran, 2) Hotel dan Restoran: Penyediaan akomodasi dan makanan/minuman, 3) Transportasi dan Pergudangan: Pengangkutan barang

dan orang, serta penyimpanan barang, 4) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan: Layanan perbankan, asuransi, konsultasi, dan lain-lain, 5) Jasa-jasa: Pendidikan, kesehatan, pariwisata, hiburan, dan lain-lain. Guna mencapai sasaran ini indikator yang digunakan adalah pertumbuhan sektor tersier. Indikator ini dapat melihat dan mengukur sejauh mana pertumbuhan sektor tersier di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tujuan 2.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan ini diarahkan untuk memastikan tercapainya kondisi lingkungan yang sehat, lestari, dan mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Upaya ini mencakup pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah, peningkatan kualitas tutupan lahan, rehabilitasi kawasan kritis, serta penguatan sistem pengelolaan limbah, baik domestik maupun industri. Selain itu, penguatan tata kelola lingkungan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pengawasan berbasis data lingkungan yang terintegrasi, serta perluasan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian lingkungan. Tujuan ini juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pengurangan risiko bencana ekologis, konservasi ekosistem pesisir dan rawa gambut, serta peningkatan kualitas indeks lingkungan hidup daerah secara terukur. Dengan demikian, peningkatan kualitas lingkungan tidak hanya menjadi dasar kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pilar penting dalam mendukung pembangunan wilayah yang resilien dan berdaya saing jangka panjang.

Sasaran 2.2.1 Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas air, udara, dan tutupan lahan sebagai bagian dari upaya strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Capaian selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang mencerminkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah dan sistematis. Indeks Kualitas Air (IKA) sempat mengalami penurunan dari 59,26 pada 2020

menjadi 51,78 pada 2022, sebelum meningkat kembali menjadi 61,00 pada 2024, mengindikasikan masih terbatasnya efektivitas pengendalian pencemaran air. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 85,00 menjadi 95,45 pada periode yang sama, namun perlu dijaga melalui kebijakan emisi jangka panjang. Di sisi lain, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) justru menunjukkan penurunan tajam dari 65,21 pada 2020 menjadi 50,83 pada 2022, menandakan ancaman serius terhadap keberlanjutan fungsi ekologis kawasan daratan dan pesisir. Oleh karena itu, pencapaian sasaran ini menuntut penguatan tata kelola lingkungan, peningkatan partisipasi masyarakat, pengendalian alih fungsi lahan, serta optimalisasi program rehabilitasi kawasan kritis secara lintas sektor dan berkelanjutan.

Misi 3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan Kredibel dan Kondusif

Tujuan 3.1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Tujuan meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing merupakan fondasi utama dalam pencapaian visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia. Melalui misi daerah yang menekankan penguatan sumber daya manusia, pemerintah daerah berkomitmen untuk membangun masyarakat yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga adaptif, inklusif, dan sejahtera secara sosial. Tujuan ini diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan mendasar yang masih dihadapi daerah, seperti rendahnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan yang belum merata, ketimpangan sosial, serta kesenjangan kesempatan pembangunan antarwilayah dan antar-gender. Pembangunan manusia yang unggul berarti mendorong penciptaan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi, berkompetensi, serta mampu menghadapi tantangan global. Berdaya saing juga mencerminkan kemampuan individu untuk berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta

berkontribusi aktif dalam pembangunan lokal. Dalam kerangka keadilan sosial, pembangunan manusia juga harus merata memberikan akses yang setara terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan. Dengan demikian, arah pembangunan ini akan mendorong terciptanya masyarakat Tanjung Jabung Timur yang cerdas, sehat, sejahtera, dan bahagia secara menyeluruh, sebagai wujud nyata dari sinergi antara tujuan, misi, dan visi daerah.

Sasaran 3.1.1 Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas

Sasaran ini menyoroti urgensi peningkatan kualitas pendidikan dari hulu ke hilir, serta memastikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup upaya peningkatan harapan lama sekolah (HLS) yang telah menunjukkan tren positif dari 12,16 tahun di 2020 menjadi 12,21 tahun di 2024, dan rata-rata lama sekolah (RLS) yang juga mengalami peningkatan dari 6,70 tahun di 2020 menjadi 7,70 tahun di 2024. Namun, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar setara dengan provinsi dan nasional. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan mengatasi permasalahan inti kualitas pendidikan yang masih rendah, seperti rendahnya intelegualitas anak usia sekolah dan tingkat literasi masyarakat. Program-program akan difokuskan pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana prasarana yang memadai, pengembangan kurikulum yang relevan, serta peningkatan literasi dan numerasi masyarakat.

Sasaran 3.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan setiap warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, tanpa memandang status sosial atau lokasi geografis. Berdasarkan data usia harapan hidup (UHH), meskipun menunjukkan tren positif dari 66,23 tahun di 2020 menjadi 67,04 tahun 2024, masih menghadapi beberapa tantangan terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat. Tantangan tersebut meliputi masih tingginya angka kematian Ibu dan Bayi, tingginya

angka stunting dan gizi buruk anak, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan. Sasaran ini akan mengatasi permasalahan inti derajat kesehatan masyarakat yang rendah, termasuk kualitas kesehatan keluarga yang rendah dan belum terwujudnya keluarga berkualitas. Upaya akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan primer, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan gizi masyarakat, serta penguatan sistem rujukan.

Sasaran 3.1.3 Meningkatnya Standar Kehidupan Layak

Sasaran ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penurunan kemiskinan menjadi 10,14 persen pada tahun 2024 merupakan capaian positif, namun pengeluaran per kapita daerah masih tergolong rendah hanya 10,696 ribu jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional yang sudah mencapai angka 11.621 ribu dan 12.341 ribu. Sasaran ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan inti kualitas hidup masyarakat yang masih rendah, termasuk kesejahteraan sosial yang belum inklusif, kesempatan dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, serta peran pemuda dalam pembangunan yang belum optimal. Strategi akan mencakup pengentasan kemiskinan ekstrem yang terfokus, peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, pengembangan UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pemberdayaan pemuda dalam berbagai sektor pembangunan.

Sasaran 3.1.4 Meningkatnya Kualitas Hidup Antargender

Sasaran ini menegaskan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi semua, tanpa memandang gender, serta memastikan perlindungan optimal bagi anak-anak. Hal ini penting mengingat masih adanya kesenjangan pembangunan manusia antar gender dan rendahnya kesetaraan gender serta perlindungan anak. Meskipun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 88,09 tahun 2024 namun angka ini masih di bawah angka IPG Provinsi dan Nasional. . Selaian Pembangunan

Gender, ketimpangan Gender memberikan gambaran tentang seberapa besar ketidaksetaraan gender mempengaruhi pencapaian pembangunan secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai IKG, semakin besar kesenjangan antara pencapaian laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, yang pada akhirnya menghambat pembangunan yang optimal. Upaya akan difokuskan pada pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program daerah, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan lembaga perlindungan anak.

Tujuan 3.2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berdaya Saing

Tanjung Jabung Timur dalam tata kelola pemerintahan memiliki tujuan yakni Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan berdaya saing. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempatkan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkualitas. Tujuan utama dari tata kelola pemerintahan di daerah ini adalah menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan berdaya saing, yang mampu menjawab tantangan zaman serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Tata kelola yang efektif berarti seluruh proses administrasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga menghasilkan pelayanan publik yang prima dan berdampak positif bagi kesejahteraan warga.

Selain itu, daya saing dalam tata kelola pemerintahan menjadi kunci penting agar Kabupaten Tanjung Jabung Timur mampu bersaing secara regional maupun nasional dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga teknologi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, inovasi kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi guna memperkuat tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Dengan demikian, tercipta lingkungan pemerintahan yang tidak hanya mampu mengelola sumber daya secara

optimal, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat posisi strategis daerah di tingkat yang lebih luas.

Sasaran 3.2.1 Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, Profesional, dan Akuntabel

Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi berbasis digital menjadi prioritas utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan terintegrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Infrastruktur digital yang handal dan modern tidak hanya mempercepat akses layanan, tetapi juga memungkinkan integrasi yang mulus dengan aplikasi di tingkat provinsi maupun nasional, sehingga menciptakan ekosistem pelayanan yang efisien, transparan, dan responsif. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan barang milik daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah, yang pada akhirnya mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel. Keamanan data dan informasi pada sistem pemerintahan berbasis elektronik juga menjadi fokus utama, guna melindungi integritas dan kerahasiaan data dari berbagai ancaman siber, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah dapat terus terjaga dan meningkat.

Selain penguatan infrastruktur dan keamanan, peningkatan kualitas dokumen perencanaan melalui pendekatan cascading dan cross cutting dengan indikator kinerja yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) menjadi landasan penting dalam memastikan perencanaan yang terarah dan terukur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berkomitmen untuk memperluas kerja sama dan kolaborasi dengan perguruan tinggi serta lembaga kompeten lainnya, guna meningkatkan kualitas laporan, layanan, hasil riset, serta kapasitas sumber daya manusia. Sinergi ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan kerja sama

pengawasan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta aparat penegak hukum menjadi bagian integral dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Tidak kalah penting, kolaborasi dengan pihak swasta juga terus ditingkatkan untuk mendukung peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan mandiri.

Sasaran 3.2.2 Meningkatnya Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman, dan Harmonis

Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), Organisasi Masyarakat (Ormas), dan masyarakat umum dalam penanggulangan bencana menjadi pondasi utama dalam membangun ketahanan dan kesiapsiagaan daerah. Melalui pelatihan intensif, pembinaan berkelanjutan, serta forum-forum penanggulangan bencana dan konflik, kapasitas seluruh elemen masyarakat diperkuat agar mampu merespons secara cepat dan tepat terhadap berbagai ancaman bencana dan potensi konflik sosial. Pendidikan tentang keberagaman dan toleransi juga diberikan sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat, guna menumbuhkan sikap saling menghargai dan menjaga kerukunan antarwarga. Selain itu, pemetaan potensi konflik dan pemantauan secara aktif dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan, disertai fasilitasi penanganan konflik sosial yang efektif dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen kebencanaan di tingkat desa menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan dan respons lokal yang terstruktur dan terintegrasi.

Kerja sama lintas sektor menjadi pilar penting dalam penanggulangan bencana dan pengelolaan ketertiban umum. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjalin sinergi erat dengan TNI, POLRI, serta pihak swasta dalam rangka meningkatkan kesiagaan, pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk pemasangan rambu evakuasi di daerah rawan bencana, menjadi prioritas untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana. Upaya ini tidak hanya

meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga memperkuat koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terlibat, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik.

Selain aspek penanggulangan bencana, penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya juga menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas daerah. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) secara konsisten mendukung terciptanya tata kelola yang tertib dan berkeadilan. Koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat, terus ditingkatkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah tindak kriminal. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen membangun lingkungan yang aman, harmonis, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan sosial dan bencana.

Sasaran 3.2.3 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Meningkatkan kualitas, integritas, dan komitmen dalam efektivitas pelayanan publik, baik yang berbasis digital maupun non-digital, merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan pelayanan yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya mengedepankan kecepatan dan kemudahan akses, tetapi juga menuntut adanya integritas tinggi dari seluruh pelaksana layanan agar setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pemerintahan menjadi kunci utama dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan peningkatan pelayanan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari setiap inovasi dan perbaikan yang dilakukan.

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan publik di seluruh sektor menjadi prioritas strategis yang tidak kalah penting. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan yang berkelanjutan, ASN dan tenaga pelayanan publik lainnya dipersiapkan untuk menghadapi tantangan pelayanan yang semakin kompleks dan dinamis, terutama di era

digitalisasi saat ini. Kompetensi yang meningkat akan memperkuat kemampuan mereka dalam memberikan layanan yang responsif, ramah, dan profesional, sekaligus mampu mengelola teknologi informasi dengan baik untuk mendukung proses pelayanan. Dengan demikian, peningkatan kompetensi SDM tidak hanya berdampak pada kualitas layanan, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Selain itu, peningkatan kerja sama dengan badan cyber nasional menjadi langkah strategis dalam menjaga keamanan aplikasi layanan publik yang semakin berkembang dan terintegrasi. Keamanan siber merupakan aspek krusial yang harus dijaga agar data dan informasi masyarakat terlindungi dari ancaman siber yang dapat merusak sistem dan menurunkan kepercayaan publik. Melalui kolaborasi yang erat dengan badan keamanan siber nasional, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat mengadopsi standar keamanan terbaik, melakukan pemantauan dan mitigasi risiko secara proaktif, serta meningkatkan kapasitas teknis dalam menghadapi berbagai ancaman digital. Sinergi ini akan memperkuat fondasi pelayanan publik digital yang aman, andal, dan berkelanjutan

Dalam rangka mencapai visi "Membangun Bersama Rakyat Sejahtera dan Bahagia" yang diusung dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2025–2029, pembangunan daerah dirancang secara strategis, terarah, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat serta potensi unggulan wilayah. Untuk mengarahkan program dan kegiatan pembangunan secara lebih terukur, sistematis, dan tepat sasaran, maka setiap kata kunci dalam visi dijabarkan ke dalam pemetaan sasaran daerah. Pemetaan ini menjadi landasan dalam penyusunan indikator kinerja utama (IKU) serta penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Proses ini penting untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki panduan yang konsisten dan terintegrasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Pemetaan sasaran ini juga bertujuan menyelaraskan rencana pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan RPJMD

Provinsi Jambi dan RPJMN 2025–2029, sehingga kontribusi pembangunan daerah dapat memperkuat pencapaian target pembangunan nasional, khususnya dalam hal pemerataan kesejahteraan, pembangunan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas layanan publik di daerah. Adapun kata-kata kunci dalam visi “MERATA” serta pemetaan sasaranannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5

Keterkaitan Kata Kunci dalam Visi dengan Sasaran Daerah RPJMD Kabupaten Tanjung Tabung Timur Tahun 2025-2029

Kata Kunci Visi	Sasaran Daerah	Indikator
Membangun	Terwujudnya aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah yang berkualitas	Indeks Konektivitas
	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Luas Kawasan kumuh (Ha)
	Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan
	Meningkatnya pertumbuhan sektor tersier	Distribusi PDRB Sektor Tersier
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik
	Meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel	Nilai SAKIP
		Indeks Pemerintahan Digital/SPBE
		Indeks Reformasi Hukum
		Indeks inovasi daerah
Bersama Rakyat	Meningkatnya kondisi daerah yang aman, nyaman, dan harmonis	Persentase Penegakan Perda/Perkada
		Indeks Kerukunan Umat Beragama
		Indeks risiko bencana
Sejahtera	Terwujudnya daya saing sektor pertanian dan perikanan	Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB
	Meningkatnya standar kehidupan layak	Angka Kemiskinan
		Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	Rata-rata Lama Sekolah
		Harapan Lama Sekolah
Bahagia	Meningkatnya kondisi daerah yang aman, nyaman, dan harmonis	
	Meningkatnya kualitas hidup antargender	Indeks Ketimpangan Gender
	Meningkatnya kualitas lingkungan	IKLH

	hidup	

Target Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai acuan utama dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Setiap tujuan mencerminkan arah strategis pembangunan daerah, sementara sasarannya dirumuskan secara terukur untuk memastikan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Target ini juga menjadi instrumen penting dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang. Target Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1: Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah		Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	2,91	2,95	2,99	3,03	3,07	3,11	
		Terwujudnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antarwilayah yang berkualitas	Indeks Konektivitas	30,90	30,90	31,00	31,00	31,09	31,09	
		Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berkualitas	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	105,20	101,20	97,20	94,20	91,20	88,20	
Misi 2: Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,97	5,53	6,22	6,80	7,00	7,20	
			Indeks Gini	0,31-0,315	0,31-0,314	0,31-0,313	0,31-0,312	0,300-0,305	0,300-0,305	
		Terwujudnya daya saing sektor pertanian dan perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	24,48	24,79	25,11	25,42	25,74	26,05	
		Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	8,37	8,68	9,00	9,31	9,63	9,94	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya pertumbuhan sektor Tersier	Distribusi Pertumbuhan sektor Tersier	25,65	25,67	25,69	25,71	25,73	25,75	
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,28	73,30	73,33	73,36	73,38	73,41	
		Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,28	73,30	73,33	73,36	73,38	73,41	
Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan Kredibel	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang unggul dan berdaya saing		IPM	70,94	71,11	71,28	71,44	71,61	71,78	
		Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas	Rata- rata lama sekolah	7,82	7,95	8,07	8,19	8,32	8,44	
			Harapan Lama Sekolah	12,29	12,37	12,46	12,54	12,62	12,7	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	67,54	67,82	68,11	68,39	68,67	68,95	
		Meningkatnya Standar Kehidupan Layak	Angka Kemiskinan	9,88	7,44-8,08	5,94-6,60	4,43-5,12	2,93-3,73	2,93-3,73	
			Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	24.090	24.809	25.528	26.247	26.966	27.685	
		Meningkatnya Kualitas Hidup antargender	Indeks Pembangunan Gender	89,92	90,34	90,76	91,18	91,6	92,02	
	terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdaya		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	BB	BB	
		meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif,	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	A	
			Indeks Pemerintahan	2,83	2,85	2,87	2,90	2,92	2,96	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	saing	profesional, dan akuntabel	Digital/ SPBE							
			Indeks Reformasi Hukum	87,05	87,64	88,23	88,82	89,41	90	
			Indeks Inovasi Daerah	46,86	47,62	48,38	49,14	49,90	50,66	
		Meningkatnya kondisi daerah yang aman, nyaman, dan harmonis	Angka Kriminalitas	156,0	151,9	147,9	143,9	139,8	135,8	
			Indek Kerukunan Umat Beragama	71,64	71,78	71,92	72,06	72,2	72,34	
			Indeks Resiko Bencana	152,24	151,18	150,11	149,05	147,98	131,46	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,39	3,51	3,64	3,76	3,88	4	

3.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

3.4.1 Strategi

Terdapat beberapa strategi dari masing-masing Misi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029, yang dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antarwilayah

Misi pertama menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur dasar sebagai langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Misi ini diarahkan untuk menciptakan keterpaduan wilayah melalui penyediaan infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan guna mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Dengan terwujudnya konektivitas yang lebih baik, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi pembangunan, pemerataan akses antar daerah, serta penguatan integrasi wilayah sebagai fondasi menuju pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing. Misi ini juga mendasari pencapaian tujuan pembangunan lainnya, karena infrastruktur yang memadai akan mempercepat transformasi wilayah, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis keunggulan lokal dan keterjangkauan layanan publik.

Tabel 3.7
Strategi Pembangunan Misi 1

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 1 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antarwilayah		
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	Terwujudnya Aksesibilitas dan Konektivitas	Penguatan Investasi Infrastruktur melalui Integrasi Tata Ruang dan

	Antarwilayah yang berkualitas	Skema Pembiayaan Alternatif Akselerasi Konektivitas Wilayah dan Aksesibilitas Ekonomi Pengembangan Infrastruktur Perairan dan Pelabuhan Sungai sebagai Jalur Logistik Strategis Pembangunan kemitraan kelembagaan antara pemerintah, BUMN/BUMD, LSM, dan sektor swasta untuk memperkuat pembiayaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur
	Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berkualitas	Penataan Permukiman Layak dan Pemenuhan Layanan Dasar Terintegrasi

Dalam rangka mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan selaras dengan visi serta misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, strategi peningkatan kualitas infrastruktur akan difokuskan pada beberapa aspek prioritas berdasarkan hasil analisis strategi.

Tujuan 1.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah

Sasaran 1.1.1 Terwujudnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antarwilayah yang Berkualitas, sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Penguatan investasi infrastruktur melalui integrasi tata ruang dan skema pembiayaan alternatif

Strategi ini bertujuan memperkuat investasi infrastruktur dengan menyelaraskan perencanaan tata ruang dan memanfaatkan skema pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Penerapan strategi ini dilaksanakan dengan cara: (a) Mendorong minat investor untuk berinvestasi dalam infrastruktur dengan kebijakan insentif yang kompetitif baik fiskal maupun non-fiskal yang memberikan keuntungan bagi investor yang mau mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; (b) Melakukan penyelarasan tata ruang sebagai dasar

kepastian investasi dengan menyediakan peta digital RDTR tematik yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk menunjukkan zona investasi prioritas infrastruktur; (c) Melakukan branding Tanjung Jabung Timur sebagai daerah siap investasi infrastruktur dengan tata ruang yang siap, akses baik, dan SDM teknis yang terampil; (d) Kolaborasi dengan provinsi untuk memastikan proyek infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap prioritas pembangunan jangka panjang, bukan terpinggirkan oleh isu bencana yang berasal dari daerah lain; (e) Lobby dan advokasi ke pemerintah pusat dan provinsi agar program strategis tetap memperhatikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; (f) Sinkronisasi RTRW dan RDTR dengan masterplan Ujung Jabung dan Kawasan Swasembada Pangan, serta integrasi program pembangunan tiga juta rumah untuk pengentasan kawasan kumuh secara terpadu.

2) Akselerasi konektivitas wilayah dan aksesibilitas ekonomi

Strategi ini bertujuan mempercepat konektivitas dan aksesibilitas ekonomi melalui pembangunan dan penguatan jaringan transportasi yang terintegrasi, berkelanjutan serta mendukung distribusi logistik dan pertumbuhan kawasan strategis. Penerapan strategi ini dilaksanakan dengan cara: (a) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan menuju kawasan industri melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan perkebunan dan sektor industri pengolahan sawit dan kelapa; (b) Mendorong infrastruktur jalan sebagai penunjang pengelolaan Kawasan Strategis Nasional; (c) Mendorong infrastruktur jalan untuk kelancaran transportasi massal dengan menentukan ruas jalan yang menjadi prioritas pengembangan dan pemeliharaan; (d) Mendorong peningkatan jalan kabupaten untuk menunjang pengembangan kawasan sentral pangan dan kawasan industri dengan mengusulkan ruas jalan prioritas agar dibiayai lewat program pemerintah pusat dan program angkutan perintis; (e) Membangun koordinasi lintas sektor agar integrasi jaringan jalan

nasional-provinsi-kabupaten-desa tidak tumpang tindih (meliputi batas tonase, fungsi jalan, dan status aset); (f) Prioritaskan pemeliharaan dan peningkatan jalan penghubung antarkecamatan dengan pendekatan padat karya, dana desa, CSR dan DAK fisik; (g) Mendorong regulasi teknis seperti Peraturan Bupati kelas jalan, tonase dan operasionalisasi jalan untuk membatasi kerusakan dari kendaraan berat; (h) Pemanfaatan jalur sungai sebagai transportasi logistik dan mobilisasi material bangunan serta komoditas unggulan.

3) Pengembangan infrastruktur perairan dan pelabuhan sungai sebagai jalur logistik strategis

Strategi ini bertujuan meningkatkan efisiensi logistik dan konektivitas wilayah melalui pengembangan infrastruktur perairan dan pelabuhan sungai sebagai jalur distribusi barang, material, dan komoditas unggulan secara berkelanjutan. Strategi ini diterapkan melalui: (a) Membangun kolaborasi bersama Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) dan pemerintah provinsi untuk meningkatkan jalur ekonomi sungai melalui dermaga/halte sungai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai bagian dari pengembangan pelabuhan sungai dan distribusi logistik murah; (b) Pengembangan dermaga multifungsi untuk daerah pesisir dengan dukungan dari program angkutan perintis; (c) Penguatan fungsi pelabuhan melalui revitalisasi fisik dan perbaikan sistem logistik untuk menjamin daya saing komoditas (kelapa dan sawit); (d) Peningkatan Kualitas dan kuantitas dermaga melalui kerja sama Kementerian Perhubungan dan penguatan peran Dinas Perhubungan untuk mengajukan Program Perintis; (e) Optimalisasi peran dermaga untuk pengangkutan material; (f) Kolaborasi multipihak dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk optimalisasi pelabuhan dan jalur sungai sebagai simpul logistik, didukung konektivitas jalan dan transportasi perintis dengan melakukan peremajaan dan pemeliharaan jalan strategis kabupaten untuk menunjang konektivitas antar kawasan.

- 4) Pembangunan kemitraan kelembagaan antara pemerintah, BUMN/ BUMD, LSM, dan sektor swasta untuk memperkuat pembiayaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur

Strategi ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas kelembagaan guna mengoptimalkan pembiayaan, efisiensi pelaksanaan, dan keberlanjutan proyek infrastruktur melalui sinergi antara pemerintah, BUMN/ BUMD, LSM, dan sektor swasta. Penerapan strategi ini dilakukan melalui: (a) Membangun kemitraan dengan BUMN/ BUMD, LSM, dan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur prioritas dengan optimalisasi skema pendanaan alternatif seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha); (b) Pelatihan dan upskilling Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi Teknis Perhubungan melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga; (c) Kampanye keselamatan berlalu lintas dan edukasi transportasi publik guna menunjang Kawasan Strategis Ujung Jabung dan Berbak-Sembilang; (d) Menggunakan skema pendanaan alternatif (CSR, KPBU, dana filantropi, dan bantuan provinsi) untuk mempercepat pembangunan tanpa harus selalu bergantung pada proyek strategis nasional dari pemerintah pusat; (e) Mendorong pembiayaan alternatif seperti KPBU, dana CSR, kerja sama NGO/donor, program Kemendes/DAK Tematik Untuk proyek perumahan, jalan, air bersih, dan sanitasi.

Sasaran 1.1.2 Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas, sasaran ini memiliki strategi dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Penataan permukiman layak dan pemenuhan layanan dasar terintegrasi
Strategi ini mengintegrasikan penataan permukiman layak dengan penyediaan air bersih, sanitasi, dan perumahan adaptif, melalui kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan dokumen perencanaan, dan skema pembiayaan inovatif. Penerapan strategi ini dilakukan dengan cara: (a) Sinkronisasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk optimalisasi program Bantuan Rumah Layak Huni dengan

memanfaatkan dokumen perencanaan (SSK dan RP2KPKPK) sebagai dasar teknis dan argumentatif pengajuan; (b) Meningkatkan kualitas permukiman kumuh menjadi rumah layak huni melalui penyediaan sanitasi aman dan akses terhadap air minum aman dengan memanfaatkan proyek strategis nasional tiga juta rumah; (c) Mendorong pelaku usaha untuk membangun infrastruktur dasar permukiman melalui CSR di sekitar areal operasional mereka; (d) Penyediaan infrastruktur air bersih dan pengelolaan limbah terdesentralisasi di kawasan pertanian atau komunitas unggulan; (e) Pembangunan infrastruktur adaptif (tanggul, dermaga apung) untuk memitigasi abrasi dan rob; (f) Penataan kawasan permukiman pesisir dengan skema resilient settlement berbasis tata ruang adaptif dan SSK; (g) Menyusun proposal infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi dan permukiman) untuk lahan siap bangun dengan mengacu pada dokumen masterplan dan RP2KPKPK; (h) Mengembangkan proposal lintas sektor berbasis tematik (kemiskinan, stunting, perumahan dan iklim) untuk mendapatkan keistimewaan pembiayaan lintas kementerian; (i) Membangun sistem perencanaan berbasis mitigasi iklim dan ekoregion melalui zonasi tata ruang adaptif (RTRW dan RDTR revisi khusus kawasan rawan); (j) Implementasi program rumah tahan banjir dan abrasi di wilayah pesisir dengan pendekatan klaster dan berbasis partisipasi; (k) Kolaborasi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Organisasi Non-Pemerintah (NGO) lingkungan untuk program restorasi gambut dan penguatan infrastruktur hijau (green infrastructure); (l) Melakukan kampanye edukatif tentang pentingnya sanitasi, air minum aman, dan tata kelola lingkungan berkolaborasi dengan PKK, Karang Taruna, dan sekolah.

Misi 2 Memperkokoh struktur Ekonomi Daerah, serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber daya Alam yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Strategi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran dari pemerintah daerah. Terdapat 3 strategi utama yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di antaranya 1) Strategi sasaran 1 terwujudnya daya saing sektor pertanian dan perikanan 2) Strategi Sasaran 2 Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah dan 3) Strategi Sasaran 3 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Pariwisata. Untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup akan difokuskan pada sejumlah aspek prioritas yang telah diidentifikasi melalui analisis strategis.

Tabel 3.8
Strategi Pembangunan Misi 2

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 2 Memperkokoh struktur Ekonomi Daerah, serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan		
Mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan	Terwujudnya daya saing sektor pertanian dan perikanan	▪ Mendorong pembangunan pertanian dan perikanan dengan penguatan kebijakan dan komitmen multi pihak untuk menjaga stabilitas harga yang mendukung swasembada dan ketersediaan pangan disektor perikanan dan pertanian ▪ Mewujudkan ketahanan pangan sektor pertanian dan perikanan melalui komitmen bersama, penerapan teknologi, penguatan SDM dan kelembagaan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan ▪ Mendorong daya saing sektor pertanian dan perikanan dengan mengintegrasikan sektor hulu dan hilir, melalui koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta. ▪ Memperkuat daya saing sektor pertanian dan perikanan dengan mengintegrasikan sektor hulu dan hilir yang selaras dengan kebijakan ekonomi dalam negeri

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
		▪ Mengoptimalkan potensi sumber daya alam daerah dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi biru dan ekonomi hijau serta memperkuat keamanan dan pemanfaatan pangan yang searah dengan kebijakan ekonomi domestik
	Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah	▪ Mengembangkan sektor industri pertanian dan perikanan melalui penguatan regulasi yang mendukung kerjasama dan iklim investasi yang kondusif. ▪ Peningkatan sektor industri pertanian dan perikanan serta penguatan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. ▪ Memperkuat kolaborasi skema KPBU dan kemitraan strategis daerah untuk mempercepat pembangunan industri, memanfaatkan produk unggulan daerah untuk menarik investor, serta memperluas akses pasar guna mempercepat kemajuan daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. ▪ Membangun kolaborasi antar stakeholder untuk meningkatkan daya saing produk unggulan dan perluasan akses pasar yang mendukung pembangunan industri daerah. ▪ Mendorong pertumbuhan industri daerah yang inklusif melalui kolaborasi antar sektor, dan peningkatan kualitas produk unggulan.
	Meningkatnya pertumbuhan sektor tersier	▪ Meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan destinasi wisata yang menarik serta peningkatan kualitas dan kuantitas event ekonomi kreatif untuk mewujudkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor pariwisata ▪ Mengembangkan pariwisata berkelanjutan berbasis konservasi ekologi dan budaya lokal, memperkuat peran masyarakat dan UMKM, serta menjaga identitas dan kelestarian lingkungan ▪ Meningkatkan efektivitas kelembagaan pariwisata dan UMKM melalui peningkatan kualitas produk dan optimalisasi pengelolaan kepariwisataan ▪ Meningkatkan sektor kepariwisataan berazaskan identitas budaya lokal dan perdagangan berbasis dukungan teknologi informatika (TI) ▪ Mewujudkan pariwisata sebagai pilar utama

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
		ekonomi daerah dan PAD. ▪ Meningkatkan Kebijakan yang mendukung pengembangan sektor jasa, seperti insentif investasi dan pengembangan infrastruktur, dapat mendorong pertumbuhan sektor tersier
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	▪ Pengembangan sistem pengelolaan Persampahan Tepat Guna dan Berkelanjutan ▪ Mendorong Konservasi dan Penguatan Ekosistem Kawasan Strategis ▪ Penguatan Tata Kelola, kemitraan/kerja sama dan Penegakan Hukum Lingkungan ▪ Peningkatan Teknologi dan kajian Lingkungan untuk mendorong kebijakan lingkungan berbasis bukti

Dalam rangka mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan selaras dengan visi serta misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, strategi peningkatan kualitas ekonomi akan difokuskan pada beberapa aspek prioritas berdasarkan hasil analisis strategi sesuai sasaran dari program kerja ekonomi di sektor primer, sekunder dan tersier.

Tujuan 2.1 Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Konsep kesejahteraan ekonomi yang berdaya saing menekankan pada kemampuan suatu negara atau daerah untuk memproduksi barang dan jasa yang mampu bersaing di pasar global, namun tetap meningkatkan standar hidup penduduknya. Daya saing yang tinggi mendorong efisiensi, inovasi, dan produktivitas, yang pada akhirnya memperbesar peluang kerja dan pendapatan masyarakat. Sementara itu, keberlanjutan ekonomi adalah tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan, merugikan kelompok rentan, atau menciptakan ketimpangan sosial yang tinggi. Dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dalam kebijakan ekonomi, negara dapat mencegah krisis ekonomi, sosial, maupun ekologi di masa depan.

Sasaran 2.1.1 Terwujudnya Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan,

sasaran ini memiliki strategi dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut ini:
Meningkatkan komitmen bersama untuk mendukung swasembada pangan di sektor pertanian dan perikanan
- 2) Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan untuk menjadikan Provinsi Jambi sebagai lumbung pangan nasional
- 3) Mengembangkan Sumber Daya Alam Daerah untuk mendukung kebijakan ekonomi biru dan ekonomi hijau
- 4) Meningkatkan pembangunan pertanian dan perikanan melalui dukungan kebijakan pemerintah pusat
- 5) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan
- 6) Meningkatkan peran kelembagaan pertanian dan perikanan untuk mendukung gerakan pasar yang kompetitif dan bersaing
- 7) Meningkatkan nilai tambah ekonomi sektor kelautan untuk mendukung swasembada pangan
- 8) Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui adopsi teknologi terkini dan inovatif sesuai kondisi alam
- 9) Menjaga kelestarian laut dan keanekaragaman hayati untuk mendukung ekonomi biru
- 10) Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat untuk mendukung konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan seimbang
- 11) Meningkatkan kapasitas SDM penyuluh pertanian dan perikanan untuk mendukung gerakan pasar yang kompetitif dan bersaing
- 12) Menjaga stabilitas harga pasar di sektor pertanian dan perikanan
- 13) Mengoptimalkan wewenang pemerintah kabupaten untuk mendukung produksi pertanian dan perikanan
- 14) Mengoptimalkan kebijakan ekonomi dalam negeri untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan

- 15) Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dan perikanan melalui dukungan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat
- 16) Meningkatkan dukungan rumah tangga masyarakat yang gemar mengkonsumsi hasil pertanian dan perikanan
- 17) Meningkatkan SDM masyarakat yang terampil memanfaatkan potensi ekonomi kelautan dan menjaga stabilitas harga pasar
- 18) Memanfaatkan wewenang pemerintah kabupaten untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya
- 19) Mengoptimalkan wewenang pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian laut dan keanekaragaman hayati
- 20) Meningkatkan pengendalian bencana pertanian untuk mendukung konsumsi hasil pertanian daerah
- 21) Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian dan perikanan untuk membantu proses pemasaran produksi pertanian dan perikanan.

Sasaran 2.1.2 Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran ini maka langkah-langkah strategi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produksi produk -produk industri pertanian dan perikanan melalui skema KPBU dan kemitraan strategis daerah
- 2) Mengembangkan sektor industri kecil dan menengah melalui kolaborasi sektor swasta, BUMDes, koperasi maupun investor luar negeri
- 3) Meningkatkan produk-produk lokal berkualitas dengan jaminan mutu pangan untuk menjangkau pasar online
- 4) Meningkatkan kemudahan berinvestasi guna mendorong masuknya investasi
- 5) Mengembangkan kolaborasi skema KPBU dan kemitraan strategis daerah untuk meningkatkan realisasi pembangunan industri
- 6) Meningkatkan pemanfaatan sistem OSS dan kemudahan perizinan guna mendorong realisasi izin pelaku usaha industri

- 7) Pemanfaatan konsep pembangunan inklusif berbasis daerah untuk menarik investor
- 8) Mengembangkan kolaborasi sektor swasta, BUMDes, koperasi atau investor untuk meningkatkan efektivitas kerja sama penanaman modal
- 9) Pemanfaatan produk-produk unggulan daerah untuk bersaing menarik investor luar
- 10) Pemanfaatan dukungan stakeholder untuk meminimalisir risiko kegagalan kerja sama
- 11) Pemanfaatan dukungan regulasi dan kebijakan daerah untuk mengatasi ketidakpastian hukum atau perubahan kebijakan yang berdampak pada kelangsungan kerja sama
- 12) Pemanfaatan ketersediaan akses pasar regional, nasional, dan internasional untuk mengejar ketertinggalan daerah dalam menarik investor
- 13) Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah untuk bersaing dalam pembangunan industri daerah
- 14) Menjamin regulasi dan kebijakan yang aman bagi para investor
- 15) Mengembangkan iklim investasi yang kondusif
- 16) Mendorong kerja sama partisipatif untuk menjangkau akses pasar regional, nasional maupun internasional.

Strategi Sasaran 2.1.3 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut maka langkah-langkah strategi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan potensi dan daya tarik pariwisata berbasis konservasi ekologi dan warisan budaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- 2) Memperluas lapangan pekerjaan pada sektor pariwisata melalui kelompok sadar wisata

- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui pemasaran pariwisata berbasis digital
- 4) Meningkatkan pembangunan pariwisata daerah melalui peningkatan kesadaran apresiasi masyarakat
- 5) Meningkatkan PAD guna pemenuhan sarana dan prasarana pada destinasi pariwisata lokal
- 6) Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap objek pariwisata lokal
- 7) Mengoptimalkan peran pelaku usaha/UMKM dalam mendukung pariwisata melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal
- 8) Meningkatkan SDM pelaku wisata melalui penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata
- 9) Mengembangkan potensi dan daya tarik pariwisata untuk mengatasi ketergantungan ekonomi terhadap fluktuasi ekonomi global
- 10) Pemanfaatan regulasi nomor 11 tahun 2017 tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah untuk mengatasi ancaman politik luar negeri bebas aktif, geopolitik dan geoekonomi internasional, serta pengaruh budaya luar yang dapat mengancam stabilitas, kemandirian, dan identitas daerah
- 11) Peningkatan dukungan pemerintah dalam penyediaan platform digital untuk memperkuat identitas budaya lokal
- 12) Meningkatkan kelompok sadar wisata untuk mencegah kerusakan lingkungan seperti polusi, erosi dan kerusakan habitat
- 13) Mengembangkan sektor perdagangan dan pariwisata unggulan daerah untuk mengatasi ketergantungan ekonomi dan terbatasnya sarana dan prasarana destinasi pariwisata
- 14) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman politik luar negeri bebas aktif, geopolitik dan geoekonomi internasional, serta pengaruh budaya luar yang dapat mengancam stabilitas, kemandirian, dan identitas daerah

- 15) Meningkatkan SDM pelaku wisata dalam membangun identitas budaya lokal.
- 16) Meningkatkan Kebijakan yang mendukung pengembangan sektor jasa, seperti insentif investasi dan pengembangan infrastruktur, dapat mendorong pertumbuhan sektor tersier

Tujuan 2.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 2.2.1 Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan, sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sistem pengelolaan persampahan tepat guna dan berkelanjutan
Strategi ini bertujuan mengembangkan sistem persampahan yang efisien, berbasis teknologi tepat guna, mendukung daur ulang, dan berkelanjutan guna mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan kualitas layanan publik. Penerapan strategi ini dilakukan dengan cara: (a) Menyusun kebijakan pengurangan timbulan sampah guna menekan biaya pengelolaan sampah; (b) Meningkatkan efektivitas pengelolaan persampahan melalui integrasi perda persampahan dengan program nasional Kampung Iklim; (c) Meningkatkan kapasitas dan distribusi TPS3R dengan dukungan pendanaan dari DAK dan insentif fiskal lingkungan, agar sistem pengumpulan dan pemrosesan sampah dapat menjangkau wilayah yang lebih luas; (d) Membuat Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) daerah pesisir; (e) Mendorong keterlibatan masyarakat dan komunitas bisnis pengelolaan sampah secara sistematis dalam upaya pengurangan timbulan sampah; (f) Meningkatkan sarana prasarana persampahan dan peremajaan sarana prasarana yang sudah tidak layak pakai; (g) Menyusun perencanaan pembangunan kawasan TPA yang baru.
- 2) Mendorong konservasi dan penguatan ekosistem kawasan strategis

Strategi ini bertujuan mendorong pelestarian lingkungan melalui konservasi dan penguatan ekosistem di kawasan strategis guna menjaga keseimbangan ekologis dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun strategi yang diterapkan untuk dilakukan adalah: (a) Memperkuat kolaborasi antar sektor dalam konservasi kawasan strategis dengan memanfaatkan tutupan lahan yang masih tinggi dan dukungan program restorasi gambut dari provinsi; (b) Memperluas pemanfaatan Peraturan Daerah Hutan Kota dengan dukungan pendanaan dari pusat, CSR dan pendanaan dari negara donor serta insentif fiskal lingkungan untuk mendukung perencanaan ruang hijau dan hutan kota sebagai bagian dari strategi penurunan emisi karbon; (c) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari rumah melalui pelibatan dalam program kemitraan seperti Sekolah Adiwiyata dan program Bank Sampah; (d) Meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengawasan kawasan pesisir dan mangrove dengan dukungan pelatihan, penyuluhan, serta insentif berbasis hasil konservasi dan restorasi; (e) Menerapkan kebijakan perkebunan sawit dengan tanaman lain (agroforestry sawit) bagi usaha kegiatan yang berskala besar.

3) Penguatan tata kelola, kemitraan/kerja sama dan penegakan hukum lingkungan

Strategi ini bertujuan memperkuat tata kelola lingkungan melalui kemitraan lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi lingkungan secara berkelanjutan. Adapun penerapan strategi ini dilakukan dengan cara: (a) Memperkuat sistem pengendalian pembangunan melalui penegakan hukum dan memaksimalkan peraturan daerah tata ruang berbasis KLHS dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, guna menekan alih fungsi lahan dan pembangunan ilegal; (b) Meningkatkan kinerja pengawasan batas wilayah kehutanan dan

batas wilayah pemerintah daerah kabupaten; (c) Membuat kebijakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang merugikan dan berdampak di luar pengawasan pemerintah daerah agar lebih ketat; (d) Memaksimalkan RTRW guna meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan; (e) Memberikan sanksi dan menutup usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin; (f) Meningkatkan pengawasan dan menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah disepakati; (g) Mengintegrasikan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) ke dalam program-program kemitraan seperti sekolah adiwiyata dan bank sampah, guna memperkuat orientasi pembangunan berkelanjutan; (h) Memperluas peran komunitas bisnis pengelolaan sampah melalui pemanfaatan teknologi deteksi kualitas udara dan air, serta mendorong inovasi pembiayaan berbasis energi terbarukan untuk mendukung transisi energi hijau; (i) Meningkatkan keamanan masyarakat terhadap serangan binatang buas di daerah pesisir melalui peran pemerintah daerah dan masyarakat.

4) Peningkatan teknologi dan kajian Lingkungan untuk mendorong kebijakan lingkungan berbasis bukti

Strategi ini berfokus pada peningkatan teknologi dan kajian lingkungan bertujuan untuk memperkuat dasar kebijakan lingkungan yang berbasis bukti (evidence-based policy) melalui pemanfaatan sistem pemantauan digital, teknologi sensor, dan database lingkungan yang terintegrasi. Langkah ini mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan responsif terhadap dinamika ekologi daerah, sekaligus mendorong pelaksanaan kajian lingkungan yang ilmiah dan sistematis dalam menilai daya dukung, risiko, dan kebutuhan intervensi kebijakan.

Adapun strategi ini dilakukan dengan cara: peningkatan status laboratorium lingkungan menjadi terakreditasi guna mendorong PAD. Dalam mendukung hal tersebut, peningkatan akreditasi laboratorium

lingkungan hidup daerah menjadi prioritas strategis guna menjamin kualitas dan validitas hasil uji lingkungan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengawasan dan penyusunan dokumen lingkungan yang sah dan terpercaya. Melalui strategi ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen mewujudkan tata kelola lingkungan yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan.

Misi 3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan Kredibel

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta tata kelola pemerintahan yang kredibel, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempatkan pengembangan kualitas SDM sebagai salah satu misi strategis utama. Upaya ini menjadi pondasi penting dalam meningkatkan kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas masyarakat yang secara langsung akan memperkuat daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional. Pada saat yang bersamaan, tata kelola pemerintahan yang kredibel merupakan elemen vital dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Dengan strategi yang terarah pada aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyempurnaan mekanisme pemerintahan, Tanjung Jabung Timur berkomitmen untuk membangun sistem pemerintahan yang mampu merespons tuntutan perubahan dan perkembangan zaman secara adaptif dan inovatif. Seluruh upaya ini dirancang tidak hanya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk menciptakan sinergi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. oleh karena itu penjelasan strategi pada masing-masing sasaran daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Strategi Pembangunan Misi 3

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan Kredibel dan Kondusif		
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang unggul dan berdaya saing	Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas	▪ Penguatan Pendidikan Karakter, membangun ketahanan sosial dan regulasi untuk mengatasi kekerasan, pernikahan anak, degradasi budaya, korupsi, dampak media sosial dan globalisasi di lingkungan pendidikan ▪ Penguatan dan Pemerataan layanan perpustakaan melalui optimalisasi perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan, mobil perpustakaan keliling dan aplikasi I-Pustakatanjabtim untuk meningkatkan layanan dan akses ke wilayah 3T. ▪ Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi masyarakat dengan penguatan peran orang tua dan perpustakaan serta peningkatan kapasitas guru mengenai pembelajaran kontekstual untuk numerasi melalui pelatihan permainan edukatif berbasis numerasi dan logika di kelas rendah PAUD sampai SD. (Dinas Pendidikan periode 1,3,5 Dinas Perpustakaan 5 periode) ▪ Penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program penuntasan wajib belajar untuk mengurangi angka putus sekolah melalui penguatan standar teknis pelayanan minimal pendidikan, penambahan lembaga pendidikan non-formal dan validitas data untuk bantuan beasiswa serta membangun kerjasama lintas sektor ▪ Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Guru melalui Penambahan, Pemerataan dan penguatan ((guru yang belum memiliki sertifikasi dan tidak linear kualifikasi) melalui Kolaborasi Multi-Sektor ▪ Membangun sistem insentif dan Penguatan edukasi dan promosi untuk peningkatan partisipasi dalam program PAUD.
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	▪ Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan melalui Digitalisasi Layanan, Efisiensi Rujukan dan Peningkatan Mutu Pelayanan ▪ Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi melalui sinergitas multi-stakeholder dan integrasi lintas program ▪ Membangun sistem insentif dan Penguatan

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
		edukasi dan promosi untuk peningkatan Kesadaran kesehatan Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal ▪ Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat berbasis potensi pangan lokal ▪ Penguatan dan Pemerataan SDM Kesehatan dengan penarikan, pengembangan, dan kesejahteraan SDM Kesehatan melalui Kolaborasi Multi-Sektor ▪ Pemerataan akses layanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional ▪ Penguatan Layanan Rujukan untuk penyakit degeneratif dan kronis
	Meningkatnya Standar Kehidupan Layak	▪ Optimalisasi Kelembagaan dan Kebijakan Daerah untuk Penghapusan Kemiskinan dengan sinergitas multisektor ▪ Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja dengan memastikan perlindungan pekerja, disertai peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan sektor unggulan. ▪ Penguatan Ekonomi Lokal dengan Mendorong pemberdayaan, penguatan kapasitas, dan kemandirian pemuda. ▪ Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan (Lansia, Disabilitas, dan ODGJ terlantar) yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan kemiskinan struktural. ▪ Pencegahan Kemiskinan Struktural Melalui Literasi Digital, Keuangan, dan Ekonomi
	Meningkatnya Kualitas Hidup antargender	▪ Penguatan implementasi regulasi dan kelembagaan Daerah untuk Perlindungan Perempuan dan Anak ▪ Percepatan Penyediaan dan Pemanfaatan Data Terpilah Gender untuk mendukung kebijakan responsif gender ▪ Edukasi Publik dan Pencegahan Kekerasan serta Pernikahan Anak dengan pelibatan multistakeholder ▪ Mengintegrasikan kebijakan penyediaan fasilitas publik yang ramah perempuan dengan kebijakan afirmatif guna memperkuat peran perempuan dalam ruang sosial dan ekonomi serta mengurangi diskriminasi gender. ▪ Mendorong representasi perempuan dalam birokrasi (ASN), politik, dan dunia kerja melalui kebijakan afirmatif, pelatihan, dan

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berdaya Saing	Meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel	pembukaan akses ekonomi yang berkeadilan gender ▪ Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi Informasi berbasis digital untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang prima yang terintegrasi dengan aplikasi provinsi dan/atau nasional ▪ Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan barang milik daerah ▪ Meningkatkan keamanan data dan Informasi pada sistem pemerintahan berbasis elektronik ▪ Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan melalui casecading dan crosscutting dengan indikator kinerja yang SMART ▪ Meningkatkan jumlah Kerjasama/kolaborasi dengan perguruan tinggi dan/atau Lembaga yang berkompeten dalam peningkatan kualitas laporan, layanan dan hasil riset serta peningkatan kapasitas SDM ▪ Meningkatkan Kerjasama pengawasan dengan BPKP dan aparat penegak hukum ▪ Melakukan Kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan penerimaan PAD
	Meningkatnya kondisi daerah yang aman, nyaman, dan harmonis	▪ Melakukan peningkatan kompetensi ASN, Ormas, dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pelatihan, pembinaan, dan forum penanggulangan bencana dan konflik ▪ Memberikan Pendidikan tentang keberagaman dan toleransi kepada seluruh lapisan Masyarakat sejak dini ▪ Melakukan pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial ▪ Menyusun dokumen kebencanaan di Tingkat desa ▪ Bekerjasama dengan TNI, POLRI pihak swasta untuk penanggulangan, kesiagaan dan pengadaan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana dan kebakaran ▪ Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menanggulangi bahaya kebakaran dan bencana serta pemasangan rambu evakuasi di daerah rawan bencana ▪ Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan penegakan PERDA dan PERKADA ▪ Meningkatkan koordinasi dengan berbagai

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
		pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat serta pencegahan tindak kriminal
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	▪ Meningkatkan kulaitas , integritas, dan komitmen dalam efektivitas pelayanan publik digital/non digital secara prima ▪ Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelayanan publik di seluruh sektor ▪ Meningkatkan Kerjasama dengan badan cyber nasional untuk keamanan aplikasi layanan publik

Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan Kredibel serta selaras dengan visi serta misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, strategi peningkatan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing, sementara dalam bidang tata kelola pemerintahan akan difokuskan pada tata kelola pemerintahan yang yang efektif dan berdaya saing. strategi peningkatan kualitas ekonomi akan difokuskan pada beberapa aspek prioritas berdasarkan hasil analisis strategi sesuai sasaran dari program kerja ekonomi di sektor primer, sekunder dan tersier.

Tujuan 3.1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Dalam upaya mewujudkan Visi “Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia” serta mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang unggul dan berdaya saing. Berdasarkan analisis, strategi pembangunan daerah dalam sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia akan difokuskan pada beberapa aspek.

Sasaran 3.1.1 Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas, sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Penguatan pendidikan karakter; membangun ketahanan sosial dan regulasi untuk mengatasi kekerasan, pernikahan anak, degradasi budaya, korupsi, dampak media sosial dan globalisasi di lingkungan pendidikan,

Strategi ini bertujuan memastikan setiap anak mendapat akses pendidikan berkualitas dan inklusif dengan melibatkan berbagai pihak. Langkah strategis mencakup penguatan pendidikan karakter anti-kekerasan dan anti-korupsi, penyesuaian konten literasi terhadap perubahan kurikulum, pengembangan literasi digital, serta penguatan peran keluarga dan regulasi perlindungan anak.

- 2) Penguatan dan Pemerataan layanan perpustakaan melalui optimalisasi perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan, mobil perpustakaan keliling dan aplikasi I-Pustakatanjabtim untuk meningkatkan layanan dan akses ke wilayah 3T. Strategi ini mendukung pelaksanaan Perda terkait penyelenggaraan perpustakaan dan mendukung capaian SDGs 4, dengan fokus pada penyediaan TIK dan literatur di wilayah terbatas jaringan guna mengurangi kesenjangan informasi dan dampak globalisasi.
- 3) Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi masyarakat dengan penguatan peran orang tua dan perpustakaan serta peningkatan kapasitas guru mengenai pembelajaran kontekstual untuk numerasi melalui pelatihan permainan edukatif berbasis numerasi dan logika di kelas rendah PAUD sampai SD. Strategi ini bertujuan mengintegrasikan pembelajaran kontekstual dengan partisipasi aktif masyarakat dan pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana inklusif. Selain mengatasi rendahnya literasi dan numerasi, strategi ini juga diarahkan untuk mengurangi dampak negatif teknologi serta mendorong praktik literasi numerasi di lingkungan keluarga.
- 4) Penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program penuntasan wajib belajar untuk mengurangi angka putus sekolah melalui penguatan standar teknis pelayanan minimal pendidikan, penambahan lembaga pendidikan non-formal dan validitas data untuk bantuan beasiswa serta membangun kerja sama lintas sektor. Upaya ini mencakup dukungan kebijakan lokal seperti Perda Layak Anak

dan Wajib Belajar 13 Tahun, pemanfaatan bantuan dari Baznas dan CSR, serta optimalisasi MOU antar-instansi. Selain itu, strategi ini juga menekankan pentingnya penguatan standar teknis pelayanan minimal pendidikan dan pemanfaatan juknis BOS untuk menjamin keberlanjutan akses pendidikan yang inklusif dan merata.

- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru melalui penambahan, pemerataan dan penguatan (guru yang belum memiliki sertifikasi dan tidak linear kualifikasi) melalui kolaborasi multi-sektor. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan BPMP, Balai Guru Penggerak, dan perguruan tinggi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan guru yang sesuai dengan perubahan kurikulum serta pemerataan distribusi guru di seluruh wilayah, guna mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas dan merata.

Membangun sistem insentif dan penguatan edukasi dan promosi untuk peningkatan partisipasi dalam program PAUD. Langkah ini mencakup sosialisasi pentingnya pendidikan usia dini, integrasi kebijakan wajib PAUD di tingkat kabupaten dan desa, serta pemberian insentif bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya di PAUD. Strategi ini juga melibatkan kolaborasi lintas elemen seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, media sosial, kader desa, dan posyandu dalam kampanye edukatif, serta pemantauan partisipatif oleh pemerintah desa untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

Sasaran 3.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan melalui Digitalisasi Layanan, Efisiensi Rujukan dan Peningkatan Mutu Pelayanan. Strategi ini mencakup digitalisasi sistem rujukan antar layanan (Puskesmas-RS), penguatan surveilans epidemiologi berbasis masyarakat dan deteksi dini digital, peningkatan kualitas layanan untuk membangun kepercayaan publik, serta optimalisasi peran UPTD dan

kader desa dalam layanan kesehatan hybrid yang mengintegrasikan pendekatan offline dan online.

- 2) Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi melalui sinergitas multi-stakeholder dan integrasi lintas program. Langkah-langkah yang diambil meliputi integrasi program TPPS dan Kampung Keluarga Berkualitas dengan layanan primer desa, optimalisasi fungsi posyandu lansia sebagai ruang sosial, serta pemanfaatan TPK, UPPKA, dan PIK R untuk edukasi gizi dan kesehatan reproduksi. Selain itu, revitalisasi peran BKB, BKR, dan BKL dilakukan melalui pelatihan kader, disertai pemetaan dan pendampingan remaja berisiko melalui sekolah dan komunitas, guna memperkuat kemandirian keluarga berbasis desa secara berkelanjutan.
- 3) Peningkatan Gizi Masyarakat berbasis potensi pangan lokal
Strategi ini berfokus pada pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung peningkatan gizi masyarakat. Strategi ini mengakui bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan memerlukan dukungan ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Strategi yang akan dijalankan melalui, meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui pemetaan dan promosi pangan lokal bergizi.
- 4) Membangun sistem insentif dan Penguatan edukasi dan promosi untuk peningkatan Kesadaran kesehatan Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal. Upaya ini mencakup promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pencegahan penyakit menular dan tidak menular, serta risiko perkawinan anak melalui media lokal, sekolah, dan komunitas desa. Pemerintah juga mendorong pencapaian status "desa sehat" dengan indikator air bersih, jamban sehat, dan sanitasi melalui insentif, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam kampanye kesehatan dan STBM. Selain itu, penguatan regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), digitalisasi layanan kesehatan anak dan TPPS, serta pelatihan kader promkes desa

dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

- 5) Penguatan dan Pemerataan SDM Kesehatan dengan penarikan, pengembangan, dan kesejahteraan SDM Kesehatan melalui Kolaborasi Multi-Sektor. Upaya ini mencakup kerja sama dengan organisasi profesi dan perguruan tinggi untuk pengembangan kompetensi, penyusunan skema insentif berbasis kinerja dan lokasi, serta penyediaan beasiswa dengan ikatan dinas. Selain itu, pemerintah daerah mendorong pembiayaan bersama lintas pemangku kepentingan, membangun sistem peningkatan kapasitas SDM yang terintegrasi, serta memperkuat peran daerah sebagai pelindung nakes melalui skema tunjangan dan perlindungan kerja berbasis JKN untuk menciptakan sistem kesehatan yang andal dan merata.
- 6) Pemerataan akses layanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional
Strategi ini bertujuan untuk pemerataan akses masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan memanfaatkan layanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Strategi difokuskan pada perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi antara Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan Dinsos dalam integrasi serta pemutakhiran data penerima manfaat bantuan iuran (PBI) secara berkala di tingkat desa, didukung oleh validasi data kepesertaan BPJS setiap semester. Selain itu, dukungan regulasi dan komitmen kepala daerah turut mendorong akselerasi implementasi UHC untuk memastikan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.
- 7) Penguatan Layanan Rujukan untuk penyakit degeneratif dan kronis
Strategi ini berfokus pada pengembangan layanan rujukan bagi masyarakat penderita penyakit degeneratif dan kronis. Strategi ini mengakui bahwa diperlukannya perhatian lebih terhadap kesehatan

masyarakat dan layanan rujukan. Strategi yang akan dijalankan melalui, memperkuat layanan kesehatan penyakit kanker, jantung, stroke, urologi, dan penyakit degeneratif lainnya pada layanan rujukan rumah sakit.

Sasaran 3.1.3 Meningkatnya Standar Kehidupan Layak, sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Kelembagaan dan Kebijakan Daerah untuk Penghapusan Kemiskinan dengan sinergitas multisektor. Strategi ini bertujuan untuk membangun kelembagaan dan sinergi multi-sektoral dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Upaya ini mencakup optimalisasi peran TKPK dan SK daerah dalam mendukung implementasi Inpres No. 8/2025 serta tujuan SDGs “No Poverty”, validasi data sosial ekonomi nasional (DTSEN) untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dengan dukungan pemerintah daerah dan APBD provinsi. Selain itu, strategi ini juga menyoroti pentingnya peningkatan keterampilan lokal untuk mencegah dominasi tenaga kerja luar dan memastikan pemberdayaan masyarakat miskin secara berkelanjutan.
- 2) Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja dengan memastikan perlindungan pekerja dari upah di bawah UMR, disertai peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan sektor unggulan. Strategi ini difokuskan pada penguatan kelembagaan, perlindungan upah, serta peningkatan keterampilan berbasis kompetensi dan sektor unggulan. Melalui penguatan peran Dewan Pengupahan dan Lembaga Tripartit, strategi ini bertujuan mencegah praktik pemberian upah di bawah UMR dan menindaklanjuti amanat UU Cipta Kerja. Selain itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal dan validasi data ketenagakerjaan menjadi langkah penting untuk mengurangi dominasi tenaga kerja luar dan memastikan distribusi manfaat pembangunan yang merata, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan angkatan kerja secara berkelanjutan.

- 3) Penguatan Ekonomi Lokal dengan Mendorong pemberdayaan, penguatan kapasitas, dan kemandirian pemuda. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi lokal dan peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian pemuda. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan komunitas pemuda dan kewirausahaan yang terintegrasi dengan program magang internasional dan pelatihan melalui Sekolah Rakyat. Selain itu, pelatihan lokal ditingkatkan untuk menghadapi dominasi tenaga kerja luar, disertai monitoring dan evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
- 4) Perlindungan sosial bagi kelompok rentan (lansia, disabilitas, dan ODGJ) yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan kemiskinan struktural. Upaya ini mencakup penguatan manajemen kelembagaan, dorongan regulasi perlindungan sosial berbasis UU No. 11 Tahun 2009 dan SDGs, serta penguatan Perda Disabilitas untuk mendukung kesejahteraan sosial. Selain itu, strategi ini juga menekankan pentingnya sistem dukungan yang responsif terhadap kondisi ODGJ terlantar melalui integrasi kebijakan perlindungan sosial dan penguatan peran daerah dalam menjamin keberlanjutan layanan bagi kelompok rentan. Pencegahan kemiskinan struktural melalui literasi digital, keuangan, dan ekonomi sebagai langkah preventif terhadap maraknya judi online dan pinjaman online ilegal. Melalui pelatihan kewirausahaan dan edukasi komunitas, strategi ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan teknologi secara produktif. Sosialisasi literasi digital dan keuangan juga dilakukan untuk membangun kesadaran kolektif dalam mencegah risiko ekonomi yang timbul dari praktik keuangan digital yang tidak sehat.

Sasaran 3.1.4 Meningkatnya Kualitas Hidup Antargender, sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Penguatan implementasi regulasi dan kelembagaan Daerah untuk Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan pada optimalisasi Perda Layak Anak dan peran UPTD PPA dalam mendukung pelaksanaan UU Perlindungan Perempuan dan Anak serta pencapaian SDG's "Gender Equality". Langkah ini mencakup penguatan regulasi daerah sebagai landasan perlindungan korban kekerasan dan TPPO, serta pemanfaatan kelembagaan responsif untuk mengantisipasi peningkatan kasus kekerasan dan ketimpangan gender akibat dinamika sosial atau krisis.
- 2) Percepatan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah gender untuk mendukung kebijakan responsif gender. Langkah ini mencakup pengembangan sistem data terpilah gender sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, serta percepatan penyediaan data yang akurat untuk memperkecil ketimpangan pendidikan dan ekonomi perempuan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dalam mengatasi isu-isu ketimpangan gender secara menyeluruh.
- 3) Edukasi publik dan pencegahan kekerasan serta pernikahan anak dengan melibatkan multistakeholder untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam menghadapi tren sosial negatif. Melalui kampanye dan edukasi publik, strategi ini bertujuan menurunkan angka pernikahan anak dan kekerasan terhadap perempuan dengan mengoptimalkan implementasi UU Perlindungan Perempuan dan Anak serta mendukung pencapaian tujuan SDG's terkait kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan.
- 4) Mengintegrasikan kebijakan penyediaan fasilitas publik yang ramah perempuan dengan kebijakan afirmatif guna memperkuat peran perempuan dalam ruang sosial dan ekonomi serta mengurangi diskriminasi gender. Upaya ini mencakup penyediaan fasilitas publik yang mendukung partisipasi perempuan, penguatan posisi perempuan

melalui akses yang setara terhadap layanan publik, serta penyusunan kebijakan afirmatif yang menutup kesenjangan pendidikan dan ekonomi secara multisektor sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dalam SDG's.

- 5) Mendorong representasi perempuan dalam birokrasi (ASN), politik, dan dunia kerja melalui kebijakan afirmatif, pelatihan, dan pembukaan akses ekonomi yang berkeadilan gender. Langkah ini mencakup kebijakan afirmatif di sektor pemerintahan dan politik, peningkatan TPAK perempuan, serta pelatihan dan pembukaan akses ekonomi yang adil gender, agar perempuan memiliki peran lebih besar dalam pengambilan keputusan dan ketahanan ekonomi, terutama di tengah dinamika sosial dan tekanan struktural.

Tujuan 3.2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Berdaya Saing

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang efektif dan berdaya saing serta selaras dengan visi serta misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, strategi peningkatan kualitas tata kelola akan difokuskan pada beberapa aspek prioritas berdasarkan hasil analisis strategi. Melalui strategi ini, diharapkan birokrasi tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pendekatan yang sistematis dan terintegrasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, serta penguatan regulasi dan pengawasan menjadi pilar utama dalam mewujudkan birokrasi yang ideal. Dengan demikian, strategi peningkatan birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel merupakan pondasi penting dalam membangun pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. adapun beberapa kelompok strategi yang akan dilaksanakan sebagai penunjang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel antara lain:

Sasaran 3.2.1 Strategi Peningkatan Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel, sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi berbasis digital untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang prima yang terintegrasi dengan aplikasi provinsi dan/atau nasional

Dalam mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa strategi sebagai berikut: a) Meningkatkan pemanfaatan teknologi Informasi public dalam meningkatkan kinerja pemerintahan; b) implementasi kebijakan pemerintahan pusat untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik; c) Meningkatkan komitmen pemerintah daerah terhadap pemanfaatan teknologi Informasi berbasis digital; d) Pemanfaatan teknologi Informasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima; e) Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait integrasi data Informasi dan aplikasi serta pengimplementasian perubahan regulasi

- 2) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan barang milik daerah merupakan kelompok strategi yang fundamental

Dalam mewujudkan sasaran ini. adapun rincian beberapa strategi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sebagai berikut: a) meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan barang milik daerah

- 3) Meningkatkan keamanan data dan Informasi pada sistem pemerintahan berbasis elektronik

Dalam era digital yang semakin maju, keamanan data dan informasi pada sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi aspek yang sangat krusial untuk menjamin integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi publik. Peningkatan keamanan ini tidak hanya melindungi data dari ancaman siber seperti peretasan, pencurian data, dan penyalahgunaan informasi, tetapi juga memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan digital yang semakin

berkembang. Oleh karena itu, penerapan teknologi keamanan yang mutakhir, seperti enkripsi data, sistem autentikasi ganda, serta pemantauan dan deteksi ancaman secara real-time, menjadi kebutuhan utama dalam menjaga stabilitas dan keandalan sistem pemerintahan elektronik.

- 4) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan melalui cascading dan cross cutting dengan indikator kinerja yang SMART

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satu strategi utama yang dapat diterapkan adalah melalui pendekatan cascading dan crosscutting, yang memungkinkan penyelarasan tujuan dan program dari tingkat strategis hingga operasional secara sistematis dan terintegrasi. Pendekatan cascading memastikan bahwa setiap tingkatan perencanaan saling mendukung dan berkesinambungan, sementara crosscutting mengakomodasi isu-isu lintas sektor yang memerlukan kolaborasi antar unit kerja. Dalam konteks ini, penggunaan indikator kinerja yang SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound) menjadi sangat penting untuk mengukur pencapaian secara objektif dan terukur, sehingga memudahkan evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data. adapun strategi utamanya yakni Meningkatkan ketersediaan infrastruktur digital untuk meningkatkan Informasi dan keamanan data

- 5) Meningkatkan jumlah Kerja sama/kolaborasi dengan perguruan tinggi dan/atau Lembaga yang berkompeten dalam peningkatan kualitas laporan, layanan dan hasil riset serta peningkatan kapasitas SDM

Meningkatkan jumlah kerja sama dan kolaborasi dengan perguruan tinggi serta lembaga yang berkompeten merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas laporan, layanan, dan hasil riset, sekaligus pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Melalui kemitraan yang sinergis, institusi pemerintahan dapat

memanfaatkan keahlian akademik dan riset yang mendalam untuk menghasilkan produk kerja yang lebih valid, inovatif, dan berbasis bukti. Selain itu, kolaborasi ini juga membuka peluang bagi peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, workshop, dan program pengembangan kapasitas yang diselenggarakan bersama, sehingga mampu meningkatkan profesionalisme dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

- 6) Meningkatkan kerja sama pengawasan dengan BPKP dan aparat penegak hukum

Peningkatan kerja sama pengawasan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta aparat penegak hukum merupakan langkah strategis yang esensial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sinergi ini difokuskan pada optimalisasi fungsi pengawasan melalui integrasi mekanisme audit, investigasi, dan penegakan hukum yang terkoordinasi secara sistematis. Dengan demikian, potensi risiko penyimpangan dan korupsi dapat diminimalisir secara efektif melalui pemanfaatan sumber daya dan kapabilitas teknis yang dimiliki oleh kedua institusi.

- 7) Melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan penerimaan PAD

Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta merupakan strategi teknokratik yang krusial dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun strategi utama dalam mewujudkan hal tersebut yakni melakukan kolaborasi/kerja sama dengan pihak swasta dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sasaran 3.2.1 Peningkatan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman, dan Harmonis

Peningkatan kondisi daerah yang aman, nyaman, dan harmonis merupakan prioritas strategis dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Strategi ini menekankan pendekatan sistematis dan terintegrasi yang menggabungkan aspek keamanan, kenyamanan lingkungan, serta keharmonisan sosial sebagai fondasi utama dalam menciptakan ekosistem daerah yang kondusif. Melalui penerapan teknologi informasi, penguatan kapasitas institusi, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan mitigasi risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan publik. Pendekatan berbasis data dan analisis risiko menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi serta tantangan kontemporer.

- 1) Melakukan peningkatan kompetensi ASN, ormas, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pelatihan, pembinaan, dan forum penanggulangan bencana dan konflik

Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), Organisasi Masyarakat (Ormas), dan komunitas masyarakat dalam konteks penanggulangan bencana dilakukan melalui implementasi program pelatihan terstruktur, pembinaan berkelanjutan, serta fasilitasi forum koordinasi penanggulangan bencana dan konflik. Pendekatan ini mengedepankan metode berbasis kapabilitas dan evidence-based practice yang dirancang untuk memperkuat kapasitas teknis, manajerial, dan koordinatif para pemangku kepentingan. Optimalisasi sumber daya manusia melalui mekanisme pembelajaran yang sistematis dan kolaboratif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas respons dan mitigasi risiko bencana secara signifikan. Selain itu, pengembangan platform komunikasi dan pertukaran informasi yang terintegrasi

menjadi komponen vital dalam mendukung sinergi lintas sektor dan mempercepat pengambilan keputusan strategis dalam situasi darurat.

- 2) Memberikan pendidikan tentang keberagaman dan toleransi kepada seluruh lapisan Masyarakat sejak dini

Penyelenggaraan pendidikan mengenai keberagaman dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak tahap awal pendidikan merupakan upaya strategis yang bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat kohesi sosial. Program ini dirancang secara sistematis dengan pendekatan berbasis kurikulum yang inklusif dan berorientasi pada pengembangan nilai-nilai pluralisme, penghormatan terhadap perbedaan, serta penguatan kapasitas sosial budaya. Implementasi pendidikan ini melibatkan metode pembelajaran interaktif dan partisipatif yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta fasilitas pendidikan yang memadai. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap toleran dan harmonis secara berkelanjutan, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi terciptanya stabilitas dan kemajuan daerah maupun nasional.

- 3) Melakukan pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial

Pelaksanaan pemetaan potensi konflik sosial, pemantauan berkelanjutan, serta fasilitasi penanganan konflik sosial merupakan langkah strategis yang mengedepankan pendekatan sistematis dan berbasis data. Pemetaan potensi konflik dilakukan melalui identifikasi dan analisis faktor-faktor risiko yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, menggunakan metode survei, pengumpulan data primer dan sekunder, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pemodelan spasial dan temporal. Pemantauan konflik dilaksanakan secara real-time dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, guna mendeteksi dini indikasi eskalasi konflik dan menginformasikan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Fasilitasi penanganan konflik sosial dilakukan melalui mekanisme mediasi, dialog antar pemangku kepentingan, dan koordinasi lintas sektor yang terstruktur, dengan tujuan meredam potensi konflik dan membangun konsensus bersama. Pendekatan ini menekankan pada penguatan kapasitas institusi dan komunitas lokal dalam mengelola dinamika sosial secara konstruktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya berorientasi pada mitigasi risiko, tetapi juga pada pembangunan sosial yang inklusif dan harmonis, yang mendukung stabilitas dan kemajuan daerah secara menyeluruh.

4) Menyusun dokumen kebencanaan di tingkat desa

Penyusunan dokumen kebencanaan di tingkat desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat terhadap berbagai risiko bencana yang potensial terjadi di wilayah ini. Proses penyusunan dokumen ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada standar nasional serta prinsip-prinsip manajemen risiko bencana yang berbasis data dan analisis ilmiah. Dokumen kebencanaan yang dihasilkan berfungsi sebagai pedoman operasional dalam mitigasi, respons, dan pemulihan bencana di tingkat desa, sehingga dapat mengoptimalkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif. Dokumen kebencanaan yang tersusun dengan baik di tingkat desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko bencana, mempercepat respons darurat, serta meminimalisir dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana. Selain itu, dokumen ini juga berperan sebagai instrumen perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, dengan mengintegrasikan aspek mitigasi bencana ke dalam program-program pembangunan desa. Dengan demikian, penyusunan dokumen kebencanaan di tingkat desa menjadi fondasi penting dalam

mewujudkan masyarakat yang tangguh, resilient, dan mampu menghadapi berbagai tantangan bencana secara mandiri dan terkoordinasi.

- 5) Bekerja sama dengan TNI, POLRI pihak swasta untuk penanggulangan, kesiagaan dan pengadaan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana dan kebakaran

Pelaksanaan kerja sama strategis antara pemerintah dengan TNI, POLRI, dan pihak swasta merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana dan kebakaran. Sinergi ini bertujuan untuk memperkuat kesiagaan, mempercepat respons, serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi.

Melalui kerja sama yang sinergis antara pemerintah, TNI, POLRI, dan pihak swasta, penanggulangan bencana dan kebakaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta kesiapsiagaan yang terbangun akan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana. Selain itu, kolaborasi ini juga memperkuat ketahanan daerah dan meningkatkan rasa aman serta kepercayaan masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana yang dilakukan secara terpadu.

- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menanggulangi bahaya kebakaran dan bencana serta pemasangan rambu evakuasi di daerah rawan bencana

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang rentan terhadap berbagai potensi bencana, memerlukan upaya strategis dalam peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana. Peningkatan ini menjadi sangat penting untuk memperkuat ketahanan daerah dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda.

Melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis data, pemerintah daerah bersama dengan aparat keamanan dan pihak swasta berkolaborasi dalam pengadaan alat pemadam kebakaran, kendaraan operasional, sistem peringatan dini, serta fasilitas pendukung lainnya yang sesuai dengan standar teknis dan kebutuhan lokal. Selain itu, pemasangan rambu evakuasi di titik-titik rawan bencana menjadi langkah krusial untuk memberikan panduan yang jelas dan efektif bagi masyarakat dalam proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat, sehingga dapat meminimalisir risiko korban jiwa dan mempercepat respons penanganan bencana.

Implementasi peningkatan sarana dan prasarana ini dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, TNI, POLRI, dan sektor swasta, yang bersama-sama membangun sinergi dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. Proses ini juga didukung oleh pelatihan dan sosialisasi yang intensif kepada aparat desa dan masyarakat, guna memastikan pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan fasilitas yang tersedia serta mengikuti prosedur evakuasi yang benar. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur penanggulangan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak hanya memperkuat aspek teknis, tetapi juga membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai ujung tombak dalam menghadapi bencana. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, resilient, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam melindungi keselamatan dan kesejahteraan mereka.

7) Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan penegakan Perda dan Perkada

Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan daerah melalui peningkatan aspek ekonomi,

sosial, dan budaya secara terpadu dan berkelanjutan. Upaya ini difokuskan pada pengembangan kapasitas ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing, dengan mendorong pemberdayaan UMKM, optimalisasi potensi sumber daya alam, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan. Secara sosial, pemerintah daerah menginisiasi program-program yang memperkuat kohesi sosial dan solidaritas masyarakat, termasuk penguatan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas yang memperkokoh persatuan dan toleransi antarwarga. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, lembaga adat, hingga komunitas masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam membangun ketahanan sosial dan budaya yang adaptif terhadap dinamika perubahan zaman.

Selain itu, penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menjadi pilar penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara konsisten melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembaruan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum nasional. Penegakan aturan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang diperkuat oleh penegakan regulasi yang efektif diharapkan dapat menciptakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang lebih maju, harmonis, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

- 8) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat serta pencegahan tindak kriminal Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempatkan peningkatan koordinasi antar berbagai pihak sebagai salah satu strategi utama dalam menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Upaya ini melibatkan sinergi yang erat antara aparat penegak hukum seperti POLRI, TNI, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat dan sektor swasta. Melalui koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan, berbagai pihak dapat saling bertukar informasi, melakukan pemantauan situasi keamanan secara real-time, serta merancang langkah-langkah preventif yang tepat sasaran untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Pendekatan kolaboratif ini juga mencakup pelaksanaan patroli terpadu, penguatan sistem keamanan lingkungan, serta penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada dan aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Selain itu, peningkatan koordinasi ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang modern untuk mempercepat respons terhadap potensi gangguan keamanan dan tindak kriminal. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara konsisten mendorong pembentukan forum-forum koordinasi lintas sektor yang rutin mengadakan evaluasi dan perencanaan strategis, sehingga tercipta mekanisme kerja yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Dengan demikian, melalui penguatan koordinasi yang komprehensif dan sinergis, diharapkan tercipta suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif, yang tidak hanya melindungi masyarakat dari ancaman kriminalitas, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan pemerintah daerah.

Sasaran 3.2.3 Strategi Peningkatan Layanan Publik

Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyadari bahwa peningkatan kualitas layanan publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi peningkatan layanan publik di daerah ini dirancang secara komprehensif dengan mengedepankan prinsip-prinsip good

governance, inovasi teknologi, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), lembaga masyarakat, hingga sektor swasta. Melalui pendekatan yang terintegrasi, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mempercepat akses, meningkatkan kualitas, dan memperluas jangkauan layanan publik di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan infrastruktur dasar.

Dalam konteks Kabupaten Tanjung Jabung Timur, strategi ini juga menitikberatkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi yang terhubung secara digital, serta peningkatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan layanan yang diberikan tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga berkelanjutan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain itu, upaya peningkatan layanan publik ini didukung oleh kebijakan yang adaptif dan berbasis data, sehingga mampu merespons dinamika sosial-ekonomi serta tantangan lokal secara efektif. Dengan demikian, strategi peningkatan layanan publik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

- 1) Meningkatkan kualitas, integritas, dan komitmen dalam efektivitas pelayanan publik digital/non digital secara prima

Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempatkan peningkatan kualitas, integritas, dan komitmen sebagai fondasi utama dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima, baik dalam bentuk digital maupun non-digital. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas strategis yang diarahkan untuk memenuhi harapan masyarakat akan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, integritas aparatur pemerintah menjadi kunci utama guna memastikan setiap proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi, sehingga

dapat membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. Komitmen yang kuat dari seluruh elemen penyelenggara layanan publik juga menjadi faktor penentu dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan peningkatan efektivitas layanan, baik yang berbasis teknologi informasi maupun layanan konvensional.

Lebih lanjut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengadopsi pendekatan terpadu yang menggabungkan inovasi teknologi digital dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem manajemen pelayanan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas, sekaligus memastikan bahwa layanan non-digital tetap dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil. Pemerintah daerah juga secara aktif melakukan evaluasi dan pembaruan prosedur pelayanan, serta mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga mutu dan integritas layanan. Dengan demikian, melalui peningkatan kualitas, integritas, dan komitmen yang menyeluruh, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupaya menciptakan pelayanan publik yang prima, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai wujud nyata dari tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

2) Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelayanan publik di seluruh sektor

Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempatkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu pilar utama dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik di seluruh sektor. Hal ini merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan SDM yang kompeten, pelayanan publik diharapkan dapat berjalan secara prima, responsif, dan berkelanjutan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara optimal.

Dengan upaya ini, Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertransformasi menjadi wilayah yang unggul dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan daya saing regional, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

3) Meningkatkan Kerja sama dengan badan cyber nasional untuk keamanan aplikasi layanan publik

Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyadari bahwa dalam era digitalisasi yang semakin pesat, keamanan aplikasi layanan publik menjadi aspek yang sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama strategis dengan Badan Cyber Nasional sebagai upaya memperkuat sistem keamanan siber yang melindungi seluruh aplikasi layanan publik, baik yang berbasis digital maupun hybrid. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pertahanan terhadap ancaman siber yang semakin kompleks dan dinamis, serta memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data layanan publik tetap terjaga dengan baik.

Melalui sinergi dengan Badan Cyber Nasional, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat mengakses berbagai sumber daya dan keahlian teknis yang diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkan standar keamanan teknologi informasi yang mutakhir dan sesuai dengan regulasi nasional. Selain itu, kolaborasi ini juga mencakup pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam bidang keamanan siber, sehingga mereka mampu mengantisipasi dan merespons insiden siber secara cepat dan efektif. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya memperkuat keamanan aplikasi layanan publik, tetapi juga mendukung transformasi digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan demi

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

3.4.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan merupakan pedoman strategis yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Setiap tahapan pembangunan disusun secara sistematis dan adaptif untuk menjawab tantangan pembangunan lintas sektor serta memastikan kesinambungan antarprogram prioritas. Fokus pembangunan pada tiap tahun dirancang untuk membentuk fondasi yang kuat, mempercepat transformasi, dan mengonsolidasikan capaian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Penyusunan tahapan ini mengacu pada prinsip sinkronisasi dengan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2025–2045, RPJMD Provinsi Jambi, serta RPJMN Tahun 2025–2029, sehingga capaian pembangunan daerah dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional dan regional. Adapun rincian tahapan pembangunan dimaksud disajikan dalam gambar berikut.

Tabel 3.10
Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Fondasi Inklusif untuk Transformasi Pembangunan	Penguatan Kapasitas Lokal dan Akses Strategis	Transformasi Berkelanjutan dan Daya Saing Daerah	Konsolidasi Tata Ruang dan Kolaborasi Stakeholder	Keberlanjutan Inovatif menuju Tanjung Jabung Timur yang Merata

Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 disusun secara bertahap dan strategis. Pada Tahap I (2026), Pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi infrastruktur dasar yang

inklusif dan kolaboratif, swasembada pangan dan ekonomi kreatif, dasar tata kelola lingkungan hidup yang integratif, serta penguatan fondasi pembangunan manusia dan tata kelola pemerintahan yang digital, kolaboratif, dan berkeadilan sosial. Pada Tahap II (2027), pembangunan diarahkan pada investasi infrastruktur strategis yang terintegrasi tata ruang, ketahanan pangan dan pariwisata berkelanjutan, sistem pengelolaan lingkungan berbasis data, peningkatan akses pembangunan manusia yang responsif dan inklusif, serta peningkatan layanan publik berbasis teknologi dan profesionalisme ASN. Pada Tahap III (2028), pembangunan berfokus pada transformasi konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, mendorong daya saing sektor unggulan daerah, penguatan kualitas SDM secara kolaboratif, serta efisiensi layanan publik melalui manajemen aset dan penanggulangan risiko yang terintegrasi. Pada Tahap IV (2029), pembangunan ditekankan pada penguatan tata ruang dan infrastruktur permukiman/logistik dilakukan secara tematik, membangun kolaborasi untuk memperkuat produk unggulan daerah, optimalisasi persampahan berbasis ekonomi sirkular, penguatan ekosistem pembangunan manusia, serta modernisasi layanan publik berbasis digital dan inklusif. Terakhir, pada tahap V (2030) pembangunan diarahkan pada penguatan ekosistem pembiayaan dan tata kelola infrastruktur berkelanjutan, pemanfaatan potensi daerah untuk kemandirian ekonomi, sistem persampahan cerdas berbasis teknologi, kesejahteraan sosial masyarakat yang setara, serta konsolidasi tata kelola pemerintahan digital yang berdaya saing.

Selanjutnya, setiap misi pembangunan dirinci ke dalam arah kebijakan sebagai bentuk nyata dari rencana kerja yang akan mengarahkan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pembangunan. Dalam jangka menengah, arah kebijakan ditetapkan untuk lima tahun, dengan penekanan atau fokus yang berbeda setiap tahunnya pada masing-masing sektor pembangunan. Meskipun memiliki prioritas yang bervariasi tiap tahun, arah kebijakan tersebut disusun secara sinergis dan

berkesinambungan agar saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029, arah kebijakan dirumuskan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahunan, yang dijelaskan sebagai berikut.

Misi 1 Peningkatan Infrastruktur Dasar guna Terwujudnya Konektivitas Antarwilayah

Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur kewilayahan dibagi berdasarkan sasaran-sasaran utama peningkatan kualitas infrastruktur dasar daerah. Arah kebijakan ini akan berkembang secara bertahap setiap tahunnya:

Tabel 3.11
Arah Kebijakan Pembangunan Misi 1

Tahap I	Tahap II	Tahap II	Tahap IV	Tahap V
Misi 1 Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antarwilayah				
Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah				
Membangun fondasi infrastruktur dasar yang inklusif dan kolaboratif	Penguatan investasi infrastruktur strategis yang terintegrasi dan berbasis tata ruang	Transformasi konektivitas wilayah yang menunjang mobilitas ekonomi secara terintegrasi	Mengkonsolidasikan Tata Ruang dan Infrastruktur untuk Permukiman dan Logistik Berkelanjutan	Penguatan ekosistem pembiayaan dan tata kelola infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan

Secara terperinci, arah kebijakan yang terkait dengan pada Misi 1 Tujuan 1 RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 dalam setiap tahap RPJMD dijelaskan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahap I: Membangun Fondasi Infrastruktur Dasar yang Inklusif dan Kolaboratif

Arah kebijakan infrastruktur kewilayahan pada tahun pertama difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas wilayah, peningkatan kualitas permukiman, serta

penguatan kolaborasi lintas sektor. Melalui akselerasi konektivitas, pemerintah daerah berupaya memperkuat jaringan infrastruktur yang mampu membuka akses antarwilayah secara efisien dan merata. Peningkatan permukiman layak menjadi prioritas untuk mewujudkan lingkungan hunian yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Selain itu, arah kebijakan ini mendorong keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dalam membangun kemitraan strategis yang inklusif. Pendekatan multipihak ini ditujukan untuk memperluas sumber daya pembangunan, mempercepat capaian pembangunan infrastruktur dasar, serta menciptakan sinergi antar aktor dalam mendukung transformasi wilayah yang berkeadilan dan berdaya saing.

Arah Kebijakan Tahap II: Penguatan Investasi Infrastruktur Strategis yang Terintegrasi dan Berbasis Tata Ruang

Arah kebijakan pada tahun kedua diarahkan pada penguatan investasi infrastruktur strategis yang berbasis pada tata ruang terintegrasi dan kolaborasi multipihak. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang tidak hanya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan konektivitas logistik dan penyediaan permukiman layak secara berkelanjutan. Penguatan peran investasi publik dan swasta menjadi kunci dalam menghadirkan infrastruktur strategis yang mendukung efisiensi rantai pasok wilayah, mengurangi ketimpangan antarwilayah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Pendekatan multipihak terus diperluas untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pembangunan berbasis wilayah yang responsif terhadap dinamika spasial dan sosial. Dengan demikian, arah kebijakan ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan kawasan permukiman yang tertata, terhubung, dan memiliki daya dukung logistik yang andal.

Arah Kebijakan Tahap III: Transformasi Konektivitas Wilayah yang Menunjang Mobilitas Ekonomi secara Terintegrasi

Arah kebijakan pada tahun ketiga difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah melalui penguatan infrastruktur transportasi darat dan sungai yang terintegrasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, adaptif, dan mampu menunjang kelancaran mobilitas barang dan jasa antar kawasan, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal dan regional. Pengembangan infrastruktur darat dan sungai dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan pola tata ruang dan potensi wilayah, guna memperkuat keterhubungan antar kecamatan, pusat pertumbuhan, serta kawasan produksi dan distribusi. Selain meningkatkan efisiensi logistik, arah kebijakan ini juga diharapkan mampu menurunkan biaya distribusi, membuka akses ekonomi masyarakat, dan mempercepat integrasi pembangunan antarwilayah secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan Tahap IV: Mengkonsolidasikan Tata Ruang dan Infrastruktur untuk Permukiman dan Logistik Berkelanjutan

Arah kebijakan pada tahun keempat diarahkan pada optimalisasi investasi dan pemanfaatan tata ruang infrastruktur strategis guna mendukung pengembangan wilayah pesisir serta penataan permukiman yang inklusif. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan wilayah secara seimbang dengan memperhatikan potensi dan kerentanan kawasan pesisir melalui penyediaan infrastruktur yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis mitigasi risiko. Penataan permukiman dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan inklusif untuk memastikan keterjangkauan akses terhadap layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hunian, serta penguatan kapasitas adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim dan tekanan pembangunan. Melalui sinergi antara investasi publik-swasta dan perencanaan tata ruang yang terarah, kebijakan ini mendukung transformasi wilayah pesisir menjadi kawasan strategis yang produktif, tangguh, dan

berdaya saing, sekaligus memperkuat integrasi spasial pembangunan antarwilayah.

Arah Kebijakan Tahap V: Penguatan Ekosistem Pembiayaan dan Tata Kelola Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Sebagai tahap akhir, arah kebijakan tahun kelima berfokus pada penguatan ekosistem pembiayaan dan tata kelola infrastruktur yang terintegrasi guna mewujudkan permukiman yang inklusif serta penyediaan layanan dasar yang berkelanjutan. Kebijakan ini menekankan pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan, baik melalui skema APBD, kemitraan publik-swasta, maupun sumber alternatif lainnya, guna menjamin kesinambungan pembangunan infrastruktur. Selain itu, tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berbasis data menjadi pilar utama dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan program serta akuntabilitas penggunaan sumber daya. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi infrastruktur dilakukan secara terintegrasi dengan rencana tata ruang dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, arah kebijakan tahap V diharapkan mampu memastikan ketersediaan infrastruktur dasar yang merata, layak huni, dan inklusif, serta mempercepat tercapainya target pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Misi 2 Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Misi ini dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pemanfaatan teknologi sebagai bentuk inovasi dalam mengelola dan meningkatkan daya saing potensi daerah secara berkelanjutan dengan memberdayakan sektor-sektor strategis, mempromosikan potensi investasi daerah guna mendukung penciptaan lapangan kerja. Penguatan komponen struktur ekonomi dan investasi daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, melalui pemanfaatan teknologi sebagai wujud inovasi

difokuskan pada sektor unggulan yang dikelola masyarakat pada sektor Pertanian dan Perikanan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan menjaga lingkungan.

Tujuan 2.1 Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Kebijakan pembangunan merupakan kerangka strategis yang disusun pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ekonomi nasional, dan menjamin keberlanjutan sumber daya. Salah satu arah kebijakan pembangunan yang menjadi perhatian utama di era modern adalah mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga berfokus pada pemerataan hasil pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pelestarian lingkungan hidup. Kesejahteraan ekonomi mengacu pada kondisi di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Sementara itu, daya saing ekonomi mencerminkan kemampuan suatu negara untuk memproduksi dan mengeksport barang dan jasa secara efisien, bersaing di pasar internasional, serta menarik investasi yang produktif. Sedangkan keberlanjutan ekonomi menuntut agar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dilakukan tanpa mengorbankan lingkungan, sosial, dan kepentingan generasi mendatang.

Tabel 3.12
Arah Kebijakan Pembangunan Misi 2 Tujuan 1

Tahap I	Tahap II	Tahap II	Tahap IV	Tahap V
Misi 2 Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan				
Tujuan 1 Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Mendorong swasembada pangan pada sektor industri pertanian dan perikanan serta mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Meningkatkan ketahanan pangan di sektor industri pertanian dan perikanan serta mengembangkan pariwisata berkelanjutan berbasis konservasi ekologi dan budaya lokal.	Mendorong daya saing produk unggulan daerah di sektor industri pertanian dan perikanan serta meningkatkan efektivitas kelembagaan pariwisata dan UMKM.	Membangun kolaborasi antar stakeholder untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah dan kepariwisataan berazaskan identitas budaya lokal serta perdagangan berbasis dukungan teknologi informatika (TI).	Mengoptimalkan potensi daerah untuk mendukung ekonomi biru dan hijau serta pertumbuhan industri dan pariwisata.

Secara terperinci, arah kebijakan yang terkait dengan pada Misi 3 Tujuan 1 RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 dalam setiap tahap RPJMD dijelaskan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahap I: Mendorong Swasembada Pangan pada Sektor Industri Pertanian dan Perikanan serta Mengembangkan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Jambi, memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan. Sebagai daerah yang didominasi oleh wilayah pesisir, rawa, dan lahan pertanian produktif, kabupaten ini memiliki peluang besar untuk menjadi lumbung pangan sekaligus pusat pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal. Arah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada mendorong swasembada pangan di sektor industri pertanian dan perikanan, serta pengembangan ekonomi kreatif, menjadi sangat relevan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mencapai arah kebijakan di tahap I maka langkah-langkah strategi kebijakan yang dilakukan antara lain sebagai berikut ini: 1) Mendorong pembangunan pertanian dan perikanan dengan penguatan kebijakan dan komitmen multi pihak untuk menjaga stabilitas harga yang mendukung swasembada dan ketersediaan pangan di sektor perikanan dan pertanian 2) Mengembangkan sektor industri pertanian dan perikanan melalui penguatan regulasi yang mendukung kerja sama dan iklim investasi yang kondusif 3) Meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan destinasi wisata yang menarik serta peningkatan kualitas dan kuantitas event ekonomi kreatif untuk mewujudkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor pariwisata

Arah Kebijakan Tahap II: Meningkatkan Ketahanan Pangan di Sektor Industri Pertanian dan Perikanan serta Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Konservasi Ekologi dan Budaya Lokal

Pembangunan daerah dewasa ini tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga pada keberlanjutan dan kemandirian. Dalam konteks ini, arah kebijakan yang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan di sektor industri pertanian dan perikanan, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis konservasi ekologi dan budaya lokal, menjadi pilar penting dalam menjawab tantangan masa depan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menciptakan kesejahteraan jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam, budaya, dan ekosistem lokal.

Dalam mencapai arah kebijakan di tahap II maka strategi kebijakan yang dilakukan antara lain sebagai berikut ini 1) Mewujudkan ketahanan pangan sektor pertanian dan perikanan melalui komitmen bersama, penerapan teknologi, penguatan SDM dan kelembagaan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan 2) Peningkatan sektor industri pertanian dan perikanan serta penguatan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah 3) Mengembangkan pariwisata berkelanjutan berbasis konservasi ekologi dan

budaya lokal, memperkuat peran masyarakat dan UMKM, serta menjaga identitas dan kelestarian lingkungan.

Arah Kebijakan Tahap III: Mendorong Daya Saing Produk Unggulan Daerah di Sektor Industri Pertanian dan Perikanan serta Meningkatkan Efektivitas Kelembagaan Pariwisata dan UMKM

Di tengah dinamika global dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, daerah dituntut untuk mampu mengembangkan potensi lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan. Produk unggulan dari sektor pertanian dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian daerah, terutama bagi wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Namun, daya saing tersebut tidak akan optimal tanpa didukung oleh penguatan kelembagaan, khususnya dalam sektor pariwisata dan UMKM. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan yang menekankan pada penguatan daya saing produk unggulan dan efektivitas kelembagaan ekonomi lokal menjadi krusial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertanian dan perikanan merupakan sektor utama yang menopang kehidupan masyarakat di banyak wilayah Indonesia, termasuk di kabupaten-kabupaten pesisir dan pedesaan. Produk-produk unggulan seperti padi, kelapa, udang, ikan, maupun hasil hortikultura dan perikanan air tawar memiliki potensi besar sebagai komoditas ekspor dan bahan baku industri. Namun, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya nilai tambah, keterbatasan teknologi, ketergantungan pada musim, serta lemahnya akses pasar. Selain itu, kualitas produk belum memenuhi standar kompetitif di pasar nasional dan global.

Dalam mencapai arah kebijakan di tahap III maka langkah-langkah strategi kebijakan yang dilakukan antara lain sebagai berikut ini 1) Mewujudkan ketahanan pangan sektor pertanian dan perikanan melalui komitmen bersama, penerapan teknologi, penguatan SDM dan kelembagaan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan 2) Memperkuat kolaborasi skema KPBU dan kemitraan strategis daerah untuk mempercepat

pembangunan industri, memanfaatkan produk unggulan daerah untuk menarik investor, serta memperluas akses pasar guna mempercepat kemajuan daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 3) Meningkatkan efektivitas kelembagaan pariwisata dan UMKM melalui peningkatan kualitas produk dan optimalisasi pengelolaan kepariwisataan.

Arah Kebijakan Tahap IV: Membangun Kolaborasi Antar*stakeholder* untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah dan Kepariwisata Berazaskan Identitas Budaya Lokal serta Perdagangan Berbasis Dukungan Teknologi Informatika (TI)

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, daya saing daerah tidak lagi hanya ditentukan oleh sumber daya alam semata, melainkan juga oleh sejauh mana sinergi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengelola potensi lokal secara inovatif dan berkelanjutan. Produk unggulan daerah dan sektor kepariwisataan memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak perekonomian lokal, jika dikembangkan dengan pendekatan kolaboratif yang kuat, menjunjung tinggi identitas budaya lokal, serta memanfaatkan teknologi informatika sebagai infrastruktur pendukung utama dalam perdagangan dan promosi. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah harus menempatkan kolaborasi, budaya lokal, dan teknologi digital sebagai tiga pilar utama transformasi ekonomi daerah.

Dalam mencapai arah kebijakan tahap IV maka langkah-langkah strategi kebijakan yang dilakukan antara lain sebagai berikut ini: 1) Memperkuat daya saing sektor pertanian dan perikanan dengan mengintegrasikan sektor hulu dan hilir yang selaras dengan kebijakan ekonomi dalam negeri 2) Membangun kolaborasi antar *stakeholder* untuk meningkatkan daya saing produk unggulan dan perluasan akses pasar yang mendukung pembangunan industri daerah 3) Meningkatkan sektor kepariwisataan berazaskan identitas budaya lokal dan perdagangan berbasis dukungan teknologi informatika (TI).

Arah Kebijakan Tahap V: Mengoptimalkan Potensi Daerah untuk Mendukung Ekonomi Biru dan Hijau serta Pertumbuhan Industri dan Pariwisata

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan tekanan terhadap sumber daya alam telah mendorong banyak daerah untuk mengubah paradigma pembangunan ekonomi. Tidak lagi bertumpu pada eksploitasi sumber daya semata, arah kebijakan kini ditujukan untuk mengembangkan ekonomi biru dan ekonomi hijau—dua konsep yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dan konservasi dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks pembangunan daerah, optimalisasi potensi sumber daya alam dan budaya lokal menjadi pondasi penting untuk mendukung transformasi menuju industri ramah lingkungan dan pariwisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis dan kolaboratif untuk mewujudkan sinergi antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam mencapai arah kebijakan tahap V maka langkah-langkah strategi kebijakan yang dilakukan antara lain sebagai berikut ini: 1) Memperkuat daya saing sektor pertanian dan perikanan dengan mengintegrasikan sektor hulu dan hilir yang selaras dengan kebijakan ekonomi dalam negeri 2) Mendorong pertumbuhan industri daerah yang inklusif melalui kolaborasi antar sektor, dan peningkatan kualitas produk unggulan 3) Mewujudkan pariwisata sebagai pilar utama ekonomi daerah dan PAD.

Tujuan 2.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2025-2029 diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Arah kebijakan bidang lingkungan hidup dibagi berdasarkan sasaran-sasaran utama dan akan berkembang secara bertahap setiap tahunnya.

Tabel 3.13
Arah Kebijakan Pembangunan Misi 2 Tujuan 2

Tahap I	Tahap II	Tahap II	Tahap IV	Tahap V
Misi 2 Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan				
Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup				
Membangun dasar tata kelola lingkungan hidup yang integratif	Penguatan Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup yang inovatif Berbasis Data	Transformasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Optimalisasi Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat dan Ekonomi Sirkular	Penguatan Sistem Persampahan Cerdas dan Berbasis Teknologi untuk Mewujudkan Daerah Bebas Sampah dan Berkelanjutan

Secara terperinci, arah kebijakan yang terkait dengan pada Misi 2 Tujuan 2 RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 dalam setiap tahap RPJMD dijelaskan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahap I: Membangun Dasar Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Integratif

Arah Kebijakan Tahap I dalam pelaksanaan Misi 2 Tujuan 2 RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 diarahkan pada peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui pendekatan multidimensi dan lintas sektor. Fokus utama dalam tahap ini adalah memperkuat penegakan hukum lingkungan sebagai instrumen regulatif untuk menekan aktivitas yang merusak lingkungan, sekaligus memperjelas mekanisme sanksi dan pengawasan terhadap pelanggaran yang berdampak pada kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Selain itu, sistem pengelolaan persampahan yang tepat guna akan dikembangkan melalui pendekatan hulu ke hilir, dengan penguatan sarana-prasarana, edukasi masyarakat, dan inovasi teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Kebijakan ini juga mencakup perlindungan terhadap kawasan strategis, seperti daerah konservasi, sempadan sungai, dan wilayah pesisir, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam mendukung keberlanjutan kebijakan ini, tata kelola kolaboratif menjadi fondasi utama melalui pelibatan multipihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini diarahkan untuk menciptakan sinergi dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring program-program lingkungan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan jaringan informasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat meningkat secara signifikan, mendukung keberlanjutan ekonomi daerah, serta memberikan perlindungan jangka panjang terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Arah Kebijakan Tahap II: Penguatan Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup yang inovatif Berbasis Data

Arah Kebijakan Tahap II difokuskan pada penguatan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis data dan didukung oleh inovasi teknologi. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun sistem pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan yang lebih responsif, akurat, dan berkelanjutan. Integrasi data spasial dan temporal menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam pengawasan terhadap pencemaran, alih fungsi lahan, dan degradasi ekosistem. Inovasi teknologi, seperti sistem monitoring kualitas udara dan air secara real time, serta digitalisasi data lingkungan, akan diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan lingkungan di berbagai sektor pembangunan.

Selain itu, kebijakan ini menekankan pentingnya konservasi kawasan strategis yang memiliki fungsi ekologis penting, seperti hutan mangrove, sempadan sungai, dan kawasan lindung lainnya, sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim. Konservasi ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya secara aktif. Tata kelola

kolaboratif terus diperkuat dalam kerangka sinergi multipihak untuk mendukung penyusunan rencana aksi lingkungan yang inklusif, berbasis bukti, dan adaptif terhadap dinamika daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang harmonis antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.

Arah Kebijakan Tahap III: Transformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Arah Kebijakan Tahap III diarahkan pada transformasi pengelolaan lingkungan hidup melalui pemanfaatan inovasi teknologi dan penguatan sistem persampahan berkelanjutan yang terintegrasi dengan kebijakan berbasis data. Transformasi ini bertujuan untuk mendorong perubahan paradigma pengelolaan lingkungan dari pendekatan konvensional menuju sistem yang lebih adaptif, efisien, dan prediktif. Penggunaan teknologi digital dan otomatisasi dalam pengawasan lingkungan akan menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kapasitas respon dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Sistem informasi lingkungan yang diperkuat diharapkan menjadi dasar perencanaan lintas sektor yang akurat dan akuntabel.

Di sisi lain, pembangunan sistem persampahan yang berkelanjutan difokuskan pada pendekatan ekonomi sirkular, pengurangan timbunan sampah sejak dari sumber, serta pengolahan yang ramah lingkungan dan bernilai guna. Strategi ini mencakup pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah terpadu, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pelibatan aktif masyarakat dan sektor swasta dalam seluruh rantai pengelolaan sampah. Integrasi antara inovasi teknologi dan sistem persampahan ini akan memperkuat penyusunan kebijakan dan intervensi berbasis data secara real-time, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, menekan beban lingkungan, dan memperkuat ketahanan daerah terhadap risiko ekologis. Dengan demikian, arah kebijakan ini menjadi pilar penting dalam mempercepat

tercapainya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan pembangunan yang ramah lingkungan.

Arah Kebijakan Tahap IV: Optimalisasi Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat dan Ekonomi Sirkular

Arah Kebijakan Tahap IV menekankan pada optimalisasi pengelolaan persampahan berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan pendekatan ekonomi sirkular. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan di sumber, pengumpulan, hingga pengolahan dan pemanfaatan kembali. Melalui peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat komunitas dan pemberdayaan kelompok masyarakat, pemerintah daerah mendorong terbentuknya sistem persampahan yang inklusif, adaptif, dan berbasis kebutuhan lokal. Pendekatan ini juga mencakup pelibatan UMKM dan koperasi dalam pengelolaan sampah bernilai ekonomi, guna menciptakan lapangan kerja hijau dan memperkuat ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Dalam kerangka ekonomi sirkular, kebijakan ini mendorong penggunaan kembali material, pengurangan sampah residu, serta penerapan teknologi ramah lingkungan yang efisien dan terjangkau. Pemerintah daerah akan memfasilitasi kemitraan antara masyarakat, swasta, dan lembaga riset untuk mengembangkan ekosistem pengelolaan sampah yang produktif dan berkelanjutan. Dengan penguatan regulasi, insentif, dan sistem monitoring yang berbasis data, arah kebijakan ini diharapkan mampu menekan timbulan sampah secara signifikan, meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat, serta memperkuat kontribusi sektor persampahan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Optimalisasi pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular menjadi strategi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Arah Kebijakan Tahap V: Penguatan Sistem Persampahan Cerdas dan Berbasis Teknologi untuk Mewujudkan Daerah Bebas Sampah dan Berkelanjutan

Arah Kebijakan Tahap V difokuskan pada penguatan sistem persampahan cerdas (smart waste management) yang berbasis teknologi untuk mewujudkan daerah bebas sampah dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk mentransformasi tata kelola persampahan dengan menerapkan solusi digital, seperti sistem pelaporan dan pemantauan berbasis aplikasi, sensor pemantau volume sampah, serta integrasi data spasial dalam pengelolaan rute pengangkutan dan titik pembuangan akhir. Teknologi ini diharapkan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya logistik, serta mempercepat pengambilan keputusan dalam pengendalian sampah. Selain itu, sistem persampahan cerdas juga mendorong keterbukaan data dan transparansi, sehingga memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan persampahan.

Selain aspek teknologi, penguatan sistem ini mencakup pembangunan infrastruktur digital, pengembangan aplikasi layanan publik terkait persampahan, serta pelatihan SDM aparatur dan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi lingkungan. Pemerintah daerah juga akan mendorong inovasi berbasis kemitraan dengan sektor swasta, komunitas lingkungan, dan institusi pendidikan untuk menciptakan ekosistem persampahan yang adaptif terhadap tantangan masa depan. Dengan pendekatan ini, sistem persampahan tidak hanya berfungsi sebagai layanan dasar, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mencapai target zero waste, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat posisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai daerah yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Misi 3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan Kredibel

Misi ketiga Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan Kredibel" adalah fondasi strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas manusia sebagai modal utama pembangunan daerah. Misi ini menekankan peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Selain itu, misi ini mengedepankan penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Melalui sinergi antara penguatan sumber daya manusia dan reformasi tata kelola, Tanjung Jabung Timur berkomitmen menciptakan lingkungan pemerintahan yang kredibel serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional dengan pengalaman pelayanan yang prima dan berorientasi pada keadilan sosial.

Tujuan 3.1 Arah Kebijakan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berdaya saing. Arah kebijakan bidang Sumber Daya Manusia dibagi berdasarkan sasaran-sasaran utama pembangunan manusia dan akan berkembang secara bertahap setiap tahunnya.

Tabel 3.14
Arah Kebijakan Pembangunan Misi 3 Tujuan 1

Tahap I	Tahap II	Tahap II	Tahap IV	Tahap V
Misi 3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan Kredibel dan Kondusif				
Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing				
Penguatan fondasi pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan sosial	Peningkatan akses pada pembangunan manusia yang berkualitas, responsif, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan kualitas pembangunan manusia secara kolaboratif dan berkelanjutan	Penguatan ekosistem pembangunan manusia untuk kesejahteraan sosial dan daya saing daerah	Mendorong kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif, berdaya saing, setara, dan sejahtera

Secara terperinci, arah kebijakan yang terkait dengan pada Misi 3 Tujuan 1 RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 dalam setiap tahap RPJMD dijelaskan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahap I: Penguatan Fondasi Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Berkeadilan Sosial

Pada tahun pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2025-2029, arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan yang inklusif, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan. Fokus utama meliputi pendidikan berkarakter dan literasi inklusif, transformasi layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, perlindungan sosial dan ketenagakerjaan yang responsif, serta perlindungan perempuan dan anak berbasis data gender. Kebijakan ini dirancang sebagai langkah awal transformasi fundamental melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif, dengan prinsip inklusivitas untuk memastikan akses setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, guna mewujudkan masyarakat yang sehat, berdaya, dan adil secara sosial.

Arah Kebijakan Tahap II: Peningkatan Akses pada Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Responsif, Inklusif, dan Berkelanjutan

Pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029, arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan pada peningkatan akses terhadap layanan yang berkualitas, responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Fase ini menjadi momentum akselerasi untuk memperkuat integrasi kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan kesetaraan gender guna mendorong pembangunan manusia yang berdaya saing dan berkeadilan sosial. Kebijakan dirancang untuk memperluas keterhubungan antar sektor, memanfaatkan teknologi, dan melibatkan multi-stakeholder, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang produktif, sehat, dan setara.

Arah Kebijakan Tahap III: Penguatan Kualitas Pembangunan Manusia Secara Kolaboratif dan Berkelanjutan

Pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029, arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memasuki fase konsolidasi dengan fokus pada penguatan kualitas layanan publik, ekonomi berkelanjutan, dan perlindungan sosial yang responsif melalui kolaborasi lintas sektor. Strategi ini bertujuan memperkuat capaian sebelumnya dan membangun landasan kokoh menuju target jangka menengah dan panjang, dengan menekankan inklusivitas, partisipasi kelompok rentan, dan peningkatan mutu layanan pendidikan serta kesehatan. Tahun ketiga menjadi momen strategis untuk memperluas dampak pembangunan, memperkuat keadilan sosial, serta meningkatkan daya saing dan ketahanan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan Tahap IV: Penguatan Ekosistem Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Sosial dan Daya Saing Daerah

Pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2025–2029, arah kebijakan pembangunan manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan pada penguatan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan sosial dan daya saing daerah. Fase ini menjadi momen akselerasi dan harmonisasi kebijakan melalui sinergi nilai-nilai lokal dan transformasi digital guna menciptakan SDM yang tangguh, adaptif, dan kompetitif. Penguatan identitas lokal, inovasi layanan publik, serta digitalisasi sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan UMKM menjadi pilar utama. Dengan prinsip kolaborasi lintas sektor dan inklusivitas, kebijakan ini diharapkan mampu memperluas dampak pembangunan secara merata dan menjadikan tahun keempat sebagai tonggak penting menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.

Arah Kebijakan Tahap V: Mendorong Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif, Berdaya Saing, Setara, dan Sejahtera

Pada tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2025–2029, arah kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan pada pemantapan hasil pembangunan manusia yang inklusif, tangguh, dan responsif terhadap tantangan multidimensi. Sebagai fase penutup, kebijakan ini bertujuan mengonsolidasikan seluruh capaian sebelumnya dengan menekankan peningkatan ketahanan sosial-ekonomi, penguatan daya saing SDM, serta pelembagaan layanan publik yang adil dan inklusif. Fokus diarahkan pada penyempurnaan sistem pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Tahun kelima menjadi landasan strategis untuk menyiapkan masyarakat yang lebih produktif, adaptif, dan setara dalam menghadapi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Tujuan 3.2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berdaya Saing

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berdaya saing. dalam mewujudkan hal tersebut, Arah kebijakan bidang tata kelola pemerintahan dibagi berdasarkan sasaran-sasaran utama dan akan berkembang secara bertahap setiap tahunnya.

Tabel 3.15
Arah Kebijakan Pembangunan Misi 3 Tujuan 2

Tahap I	Tahap II	Tahap II	Tahap IV	Tahap V
Misi 3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan Kredibel				
Tujuan 2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berdaya Saing				
Penguatan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, berbasis digital, dan kolaboratif	Penguatan kualitas layanan publik melalui peran ASN yang profesional dan pemanfaatan teknologi yang partisipatif	Penguatan efisiensi, layanan publik, manajemen aset daerah, dan penanggulangan risiko yang terintegrasi	Modernisasi infrastruktur dan layanan tata kelola digital yang mendukung ketahanan sosial-ekonomi, penguatan kompetensi, serta pelayanan publik yang inklusif	Konsolidasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang berdaya saing

Secara terperinci, arah kebijakan yang terkait dengan pada Misi 3 Tujuan 2 RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 dalam setiap tahap RPJMD dijelaskan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahap I: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Berbasis Digital, dan Kolaboratif

Pada periode pertama, fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang mengacu pada prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) untuk memastikan setiap rencana yang disusun memiliki tujuan yang jelas, terukur, realistis, relevan, dan tepat waktu. Penggunaan teknologi pengelolaan barang milik daerah juga dioptimalkan untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan

aset daerah. Selain itu, perluasan kerja sama lintas-institusi menjadi strategi penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kerja sama ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memperkuat riset, pengawasan, dan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pengembangan kompetensi ASN, organisasi masyarakat (Ormas), dan masyarakat umum dalam penanggulangan bencana menjadi prioritas utama. Melalui pelatihan intensif dan forum koordinasi yang berkelanjutan, kapasitas sumber daya manusia ditingkatkan agar mampu merespons dan mengelola risiko bencana secara efektif dan cepat. Kolaborasi erat dengan TNI, POLRI, serta sektor swasta dalam kesiapsiagaan dan pengadaan sarana prasarana bencana memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana alam maupun non-alam. Pendekatan terpadu ini tidak hanya meningkatkan kesiapan teknis, tetapi juga memperkuat jaringan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga respons terhadap bencana dapat dilakukan secara terkoordinasi dan tepat sasaran.

Periode ini juga menitikberatkan pada penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya melalui penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) yang konsisten dan efektif. Koordinasi lintas pihak dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal didukung oleh dokumen kebencanaan desa yang menjadi pedoman mitigasi risiko lokal. Selain itu, peningkatan kualitas, integritas, dan komitmen dalam pelayanan publik, baik digital maupun non-digital, menjadi prioritas utama untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di seluruh sektor pelayanan publik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus terjaga dan meningkat secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan Tahap II: Penguatan Kualitas Layanan Publik melalui Peran ASN yang Profesional dan Pemanfaatan Teknologi yang Partisipatif

Implementasi sistem keamanan yang terintegrasi dan didukung oleh Badan Cyber Nasional memastikan bahwa data pemerintah terlindungi dengan baik, sehingga kepercayaan publik terhadap layanan digital dapat terus meningkat. Selain itu, kualitas dokumen perencanaan yang mengacu pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) terus ditingkatkan untuk menjamin bahwa setiap rencana pembangunan memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan realistis. Penggunaan teknologi pengelolaan aset daerah juga dioptimalkan untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, sehingga aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Perluasan kerja sama lintas-institusi menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pendapatan asli daerah (PAD). Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diupayakan agar dapat memperkuat riset, pengawasan, dan pelaksanaan program pembangunan secara efektif. Dalam konteks kesiapsiagaan bencana, kolaborasi yang erat dengan TNI, POLRI, dan sektor swasta diperkuat untuk memastikan kesiapan teknis dan logistik dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Pengadaan sarana dan prasarana bencana yang memadai serta koordinasi yang terintegrasi antar pemangku kepentingan menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan daerah yang tangguh dan responsif terhadap risiko bencana.

Penguatan ketahanan sosial-ekonomi menjadi fokus penting dengan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang konsisten dan efektif. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penegakan aturan yang tegas dan koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi prioritas, dengan dukungan dokumen kebencanaan desa sebagai pedoman mitigasi risiko lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang merata.

Pengembangan kompetensi ASN, organisasi masyarakat (Ormas), dan masyarakat umum terus dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, termasuk pendidikan toleransi sejak dini sebagai upaya membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Peningkatan kualitas dan komitmen dalam pelayanan publik, baik digital maupun non-digital, menjadi prioritas utama untuk memberikan layanan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Dukungan keamanan siber dari Badan Cyber Nasional memperkuat integritas layanan digital, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan aman dan nyaman. Dengan demikian, pelayanan publik yang prima dapat terwujud secara terpadu, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Arah Kebijakan Tahap III: Penguatan efisiensi, Layanan Publik, Manajemen Aset Daerah, dan Penanggulangan Risiko yang Terintegrasi

Pada periode ketiga, peningkatan keamanan data pemerintahan elektronik menjadi fokus utama untuk melindungi informasi strategis dan sensitif dari ancaman siber yang semakin kompleks dan beragam. Pemerintah mengimplementasikan sistem keamanan yang terintegrasi dan canggih, didukung oleh Badan Cyber Nasional, guna memastikan bahwa seluruh data dan transaksi digital terlindungi secara optimal. Keamanan ini tidak hanya menjaga kerahasiaan data, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Selain itu, kualitas perencanaan pembangunan terus ditingkatkan dengan mengacu pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), sehingga setiap dokumen perencanaan memiliki tujuan yang jelas, terukur, realistis, relevan, dan tepat waktu. Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan aset daerah juga dioptimalkan untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, sehingga aset publik dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Perluasan kerja sama lintas-institusi menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pendapatan asli daerah (PAD). Sinergi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diupayakan untuk memperkuat riset, pengawasan, dan pelaksanaan program pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks kesiapsiagaan bencana, kolaborasi yang solid dengan TNI, POLRI, dan sektor swasta diperkuat untuk memastikan kesiapan teknis dan logistik dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam maupun non-alam. Pengadaan sarana dan prasarana bencana yang memadai serta koordinasi yang terintegrasi antar pemangku kepentingan menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan daerah yang tangguh dan responsif. Pendekatan ini memungkinkan respons cepat dan terkoordinasi, meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat dan infrastruktur.

Penguatan ketahanan sosial-ekonomi menjadi fokus utama dengan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang konsisten dan efektif. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penegakan aturan yang tegas dan koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi prioritas, dengan dukungan dokumen kebencanaan desa sebagai pedoman mitigasi risiko lokal. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang merata, sekaligus memperkuat rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi masyarakat (Ormas), dan masyarakat umum terus dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, termasuk pendidikan toleransi sejak dini sebagai upaya membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Peningkatan kualitas dan komitmen dalam pelayanan publik, baik digital maupun non-digital, menjadi prioritas utama untuk memberikan layanan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Dukungan keamanan siber dari Badan

Cyber Nasional memperkuat integritas layanan digital, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan aman dan nyaman. Dengan demikian, pelayanan publik yang prima dapat terwujud secara terpadu, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang modern dan efektif.

Arah Kebijakan Tahap IV: Modernisasi Infrastruktur dan Layanan Tata Kelola Digital yang Mendukung Ketahanan Sosial-Ekonomi, Penguatan Kompetensi, serta Pelayanan Publik yang Inklusif

Pada periode keempat, fokus utama diarahkan pada peningkatan infrastruktur teknologi informasi (TI) yang handal dan aman untuk mendukung pemerintahan elektronik. Keamanan data menjadi prioritas utama, dengan penerapan sistem keamanan siber yang terintegrasi dan canggih, didukung oleh Badan Cyber Nasional. Langkah ini bertujuan melindungi data strategis dan sensitif dari ancaman siber yang semakin kompleks, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Selain itu, kualitas perencanaan pembangunan terus ditingkatkan dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), memastikan setiap rencana memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan realistis. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset daerah juga dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, sehingga aset publik dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kerja sama lintas-institusi diperluas untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pendapatan asli daerah (PAD). Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperkuat guna memperkuat riset, pengawasan, dan pelaksanaan program pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam hal kesiapsiagaan bencana, kolaborasi erat dengan TNI, POLRI, dan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan kesiapan teknis dan logistik menghadapi berbagai ancaman bencana alam maupun non-alam. Pengadaan sarana dan prasarana bencana yang memadai serta koordinasi

terintegrasi antar pemangku kepentingan menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan daerah yang tangguh dan responsif. Pendekatan ini memungkinkan respons cepat dan terkoordinasi, meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat dan infrastruktur.

Penguatan ketahanan sosial-ekonomi menjadi fokus utama dengan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang konsisten dan efektif. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penegakan aturan yang tegas dan koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi prioritas, dengan dukungan dokumen kebencanaan desa sebagai pedoman mitigasi risiko lokal. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang merata, sekaligus memperkuat rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi masyarakat (Ormas), dan masyarakat umum terus dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, termasuk pendidikan toleransi sejak dini sebagai upaya membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Peningkatan kualitas dan komitmen dalam pelayanan publik, baik digital maupun non-digital, menjadi prioritas utama untuk memberikan layanan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Dukungan keamanan siber dari Badan Cyber Nasional memperkuat integritas layanan digital, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan aman dan nyaman. Dengan demikian, pelayanan publik yang prima dapat terwujud secara terpadu, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang modern dan efektif.

Arah Kebijakan Tahap V: Konsolidasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital yang Berdaya Saing

Pada periode kelima atau terakhir ini, peningkatan infrastruktur teknologi informasi (TI) digital menjadi prioritas utama untuk mendukung transformasi pemerintahan elektronik yang lebih modern dan efisien. Pemerintah berfokus pada penguatan sistem keamanan data yang komprehensif dan terintegrasi, dengan dukungan penuh dari Badan Cyber Nasional. Langkah ini bertujuan melindungi data strategis dan sensitif dari ancaman siber yang semakin kompleks dan beragam, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Selain itu, kualitas perencanaan pembangunan terus ditingkatkan dengan mengacu pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), sehingga setiap dokumen perencanaan memiliki tujuan yang jelas, terukur, realistis, relevan, dan tepat waktu. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset daerah juga dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, sehingga aset publik dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kerja sama lintas-institusi diperluas dan diperkuat sebagai strategi utama untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pendapatan asli daerah (PAD). Sinergi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diupayakan untuk memperkuat riset, pengawasan, dan pelaksanaan program pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks kesiapsiagaan bencana, kolaborasi yang solid dengan TNI, POLRI, dan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan kesiapan teknis dan logistik dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam maupun non-alam. Pengadaan sarana dan prasarana bencana yang memadai serta koordinasi yang terintegrasi antarpemangku kepentingan menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan daerah yang tangguh dan responsif. Pendekatan ini memungkinkan respons cepat dan terkoordinasi, sehingga dampak bencana terhadap masyarakat dan infrastruktur dapat diminimalkan secara signifikan.

Penguatan ketahanan sosial-ekonomi menjadi fokus utama dengan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang konsisten dan efektif. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penegakan aturan yang tegas dan koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi prioritas utama. Dukungan dokumen kebencanaan desa sebagai pedoman mitigasi risiko lokal turut memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang merata, sekaligus memperkuat rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi masyarakat, dan masyarakat umum terus dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, termasuk pendidikan toleransi sejak dini sebagai upaya membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Peningkatan kualitas dan komitmen dalam pelayanan publik, baik digital maupun non-digital, menjadi prioritas utama untuk memberikan layanan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Dukungan keamanan siber dari Badan Cyber Nasional memperkuat integritas layanan digital, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan aman dan nyaman. Dengan demikian, pelayanan publik yang prima dapat terwujud secara terpadu, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang modern dan efektif.

3.5 Program Prioritas Daerah

Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2025–2029 mengusung slogan "MERATA", yang merupakan akronim dari visi *Membangun Bersama Rakyat Sejahtera dan Bahagia*. Slogan ini bukan sekadar narasi politik, melainkan wujud komitmen strategis untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan

berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten, dengan menempatkan rakyat sebagai subjek sekaligus mitra pembangunan. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 8 agenda utama pembangunan yang terintegrasi dalam pendekatan berbasis desa — dikenal sebagai program "MERATA" — yang mencakup aspek infrastruktur, lingkungan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan pemuda, ketentraman sosial, serta penguatan nilai spiritual dan moral masyarakat. Agenda ini disusun secara komprehensif sebagai langkah nyata menghadirkan pembangunan yang menjangkau seluruh pelosok wilayah dan seluruh lapisan masyarakat. Agenda "MERATA" ini sejalan dan mendukung arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, yang menekankan pembangunan wilayah berbasis keunggulan lokal, pengurangan ketimpangan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penguatan pelayanan dasar. Dalam konteks yang lebih luas, seluruh agenda tersebut juga selaras dengan RPJMN 2025–2029, khususnya dalam mendukung pencapaian isi Indonesia Emas 2045 yang mengedepankan pembangunan sumber daya manusia unggul, pembangunan berkelanjutan dan inklusif, serta pemerataan kesejahteraan di wilayah-wilayah tertinggal dan perdesaan. Melalui sinergi antara visi daerah dengan arah pembangunan provinsi dan nasional, delapan agenda "MERATA" menjadi instrumen nyata untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka menengah, memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat lokal, serta menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai entitas daerah yang berkontribusi aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Delapan Agenda MERATA tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Lancar Desaque

Agenda pembangunan ini berfokus pada infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan diposisikan sebagai fondasi penggerak roda ekonomi desa. Aksesibilitas yang merata akan memperkecil kesenjangan antarwilayah, membuka peluang distribusi hasil produksi, dan memperkuat hubungan antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis desa.

2. **Terang Desaque**

Terang Desaque tidak hanya berfokus pada aspek fisik seperti penerangan, tetapi juga membangun sistem sosial yang menjamin keamanan dan ketertiban. Ini mencakup penguatan pranata sosial, sistem keamanan komunitas, dan pendekatan pencegahan konflik berbasis komunitas.

3. **Bening Desaque**

Agenda pembangunan ini menempatkan air sebagai layanan publik yang esensial dan instrumen penting dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Pemerataan air layak minum juga menjadi strategi dalam penguatan daya tahan masyarakat terhadap risiko lingkungan dan penyakit.

4. **Hijau Desaque**

Agenda ini menekankan pentingnya integrasi perlindungan lingkungan dalam seluruh sektor pembangunan. Kelestarian sumber daya alam dipandang sebagai aset pembangunan jangka panjang, dengan pendekatan konservasi, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon di tingkat lokal.

5. **Ramai Desaque**

Pemuda dipandang sebagai aktor perubahan dan sumber daya pembangunan masa depan. Ramai Desaque adalah kerangka untuk menciptakan ruang partisipasi pemuda melalui pemberdayaan, peningkatan keterampilan, dan akses terhadap aktivitas produktif serta budaya yang konstruktif.

6. **Cerdas Desaque**

Agenda ini menekankan pentingnya intervensi afirmatif bagi keluarga berpenghasilan rendah agar anak-anak mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak. Cerdas Desaque adalah bentuk dari investasi sosial untuk menciptakan SDM unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

7. Bahagia Desaque

Konsep ini mencakup jaminan layanan kesehatan universal, peningkatan gizi anak, serta penguatan sistem kesehatan primer di desa. Bahagia Desaque mengedepankan pendekatan promotif dan preventif sebagai strategi membangun masyarakat yang sehat dan tangguh sejak usia dini.

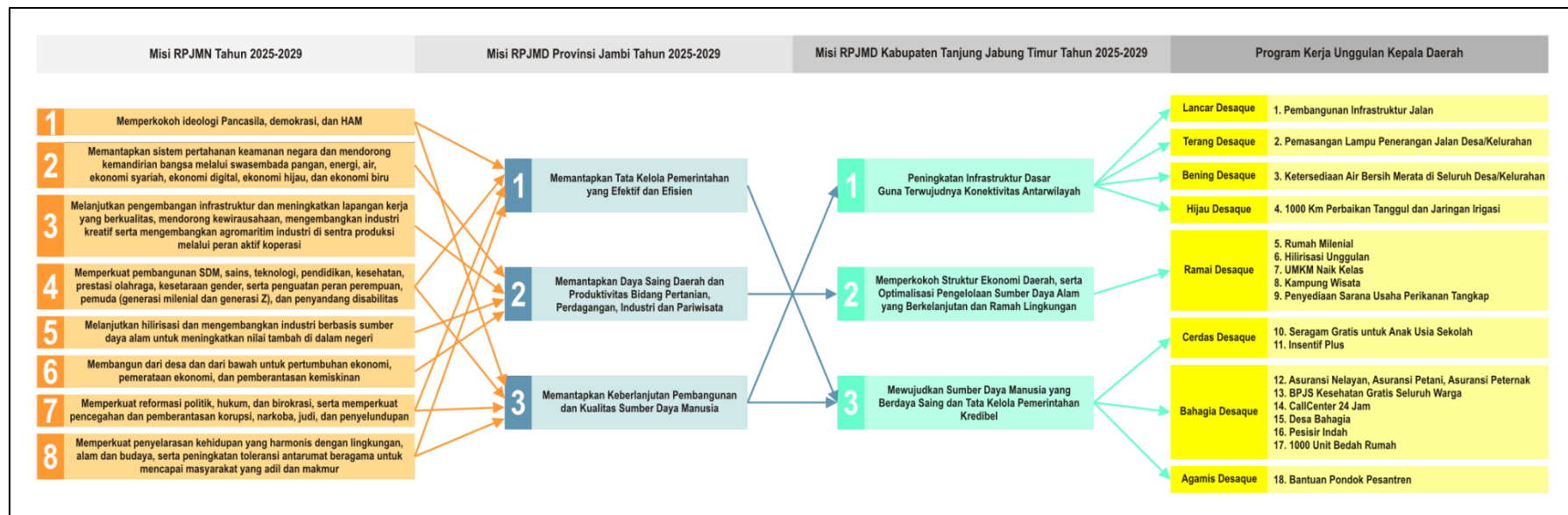
8. Agamis Desaque

Agenda ini menempatkan nilai-nilai keagamaan sebagai kekuatan penggerak pembangunan moral, sosial, dan solidaritas antarwarga. Dukungan terhadap sarana ibadah dan lembaga keagamaan menjadi bagian dari penguatan identitas, etika kolektif, dan integrasi sosial di tingkat desa.

Delapan Agenda Pembangunan Merata ini kemudian diturunkan menjadi 18 (delapan belas) Program Kerja Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029. Program Kerja Unggulan ini secara strategis dipetakan untuk memastikan selaras dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi, dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.2

Sinkronisasi Program Kerja Unggulan Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029



Dalam upaya mewujudkan Visi “Membangun Bersama Rakyat Untuk Sejahtera dan Bahagia”, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mengimplementasikan serangkaian program prioritas daerah selama periode 2025-2029. Program prioritas daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2025-2029 berfokus pada pembangunan yang inklusif, berbasis bukti, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prioritas utama meliputi peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Program-program ini akan menjadi landasan utama bagi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lima tahun ke depan. Program-program ini dirancang untuk menjawab permasalahan krusial dan memastikan pemerataan akses, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 3.16
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
Misi 1: Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Antarwilayah	T1.1.Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Pilar Infrastruktur		
		S1.1.1.Terwujudnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antarwilayah yang berkualitas		Indeks Konektivitas		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	Penyelenggaraan Jalan	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
				Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas sungai	Pengelolaan Pelayaran	
		S1.1.2.Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas		Luas Kawasan kumuh		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Pengembangan Perumahan	
				Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni		
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
			Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Pengelolaan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU Tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Peningkatan Pelayanan Seritifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya akses Masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persampahan Regional	
			Meningkatnya akses Masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
Misi 2: Memperkokoh Struktur	T2.1.Mewujudkan kesejahteraan ekonomi			Pertumbuhan ekonomi Indeks Gini Pendapatan per capita		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
Ekonomi Daerah, Serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan	yang berdaya saing dan berkelanjutan	S2.1.1.Terwujudnya daya saing sektor pertanian dan perikanan		Pertumbuhan sektor pertanian		
			Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan	Pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	Pengelolaan perikanan tangkap	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan tangkap	Pengelolaan perikanan budidaya	
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Tingkat pencemaran/ kesehatan lingkungan perairan darat	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Persentase produk perikanan yang telah dijual dalam bentuk olahan	Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produksi pertanian (masing masing jenis produk)	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Indeks prasarana produksi pertanian (lahan; jaringan irigasi; bendungan; jalan usaha tani dan prasarana lainnya)	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	
			Meningkatnya pengendalian Kesehatan hewan dan	Produksi produk peternakan yang memenuhi standar	Pengendalian Kesehatan hewan	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			Kesehatan Masyarakat veteriner		dan Kesehatan Masyarakat veteriner	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Produktivitas Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Usaha pertanian yang memiliki ijin	Perizinan usaha pertanian	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	kelas kelompok tani	Penyuluhan pertanian	
			Meningkatnya perlindungan Masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses Masyarakat terhadap irigasi	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	Pengelolaan Sumber Daya Air	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	ketersediaan pangan pokok per capita	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Infrastruktur fasilitas desa dalam kondisi baik	Penataan Desa	
			Meningkatnya efektivitas Kerjasama desa	Dimensi ketahanan ekonomi dari IDM	Penataan Kerjasama desa	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	IKM pelayanan di tingkat desa	Administrasi Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat dalam Pembangunan	Dimensi ketahanan sosial dari IDM	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
			Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	
			Meningkatnya kualitas Pembangunan Kawasan transmigrasi	persentase luas wilayah transmigrasi yang berkembang	Pembangunan Kawasan transmigrasi	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan transmigrasi	persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	Pengembangan Kawasan transmigrasi	
		S2.1.2.Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah		Pertumbuhan sektor industri pengolahan Indeks daya saing daerah		
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Pelayanan Izin usaha simpan pinjam	
			Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	pengelola koperasi yang profesional	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Koperasi Sehat (%)	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	UMKM yang naik kelas (%)	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (umkm)	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor	Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Omset per usaha industri yang dibina	Perencanaan dan Pembangunan industri	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Usaha industri yang memiliki izin	Pengendalian Izin Usaha Industri	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	pemanfaatan atau ketersediaan data industri nasional di Tanjabtim	Pengelolaan sistem informasi industri nasional	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Nilai realisasi investasi	Pengembangan iklim penanaman modal	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Jumlah perusahaan investasi	Promosi Penanaman Modal	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	IKM bidang izin investasi	Pelayanan Penanaman Modal	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Kasus penanaman modal yang dapat diselesaikan	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Catatan: ini bukan programnya penanaman modal tapi Perindustrian)	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	
			Meningkatnya efektivitas Kerjasama penanaman modal	Persentase Kerjasama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	Kerjasama penanaman modal	
		S2.1.3.Meningkatnya pertumbuhan sektor		Pertumbuhan sektor perdagangan dan sektor akomodasi, makan minum		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
		perdagangan dan pariwisata				
			Meningkatnya daya Tarik destinasi pariwisata	Destinasi wisata dalam kondisi baik (termasuk akses dan atraksinya)	Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Pemasaran pariwisata	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang telah memiliki HAKI	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah produksi ekonomi kreatif (jenis jenis produk ekonomi kreatif)	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Pelaku usaha perdagangan yang berizin	Perizinan dan pendaftaran Perusahaan	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Sarana dan prasarana perdagangan yang memenuhi standar	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi	Fluktuasi harga kebutuhan pokok	Stabilisasi harga barang kebutuhan	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		pokok dan barang penting	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor rendah	Pengembangan ekspor	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Kasus kasus ketidakamanan produk yang diperdagangkan	Standarisasi dan perlindungan konsumen	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	nilai produk lokal yang dijual keluar daerah	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	
	T2.2.Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
		S2.2.1.Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Pengendalian Bahan dan Limbah B3	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
			Meningkatnya tata Kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (di proxy pakai Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%))	Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Daerah	Penyelenggaraan Penataan Ruang	
Misi 3: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang	T3.1.Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang unggul dan berdaya saing			IPM		
		S3.1.1.Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas		Rata- rata lama sekolah Harapan Lama Sekolah		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
Berdaya Saing Dan Tatakelola Pemerintahan Kredibel dan Kondusif			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	APS (Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP)	Pengelolaan Pendidikan	
			Meningkatnya Mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik Persentase Kualifikasi Guru S1	Pendidik dan tenaga Pendidikan	
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Tingkat Kegemaran Membaca	Pembinaan perpustakaan	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	
			Meningkatnya kualitas perpustakaan dan pustakawan	Persentase Pustakawan yang memiliki Sertifikat Profesi di bidang perpustakaan	Akreditasi Perpustakaan dan sertifikasi pustakawan	
		S3.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup		
			Meningkatnya kualitas Kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
				Persentase Pelayanan Persalinan di Fasilitas Layanan Kesehatan		
			Meningkatnya Mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Mutu : Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan Distribusi : Ketersediaan 12 Jenis SDM Kesehatan di Puskesmas Ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar Rumah Sakit	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan makanan minuman	Persentase cakupan kesediaan farmasi dan Alat Kesehatan	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Pengendalian Penduduk	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam pembinaan	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
		S3.1.3..Meningkatnya Standar Kehidupan Layak		Angka Kemiskinan Pengeluaran Per Kapita		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase TKS/Relawan Sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial Persentase Lembaga di bidang Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan Sosial	Pemberdayaan Sosial	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang di luar HIV/AIDS yang dipenuhi kebutuhan dasarnya (hanya pada disabilitas)	Rehabilitasi Sosial	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang dipenuhi kebutuhan dasarnya	Perlindungan dan Jaminan Sosial	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
				Persentase Penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan Data Fakir Miskin Persentase keluarga miskin rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Perencanaan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga Kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan Data tenaga kerja yang berkompetensi	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Penempatan tenaga kerja	
			Meningkatnya pekerja	Persentase Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Hubungan industrial	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase atlet yang berprestasi	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan	Pengembangan kapasitas kepramukaan	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi Masyarakat terhadap tinjauan Sejarah lokal	Pengembangan kebudayaan	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang ditetapkan	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	
		S3.1.4.Meningkatnya Kualitas Hidup antargender		Indeks Pembangunan Gender		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan Peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan	
			Menurunnya kekerasan terhadap Perempuan	Data Jumlah Kekerasan Perempuan	Perlindungan perempuan	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif	Peningkatan kualitas keluarga	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan Perempuan dan anak	gender dan hak anak sesuai standar		
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Persentase desa/kelurahan layak anak	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif . Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Perlindungan Khusus Anak	
				Indeks Reformasi Birokrasi		
	T3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdaya saing	S3.2.1.Meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel		Nilai SAKIP Indeks pemerintahan digital Indeks perencanaan daerah IPKD Maturitas SPIP IP ASN Indeks Sistem Merit Indeks digitalisasi arsip Indeks inovasi daerah		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah	persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase keselarasan RPJMD dengan renstra PD persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada Bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangannya	tindak lanjut pengawasan BPK keselarasan RPJMD dengan renstra PD	Penyelenggaraan pengawasan	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas APIP	perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	
			Meningkatnya tata Kelola anggaran	temuan BPK yang ditindaklanjuti	Pengelolaan keuangan daerah	
			Meningkatnya tata Kelola aset daerah	persentase penambahan aset tetap	Pengelolaan barang milik daerah	
			Meningkatnya Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	pertumbuhan komponen pembentuk PAD (pajak, retribusi, lain lain PAD yang sah)	Pengelolaan pendapatan daerah	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip	Pengelolaan Arsip	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Perlindungan dan penyelamatan arsip	
			Meningkatnya akses Masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	persentase akses Masyarakat yang menggunakan arsip yang bersifat tertutup	Perizinan penggunaan arsip	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan	persentase SDM bidang kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya	Akreditasi dan sertifikasi	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	persentase rekomendasi kebijakan Pembangunan daerah yang dijadikan landasan dalam implementasi Pembangunan	penelitian dan pengembangan daerah	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Riset dan inovasi daerah	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	capaian kinerja sasaran daerah bidang tata kelola pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia	Pemerintahan dan otonomi daerah	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang dihasilkan	Fasilitasi dan koordinasi hukum	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	efektivitas Kerjasama daerah Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Perekonomian dan pembangunan	
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan dan ukpbj	kebijakan pelayanan pengadaan barang dan jasa	
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	persentase produk hukum yang dihasilkan	Kualitas produk hukum	
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	efektivitas kebijakan administrasi pembangunan	Kebijakan administrasi Pembangunan	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan pelaksanaan jadwal kerja dewan (cara menghitungnya adalah dengan membandingkan rencana kerja dewan dengan realisasi kerjanya)	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	indeks sistem merit	Kepegawaian daerah	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Kompetensi ASN	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			Meningkatnya tata Kelola pengembangan karir ASN	persentase perkembangan karir asn sesuai kompetensinya Persentase ASN dengan nilai SKP terbaik	Pengelolaan pengembangan karir ASN dan penilaian kinerja ASN	
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	persentase realisasi diklat yang dilaksanakan	Analisis kebutuhan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial, dan fungsional	Pegawai daerah yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Program pengembangan SDM	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggul	persentase produk inovasi yang dimanfaatkan Persentase hasil penelitian yang menjadi dasar pengambilan kebijakan Persentase inovasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	persentase aplikasi informatika yang dimanfaatkan	Pengelolaan aplikasi informatika	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	indeks Pembangunan statistic (IPS)	penyelenggaraan statistic sektoral	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	penyelenggaraan persandian untuk keamanan Informasi	
		S3.2.2.Meningkatnya kondisi daerah yang aman, nyaman dan harmonis		angka kriminalitas Indeks demokrasi indonesia Indeks harmoni indonesia Indeks risiko bencana		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Pelanggaran terhadap ketertiban yang diselesaikan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Penanggulangan bencana	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	respon cepat penanggulangan kebakaran non kebakaran	pencegahan, penanggulangan, serta penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	peningkatan kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	persentase Pendidikan politik pada kader partai politik	Peningkatan etika dan budaya politik	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas aktif	pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	persentase kebijakan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	ketahanan ekonomi, social, dan budaya Masyarakat	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Penanganan konflik sosial	
		S3.2.3.Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks pelayanan publik		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	persentase kepemilikan identitas kependudukan digital (ini sudah termasuk KTP, akte kelahiran dll)	Persentase Penduduk	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	persentase kepemilikan dokumen catatan sipil (termasuk akta kematian, kelahiran, perkawinan)	Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	persentase Informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	cakupan pengelolaan profil kependudukan	Pengelolaan profil kependudukan	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Pelayanan penanaman modal	
			Meningkatnya kualitas pelayanan di kecamatan	sarana dan prasarana kecamatan dalam kondisi baik	Optimalisasi sarana dan prasarana Masyarakat di Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas pegawai di kecamatan	persentase penyelesaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Peningkatan SDM Perencanaan di Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit Tingkat C	persentase cakupan ketersediaan alat kesehatan	Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Tingkat C	

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama lima tahun. Keberhasilan pencapaian Visi “Membangun Bersama Rakyat Untuk Sejahtera dan Bahagia” serta misi Kepala Daerah terpilih sangat bergantung pada sinergi, efektivitas program, dan kinerja optimal dari setiap Perangkat Daerah.

4.1 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah akan diorientasikan pada pencapaian target-target spesifik yang tercantum dalam arah kebijakan setiap tahunnya. Berikut program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama lima tahun ke depan:

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	233.479.296.052	100	199.650.562.861	100	187.106.114.545	100	190.674.038.175	100	195.476.034.234	100	197.223.968.967	100	1.203.610.014.834	Dinas Pendidikan
2	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Menengah (APS PAUD)	Angka Kemendikbud	73,07	75,16	75.163.754.765	77,25	82.234.567.907	79,34	100.398.731.629	81,44	102.314.987.470	83,53	103.925.742.191	85,62	105.927.973.527	83,53	569.965.757.489	Dinas Pendidikan

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Menengah (APS SD dan SMP)	Angka Kemendikbud	97,93	98,63		99,27		99,91		100		100		100		100		
		Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Menengah (APS Kesetaraan)	Angka Kemendikbud	9,29	10,06		10,82		11,58		12,35		13,11		17,87		17,87		
3	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	Jumlah Pendidik/Guru yang dibutuhkan di satuan pendidikan dibagi dengan Jumlah Pendidik/Guru yang tersedia di Satuan Pendidikan dikali 100 persen	NA	56,00	865.090.000	58,00	876.897.023	60,00	987.765.765	75,00	1.009.887.456	85,00	1.123.687.938	90,00	1.228.772.923	100,00	6.092.101.105	Dinas Pendidikan

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Jumlah guru yang bersertifikat pendidik dibagi total Jumlah Guru x 100 persen	49,16	50,07		50,56		51,06		51,56		52,05		52,05				
4	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	73.530.529.426	100	68.525.616.606	100	69.896.128.909	100	69.896.128.909	100	72.005.078.224	100	71.020.553.106	100	424.874.035.180	Dinas Kesehatan
5	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah Kematian Ibu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000 KH	121,06/100.000 KH	112,22/100.000 KH	52.960.525.950	103,38/100.000 KH	42.368.420.700	94,54/100.000 KH	43.009.666.300	85,70/100.000 KH	43.009.666.300	76,86/100.000 KH	44.385.975.600	68/100.000 KH	45.184.923.100	68/100.000 KH	270.919.177.950	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Data Kemenkes	23,90	22,09		20,48		18,87		17,27		15,67		14,07		14,07		
		Indeks Pencapaian	Data Kemendagri	80,16%	83,11%		86,49%		89,87%		93,25%		96,63%		100,00		100		

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Standar Pelayanan Minimal Kesehatan																	
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Jumlah penduduk yang memiliki Jaminan kesehatan di bagi Jumlah Total penduduk dalam satu tahun yang sama di kali 100 (Data BPJS)	88,01%	98,60%		98,88%		99,16%		99,44%		99,72%		100%		100%		
		Persentase Pelayanan Persalinan di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin di Fayankes dibagi jumlah total ibu bersalin dalam satu tahun yang sama di kali 100	82,33%	85,27%		88,21%		91,15%		94,09%		97,03%		100%		100%		
6	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Jumlah SDM Bidang Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya dibagi total SDM Kesehatan x 100	NA	50%	533.659.500	60%	560.342.400	70%	577.152.600	80%	577.152.600	90%	582.924.000	100%	588.753.000	100%	3.419.984.100	Dinas Kesehatan

No.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Puskesmas dengan Jenis SDM Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar di bagi jumlah seluruh puskesmas di wilayah tanjung jabung timur di kali 100	41,18%	47,65%		54,12%		60,59%		67,06%		73,53%		80%		80%		
		Persentase Rumah Sakit dengan Jenis SDM Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dengan Jenis SDM Kesehatan Sesuai Standar di bagi Jumlah Rumah Sakit dalam satu wilayah yang sama di kali 100	50%	50%		50%		100%		100%		100%						
7	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Jumlah Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dibagi target x 100	NA	36%	403.088.600	44%	378.903.284	52%	369.134.000	59%	369.134.000	67%	380.507.100	75%	379.911.700	75%	2.280.678.684	Dinas Kesehatan
8	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Jumlah Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan dibagi target x 100	NA	45%	100.390.000	55%	103.401.700	65%	106.503.000	75%	106.503.000	85%	115.182.900	95%	111.727.400	95%	643.708.000	Dinas Kesehatan

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
9	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	39.890.370.560	100	35.360.000.000	100	35.730.800.000	100	36.112.724.000	100	36.506.105.720	100	36.506.105.720	100	220.106.106.000	Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah
10	1.02.02 PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD	Survey Permenpan RB No 14 tahun 2017	88,42	88,50	10.344.397.456	88,80	3.917.245.461	89,00	4.258.655.776	89,30	4.276.444.298	89,70	4.298.188.590	90	4.729.150.940	90	31.824.082.521	Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah
11	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Jumlah SDM Bidang Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya dibagi total SDM Kesehatan x 100	70,58	71,00	1.638.212.284	72	1.880.000.000	73	2.060.000.000	74	2.240.000.000	75	2.420.000.000	76	2.600.000.000	76	12.838.212.284	Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah

No.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
12	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	9.043.102.607	100	7.243.776.895	100	7.716.219.180	100	7.687.251.645	100	7.664.206.330	100	7.685.523.781	100	37.996.977.832	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Luas Daerah Irigasi Rawa Pertanian dan Perkebunan dalam Kondisi Baik (Ha)/Total Luas Daerah Irigasi Rawa Pertanian dan Perkebunan) X 100%	60,92%	62,17	26.783.745.893	63,17	21.454.525.962	64,17	22.853.799.494	65,17	22.768.003.817	66,17	22.699.748.498	67,17	22.762.886.253	67,17	112.538.964.024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	Panjang Jalan Kondisi Mantap/Panjang Jalan Kabupaten x 100%	16,67%	17,13	128.652.711.196	20,04	103.054.402.601	18,58	109.775.655.644	23,21	109.363.545.762	21,58	109.035.689.014	24,92	109.338.964.118	24,92	540.568.257.139	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
15	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	Jumlah Tenaga kerja konstruksi kualifikasi Terampil/ Total Angkatan Kerja Bidang Konstruksi x 100	40%	50%	299.505.233		239.912.028		255.559.195		254.599.798		253.836.543		254.542.571		1.258.450.135	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diselesaikan dibagi Total Pelanggaran x 100	90%	91	1.141.101.239	92	914.053.854	93	973.668.845	94	970.013.585	95	967.105.618	96	969.795.555	96	4.794.637.456	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					23.811.418.197		15.163.570.325		17.919.759.327		17.500.799.278		17.082.238.207		17.015.211.304			
18	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sarana Umum Masyarakat dan Akses Berkelanjutan terhadap Air Bersih	Jumlah Sambungan Rumah (SR) Bukan Jaringan Perpipaan yang terlayani / Total Jumlah Rumah	14,57	14,90	2.985.995.604	15,31	1.496.301.071	15,81	1.768.274.523	16,38	1.726.932.652	17,04	1.685.630.151	17,78	1.679.016.113	17,78	8.356.154.510	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tangga X 100																
19	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupate n / Kota	Jumlah Sambungan Rumah (SR) Jaringan Perpipaan yang terlayani / Total Jumlah Rumah Tangga X 100	25,60	26,92	2.985.995 .604	28,32	3.519.575 .047	29,80	4.195.659 .347	31,36	4.092.889 .794	33,00	3.990.218 .109	34,73	3.973.776 .625	34,73	19.772.11 8.922	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Terbangunnya TPS3R di Setiap Kecamatan	Jumlah Terbangunnya TPS3R di Setiap Kecamatan / Jumlah Kecamatan x 100	18,18	27,27	-	36,36	200.000.0 00	45,45	200.000.0 00	54,55	200.000.0 00	63,64	200.000.0 00	72,73	200.000.0 00	72,73	1.000.000 .000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
21	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan	jumlah Rumah Tangga dengan sanitasi layak / total rumah tangga x 100	43,96	44,46	2.512.824 .768	45,03	1.259.192 .206	45,69	1.488.067 .836	46,43	1.453.277 .136	47,25	1.418.519 .567	48,16	1.412.953 .612	48,16	7.032.010 .358	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)																	
22	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Panjang Drainase yang terbangun dalam kondisi baik / total panjang draenase x 100	NN	16,67	2.012.039.897	33,33	1.008.245.775	50	1.191.508.415	66,66666667	1.163.651.209	83,33333333	1.135.820.532	100	1.131.363.824	100	5.630.589.755	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	Panjang Jalan Lingkungan yang ditangani dalam kondisi baik / total panjang Jalan Lingkungan x 100	68,99	75,03	15.326.602.222	82,27	7.680.256.225	95,31	9.076.249.206	96,00	8.864.048.487	96,50	8.652.049.848	97,00	8.618.101.129	97,00	42.890.704.896	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					38.683.917.126		19.384.752.799		22.908.200.202		22.372.611.497		21.837.532.838		21.751.847.217		108.254.944.553	

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
25	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	23.998.604.486	100	12.025.850.794	100	14.211.715.798	100	13.879.448.994	100	13.547.498.611	100	13.494.341.240	100	67.158.855.438	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26		Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Jumlah Luas permukiman kumuh yang ditangani dibagi Total Luasan Kumuh x 100	3,12	4,16	1.057.530.676	5,20	529.935.235	6,24	626.258.307	7,28	611.616.525	8,32	596.988.686	9,36	594.646.235	9,36	2.959.444.989	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah tidak Layak Huni yang ditangani dibagi Jumlah Total Rumah Tidak Layak Huni x 100	33,87	38,01	0	42,42	500.000.000	47,10	500.000.000	52,04	500.000.000	57,26	500.000.000	62,74	500.000.000	62,74	2.500.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
28	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Jumlah Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) dibagi Total Perumahan x 100	NA	10,00	13.627.781.964	15,00	6.328.966.770	20,00	7.570.226.097	25,00	7.381.545.978	30,00	7.193.045.541	35,00	7.162.859.741	35,00	35.636.644.127	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
29	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	7.898.971.890	100	5.956.099.339	100	6.070.867.721	100	6.097.800.792	100	6.125.272.525	100	6.153.293.692	100	38.302.305.960	Satpol PP dan Damkar
30	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perdamaian yang Ditegakkan	Jumlah Pelanggaran Perdamaian yang di tangani / Jumlah Pelanggaran Perdamaian x 100	100,00	100	479.745.779	100	361.744.991	100	368.715.474	100	370.351.260	100	372.019.761	100	373.721.633	100	2.326.298.897	Satpol PP dan Damkar
31		Persentase Penyelenggaraan	Jumlah Penyelenggaraan Tibumtranm	NA	100		100		100		100								

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
32		Tibumtramas	as dibagi target x 100																
		Persentase PNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah PNS yang Ditingkatkan Kompetensinya menjadi PPNS dibagi Targetx 100	NA	16,67		33,33		50		66,67		83,33		100,00		100,00		
33	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di kecamatan dibagi Jumlah Kecamatan x 100	NA	63,64	1.021.196.944	72,73	770.017.988	81,82	784.855.504	90,91	788.337.472	100	791.889.080	100	795.511.720	100	4.951.808.707	
34	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata rata Capaian Kegiatan Perencanaan Penganggaran Administrasi Keuangan Kepegawaian Umum Pengadaan Barang Jasa dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100%	3.594.299.898	100%	3.511.364.656	100%	3.581.702.614	100%	3.598.602.442	100%	3.606.140.266	100%	3.606.328.847	100%	21.498.438.723	Badan Kesbangpol

N o.	NOMENKLA TUR PROGRAM	INDIKAT OR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIA N KINERJ A AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3 5	8.01.02 PROGRAM PENGUATA N IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSA AN	Persenta se Masyarak at Memaha mi Nilai Pancasila	Jumlah peserta yang Mengikuti Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaa an dibagi Total Target Peserta X 100	100	100%	1.217.588 .860	100%	1.217.588 .860	100%	1.217.588 .860	100%	1.217.588 .860	100%	1.232.588 .860	100%	1.242.588 .860	100%	7.345.533 .160	Badan Kesbang pol
3 6	8.01.03 PROGRAM PENINGKAT AN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKA N MELALUI PENDIDIK AN POLITIK DAN PENGEMBA NGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persenta se peningkat an jumlah masyarak at yang ikut pemilu	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipa si Dalam Pilkada th n dibagi jumlah masyarakat yg memiliki hak pilih dalam pilkada th n X 100	84,00	84%	1.015.078 .020	84%	1.015.078 .020	84%	1.015.078 .020	84%	1.015.078 .020	92%	1.015.078 .020	92%	1.028.078 .020	92%	6.103.468 .120	Badan Kesbang pol
3 7	8.01.04 PROGRAM PEMBERDA YAN DAN PENGAWAS AN ORGANISA SI KEMASYAR AKATAN	Persenta se Ormas yang aktif	jumlah ormas yang aktif / total jumlah ormas x 100	39,29	39,29	59.174.68 0	42,86	59.174.68 0	46,43	59.174.68 0	50,00	59.174.68 0	53,57	64.174.68 0	57,14	64.174.68 0	57,14	365.048.0 80	Badan Kesbang pol

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
38	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Dibagi Jumlah Total Target X100	100,00	100%	108.810.400	100%	108.810.400	100%	108.810.400	100%	108.810.400	100%	113.810.400	100%	113.810.400	100%	662.862.400	Badan Kesbang pol
39	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase konflik yang difasilitasi	Realisasi Konflik Yang Difasilitasi / Total konflik X 100	100	100%	818.430.940	100%	670.000.000	100%	670.000.000	100%	685.000.000	100%	685.000.000	100%	695.000.000	100%	4.223.430.940	Badan Kesbang pol
40	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang.	100	100%	0	100%	5.173.065.000	100%	5.263.093.990	100%	5.263.093.000	100%	5.318.992.000	100%	5.347.782.000	100%	26.366.025.990	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

N o.	NOMENKLA TUR PROGRAM	INDIKAT OR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIA N KINERJ A AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			jasa, dan pemeliharaaa n barang miik daerah																
4 1	1.05.03 PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA	Persenta se Cakupan Penyebar an Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	jumlah warga yang mendapatka n informasi dibagi jumlah penduduk x 100%	NA	20,10%	0	24,71%	1.293.266 .374	29,33%	1.315.773 .499	33,76%	1.315.774 .489	38,56%	1.329.748 .009	43,17%	1.336.945 .816	43,17%	6.591.508 .187	Badan Penangg ulangan Bencana Daerah
4 2		Persenta se Penanga nan Tanggap Darurat Bencana	jumlah kejadian bencana dibagi kejadian bencana yang ditindaklanj uti x 100%	100%	100		100%		100%		100%		100%		100%				
4 3		Persenta se Penanga nan Pasca Bencana	Jumlah Penangana n Pasca Bencana dibagi jumlah kejadian bencana x 100%	100%	100		100%		100%		100%		100%		100%				
4 4	2.07 URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG TENAGA KERJA					5.771.684 .133		6.376.948 .446		6.484.553 .181		6.506.485 .946		6.519.057 .367		6.522.280 .216		38.181.00 9.289	

N o.	NOMENKLA TUR PROGRAM	INDIKAT OR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIA N KINERJ A AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4 5	2.07.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Persenta se Terlaksan anya Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaa n, penganggar an, administrasi keuangan, kepegawaia n, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaa n barang milik daerah	100	100	5.328.400 .507	100	5.236.948 .446	100	5.224.553 .181	100	5.246.485 .946	100	5.239.057 .367	100	5.132.280 .216	100	31.407.72 5.662,78	Dinas Tenaga Kerja dan Transmig rasi
4 6	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIV ITAS TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja yang mendapa tkan Pelatihan	Jumlah tenaga kerja yang dilatih (... orang) dibagi Jumlah Total Tenaga Kerja yang mendaftar (... orang) X 100	66,67	67,00	153.275.4 30	68,00	720.000.0 00	68,50	810.000.0 00	69,00	810.000.0 00	69,50	810.000.0 00	70,00	900.000.0 00	70,00	4.203.275 .430,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmig rasi
4 7	2.07.04 PROGRAM PENEMPAT AN TENAGA KERJA	Persenta se Tenaga Kerja yang Ditempat kan di Dalam Negeri	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan didalam negeri/ total jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar x 100	53,44	54,00	100.995.7 96	56,00	170.000.0 00	57,00	180.000.0 00	57,50	170.000.0 00	58,00	180.000.0 00	59,00	200.000.0 00	60,00	1.000.995 .796,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmig rasi

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
48	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Jumlah Pekerja (orang) pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	5.432	5.432	189.012.400	5.452	250.000.000	5.470	270.000.000	5.480	280.000.000	5.490	290.000.000	5.500	290.000.000	5.500	1.569.012.400,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
49	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					335.312.312		450.000.000		450.000.000		450.000.000		470.000.000		500.000.000		2.655.312.312,00	
50	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Jumlah Eks Transmigran yang dibina / target x 100	60	62	335.312.312	64	450.000.000	65	450.000.000	66	450.000.000	68	470.000.000	70	500.000.000	70	2.655.312.312,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
51	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.632.071.404		5.421.236.352		5.501.886.837		5.540.941.380		5.580.777.013		5.621.409.359		33.298.322.345	

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
52	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	4.739.949.401	100	4.562.510.693	100	4.630.386.114	100	4.663.254.404	100	4.696.780.059	100	4.730.976.228	100	28.023.856.899	Dinas Sosial, PPPA
53	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial dibagi Total Jumlah Pekerja Sosial/TKS x 100	100	100	254.676.900	100	245.143.140	100	248.790.078	100	250.556.088	100	252.357.417	100	254.194.773	100	1.505.718.397	Dinas Sosial, PPPA

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
54		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA dibagi total Pekerja Sosial x 100	100	100		100		100		100		100		100		100		
55		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan	Jumlah Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan	21,51	25,00		30,00		35,00		40,00		45,00		50,00		50,00		

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar Target x 100																
56		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial dibagi Total Pekerja Sosial x 100	84,62	84,62		88,46		90,38		92,31		94,23		100,00		100,00		
57		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Jumlah Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial dibagi total Lembaga sosial x 100	28,57	28,57		42,86		57,14		71,43		85,71		100,00		100,00		

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
58	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Bantuan dibagi dengan Jumlah Keseluruhan Disabilitas (sesuai data Perangkat Daerah) dikali 100	3,63	3,85	115.918.701	3,90	111.579.316	3,95	113.239.256	4,00	114.043.073	4,50	114.862.965	3,85	115.699.256	3,85	685.342.568	Dinas Sosial, PPPA
59		Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia Yang Mendapatkan Bantuan Permakanaan dibagi dengan Jumlah Keseluruhan Lanjut Usia (sesuai data Perangkat Daerah) dikali 100	0,29	0,50		0,55		0,60		0,65		0,70		0,75		0,75		
60	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar dibagi target x 100	55,29	58,18	368.132.565	60,93	354.351.623	64,16	359.623.230	67,75	362.175.977	71,77	364.779.778	76,29	367.435.655	76,29	2.176.498.827	Dinas Sosial, PPPA
61		Persentase Daerah yang Melaksanakan	Jumlah Daerah yang Melaksanakan	100	100		100		100		100		100		100		100		

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		akan Pengelolaan Data Fakir Miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin dibagi target x 100																
62	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana dibagi Jumlah Korban Bencana x 100	100	100	153.393.836	100	147.651.580	100	149.848.158	100	150.911.839	100	151.996.794	100	153.103.447	100	906.905.655	Dinas Sosial, PPPA
63		Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial dibagi target x 100	100	100		100		100		100		100		100		100		

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
64	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					992.516.916		955.362.317		969.575.022		976.457.445		983.477.516		990.637.988		5.868.027.204	
65	2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi total anggaran x 100	12,51	13,00		13,25	13,50		13,75		14,00		14,00		14,00		Dinas Sosial, PPPA	
66		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Data BPS	42,47	45,00	135.080.083		130.023.397		131.957.725		132.894.413		133.849.834		134.824.364	798.629.816		
67	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar dibagi target x 100	100	100	695.392.859	100	669.361.017	100	679.318.947	100	684.141.018	100	689.059.531	100	694.076.414	100	4.111.349.786	Dinas Sosial, PPPA

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
68	2.08.06 PROGRAM PEMEMUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Data BPS	60,31	60,50	77.256.532	60,75	74.364.455	61,00	75.470.758	61,25	76.006.479	61,50	76.552.914	61,75	77.110.278	61,75	456.761.415	Dinas Sosial, PPPA
69	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif target x 100	100	100	84.787.443	100	81.613.448	100	82.827.592	100	83.415.535	100	84.015.237	100	84.626.932	100	501.286.187	Dinas Sosial, PPPA
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Data BPS	84,14	85,00		85,10		85,20		85,30		85,40		85,50		85,50		
71	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100,00	100,00	11.226.628.148,00	100,00	11.767.584.050,00	100,00	11.767.584.050,00	100,00	11.767.584.050,00	100,00	11.767.584.050,00	100	11.767.584.050,00	100	70.064.548.398,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
72	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN	Peningkatan Produksi	Jumlah Produksi Tanaman	16,67	20,00	3.860.883.000,00	40,00	3.861.067.811,00	60,00	4.206.680.447,00	80,00	4.296.919.037,77	100,00	3.909.392.458,60	100,00	4.003.337.889,75	100	24.138.280.644,12	Dinas Tanaman Pangan

N o.	NOMENKLA TUR PROGRAM	INDIKAT OR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIA N KINERJ A AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
7 3	N DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Tanaman Pangan	Pangan dibagi target x 100															dan Hortikultu ra	
		Peningka tan Produksi Hortikultu ra	Jumlah Produksi Hortikultura dibagi target x 100	16,67	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		100		
7 4	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAA N DAN PENGEMBA NGAN PRASARAN A PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapka n Menjadi LP2B	Jumlah Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B dibagi target x 100	34,86	38,98	502.189.5 00,00	43,09	502.189.5 00,00	47,21	502.189.5 00,00	51,33	502.189.5 00,00	55,45	502.189.5 00,00	59,56	502.189.5 00,00	59,56	3.013.137 .000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultu ra
7 5	3.27.05 PROGRAM PENGENDA LIAN DAN PENANGGU LANGAN BENCANA PERTANIAN	Persenta se Penanga nan Bencana Pertanian	Jumlah Penangana n Bencana Pertanian dibagi target x 100	16,67	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		100	1.949.691 .100,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultu ra
7 6		Persenta se Penanga nan Dampak Perubaha n Iklim Terhadap Pertanian	Jumlah Penangana n Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian dibagi target x 100	16,67	20,00	109.115.1 00,00	40,00	368.115.2 00,00	60,00	368.115.2 00,00	80,00	368.115.2 00,00	100,00	368.115.2 00,00	100,00	368.115.2 00,00	100		
7 7	3.27.07 PROGRAM PENYULUH AN PERTANIAN	Persenta se SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatk an	Jumlah SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan dibagi total penyuluh x 100	19,05	28,57	1.829.757 .784,00	38,10	1.829.757 .784,00	47,62	1.829.757 .784,00	57,14	1.829.757 .784,00	66,67	1.829.757 .784,00	76,19	1.829.757 .784,00	76,19	10.978.54 6.704,00	

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
78		Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Jumlah Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi dibagi target x 100	NA	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
79	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	4.019.549.190	100	3.778.973.539	100	3.853.407.696	100	3.866.824.235	100	3.880.509.104	100	3.894.467.671	100	23.293.731.436	Dinas Lingkungan Hidup
80	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti dibagi target x 100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
81	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	Indeks Kualitas Air	Cukup Jelas	61	67,40	379.464.090	67,45	361.540.745	67,5	367.086.232	67,55	368.085.790	67,6	369.105.339	67,65	370.145.278	67,65	2.215.427.474	Dinas Lingkungan Hidup
82		Indeks Kualitas Udara		95,45	74,83		74,88		74,93		74,98		75,03		75,08				

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
83	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lahan		53,42	77,14		77,19		77,24		77,29		77,39		77,39		77,39		
84	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Jumlah Usaha/ Kegiatan Dengan Rintek LB3 yang Memenuhi Syarat dibagi Jumlah Usaha/Kegiatan Memiliki Rintek LB3 X 100	100	100	11.579.634	100	10.886.577	100	11.101.009	100	11.139.659	100	11.179.083	100	11.219.295	100	67.105.257	Dinas Lingkungan Hidup
85	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang taat undang-undang dibagi Jumlah Persetujuan Lingkungan yang diverifikasi Kelayakannya X 100	100	100	85.598.470	100	80.475.282	100	82.060.397	100	82.346.110	100	82.637.536	100	82.934.792	100	496.052.587	Dinas Lingkungan Hidup

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
86	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Pengangkutan Sampah ke TPA Perhari (ton) dibagi dengan Kemampuan Daya Angkut Sarana Prasarana Pengangkutan Sampah per Hari (ton) X 100	100	100	4.432.811.687	100	4.159.721.014	100	4.244.215.326	100	4.259.445.178	100	4.274.979.627	100	4.290.824.765	100	25.661.997.597	Dinas Lingkungan Hidup
87	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	4.917.877.514	100	357.892.880	100	#REF!	100	4.200.470.881	100	4.223.546.318	100	4.230.731.264	100	#REF!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
88	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Jumlah Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital dibagi Jumlah Penduduk x 100	1,22	30%	248.542.200	30%	230.000.000	30%	235.000.000	30%	240.000.000	30%	245.000.000	30%	258.000.000	30%	1.456.542.200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
89	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak dibagi Total Jumlah Anak x 100	62,97	62%	107.365,987	63%	90.000,000	64%	95.000,000	65%	100.000,000	66%	105.000,000	67%	110.000,000	67%	607.365,987	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
90		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan / Jumlah kematian yang dilaporkan x 100	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
91		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan dibagi jumlah kelahiran yang dilaporkan x 100	98,45	99,5%		99,5%		99,5%		99,5%		99,5%		99,5%				
92		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Jumlah Akta Perkawinan yang Diterbitkan dibagi jumlah perkawinan yang dilaporkan x 100	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
93		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang	Jumlah Akta Perceraian yang Diterbitkan dibagi Jumlah Perceraian	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%				

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Melaporkan	yang dilaporkan x 100																
94	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	#REF!	Jumlah Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan dibagi total informasi kependudukan x 100	15%	35%	389.350.000	36%	370.000.000	38%	390.000.000	40%	398.000.000	42%	400.000.000	44%	410.000.000	46%	2.357.350.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
95	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	#REF!	Jumlah Profil Kependudukan dibagi target x 100	100%	100	20.250.000	100	18.000.000	100	18.500.000	100	18.600.000	100	19.000.000	100	20.000.000	100	114.350.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
96	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	Survey Permenpan RB No 14 Tahun 2017	3,0	3,1	3.472.728.581	3,2	3.411.783.377	3,3	3.456.898.631	3,4	3.476.349.755	3,5	3.496.189.901	3,6	3.516.426.850	3,6	20.830.377.095	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
97	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya dibagi target x 100	NA	17,91	439.949.880	31,33	432.228.910	44,76	437.944.430	62,67	440.408.636	80,57	442.922.126	100,00	445.485.887	100,00	2.638.939.868	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
98		Persentase Fasilitasi Tata	Jumlah Tata Kelola Desa yang difasilitasi	NA	54,79		68,49		79,45		86,30		93,15		100		100,00		Dinas Pemberdayaan Masvara

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Kelola Desa	dibagi target x 100																kat dan Desa
9 9	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dibagi target x 100	NA	16,67		33,33		50,00		66,67		83,33		100		100		8.092.873 .599
1 0 0	KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat dibagi target x 100	NA	20,55	1.349.200 .416	41,10	1.325.522 .409	61,6	1.343.050 .274	75,34	1.350.607 .290	82,2	1.358.315 .446	100	1.366.177 .765	100		
1 0 1	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	7.441.271 .647	100	5.371.308 .152	100	5.479.731 .677	100	5.562.151 .901	100	5.646.505 .280	100	5.732.837 .596		27.792.53 4.605	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
1 0 2	2.14.02 PROGRAM PENGENDALAN	Angka Kelahiran Total	Data BKKBN (rata-rata)	2,25	2,23	877.848.7 76	2,20	633.654.6 37	2,17	646.445.3 89	2,15	656.168.5 25	2,12	666.119.7 15	2,10	676.304.3 61	2,10	3.278.692 .628	Dinas Pengendalian

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
103	LIAN PENDUDUK	(TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun	anak per wanita usia 15-49 Tahun)																Penduduk dan KB
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19 Tahun)	Data BKKBN (kelahiran per 1000 wanita usia 15-19 Tahun)	22,42	22,05		21,65		21,00		19,75		19,35		19,05		19,05		
104	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	Data BKKN (Jumlah peserta KB Aktif Modern dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100)	73,19	74,15	3.639.982 .233	74,95	2.627.436 .165	75,25	2.680.472 .759	76,15	2.720.789 .545	77,15	2.762.051 .954	78,00	2.804.282 .384	78,00	13.595.03 2.807	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
105		Presentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Data BKKN (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x100)	6,52	6,40		6,25		5,85		5,50		5,15		5,00		5,00		

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
106	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga dibagi Target x 100	26,21	27,25	412.571.900	28,25	297.805.391	29,25	303.816.796	30,25	308.386.481	31,25	313.063.348	32,25	317.849.934	32,25	1.540.921.950	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
107	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	6.069.834.757	100	6.009.481.622	100	6.107.189.828	100	6.138.420.851	100	6.170.276.494	100	6.202.769.250	100	30.628.138.045	Dinas Perhubungan
108	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat	Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap dibagi dengan Jumlah kendaraan yang telah membayar paiaK X 100	0,25	0,27	166.576.645	0,28	164.920.353	0,29	167.601.794	0,3	168.458.878	0,31	169.333.104	0,32	170.224.814	0,32	840.538.943	Dinas Perhubungan

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
109		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Jumlah Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal dibagi Jumlah Kelengkapan Jalan yang ideal x 100	6%	7%		8%		9%		10%		11%		12%		12%		
110	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Sungai	Jumlah Dermaga dalam Kondisi Baik dibagi dengan Jumlah Dermaga X 100	49,6	50,78125	519.916.250	51,1627907	514.746.657	51,53846154	523.115.927	51,90839695	525.791.043	52,27272727	528.519.662	52,63157895	531.302.854	52,63157895	2.623.476.142	Dinas Perhubungan
111	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.944.051.473		6.921.505.386		7.053.825.879		7.080.675.588		7.108.062.290		7.135.996.727		35.300.065.870	
112	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang,	100	100	3.997.931.316	100	3.483.323.746	100	3.549.915.491	100,0	3.563.427.902	100	3.577.210.561	100	3.591.268.874	100	17.765.146.574	Dinas Komunikasi dan Informatika

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah																
113	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Survey	NA	68,00	2.186.488.079	72,00	1.905.046.696	76,00	1.941.466.045	78,00	1.948.856.048	80,00	1.956.393.852	82,00	1.964.082.411	82,00	9.715.845.053	Dinas Komunikasi dan Informatika
114	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	Menpan RB	2,83	2,83	1.759.632.078	2,85	1.533.134.943	2,87	1.562.444.344	2,90	1.568.391.637	2,92	1.574.457.877	2,97	1.580.645.442	2,97	7.819.074.243	Dinas Komunikasi dan Informatika
115	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					97.341.170		84.811.565		86.432.933		86.761.931		87.097.510		87.439.800		432.543.739	
116	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	BPS	2,2	2,3	97.341.170	2,4	84.811.565	2,5	86.432.933	2,6	86.761.931	2,7	87.097.510	2,75	87.439.800	2,75	432.543.739	Dinas Komunikasi dan Informatika
117	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					56.637.295		49.347.030		50.290.412		50.481.837		50.677.091		50.876.251		251.672.621	

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR OR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIA N KINERJ A AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
118	PERSANDIAN																		
	2.21.02 PROGRAM PENYELEN GGARAAN PERSANDIA N UNTUK PENGAMAN AN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengama nan Informasi Pemerint ah Daerah (KAMI)	BSSN	NA	Tingkat I	56.637.29 5	Tingkat I	49.347.03 0	Tingkat I	50.290.41 2	Tingkat II	50.481.83 7	Tingkat II	50.677.09 1	Tingkat II	50.876.25 1	Tingkat II	251.672.6 21	Dinas Komunik asi dan Informati ka
119	2.17.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Persenta se Terlaksan anya Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaa n, penganggar an, administrasi keuangan, kepegawaia n, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaa an barang milik daerah	100	100	3.937.105 .612	100	4.321.498 .704	100	4.385.502 .379	100	4.414.107 .482	100	4.443.284 .686	100	4.473.045 .435	100	25.974.54 4.297	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga h
120	2.17.02 PROGRAM PELAYANA N IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbu han Volume Usaha Koperasi	Jumlah Volume Usaha Koperasi tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n-1 x 100	5,00	10	30.725.81 1	15	33.725.67 7	20	34.225.17 2	25	34.448.41 0	30	34.676.11 4	35	34.908.37 2	35	202.709.5 55	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga h
121	2.17.03 PROGRAM PENGAWAS AN DAN PEMERIKSA AN KOPERASI	Persenta se Pengawa san dan Pemeriks aan Koperasi	Jumlah Pengawas an dan Pemeriksaa n Koperasi dibagi target x 100	92,16	20,00	49.878.99 7	40,00	54.748.85 4	60,00	55.559.71 3	73,33	55.922.11 0	86,67	56.291.75 5	100,00	56.668.79 2	100,00	329.070.2 22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga h

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1 2 2	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN N KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi aktif / total jumlah koperasi x 100	18,35	15,14	91.828.114	22,97	100.793.607	30,81	102.286.413	38,65	102.953.592	46,49	103.634.114	54,32	104.328.247	54,32	605.824.086	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 2 3	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan dibagi total koperasi aktif x 100	24,00	2,10	223.710.266	19,58	245.551.865	39,16	249.188.618	59,44	250.813.988	79,72	252.471.866	100,00	254.162.901	100,00	1.475.899.504	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 2 4	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Jumlah Koperasi yang Berkualitas dibagi total koperasi aktif x 100	5,88	0,70	64.179.280	2,10	70.445.322	3,50	71.488.655	4,90	71.954.950	6,99	72.430.572	8,39	72.915.705	8,39	423.414.483	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 2 5	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Jumlah Usaha mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal dibagi total usaha mikro x 100	20,36	1,44	229.753.678	3,17	252.185.316	5,19	255.920.313	6,92	257.589.592	8,65	259.292.257	10,39	261.028.975	10,39	1.515.770.131	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 2 6	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi Usaha Mikro Menjalinkan Kemitraan	Jumlah Usaha Mikro Menjalinkan Kemitraan dibagi total UMKM x 100	10,71	0,11	79.707.327	0,23	87.489.427	0,34	88.785.191	0,46	89.364.306	0,57	89.955.003	0,69	90.557.514	0,69	525.858.768	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIA N KINERJ A AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1 2 7	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	4.695.767.252	100	4.986.306.087	100	5.112.551.783	100	5.154.256.449	100	5.161.977.697	100	5.161.977.697	700	30.272.836.965	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1 2 8	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Total Realisasi Investasi sampai dengan Tahun N - Realisasi Investasi yang Tahun N yang tercatat dalam LKPM (RP)	357.912.787.334	357.912.787.334	20.000.000	358.270.700.121,33	180.000.000	358.628.970.821,46	150.000.000	358.987.599.792,28	150.000.000	359.346.587.392,07	170.000.000	359.705.933.979,46	170.000.000	2.510.765.366.774,60	840.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1 2 9	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Jumlah Investor yang Berinvestasi dibagi target x 100	50	50,00	56.125.000	55,00	110.000.000	60,00	120.000.000	65,00	120.000.000	70,00	120.000.000	70,00	120.000.000	420,00	646.125.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

N o.	NOMENKLA TUR PROGRAM	INDIKAT OR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIA N KINERJ A AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1 3 0	2.18.04 PROGRAM PELAYANA N PENANAMA N MODAL	Persenta se Pelaku Usaha yang Mempero leh Izin Sesuai Ketentua n	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperole h Izin Sesuai Ketentuan dibagi total Pelaku Usaha x 100	75	75	189.592.5 80	80	240.000.0 00	85	240.000.0 00	90	245.000.0 00	95	245.000.0 00	95	245.000.0 00	595	1.404.592 .580	Dinas Penana man Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
1 3 1	2.18.05 PROGRAM PENGENDA LIAN PELAKSANA AN PENANAMA N MODAL	Persenta se Penyeles aian Permasala han dan Hambata n yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Jumlah Penyelesaia n Permasalah an dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha dibagi target x 100	100	100	81.575.00 0	100	160.000.0 00	100	160.000.0 00	100	160.000.0 00	100	170.000.0 00	100	170.000.0 00	700,0	901.575.0 00	Dinas Penana man Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
1 3 2	2.18.06 PROGRAM PENGELOLA AN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMA N MODAL	Persenta se Pemanfa atan Data dan Informasi Penanam an Modal	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang dimanfaatka n dibagi target x 100	100	100	76.637.50 0	100	80.000.00 0	100	80.000.00 0	100	80.000.00 0	100	80.000.00 0	100	80.000.00 0	700	476.637.5 00	Dinas Penana man Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
1 3 3	Kerja Sama Penanaman Modal	Persenta se Kerja Sama Penanam an Modal yang Ditindakla niuti	(Kerjasama penanaman modal yang ditindaklanj uti / Traget)*100	N/A	0	0	50	60.000.00 0	60	60.000.00 0	70	60.000.00 0	80	70.000.00 0	90	70.000.00 0	350	320.000.0 00	Dinas Penana man Modal dan Pelayana n Terpadu

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																			Satu Pintu
134	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					7.330.783.090		6.670.554.682		6.746.922.716		6.781.844.761		6.807.450.472		6.826.643.116		41.164.198.837	
135	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	6.120.422.090	100	5.572.042.682	100	5.630.356.716	100	5.663.130.761	100	5.685.319.472	100	5.698.414.116	100	34.369.685.837	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
136	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan tahun ini dikurang tahun lalu /jumlah kunjungan wisatawan tahun lalu x 100	3,76	4,00	480.886.000	4,25	460.665.000	4,50	462.873.000	4,75	463.773.000	5,00	464.508.000	5,50	465.350.000	5,50	2.798.055.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
137	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran	Jumlah media pemasaran wisatawan tahun ini dikurang tahun lalu	25	20,00	539.475.000	33,00	447.847.000	37,50	457.693.000	36,36	460.941.000	40,00	463.623.000	42,86	467.879.000	42,86	2.837.458.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda

N o.	NOMENKLA TUR PROGRAM	INDIKAT OR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIA N KINERJ A AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pariwisat a	/jumlah pemasaran wisata tahun lalu x 100																dan Olahraga
1 3 8	3.26.05 PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA PARIWISAT A DAN EKONOMI KREATIF	Persenta se Ekonomi Kreatif yang Aktif	Jumlah Ekonomi Kreatif yang Aktif dan dibagi total ekonomi kreatif x 100	7,14	6,67	190.000.0 00	6,25	190.000.0 00	5,88	196.000.0 00	5,56	194.000.0 00	5,26	194.000.0 00	5,00	195.000.0 00	5,00	1.159.000 .000	Dinas Pariwisat a, Kebudaya an, Pemuda dan Olahraga
1 3 9	2.22 URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYA AN					1.412.512 .000		1.270.128 .000		1.285.263 .000		1.290.313 .000		1.294.475 .000		1.300.257 .000		7.852.948 .000	
1 4 0	2.22.02 PROGRAM PENGEMBA NGAN KEBUDAYA AN	Tingkat Partisipas i Masyarak at Terhadap Pengemb angan Kebudaya an	Jumlah Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengemban gan Kebudayaa n dibagi target x 100	NA	0,98	318.012.0 00	1,45	293.362.0 00	1,91	295.983.0 00	2,34	297.088.0 00	2,74	297.569.0 00	3,11	298.577.0 00	3,11	1.800.591 .000	Dinas Pariwisat a, Kebudaya an, Pemuda dan Olahraga
1 4 1	2.22.03 PROGRAM PENGEMBA NGAN KESENIAN TRADISION AL	Persenta se Kesenian Tradision al yang Dilestarik an dan Dikemban gkan	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembang kan dibagi target x 100	NA		958.500.0 00	300,00	863.823.0 00	75,00	873.887.0 00	14,00	877.019.0 00	13,00	879.583.0 00	22,00	883.622.0 00	22,00	5.336.434 .000	Dinas Pariwisat a, Kebudaya an, Pemuda dan Olahraga

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
142	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan / total cagar budaya x 100	100	100	136.000.000	100	112.943.000	100	115.393.000	100	116.206.000	100	117.323.000	100	118.058.000	100	715.923.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan dibagi total cagar budaya x 100	100	100		100		100		100		100		100		100		
144	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					5.887.846.800		5.377.369.800		5.425.442.800		5.436.644.000		5.459.073.000		5.487.339.000		33.073.715.400	
145	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirasaha Pemuda	Jumlah Wirasaha Pemuda dibagi total wira usaha x 100	NA		177.800.000	100,00	170.508.000	100,00	171.283.000	50,00	171.615.000	33,00	172.035.000	38,00	175.601.000	38,00	1.038.842.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase Atlet yang Berprestasi	Jumlah Atlet yang Berprestasi dibagi total atlet x 100	7	11	5.360.046.800	14	4.886.861.800	18	4.934.159.800	21	4.965.029.000	25	4.987.038.000	28	4.991.738.000	28	30.124.873.400	
146	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN																		

N o.	NOMENKLA TUR PROGRAM	INDIKAT OR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIA N KINERJ A AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1 4 7	2.19.04 PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS KEPRAMUK AAN	Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Kepramu kaan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Kepramuka an dibagi target x 100	100	100	350.000.0 00	100	320.000.0 00	100	320.000.0 00	100	300.000.0 00	100	300.000.0 00	100	320.000.0 00	100	1.910.000 .000	Dinas Pariwisat a, Kebudaya an, Pemuda dan Olahraga
1 4 8	2.23 URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERPUSTA KAAAN					6.638.820 .343		4.438.711 .183		4.514.326 .302		4.546.039 .165		4.578.386 .286		4.611.380 .348		29.327.66 3.628	
1 4 9	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Persenta se Terlaksana nya Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan perencanaa n, penganggar an, administrasi keuangan, kepegawaia n, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaa n barang milik daerah	100	100,0	5.546.023 .699	100,0	3.708.068 .021	100,0	3.771.236 .359	100,0	3.797.729 .061	100,0	3.824.751 .617	100,0	3.852.314 .624	100,0	24.500.12 3.382	Dinas Perpusta kaan Kearsipa n
1 5 0	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTA KAAAN	Nilai Tingkat Kegemar an Membaca Masyarak at	#REF!	68,86	69,0	992.796.6 44	70,0	630.643.1 62	71,0	643.089.9 44	72,0	648.310.1 04	73,0	653.634.6 69	74,0	659.065.7 24	74,0	4.227.540 .247	Dinas Perpusta kaan Kearsipa n
1 5 1	2.23.03 PROGRAM PELESTARI AN KOLEKSI NASIONAL	Persenta se Koleksi Nasional dan Naskah	Jumlah koleksi buku yg tersedia / jumlah koleksi buku per	NA	16,7	100.000.0 00	33,3	100.000.0 00	50,0	100.000.0 00	66,7	100.000.0 00	83,3	100.000.0 00	100,0	100.000.0 00	100,0	600.000.0 00	Dinas Perpusta kaan Kearsipa n

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	DAN NASKAH KUNO	Kuno yang Dimiliki	eksemplar yg tersedia x 100																
152	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					188.151.101		125.797.710		127.940.721		128.839.497		129.756.248		130.691.334		831.176.610	
153	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	Jumlah realisasi OPD yg mengelola Arsip dengan baku / jumlah OPD x 100	2,38	4,76	163.151.101	7,14	100.797.710	9,52	102.940.721	9,52	103.839.497	9,52	104.756.248	9,52	105.691.334	9,52	681.176.610	Dinas Perpustakaan Kearsipan
154	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Kegiatan penyelesaian program perlindungan dan penyelamatan arsip/target x 100	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	150.000.000	Dinas Perpustakaan Kearsipan
155	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan	100,00	100,00	4.850.344.114,00	100,00	6.004.267.555,00	100,00	6.086.684.801,00	100,00	6.098.767.857,00	100,00	6.111.210.800,00	100,00	6.124.020.781,00	100,00	35.275.295.908,00	Dinas Perikanan

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			n barang milik daerah																
156	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Realisasi Produksi Perikanan tangkap/target*100	89,56	90,16	856.161.420,00	90,77	1.151.319.600,00	91,58	1.162.832.700,00	92,39	1.174.461.100,00	93,22	1.186.205.700,00	94,25	1.198.067.700,00	94,25	6.729.048.220,00	Dinas Perikanan
157	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Realisasi Produksi Perikanan Budidaya/target*100	81,33	82,04	379.365.461,00	82,76	475.368.200,00	83,48	480.121.800,00	84,21	484.923.100,00	84,94	489.772.300,00	85,69	494.670.000,00	85,69	2.804.220.861,00	Dinas Perikanan
158	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pembinaan nelayan	Jumlah Pembinaan/ sosialisasi dibagi kecamatan wilayah pesisir *100	100,00	100,00	149.758.622,00	100,00	218.118.900,00	100,00	224.662.400,00	100,00	231.402.300,00	100,00	238.344.400,00	100,00	245.494.700,00	100,00	1.307.781.322,00	Dinas Perikanan
159	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	BPS	20,70	20,70	196.333.280,00	20,90	210.571.200,00	21,10	212.676.900,00	21,30	214.803.600,00	21,50	216.951.700,00	21,70	219.121.200,00	21,70	1.270.457.828,00	Dinas Perikanan
160	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Indeks Pelayana n Instansi	Survey berdasarka n Permenpan No 14 th 2017	77,3	89	4.517.688.496	89,5	4.716.196.084	90	4.791.740.113	90,5	4.820.315.434	91	4.849.462.261	91,5	4.879.192.026	91,5	28.574.594.413	Dinas Ketahan an Pangan

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
161	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan dibagi target x 100	29,63	100,00	124.968.004	100,00	130.459.107	100,00	132.548.801	100,00	133.339.250	100,00	134.145.508	100,00	134.967.891	100,00	790.428.561	Dinas Ketahanan Pangan
162	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	cukup jelas	93,3	93,6	627.091.528	93,9	654.645.979	94,2	665.132.099	94,5	669.098.583	94,8	673.144.398	95	677.271.128	95	3.966.383.716	Dinas Ketahanan Pangan
163	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Jumlah Desa/Kelompok sangat rentan, rentan dan cukup rentan Pangan dibagi total desa/kelurahan x 100	78,49	78,49	147.287.374	74,19	153.759.193	69,89	156.222.107	65,59	157.153.731	61,29	158.103.987	56,99	159.073.247	56,99	931.599.639	Dinas Ketahanan Pangan
164	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Jumlah sampel Pangan Segar asal tumbuhan (PSAT) dibagi Jumlah Sampel Aman x 100	100	100	83.856.398	100	87.541.055	100	88.943.287	100	89.473.696	100	90.014.714	100	90.566.552	100	530.395.702	Dinas Ketahanan Pangan

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
165	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100,00	100,000	5.195.792 .343	100,000	7.204.006 .135	100,000	7.344.746 .275	100,000	7.424.704 .754	100	7.506.525 .142	100,00	7.590.251 .245	100	37.070.23 3.551	Dinas Perkebunan dan Peternakan
166	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAR SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Komoditas Temak Sapi	Jumlah Populasi dibagi target * 100	50,09	58,41	986.068.0 02	66,73	1.367.190 .886	75,05	1.393.900 .835	83,36	1.409.075 .517	91,68	1.424.603 .556	100,00	1.440.493 .266	100,00	7.035.264 .060	Dinas Perkebunan dan Peternakan
167		Peningkatan Produksi Komoditas Temak Kambing	Jumlah Populasi dibagi target * 100	93,28	94,40		95,52		96,64		97,76		98,88		100,00		100,00		
168		Peningkatan Produksi Komoditas Itik	Jumlah Populasi dibagi target * 100	81,14	84,29		87,43		90,57		93,71		96,86		100,00		100,00		
169		Peningkatan Produksi Komoditas Ayam Buras	Jumlah Populasi dibagi target * 100	93,28	94,40		95,52		96,64		97,76		98,88		100,00		100,00		
170	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Persentase Peningkatan	Jumlah Produksi Perkebunan	65,49	71,24	2.026.476 .423	76,99	2.779.050 .566	82,74	2.835.296 .768	88,50	2.867.251 .836	94,25	2.899.951 .007	100,00	2.933.411 .790	100,00	14.314.96 1.967	Dinas Perkebunan dan

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1 7 1	PENGEMBAN GAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Perkebunan Sawit	dibagi Target *100																Peternakan
		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Kelapa Dalam	Jumlah Produksi Perkebunan dibagi Target *100	89,45	91,21		92,97		94,72		96,48		98,24		100,00		100,00		
		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Kopi	Jumlah Produksi Perkebunan dibagi Target *100	27,94	39,95		51,96		63,97		75,98		87,99		100,00		100,00		
1 7 3	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Jumlah Izin dibagi Perusahaan *100	14,29	28,57	50.000.000	42,86	100.000.000	57,14	100.000.000	71,43	100.000.000	85,71	100.000.000	100,00	100.000.000	100	550.000.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1 7 4	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) terselesaikan	Jumlah Kematian Temak dibagi Total Populasi Temak x 100	100,00	100,00	1.875.604.245	100,00	2.600.539.743	100,00	2.651.344.854	100,00	2.680.208.683	100,00	2.709.744.634	100,00	2.739.968.519	100,00	13.381.806.433	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1 7 5	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	Persentase Penanganan Serangan Hama yang	Jumlah Luas Lahan Serangan Hama dibagi target x 100	100,00	100,00	167.858.620	100,00	232.737.270	100,00	237.284.112	100,00	239.867.302	100,00	242.510.644	100,00	245.215.554	100,00	1.197.614.882	Dinas Perkebunan dan Peternakan

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
176	BENCANA PERTANIAN	terselesaikan																	
		Persentase Penanganan Tingkat Kebakaran terselesaikan	Jumlah Luas Lahan Kebakaran dibagi target x 100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
177	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Koperasi perkebunan yang Dibentuk dan Beroperasi	Jumlah Kelembagaan Koperasi perkebunan yang Dibentuk dan Beroperasi dibagi target x 100	1,10	2,20	194.033.354	3,30	269.028.740	4,40	274.284.586	5,50	277.270.581	6,60	280.326.108	7,70	283.452.803	7,70	1.384.362.818	Dinas Perkebunan dan Peternakan
178	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					0		5.716.194.205		5.814.735.707		5.839.013.207		5.863.776.257		5.889.034.568		29.122.753.945	
179	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan	100	100	4.135.156.289	100	4.464.608.327	100	4.541.573.734	100	4.560.535.569	100	4.579.876.640	100	4.599.604.533	100	22.746.198.803	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			n barang milik daerah																
180	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Realisasi Investasi sektor Industri dibagi target x 100		88,89	894.707.854	100	965.990.124	100	982.642.833	100	986.745.532	100	990.930.285	100	995.198.734	100	4.921.507.509	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
181	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN NIKOTA	Persentase rekomendasi Izin Usaha Industri kecil, menengah (IKM) yang Diterbitkan	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Industri kecil, menengah (IKM) yang Diterbitkan Target x 100		46,51	184.630.716	55	199.340.430	65	202.776.860	75	203.623.488	85	204.487.048	95	205.367.879	75	1.015.595.705	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
182	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Jumlah Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini dibagi Target x 100	100,00	100	79.890.377	100	86.255.324	100	87.742.280	100	88.108.618	100	88.482.284	100	88.863.423	100	439.451.929	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
183	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					0		2.258.866.319		2.297.806.928		2.307.400.658		2.317.186.263		2.327.167.581		11.508.427.749	

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
184	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Jumlah Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya dibagi total Sarana Perdagangan x 100	40	40	1.202.028.552	50	1.297.795.369	60	1.320.168.070	70	1.325.679.994	80	1.331.302.156	90	1.337.036.762	90	6.611.982.351	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
185	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang stabil dibagi target x 100	100,00	100,00	100,00	100	266.636.820	100	271.233.374	100	272.365.819	100	273.520.913	100	274.699.109	100	1.358.456.035	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
186	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang ditangani dibagi Total Pengaduan x 100	100,00	100	148.366.551	100	160.187.062	100	162.948.528	100	163.628.865	100	164.322.809	100	165.030.633	100	816.117.897	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
187	3.30.07 PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Jumlah Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan dibagi Target x 100	100	100	494.823.949	100	534.247.068	100	543.456.956	100	545.725.980	100	548.040.385	100	550.401.077	100	2.721.871.465	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
188	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTAKOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	5.581.841 .659	100	6.187.502 .117	100	6.313.326 .288	100	6.339.211 .401	100	6.365.614 .217	100	6.392.545 .089	100	37.180.04 0.771	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
189	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarsaan RPJMD dengan RKPD	Jumlah Program dalam RKPD dibagi jumlah program dalam RPJMD dikali 100	99,15	100	1.583.824 .089	100	1.755.677 .696	100	1.791.379 .775	100	1.798.724 .567	100	1.806.216 .255	100	1.813.857 .777	100	10.549.68 0.159	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
190		Persentase Keselarsaan RPJMD dengan Renstra PD	Jumlah Program dalam Renstra dibagi jumlah program dalam RPJMD dikali 100	100	100		100		100		100		100		100		100		
191	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Persentase Keselarsaan RKPD dengan Renja PD	Jumlah Program dalam RKPD dibagi jumlah program	100	100	2.085.566 .750	100	2.311.862 .190	100	2.358.874 .399	100	2.368.545 .962	100	2.378.410 .956	100	2.388.473 .249	100	13.891.73 3.505	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1 9 2	AAN PEMBANGUNAN DAERAH	pada Bidang Perekonomian dan SDA	dalam Renstra dikali 100																
		Persentase Keseluruhan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Program dalam RKPD dibagi jumlah program dalam Renstra dikali 100	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase Keseluruhan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Program dalam RKPD dibagi jumlah program dalam Renstra dikali 100	100	100		100		100		100		100		100		100		
1 9 4	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata rata Capaian Kegiatan Perencanaan Penganggaran Administrasi Keuangan Kepegawaian Umum Pengadaan Barang	100	100	15.986.635.622	100	16.920.333.893	100	15.491.226.564	100	15.734.076.742	100	16.098.031.983	100	16.389.247.227	100	96.619.552.031	Badan Keuangan Daerah

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Jasa dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah																
195	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Jumlah Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD dibagi total belanja x 100	100	100	183.127.439.533	100	193.822.984.086	100	177.452.512.392	100	180.234.369.203	100	184.403.488.531	100	187.739.368.768	100	1.106.780.162.513	Badan Keuangan Daerah
196	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Jumlah Penambahan Nilai Aset Tetap dibagi total aaset x 100	6,53	6,59	2.153.893.535	6,64	2.279.691.527	6,70	2.087.146.635	6,75	2.119.866.054	6,81	2.168.902.065	6,87	2.208.137.752	6,92	13.017.637.568	
197	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Jumlah pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan dibagi target x 100	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
198		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Jumlah Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital dibagi target x 100	100	100	1.426.574.195	100	1.509.893.155	100	1.382.366.158	100	1.404.036.996	100	1.436.514.696	100	1.462.501.412	100	8.621.886.611	
199		Persentase PAD terhadap	Jumlah PAD dibagi Pendapatan	5,64	8,16		8,19		8,21		8,24023124		8,27		8,30		8,30		

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pendapatan Daerah	Daerah x 100																
200	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	11.554.897.553	100	9.222.066.766	100	9.386.835.093	100	9.438.410.993	100	9.491.018.412	100	9.544.677.979	100	58.637.906.797	Inspektoral
201	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindakan Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-I	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti / total temuan x 100	66,7	68	2.226.037.550	69	1.776.620.417	70	1.808.362.843	70	1.818.298.880	70	1.828.433.638	70	1.838.771.091	70	11.296.524.420	Inspektoral
202	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Penilaian BPKP	3,07	3,1	1.205.147.315	3,2	961.838.818	3,3	979.023.748	3,35	984.402.987	3,4	989.889.811	3,5	995.486.372	3,5	6.115.789.050	Inspektoral
203		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Penilaian BPKP	3,2	3,25		3,3		3,35		3,4		3,45		3,5		3,5		Inspektoral

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
204	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	9.170.303.859	100	7.741.088.034	100	7.880.081.422	100,00	7.930.085.291	100	7.981.089.237	100	8.033.113.262	100	48.735.761.104	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
205	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Jumlah ASN dibagi Jumlah Kebutuhan ASN sesuai Formasi x 100	34,86	36,78	1.478.882.679	38,69	1.201.639.164	40,60	1.228.601.513	42,52	1.238.301.412	44,43	1.248.195.308	46,34	1.258.287.082	46,34	7.653.907.159	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
206		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah keseluruhan ASN x 100	57,53	60,27		63,02		65,76		68,50		71,25		73,99		73,99		
207		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi Diklat Pimpinan / jumlah keseluruhan ASN yang menduduki	13,96	17,77		21,57		25,38		29,19		32,99		36,80		36,80		

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Jabatan x 100																
208		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Jumlah ASN yang bernilai SKP Baik dibagi Total ASN x 100	65,13	71,99		78,85		85,71		92,57		99,42		100,00		100,00		
209	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional dibagi Total Jumlah ASN x 100	57,53	60,27		63,02		65,76		68,50		71,25		73,99		73,99		1.800.000.000
210		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan dibagi target x100	16,67	50,00	300.000.000	66,67	300.000.000	83,33	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00		
211		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Jumlah ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi dibagi Total ASN x 100	57,53	60,27		63,02		65,76		68,50		71,25		73,99		73,99		
212		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pengembangan	70,51	71,88		73,25		74,62		75,99		77,37		78,74		78,74		

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIA N KINERJ A AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERAN GKAT DAERA H PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		angan Kompetensi Teknis	Kompetensi Teknis dibagi Total ASN x 100																
213	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIKOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	4.036.101.039	100%	4.370.699.659	100%	4.442.165.223	100%	4.471.487.309	100%	4.501.395.836	100%	4.531.902.534	100%	22.317.650.560	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
214	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan dibagi total Rekomendasi x 100	100	100	1.730.030.200	100	885.643.526	100	900.124.735	100	906.066.327	100	912.126.751	100	918.308.384	100	4.522.269.722	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

N o.	NOMENKLA TUR PROGRAM	INDIKAT OR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIA N KINERJ A AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2 1 5		Persenta se Kajian Berbasis Bukti dalam Pengemb angan Potensi Unggulan yang T ermanfaa tkan dalam Kebijakan Pembang unan Daerah	Jumlah Kajian Berbasis Bukti dalam Pengemban gan Potensi Unggulan yang T ermanfaatk an dalam Kebijakan Pembangun an Daerah dibagi Total Kajian x 100	100	100		100		100		100		100		100		100		
2 1 6		Persenta se Kajian Berbasis Bukti dalam Penyeles aian Permasal ahan Daerah yang Termanfa atkan dalam Kebijakan Pembang unan Daerah	Jumlah Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaia n Permasalah an Daerah yang Termanfaat kan dalam Kebijakan Pembangun an Daerah dibagi Total Kajian x 100	100	100		100		100		100		100		100		100		
2 1 7		Persenta se Fasilitasi, Pembina an, Bimbanga n Teknis dan Supervisi terkait Penelitian	Jumlah Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengemban gan, Pengkajian	100	100		100		100		100		100		100		100		

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	dan Penerapan di Daerah dibagi target x 100																
Unsur Penunjang																			
218	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjan gan Urusan Pemerint ahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan barang milik daerah, penataan organisasi, keprotokolan dan komunikasi pimpinan x 100	91,9%	100%	30.580.081.261	100%	24.931.702.611	100%	25.341.287.414	100%	25.458.893.501	100%	25.578.851.709	100%	25.701.209.082	100%	127.011.944.316	Sekretariat Daerah
219	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan, Politik,	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan, Politik, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat dibagi Total Kebijakan	100,0%	100%	5.897.073.691	100%	4.807.838.354	100%	4.886.822.832	100%	4.909.502.031	100%	4.932.634.815	100%	4.956.230.254	100%	24.493.028.286	Sekretariat Daerah

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Strategis x 100																
220	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian, Pembangunan, Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang Jasa	Jumlah Kebijakan Pengelolan Perekonomian, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang Jasa dibagi Total Kebijakan Strategis x 100	106,3%	100%	2.505.787.565	100%	2.042.949.129	100%	2.076.511.254	100%	2.086.148.111	100%	2.095.977.705	100%	2.106.003.891	100%	10.407.590.091	Sekretariat Daerah
Urusan Pertanahan																			
221	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Terselesainya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Jumlah sengketa lahan yang diselesaikan dibagi total sengketa yang ada x 100	123,5%	100%	8.948.278	100%	7.295.462	100%	7.415.313	100%	7.449.727	100%	7.484.829	100%	7.520.633	100%	37.165.964	Sekretariat Daerah
222	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan	Rata-rata capaian kegiatan perencanaan, penganggaran	100	100	36.313.107.305	100	27.589.648.848	100	41.500.205.275	100	55.395.579.703	100	69.568.861.620	100	84.025.609.175	100	314.393.011.925	Sekretariat DPRD

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintahan Daerah	an, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, pengadaan barang, jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah																
2 2 3	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Cukup Jelas	Tepat Waktu	Tepat Waktu	9.018.759 .902	Tepat Waktu	6.852.192 .974	Tepat Waktu	10.307.03 2.777	Tepat Waktu	13.758.10 1.965	Tepat Waktu	17.278.19 2.536	Tepat Waktu	20.868.68 4.918	Tepat Waktu	78.082.96 5.071	Sekretariat DPRD
		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Jumlah Ranperda yang ditetapkan dibagi Total Ranperda x 100	100	100		100		100		100		100						
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan dibagi target x 100	NA	100		100		100		100		100						
2 2 4	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kegiatan Perencanaan Penganggaran Administrasi Keuangan Kepegawaian Umum	100	100	47.627.26 9.992	100	42.974.51 8.739	100	43.792.65 8.332	100	44.069.04 0.060	100	44.350.94 9.423	100	44.638.49 6.973	100	267.452.9 33.518	11 Kecamatan

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pengadaan Barang Jasa dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah																
2 2 5	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	(Realisasi Persentase Keg Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat + Realisasi Persentase Keg Koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan sarana pelayanan umum + Realisasi persentase Keg penyelenggaraan kegiatan pemerintahan an di kecamatan) dibagi 3	100	100	263.465.956	100	237.727.727	100	242.253.536	100	243.782.433	100	245.341.908	100	246.932.572	100	1.479.504.131	11 Kecamatan
2 2 6	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif di PKK kecamatan dibagi target x 100	100	100	12.614.986.595	100	11.382.617.099	100	11.599.316.902	100	11.672.521.849	100	11.747.190.895	100	11.823.353.323	100	70.839.986.663	11 Kecamatan

N o.	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA SI	CAPAIAN KINERJA AWAL RPJMD (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI PADA AKHIR PERIODE (2030)		
					Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
227	KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	Jumlah Pembangunan fisik di kelurahan/ target x 100	100	100		100		100		100		100		100		100		11 Kecamatan
228	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	jumlah hari besar keagamaan / target x 100	100	100	2.220.748.137	100	2.003.801.235	100	2.041.949.170	100	2.054.836.203	100	2.067.980.977	100	2.081.388.646	100	12.470.704.368	11 Kecamatan
229	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan / target x 100	100	100	1.786.154.925	100	1.611.663.828	100	1.642.346.336	100	1.652.711.418	100	1.663.283.803	100	1.674.067.634	100	10.030.227.945	11 Kecamatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kinerja penyelenggaraan pemerintah tersebut harus diukur guna meninjau sejauh mana program yang telah direncanakan dapat tercapai dan aspek apa yang perlu ditingkatkan oleh perangkat daerah. Penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara sistematis, objektif, terukur, dan berkesinambungan melalui mekanisme evaluasi yang mengacu pada indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Perumusan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan pendekatan yang terukur dan terarah, disertai dengan penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirancang untuk dicapai secara bertahap setiap tahunnya selama periode perencanaan. Penetapan target ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah memiliki acuan kinerja yang jelas dan dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif.

Target indikator tujuan dan sasaran ini mencerminkan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan adanya target yang konkret dan realistis, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian kebijakan secara berkala, guna memastikan bahwa seluruh proses pembangunan memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029

Indikator	Satuan	Target Tahun ke-						Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks	2,91	2,95	2,99	3,03	3,07	3,11	
Indeks Konektivitas	Indeks	30,90	30,90	31,00	31,00	31,09	31,09	
Luas Kawasan kumuh (Ha)	Ha	105,20	101,20	97,20	94,20	91,20	88,20	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,97	5,53	6,22	6,80	7,00	7,20	
Indeks Gini	Indeks	0,31-0,315	0,31-0,314	0,31-0,313	0,31-0,312	0,300-0,305	0,300-0,305	
Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	%	24,48	24,79	25,11	25,42	25,74	26,05	
Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,37	8,68	9,00	9,31	9,63	9,94	
Distribusi PDRB sektor Tersier	%	25,65	25,67	25,69	25,71	25,73	25,75	
IKLH	Indeks	73,28	73,30	73,33	73,36	73,38	73,41	
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,94	71,11	71,28	71,44	71,61	71,78	
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,82	7,95	8,07	8,19	8,32	8,44	
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,29	12,37	12,46	12,54	12,62	12,7	
Usia Harapan Hidup	Tahun	67,54	67,82	68,11	68,39	68,67	68,95	
Angka Kemiskinan	%	9,88	7,44-8,08	5,94-6,60	4,43-5,12	2,93-3,73	2,93-3,73	
Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	Rupiah	24.090	24.809	25.528	26.247	26.966	27.685	
Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,54	0,53	0,51	0,50	0,49	0,48	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	BB	BB	BB	BB	
Nilai SAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	BB	A	

Indikator	Satuan	Target Tahun ke-						Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indeks pemerintahan digital/SPBE	Indeks	2,83	2,85	2,87	2,90	2,92	2,96	
Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,05	87,64	88,23	88,82	89,41	90	
Indeks inovasi daerah	Indeks	46,86	47,62	48,38	49,14	49,90	50,66	
Persentase Penegakan Perda/Perkada	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100	
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	71,64	71,78	71,92	72,06	72,2	72,34	
Indeks resiko bencana	Indeks	152,24	151,18	150,11	149,05	147,98	131,46	
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,39	3,51	3,64	3,76	3,88	4	

4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dilihat dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang ditetapkan setiap tahunnya. IKD ditetapkan sebagai target kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilihat dari seluruh indikator setiap sasaran pembangunan daerah. Berikut IKD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
AA										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,25	73,28	73,3	73,33	73,36	73,38	73,41	
2	Indeks Resiko Bencana	Indeks	156,4	152,24	151,18	150,11	149,05	147,98	131,46	
3	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	69,99	70	71	72	73	74	75	
4	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	%	13,25	14	15	16	17	18	19	
5	Rumah Tangga Terlayani Air Minum	Angka (Rumah Tangga)	24.442	27.035	29.628	32.221	34.814	37.407	40.000	
6	Konsumsi Listrik Per Kapita	KWH	1.814	1.894	1.974	2.054	2.134	2.214	2.294	
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	7	7,79	8,58	9,38	10,17	10,96	11,75	
8	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,27	0,3	0,32	0,35	0,37	0,4	0,42	
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,95	0,9	0,88	0,86	0,85	0,83	0,82	
10	Kepadatan Penduduk	Orang/Km2	45	47	49	51	52	54	55	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
AA										
1	Persentase Kemiskinan	%	10,14	8,94-9,65	7,94-8,65	6,94-7,65	4,94-5,65	2,93-3,73	2,93-3,73	
2	HLS (Harapan Lama Sekolah)	Angka	12,21	12,29	12,37	12,46	12,54	12,62	12,7	
3	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Angka	7,7	7,82	7,95	8,07	8,19	8,32	8,44	
4	Angka Melek huruf	%	94,01	95	96	97	98	99	100	
5	Indek Pembangunan Literasi	%	60,48	61,23	61,98	62,73	63,48	64,23	64,98	
6	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,5	89,92	90,34	90,76	91,18	91,6	92,02	
7	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,55	0,54	0,53	0,51	0,50	0,49	0,48	
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,77	70,94	71,11	71,28	71,44	71,61	71,78	
9	PDRB Per Kapita	Rp (Juta)	11,4	11,58	11,76	11,94	12,12	12,3	12,48	
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,73	4,97	5,53	6,22	6,8	7	7,2	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Rasio Gini	Indeks	0,3	0,31-0,315	0,31-0,314	0,31-0,313	0,31-0,312	0,300-0,305	0,300-0,305	
12	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Angka	7,7	7,85	8,00	8,14	8,29	8,44	8,59	
13	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,37	74,65	74,93	75,21	75,49	75,77	76,05	
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,06	1,96-2,01	1,84-1,99	1,64-1,95	1,44-1,90	1,28-1,87	1,28-1,87	
15	Rasio Kesempatan Kerja	%	97,43	97,53	97,62	97,72	97,81	97,91	98	
16	Prevalensi Stunting	%	23,9	23,39	22,88	22,37	21,86	21,35	20,84	
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	28,35	28,49	28,63	28,76	28,90	29,04	29,18	
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
AA										
1	Rasio Ketergantungan	Angka	43,6	43,70	43,81	43,91	44,01	44,11	44,22	
2	Rasio Industri Pengolahan	Angka	8,05	8,365	8,68	8,995	9,31	9,625	9,94	
3	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	46,1	46,86	47,62	48,38	49,14	49,9	50,66	
4	Rasio PDRB Makan dan Minum	%	0,44	0,472	0,504	0,536	0,568	0,6	0,632	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Angka	65,44	67,04	68,64	70,24	71,84	73,44	75,04	
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto thd PDRB	%	20,02	19,94	19,86	19,78	19,70	19,62	19,54	
7	Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa thd PDRB	%	42,47	41,96	41,45	40,93	40,42	39,91	39,40	
8	Persentase Desa Mandiri	%	NA	0,00	0,68	1,36	2,04	2,74	3,42	
9	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	%	0,08	0,11	0,14	0,18	0,21	0,24	0,27	
10	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,83	2,91	2,95	2,99	3,03	3,07	3,11	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
AA										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	A	A	A	A	A	A	A	
2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,27	3,39	3,51	3,64	3,76	3,88	4,00	
3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	66	67	68	69	70	71	72	
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	CC	B	B	B	BB	
5	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
7	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B	B	B	BB	BB	BB	A	
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,83	2,83	2,85	2,87	2,9	2,92	2,96	
9	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Angka Kriminalitas	Angka	160	156	152	148	144	140	136	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Urusan Pelayanan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Menengah (APS PAUD)	%	73,07	75,16	77,25	79,34	81,44	83,53	85,62	Pendidikan
2	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Menengah (APS SD dan SMP)	%	97,93	98,63	99,27	99,91	100	100	100	Pendidikan
3	Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Menengah (APS Kesetaraan)	%	9,29	10,06	10,82	11,58	12,35	13,11	17,87	Pendidikan
4	Indeks Pemerataan Guru	%	NA	56	58	60	75	85	90	Pendidikan
5	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	49,16	50,07	50,56	51,06	51,56	52,05	52,05	Pendidikan
6	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	121,06/ 100.000 KH	112,22/ 100.000 KH	103,38/ 100.000 KH	94,54/ 100.000 KH	85,70/ 100.000 KH	76,86/ 100.000 KH	68/ 100.000 KH	Kesehatan
7	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	23,9	22,09	20,48	18,87	17,27	15,67	14,07	Kesehatan
8	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Indeks	80,16%	83,11%	86,49%	89,87%	93,25%	96,63%	100	Kesehatan
9	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	88,01	98,6	98,88	99,16	99,44	99,72	100	Kesehatan
10	Persentase Pelayanan Persalinan di Fasilitas Layanan Kesehatan	%	82,33%	85,27%	88,21%	91,15%	94,09%	97,03%	100	Kesehatan
11	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	NA	50	60	70	80	90	100	Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Persentase Puskesmas dengan Jenis SDM Kesehatan Sesuai Standar	%	41,18%	47,65%	54,12%	60,59%	67,06%	73,53%	80	Kesehatan
13	Persentase Rumah Sakit dengan Jenis SDM Kesehatan Sesuai Standar	%	50	50	50	50	100	100	100	Kesehatan
14	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	NA	36	44	52	59	67	75	Kesehatan
15	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	NA	45	55	65	75	85	95	Kesehatan
16	Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan RSUD	Indeks	88,42	88,5	88,8	89	89,3	89,7	90	RSUD NH
17	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	70,58	71	72	73	74	75	76	RSUD NH
18	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	60,92%	62,17	63,17	64,17	65,17	66,17	67,17	PUPR
19	Tingkat Kemantapan Jalan	%	16,67%	17,13	20,04	18,58	23,21	21,58	24,92	PUPR
20	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	%	40%	50%						PUPR
21	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	%	90%	91	92	93	94	95	96	PUPR
22	Persentase Sarana Umum Masyarakat dan Akses Berkelanjutan terhadap Air Bersih	%	14,57	14,90	15,31	15,81	16,38	17,04	17,78	Perkim
23	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten / Kota	%	25,60	26,92	28,32	29,80	31,36	33,00	34,73	Perkim
24	Persentase Terbangunnya TPS3R di Setiap Kecamatan	%	18,18	27,27	36,36	45,45	54,55	63,64	72,73	Perkim
25	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	43,96	44,46	45,03	45,69	46,43	47,25	48,16	Perkim
26	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	NN	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100	Perkim

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
27	Tingkat Kemantapan Jalan	%	68,99	75,03	82,27	95,31	96,00	96,50	97,00	Perkim
28	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	%	3,12	4,16	5,20	6,24	7,28	8,32	9,36	Perkim
29	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	%	33,87	38,01	42,42	47,10	52,04	57,26	62,74	Perkim
30	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	NA	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	Perkim
31	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100,00	100	100	100	100	100	100	Satpol PP Damkar
32	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	NA	100	100	100	100	100	100	Satpol PP Damkar
33	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	NA	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100,00	Satpol PP Damkar
34	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	NA	63,64	72,73	81,82	90,91	100	100	Satpol PP Damkar
35	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	NA	20,10%	24,71%	29,33%	33,76%	38,56%	43,17%	BPBD
36	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
37	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
38	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial PPA
39	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial PPA

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
40	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	%	21,51	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	Dinas Sosial PPA
41	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	84,62	84,62	88,46	90,38	92,31	94,23	100,00	Dinas Sosial PPA
42	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	28,57	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	100,00	Dinas Sosial PPA
43	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	%	3,63	3,85	3,90	3,95	4,00	4,50	3,85	Dinas Sosial PPA
44	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	%	0,29	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	Dinas Sosial PPA
45	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	55,29	58,18	60,93	64,16	67,75	71,77	76,29	Dinas Sosial PPA
46	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Data Fakir Miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial PPA
47	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial PPA
48	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial PPA
49	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	12,51	13,00	13,25	13,50	13,75	14,00	14,00	Dinas Sosial PPA
50	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	42,47	45,00	46,50	48,00	49,50	51,00	52,50	Dinas Sosial PPA
51	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial PPA

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
52	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	60,31	60,50	60,75	61,00	61,25	61,50	61,75	Dinas Sosial PPA
53	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial PPA
54	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	84,14	85,00	85,10	85,20	85,30	85,40	85,50	Dinas Sosial PPA
2	Urusan Pelayanan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	%	66,67	67,00	68,00	68,50	69,00	69,50	70,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	53,44	54,00	56,00	57,00	57,50	58,00	59,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	5.432	5.432	5.452	5.470	5.480	5.490	5.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	60	62	64	65	66	68	70	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	29,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	93,3	93,6	93,9	94,2	94,5	94,8	95	Dinas Ketahanan Pangan
7	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	78,49	78,49	74,19	69,89	65,59	61,29	56,99	Dinas Ketahanan Pangan
8	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
9	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
10	Indeks Kualitas Air	Indeks	61	67,40	67,45	67,5	67,55	67,6	67,65	Dinas Lingkungan Hidup
11	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,45	74,83	74,88	74,93	74,98	75,03	75,08	Dinas Lingkungan Hidup
12	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	53,42	77,14	77,19	77,24	77,29	77,39	77,39	Dinas Lingkungan Hidup
13	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
14	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
15	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
16	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	0	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Dinas Dukcapil

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	62,97	62%	63%	64%	65%	66%	67%	Dinas Dukcapil
18	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Dukcapil
19	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	98.45	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	Dinas Dukcapil
20	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Dukcapil
21	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Dukcapil
22	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	15%	35%	36%	38%	40%	42%	44%	Dinas Dukcapil
23	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100%	100	100	100	100	100	100	Dinas Dukcapil
24	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	NA	17,91	31,33	44,76	62,67	80,57	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
25	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	NA	54,79	68,49	79,45	86,30	93,15	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
26	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	NA	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
27	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	NA	20,55	41,10	61,6	75,34	82,2	100	Dinas Pemberdayaan

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Masyarakat Desa
28	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun	Angka	2,25	2,23	2,20	2,17	2,15	2,12	2,10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
29	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19 Tahun)	Angka	22,42	22,05	21,65	21,00	19,75	19,35	19,05	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
30	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Angka	73,19	74,15	74,95	75,25	76,15	77,15	78,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31	Presentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	%	6,52	6,40	6,25	5,85	5,50	5,15	5,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	26,21	27,25	28,25	29,25	30,25	31,25	32,25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
33	Konektivitas Darat	Indeks	0,25	0,27	0,28	0,29	0,3	0,31	0,32	Dinas Perhubungan
34	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	Dinas Perhubungan
35	Konektivitas Sungai	%	49,6	50,78	51,16	51,54	51,91	52,27	52,63	Dinas Perhubungan
36	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	NA	68,00	72,00	76,00	78,00	80,00	82,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
37	Indeks SPBE	Indeks	2,83	2,83	2,85	2,87	2,90	2,92	2,97	Dinas Komunikasi dan Informatika
38	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
39	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (KAMI)	Tingkat	NA	Tingkat I	Tingkat I	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat II	Tingkat II	Dinas Komunikasi dan Informatika
40	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	5,00	10	15	20	25	30	35	Dinas Koperasi dan UKM
41	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	92,16	20,00	40,00	60,00	73,33	86,67	100,00	Dinas Koperasi dan UKM

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
42	Persentase Koperasi Aktif	%	18,35	15,14	22,97	30,81	38,65	46,49	54,32	Dinas Koperasi dan UKM
43	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	24,00	2,10	19,58	39,16	59,44	79,72	100,00	Dinas Koperasi dan UKM
44	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	5,88	0,70	2,10	3,50	4,90	6,99	8,39	Dinas Koperasi dan UKM
45	Persentase Usaha mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	20,36	1,44	3,17	5,19	6,92	8,65	10,39	Dinas Koperasi dan UKM
46	Proporsi Usaha Mikro Menjalin Kemitraan	%	10,71	0,11	0,23	0,34	0,46	0,57	0,69	Dinas Koperasi dan UKM
47	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Rp (Juta)	357912,79	357912,79	358270,70	358628,97	358987,60	359346,59	359705,93	DPMPSTP
48	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	50	50	55	60	65	70	70	DPMPSTP
49	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	75	75	80	85	90	95	95	DPMPSTP
50	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100	100	100	100	100	100	100	DPMPSTP
51	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100	100	DPMPSTP
52	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	3,76	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	Dinas Parbudpora
53	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	25	20,00	33,00	37,50	36,36	40,00	42,86	Dinas Parbudpora
54	Persentase Ekonomi Kreatif yang Aktif	%	7,14	6,67	6,25	5,88	5,56	5,26	5,00	Dinas Parbudpora

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
55	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	NA	0,98	1,45	1,91	2,34	2,74	3,11	Dinas Parbudpora
56	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Parbudpora
57	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Parbudpora
58	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Parbudpora
59	Rasio Wirausaha Pemuda	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Parbudpora
60	Persentase Atlet yang Berprestasi	%	7	11	14	18	21	25	28	Dinas Parbudpora
61	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Parbudpora
62	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	68,86	69,0	70,0	71,0	72,0	73,0	74,0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
63	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	NA	16,7	33,3	50,0	66,7	83,3	100,0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
64	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	2,38	4,76	7,14	9,52	9,52	9,52	9,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
65	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Urusan Pilihan									
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	89,56	90,16	90,77	91,58	92,39	93,22	94,25	Dinas Perikanan

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	81,33	82,04	82,76	83,48	84,21	84,94	85,69	Dinas Perikanan
3	Persentase pembinaan nelayan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perikanan
4	Angka Konsumsi Ikan	Angka	20,70	20,70	20,90	20,90	21,10	21,10	21,30	Dinas Perikanan
5	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	16,67	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
6	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	16,67	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
7	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	%	34,86	38,98	43,09	47,21	51,33	55,45	59,56	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
8	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	16,67	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
9	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	16,67	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
10	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	19,05	28,57	38,10	47,62	57,14	66,67	76,19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
11	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%	NA	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Tanaman

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Pangan dan Hortikultura
12	Peningkatan Produksi Komoditas Ternak Sapi	%	50,09	58,41	66,73	75,05	83,36	91,68	100,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13	Peningkatan Produksi Komoditas Ternak Kambing	%	93,28	94,40	95,52	96,64	97,76	98,88	100,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
14	Peningkatan Produksi Komoditas Itik	%	81,14	84,29	87,43	90,57	93,71	96,86	100,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
15	Peningkatan Produksi Komoditas Ayam Buras	%	93,28	94,40	95,52	96,64	97,76	98,88	100,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
16	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Sawit	%	65,49	71,24	76,99	82,74	88,50	94,25	100,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
17	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Kelapa Dalam	%	89,45	91,21	92,97	94,72	96,48	98,24	100,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
18	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Kopi	%	27,94	39,95	51,96	63,97	75,98	87,99	100,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
19	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	%	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	100,00	Dinas Perkebunan

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										dan Pernakan
20	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) terselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perkebunan dan Pernakan
21	Persentase Penanganan Serangan Hama yang terselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perkebunan dan Pernakan
22	Persentase Penangan Tingkat Kebakaran terselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perkebunan dan Pernakan
23	Persentase Kelembagaan Koperasi perkebunan yang Dibentuk dan Beroperasi	%	1,10	2,20	3,30	4,40	5,50	6,60	7,70	Dinas Perkebunan dan Pernakan
24	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	NA	88,89	100	100	100	100	100	Dinas Perindustria n dan Perdaganga n
25	Persentase rekomendasi Izin Usaha Industri kecil, menengah (IKM) yang Diterbitkan	%	NA	46,51	55	65	75	85	95	Dinas Perindustria n dan Perdaganga n
26	Persentase Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	100,00	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustria n dan Perdaganga n

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
27	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	40	40	50	60	70	80	90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	100,00	100,00	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	100,00	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Urusan Penunjang Pemerintahan									
1	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan, Politik, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	%	100,0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
2	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian, Pembangunan, Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang Jasa	%	106,3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
3	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	%	123,5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
4	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Ketepatan Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sekretariat DPRD

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
6	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	NA	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
7	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	99,15	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA
8	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA
9	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA
10	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA
11	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA
12	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan daerah
13	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	6,53	6,59	6,64	6,70	6,75	6,81	6,87	Badan Keuangan daerah
14	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan daerah
15	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan daerah
16	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	5,64	8,16	8,19	8,21	8,240	8,27	8,30	Badan Keuangan daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	34,86	36,78	38,69	40,60	42,52	44,43	46,34	BKPSDMD
18	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	57,53	60,27	63,02	65,76	68,50	71,25	73,99	BKPSDMD
19	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	13,96	17,77	21,57	25,38	29,19	32,99	36,80	BKPSDMD
20	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	65,13	71,99	78,85	85,71	92,57	99,42	100,00	BKPSDMD
21	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	57,53	60,27	63,02	65,76	68,50	71,25	73,99	BKPSDMD
22	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	16,67	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00	100,00	BKPSDMD
23	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	57,53	60,27	63,02	65,76	68,50	71,25	73,99	BKPSDMD
24	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	70,51	71,88	73,25	74,62	75,99	77,37	78,74	BKPSDMD
25	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	BALITBANG DA
26	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	BALITBANG DA
27	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	BALITBANG DA
28	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	BALITBANG DA

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Urusan Pengawasan									
1	Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-l	%	66,7	68	69	70	70	70	70	Inspektorat
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	3,07	3,1	3,2	3,3	3,35	3,4	3,5	Inspektorat
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Skor	3,2	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,5	Inspektorat
6	Urusan Kewilayahan									
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	11 Kecamatan
2	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	11 Kecamatan
3	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	11 Kecamatan
4	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	%	100	100	100	100	100	100	100	11 Kecamatan
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	11 Kecamatan
7	Urusan Pemerintahan Umum									
1	Persentase Masyarakat Memahami Nilai nilai Pancasila	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kesbangpol
2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang ikut pemilu	%	84,00	84%	84%	84%	84%	92%	92%	Badan Kesbangpol
3	Persentase Ormas yang aktif	%	39,29	39,29	42,86	46,43	50,00	53,57	57,14	Badan Kesbangpol
4	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat	%	100,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kesbangpol
5	Presentase konflik yang difasilitasi	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kesbangpol

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman pembangunan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah. Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJMD ini telah melalui proses perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra) perangkat daerah, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah selama periode lima tahun ke depan. Diharapkan implementasi RPJMD ini mampu mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara adil dan merata, sejalan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Komitmen, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh elemen pembangunan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen ini.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



Hj. DILLAH HIKMAH SARI, ST

LAMPIRAN

Kecamatan Rantau Rasau		
1.	Ruas Jalan Simp 4 Kantor Camat Rantau Rasau – Batas Nipah Panjang	Jalan Simpang 4 Kantor Camat - Batas. Kec. Nipah Panjang (15.07.083.00)
2.	Ruas Jalan SK 10 – SK 26 Patok 40	Jalan SK 4 Margamulya - Sk 28 Sungai Dusun (15.07.089.00)
3.	Jalan SK 27 Sungai Dusun - Rantau Jaya	Jalan SK 27 Sungai Dusun - Rantau Jaya (15.07.109.00)
Kecamatan Muara Sabak Timur		
1.	Ruas Jalan Simbur Naik – Simpang Lambur II (ruas jalan provinsi)	Desa Simpang/Berbak – Simp. Jembatan Muara Sabak (Ruas Provinsi P.0312)
2.	Ruas Jalan Menuju Desa Lambur Luar	Jalan Menuju Desa Lambur Luar (15.07.017.00)
3.	Jalan Asoi - Alang-Alang	Jalan Asoi - Alang-Alang (15.07.016.00)
Kecamatan Geragai		
1.	Jalan Simpang Blok D - Batas Kecamatan Mendahara	Jalan Simpang Blok D - Batas Kecamatan Mendahara (15.07.309.00)
2.	Jalan Simpang Blok D – Pandang Lagan	Jalan Poros Pandan Lagan Blok C - Pandan Jaya Blok D (15.07.287.00)
Kecamatan Berbak		
1.	Ruas Jalan Kel Simpang – Sungai Rambut	Jalan Batas Kel.Simpang - Desa Sei.Rambut (Parit 5) (15.07.322.00)
2.	Ruas Jalan Dusun Sei.Palas - Simpang Datuk	Jalan Dusun Sei.Palas - Simpang Datuk (15.07.323.00)
Kecamatan Nipah Panjang		
1.	Ruas Jalan Batas. Desa Sungai Jeruk - Batas. Simp. Datuk	Jalan Batas Desa Sungai Jeruk - Batas Simpang Datuk (15.07.045.00)
2.	Ruas Jalan Batas. Simp Jelita - Batas. Kec. Sadu	Jalan Batas Simpang Jelita - Batas. Kec. Sadu (15.07.047.00)
3.	Ruas Jalan Teluk Kijing - Batas Desa Kuala Simbur	Jalan Teluk Kijing - Kuala Simbur (15.07.026.00)
4.	Jalan Batas Sei.Jeruk - Sei.Lokan	Jalan Batas Sungai Jeruk - Sungai Lokan (15.07.131.00)
Kecamatan Sadu		
1.	Jalan Poros Sei.Lokan - Sei Jambat	Jalan Poros Sungai Lokan - Sungai Jambat (15.07.132.00)
2.	Jalan Poros Sei.Jambat - Sei.Sayang	Jalan Poros Sungai Jambat - Sungai Sayang (15.07.134.00)
3.	Ruas Jalan Poros Sei.Sayang - Bako Tuo	Jalan Poros Sungai Sayang - Bako Tuo (15.07.135.00)
4.	Ruas Jalan Poros Bako Tuo - Batas Air Hitam	Jalan Poros Bako Tuo - Batas Air Hitam (15.07.136.00)

Kecamatan Mendahara		
1.	Jalan Parit Selamat - Kuala Mendahara	Jalan Parit Selamat - Kuala Mendahara (15.07.059.00)
2.	Ruas Jalan Kampung Lama Desa Menteng - Parit 7 Desa Pangkal Duri	Jalan Kampung Lama Desa Menteng - Parit 7 Desa Pangkal Duri (15.07.081.00)
3.	Ruas Jalan Parit 7 - Parit 10 Desa Pangkal Duri (Batas)	Jalan Parit 7 - Parit 10 Desa Pangkal Duri (15.07.080.00)
4.	Ruas Jalan Sungai Tembikar – Sungai Tawar	
Kecamatan Dendang		
1.	Ruas Jalan Poros Desa Kota Kandis Dendang	Jalan Poros Kota Kandis Dendang (15.07.165.00)
2.	Ruas Jalan BBI - Rawasari Dendang	Jalan BBI - Rawasari Dendang (15.07.178.00)
3.	Jalan Koto Kandis – Trimulya	Jalan Koto Kandis – Trimulyo (15.07.166.00)me
Kecamatan Mendahara Ulu		
1.	Jalan Alternatif Desa Mencolok – Desa Simp.Tuan	

